PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT

GARUT HEBAT!



RENCANA PEMBANGUNAN **JANGKA MENENGAH DAERAH**

KABUPATEN GARUT

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 Nomor...);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan Kinerja.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang disusun berdasarkan RPJPD dan RTRW.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah serta dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a. penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif;

b. peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;

c. pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan;

d. percepatan penurunan tingkat kemiskinan;

e. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal;

f. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan;

g. mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana; dan

h. mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib, dan aman.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:

a. BAB I : pendahuluan;

b. BAB II : gambaran umum Daerah;

c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. BABV : penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT: (3/118/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi Daerah yang dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen tahunan dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Bupati paling sedikit juga memuat sasaran pokok RPJPD periode I Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyusunan RPJMD Tahun 2025- 2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu “Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 “Jabar Istimewa”, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.

Visi Daerah berupa “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” yang diterjemahkan kedalam Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi dengan mengacu pada rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan Tahun 2025-2030 dan telah dilakukan pembahasan secara teknokratik. Hasil rumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1. mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif;
2. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
3. mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4. memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5. mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;
6. mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;
7. mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana; dan

8. mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xi

BAB IPENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.1.1. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah I-1
1.1.2. Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ..... I-3
1.2. Dasar Hukum I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-9
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMN I-10
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat I-11
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJPD Kabupaten Garut I-11
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RTRW I-12
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan KLHS RPJMD I-12
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RKPD. I-13
1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) I-13
1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RIPJPID I-14
1.3.9. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Evaluasi RPJMD Kabupaten Garut Periode Sebelumnya I-14
1.3.10. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMD Daerah lain yang berbatasan I-15
1.3.11. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Dokumen Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya I-15
1.4. Maksud dan Tujuan I-15
1.5. Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-65
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II-99
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-123

2.1.5. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). II-207
2.1.6. Standar Pelayanan Minimal II-209
2.1.7. Kerjasama Daerah II-213
2.1.8. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... II-221
2.2. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik..... II-223
2.2.1. Proyeksi Demografi..... II-223
2.2.2. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi..... II-229
2.2.3. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana..... II-230
2.3. Gambaran Keuangan Daerah II-251
2.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD II-252
2.3.1.1. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah..... II-254
2.3.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah II-259
2.3.1.3. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah II-265
2.3.1.4. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Garut . II-266
2.3.2. Neraca Daerah II-267
2.3.3. Kinerja Pendanaan Non-APBD II-272
2.3.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) II-272
2.3.3.2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) II-272
2.3.3.3. Dana Umat..... II-274
2.3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-274
2.3.5. Proporsi Penggunaan Anggaran..... II-278
2.3.6. Proporsi Pembiayaan Daerah II-279
2.3.7. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030..... II-281
2.3.7.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... II-281
2.3.7.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah II-289
2.3.7.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... II-290
2.3.7.4. Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya..... II-291
2.4. Permasalahan Dan Isu Strategis..... II-294
2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-294
2.4.2. Isu Strategis..... II-304

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1. Visi dan Misi..... III-1
3.1.1. Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-1
3.1.2. Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-10
3.1.3. Misi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-202 ..... III-12
3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029..... III-15
3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III-22
3.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III-53

3.4.1. Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025-2030..... III-98
3.4.2. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah..... III-104
3.4.3. Kerangka Dukungan Regulasi..... III-106
3.4.4. Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi..... III-119
3.4.5. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD Provinsi..... III-127
3.5 Strategi Pencapaian Target Indikator Makro Kabupaten Garut..... III-137
3.6 Implementasi Reformasi Birokrasi..... III-156
3.7 Arah Pengembangan Riset dan Inovasi Kabupaten Garut .. III-162
3.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... III-162
3.8.1. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten..... III-162
3.8.2. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi..... III-174
3.8.3. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional..... III-174
3.9 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Garut III-180

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah..... IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV-107

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2024	II-4
Tabel 2.2.	Luas Wilayah menurut Topografi	II-5
Tabel 2.3.	Keadaan Iklim Kabupaten Garut menurut Bulan	II-8
Tabel 2.4.	Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut menurut Bulan	II-9
Tabel 2.5.	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut	II-10
Tabel 2.6.	Kawasan Hutan Kabupaten Garut	II-12
Tabel 2.7.	Potensi Mineral Logam Maupun Non Logam Kabupaten Garut	II-18
Tabel 2.8.	Upacara Adat	II-20
Tabel 2.9.	Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Garut Tingkat Nasional	II-23
Tabel 2.10.	Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Garut Tingkat Provinsi	II-23
Tabel 2.11.	Luas Daya Dukung Pangan di Kabuparen Garut Tahun 2023	II-26
Tabel 2.12.	Status Daya Dukung Air di Kabuparen Garut Tahun 2023	II-29
Tabel 2.13.	Jumlah Rumah Belum Berlistrik	II-34
Tabel 2.14.	Unit Air Baku Sistem Ibukota Kabupaten	II-38
Tabel 2.15.	Capaian Tiga Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.16.	Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan SPALD Tahun 2021-2024	II-42
Tabel 2.17.	Persentase Layanan Akses Sanitasi Tahun 2021- 2024	II-42
Tabel 2.18.	Capaian Tingkat Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2024	II-46
Tabel 2.19.	Emisi GRK Limbah Padat Domestik (BAU) dan Emisi GRK Limbah Cair Domestik (BAU) (dalam GgCO2eq)	II-48
Tabel 2.20.	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Garut Tahun 2021-2024	II-50
Tabel 2.21.	Klasifikasi Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	II-50
Tabel 2.22.	Kondisi Demografi Kabupaten Garut 2020-2024 (BPS)	II-60
Tabel 2.23.	Kondisi Demografi Kabupaten Garut 2020-2024 (SIAK)	II-60
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Garut Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.25.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Garut Tahun 2020-2024	II-65

Tabel 2.26.	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen Tahun 2024	II-80
Tabel 2.27.	Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Indeks Literasi dan Indeks Numerasi) Tahun 2021-2024	II-87
Tabel 2.28.	Persebaran Jumlah Keluarga dan Jumlah Penduduk Desil 1 per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2025	II-92
Tabel 2.29.	Jumlah UMKM Kabupaten Garut berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2024	II-104
Tabel 2.30.	Kondisi Jalan (Kabupaten dan Desa) Tahun 2024	II-112
Tabel 2.31.	Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan	II-126
Tabel 2.32.	Perbandingan Capaian 12 (Dua Belas) Pilar Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Garut Tahun 2023-2024	II-131
Tabel 2.33.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.34.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.35.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.36.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.37.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.38.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.39.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.40.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.41.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.42.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.43.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.44.	Capaian Komponen Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2021-2024	II-159
Tabel 2.45.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.46.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	II-163

Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.48. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel 2.49. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.51. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2.52. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-175
Tabel 2.53. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Statistik Tahun 2020-2024 ..... II-176
Tabel 2.54. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel 2.55. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..... II-178
Tabel 2.56. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-180
Tabel 2.57. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2.58. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II-184
Tabel 2.60. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 ..... II-186
Tabel 2.61. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 ..... II-188
Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.63. Capaian Indikator Kinerja Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.64. Capaian Indikator Kinerja Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.65. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2.66. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.67. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024..... II-200
Tabel 2.68. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ..... II-201
Tabel 2.69. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2024 ..... II-203

Tabel 2.70.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024	II-205
Tabel 2.71.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024	II-206
Tabel 2.72.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Garut	II-208
Tabel 2.73.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Garut berdasarkan Pilar	II-209
Tabel 2.74.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.75.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024	II-210
Tabel 2.76.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024	II-211
Tabel 2.77.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	II-212
Tabel 2.78.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020-2024	II-212
Tabel 2.79.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2020-2024	II-213
Tabel 2.80.	Rekapitulasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Garut	II-215
Tabel 2.81.	Penyertaan Modal dan Dividen Tahun 2020-2024	II-222
Tabel 2.82.	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2025-2030	II-223
Tabel 2.83.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030	II-224
Tabel 2.84.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030	II-224
Tabel 2.85.	Proyeksi Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2030	II-228
Tabel 2.86.	Proyeksi Dependency Ratio dan Bonus Demografi Kabupaten Garut Tahun 2025-2030	II-229
Tabel 2.87.	*Backlog* Kabupaten Garut Tahun 2023-2030	II-230
Tabel 2.88.	Proyeksi Pengurangan Kawasan Kumuh 2025-2030	II-231
Tabel 2.89.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Garut Tahun 2025-2030	II-232
Tabel 2.90.	Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan	II-233
Tabel 2.91.	Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Sistem Perdesaan	II-233
Tabel 2.92.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2030	II-236
Tabel 2.93.	Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik 2025-2030	II-237
Tabel 2.94.	Proyeksi Pelayanan dan Penanganan Air Limbah Domestik 2025-2030	II-238

Tabel 2.95. Proyeksi Pelayanan dan Penanganan Air Limbah Domestik 2025- 2030 ..... II-239
Tabel 2.96. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Garut Tahun 2025 dan 2030 ..... II-240
Tabel 2.97. Jumlah Rumah Belum Berlistrik II-240
Tabel 2.98. Proyeksi Jalan dan Jembatan 2025-2030 ..... II-242
Tabel 2.99. Proyeksi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) II-243
Tabel 2.100. Reaktivasi Jalur Kereta Api II-244
Tabel 2.101. Parameter Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut II-244
Tabel 2.102. Rencana Pengurangan Sampah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Garut II-245
Tabel 2.103. Rencana Penanganan Sampah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Garut II-246
Tabel 2.104. Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Garut II-249
Tabel 2.105. Proyeksi Kebutuhan Bed dan Rumah Sakit di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-249
Tabel 2.106. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-250
Tabel 2.107. Proyeksi Ruang Kelas di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-250
Tabel 2.108. Perbandingan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ..... II-252
Tabel 2.109. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-254
Tabel 2.110. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-255
Tabel 2.111. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024 ..... II-256
Tabel 2.112. Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-257
Tabel 2.113. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-258
Tabel 2.114. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-259
Tabel 2.115. Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-260
Tabel 2.116. Proporsi Jenis Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-262
Tabel 2.117. Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-263
Tabel 2.118. Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-265
Tabel 2.119. Neraca Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-268
Tabel 2.120. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-271

Tabel 2.121. Realisasi CSR di Kabupaten Garut tahun 2021- 2024 ..... II-273
Tabel 2.122. Realisasi Penyaluran Dana BAZNAS 2024 ..... II-274
Tabel 2.123. Ketentuan *Mandatory Spending* II-276
Tabel 2.124. Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-279
Tabel 2.125. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ... II-279
Tabel 2.126. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-280
Tabel 2.127. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-280
Tabel 2.128. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-287
Tabel 2.129. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-289
Tabel 2.130. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah II-290
Tabel 2.131. Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah II-311
Tabel 3.1. Sasaran Visi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-11
Tabel 3.2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-18
Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-23
Tabel 3.4. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-35
Tabel 3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-54
Tabel 3.6. Keselarasan Program Prioritas dengan 8 Agenda Transformasi Garut Hebat serta 9 Lengkah Provinsi Jawa Barat III-95
Tabel 3.7. Proyek/Kegiatan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... III-98
Tabel 3.8. Kerangka Dukungan Regulasi dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah III-107
Tabel 3.9. Dukungan Daerah Terhadap Indikasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut III-123
Tabel 3.10. Dukungan Daerah terhadap Program/Proyek Strategis Provinsi Bidang Infrastruktur Tahun 2025-2029 ..... III-127
Tabel 3.11. Dukungan Daerah terhadap Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 Di Kabupaten Garut III-129
Tabel 3.12. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kabupaten Garut untuk Strategi Pertumbuhan Ekonomi III-140
Tabel 3.13. Target Penurunan Tingkat Persentase Penduduk Miskin dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2025-2030 ..... III-154

Tabel 3.14.	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	III-164
Tabel 3.15.	Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKL, PPK dan PPL sesuai amanat RTRW.....	III-167
Tabel 3.16.	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut	III-171
Tabel 3.17.	Lokasi yang Ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat	III-174
Tabel 3.18.	Kebijakan Pengembangan WP Priangan Timur dan Pangandaran	III-175
Tabel 3.19.	Daftar Program/Proyek Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	III-178
Tabel 4.1.	Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030.....	IV-3
Tabel 4.2.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029.....	IV-92
Tabel 4.3.	Dukungan Program Daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).....	IV-96
Tabel 4.4.	Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030	IV-109
Tabel 4.5.	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Garut Tahun 2025-2030.....	IV-110
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Daerah.....	IV-113

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... I-5
Gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-10
Gambar 2.1. Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut II-2
Gambar 2.2. Kondisi Geografi Daerah dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya II-3
Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Garut II-4
Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Garut II-6
Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Garut II-7
Gambar 2.6. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut II-8
Gambar 2.7. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut II-10
Gambar 2.8. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II-13
Gambar 2.9. Sebaran Komoditas Unggulan Pertanian II-14
Gambar 2.10. Sebaran Komoditas Unggulan Perikanan II-15
Gambar 2.11. Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-16
Gambar 2.12. Sebaran Komoditas Unggulan Peternakan II-17
Gambar 2.13. Data Kunjungan Wisata dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II-19
Gambar 2.14. Indeks Kreatif Kabupaten Garut II-24
Gambar 2.15. Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut II-27
Gambar 2.16. Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Garut II-28
Gambar 2.17. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Garut II-28
Gambar 2.18. Peta Kebutuhan Air Kabupaten Garut II-30
Gambar 2.19. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Garut II-31
Gambar 2.20. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Garut II-32
Gambar 2.21. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 ..... II-32
Gambar 2.22. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Tahun 2020-2024 ..... II-33
Gambar 2.23. Grafik Persentase Layanan Akses Air Minum di Kabupaten Garut II-36
Gambar 2.24. Persentase Cakupan Air Minum Per Kecamatan II-37
Gambar 2.25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ..... II-39
Gambar 2.26. Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dengan Capaian Provinsi II-41
Gambar 2.27. Persentase Cakupan Air Limbah Domestik Per Kecamatan II-43

Gambar 2.28. Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan II-45
Gambar 2.29. Peta Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Iklim di Kabupaten Garut II-52
Gambar 2.30 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Garut ... II-53
Gambar 2.31. Infromasi Kejadian Bencana Tahun 2024..... II-54
Gambar 2.32. Indeks Resiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Garut II-55
Gambar 2.33. Peta Resiko Bencana Longsor II-55
Gambar 2.34. Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Garut II-56
Gambar 2.35. Peta Resiko Banjir di Kabupaten Garut..... II-57
Gambar 2.36. Peta Resiko Banjir Bandang di Kabupaten Garut II-57
Gambar 2.37. Peta Potensi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Garut II-58
Gambar 2.38. Indeks Kerentanan Provinsi Jawa Barat..... II-59
Gambar 2.39. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 (Ribu Jiwa)..... II-61
Gambar 2.40. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) dan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.41. Perbandingan Piramida Penduduk Tahun 2020 dan Tahun 2024 ..... II-64
Gambar 2.42. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar 2.43. Kuadran Perbandingan Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024..... II-67
Gambar 2.44. Kuadran Perbandingan Kategorasisi Pertumbuhan LPE Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024..... II-68
Gambar 2.45. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut menurut Produksi per Kategori Tahun 2024..... II-69
Gambar 2.46. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut menurut Permintaan per Komponen Pengeluaran Tahun 2024 ..... II-70
Gambar 2.47. Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut Tahun 2024 ..... II-71
Gambar 2.48. Tipologi Klassen PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar 2.49. Hasil Analisis *Shift Share* PDRB Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.50. PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.51. Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2020-2024..... II-74
Gambar 2.52. Kuadran Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-75

Gambar 2.53. Garis Tren dan Kategorisasi Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024..... II-76
Gambar 2.54. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-77
Gambar 2.55. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%) Tahun 2020-2024..... II-78
Gambar 2.56. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-79
Gambar 2.57. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-80
Gambar 2.58. Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020-2024 ..... II-81
Gambar 2.59. Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar 2.60. Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024..... II-83
Gambar 2.61. Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024..... II-83
Gambar 2.62. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB serta Angka Keberhasilan Pengobatan TB Tahun 2020-2024..... II-84
Gambar 2.63. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupatan Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasioanal Tahun 2020-2024..... II-85
Gambar 2.64. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasioanal Tahun 2020-2024..... II-86
Gambar 2.65. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024..... II-88
Gambar 2.66. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-89
Gambar 2.67. Garis Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024..... II-90
Gambar 2.68. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Basis Data Tunggal dan Sumber Data Utama..... II-91
Gambar 2.69. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021-2023 ..... II-95
Gambar 2.70. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024 ..... II-96
Gambar 2.71. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024 ..... II-97
Gambar 2.72. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024 ..... II-98
Gambar 2.73. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2020-2024..... II-98
Gambar 2.74. Angka Ketergantungan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024..... II-99
Gambar 2.75. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-100
Gambar 2.76. Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024..... II-101
Gambar 2.77. Sebaran Potensi Industri di Kabupaten Garut II-102

Gambar 2.78. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024 ..... II-103
Gambar 2.79. Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024..... II-103
Gambar 2.80. Pelaku Usaha berdasarkan Jenis Usaha Kabupaten Garut Tahun 2023-2024 ..... II-106
Gambar 2.81. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Garut..... II-106
Gambar 2.82. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024..... II-107
Gambar 2.83. Kontribusi PDRB Kabupaten Garut terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-108
Gambar 2.84. Persentase Penduduk di atas 5 Tahun ke atas yang menggunakan Internet dalam 3 bulan terakhir Tahun 2020-2023..... II-110
Gambar 2.85. Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024 ..... II-111
Gambar 2.86. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024 ..... II-113
Gambar 2.87. Peta Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024..... II-113
Gambar 2.88. Persentase Luas Areal Irigasi Kewenangan Kabupaten Terlayani Air Tahun 2020-2024 ..... II-114
Gambar 2.89. Persentase Layanan Areal Per Daerah Irigasi Tahun 2024 ..... II-115
Gambar 2.90. Persentase Cakupan Air Minum Per Kecamatan..... II-117
Gambar 2.91. Persentase Cakupan Air Limbah Domestik Per Kecamatan..... II-118
Gambar 2.92. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Garut Tahun 2024 ..... II-119
Gambar 2.93. Persentase Desa Mandiri Tahun 2020-2024 ..... II-120
Gambar 2.94. Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024..... II-121
Gambar 2.95. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-122
Gambar 2.96. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 ..... II-123
Gambar 2.97. Capaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022-2024 ..... II-124
Gambar 2.98. Capaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024 ..... II-124
Gambar 2.99. Capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024..... II-125
Gambar2.100. Capaian Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024..... II-125
Gambar 2.101. Efektivitas Kerjasama Daerah Tahun 2020-2024..... II-127
Gambar 2.102. Kerangka IDSD Tahun 2024..... II-129
Gambar 2.103. Skor IDSD Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024 ..... II-129
Gambar 2.104. Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-226

Gambar 2.105. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-226
Gambar 2.106. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 ..... II-227
Gambar 2.107. Proyeksi Kemantapan Jalan Tahun 2025-2030..... II-243
Gambar 2.108. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-254
Gambar 2.109. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024 ..... II-256
Gambar 2.110. Rata-rata Kontribusi Sumber Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024..... II-257
Gambar 2.111. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024.... II-259
Gambar 2.112. Rata-rata Kontribusi Sumber Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024..... II-262
Gambar 2.113. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-267
Gambar 3.1. 8 (Delapan) Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional III-2
Gambar 3.2. Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029..... III-5
Gambar 3.3. Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029..... III-6
Gambar 3.4. Tema dan Tahapan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 ..... III-9
Gambar 3.5. Visi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-11
Gambar 3.6. 8 (Delapan) Misi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029..... III-12
Gambar 3.7. Konstruksi Visi Misi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ..... III-13
Gambar 3.8. Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita) dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ... III-14
Gambar 3.9. Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-35
Gambar 3.10. Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) III-120
Gambar 3.11. Keterkaitan antar Indikator Makro..... III-137
Gambar 3.12. Analisis SWOT Kabupaten Garut III-138
Gambar 3.13. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi III-144
Gambar 3.14. Langkah Konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah III-145
Gambar 3.15. Tahapan Graduasi Penduduk: Dari Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi menuju Kemandirian III-156
Gambar 3.16. Rancangan Struktur Ruang..... III-170
Gambar 3.17. Rancangan Wilayah Pengembangan (WP) III-170

Gambar 3.18. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 ..... III-173
Gambar 3.19. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025 ..... III-173
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program Perangkat Daerah IV-1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 mengamanatkan bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk periode Tahun 2025-2030, dan pada tanggal 9 Januari 2025 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Garut Tahun 2024, telah ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Garut Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU dan drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Garut Periode Tahun 2025-2030. Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bertempat di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng. dan drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut masa jabatan Tahun 2025-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam pelantikan serentak sebanyak 961 kepala daerah masa jabatan Tahun 2025-2030 dari 481 daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung mulai tanggal pelantikan 20 Februari 2025, pelaksanaan salah satu tugas sebagai kepala daerah untuk menyusun RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 telah dimulai dan harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan. Kebijakan penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 merupakan turunan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 dan telah memastikan kesesuaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menyelaraskan berbagai kebijakan Nasional yang telah diakomodir dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Kabupaten Garut 2025-2045 yaitu “Unggul, Maju dan Berkelanjutan”, sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu “Jabar Istimewa”, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

1.1.2 Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan pula menggunakan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu :

1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

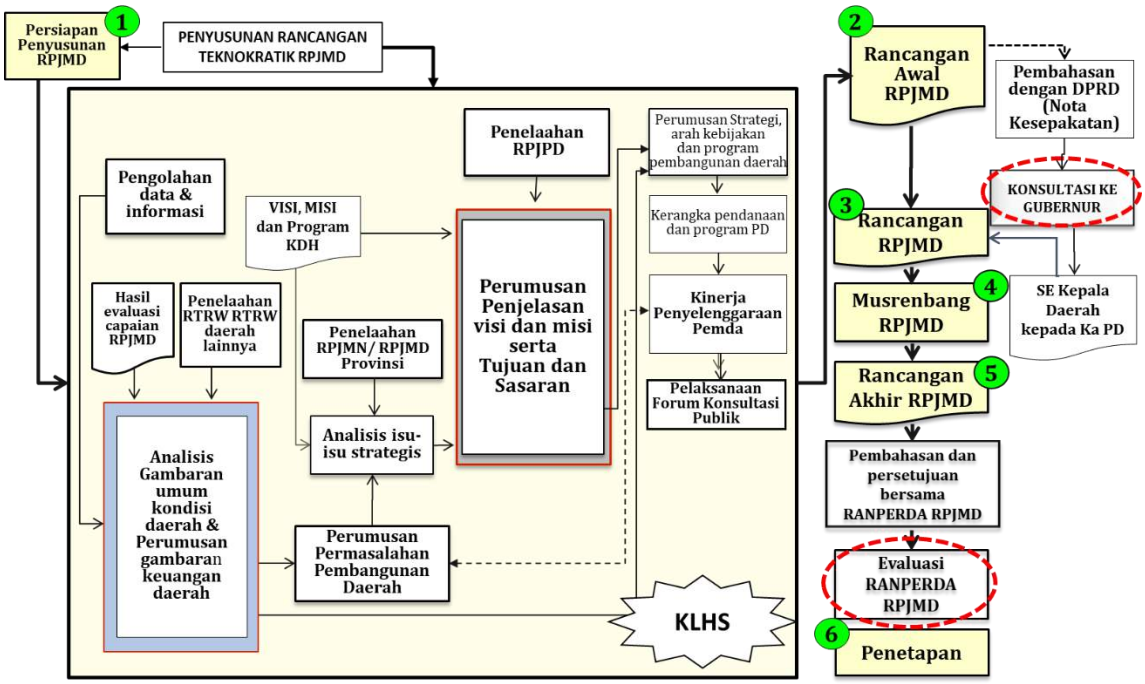
Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 juga menggunakan pendekatan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilar yakni berpikir kedepan (*thinking ahead*) berpikir kembali (*thinking again*) dan berpikir melintasi batas (*thinking across*).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), berdasarkan ketentuan pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Tahapan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029
b. Pembahasan visi dan misi secara teknokratik
c. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
e. Pengajuan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD
f. Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD
g. Konsultasi Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029
h. Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah dan Penyusunan Rancangan Renstra PD
i. Forum PD/Lintas PD
j. Verifikasi Rancangan Renstra PD
k. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029
l. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029
m. Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD Tahun 2025-2029
n. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029
o. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD
p. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
q. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029
r. Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029



Gambar 1.1 Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis dan politis, yaitu:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD))
3. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
5. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6980);
8. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran

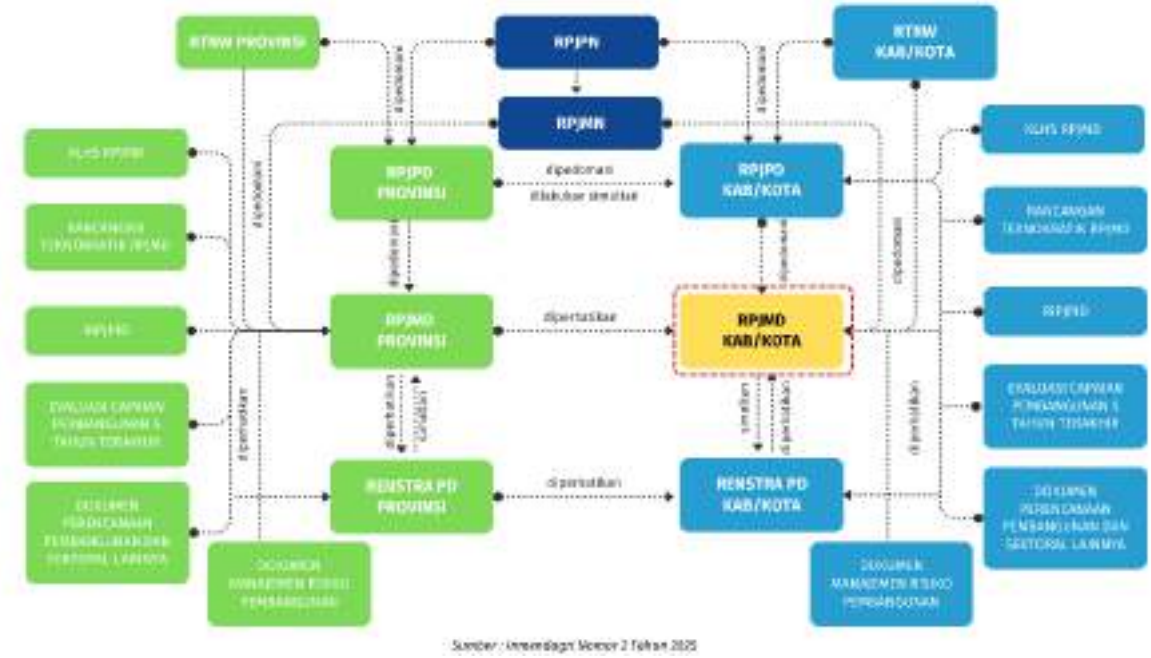
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 memiliki hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya mewujudkan sinkronisasi, integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi kebijakan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi.



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Bentuk hubungan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya disajikan sebagaimana pada Gambar 1.2.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara khusus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Garut.

Penyelarasan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita,

dengan mempertimbangkan kewenangan, kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

1) Periodisasi;
2) Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;
3) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029;
4) Indikator makro RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam arah pembangunan kewilayahan pada Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029;
5) Program perangkat daerah mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas utama pada Lampiran I RPJMN Tahun 2025-2029.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Untuk menciptakan pembangunan yang terkoordinasi dan saling mendukung serta menjamin kesinambungan pembangunan antarwilayah dan antarlevel pemerintahan, maka sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJPD Kabupaten Garut

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 sebagai penjabaran rencana pembangunan lima tahun pertama dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 yang merupakan periode pembentukan fondasi dalam rangka mencapai visi jangka panjang Kabupaten Garut Tahun 2045 yaitu Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka panjang (RPJPD), maka dilakukan

penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah periode lima tahunan pertama dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berpedoman kepada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk memastikan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan terpadu. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan RTRW merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan daerah agar program pembangunan sejalan dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Adanya kesesuaian antara RPJMD dan RTRW akan mempermudah proses perizinan dan mendorong investasi yang berkelanjutan.

Perencanaan kewilayahan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam RTRW baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, maupun RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 melalui penyelarasan dan pengintegrasian antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan KLHS RPJMD

Untuk memastikan bahwa pembangunan daerah yang direncanakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan risiko ekologis di masa depan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam operasional perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD, melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah berikutnya pada periode 2030-2034. Pelaksanaan operasional tahunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan melalui RKPD yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan terarah dan terukur, maka RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD

Kabupaten Garut Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID)

Dalam upaya memperkuat ekosistem inovasi di tingkat daerah dan sebagai landasan kebijakan berbasis bukti untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, maka disusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

RIPJPID Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 sebagai dokumen strategis yang berfungsi menjadi pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan Iptek di daerah yang memuat identifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat inovasi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

RIPJPID Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah (RARID) sebagai rencana aksi tahunan yang memuat program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

1.3.9. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Evaluasi RPJMD Kabupaten Garut Periode Sebelumnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 memperhatikan hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan menganalisa kondisi capaian kinerja pembangunan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja periode 2020-2024 tersebut menjadi salah satu acuan dan

pertimbangan dalam merumuskan sasaran dan arah kebijakan serta kesesuaian rasionalitas penetapan target indikator pembangunan pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029.

1.3.10. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan RPJMD Daerah lain yang berbatasan

Untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan lintas wilayah, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan pengelolaan isu-isu strategis bersama dalam rangka penyelesaian persoalan pembangunan bersifat lintas batas, pembangunan terintegrasi antarwilayah lebih efektif dan efisien, serta mendukung pengembangan kawasan strategis bersama, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yang berbatasan, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya yang berbatasan.

1.3.11. Hubungan RPJMD Kabupaten Garut dengan Dokumen Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi maupun daerah lainnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan sektoral maupun spasial yang relevan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang holistik.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut periode masa jabatan 2025-2030 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke

depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kabupaten Garut selama kurun waktu 2025-2029;
3. Mendukung upaya kolaborasi pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) bagi Pemerintah Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
8. Menjadi alat atau instrumen pengendalian bagi aparat Satuan Pengawas Internal (SPI) dan instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja daerah selama 5 tahun.
9. Pedoman penilaian keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah

dan aspek pelayanan umum, serta tambahan kondisi daerah mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut, dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah. Bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Memuat program Perangkat Daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

Bab V Penutup
Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1) Peran Strategis Kabupaten Garut

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung dan sekitar 216 km dari Jakarta yang direncanakan akan menjadi kota global dunia dan sebagai pusat bisnis serta ekonomi nasional. Meskipun tidak langsung berbatasan, letak geografis yang berdekatan dengan Kota Bandung menjadikan Kabupaten Garut memiliki peran penting dalam beberapa aspek sebagai berikut:

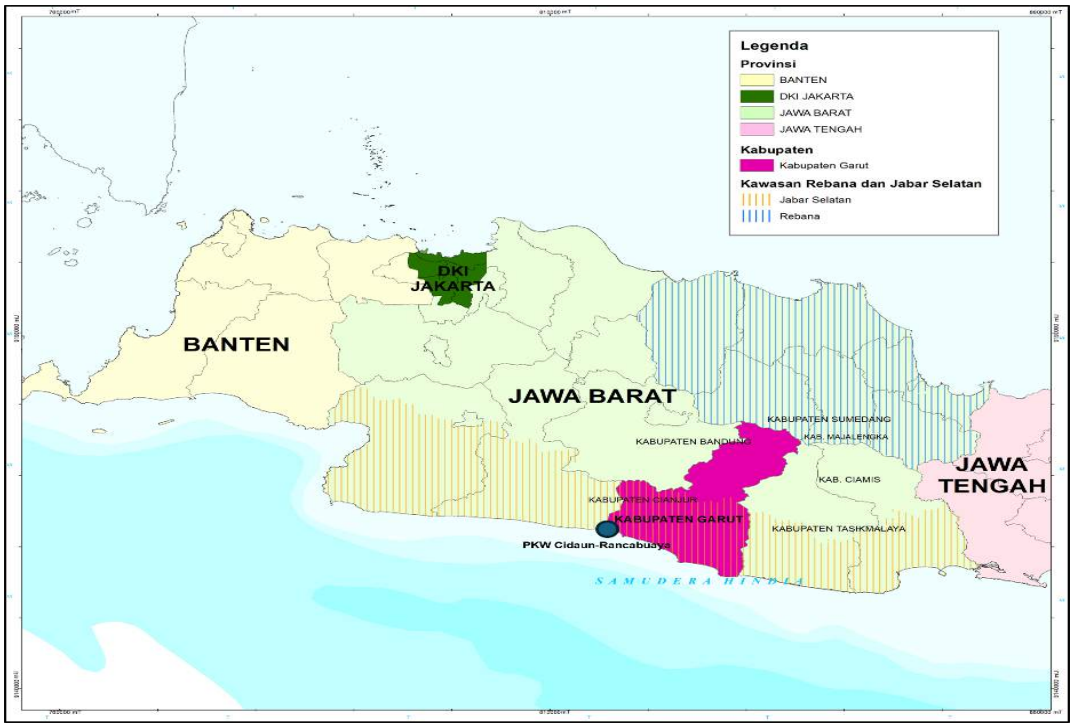
1. Jaringan jalan nasional dan provinsi yang melintasi Kabupaten Garut merupakan simpul penting dalam konektivitas antara Kota Bandung dengan wilayah Priangan Timur dan bagian selatan Jawa Barat serta merupakan akses alternatif menuju Jawa Tengah. Peran ini mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk secara lebih efisien.
2. Menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem dengan adanya kawasan lindung dan daerah resapan air.
3. Pemasok atau *supplier* komoditas pertanian, hortikultura dan perkebunan serta peternakan dan perikanan untuk mendukung kebutuhan pangan di wilayah Bandung Raya.
4. Lokasi alternatif pengembangan kawasan industri dan pusat produksi berbasis sumberdaya lokal khususnya agroindustri dan industri kreatif yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok bagi Kota Bandung. Dalam hal ini, Kabupaten Garut juga berperan sebagai penyedia tenaga kerja.
5. Dengan kekayaan potensi alam, budaya dan kuliner, Kabupaten Garut menjadi pelengkap atau alternatif destinasi wisata.

Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Dalam perspektif pengembangan wilayah nasional, Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan. Konsep yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian

Selatan adalah konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yaitu agribisnis, perikanan dan pariwisata. Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan, diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan.

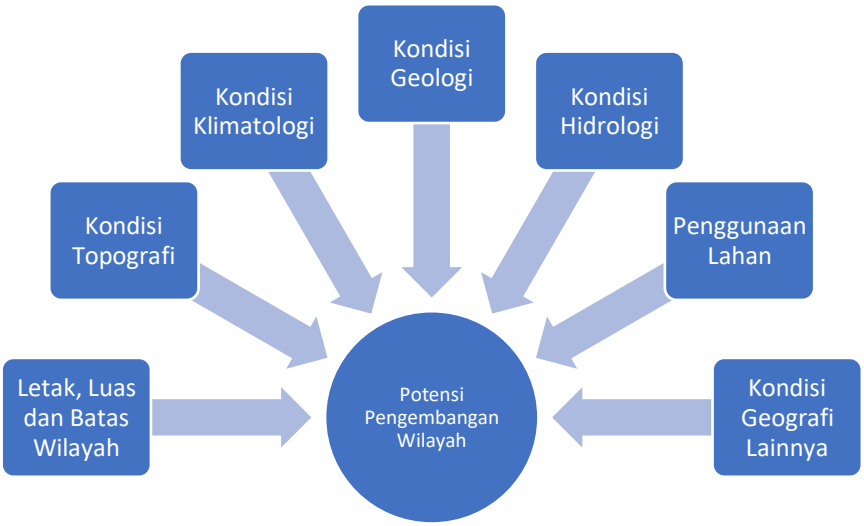
Kemudian, dalam perspektif pengembangan wilayah provinsi, Kabupaten Garut merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat yaitu PKW Cidaun-Rancabuaya yang diarahkan sebagai destinasi wisata pada pusat pertumbuhan kelautan. Selain itu, Kabupaten Garut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pelabuhan perikanan.



Sumber : Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031, diolah BAPPEDA (2025)

Gambar 2.1 Kondisi Strategis Wilayah Kabupaten Garut

Terdapat hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, yang diilustrasikan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



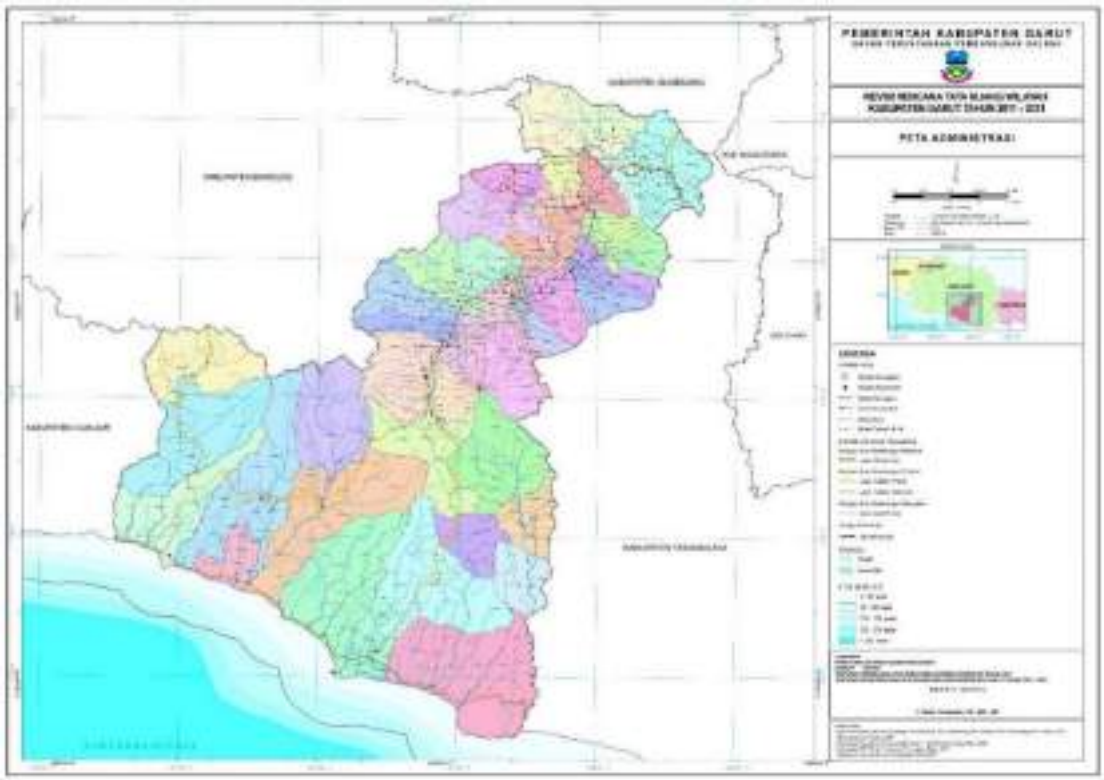
Gambar 2.2 Kondisi Geografi Daerah dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

2) Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km^2 (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Ibu kota Kabupaten Garut berada pada Ketinggian 717 m diatas permukaan laut (dpl) dikelilingi oleh beberapa gunung yakni Gunung Karacak (1.883 m), Gunung Cikuray (2.821 m), Gunung Papandayan (2.622 m) dan Gunung Guntur (2.249 m).

Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kabupaten Garut

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1	Cisewu	-	9	77	281
2	Caringin	-	6	60	240
3	Talegong	-	7	61	257
4	Bungbulang	-	13	147	485
5	Mekarmukti	-	5	52	168
6	Pamulihan	-	5	43	148
7	Pakenjeng	-	13	126	519
8	Cikelet	-	11	109	386
9	Pameungpeuk	-	8	103	312
10	Cibalong	-	11	102	344
11	Cisompet	-	11	124	424
12	Peundeuy	-	6	63	207
13	Singajaya	-	9	76	309
14	Cihurip	-	4	34	135
15	Cikajang	-	12	113	514
16	Banjarwangi	-	11	81	382
17	Cilawu	-	18	195	724
18	Bayongbong	-	18	157	579
19	Cigedug	-	5	67	236
20	Cisurupan	-	17	141	811
21	Sukaresmi	-	7	47	251

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
22	Samarang	-	13	120	425
23	Pasirwangi	-	12	106	396
24	Tarogong Kidul	5	7	166	676
25	Tarogong Kaler	1	12	184	521
26	Garut Kota	11	-	221	966
27	Karangpawitan	4	16	241	786
28	Wanaraja	-	9	85	290
29	Sucinaraja	-	7	63	206
30	Pangatikan	-	8	83	266
31	Sukawening	-	11	113	366
32	Karangtengah	-	4	36	136
33	Banyuresmi	-	15	181	544
34	Leles	-	12	142	434
35	Leuwigoong	-	8	105	281
36	Cibatu	-	11	138	437
37	Kersamanah	-	6	55	218
38	Cibiuk	-	5	58	176
39	Kadungora	-	14	173	591
40	Balubur Limbangan	-	14	164	474
41	Selaawi	-	7	63	219
42	Malangbong	-	24	157	685
Jumlah		21	421	4.632	16.805

Sumber: DPMD Kabupaten Garut, Februari Tahun 2024 yang dikelola dalam SIPD

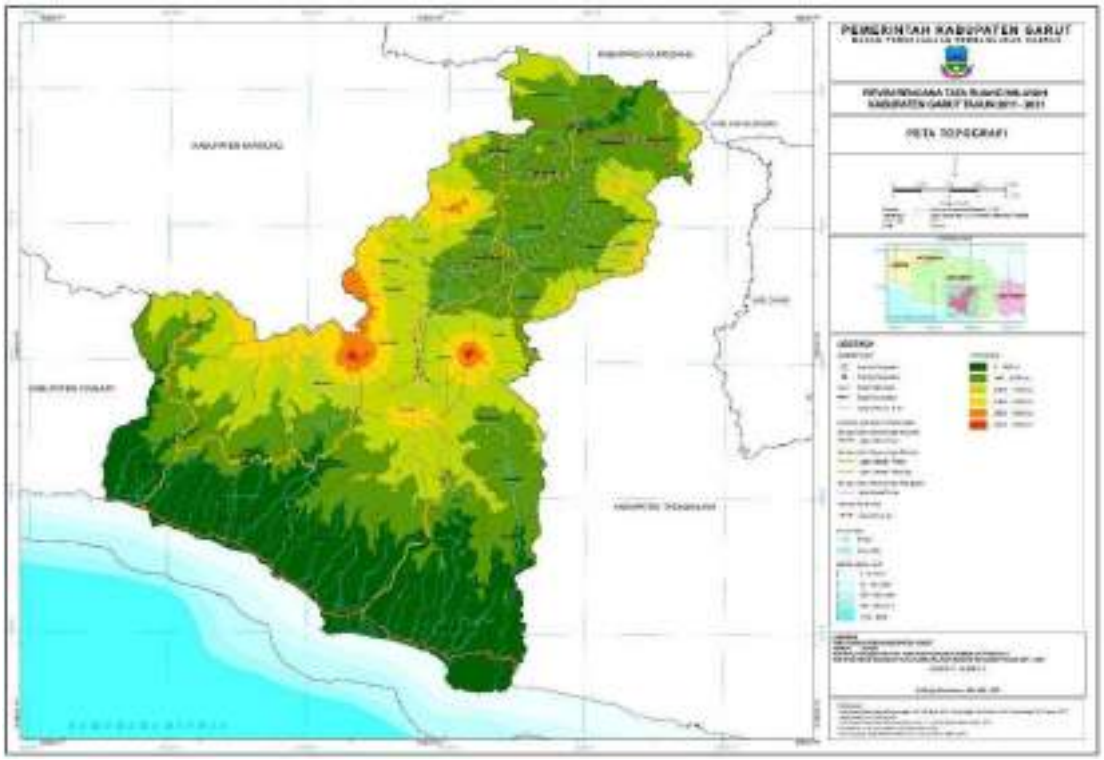
3) Kondisi Topografi

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam. Daerah sebelah utara, timur dan barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan sedangkan daerah sebelah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Ditinjau dari kemiringan lahan, luas wilayah yang memiliki kemiringan antara lain dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut Topografi

No.	Kemiringan (derajat°)	Luas (Ha)	Rasio terhadap Luas Wilayah (%)	Karakteristik
1.	0-2	32.229	10,51	Wilayah dataran tinggi berbukit dan pegunungan di bagian utara, timur dan barat
2.	2-15	38.097	12,43	
3.	15-40	110.326	35,99	Wilayah selatan sebagian besar memiliki kemiringan yang cukup curam
4.	>40	125.867	41,06%	

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.4 Peta Topografi Kabupaten Garut

Sementara untuk wilayah perairan laut Kabupaten Garut memiliki wilayah perairan laut di bagian selatan. Topografi pantai selatan Garut memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik pantai selatan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang cenderung curam. Pantai selatan Kabupaten Garut berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sehingga arus dan gelombang pantai selatan cenderung lebih besar. Berdasarkan Peta Laut Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) batimetri pantai selatan mencapai kedalaman maksimal 1.800 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai.

4) Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Garut, secara fisiografi termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung dengan bentang alam yang dibagi empat satuan morfologi yaitu kerucut gunung api, perbukitan dengan relief kasar, perbukitan dengan relief halus dan pedataran. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. Jenis tanahnya secara garis besar meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi andosol, asosiasi litosol, asosiasi mediteran, asosiasi podsolik, dan asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian paling luas dijumpai di wilayah Kabupaten Garut, terutama di bagian selatan, sedangkan bagian utara didominasi oleh jenis tanah andosol.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Garut

5) Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Garut terdapat 33 buah sungai dengan 101 buah anak sungainya dengan panjang seluruhnya 1.397,34 km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah Aliran Utara merupakan DAS Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Daerah Aliran Selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah Aliran Selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan Daerah Aliran Utara. Mata air tanah yang terdapat di Kabupaten Garut berjumlah 12 titik utama lokasi mata air. Debit mata air terbesar terletak di lokasi mata air Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong yaitu sebesar 700 liter per detik.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.6 Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut

6) Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan elevasi topografi di Bandung.

Variasi temperatur bulanan berkisar antara 16,1°C-34,5°C, adapun kelembaban udara berkisar antara 33% hingga 98%. Kecepatan angin berada pada kisaran 0,1 knot dan maksimal pada 3,1 knot dengan tekanan udara rata-rata bulanan berkisar pada 922,8 sampai 925,4 mb. Keadaan iklim Kabupaten Garut pada tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Keadaan Iklim Kabupaten Garut menurut Bulan

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	17,9	24,3	32	50	76	97	0,1	1,1	3,1	922,7	924,7	927,5
Februari	19,1	24,1	31,6	49	81	96	1,1	1,1	3,1	922,6	925,4	927
Maret	19,1	24,1	32,6	41	80	97	0,1	1,1	3,1	922	924,4	926,7
April	20,2	25,1	32	49	81	93	0,1	0,1	2,1	921,3	923,4	925,5

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Mei	19,1	25,1	32,4	43	75	93	0,1	0,1	2,1	922,2	923,9	925,5
Juni	18,1	24,1	31,8	36	77	95	0,1	0,1	2,1	923	925	927
Juli	16,2	23,1	32,8	41	73	98	0,1	0,1	2,1	922,5	924,9	928,1
Agustus	17,1	24,1	33,6	34	69	95	0,1	1,1	3,1	922	924,8	926,8
September	16,1	24,1	33,1	33	72	96	0,1	1,1	3,1	923	924,7	926,6
Oktober	18,2	25,1	34,5	36	73	91	0,1	1,1	3,1	923,5	925,1	926,7
November	19,1	23,1	30,4	58	87	98	0,1	1,1	3,1	921,7	923,5	921,5
Desember	20,1	24,1	32,8	54	82	98	0,1	1,1	3,1	920,8	922,8	925,5

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024

Curah hujan bulanan berkisar antara 30 mm/bulan - 335 mm/bulan dengan rata-rata lama penyinaran matahari berada pada kisaran 27,2% sampai 78,3%.

Tabel 2.4 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut menurut Bulan

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Rata-rata Penyinaran Matahari (%)
Januari	335	24	43,7
Februari	264	24	27,2
Maret	272	27	49,8
April	215	25	56,6
Mei	71	10	69,2
Juni	156	15	67,2
Juli	30	7	77,8
Agustus	53	4	72,8
September	15,5	13	69,9
Oktober	81	11	78,3
November	512	26	39,4
Desember	90	26	341,4

Sumber : BPS Kabupaten Garut Tahun 2024

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.7 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut

7) Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dari total luas wilayah 310.705,29 Ha, sebagian besar berupa hutan sebesar 23,71%, disusul dengan kebun/perkebunan 17,94%, tanah ladang 16,96%, semak belukar 15,14%, sawah tadah hujan 12,89%, area pemukiman 6,25%, sawah irigasi 5,63%, dan sisanya berupa padang rumput, air sungai, tanggul pasir, danau/situ, bangunan, kolam ikan, hutan bakau, empang/tambak, pasir darat, dan mata air.

Tabel 2.5 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Garut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Air Sungai	1.592,39	0,51%
2	Area Pemukiman	19.408,17	6,25%
3	Bangunan	82,83	0,03%
4	Danau/Situ	211,12	0,07%
5	Empang/Tambak	30,56	0,01%
6	Hutan	73.657,21	23,71%
7	Hutan Bakau	31,83	0,01%
8	Kebun/Perkebunan	55.752,67	17,94%
9	Kolam Ikan	35,69	0,01%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
10	Mata Air	2,58	0,00%
11	Padang Rumput	2.351,96	0,76%
12	Pasir Darat	5,27	0,00%
13	Sawah Irigasi	17.492,23	5,63%
14	Sawah Tadah Hujan	40.065,42	12,89%
15	Semak Belukar	47.030,36	15,14%
16	Tanah Ladang	52.681,37	16,96%
17	Tanggul Pasir	273,63	0,09%
	Jumlah	310.705,29	100,00%

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

B. Potensi Sumber Daya Alam

1) Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.

Secara umum pola tata guna lahan di Kabupaten Garut adalah di dataran tinggi. Tataguna lahan lebih banyak ditumbuhi dengan tanaman keras dan permanen, sawah yang berseling dengan kebun campuran mendominasi dataran rendah.

a. Hutan Primer

Hutan primer adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya. Dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang baik. Hutan primer berisi kelompok tumbuhan alami dengan tegakan pohon rapat, berseling dengan batang-batang pohon mati yang masih tegak, alamiah belum terjamah manusia (penebangan). Hutan primer di daerah Garut hanya terdapat diantaranya di Gunung Cikuray.

b. Hutan Sekunder

Hutan sekunder adalah hutan generasi kedua, yaitu hutan yang terdiri dari jenis tumbuhan yang alami yang tumbuh dalam bekas lahan hutan primer karena bukaan akibat penebangan. Jenis tumbuhan tersebut antara lain semak belukar, paku pakuan dan tumbuhan lain. Tergolong dalam hutan sekunder juga adalah campuran antara sisa-sisa hutan primer dan tumbuhan lain yang terlalu kecil untuk

dipisahkan atau hutan primer yang telah mengalami penurunan kualitas akibat adanya intervensi manusia dan mengalami kerusakan ekologis yang cukup berat. Hutan sekunder lebih mudah beralih fungsi menjadi ladang, sawah dan pemukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Kawasan Hutan ditetapkan fungsi nya menjadi:

a. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi terdiri atas: 1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas: a) cagar alam; dan b) suaka margasatwa; 2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas: a) taman nasional; b) taman hutan raya; dan c) taman wisata alam; 3. Taman Buru;

b. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kawasan Hutan di Kabupaten Garut meliputi:

Tabel 2.6 Kawasan Hutan Kabupaten Garut

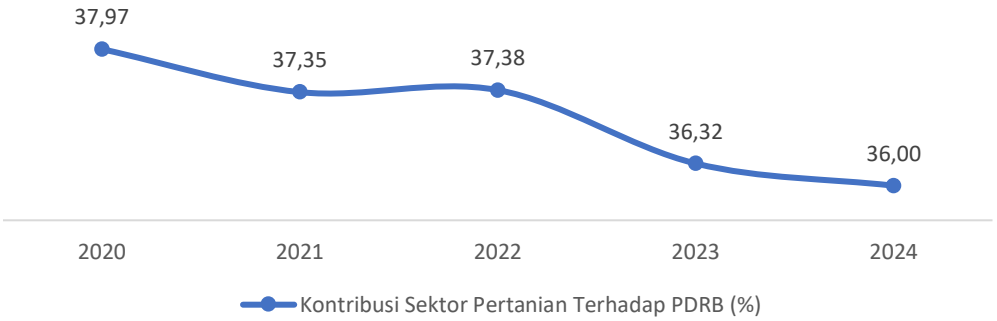
No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi (Nama Kecamatan)
1.	Kawasan Hutan Lindung	73.488	Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, Cikajang, Cilawu, Bayongbong, Cigedug, Cisurupan, Sukaresmi, Samarang, Pasirwangi, Tarogong Kaler, Garut Kota, Karangpawitan, Pangatikan, Sucinaraja, Sukawening, Karangtengah, Leles, Cibatu, Kersamanah, Cibiuk, Kadungora, Bl Limbangan, Leuwigoong, dan Malangbong.
2.	Kawasan Hutan Konservasi		
	a. Cagar Alam (CA)	12.288	Cibalong, Pangatikan, Wanaraja, Pasirwangi, Sukaresmi, Cikajang, Cisurupan, Pamulihan, Tarogong Kaler, Leles, dan Banyuresmi.
	b. Cagar Alam laut	0,25	Cibalong
	c. Taman Wisata Alam (TWA)	722	Pangatikan, Tarogong Kaler, dan Cisurupan.

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi (Nama Kecamatan)
	d. Taman Buru (TB)	2.766	Selaawi.
3.	Kawasan Lindung Lainnya		
	a. Kawasan Hutan *Mangrove*	7,43	Pameungpeuk, Cibalong, Cikelat, Pakenjeng, Mekarmukti, Caringin.
4.	Kawasan Hutan Produksi		
	a. Hutan Produksi Terbatas	13.130	Cikelet, Cibalong, Cisompet, Pameungpeuk, Caringin, dan Malangbong.
	b. Hutan Produksi Tetap	1.250	Selawi, Cibalong, dan Cisompet
5.	Kawasan Hutan Rakyat	17.076	Tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tarogong Kidul.

Sumber : Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

2) Pertanian dan Perkebunan

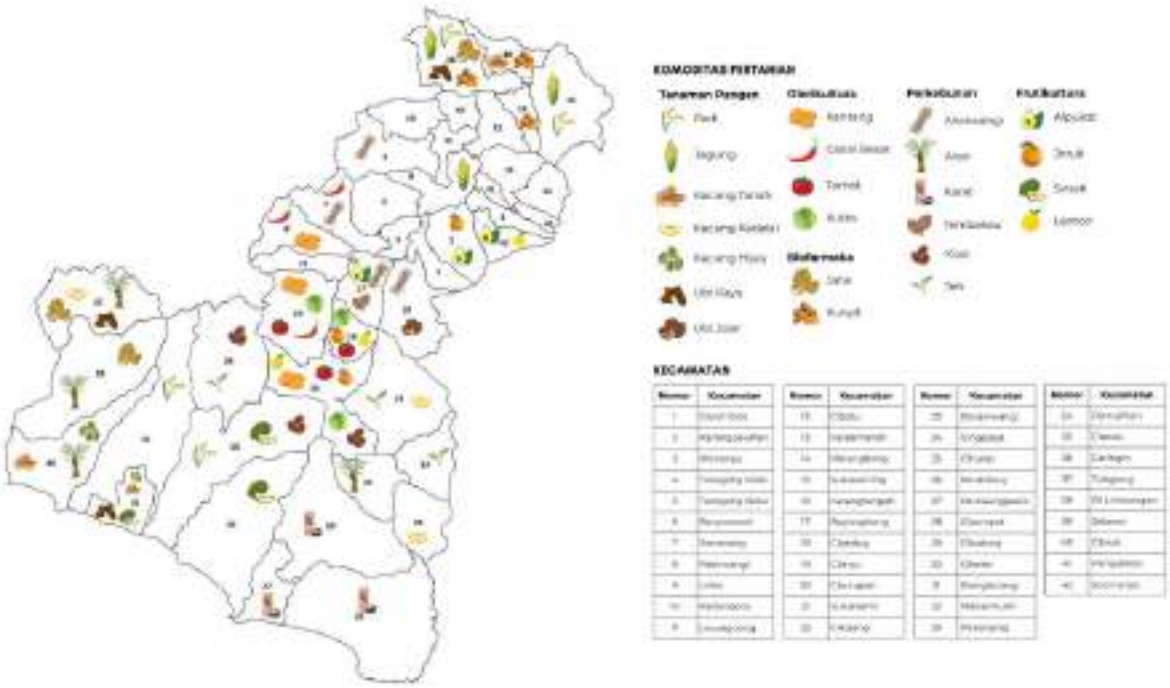
Perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PDRB sektor pertanian yang setiap tahunnya menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Garut, tercatat pada tahun 2024 sektor pertanian berkontribusi sebesar 36%. Dengan komposisi ini Garut dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang berbasis pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi Garut harus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan ekonomi rakyat terutama di daerah pedesaan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor pertanian ini dijadikan andalan Kabupaten Garut agar mendapat peluang mendorong roda ekonomi Garut khususnya, juga bisa turut andil dalam perekonomian Jawa Barat.



Sumber : BPS Kabupaten Garut 2025, diolah Bappeda

Gambar 2.8 Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Sebagai wilayah dengan karakter pertanian polikultur, Kabupaten Garut merupakan penyumbang produksi, hampir di seluruh komoditi. Berikut merupakan sebaran produksi komoditas pertanian di Kabupaten Garut menurut kecamatan.



Sumber : BPS Kabupaten Garut 2025, diolah Bappeda

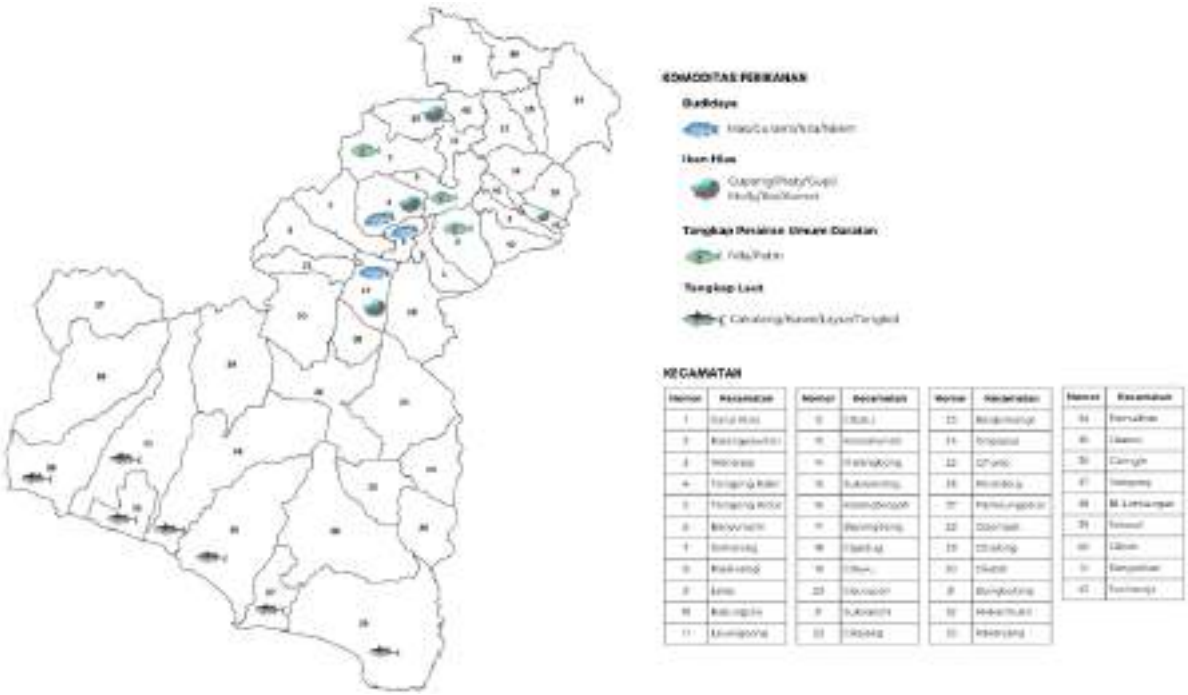
Gambar 2.9 Sebaran Produksi Komoditas Pertanian

Produksi komoditas pertanian berada pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Garut. Kecamatan dengan produksi tertinggi kelompok tanaman pangan dan biofarmaka berada di bagian utara dan bagian selatan kabupaten. Produksi tanaman pangan pada tahun 2024 diataranya: padi 796.024,95 ton; jagung 434.593,43 ton; kacang tanah 12.975,91 ton; kacang kedelai 1.790,72 ton; kacang hijau 291,60 ton; ubi kayu/singkong 393.003,96 ton; dan ubi jalar 65.433,05 ton. Produksi biofarmaka pada tahun 2024 diantaranya jahe 13.793,66 ton dan kunyit 16.806,45 ton. Kemudian, kecamatan dengan produksi tertinggi hortikultura dan frutikultura berada di bagian tengah kabupaten. Produksi hortikultura pada tahun 2024 diantaranya: kentang 194.438,11 ton; cabai besar 62.212,90 ton; tomat 91.396,36 ton dan kubis 127.146,26 ton. Produksi frutikultura pada tahun 2024 diantaranya: alpukat 249.391,77 ton; jeruk 118.405,34 ton; sirsak 17.513,11 ton; dan lemon 11.177,19 ton. Kemudian, kecamatan dengan produksi tertinggi tanaman perkebunan berada pada bagian selatan kabupaten berupa aren, karet, tembakau, kopi dan teh, serta sebagian kecil wilayah tengah kabupaten berupa akar wangi. Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2024 diantaranya: aren 14.529.670,00 ton; karet 3.474.800,00 ton; kopi 3.100.050,90 ton; dan teh 2.759.083,00 ton.

3) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Garut memiliki garis pantai di 7 wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, Pameumpeuk dan Cibalong dengan total luas sekitar 669,5 Ha.

Berdasarkan data ekosistem laut dan pesisir, di wilayah laut Kabupaten Garut teridentifikasi kawasan yang berfungsi lindung meliputi kawasan hutan *mangrove* seluas 31,81 Ha dan Kawasan terumbu karang seluas 487 Ha serta padang lamun seluas 64 Ha. Berikut merupakan sebaran produksi komoditas perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Garut.

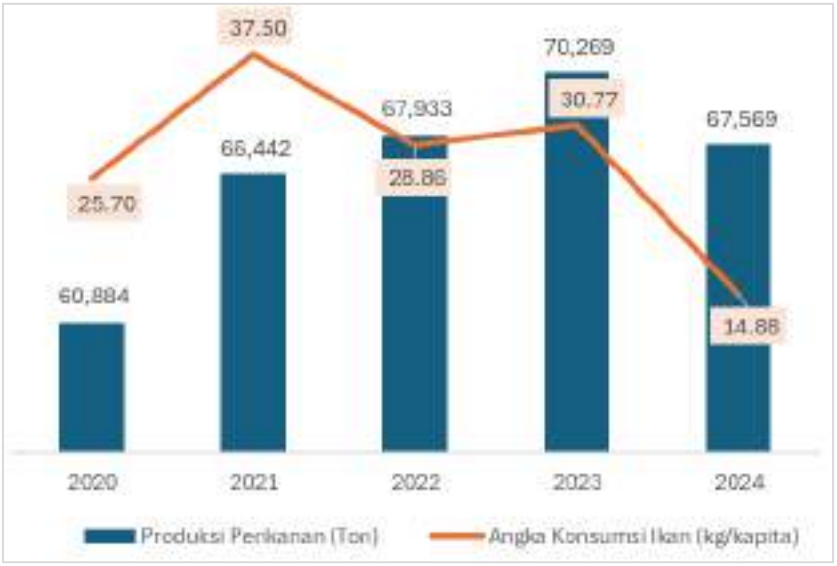


Sumber : BPS Kabupaten Garut 2025, diolah Bappeda

Gambar 2.10 Sebaran Produksi Komoditas Perikanan

Tujuh wilayah kecamatan pada bagian selatan kabupaten merupakan daerah penghasil perikanan tangkap dengan komoditas unggulan meliputi cakalang, kuwe, layur dan tongkol. Adapun produksi perikanan budidaya dan ikan hias tertinggi tersebar pada kecamatan – kecamatan di Kabupaten Garut bagian tengah dengan komoditas unggulan mas, gurami, nila dan nilem serta cupang, platy, gupi, molly, koi dan komet. Komoditas tersebut merupakan kontributor terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Garut mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan Produksi Perikanan dari 70.269 ton pada tahun 2023 menjadi 67.569 ton. Adapun konsumsi ikan mengalami tren yang fluktuatif dari 25,7 kg/kapita di tahun 2020 dan 14,88 kg/kapita per tahun 2024. Bila membandingkan rata-rata angka konsumsi ikan selama 2020-2024 yaitu sebesar 27,54 kg/kapita/tahun maka angka ini berada di atas angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yaitu 19 kg/kapita/tahun. Tren produksi perikanan dan angka konsumsi ikan pada tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Garut dan Dinas Perikanan dan Peternakan 2025, diolah Bappeda

Gambar 2.11 Produksi Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

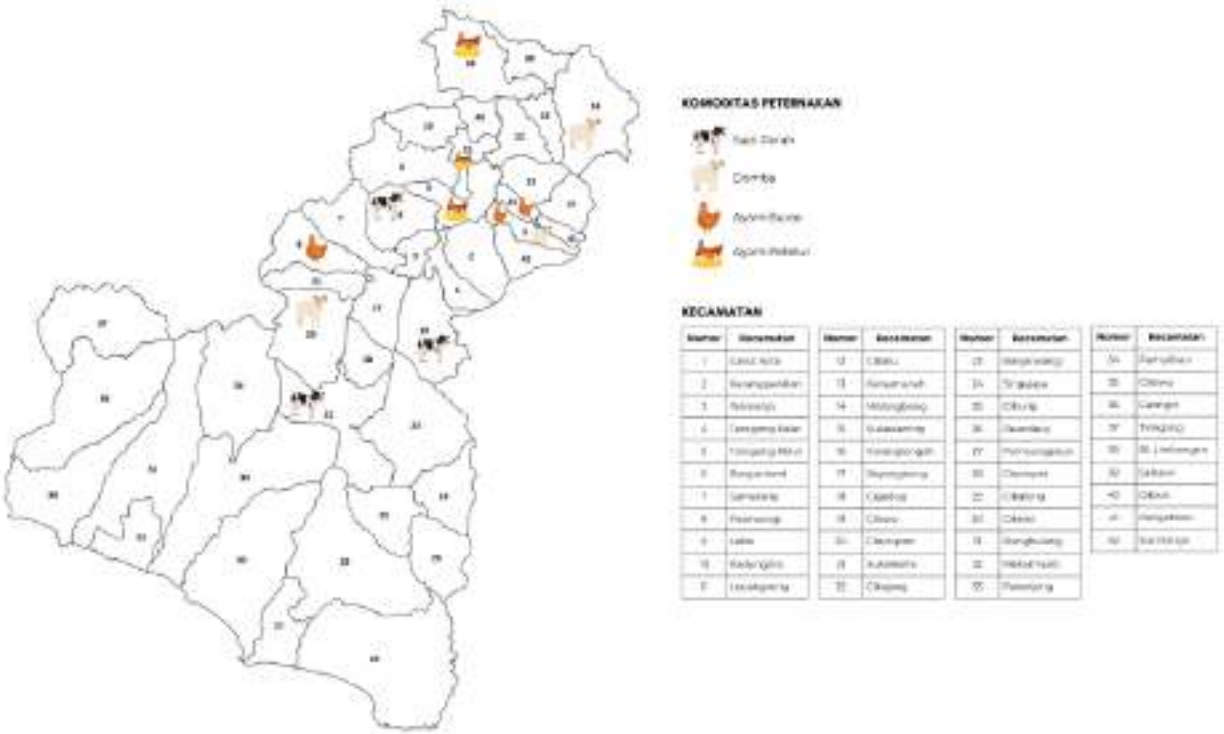
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian indikator di atas antara lain:

a. Usaha perikanan budidaya pada umumnya masih dikelola secara tradisional sebagai usaha tani sampingan;
b. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan dari lahan usaha tani budidaya perikanan menjadi lahan untuk kepentingan lainnya;
c. Semakin menurunnya kualitas perairan, daya dukung sumber daya perairan, perusakan lingkungan pesisir dan bagian hulu daerah aliran sungai;
d. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama serta unit usaha bersama belum dapat berjalan secara optimal;
e. Belum optimalnya proses alih teknologi terapan dalam mendorong peningkatan produksi di sektor perikanan;
f. Masih rendahnya kemampuan aksesibilitas petani ikan dan nelayan terhadap permodalan dan rantai tata niaga pasar hasil perikanan;
g. Fasilitas pelabuhan yang tidak memadai;
h. Kondisi musim yang tidak menentu;
i. Usaha perikanan tangkap di laut masih terbatas pada Zona 1, kurang dari 4 mil karena tonase armada penangkapan seluruhnya kurang dari 5 GT;
j. Terbatasnya tenaga kesehatan hewan;
k. Belum efektifnya pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan;
l. Belum optimalnya pemetaan penyakit; dan

m. Adanya *re-emerging disease* seperti (PMK) Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) sehingga dibutuhkan SDM serta anggaran dalam rangka pengendalian penyakit.

4) Peternakan

Sektor Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Garut, komoditas Sapi Perah mencapai 11.681 ekor pada tahun 2024 dan merupakan kontributor terbesar ketiga di Provinsi Jawa Barat, kemudian komoditas Domba dengan jumlah populasi 1.032.408 ekor pada tahun 2024 dan merupakan kontributor terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, komoditas unggas, kerbau, sapi potong dan kambing menjadi komoditas peternakan unggulan di Kabupaten Garut. Berikut merupakan sebaran populasi tertinggi komoditas sektor peternakan menurut kecamatan di Kabupaten Garut.



Sumber: BPS Kabupaten Garut dan Dinas Perikanan dan Peternakan 2025, diolah Bappeda

Gambar 2.12 Sebaran Populasi Komoditas Peternakan

Komoditas unggulan sektor peternakan meliputi sapi perah, domba, ayam buras dan ayam petelur merupakan kontributor terbesar di Provinsi Jawa Barat. Populasi tertinggi komoditas tersebut tersebar di kecamatan-kecamatan bagian utara dan tengah kabupaten.

5) Energi dan Mineral

Secara fisiologis di Kabupaten Garut terdapat banyak aktivitas vulkanisme dan tektonik yang berkembang secara dinamis, sehingga sangat dimungkinkan terdapatnya potensi endapan mineral, baik mineral

logam, non logam maupun potensi panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Berlangsungnya proses hidrotermal pada fase akhir aktivitas vulkanik menyebabkan terjadinya pelapukan batuan dasar, sehingga membentuk endapan mineral yang tergolong ke dalam mineral industri seperti kaolin di Kecamatan Malangbong. Demikian pula aktivitas vulkanik lainnya menghasilkan endapan hasil erupsi gunung berapi seperti tuf, lapili, bongkahan andesit dan basal yang hasilnya dapat dimanfaatkan sekarang ini sebagai bahan galian C seperti yang terdapat di Gunung Guntur, begitu pula dengan endapan belerang yang terdapat di Gunung Papandayan dan Talaga Bodas.

Potensi pertambangan lain yang dapat diidentifikasi mencakup emas, pasir besi, biji besi, batu bara, batu templek, obsidian dan perlit, batu andesit, batu gamping, tanah liat, batu setengah permata, granit dan mangan. Di wilayah Kabupaten Garut terdapat beberapa sebaran lokasi tambang, adapun jenis tambang yang ada di Kabupaten Garut terdiri atas tambang Batu Ali, tambang Batu Apung, tambang Batu Buka, tambang Batu Gamping, tambang Batu Granit, tambang Batu Kali, tambang Kaolin, tambang Mangan, tambang Obsidian, tambang Okar, tambang Pasir, tambang Pirit, tambang Tospid dan Tambang ras.

Tabel 2.7 Potensi Mineral Logam maupun Non Logam Kabupaten Garut

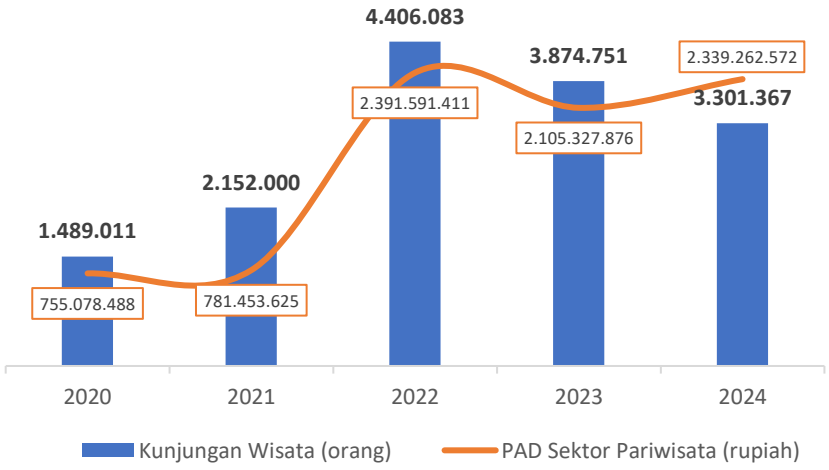
No	Jenis Komoditas Tambang	SDA dalam Ton
1	Andesit	560.000.000
2	Batu Gamping/Kapur	1.000.000
3	Kaolin	3.069.440
4	Pasir dan Tanah Urug	32.377.739
5	Sirtu	273.000.000
6	Tanah Liat	170.000.000
7	Batu ½ Permata	1.000.000
8	Emas	41
9	Mangan	180.000
10	Pasir besi	5.000.000
11	Belerang	360.000
12	Bijih besi	10.000.000
13	Batu bara	1.000.000
14	Obsiden/Perlit	4.800.000

Sumber: Laporan Akhir RPPLH Tahun 2024-2054

Persentase perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi pada tahun 2022 sampai 2024 masih stagnan sebesar 28,57%. Belum optimalnya capaian indikator persentase perusahaan yang memanfaatkan panas bumi yang berizin disebabkan masih rendahnya kesadaran perusahaan serta terdapat ketidak-sinkronan kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) antara *Online Single Submission* (OSS) dengan Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang, penerbitan SLO dapat dilakukan Perangkat Daerah di Kabupaten, sedangkan pada sistem di OSS belum terdapat menu bagi Perangkat Daerah untuk menerbitkan SLO tersebut.

6) Pariwisata

Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang menjadi berbagai potensi pengembangan pariwisata. Pariwisata menjadi *core business* di Kabupaten Garut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, karena memiliki *multiplier effect* yang besar dalam menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Kabupaten Garut memiliki 47 Daya Tarik Pariwisata 22 diantaranya merupakan Desa Wisata (47%) dan 25 lainnya mayoritas merupakan Objek Wisata Alam (53%). Kabupaten Garut berpotensi untuk dikembangkan menjadi kota wisata dan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Barat.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah Bappeda 2025

Gambar 2.13 Data Kunjungan Wisata dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024

Kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 dan 2021 PAD sektor pariwisata hanya mencapai 755 juta dan 781 juta. Pemulihan sektor wisata sudah dapat terlihat pada tahun 2022-2024, kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 4,4 juta orang dan menyumbang PAD sejumlah 2,39 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa geliat sektor pariwisata semakin terlihat, promosi yang intens melalui media sosial dan kerjasama

dengan para *influencer* adalah salah satu faktor yang menyebabkan naiknya tingkat kunjungan ke Kabupaten Garut. Kepercayaan masyarakat terhadap wisata Kabupaten Garut yang meningkat juga menyebabkan naiknya tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Garut. Namun demikian, tantangan yang dialami sektor pariwisata Kabupaten Garut diantaranya yaitu infrastruktur serta aksesibilitas menuju lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) yang masih belum memadai.

Pada tahun 2024 meskipun jumlah kunjungan wisata relatif menurun dari 3,87 juta orang di tahun 2023 menjadi 3,3 juta orang, namun PAD dari sektor pariwisata relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pelaporan data kunjungan dari DTW ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimana data kunjungan dari DTW yang dikelola swasta sangat bergantung pada kesadaran pengelola untuk melaporkan data kunjungan rutin. Ketika DTW sedang viral/terkenal dan pengunjung jumlah tinggi, pengelola rutin melaporkan kunjungan, namun ketika sepi terdapat potensi tidak melaporkan.

7) Kebudayaan Lokal

Kabupaten Garut yang dikenal sebagai "*Swiss Van Java*" memiliki daya tarik wisata alam wisata budaya, dan wisata minat khusus serta wisata pantai dan wisata petualangan.

a. Cagar Budaya

Selain wisata alam yang menjadi unggulan, Kabupaten Garut memiliki 32 Situs Cagar Budaya dengan 10 Cagar Budaya yang telah ditetapkan yang meliputi Situs Ciburuy, Situs Pasir Lulumpang, Situs Peta Ciela, Mesjid Cipari, Stasiun Cikajang, Rumah Kepala Stasiun Cisurupan, Rumah Kuncen Kp.Pulo, Sekolah Dasar Negeri 1 Regol, Stasiun Cisurupan, Tajug Kp. Pulo.

b. Upacara Adat

Upacara adat yang dilaksanakan di beberapa situs Kabupaten Garut mayoritas dilaksanakan dalam rangka pembersihan benda cagar budaya yang dilaksanakan pada Bulan *Maulud* dan *Muharam*, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Upacara Adat

No	Upacara Adat	Tempat	Waktu	Benda Pusaka/ BCB Bergerak
1	Ngalungsur	Makam Syeh Raohmatulooh	12, 13 & 14 Maulud	Keris, Kujang, Rante,Trisula, Golok Panjang, Tumbak dan lain lain
2	Siraman Pusaka	Makam Pangeran Papak	13 s.d 14 Maulud	Keris, Kujang, Golok Panjang, Pelana Kuda, Tumbak dan lain lain
3	Siraman Pusaka	Makam Sunan Cipancar	14 Maulud	Keris dan Golok,Naskah Kuno dan lain lain
4	Siraman Pusaka	Kampung Adat Pulo	14 Maulud	Keris, Tumbak, Meriam, Samurai, Golok dan lain lain
5	Siraman Pusaka	Situs Joglo Dangiang	13 dan 14 Mulud	Keris, Golok Panjang, Meriam

No	Upacara Adat	Tempat	Waktu	Benda Pusaka/ BCB Bergerak
6	Jiarah Ke Makam Karomah	Kampung Adat Dukuh	13 & 14 Maulud	Keris, Naskah Kuno, Golok dan lain lain
7	Siraman Jimat	Desa Sukahurip	14 Maulud	Keris, Kujang, Golok dan lain lain
8	Cikahuripan Jaya	Situs Ciela	Minggu ke 3 Muharam	Keris, Tasbeh, Batu, Meriam kecil, Umbul umbul Ciung Wanara, Peta Kuno
9	Seba	Situs Ciburuy	17 - 27 Muharam	Goong Renteng, Keris, Kujang, Trisula, Peso Pangot, Naskah Lontar dan lain lain
10	Ngalungsur Jimat Karahayuan	Ciputat Limbangan	12 Maulud	Keris, Kujang, Tumbak, Golok dan lain lain
11	Wisata Batin	Mulakeudeu Sucinaraja	14 Maulud	Keris, Kujang, Golok dan lain lain

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2025) yang dikelola dalam SIPD

c. Kampung Adat

Kampung adat adalah wilayah tempat tinggal yang dikelola oleh masyarakat adat dengan sistem tata pemerintahan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kampung adat memiliki aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan kehidupan sosial lainnya. Keberadaan Kampung Adat di Kabupaten Garut terdapat di 5 lokasi sebagai berikut:

i. Kampung Adat Pulo

Terletak di sebelah barat Situs Candi Cangkuang Desa Cangkuang, Kecamatan Leles dan dikenal dengan nama Kampung Pulo memiliki sejarah dan adat istiadat yang masih dijaga. Di Kampung ini terdapat jumlah rumah dan kepala keluarga yang jumlahnya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari enam kecuali ditambah satu bangunan mesjid. Hal ini terus dijaga karena merupakan sebuah perlambangan bahwa Arif Muhammad yang merupakan salah seorang Tokoh Penyebar Agama Islam di Desa Cangkuang dan sekitarnya, mempunyai enam keturunan wanita yang dilambangkan pada rumah dan satu laki-laki yang dilambangkan oleh bangunan mesjid. Arif Muhammad juga merupakan salah seorang utusan dari Mataram.

ii. Situs Kabuyutan Ciburuy

Menurut keyakinan warga setempat, Situs Kabuyutan Ciburuy terletak di kaki Gunung Cikuray, tepatnya di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut dipercaya merupakan tempat para raja atau wali yang sedang melakukan perjalanan untuk bertapa. Diceritakan bahwa ada seorang wali yang melakukan perjalanan untuk mencari tempat bertapa dan tempat tersebut harus jauh dari keramaian sehingga baik untuk tempat bertapa dan menulis.

iii. Kampung Adat Dukuh

Kampung Dukuh adalah kampung adat yang berada di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet. Asal muasal nama Kampung Dukuh berhubungan erat dengan sejarah seorang Syekh yang bernama Syekh Abdul Jalil yang disuruh kembali ke tanah Jawa ketika beliau berada di Mekkah. Kata Dukuh berarti "*calik*" atau "duduk" dalam bahasa Indonesia, berasal dari Padukuhan yang artinya tempat bermukim atau tempat yang baik untuk bermunajat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga tokoh Dukuh yang mengartikan kata Dukuh dengan istilah "*tukuh*" yang berarti "patuh", patuh dalam menjaga dan menjalankan adat istiadat nenek moyangnya, dengan istilah "*matuh (menetap/ tinggal)"* yaitu "*teguh kana katentuan-katentuan (menaati ketentuan yang telah ditetapkan)*", serta "*kukuh*" yaitu kuat.

iv. Kampung Adat Dangiang

Kampung Adat Dangiang terletak di Kecamatan Banjarwangi. Masyarakat Desa Dangiang yang sering juga disebut dengan Masyarakat Dangiang merupakan pemeluk agama Islam sehingga tidak sulit untuk menemukan masjid ataupun surau di sana. Sebagai sebuah desa adat dan juga pemeluk agama islam, terdapat sebuah tradisi turun-temurun yang hingga saat ini masih dilakukan oleh Masyarakat Dangiang, tradisi tersebut dikenal sebagai Upacara *Siraman* dan *Ngalungsur Geni* yang merupakan tradisi turun temurun dan dilakukan setiap satu tahun sekali pada 14 Maulud.

v. Kampung Adat Pasir

Kampung Pasir merupakan salah satu kampung adat yang terletak di Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang. Masyarakat Kampung Pasir menganut ajaran Sunda Wiwitan Madrais. Ajaran Sunda Wiwitan Madrais ini memiliki prinsip yang dianut oleh warga Kampung Pasir yakni kudu *beres roes*, *guyub*, dan gotong royong. Kampung Adat Pasir juga memiliki dua kebudayaan unggulan yaitu *Angklung Buncis* dan *Ampih Pare*. *Angklung Buncis* termasuk di antaranya reog, angklung, calung, karawitan, kecapi, serta kawih. Ragam produk aksesoris berbahan baku Kayu Jati yang bermakna agar mereka kelak bisa menjadi insan yang berkualitas. Menampilkan empat grup yang dilengkapi 16 *dogdog* maupun piranti musik sejenis gendang. Disertai 48 alat musik angklung, yang didatangkan dari Kabupaten Kuningan sebagai bentuk interaksi persaudaraan dengan masyarakat adat di Kuningan yang solid. Upacara *Ampih Pare* adalah upacara menyimpan hasil panen padi dari sawah/ladang ke tempat penyimpanan padi (*pare*) yang disebut "*leuit"*. Pada pelaksanaannya para petani dengan memakai pakaian adat yang khas, memikul hasil panennya menggunakan alat pikul yang disebut "*rengkong*". Selama perjalanan alat pikul

tersebut menimbulkan bunyi yang unik, upacara *Ampih Pare* merupakan suatu prosesi pertunjukan kesenian yang khas yang bermakna ketahanan pangan.

d. Kesenian Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdapat 77 Kesenian Daerah yang diantaranya sebanyak 41 Kesenian telah dilestarikan diantaranya meliputi Seni Lais, Badawung, Badeng, Surak Ibra, Cigawiran, Pencak Ular, Dodombaan, Raja Dogar, Gegel Jubleg dan lain sebagainya.

e. Status Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan di tingkat nasional sebanyak 9 WBTB dan tingkat provinsi sebanyak 7 WBTB, yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.9 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Garut Tingkat Nasional

No	Nama	Alamat	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Tahun
1	Ngalungsur Geni	Desa Dangiang, Kec. Banjarwangi	Ritual Khusus	2016
2	Lais	Kampung Pasirwaru, Kec. Limbangan	Seni	2016
3	Badawang	Desa Sanding, Kec. Malangbong	Seni	2019
4	Upacara Seba	Kabuyutan Ciburuy Kec. Bayongbong	Ritual Khusus	2020
5	Badeng	Desa Sanding Kec. Malangbong	Seni	2021
6	Tata Ruang Kampung Pulo	Kec. Leles	Pengetahuan Tradisional	2021
7	Surak Ibra	Kp. Sindangsari Desa Cinunuk Kec. Wanaraja	Seni	2022
8	Cigawiran	Kp. Serang Desa Cigawir Kec. Selaawi	Seni	2022
9	Tata Ruang Kampung Dukuh	Kp. Adat Dukuh Desa Ciroyom Kec. Cikelet	Pengetahuan Tradisional	2024

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2025) yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.10 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Garut Tingkat Provinsi

No	Nama	Alamat	Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
1	Nyaneut	Kec. Cigedug	Ritual Khusus
2	Ngawuwuh	Kec. Sucinaraja	Ritual Khusus
3	Batik Garutan	Kec. Garut Kota	Pengetahuan Tradisional
4	Burayot	Kec. Leles dan Kec. Sukawening	Pengetahuan Tradisional
5	Dodol Garut	Kec. Garut Kota	Pengetahuan Tradisional
6	Endog Lewo	Kec. Malangbong	Pengetahuan Tradisional
7	Kerajinan Kulit Sukaregang	Kec. Garut Kota	Pengetahuan Tradisional

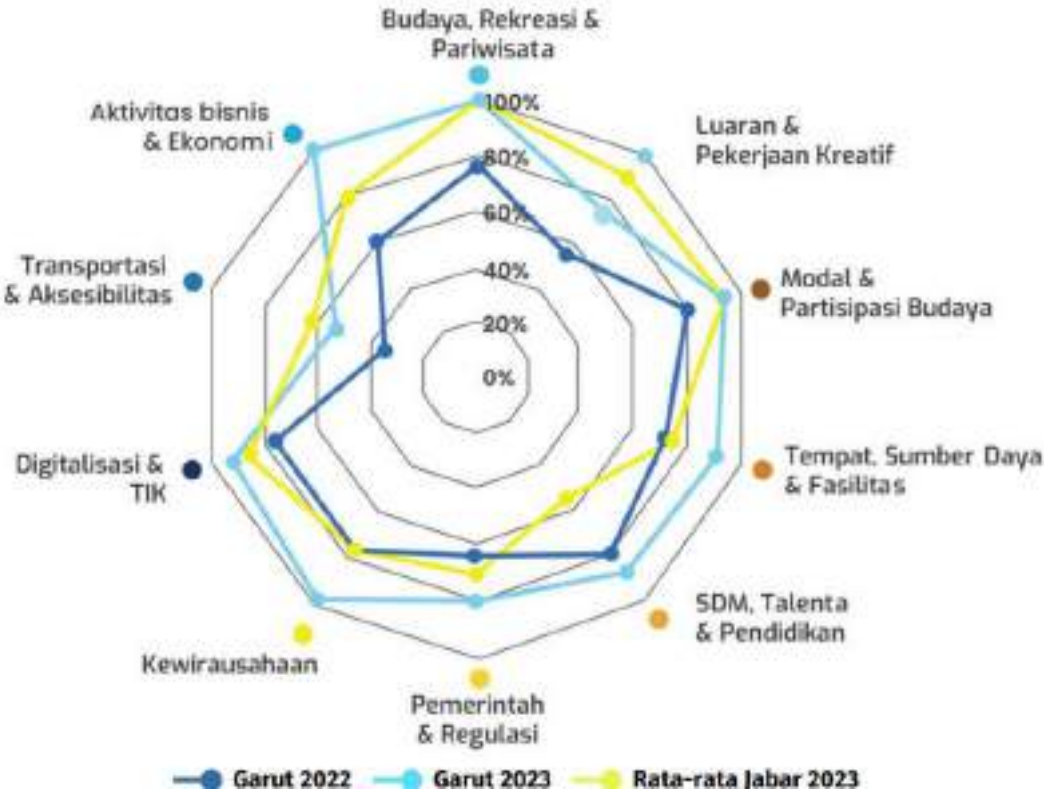
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2025) yang dikelola dalam SIPD

f. Integrasi Unsur Kebudayaan dengan Pariwisata

Kabupaten Garut memiliki 32 Juru Pelihara di 32 Cagar Budaya untuk memfasilitasi masyarakat pada saat melakukan wisata budaya, adapun pemanfaatan Cagar Budaya sebagai destinasi wisata seperti Situs Cangkuang, Makam Godog dan Makam Haruman. Selain itu Kabupaten Garut melaksanakan Gebyar Pesona Budaya Garut yang telah masuk kedalam Kharisma Event Nusantara sebagai bagian dari pengenalan, kemudian Pagelaran seni budaya di Ruang Publik telah dilaksanakan di 2 Destinasi Wisata yakni Situ Bagendit dan Situs Cangkuang pada libur hari besar dan *weekend* yang dilaksanakan oleh pelaku seni budaya lokal.

8) Ekonomi Kreatif

Kabupaten Garut dinobatkan sebagai Kota Kreatif tahun 2024, dengan subsektor unggulan Seni Pertunjukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pada Tahun 2023 Kabupaten Garut meraih peringkat ke-6 Indeks Ekonomi Kreatif Jawa Barat Tahun 2023, dengan skor 88,38 hal ini menjadi sebuah tanda bagi kemajuan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Adapun penilaian Indeks Ekonomi Kreatif Jawa Barat Tahun 2023 tersaji pada Gambar berikut.



Gambar 2.14 Indeks Kreatif Kabupaten Garut

Kabupaten Garut mendapatkan predikat *Exceptionally Creative* pada tahun 2023, dengan hasil Evaluasi Indeks Kreatif sebagai berikut:

a. Aksesibilitas masih dinilai sulit baik dari segi kualitas jalan hingga keberadaan tol dan transportasi publik di dalam daerah
b. Belum adanya payung hukum pengembangan ekonomi kreatif daerah
c. Belum optimalnya jangkauan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
d. Infrastruktur pengembang dan pemasaran masih kurang intensif dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif.

Berdasarkan data 17 (tujuh belas) sektor ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) sub sektor yang menjadi unggulan yaitu *fashion* (Bandung dan sekitarnya, Tasikmalaya, dan Garut), *game* (Bandung, Cimahi), kriya (Garut, Tasikmalaya) dan kuliner (Bandung).

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah. DDLH ditentukan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangan, serta interaksi antara makhluk hidup yang ada. Berdasarkan kajian KLHS RPJPD Kabupaten Garut, jasa ekosistem yang dipilih sebagai parameter untuk kuantifikasi DDLH adalah penyediaan pangan dan penyediaan air bersih.

1) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Analisis dan perhitungan ambang batas dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Garut dilakukan dalam sistem grid resolusi 30”x30” dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem. Hasil analisis ketersediaan energi pangan Kabupaten Garut dapat dilihat pada Gambar Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut.

Ketersediaan pangan yang tinggi berada di Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cikelet, dan Kecamatan Cibalong. Sementara ketersediaan pangan yang rendah berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cigedug, dan Kecamatan Cibiuk. Berdasarkan dokumen RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054 Ketersediaan pangan Kabupaten Garut tahun 2023 mencapai 6,4 Triliun kkal sedangkan peta kebutuhan pangan di Kabupaten Garut mencapai 2,1 Triliun kkal.

Berdasarkan peta kebutuhan pangan defisit bahan pangan terjadi di sekitar wilayah utara dan tengah Kabupaten Garut yakni di Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Garut Kota. Selain itu, terdapat pula kecamatan yang mengalami defisit bahan pangan sebagian, beberapa diantaranya adalah Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Kadungora, dan Kecamatan Wanaraja. Warna oranye pada peta menunjukkan defisit bahan pangan, sementara gradasi warna dari kuning ke hijau menunjukkan surplus bahan pangan yang semakin besar. Walaupun terdapat wilayah yang defisit bahan pangan, akumulasi nilai selisih ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Garut memiliki selisih

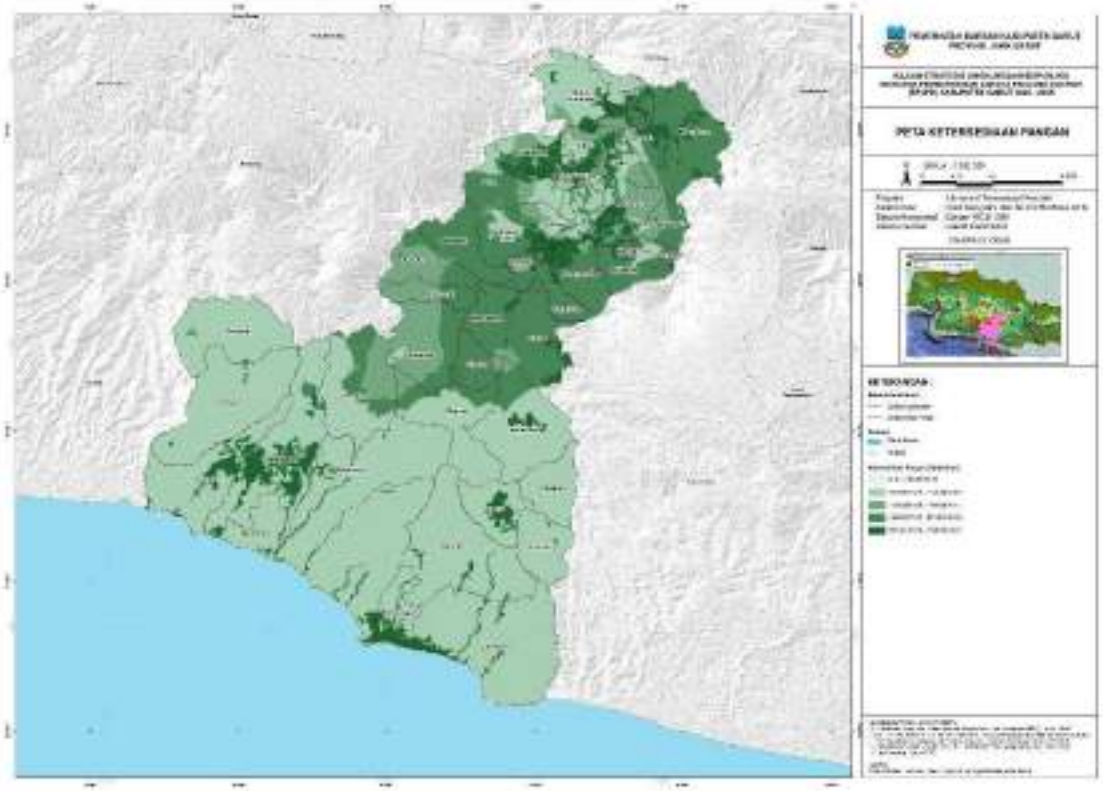
ketersediaan yang bernilai positif atau surplus. Sehingga, Kabupaten Garut masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan mendistribusikan bahan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Peta Ketersediaan, Kebutuhan dan Peta Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.11 Luas Daya Dukung Pangan di Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Banjarwangi	12.069,94	97,92	12.167,87
2	Banyuresmi	4.631,29	113,36	4.744,65
3	Bayongbong	3.416,62	1.199,17	4.615,79
4	Balubur Limbangan	8.097,54	529,69	8.627,23
5	Bungbulang	16.925,73	-	16.925,73
6	Caringin	11.444,40	0,91	11.445,31
7	Cibalong	21.612,53	0,22	21.612,75
8	Cibatu	3.066,06	760,36	3.826,42
9	Cibiuk	1.807,41	326,02	2.133,43
10	Cigedug	3.270,15	61,42	3.331,57
11	Cihurip	5.466,23	-	5.466,23
12	Cikajang	10.454,71	270,87	10.725,59
13	Cikelet	17.640,52	13,39	17.653,92
14	Cilawu	6.801,08	1.197,09	7.998,17
15	Cisewu	16.042,06	31,50	16.073,56
16	Cisompet	17.185,71	90,00	17.275,71
17	Cisurupan	8.923,61	260,39	9.184,00
18	Garut Kota	1.623,35	1.385,80	3.009,15
19	Kadungora	2.817,21	1.036,21	3.853,42
20	Karangpawitan	2.816,24	2.494,19	5.310,44
21	Karangtengah	2.702,10	379,84	3.081,94
22	Kersamanah	1.952,35	485,32	2.437,66
23	Leles	6.570,96	497,31	7.068,27
24	Leuwigoong	2.200,58	167,97	2.368,55
25	Malangbong	9.251,90	1.182,05	10.433,95
26	Mekarmukti	4.325,82		4.325,82
27	Pakenjeng	18.858,81	304,49	19.163,30
28	Pameungpeuk	4.523,62	214,51	4.738,13
29	Pamulihan	12.766,74	4,55	12.771,29
30	Pangatikan	1.592,54	460,85	2.053,39
31	Pasirwangi	5.341,23	178,87	5.520,11
32	Peundeuy	5.187,42	392,13	5.579,56
33	Samarang	4.630,29	1.159,56	5.789,85
34	Selaawi	3.284,24	274,67	3.558,91
35	Singajaya	4.016,33	1.259,63	5.275,95
36	Sucinaraja	2.615,99	548,34	3.164,33

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
37	Sukaresmi	3.190,86	80,09	3.270,95
38	Sukawening	2.946,90	766,32	3.713,21
39	Talegong	10.946,15	4,50	10.950,65
40	Tarogong Kaler	3.948,14	1.228,47	5.176,62
41	Tarogong Kidul	110,38	1.855,39	1.965,76
42	Wanaraja	1.178,31	1.033,79	2.212,10
	Total	288.258,36	22.347,18	310.605,54

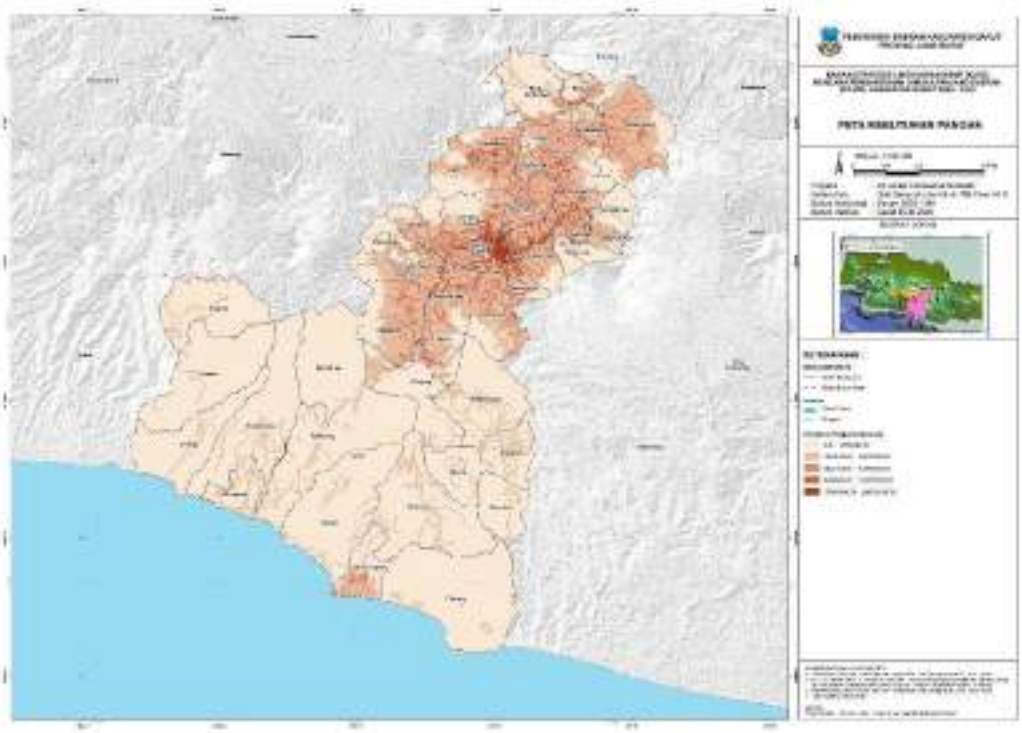
Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

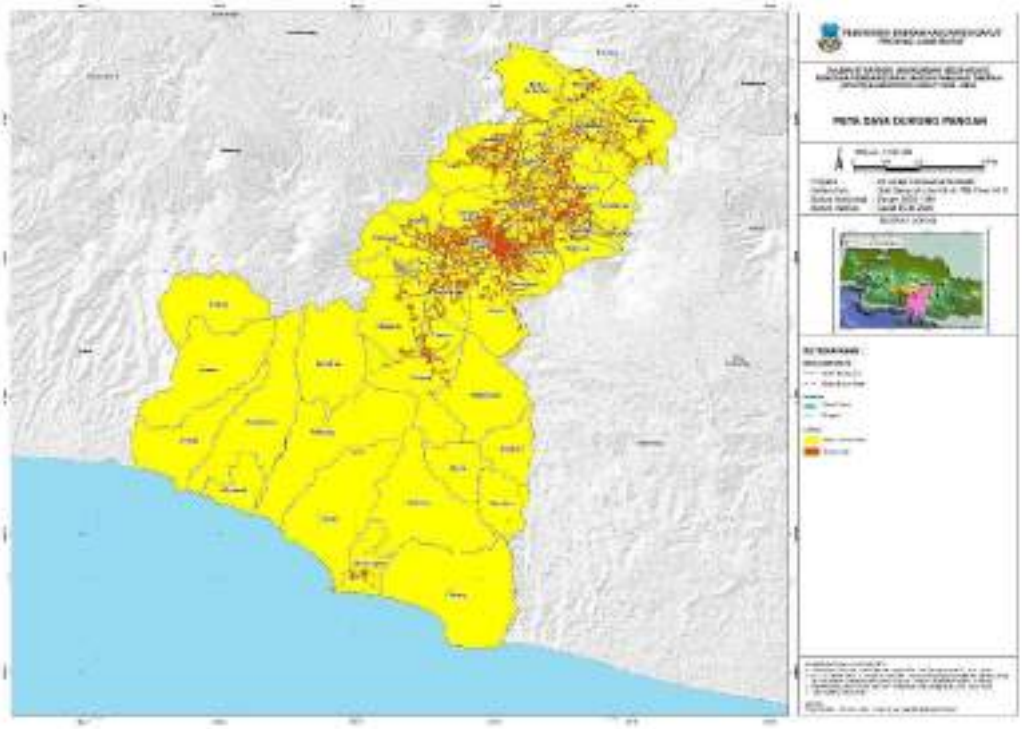
Gambar 2.15 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Garut

Secara akumulatif di Kabupaten Garut, ketersediaan bahan pangan lebih besar daripada kebutuhannya. Oleh sebab itu, selisih ketersediaan pangan di Kabupaten Garut bernilai positif atau surplus. Status daya dukung pangan di Kabupaten Garut menunjukkan masih ada 92,8 % dari total luas Kabupaten Garut yang belum melampaui daya dukung pangan. status daya dukung pangan yang belum melampaui berada di Kecamatan Cibalong seluas 21.612,53 Ha dan untuk luasan terkecil berada di Kecamatan Tarogong Kidul seluas 110,38 Ha, selain itu untuk Luasan Terbesar pada status sudah melampaui berada di Kecamatan Karangpawitan seluas 2.494,19 Ha dan untuk luasan terkecil berada di Kecamatan Talegong seluas 4.50 Ha.



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.16 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Garut



Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.17 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Garut

2) Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

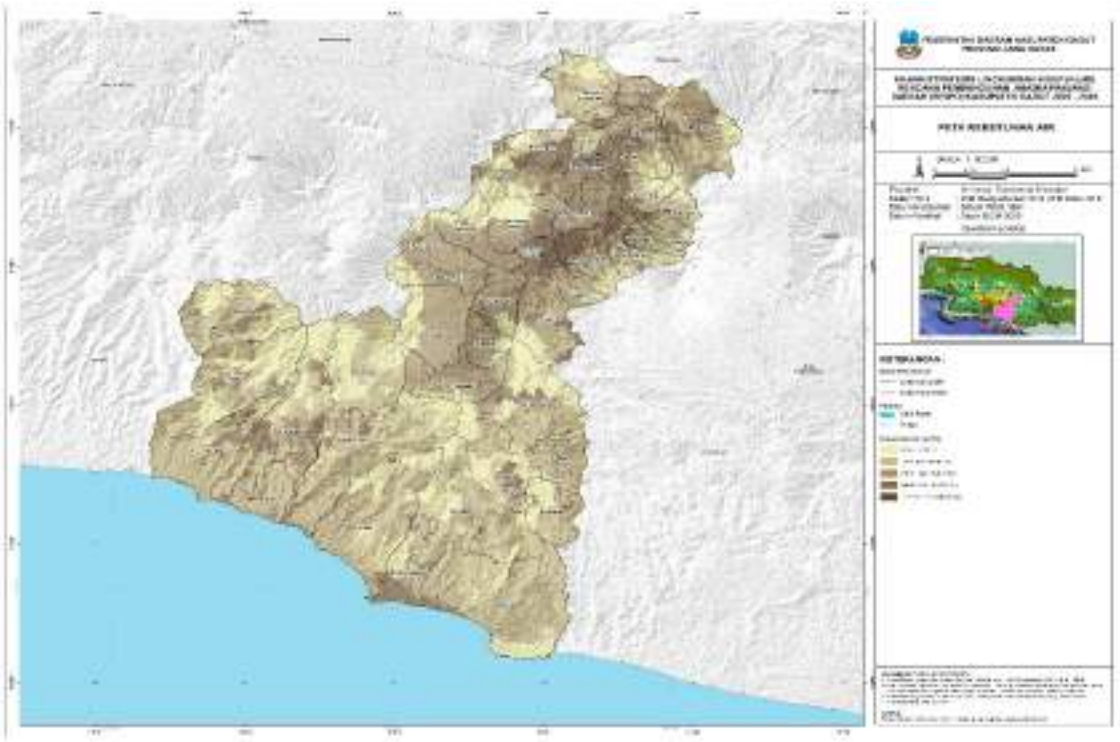
Analisis daya dukung lingkungan dilaksanakan terhadap kebutuhan dan ketersediaan air terhadap jasa ekosistem penyedia air. Berdasarkan Peta analisis Kebutuhan air, kebutuhan paling besar tersebar di perbatasan Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Cibiuk, Kadungora, Leles, Cibatu, Sukawening, Karangtengah, Wanaraja, Karangpawitan, Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Samarang, Pasirwangi, dan Sukaresmi. Selain itu kebutuhan air paling besar dapat pula ditemui di utara Kecamatan Bayongbong dan Cisurupan, tenggara Banjarwangi, Selatan Cihurip dan Cikelet, bagian tengah Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Cisewu, dan Talegong. Secara umum, nilai kebutuhan air untuk lahan di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Garut lebih besar dibandingkan nilai kebutuhan air domestik. Adapun Peta kebutuhan air di Kabupaten Garut tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.12 Status Daya Dukung Air di Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
1	Banjarwangi	9.094,57	3.073,30	12.167,87
2	Banyuresmi	239,25	4.505,40	4.744,65
3	Bayongbong	566,23	4.049,56	4.615,79
4	Balubur Limbangan	5.493,56	3.133,68	8.627,23
5	Bungbulang	9.984,04	6.941,69	16.925,73
6	Caringin	7.434,10	4.011,21	11.445,31
7	Cibalong	15.755,91	5.856,84	21.612,75
8	Cibatu	1.307,82	2.518,60	3.826,42
9	Cibiuk	1.090,10	1.043,33	2.133,43
10	Cigedug	515,52	2.816,05	3.331,57
11	Cihurip	3.807,24	1.658,99	5.466,23
12	Cikajang	4.826,60	5.898,99	10.725,59
13	Cikelet	13.123,74	4.530,17	17.653,92
14	Cilawu	3.052,26	4.945,91	7.998,17
15	Cisewu	12.637,44	3.436,13	16.073,56
16	Cisompet	13.869,05	3.406,65	17.275,71
17	Cisurupan	2.067,35	7.116,65	9.184,00
18	Garut Kota	1.492,67	1.516,49	3.009,15
19	Kadungora	1.506,62	2.346,80	3.853,42
20	Karangpawitan	2.469,89	2.840,55	5.310,44
21	Karangtengah	2.626,69	455,25	3.081,94
22	Kersamanah	1.258,21	1.179,45	2.437,66
23	Leles	2.376,50	4.691,77	7.068,27
24	Leuwigoong	113,10	2.255,45	2.368,55
25	Malangbong	4.426,80	6.007,15	10.433,95
26	Mekarmukti	1.380,00	2.945,82	4.325,82
27	Pakenjeng	15.157,76	4.005,54	19.163,30

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total (Ha)
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui	
28	Pameungpeuk	2.415,52	2.322,61	4.738,13
29	Pamulihan	8.134,80	4.636,49	12.771,29
30	Pangatikan	932,95	1.120,44	2.053,39
31	Pasirwangi	863,78	4.656,33	5.520,11
32	Peundeuy	4.856,21	723,35	5.579,56
33	Samarang	2.119,51	3.670,34	5.789,85
34	Selaawi	943,40	2.615,51	3.558,91
35	Singajaya	3.987,87	1.288,09	5.275,95
36	Sucinaraja	2.165,27	999,06	3.164,33
37	Sukaresmi	761,68	2.509,27	3.270,95
38	Sukawening	2.071,30	1.641,92	3.713,21
39	Talegong	8.760,96	2.189,68	10.950,65
40	Tarogong Kaler	1.818,94	3.357,68	5.176,62
41	Tarogong Kidul		1.965,76	1.965,76
42	Wanaraja	982,23	1.229,88	2.212,10
	Total	178.487,43	132.113,82	310.601,25

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

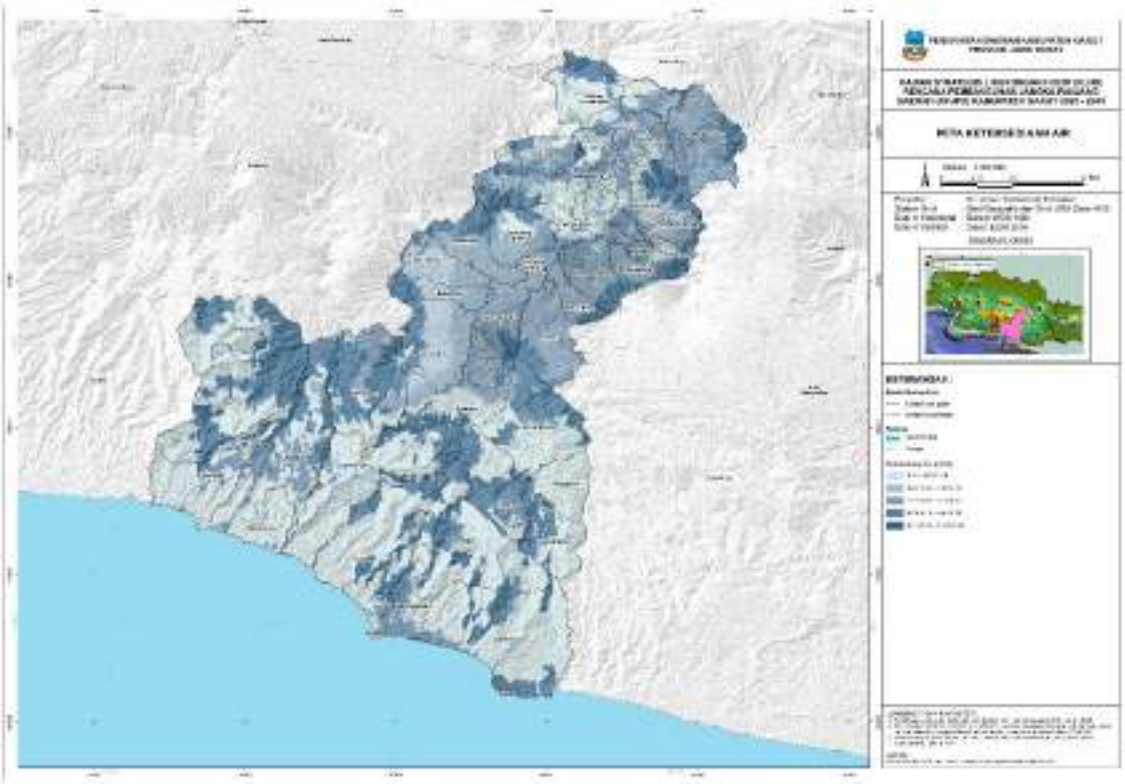


Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.18 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Garut

Berdasarkan analisis ketersediaan air di wilayah Kabupaten Garut menunjukkan bahwa wilayah selatan memiliki ketersediaan air yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Garut.

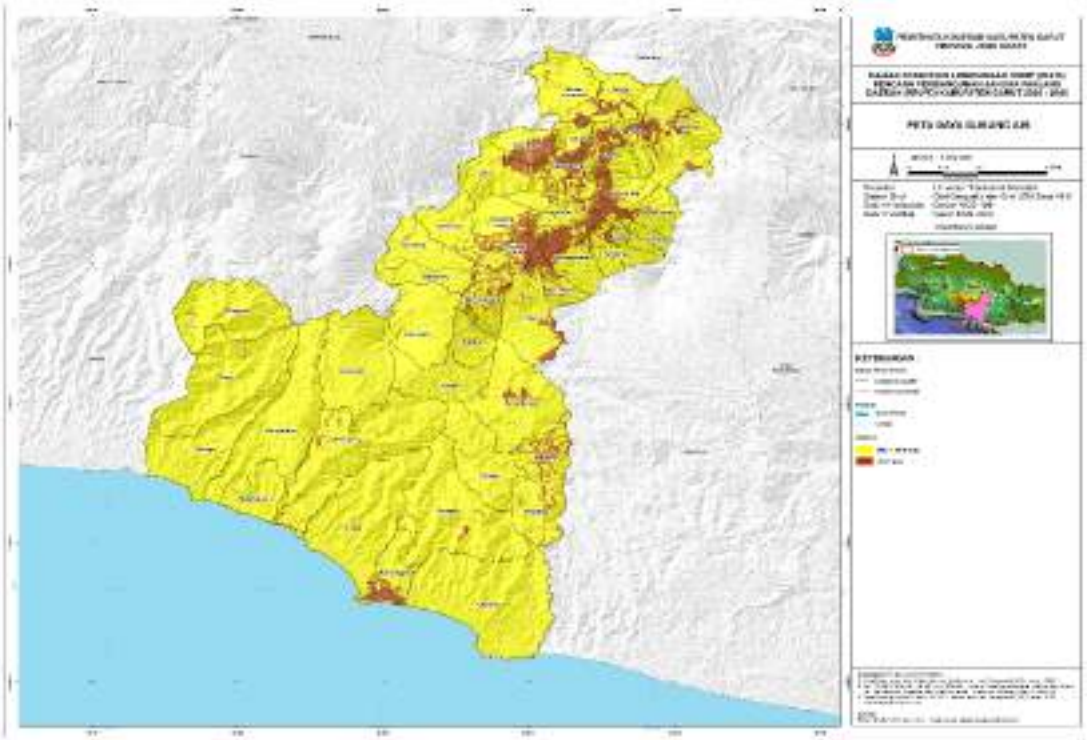
Sebagian wilayah selatan yang memiliki ketersediaan air relatif lebih rendah meliputi Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Mekarmukti, Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Cihurip, dan Cikajang. Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Garut tersaji pada Gambar berikut.



Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.19 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Garut

Wilayah yang sudah melampaui ambang batas penyediaan air sebagian besar berada di wilayah perkotaan di bagian utara Kabupaten Garut, serta sebagian kecil dan tersebar di bagian selatan Kabupaten Garut, yang direpresentasikan dengan warna coklat pada peta. Perlu dipahami bahwa daerah yang sudah melampaui ambang batasnya bukan berarti mengalami kekeringan, melainkan daerah tersebut harus bergantung ke daerah lain yang belum melampaui ambang batasnya untuk mendapatkan aliran air. Di sisi lain, daerah yang belum melampaui ambang batasnya harus dipelihara agar kondisi tersebut tidak terdegradasi karena daerah tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air di daerahnya sendiri maupun daerah-daerah sekitarnya yang sudah melampaui ambang batas DDLH penyediaan air.



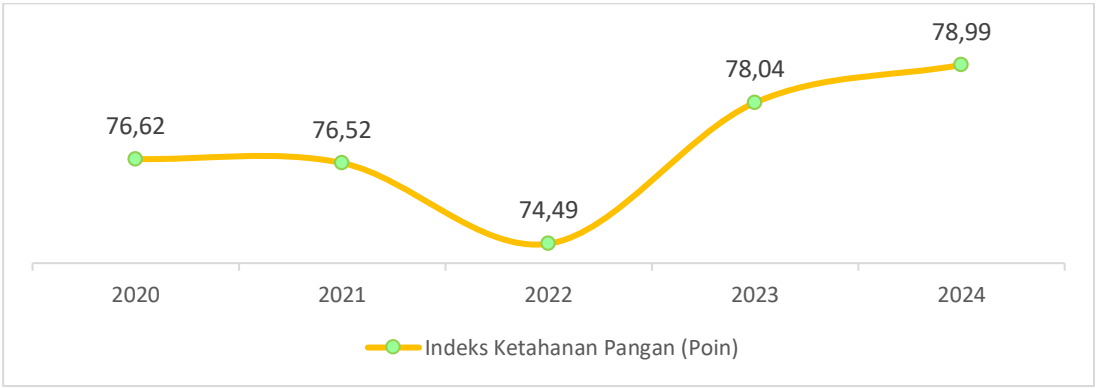
Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.20 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Garut

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka 76,62 dan sedikit menurun menjadi 76,52 di tahun 2021, lalu turun lagi menjadi 74,49 di tahun 2022. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas, atau pemanfaatan pangan, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 dan faktor eksternal lainnya seperti inflasi dan gangguan rantai pasok.



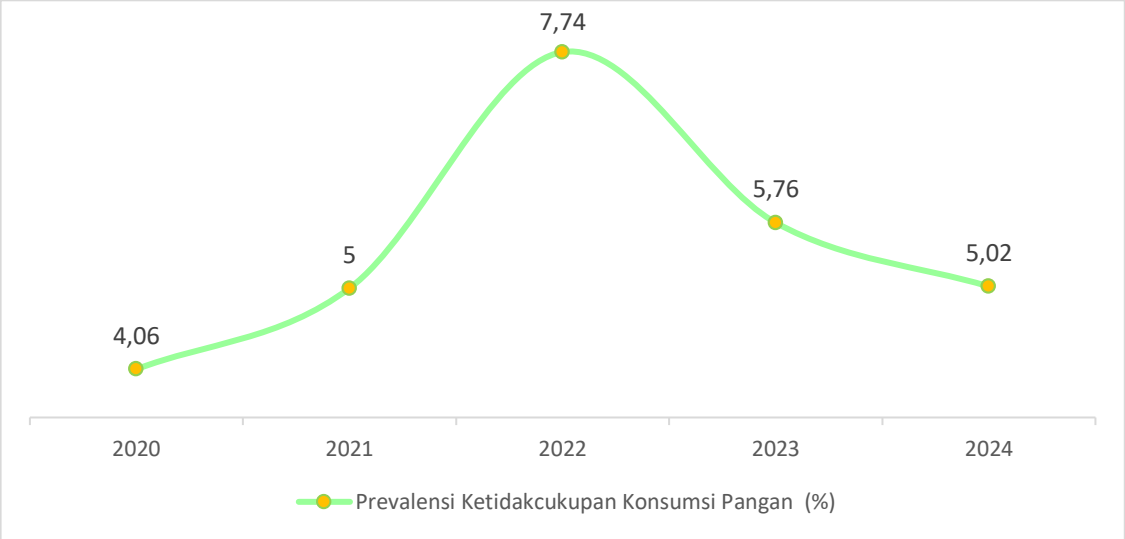
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, data diolah 2025.

Gambar 2.21 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, Indeks Ketahanan Pangan kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 78,04 dan 78,99. Hal ini menandakan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan, penguatan cadangan pangan lokal, serta pengembangan sistem distribusi dan konsumsi pangan yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, Kabupaten Garut berhasil menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakatnya menjelang akhir periode, yang menjadi modal penting dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan. Kinerja indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan berada pada angka 4,06%, namun mengalami kenaikan menjadi 5% pada 2021 dan melonjak signifikan ke angka tertinggi 7,74% pada 2022. Lonjakan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19, gangguan distribusi pangan, serta tekanan ekonomi yang berpengaruh terhadap daya beli dan akses pangan rumah tangga rentan.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, data diolah 2025.

Gambar 2.22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Tahun 2020-2024

Meski demikian, terjadi perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan PKKP menurun menjadi 5,76% di 2023 dan kembali membaik menjadi 5,02% di 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam strategi ketahanan pangan, peningkatan program intervensi gizi,

serta upaya distribusi pangan yang lebih merata oleh Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga kecukupan konsumsi pangan masyarakat, tren perbaikan di akhir periode menunjukkan komitmen Kabupaten Garut dalam mendukung ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Konsumsi Listrik Per Kapita

Pada tahun 2023, jumlah daya terpasang tercatat sebesar 629.043 KW dan meningkat menjadi 661.691 KW pada tahun 2024. Kenaikan kapasitas ini menunjukkan adanya perluasan akses terhadap energi listrik yang mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan itu, jumlah pelanggan listrik juga mengalami pertumbuhan, dari 793.451 pelanggan di tahun 2023 menjadi 825.879 pelanggan di tahun 2024, menandakan peningkatan inklusi energi di berbagai wilayah, termasuk pedesaan.

Di sisi lain, produksi listrik juga mengalami peningkatan dari 1,39 juta KWh pada 2023 menjadi 1,43 juta KWh pada 2024. Meskipun tidak terdapat data dan penjelasan secara eksplisit terkait pertumbuhan konsumsi listrik per kapita, namun dari data yang tersedia dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemanfaatan energi listrik di masyarakat. Kenaikan ini mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi, peningkatan kebutuhan rumah tangga, dan bertambahnya fasilitas umum maupun layanan publik yang mengandalkan energi listrik. Oleh karena itu, pencapaian ini menjadi indikator penting dalam mendukung ketahanan energi daerah yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.

Di Kabupaten Garut, masih terdapat 10.375 rumah yang belum berlistrik yang tersebar di 27 kecamatan dan 89 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Rumah Belum Berlistrik

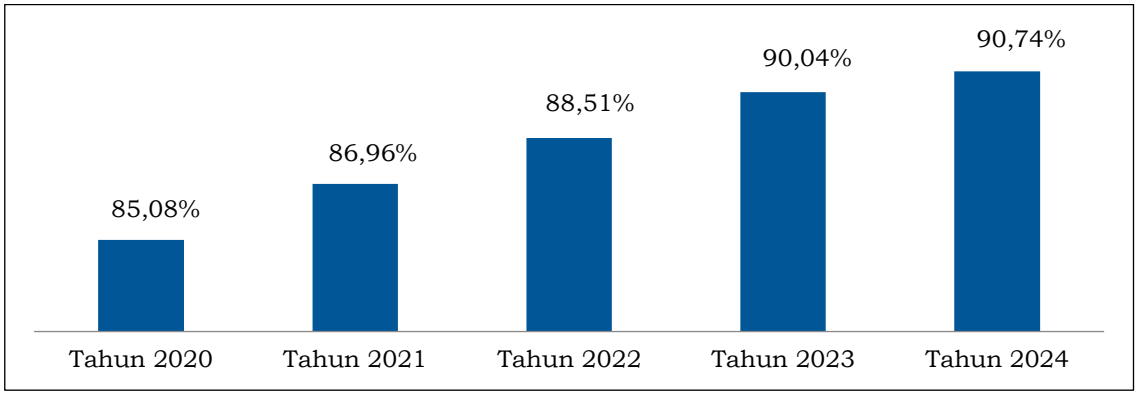
Kecamatan	Jumah Rumah	Desa
Banjarwangi	412	Jayabakti, Tanjungjaya, Wangunjaya
Banyuresmi	3	Cipicung
Bayongbong	239	Panembong
Balubur Limbangan	100	Cigagade
Bungbulang	128	Cihikeu, Mekarbakti, Tegallega
Caringin	516	Cimahi, Purbayani, Sukarame
Cibatu	886	Cibunar, Girimukti, Karyamukti, Kertajaya, Mekarsari, Padasuka, Sindangsuka, Sukalilah
Cibiuk	92	Cibiuk kaler
Cibalong	24	Cigaronggong
Cikajang	135	Simpang
Cikelet	209	Cikelet, Tipar

Kecamatan	Jumah Rumah	Desa
Cilawu	1670	Cilawu, Dawungsari, Karyamekar, Mekarmukti, Mekarsari, Ngamplangsari, Pasanggrahan, Sukamaju, Sukamukti, Sukamurni, Sukatani
Cisewu	90	Karangsewu
Cisompet	58	Margamulya, Neglasari
Cisurupan	74	Situsari
Karangtengah	157	Sindanggalih
Kersamanah	46	Girijaya
Leuwigoong	134	Leuwigoong, Margacinta
Malangbong	405	Campaka, Mekarasih
Pameungpeuk	164	Paas, Pameungpeuk, Sirnabakti
Pamulihan	426	Garumukti, Linggarjati, Pakenjeng, Panawa
Pangatikan	62	Karangsari
Pasirwangi	1408	Barusari, Karyamekar, Padaawas, Padasuka, Pasirwangi, Sarimukti, Sinarjaya
Peundeuy	115	Peundeuy
Samarang	806	Cintakarya, Cintarakyat, Cisarua, Samarang, Sukakarya
Sukawening	840	Mekarhurip, Mekarluyu, Mekarwengi, Pasanggrahan, Sudalarang, Sukahaji, Sukaluyu, Sukamukti, Sukawening
Tarogong Kaler	194	Panjiwangi, Pasawahan
Tarogong Kidul	191	Mekargalih, Sukabakti
Wanaraja	791	Cinunuk, Sindangmekar, Sindangprabu, Sindangratu, Sukamenak, Wanajaya, Wanamekar, Wanaraja, Wanasari
Jumlah	10375	

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, data diolah 2025

4) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

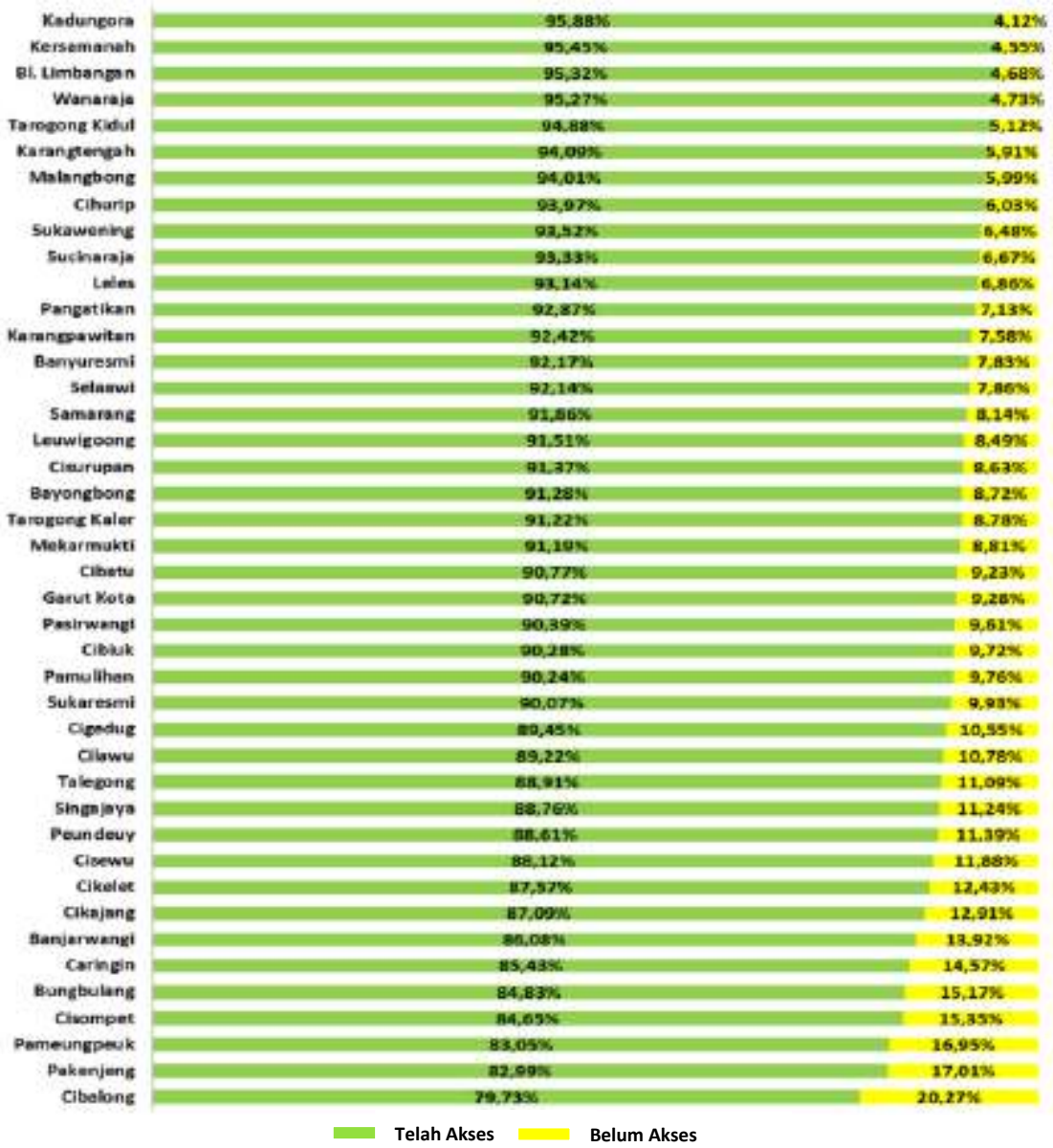
Penyediaan kebutuhan pokok air minum merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum. Capaian kinerja indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Garut menunjukkan progres yang positif, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memperoleh layanan air minum layak. Hingga tahun 2024, sebanyak 2.532.041 jiwa atau 90,74% penduduk telah terlayani oleh sistem penyediaan air minum, naik dari 2.186.750 jiwa (86,96%) pada tahun 2021. Capaian ini tidak terlepas dari pengembangan dan optimalisasi berbagai sistem penyediaan air minum perpipaan, seperti SPAM jaringan perpipaan yang dikembangkan melalui program PAMSIMAS dan layanan PDAM. Adapun persentase layanan akses air minum di Kabupaten Garut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data diolah 2025

Gambar 2.23 Grafik Persentase Layanan Akses Air Minum di Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Peningkatan akses terhadap air siap minum perpipaan di wilayah perkotaan menjadi penting mengingat konsentrasi penduduk dan kebutuhan terhadap layanan dasar yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Adanya jaringan perpipaan yang lebih terstruktur dan cakupan layanan PDAM yang semakin meluas turut mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat perkotaan. Meskipun demikian, kesenjangan antar wilayah masih ditemukan, terutama di beberapa kecamatan yang cakupan air minumnya belum maksimal. Beberapa kecamatan seperti Kadungora, Kersamanah, dan Balubur Limbangan telah mencapai cakupan di atas 95%, sementara kecamatan seperti Cibalong, Pakenjeng, dan Pameungpeuk masih berada di bawah 85%, bahkan Cibalong baru mencapai 79,73%. Ketimpangan ini menandakan perlunya intervensi khusus dan strategi pemerataan pembangunan infrastruktur air minum di wilayah-wilayah yang tertinggal.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun, 2025

Gambar 2.24 Persentase Cakupan Air Minum Per Kecamatan

5) Kapasitas Air Baku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 menguraikan bahwa air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut, asalkan memenuhi baku mutu tertentu agar bisa digunakan sebagai bahan baku air minum.

Secara garis besar rumber-sumber air baku di Kabupaten Garut terdiri dari Air permukaan, air tanah dan mata air. Kedudukan Kabupaten Garut dalam sistem wilayah sungai berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, serta Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Garut terletak terletak pada 2 Wilayah Sungai , yaitu WS Cimanuk-Cisanggarung (WS Strategis Nasional) dan WS Ciwulan-Cilaki (WS Lintas Kabupaten Kota). Jika ditinjau berdasarkan Cekungan Air Tanah di wilayah Kabupaten Garut terdapat 3 cekungan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah Garut tersebar luas di bagian utara wilayah Kabupaten Garut, Cekungan Air Tanah Tasikmalaya tersebar luas di bagian timur wilayah Kabupaten Garut, seperti dijumpai di Kecamatan Cilawu.

Kapasitas Air Permukaan, Kapasitas Air Tanah dan Mata Air Unit air baku sistem ibukota kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 261 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2022-2042 diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.14 Unit Air Baku Sistem Ibukota Kabupaten

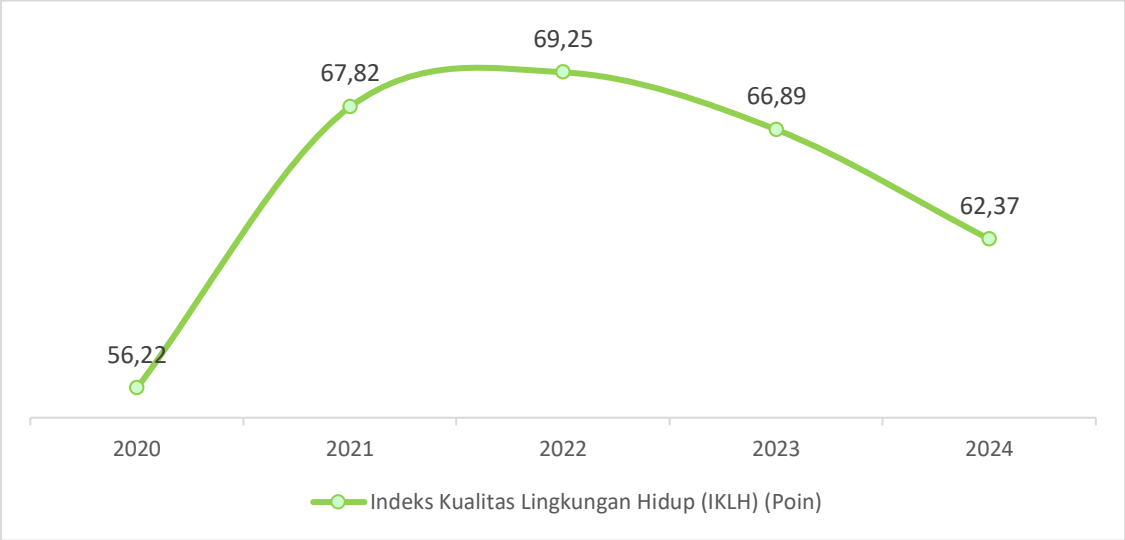
No	Cabang/Unit/IKK	Sumber Air Baku	Sistem Pengaliran	Kapasitas Pengambilan (ltr/dtk)
1	Cabang I Garut Kota	Mata Air Jamban Kulon	Gravitasi	380
		MA Jamban Wetan	Gravitasi	
2	Cabang II Tarogong Kidul	MA Cipulus	Pompa	
3	Cabang III Tarogong Kaler	MA Cibolerang, MA Cirantun	Gravitasi	80
4	Cabang VI Karangpawitan-Cempaka	DW I Cempaka, DW II Cempaka, DW Asem, DW Wates, DW Parabon	Pompa	70
		MA Cipulus	Gravitasi	
5	Cabang VII Cilawu-Mangkurayat	MA Cibulakan	Gravitasi	
		MA Ciraab	Pompa	50
		MA Cipulus	Pompa	20
6	Unit Cibunar	MA Cibuntu (Mangkurayat)	Gravitasi	
Jumlah				600

Sumber : Perumda Tirta Intan, 2021

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Garut selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 56,22 poin, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 67,82 poin dan terus naik hingga mencapai puncaknya sebesar 69,25 poin di tahun 2022. Capaian ini mencerminkan upaya positif pemerintah daerah dalam menjaga kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang menjadi komponen utama dalam perhitungan indeks tersebut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, data diolah 2025.

Gambar 2.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Namun demikian, tren penurunan mulai tampak pada tahun 2023 dengan skor turun menjadi 66,89 poin, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 62,37 poin. Penurunan ini menjadi indikator penting perlunya penguatan kembali upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pengendalian pencemaran, pelestarian sumber daya alam, serta penataan ruang yang ramah lingkungan. Penyebab penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini diantaranya disebabkan oleh Pertumbuhan jumlah penduduk kabupaten Garut sehingga berkorelasi dengan aktivitas penghasil limbah domestik yang mencemari lingkungan dan kebutuhan akan lahan, air dan energi yg meningkat, serta peningkatan jumlah penumpukan sampah dan kurangnya kesadaran lingkungan dari masyarakat.

Pada tahun 2024, data ketercapaian Indeks Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 komponen pembentuk yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan pada Tahun 2024 berdasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten Garut pada Tahun 2024 serta beberapa titik lokasi sampling adalah sejumlah 62,37 poin. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan data pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) berada pada 45,24 poin dengan kategori kurang dan berada pada urutan 18 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada kategori baik yakni mencapai 85,56 poin pada peringkat 15 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dan untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Garut berada pada kategori kurang dan berada pada 48,87 poin. Adapun tren realisasi dari ketiga komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersaji pada tabel berikut:

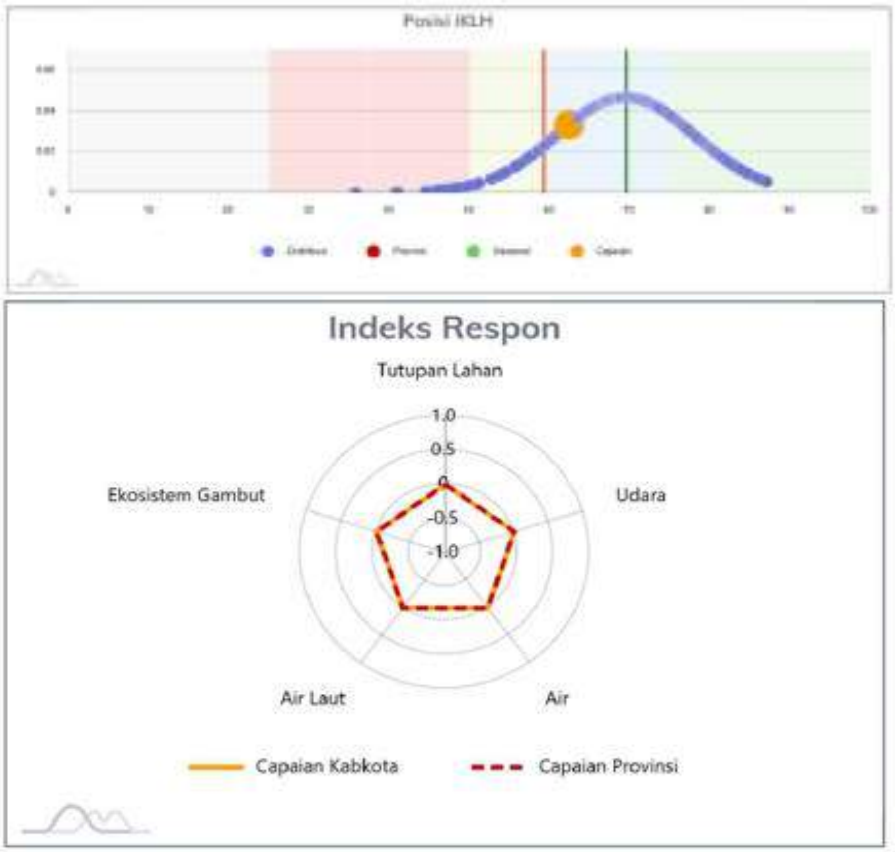
Tabel 2.15 Capaian Tiga Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Jenis Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	51,67	55,00	64,37	47,62	45,24
Indeks Kualitas Udara (IKU)	73,40	90,64	89,18	94,83	85,56
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,48	47,64	47,64	48,32	48,87
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,99	67,82	70,75	66,89	62,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (2025)

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Garut secara tren terus mengalami penurunan, meskipun sempat meningkat pada tahun 2022. Penurunan ini diakhibatkan dalam hal pengelolaan limbah Kabupaten Garut belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ideal, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi polutan seperti *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan Koliform fekal yang dikenal sebagai fecal coli atau bakteri dalam feses (tinja) mencemari sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, penanganan limbah industri kulit belum optimal serta ketaatan pelaku usaha masih rendah dalam hal komitmen pengelolaan lingkungan. Kabupaten Garut masih dihadapkan dengan masalah pemenuhan kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih rendah dari kewajiban minimal 10% dan baru terpenuhi 6%. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca belum optimal karena memerlukan kolaborasi antar sektor. Penanganan lahan kritis kurang efisien dan anggaran belanja yang dikeluarkan tidak sebanding dengan peningkatan IKL (Indeks Kualitas Lahan). Kemudian, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Kepditjen PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025-2029 bahwa terdapat perubahan kebijakan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sehingga secara capaian akan terlihat bahwa terjadi penurunan capaian yang cukup signifikan yang dipengaruhi oleh adanya perumusan baru terhadap perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Jika membandingkan tingkat capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), terlihat bahwa capaian Kabupaten Garut masih berada sedikit di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Adapun gambar perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Gambar 2.26 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dengan Capaian Provinsi

Perbedaan cukup signifikan berdasarkan perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari komponen tutupan lahan. Pada komponen tutupan lahan, capaian Kabupaten Garut relatif sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, meskipun masih terdapat kesenjangan tipis yang menunjukkan bahwa kualitas lahan di Garut belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan terhadap lahan, baik akibat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, urbanisasi, maupun meningkatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan luas tutupan vegetasi.

Dari sisi provinsi, capaian tutupan lahan Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa yang lebih baik karena masih mampu mempertahankan tutupan vegetasi di beberapa wilayah penyangga, termasuk kawasan hutan lindung dan konservasi. Sementara itu, di Kabupaten Garut masih terjadi tantangan berupa deforestasi skala kecil, konversi lahan untuk permukiman, serta degradasi kawasan hulu yang berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan.

Meskipun perbedaan capaian antara Garut dan rata-rata Jawa Barat tidak terlalu jauh, kondisi ini menjadi indikator penting bahwa Kabupaten Garut perlu memperkuat strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya

yang dapat dilakukan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan, penguatan kebijakan tata ruang, serta kolaborasi lintas sektor dan desa. Dengan demikian, meskipun capaian Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Garut sudah mendekati capaian provinsi, masih diperlukan penguatan program-program lingkungan yang lebih terfokus pada perlindungan tutupan lahan. Hal ini penting agar keberlanjutan fungsi ekologis, terutama dalam menjaga kualitas air, udara, dan keseimbangan ekosistem, tetap terjaga dalam jangka Panjang.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum. Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) meningkat dari 575.484 rumah tangga pada tahun 2021 menjadi 627.847 rumah tangga pada tahun 2024. Persentase akses layanan SPALD juga mengalami peningkatan dari 67,20% pada tahun 2021 menjadi 68,53% pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif moderat, capaian ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam pemenuhan hak masyarakat atas sanitasi yang layak dan aman. Adapun capaian rumah tangga yang mendapatkan akses layanan SPALD di Kabupaten Garut pada tahun 2021-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan SPALD Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan SPALD	Rumah Tangga	575.484	599.305	618.202	627.847
Persentase Akses Layanan SPALD	Persentase (%)	67,29	67,69	68,11	68,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

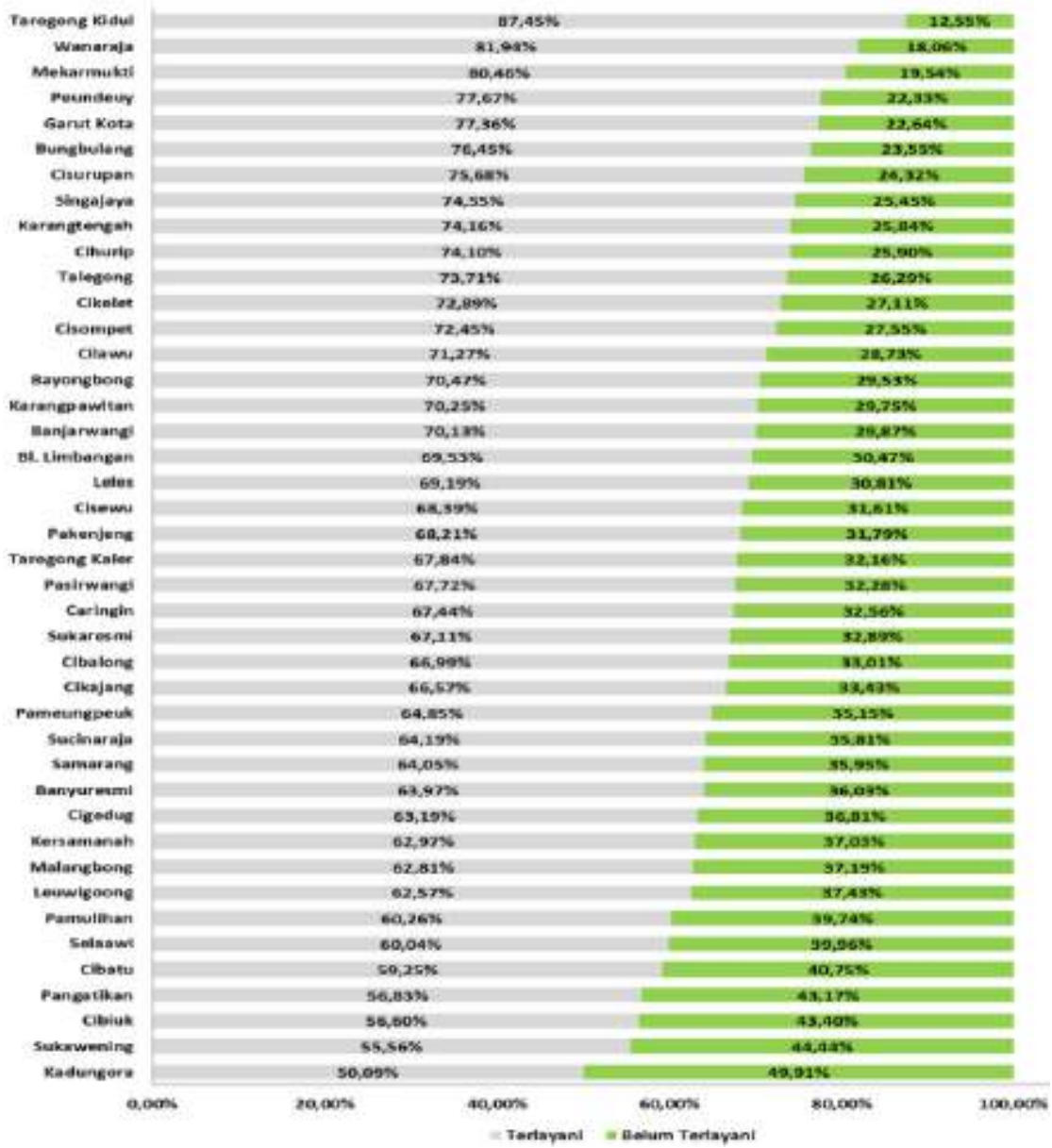
Jenis layanan yang mendominasi adalah penggunaan tangki septik atau cubluk, yang sejak tahun 2021 hingga 2024 mencakup lebih dari 99% rumah tangga. Sementara itu, cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) komunal atau terpusat masih sangat rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 0,25% pada 2021 menjadi 0,53% di tahun 2024. Adapun secara lebih terperinci uraian persentase layanan akses sanitasi tahun 2021-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Persentase Layanan Akses Sanitasi Tahun 2021- 2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
SPAL Komunal/Terpusat	Persentase (%)	0,25	0,32	0,42	0,53
Tangki Septik/Cubluk	Persentase (%)	99,75	99,68	99,58	99,47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Distribusi cakupan sanitasi antar kecamatan juga menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Kecamatan dengan cakupan tertinggi adalah Tarogong Kidul (87,45%), sedangkan yang terendah adalah Kadungora (50,09%). Sebaran ini menandakan bahwa masih banyak wilayah yang memerlukan intervensi dan percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi aman. Oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan dan pemerataan layanan sanitasi aman di seluruh kecamatan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.27 Persentase Cakupan Air Limbah Domestik Per Kecamatan

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasikan per unit per hari dalam satuan berat ataupun volume. Data timbulan sampah diperlukan untuk memperkirakan banyaknya sampah yang dihasilkan oleh setiap sumber. Untuk mengetahui karakteristik timbulan sampah Kabupaten Garut, telah dilakukan sampling di sumber sampah daerah Kabupaten Garut, yang meliputi daerah permukiman dan daerah non permukiman. Jika diuraikan berdasarkan sumber timbulan sampah Kabupaten Garut memiliki 6 (enam) sumber timbulan yang diuraikan sebagai meliputi permukiman, pasar, sekolah, perkantoran, jalan dan penginapan.

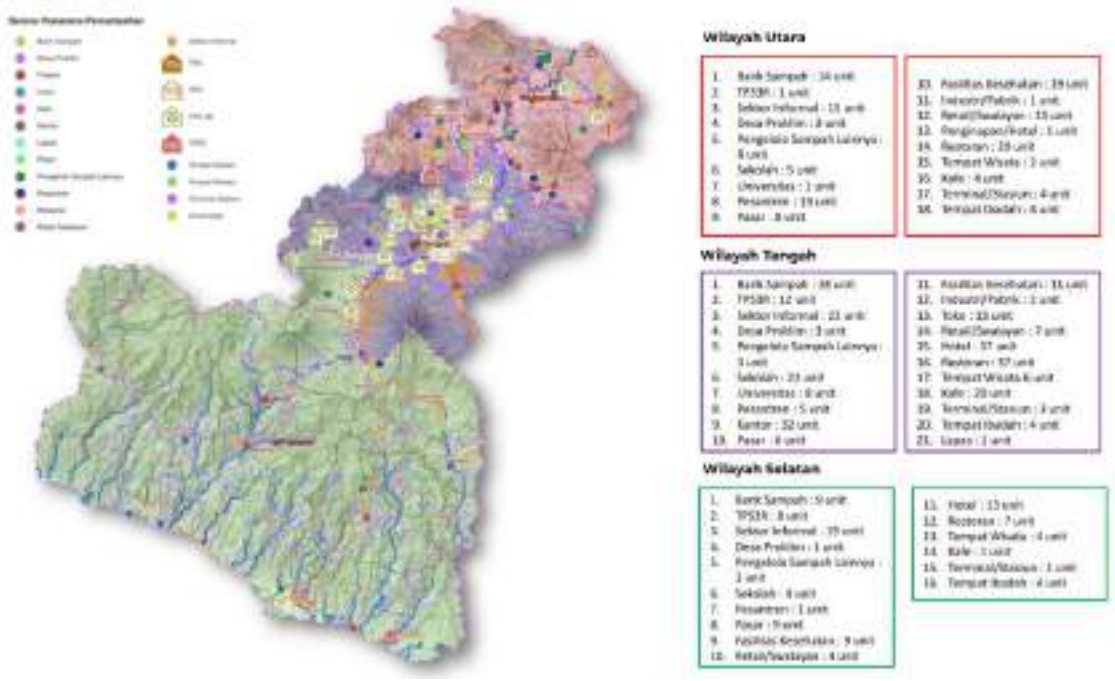
Teknik operasional pengelolaan sampah yang terdiri dan kegiatan pewadahan sampai dengan pemrosesan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan sejak dari sumbernya. Sampah yang berasal dari kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan tempat wisata, fasilitas publik, dan fasilitas lainnya dikumpulkan melalui pewadahan yang sudah disediakan oleh setiap sektor baik menggunakan wadah sampah bambu, stainless, plastik wheel bin dll sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengumpulan dari wadah sampah tersebut dikumpulkan ke TPS seperti bak sampah atau container yang untuk diangkut oleh truk ke TPA. Selain dibawa ke TPA Pasir Bajing sebagian sampah dikelola oleh masyarakat melalui sektor pengelola sampah yang sudah terbentuk di wilayah masing-masing.

Selain penanganan sampah, berbagai upaya pengurangan juga telah dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai fasilitas yang telah dibangun, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, seperti Bank Sampah, TPS3R, pengepul atau lapak, fasilitas daur ulang produk kreatif (Desa Proklim), dan pengelola sampah lainnya.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Garut terbagi kedalam 3 Wilayah Pelayanan (WP) meliputi:

a. WP Utara, terdiri dari 11 kecamatan diantaranya Kecamatan Leles, Kadungora, Balubur Limbangan, Karangtengah, Leuwigoong, Selaawi, Kersamanah, Cibatu, Cibiuk, Sukawening dan Malangbong.
b. WP Tengah, terdiri dari 13 kecamatan diantaranya Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Cilawu, Karangpawitan, Wanaraja, Sucinaraja, Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Cigedug dan Pangatikan.
c. WP Selatan, terdiri dari 18 kecamatan diantaranya Kecamatan Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cihurip, Cibalong, Peundeuy, Singajaya, Banjarwangi, Sukaresmi, Talegong, Pamulihan, Caringin, Bungbulang, Pakenjeng, Cisewu, Mekarmukti, Cisurupan dan Cikajang.

Berikut peta sebaran sarana prasarana persampahan di Kabupaten Garut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2025)

Gambar 2.28 Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana pengurangan sampah di Kabupaten Garut secara keseluruhan terdiri dari 558 titik. Pada wilayah utara terdapat 131 lokasi, wilayah tengah terdapat 339 lokasi dan wilayah selatan terdapat 88 lokasi. Jumlah sarana dan prasarana untuk aktifitas pengurangan sampah sebagian besar berada di wilayah tengah.

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengurangan:
   - Bank Sampah berpotensi memanfaatkan sampah dengan kegiatan 3R yang melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah di sumber melalui pemilahan sampah dan mengembangkan pola insentif, di Kabupaten Garut dan terdapat 53 unit bank sampah dengan 26 unit bank sampah aktif.
   - Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan recycle), merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. TPS 3R termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat. Keberadaan TPS dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat lainnya seperti bank sampah. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan pada tahun 2024, terdapat 21 TPS 3R yang terdata ada di Kabupaten Garut.

- Selain TPS 3R dan bank sampah di atas terdapat pengolahan sampah berjalan pada sektor informal berbasis ekonomi yaitu berupa pelapak/pengepul, terdapat beberapa lokasi lapak daur ulang dan penampungan sampah yang melakukan aktivitas daur ulang sampah. Secara keseluruhan Pengepul/Pelapak di Kabupaten Garut sebanyak 57 orang yang sudah memiliki lapak dan menjadikan sumber mata pencaharian yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

b. Penanganan: Penanganan sampah dimulai dari pemilahan sampah oleh masyarakat di sumbernya, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pengolahan sampah terdekat seperti TPS3R dengan menggunakan armada motor sampah. Selanjutnya, sampah yang tidak dapat diolah akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Garut dilaporkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Berdasarkan data tingkat pengelolaan sampah pada Tahun 2024 periode 2 (dua) tingkat pengelolaan sampah mencapai 35,05% cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tingkat pengelolaan sampah pada tahun 2024 periode 1 yang mencapai 33,85. Meskipun demikian artinya pada tahun 2024 masih terdapat 64,95% sampah di Kabupaten Garut yang tidak terkelola. Adapun capaian tingkat pengelolaan sampah tahun 2021-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Capaian Tingkat Pengelolaan Sampah
Tahun 2021-2024

Keterangan		2021	2022	2023	2024
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (TON)	402.980	405.970	409.465,37	418.263
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (TON)	30.079,65	40.085,03	44.263,19	57.526,80
Persentase Pengurangan (%)		7,46	9,87	10,81	13,75
a	Pembatasan timbulan sampah	469,72	470,43	471,98	1.109,60
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	27.997,85	39.465,93	43.221,59	55.658,92
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	1.612,08	170,33	569,62	758,28
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	73.339,45	81.483,33	89.227,5	89.060
Persentase Pengurangan (%)		18,20	20,07	21,81	21,29
d	Pemilahan/Pengumpulan	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pengangkutan*)				
	1. Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Pengolahan*				
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0,00	0,00	0,00	0,00

Keterangan		2021	2022	2023	2024
	2.Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Pemrosesan akhir	73.339,45	81.483,33	85.226,05	89.060
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	73.339,45	81.483,33	85.226,05	89.060
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III)	103.419,10	121.536,40	129.490,69	146.586,80
Persentase sampah terkelola (%)		25,66	29.94	31,62	35,05
v	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	299.561	284.433	279.975	271.676
Persentase sampah tidak terkelola (%)		74,34	70,05	68,38	64,95

Sumber : Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Garut Tahun 2024
*Keterangan : * data yang masih kosong dalam poin d - f dikarenakan , di Kabupaten Garut memang belum terdapat pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi, serta pengangkutan sampah dari tempat pemilahan yang belum optimal*

Berdasarkan tabel diatas jumlah sampah yang dikelola dalam kurun waktu 2021-2024 terus meningkat mencapai 146.586,80 ton pada tahun 2024, namun demikian masih terdapat 271.676 ton sampah yang tidak dikelola atau mencapai 64,95%. Permasalahan persampahan masih dihadapkan dengan pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce,* dan *Recycle* (TPS3R) yang belum berjalan secara optimal, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, diikuti dengan area TPA yang masih belum ideal mengakibatkan sering terjadinya kebakaran di area TPA yang juga menyebabkan longsor pada bangunan *leachate*/air lindi.

Pengurangan sampah dipengaruhi oleh pembatasan timbulan sampah yaitu sampah yang terkelola dari sekolah adiwiyata dan sumber sampah lain seperti restoran, hotel, pasar tradisional. Kegiatan pemanfaatan sampah di Kabupaten Garut dilakukan oleh fasilitas pengolahan sampah seperti Bank Sampah, TPS3R (anorganik), pelapak daur ulang, dan daur ulang produk kreatif (*Ecovillage*). Kegiatan daur ulang sampah di Kabupaten Garut telah dilakukan di TPS3R yang memiliki fasilitas pengomposan sampah, dan daur ulang produk kreatif (Pro Iklim). Penanganan sampah di Kabupaten Garut digambarkan dengan jumlah sampah yang masuk ke TPA Pasir Bajing. Dalam upaya pengelolaan sampah di Daerah Aluran Sungai (DAS) salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah melalui pembentukan *eco village* dan beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah.

2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca dipengaruhi oleh beberapa sektor meliputi Sektor Kehutanan dan Lahan (FOLU - *Forestry and Other Land Use*), Sektor Energi, Sektor Pertanian dan Sektor Limbah. Sektor limbah, khususnya sampah domestik, merupakan kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Kabupaten Garut, menempati urutan tertinggi setelah kebakaran, energi, dan perubahan penggunaan lahan/kehutanan.

Peningkatan jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta pola konsumsi masyarakat, diprediksi akan terus meningkatkan timbulan sampah dan limbah domestik, yang berpotensi menaikkan tingkat emisi GRK dari sektor ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Garut memiliki komitmen kuat untuk melakukan inventarisasi, mitigasi, dan adaptasi emisi GRK dari sektor limbah domestik sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Pada periode 2020-2024, data emisi GRK Kabupaten Garut menunjukkan tren kenaikan berdasarkan skenario BAU, yang mencerminkan kondisi tanpa upaya mitigasi spesifik yang menghasilkan penurunan emisi pada periode 2020-2024. Adapun secara lebih terperinci capaian emisi GRK limbah padat dan cair tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Emisi GRK Limbah Padat Domestik (BAU) dan Emisi GRK Limbah Cair Domestik (BAU) (dalam $GgCO_{2eq}$)

Tahun	Emisi GRK Limbah Padat Domestik (BAU) (dalam $GgCO_{2eq}$)	Emisi GRK Limbah Cair Domestik (BAU) (dalam $GgCO_{2eq}$)
2020	317,63	52,80
2021	319,97	55,06
2022	325,33	49,23
2023	329,55	54,70
2024	333,83	55,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (2025)

Emisi GRK dari sektor limbah domestik di Kabupaten Garut sebagian besar berasal dari :

a. Limbah Padat Domestik: Merupakan kontributor utama, menyumbang sekitar 85,75% dari total emisi GRK limbah domestik pada proyeksi tahun 2029 dalam skenario *Business as Usual* (BAU). Emisi dari limbah padat ini dihasilkan melalui beberapa jenis pengelolaan Emisi CH4 dari pengelolaan sampah secara *Open Dumping* di TPA Pasir Bajing, Emisi CH4 dan N2O dari pengelolaan sampah secara pengomposan di TPS 3R, dan Emisi CH4, N2O, dan CO2 dari pengelolaan sampah dengan cara dibakar (Open Burning).
b. Limbah Cair Domestik: Menyumbang sekitar 14,25% dari total emisi GRK limbah domestik pada proyeksi tahun 2029 dalam skenario BAU. Emisi dari limbah cair domestik ini terutama terdiri dari CH4 dan N2O.

Penting upaya mitigasi yang dirancang untuk secara signifikan menurunkan emisi GRK baru diproyeksikan memberikan dampak penurunan mulai tahun 2025. Hal ini terlihat jelas dari perbandingan data antara skenario BAU dan skenario Mitigasi dalam dokumen, di mana nilai emisi GRK untuk tahun 2019 hingga 2024 adalah identik antara kedua skenario tersebut. Ini menunjukkan bahwa periode 2020-2024 merupakan fase identifikasi masalah, inventarisasi, dan

perencanaan komprehensif untuk aksi mitigasi di masa mendatang. Capaian nyata pada tahun 2024 adalah, dalam konteks penurunan emisi GRK, adalah terlaksananya studi dan penyusunan laporan "Inventarisasi, Mitigasi, dan Adaptasi Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Limbah Domestik" itu sendiri. Laporan ini menjadi pedoman strategis bagi Kabupaten Garut untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi yang terukur. Rekomendasi yang muncul dari laporan ini meliputi penetapan peraturan daerah tentang pelaporan data aktivitas sumber emisi GRK secara rutin, pembangunan portal daring untuk pelaporan, dan penyusunan rencana aksi mitigasi prioritas dengan anggaran spesifik. Dengan implementasi upaya mitigasi yang terencana mulai tahun 2025, Kabupaten Garut menargetkan penurunan emisi GRK yang substansial. Upaya mitigasi difokuskan pada:

- Peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan serta pengelolaan sampah di TPA;
- Peningkatan angka pemanfaatan kembali sampah/limbah padat yang terbentuk;
- Pengangkatan/pemindahan lumpur yang mengandung Nitrogen pada limbah cair domestik.

Sedangkan untuk sektor pertanian dan peternakan telah dilaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui :

- Sektor Pertanian :
  - Penggunaan pupuk pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, penerapan budidaya padi hemat air, mendorong para petani untuk tidak membakar jerami / sisa tanaman lainnya penerapan pertanian terpadu (*integrated farming system*) serta pengolahan sisa tanaman (misal dibuat pupuk kompos, pupuk organik cair dll),
  - Kegiatan SL/sekolah lapang gerakan tani *pro organic* (Genta Organik) dengan salah satu yang telah berjalan pada tahun 2024 adalah Genta Organik komoditas padi di Balai Penyuluhan Pertanian Cilawu, Genta Organik komoditas sayuran di Balai Penyuluhan Pertanian Wanaraja, Genta Organik komoditas bio farmaka di Balai Penyuluhan Pertanian Balubur Limbangan;
- Sektor Peternakan :
  - Program Pakar Cinta: penggunaan pakan berkualitas tinggi dan mudah dicerna guna efisiensi pakan
  - Penggunaan pakan fermentasi (silase) : silase dapat meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi produksi metana
  - Penerapan sistem pertanian terpadu : untuk untuk merumput di lahan pertanian/diberi pakan sisa panen. Kororan ternak digunakan sebagai pupuk dan pengolahan limbah kotoran ternak dijadikan kompos.

Sedangkan dari sektor energi telah dilaksanakan upaya pengujian emisi gas buang dan penggunaan armada transportasi publik. Adapun secara lebih terperinci jumlah kendaraan bermotor wajib uji tahun 2021-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.20 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Garut Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan (Unit)	11.497	10.983	7.916	8.243

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun (2025)

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1) Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Perubahan iklim global pada kurun waktu 2020-2024 ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan berbagai dampak negatif yang terasa di seluruh dunia. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan instrumental, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55°C di atas tingkat pra-industri. Peningkatan suhu ini tentunya turut berpengaruh terhadap suhu rata-rata Indonesia termasuk di Kabupaten Garut. Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang antara lain ditimbulkan oleh industri, transportasi, pertanian, peternakan dan rumah tangga. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali lagi ke permukaan bumi.

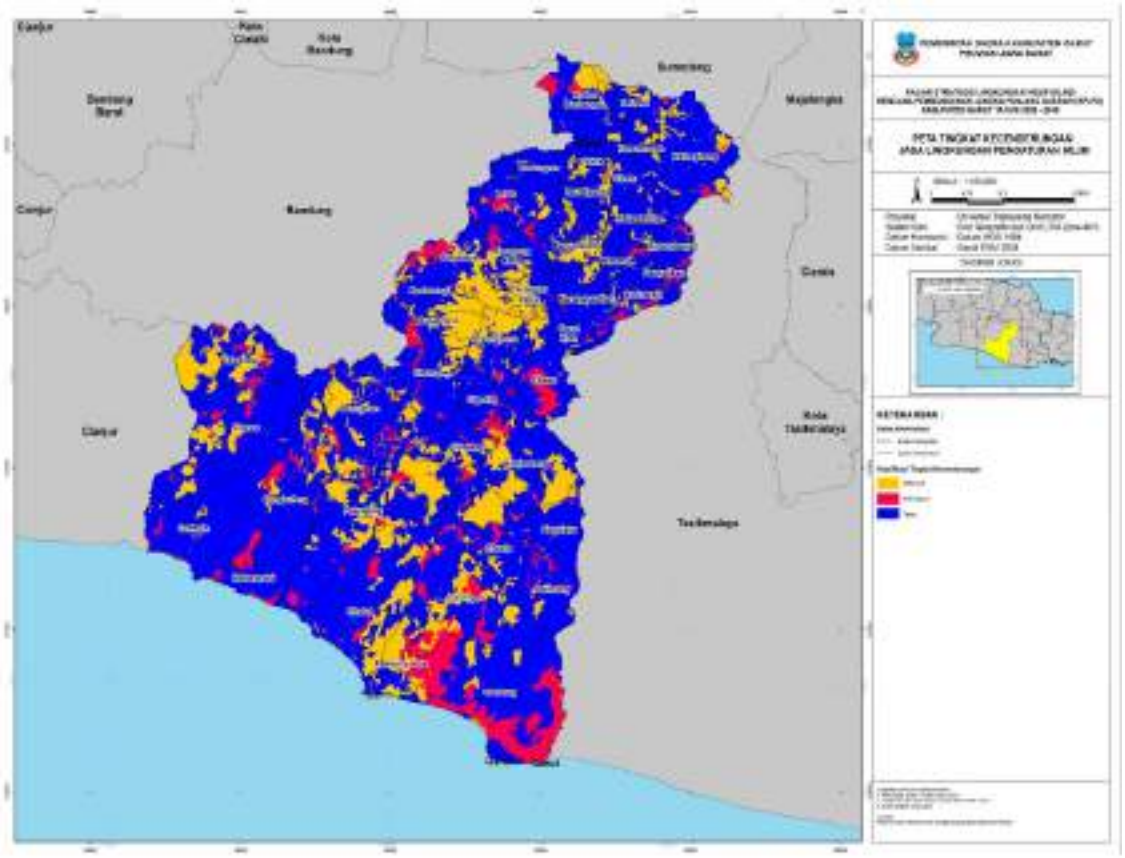
Selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan pengaturan iklim, maka penting melakukan analisis kecenderungan kinerja jasa lingkungan pengaturan iklim. Kecenderungan ini dianalisis dengan melakukan perbandingan antara tutupan lahan tahun 2006 dengan tutupan lahan tahun 2022. Adapun klasifikasi tingkat kecenderungan jasa lingkungan pengaturan iklim dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu meningkat, menurun dan tetap. Dari ketiga klasifikasi tersebut didominasi oleh kelas di tingkat tetap dengan luasan sebesar 232.684,41 Ha. Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim tersaji dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.21 Klasifikasi Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

No	Kecamatan	Klasifikasi Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Ha)			Luas Total (Ha)
		Meningkat	Menurun	Tetap	
1	Banjarwangi	253,28	3.736,39	8.178,20	12.167,87
2	Banyuresmi	216,44	1.259,58	3.340,98	4.817,00

No	Kecamatan	Klasifikasi Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Ha)			Luas Total (Ha)
		Meningkat	Menurun	Tetap	
3	Bayongbong	118,22	1.895,30	2.631,10	4.644,62
4	Bl. Limbangan	891,70	2.426,23	7.698,24	11.016,17
5	Bungbulang	1.804,25	1.788,56	13.386,99	16.979,79
6	Caringin	280,00	177,91	10.987,40	11.445,31
7	Cibalong	7.401,89	1.161,30	13.053,78	21.616,97
8	Cibatu	14,33	426,56	3.385,53	3.826,42
9	Cibiuk	18,08	258,52	1.879,01	2.155,62
10	Cigedug	181,07	53,06	3.097,44	3.331,57
11	Cihurip	407,76	539,29	4.519,18	5.466,23
12	Cikajang	608,66	3.466,45	6.650,47	10.725,59
13	Cikelet	672,36	4.082,14	12.899,42	17.653,92
14	Cilawu	1.362,70	878,42	5.757,05	7.998,17
15	Cisewu	526,16	2.248,85	13.298,55	16.073,56
16	Cisompet	2.749,62	3.331,29	11.194,80	17.275,71
17	Cisurupan	701,87	1.503,30	6.978,82	9.184,00
18	Garut Kota	41,68	275,76	2.691,71	3.009,15
19	Kadungora	0,00	112,81	3.946,19	4.059,00
20	Karangpawitan	189,22	397,87	4.723,34	5.310,44
21	Karangtengah	265,80	92,00	2.724,14	3.081,94
22	Kersamanah	3,99	335,31	2.098,36	2.437,66
23	Leles	676,18	783,20	5.923,68	7.383,07
24	Leuwigoong	31,68	437,35	1.899,53	2.368,55
25	Malangbong	316,49	1.161,13	8.956,02	10.433,63
26	Mekarmukti	173,00	10,73	4.142,09	4.325,82
27	Pakenjeng	891,49	5.479,78	12.792,03	19.163,30
28	Pameungpeuk	675,95	2.299,10	1.763,09	4.738,13
29	Pamulihan	535,83	2.711,34	9.524,12	12.771,29
30	Pangatikan	139,61	99,50	1.815,43	2.054,54
31	Pasirwangi	360,45	1.564,22	3.702,01	5.626,68
32	Peundeuy	351,92	317,55	4.910,09	5.579,56
33	Samarang	654,76	2.407,85	2.800,79	5.863,40
34	Selaawi	101,94	1567,22	4.024,44	5.693,61
35	Singajaya	94,35	297,76	4.883,85	5.275,95
36	Sucinaraja	415,10	375,91	2.447,29	3.238,30
37	Sukaresmi	119,89	1.645,20	1.532,37	3.297,47
38	Sukawening	157,31	359,70	3.204,51	3.721,51
39	Talegong	713,50	3.660,54	6.576,61	10.950,65
40	Tarogong Kaler	353,79	1.083,23	3.747,78	5.184,80
41	Tarogong Kidul	-	1.146,58	819,18	1.965,76
42	Wanaraja	57,56	261,90	2.098,81	2.418,27
Total	Luas (Ha)	25.529,90	58116,68	232.684,41	316.330,99

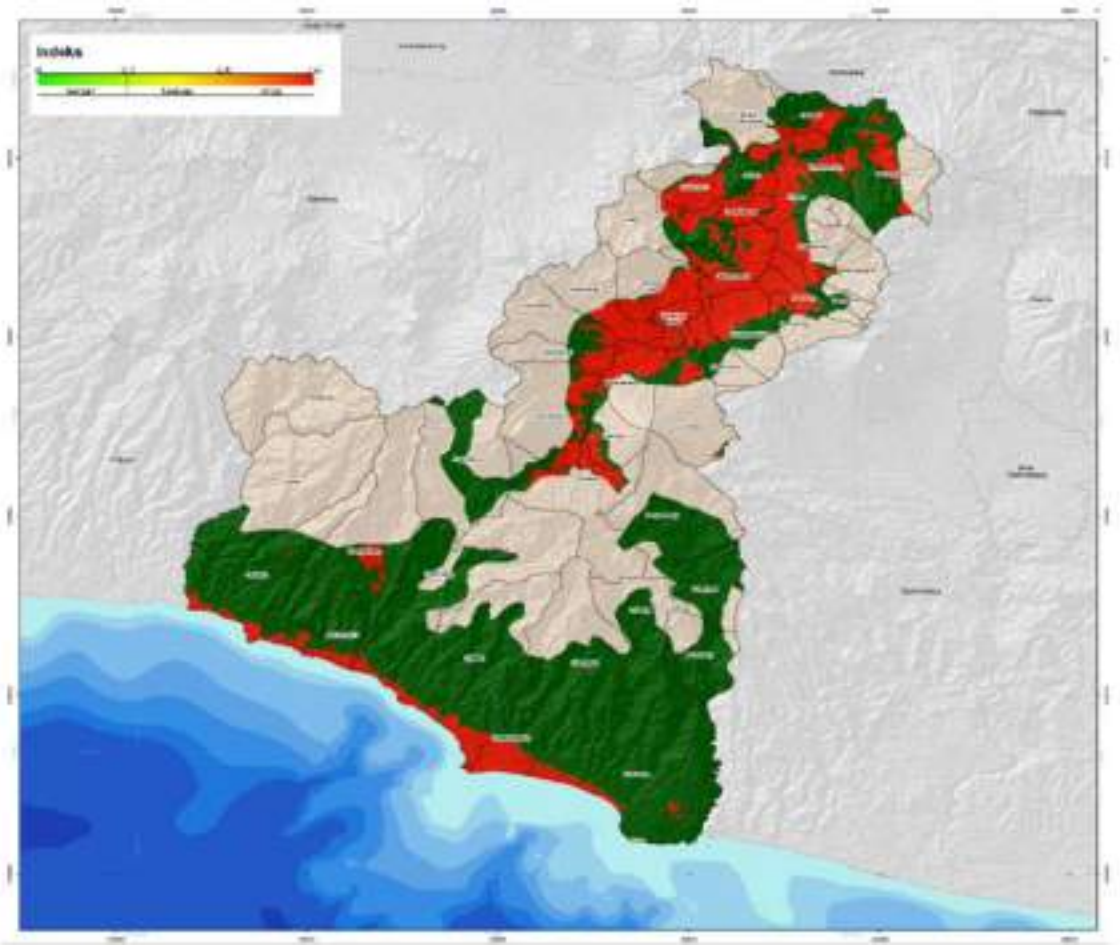
Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029



Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.29 Peta Tingkat Kecenderungan Jasa Lingkungan Iklim di Kabupaten Garut

Perubahan iklim mengakibatkan adanya resiko cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Garut, adapun peta risiko cuaca ekstrim dapat dilihat pada Gambar berikut.

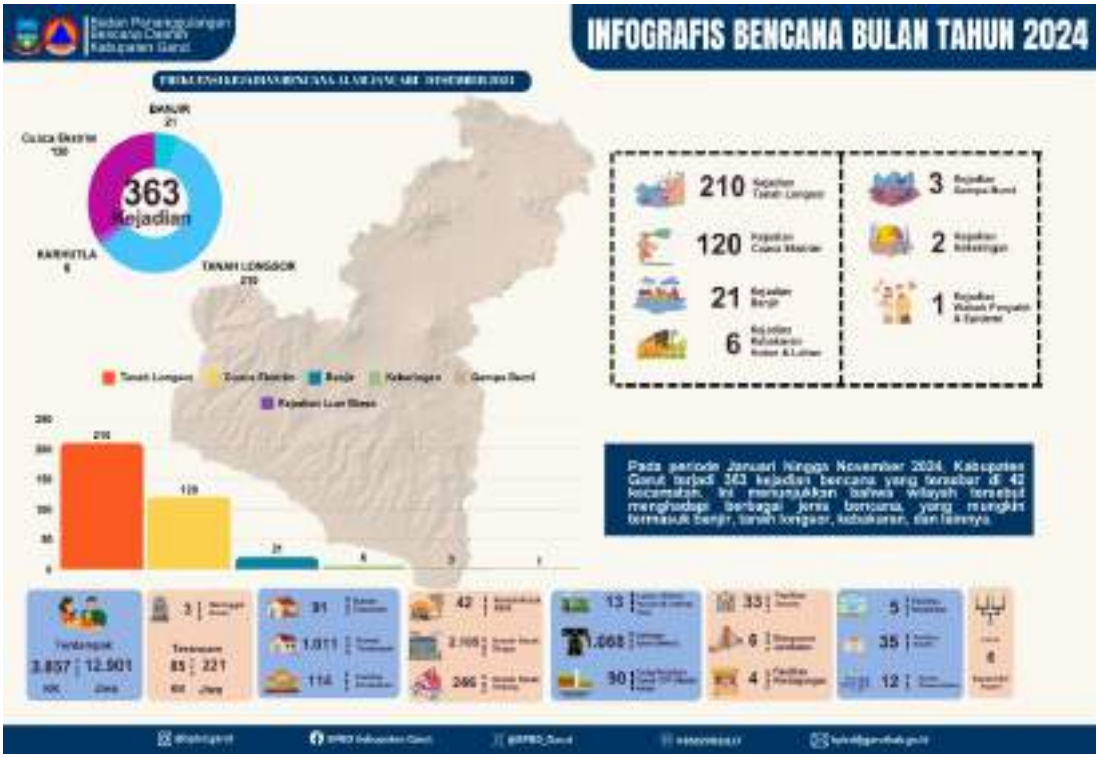


Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.30 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Garut

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karateristik pegunungan dan berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Dari segi kebencanaan, Kabupaten Garut memiliki potensi resiko bencana yang tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Tercatat berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Garut berada pada nilai 134,75 Poin. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan capaian IRB 147,39 pada tahun 2023. Meskipun demikian Garut masih berada pada peringkat ke-6 se-Jawa Barat. Tercatat hingga dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2024 telah terjadi 363 kejadian bencana yang tersebar di 42 kecamatan, kejadian bencana tersebut masih didominasi oleh bencana geo-hidro-meteorologi berupa tanah longsor (210 kejadian), Cuaca Ekstrim (120 kejadian), Banjir (21 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (6 kejadian).

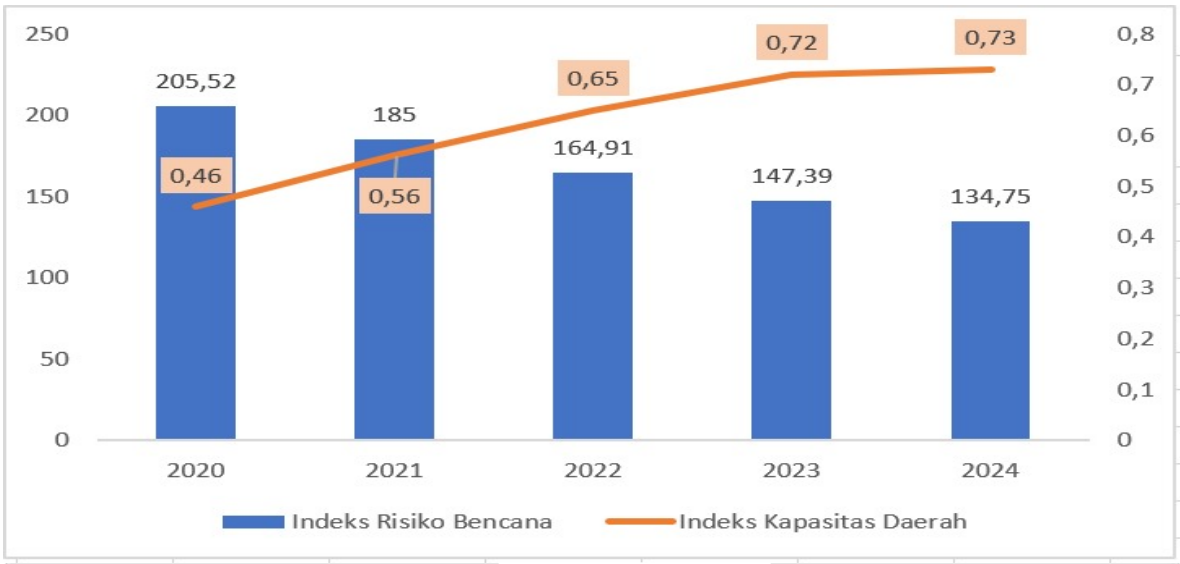


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Tahun 2024

Gambar 2.31 Infromasi Kejadian Bencana Tahun 2024

Berdasarkan kondisi geologinya, beberapa kendala yang perlu diperhatikan, khususnya dalam perencanaan konstruksi bangunan diantaranya bahaya gerakan tanah dengan lokasi terdapat di Kecamatan Cisompet, Singajaya, Talegong, Pakenjeng, Cisurupan, Bayongbong, Cisewu dan Cilawu. Bahaya rawan erosi terdapat di lereng-lereng pegunungan seperti di bagian utara komplek Gunung Mandalawangi, Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Karacak, Gunung Guntur dan Gunung Papandayan serta tebing-tebing sepanjang Sungai Cimanuk.

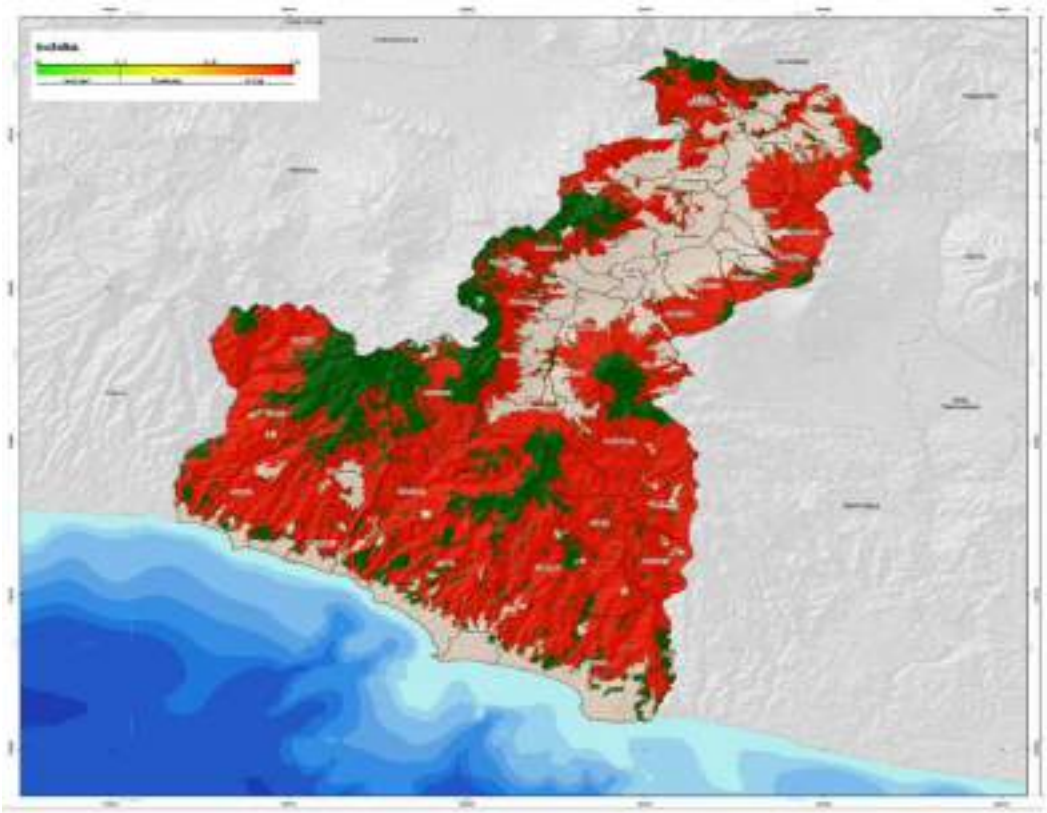
Tren capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana alam tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BNPB *diolah Bappeda Tahun 2025*

Gambar 2.32 Indeks Resiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Garut

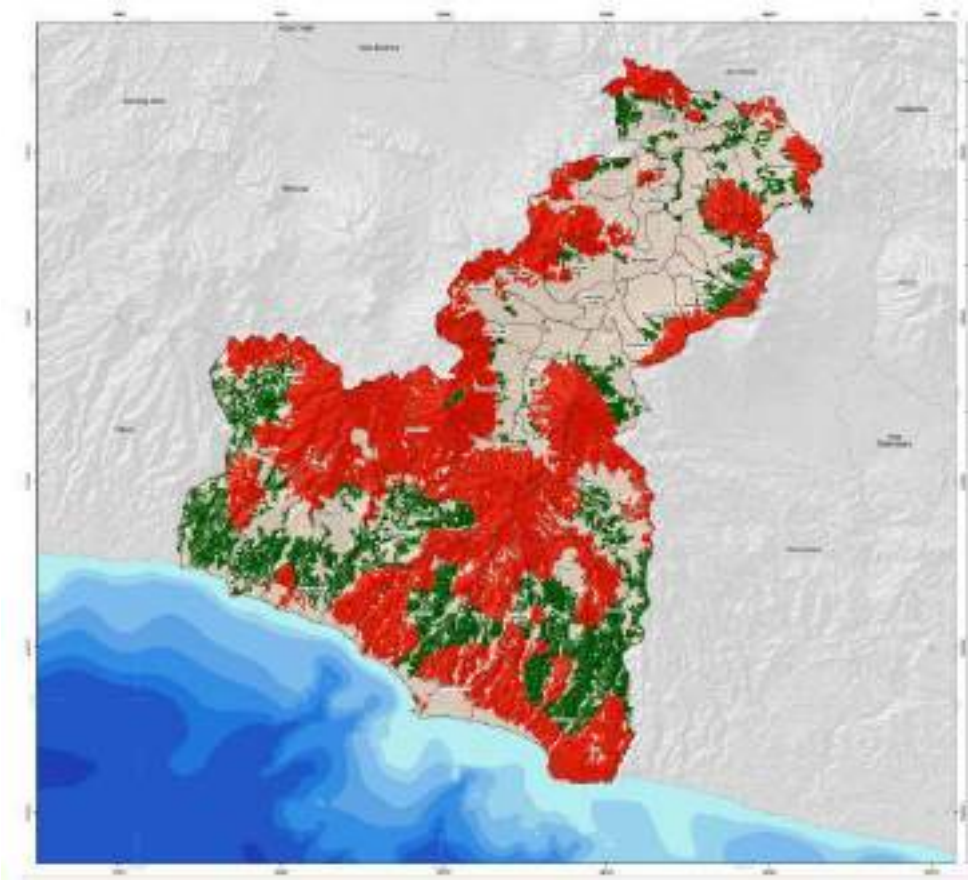
Berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Garut tahun 2024-2054 Kabupaten Garut memiliki wilayah dengan resiko bencana longsor rendah seluas 63.716,56 Ha dan 179.482,80 Ha dengan resiko sedang dengan peta risiko bencana longsor sebagai berikut.



Sumber: Laporan RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054

Gambar 2.33 Peta Resiko Bencana Longsor

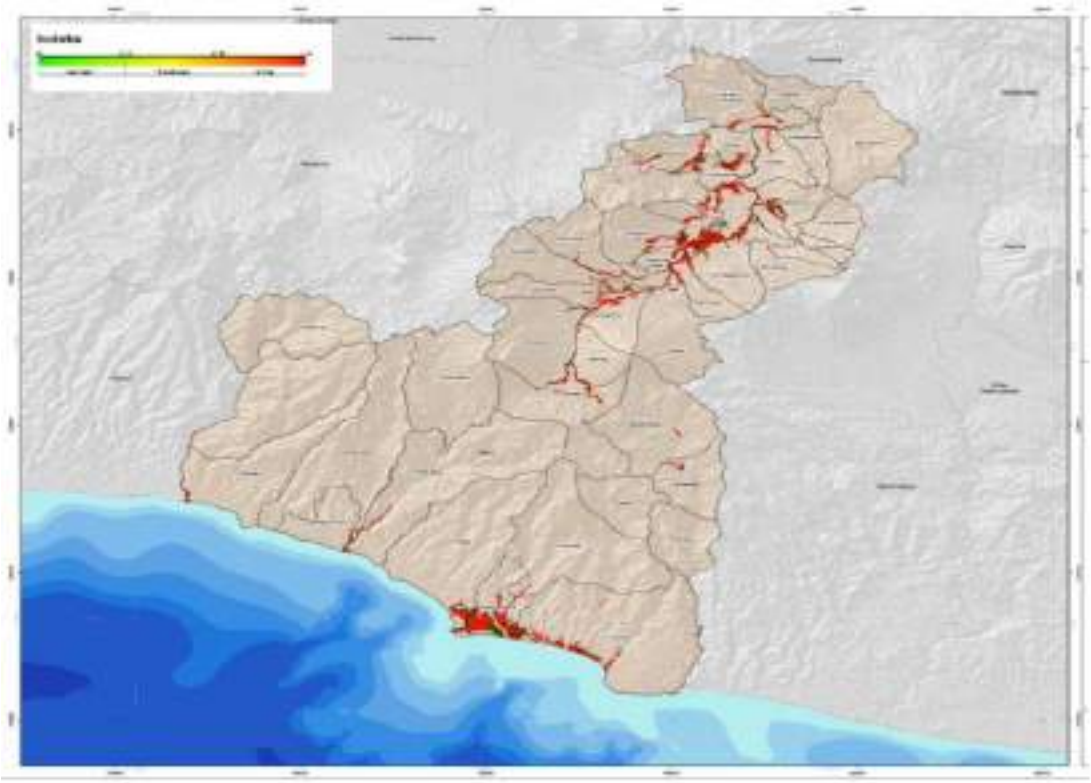
Selain bencana longsor, kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang mengancam di Kabupaten Garut, resiko kebakaran hutan dan lahan dengan resiko rendah seluas 57.358,52 Ha dan resiko sedang seluas 135.497,45 Ha, peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Laporan RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054

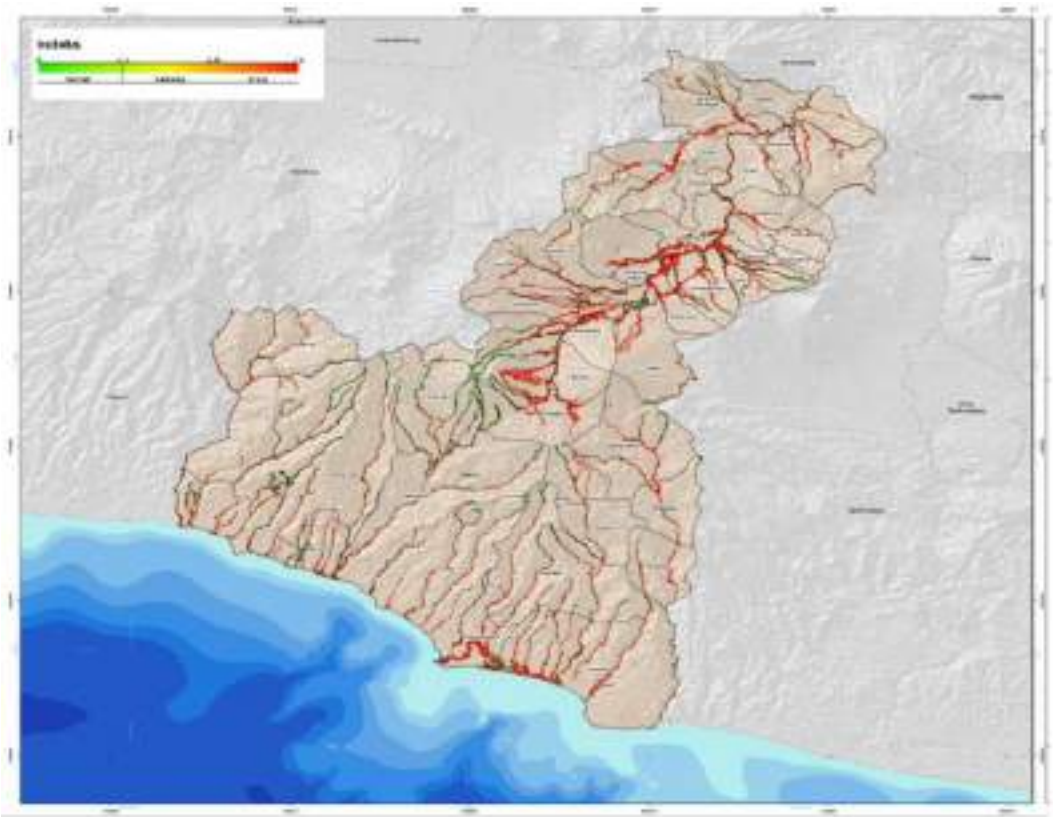
Gambar 2.34 Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Garut

Banjir menjadi bencana yang terhitung sering terjadi di Kabupaten Garut utamanya pada saat memasuki musim penghujan, luas wilayah dengan resiko banjir di Kabupaten Garut mencapai 9.330,82 Ha yang tersebar di 36 Kecamatan dengan risiko rendah 1.511,87 Ha dan risiko sedang 7.818,95 Ha. Adapun peta risiko bencana banjir tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Laporan RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054

Gambar 2.35 Peta Resiko Banjir di Kabupaten Garut

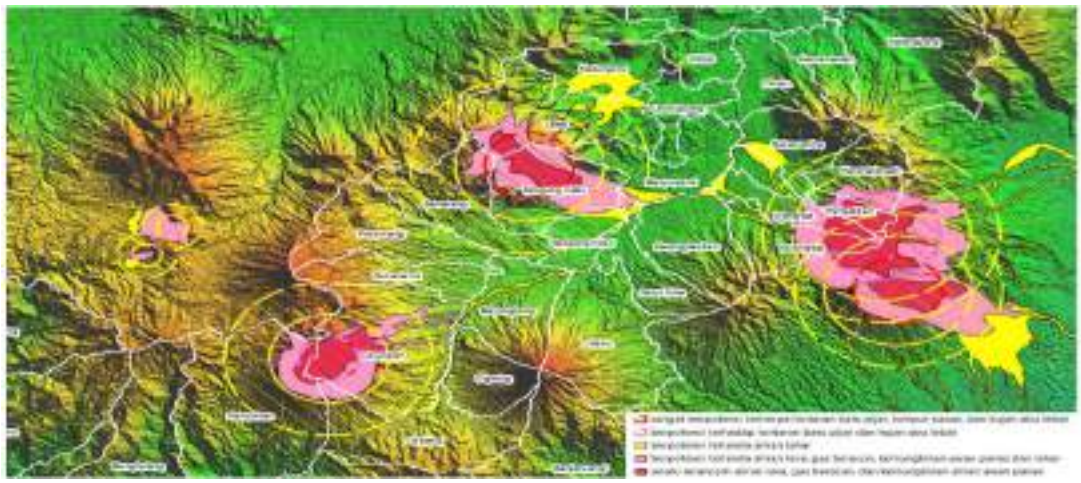


Sumber: Laporan Akhir RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054

Gambar 2.36 Peta Resiko Banjir Bandang di Kabupaten Garut

Banjir bandang juga termasuk bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut bahkan pada tahun 2016 terjadi banjir bandang terbesar di Kabupaten Garut akibat luapan Sungai Cimanuk, luas resiko bencana banjir bandang Kabupaten Garut mencapai 27.788,59 Ha. Adapun peta risiko bencana banjir bandang tersaji pada Gambar berikut.

Garut memiliki 3 (tiga) gunung api aktif yakni Gunung Papandayan, Gunung Guntur dan Gunung Cikuray sehingga masih terdapat potensi rawan bencana letusan gunung api di Kabupaten Garut. Selain wilayah pegunungan dan gunung api, Kabupaten Garut memiliki wilayah pesisir pantai yang membentang di wilayah selatan tidak terhindarkan dari resiko bencana tsunami sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: Laporan Akhir RPPLH Kabupaten Garut Tahun 2024-2054

Gambar 2.37 Peta Potensi Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Garut

2) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh beberapa indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi dalam suatu sistem. Dukungan upaya pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim. SIDIK menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Indeks kerentanan pada SIDIK divisualisasikan dengan unit analisis per kabupaten/kota dan diklasifikasikan ke dalam lima kelas (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi). Berdasarkan Peta indeks kerentanan tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan SIDIK Kabupaten Garut bersama 23 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat lainnya termasuk dalam tingkat kerentanan sedang.



Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029

Gambar 2.38 Indeks Kerentanan Provinsi Jawa Barat

Dari segi resiliensi terhadap perubahan iklim, pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebagai berikut:

1. Lingkungan, melalui penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi hijau;
3. Sosial melalui penanggulangan kemiskinan.

Perlu dilaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, adapun beberapa strategi mitigasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Pemanfaatan energi terbarukan sebagai contoh penggunaan tenaga surya dan biogas;
b) Efisiensi energi dilaksanakan mulai dari penerapan *eco office* di lingkungan perkantoran, yang diharapkan dapat menjadi contoh dan diterapkan oleh masyarakat luas;
c) Rehabilitasi lahan kritis;
d) Pertanian rendah emisi, pertanian merupakan salah satu kontributor dalam gas rumah kaca, penggunaaan pupuk organik, pengelolaan lahan tanpa proses pembakaran serta system pertanian terpadu (*integrated farming*);
e) Pengurangan sampah organik dan plastik, melalui penerapan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*

(TPS3R) dan bank sampah yang telah dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;

f) Pemanfaatan limbah untuk energi melalui pemanfaatan limbah untuk energi mengingat sektor peternakan di Kabupaten Garut yang memiliki potensi yang cukup baik, sehingga berpotensi menghasilkan limbah peternakan yang tentunya dpat digunakan dan diolah menjadi biogas.

Sedangkan untuk strategi adaptasi terhadap perubahan iklim diuraikan sebagai berikut:

a) Penguatan infrastruktur melalui pembangunan tanggul dan drainase serta konservasi sumber daya air;
b) Ketahanan dan Pertanian;
c) Pengelolaan Risiko Bencana;
d) Perlindungan Ekosistem melalui konservasi kawasan lindung.

G. Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Garut digambarkan melalui *trend* jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta proyeksi penduduk tahun 2025-2029.

Tabel 2.22 Kondisi Demografi Kabupaten Garut 2020-2024 (BPS)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.577.354	2.613.540	2.648.990	2.683.665	2.716.950
- Laki-Laki (Jiwa)	1.320.592	1.338.410	1.355.750	1.372.689	1.388.850
- Perempuan (Jiwa)	1.256.762	1.275.130	1.293.240	1.310.976	1.328.100
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		1,40	1,70	1,31	1,24
3. *Sex Ratio* (%)	105,08	104,96	104,83	104,71	104,57
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	829,52	841,16	852,574	863,73	874,44
5. Jumlah Kepala Keluarga (KK)				797.017	794.442

Sumber: Hasil Pengolahan Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Tabel 2. 23 Kondisi Demografi Kabupaten Garut 2020-2024 (SIAK)

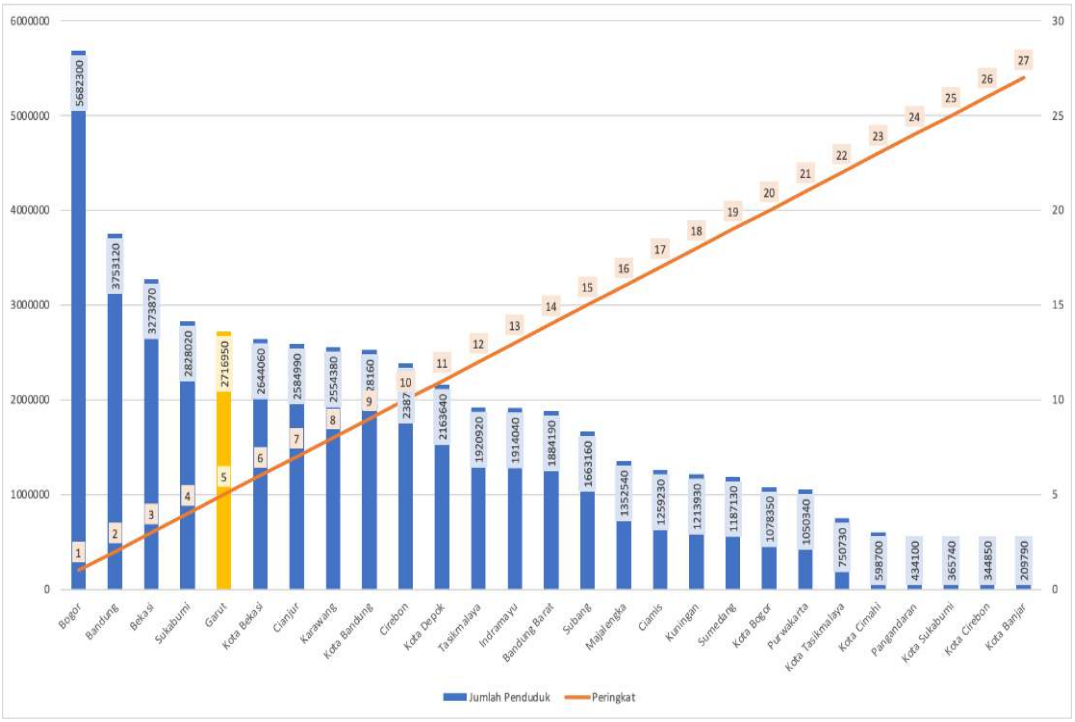
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.514.515	2.550.203	2.759.490	2.753.949	2.851.877
- Laki-Laki (Jiwa)	1.285.225	1.302.006	1.408.225	1.406.452	1.458.601
- Perempuan (Jiwa)	1.229.290	1.248.197	1.351.265	1.347.497	1.393.276

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2. *Sex ratio* (%)	104,55	104,31	104,21	104,38	104,69
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	10,7	1,42	8,20	-0,20	2,60
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	809,29	820,78	888,13	886,35	910,36
5. Jumlah Kepala Keluarga (KK)	849.981	856.511	915.327	907.609	928.917

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut (2025)

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sejumlah 2.716.950 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.388.850 jiwa dan perempuan sebanyak 1.328.100 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sejumlah 131.343 jiwa dari 2.585.607 jiwa pada tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 (Ribu Jiwa)

Kabupaten Garut menempati posisi ke-5 sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut.

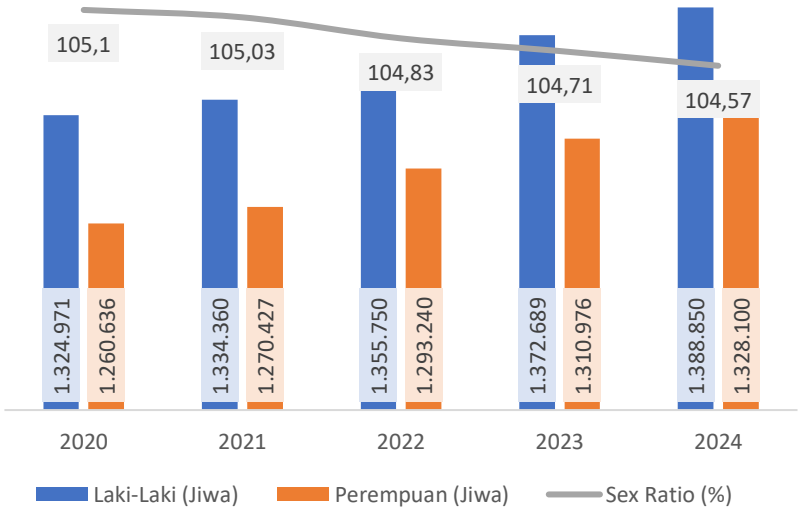
Sementara itu, gambaran demografi berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2024 yaitu 2.851.877 jiwa, meningkat sejumlah 337.362 jiwa dari 2.514.515 jiwa penduduk pada tahun 2020.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut tahun 2020-2024 sebesar 1,13%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,70%.

3) Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*)

Kondisi penggolongan penduduk menurut jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan kuantitas kelompok penduduk laki-laki dan perempuan (*Sex ratio*) menunjukkan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2024 sebesar 104,57 yang berarti ada sekitar 104 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Kondisi *sex ratio* di Kabupaten Garut tergolong baik, yang menunjukan bahwa terdapat keseimbangan produktivitas dalam bekerja karena adanya peran serta perempuan dalam hal pekerjaan membuat mereka mendapatkan pendapatan tersendiri yang dimana juga disebut dengan kesetaraan gender yang berarti perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama dan memiliki kondisi serta potensi yang sama dalam berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi dan sosial.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

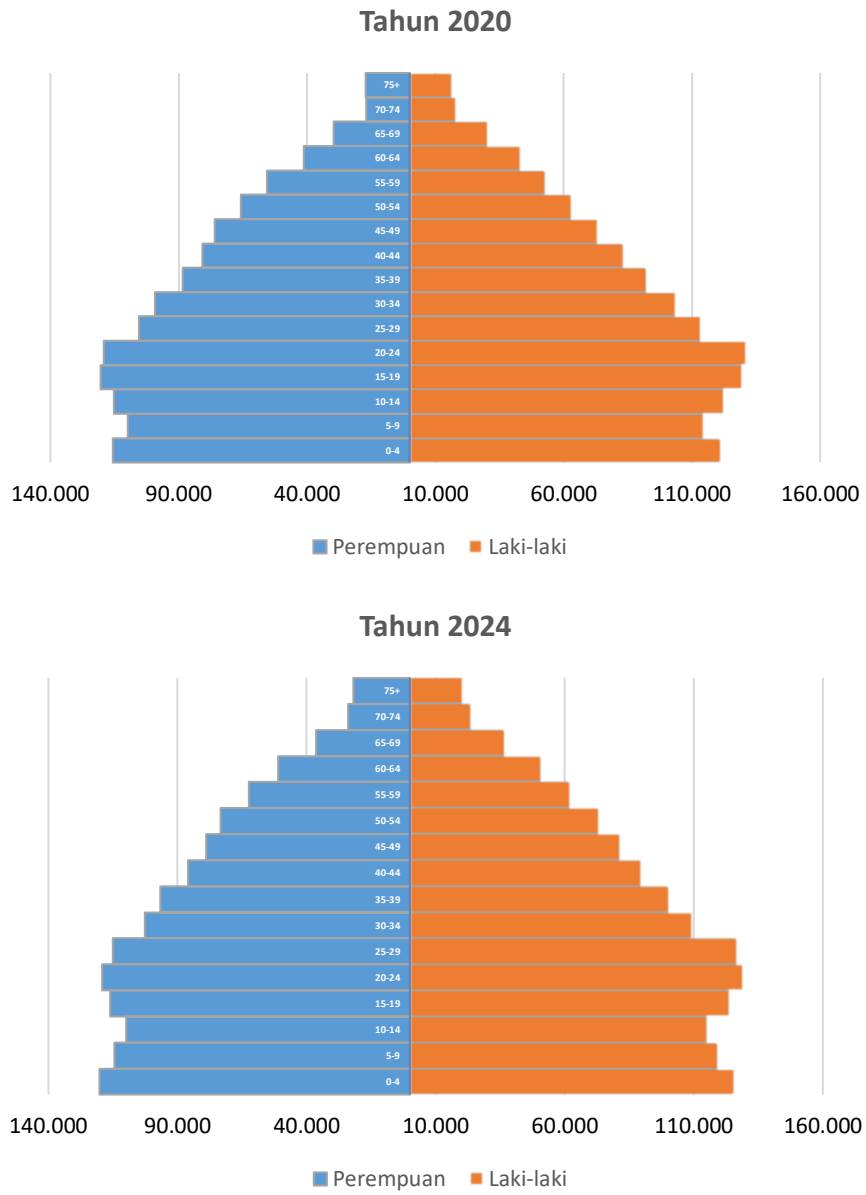
Gambar 2.40 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	236.788	240.790	243.450	244.920	245.860
5-9	224.400	224.820	226.960	230.360	233.787
10-14	237.555	234.240	230.790	227.550	225.055
15-19	249.956	247.740	245.310	242.670	239.745
20-24	250.172	251.790	251.760	250.490	248.454
25-29	219.076	224.200	230.320	236.610	241.791
30-34	202.937	205.610	207.600	209.510	211.960
35-39	180.785	184.650	188.890	193.200	197.141
40-44	165.100	167.340	169.780	172.500	175.511
45-49	152.886	155.250	157.190	158.900	160.620
50-54	132.305	135.860	139.600	143.320	146.711
55-59	112.102	115.680	118.850	121.780	124.747
60-64	84.328	88.610	93.130	97.700	102.035
65-69	60.158	63.310	66.460	69.680	73.109
70-74	35.164	38.050	41.150	44.410	47.832
75+	33.642	35.600	37.750	40.090	42.592
Jumlah	2.577.354	2.613.540	2.648.990	2.683.690	2.716.950

Sumber: BPS Hasil Long Form SP 2020, 2025.



Gambar 2.41 Perbandingan Piramida Penduduk Tahun 2020 dan Tahun 2024

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2024 mencapai 2,71 Juta jiwa. Penduduk usia produktif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, namun demikian penduduk non-produktif atau yang berusia lanjut yakni 70 tahun sampai 75 tahun keatas mengalami peningkatan, sehingga *dependency ratio* atau rasio ketergantungan menjadi 46,92 dengan kata lain penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia non-produktif.

5) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Garut tahun ke tahun semakin meningkat hal ini dapat terlihat dari nilai kepadatan penduduk pada tahun

2024 yang mencapai 874,44 jiwa/km^2 sedangkan pada tahun 2020 mencapai 832,17 jiwa/km^2. Peningkatan kepadatan penduduk umumnya terjadi karena kombinasi dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti laju pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk, yang saling berinteraksi. Peningkatan jumlah penduduk, baik melalui kelahiran maupun migrasi, akan lebih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki faktor pendorong seperti ekonomi yang berkembang, infrastruktur yang baik, dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

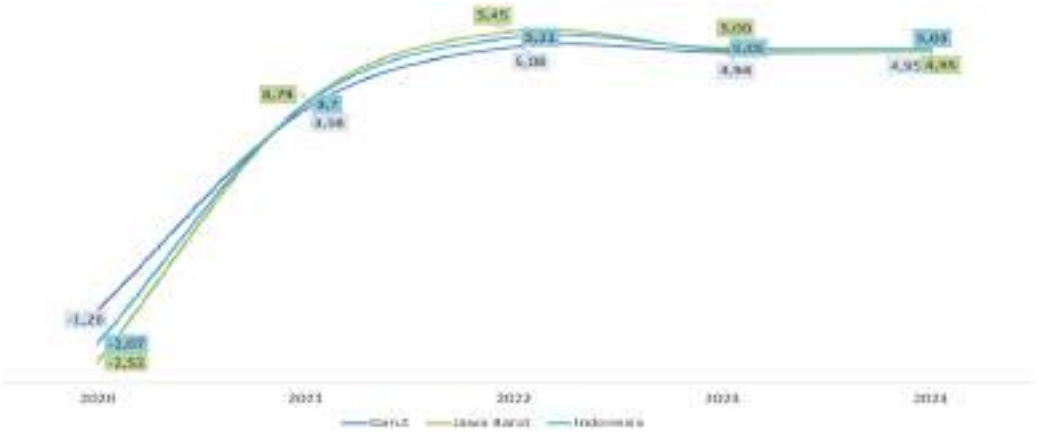
Selama periode 2020-2024, nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi Kabupaten Garut yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari Rp 58,04 Trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 78,83 Trilyun pada tahun 2024. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.25 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB (Rp Juta)		Laju PDRB (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
2020	58.043.000,00	38.598.150,00	0,29	-1,26
2021	60.836.770,00	39.981.190,00	4,81	3,58
2022	66.590.620,00	42.012.960,00	9,46	5,08
2023	72.229.229,84	44.087.224,11	8,47	4,94
2024	78.825.140,00	46.270.920,00	9,13	4,95

Sumber : BPS Kabupaten Garut, diolah Bappeda Tahun 2025

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Garut selama periode 2020-2024 juga mengalami peningkatan dari Rp. 38,60 Trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 46,27 Trilyun pada tahun 2024. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan.

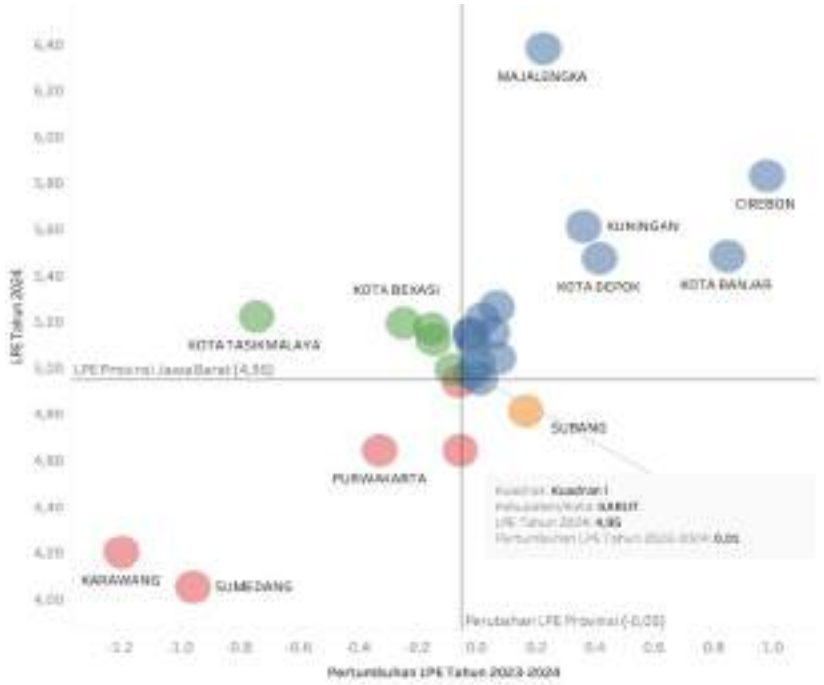


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.42 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Garut menunjukkan kinerja yang cukup positif, mencerminkan ketangguhan daerah dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Garut mengalami kontraksi sebesar -1,26% (ADHK), seiring dengan perlambatan ekonomi global dan nasional. Namun, pemulihan mulai tampak pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,58%, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 5,08% pada tahun 2022. Tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Garut tetap stabil pada angka 4,94% dan 4,95%, menunjukkan tren yang konsisten dan berada pada level yang kompetitif dibandingkan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Berikut merupakan grafik analisa kuadran yang menjelaskan derajat kompetitif perkembangan perekonomian antar wilayah. Kuadran I menunjukan daerah yang memiliki LPE lebih besar dari capaian Provinsi Jawa Barat (>=4,95%) dan memiliki pertumbuhan yang lebih besar dari Provinsi Jawa Barat (>= -0,05%). Kuadran II menunjukkan daerah yang memiliki LPE lebih besar dari capaian Provinsi Jawa Barat (>=4,95) namun memiliki pertumbuhan yang lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat (<-0,05). Kuadran III menunjukkan daerah yang memiliki LPE lebih kecil dari capaian Provinsi Jawa Barat (<4,95%) namun memiliki pertumbuhan di atas Provinsi Jawa Barat (>=0,05%). Kuadran IV menunjukkan daerah yang memiliki LPE lebih kecil dari capaian Provinsi Jawa Barat (<4,95%) dan memiliki pertumbuhan yang lebih kecil dibanding Provinsi Jawa Barat (<0,05%).

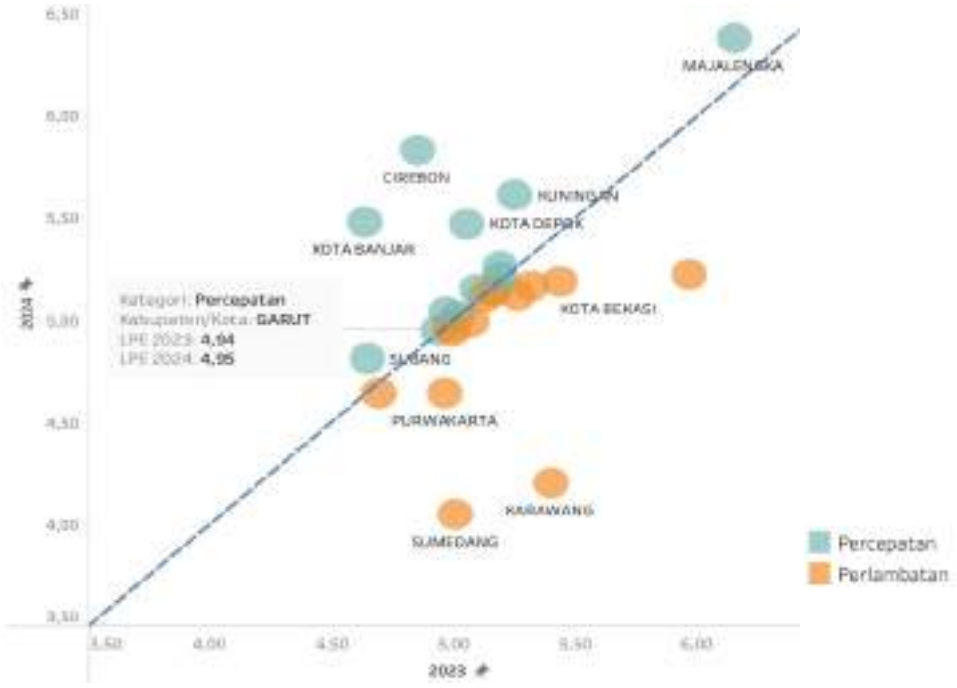


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.43 Kuadran Perbandingan Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024

Kabupaten Garut berada di Kuadran I dengan LPE 4,96%, mengalami percepatan 0,01% dibandingkan tahun sebelumnya dan capaian LPE lebih tinggi dari capaian LPE Provinsi Jawa Barat. Perubahan cuaca secara masif sehingga terjadi pergeseran musim panen mengakibatkan perubahan pencatatan produksi pertanian. Kondisi tersebut membuat proporsi sektor pertanian menjadi menurun pada tahun 2024. Sektor dominan lainnya seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa pendidikan tetap mengalami pertumbuhan sehingga dapat mengkompensasi perlambatan sektor pertanian dan membuat capaian LPE tetap konsisten tumbuh.

Kondisi LPE kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mayoritas mengalami perlambatan, tercatat 15 kabupaten dan kota memiliki angka lebih rendah dari tahun sebelumnya dan 12 kabupaten dan kota memiliki nilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya termasuk Kabupaten Garut di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh kondisi perekonomian nasional dan global terhadap setiap daerah memiliki respon yang berbeda.



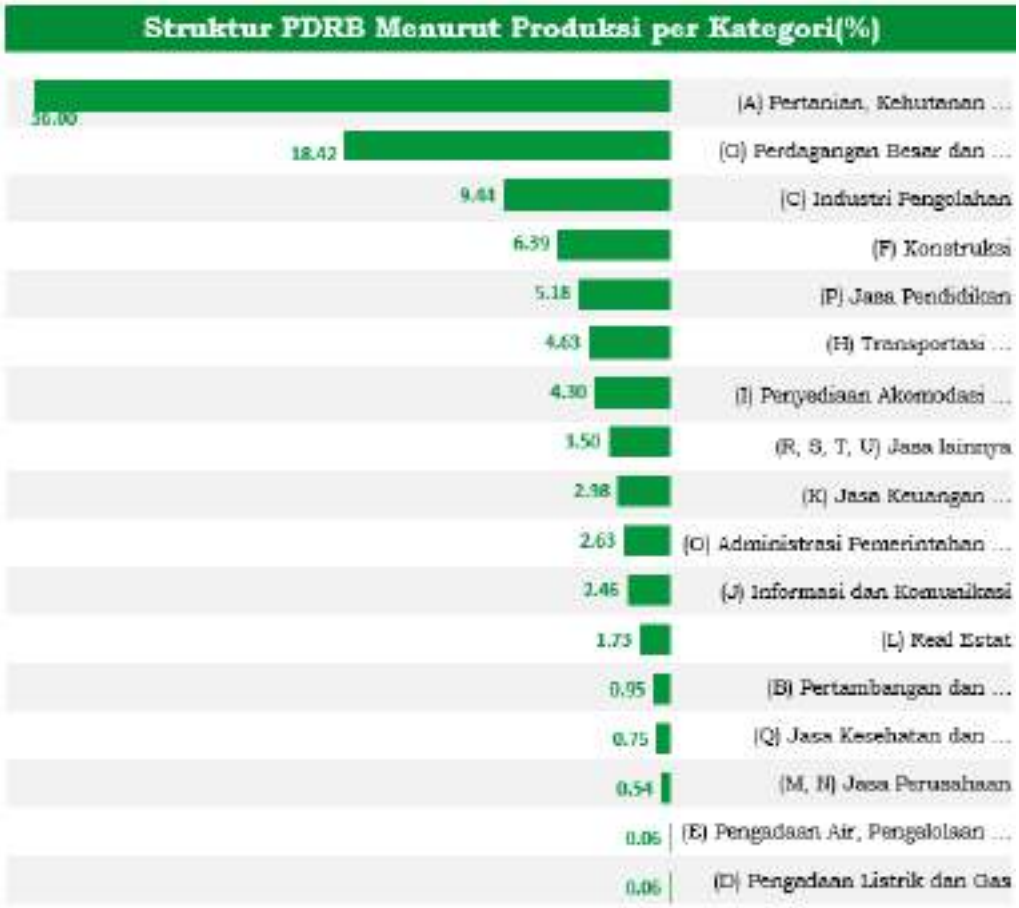
Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.44 Kuadran Perbandingan Kategorisasi Pertumbuhan LPE Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Garut menunjukkan masih relatif tradisionalnya perekonomian Garut, dimana kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih sangat mendominasi dengan *share* mencapai 36 persen, disusul kategori (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori (C) Industri Pengolahan atau manufaktur dengan *share* masing-masing sebesar 18,42 dan 9,44 persen sebagaimana terlihat pada gambar dibawah. Kategori pertanian mendominasi karena wilayah Garut yang sebagian besar adalah lahan yang sangat subur sehingga sebagian besar petani Garut merupakan petani polikultur yang menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan dan waktu yang sama, walaupun masih didominasi petani subsisten yang melakukan kegiatan bercocok tanam atau beternak untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau skala kecil, bukan untuk dijual secara komersial. Kendati demikian, dari struktur ekonomi, kunci kinerja perekonomian Garut adalah produktifitas pertanian, optimalnya kinerja pertanian akan berdampak signifikan terhadap percepatan LPE, sebaliknya kontraksi yang terjadi pada pertanian juga akan menjadi beban yang cukup berat pada kinerja perekonomian Garut.

Struktur ekonomi yang masih tradisional terjadi karena wilayah geografis yang masih di dominasi perdesaan. Selain itu, luas wilayah atau rentang kendali yang sangat tinggi menyebabkan jarak per kapita penduduk ke kutub-kutub pertumbuhan ekonomi masih sangat tinggi, sehingga sulit mengakses titik pertumbuhan. Pilihan lapangan pekerjaan

yang terbatas berimplikasi pada ketersediaan pekerjaan pada bidang pertanian dengan teknologi yang sederhana dan lahan yang terbatas.

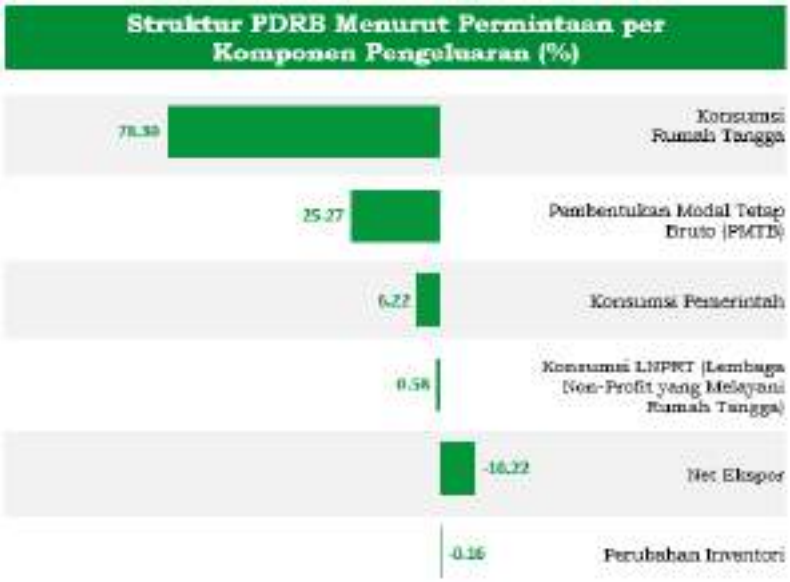


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025)
Keterangan:

- *(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing*
- *(B) Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying*
- *(C) Industri Pengolahan/Manufacturing*
- *(D) Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas*
- *(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*
- *(F) Konstruksi/Construction*
- *(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
- *(H) Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage*
- *(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities*
- *(J) Informasi dan Komunikasi/Information and Communication*
- *(K) Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities*
- *(L) Real Estat/Real Estate Activities*
- *(M,N) Jasa Perusahaan/Business Activities*
- *(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*
- *(P) Jasa Pendidikan/Education*
- *(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities*
- *(R, S, T, U) Jasa lainnya/Other Services Activities*

Gambar 2.45 Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut menurut Produksi per Kategori Tahun 2024

Di sisi lain, hilirisasi produk pertanian belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari belum optimalnya *share* industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa rantai bisnis pertanian di Kabupaten Garut masih sangat pendek, atau sebagian besar masih menjual produk mentah (*raw material*). Keterkaitan sektor pertanian ke hilir (*foreward linkage*) yang sangat potensial masih belum dimanfaatkan secara optimal. Pada kategori perdagangan, sektor ini cukup signifikan berkontribusi terhadap perekonomian yang merupakan implikasi dari tingginya *demand* dengan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Garut yang hampir mencapai 2,72 juta jiwa di Tahun 2024. Perkembangan volume perdagangan ini juga di topang oleh kinerja dari seluruh kategori lapangan usaha dan meningkatnya kinerja sektor pariwisata. Semakin tinggi volume ekonomi akan berdampak pada meningkatnya volume perdagangan.



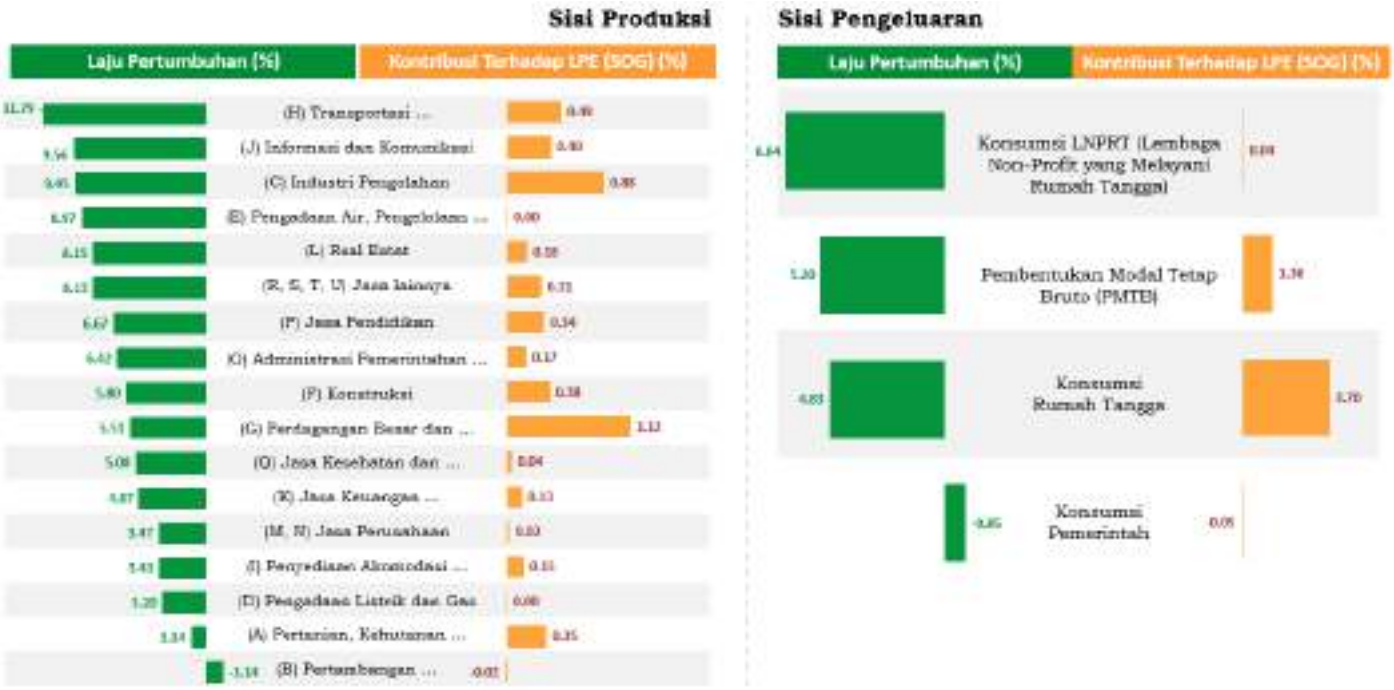
Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025)

Gambar 2.46 Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut menurut Permintaan per Komponen Pengeluaran Tahun 2024

Adapun dari sisi Pengeluaran, komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih sangat dominan di tunjukkan oleh pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dengan *share* 78,30 persen. Sedangkan pengeluaran untuk investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya memberikan *share* sebesar 25,27 persen dari PDRB, selanjutnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT masing-masing sebesar 6,22 dan 0,58 persen. Tampak kebutuhan barang/jasa lebih tinggi dibandingkan PDRB sehingga posisi Garut defisit perdagangan (barang/jasa yang masuk dari luar wilayah lebih besar dibandingkan barang/jasa yang di ekspor keluar wilayah Kabupaten Garut). Dari struktur PDRB pengeluaran, tampak ekonomi Garut di *drive* oleh komponen konsumsi rumah tangga yang merupakan mesin pertumbuhan

yang sangat dominan. Dengan demikian, pengendalian inflasi menjadi sangat penting dilakukan karena ketika terjadi lonjakan harga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sebagai mesin pertumbuhan Kabupaten Garut.

Sumber pertumbuhan (*Sources Of Growth*/SoG) adalah indikator yang merupakan ukuran dari seberapa besar peranan masing-masing kategori lapangan usaha/komponen dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi kontribusi suatu kategori/komponen terhadap pembentukan PDRB, maka akan semakin berpotensi dalam sumbangan terhadap LPE. Dari sisi produksi, pada tahun 2024 laju pertumbuhan Kategori tertinggi adalah pada kategori (H) Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan 11,79 persen, namun demikian, kategori ini hanya memberikan sumbangan sebesar 0,49 persen dari LPE sebesar 4,95 persen. Sumbangan tersebut berada di bawah sumbangan kategori (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan (C) Industri Pengolahan yang masing-masing sebesar 1,12 dan 0,88 persen. Hal tersebut di mungkinkan karena kontribusi sektor (H) Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB hanya sebesar 4,63 persen, sedangkan *share* kategori (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan (C) Industri Pengolahan telah mencapai 18,42 dan 9,44 persen terhadap PDRB.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025)

Gambar 2.47 Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Garut Tahun 2024

Selanjutnya, sektor andalan Garut, yakni kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, pada tahun 2024 hanya memberikan

sumbangan sebesar 0,35 persen terhadap penciptaan LPE. Rendahnya kontribusi sektor ini disebabkan karena kinerja pertanian di tahun 2024 relatif rendah dengan pertumbuhan ke 2 terbawah setelah kategori (B) Pertambangan & Penggalian, yakni hanya sebesar 1,14 persen. Dua kategori lainnya yang memberikan sumbangan terhadap LPE yang relatif besar adalah kategori (J) Informasi dan komunikasi dan (F) Konstruksi.



Stagnant (Stagnan)	Developed (Maju)
K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate P. Jasa Pendidikan R, S, T ,U Jasa Lainnya	A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian G. Perdagangan Besar dan Eceran... I. Penyediaan Akomodasi & Mamin M,N. Jasa Perusahaan O. Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib
Underdeveloped (Tertinggal)	**Developing (Berkembang)**
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang J. Infomasi dan Komunikasi	C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik & Gas F. Konstruksi H. Transportasi dan Pergudangan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.48 Tipologi *Klassen* PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Selanjutnya gambar diatas menunjukan hasil analisis realisasi PDRB menurut Lapangan usaha Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 dengan menggunakan tipologi Klassen menggunakan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Adapun berdasarkan hasil *Shift Share Analysis* dapat dipetakan sektor yang mempunyai pertumbuhan bersih positif *(Positive Net Shift)* atau sektor yang tumbuh dengan progresif, antara lain:

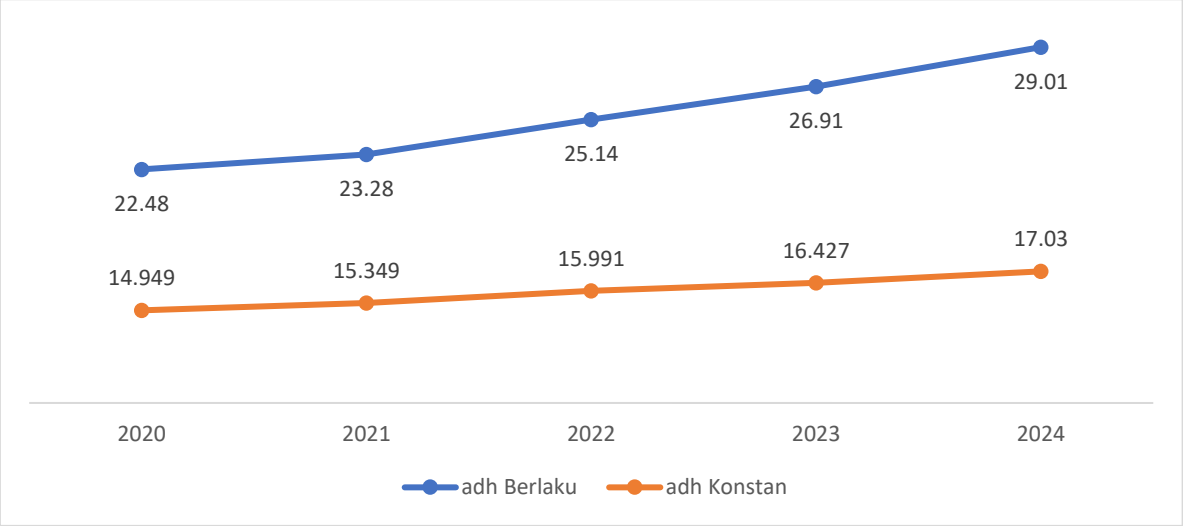
Progressive (Tumbuh Cepat)	Conservative (Tumbuh Lamban)
C. Industri Pengolahan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
D. Pengadaan Listrik & Gas	B. Pertambangan dan Penggalian
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	G. Perdagangan Besar dan Eceran
F. Konstruksi	K. Jasa Keuangan dan Asuransi
H. Transportasi dan Pergudangan	M,N. Jasa Perusahaan
I. Penyediaan Akomodasi & Mamin	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib
J. Informasi dan Komunikasi	P. Jasa Pendidikan
L. Real Estat	
Q. Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	
R,S,T,U. Jasa Lainnya	

Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.49 Hasil Analisis *Shift Share* PDRB Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

2) PDRB per Kapita

PDRB per kapita selama periode 2020-2024 yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 terus mengalami peningkatan. Adapun nilai dan diagram pertumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut.



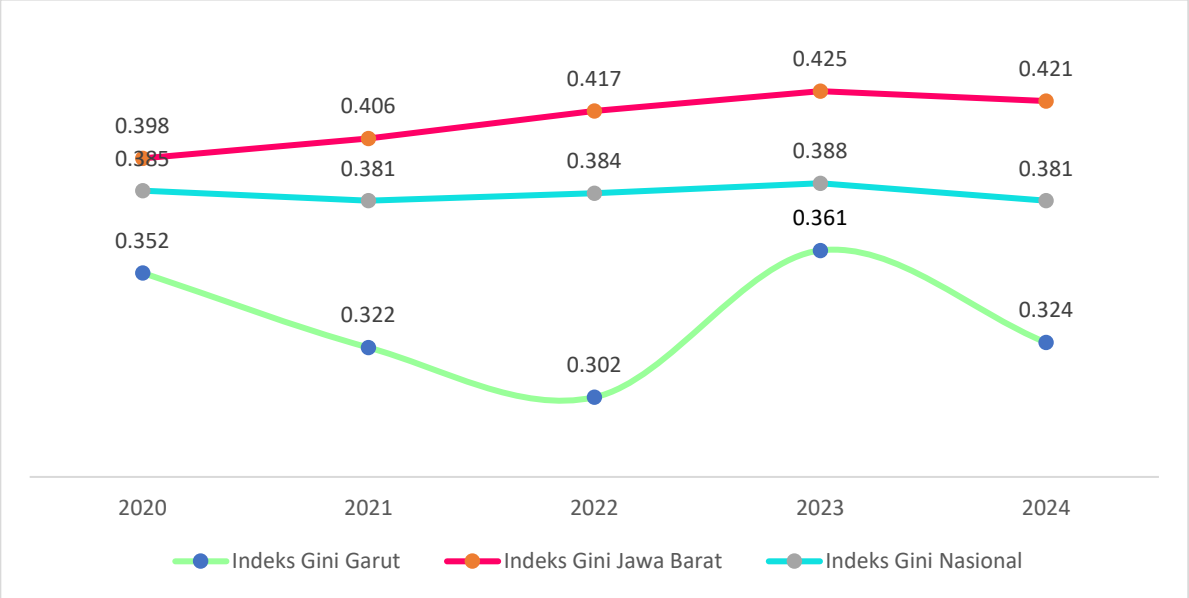
Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.50 PDRB per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, PDRB per kapita ADHB mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 % atau dari semula Rp 26,91 juta pada tahun 2023 menjadi Rp29,01 juta pada tahun 2024. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata. Begitu pun dengan PDRB per kapita ADHK mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 % atau dari semula Rp 16,427 juta pada tahun 2023 menjadi Rp17,03 juta pada tahun 2024.

3) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator statistik kunci yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu populasi, dengan skala 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan mutlak). Di Indonesia, indeks ini menjadi kompas vital perumusan kebijakan ekonomi-sosial, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan. Indeks Gini Kabupaten Garut selama periode Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada 2020, indeks tercatat sebesar 0,352, menurun menjadi 0,302 di 2022 yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Meski sempat meningkat menjadi 0,361 di 2023, indeks kembali membaik menjadi 0,324 pada 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Garut masih lebih merata dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang berada di kisaran 0,421 dan 0,381.



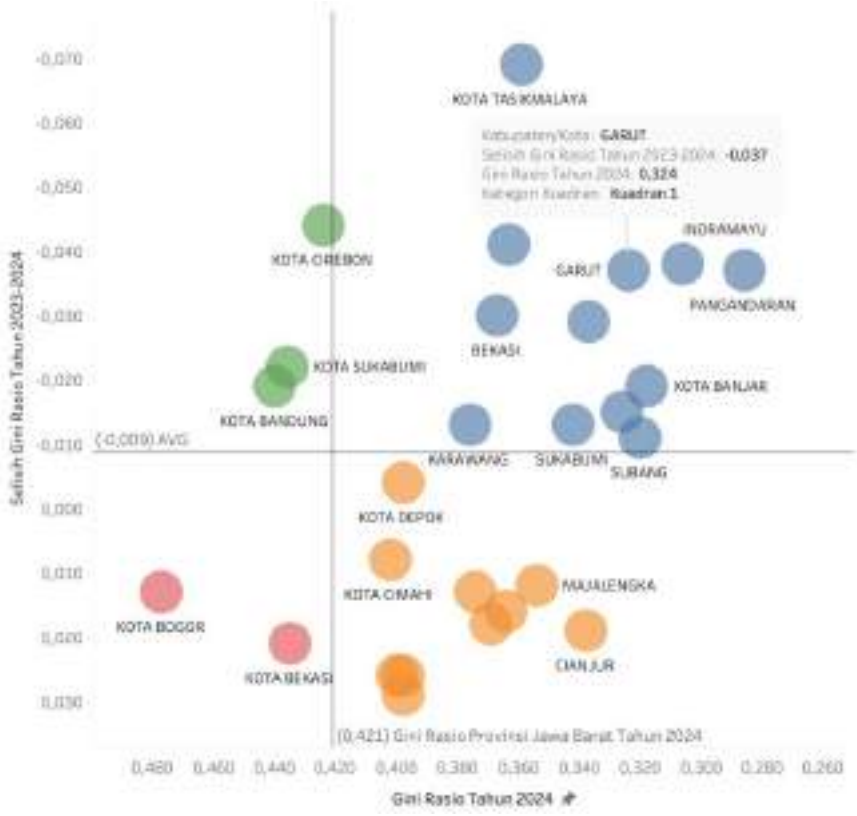
Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.51 Indeks Gini Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Ketimpangan masyarakat dipengaruhi oleh faktor ketimpangan pendapatan, pengeluaran dan kesempatan. Ditinjau dari pengeluaran per kapita dalam 1 (satu) bulan, golongan pengeluaran masyarakat terendah yakni Rp.200.000,- sampai dengan Rp.299.999,- mencakup 0,06% penduduk, golongan pengeluaran masyarakat yang mengeluarkan

Rp.500.000,- sampai dengan Rp.749.999,- sebesar 35,48% penduduk dan merupakan golongan pengeluaran terbanyak di Kabupaten Garut, sedangkan untuk golongan pengeluaran tertinggi yakni mencapai lebih dari Rp.1.500.000,- mencakup 14,81% penduduk.

Perbandingan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat angka gini rasio Kabupaten Garut berada pada klaster daerah dengan angka gini rasio mengalami penurunan melebihi rata-rata penurunan kota dan kabupaten di Jawa Barat (-0,037 < -0,009). Angka gini rasio abupaten Garut berada di bawah angka gini rasio Provinsi Jawa Barat (0,324 < 0,421), hal tersebut menunjukkan kondisi ketimpangan di Kabupaten Garut lebih lebih rendah diantara mayoritas kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

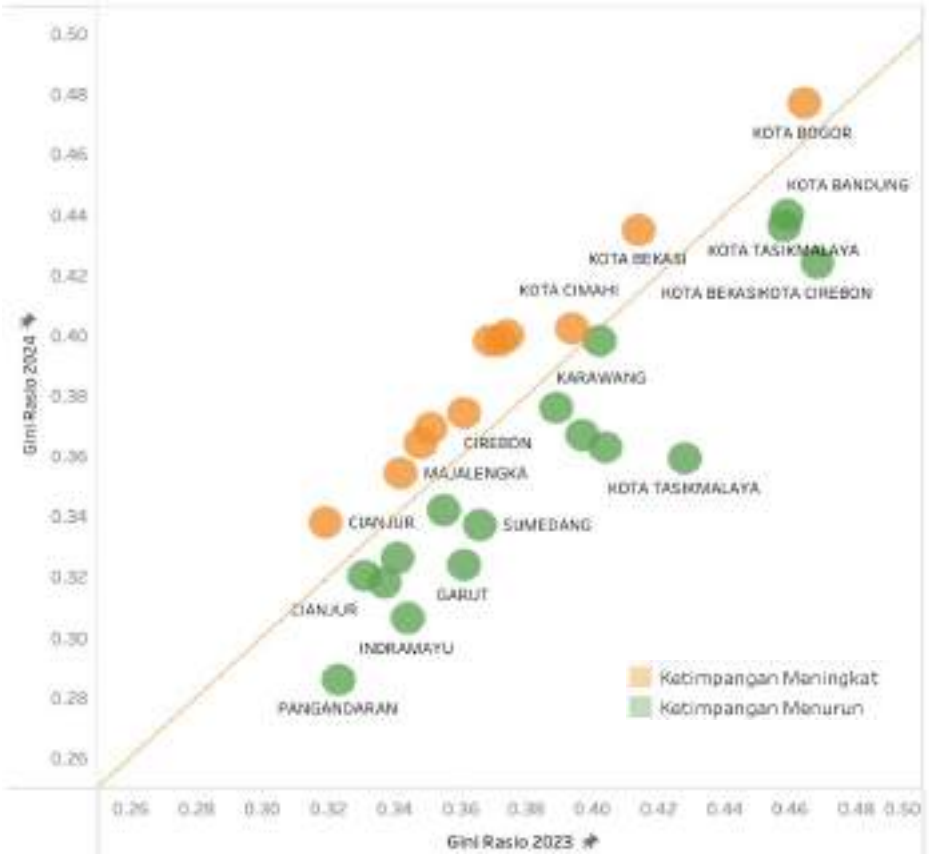


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.52 Kuadran Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Terdapat daerah yang mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan dan sebagian mengalami penurunan. Sebanyak 11 daerah mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dan 16 daerah mengalami penurunan ketimpangan pendapatan, Kabupaten Garut termasuk daerah yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa terjadi perbedaan karakter ekonomi daerah, daerah dengan struktur ekonomi ditopang oleh pertanian akan menyerap

tenaga kerja tinggi namun tingkat produktivitas rendah. Indikasi ini lebih lanjut menggambarkan bahwa dugaan daerah dengan basis ekonomi dari pertanian seperti Kabupaten Garut tidak mengalami perubahan struktural yang masif, sehingga kondisi rasio gini rendah namun produktivitas rendah harus dihindari. Alternatif pengembangan sektor manufaktur di Kabupaten Garut dapat berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja namun tingkat penyerapan tenaga kerja tidak setinggi pertanian. Hal yang perlu dihindari yaitu tingginya produktivitas tenaga kerja namun disertai dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi pula.

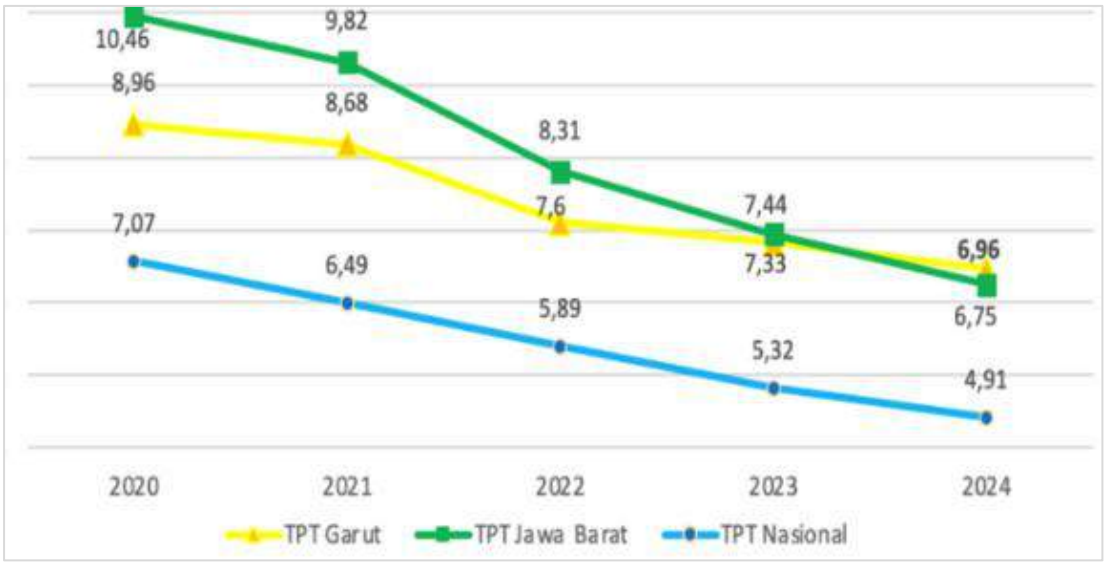


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.53 Garis Tren dan Kategorisasi Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi mengindikasikan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh bursa tenaga kerja. Berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Garut selama periode Tahun 2020-2024.

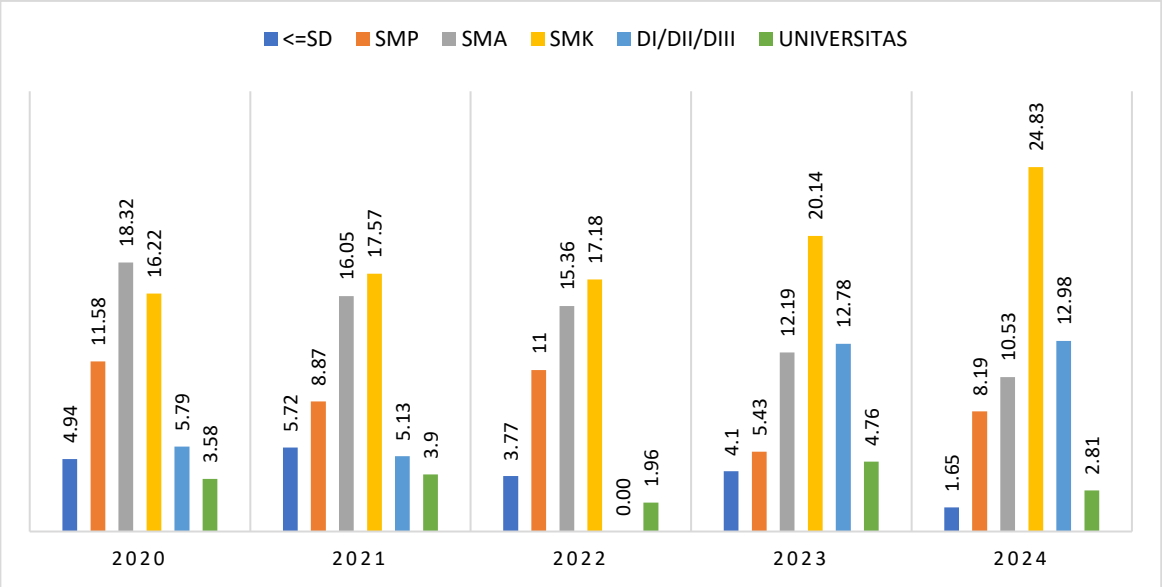


Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Garut menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 8,96 persen, kemudian turun menjadi 6,96 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar dua poin persentase ini mengindikasikan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, didorong oleh perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, tantangan seperti dominasi sektor informal dan rendahnya kualitas atau kompetensi angkatan kerja masih perlu menjadi perhatian serius. Capaian ini pun masih lebih tinggi dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tingkat Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan nasional (4,91 persen). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi ke 12 tertinggi dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penurunan TPT tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan investasi. Program-program tersebut telah berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor formal. Namun, tantangan ke depan masih besar, termasuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*), dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja muda. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 perlu memprioritaskan penguatan kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%) Tahun 2020-2024

Salah satu temuan kritis adalah tingginya TPT di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mencapai 24,83 persen. Angka ini cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, berbeda dengan tren penurunan TPT secara umum. Fenomena ini diduga kuat terjadi karena ketidaksesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, minimnya program *link and match*, serta tingginya persaingan di tingkat menengah. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat menjadi penghambat penyerapan tenaga kerja terampil di masa depan.

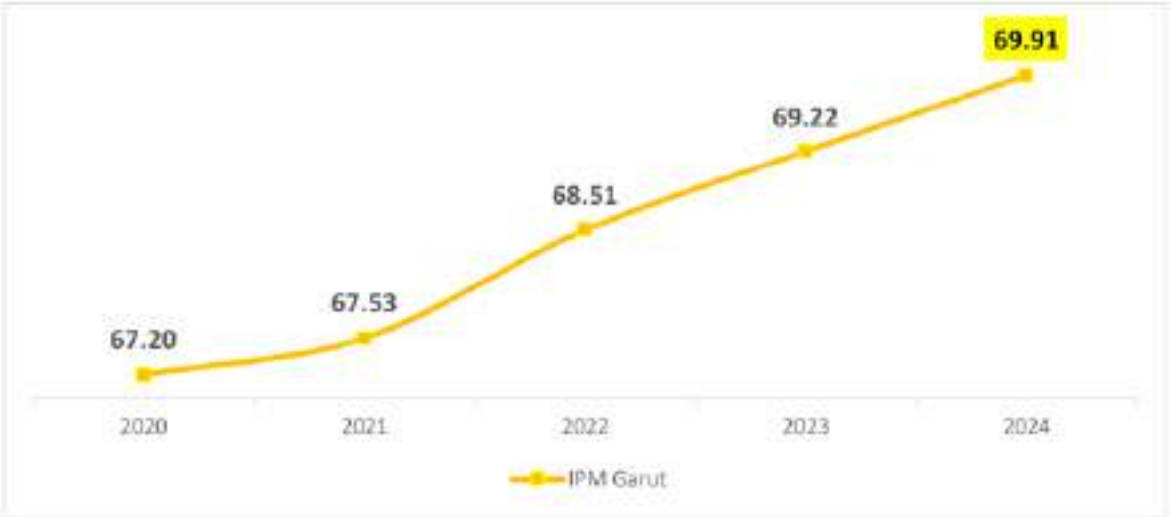
Di sisi lain, TPT terendah justru ditemukan pada angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,65 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan informal, yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi. Sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Garut menyediakan lapangan kerja yang luas bagi pekerja berpendidikan rendah. Namun, kondisi ini juga mencerminkan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan pekerja di sektor informal.

Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa 72,13% penduduk bekerja di Kabupaten Garut bergantung pada sektor informal, terutama pertanian, perdagangan kecil, dan jasa non-formal. Dominasi sektor ini menimbulkan sejumlah dampak serius, antara lain rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketiadaan jaminan sosial, dan kerentanan ekonomi saat terjadi gejolak pasar atau bencana. Pekerja di sektor informal umumnya menerima upah di bawah standar, bekerja tanpa kontrak yang jelas, dan tidak memiliki akses terhadap program jaminan kesehatan atau pensiun. Selain itu, minimnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan membuat mereka terjebak dalam pekerjaan berpenghasilan

rendah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya kontribusi pajak daerah dan terbatasnya perlindungan hukum bagi pekerja, yang pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Garut.

5) Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada hakikatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indeks kesehatan, pengetahuan dengan indeks pendidikan, serta standar hidup layak diukur dengan indeks pengeluaran.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.56 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM Garut berada pada angka 67,20 dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 69,91 pada tahun 2024. Berdasarkan dimensi-dimensi pengukuran IPM, berikut merupakan capaian indikator-indikator pembentuk IPM per tahun 2024:

Tabel 2.26 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen Tahun 2024

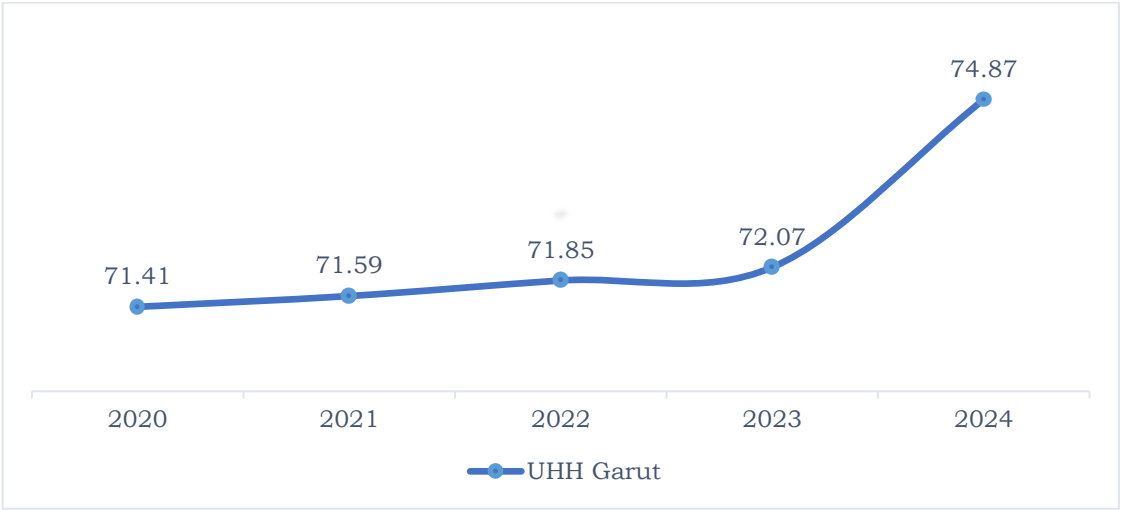
No	Indikator	Satuan	Realisasi
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,91
A	Indeks Pendidikan	Poin	59,97
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,85
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17
B	Indeks Kesehatan	Poin	84,42
	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,87
C	Indeks Pengeluaran	Poin	67,48
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	9168

Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun (2025) diolah Bappeda

B. Kesehatan untuk Semua

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Pencapaian IPM ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 *Long Form* yang dilaksanakan oleh BPS. Selama periode 2020 hingga 2024, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, UHH berada pada angka 71,41 tahun dan secara konsisten meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 74,87 tahun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 3,46 tahun dalam lima tahun terakhir ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek layanan kesehatan, gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.



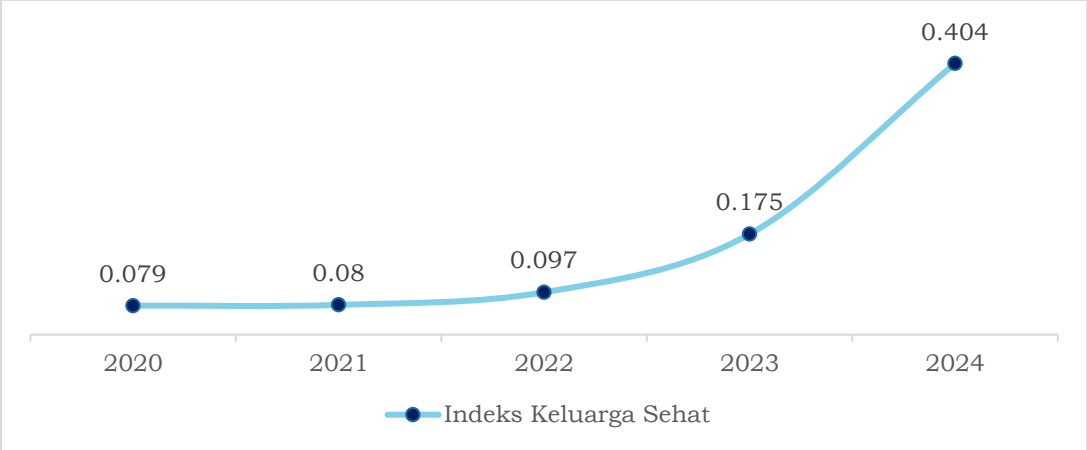
Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun (2025) diolah Bappeda

Gambar 2.57 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Capaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam memperluas akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, dan penguatan program promotif serta preventif melalui pendekatan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih merata. Ke depan, tantangan yang harus dijawab antara lain adalah mengurangi disparitas antarwilayah, mengatasi penyakit tidak menular yang cenderung meningkat, serta memperkuat perlindungan kesehatan melalui jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Keluarga sehat adalah masa depan bangsa yang gemilang. Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial dan spiritual yang optimal. Keluarga sehat memungkinkan terciptanya keluarga utuh agar bisa hidup normal secara sosial maupun ekonomi. Indeks keluarga sehat dihitung berdasarkan 12 indikator mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IKS tercatat sebesar 0,079 dan hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,08 pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, terjadi akselerasi pencapaian dengan lonjakan nilai menjadi 0,097 di tahun 2022, 0,175 di tahun 2023, dan mencapai angka 0,404 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan keluarga di Kabupaten Garut sebagai hasil dari intervensi program promotif, preventif, serta kolaborasi lintas sektor.



Sumber: Dinas Kesehatan (2025), data diolah

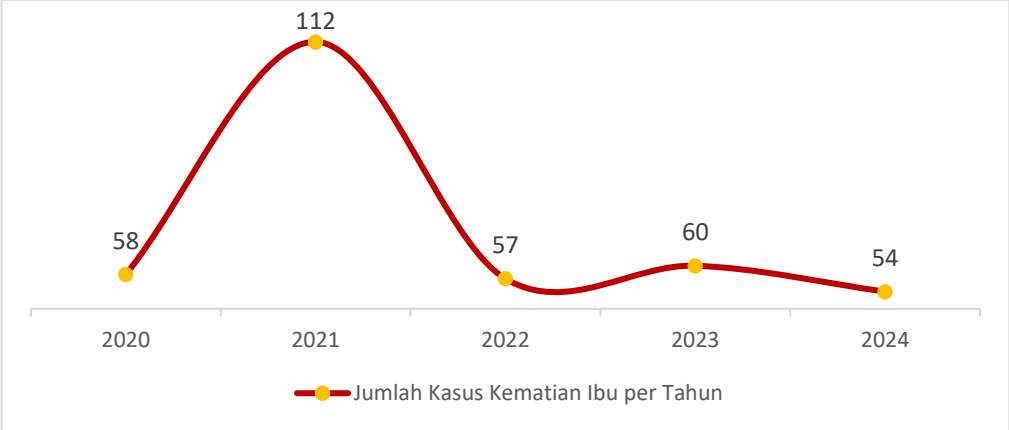
Gambar 2.58 Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020-2024

Peningkatan tajam pada dua tahun terakhir periode menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan kesehatan keluarga yang telah dilaksanakan mulai menunjukkan dampak positif, baik dari sisi akses layanan, pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, hingga kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun capaian

tahun 2024 masih berada pada level sedang jika dibandingkan dengan target ideal, tren positif ini memperlihatkan arah kebijakan yang tepat dan perlu diperkuat dalam periode perencanaan berikutnya untuk mewujudkan keluarga yang benar-benar sehat, mandiri, dan berdaya.

3) Jumlah Kasus Kematian Ibu

Kinerja Kabupaten Garut dalam menurunkan jumlah kematian ibu selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat 58 kasus kematian ibu, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 112 kasus. Kenaikan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat akses layanan kesehatan ibu dan anak secara optimal. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tren penurunan kembali terlihat dengan jumlah kasus yang menurun menjadi 57 pada 2022, kemudian sedikit naik menjadi 60 kasus di 2023, dan kembali menurun ke angka 54 kasus pada 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan (2025), data diolah.

Gambar 2.59 Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024

Data tersebut mencerminkan bahwa upaya penurunan kematian ibu sudah mulai menunjukkan hasil, meskipun belum konsisten setiap tahun. Capaian tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan awal periode menjadi sinyal positif atas perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu, peningkatan kesadaran masyarakat, serta intervensi program yang lebih tepat sasaran. Ke depan, diperlukan penguatan sistem rujukan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin agar target penurunan kematian ibu secara berkelanjutan dapat tercapai.

4) Prevalensi *Stunting*

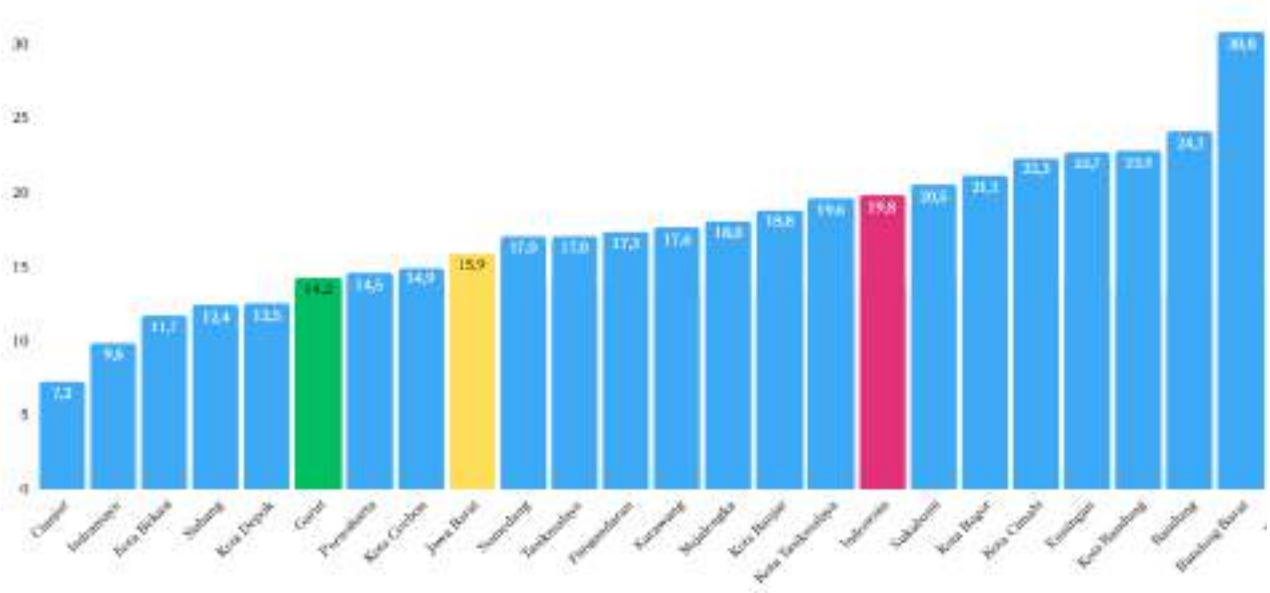
Komitmen dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* salah satunya dilakukan melalui Program TOSS (Temukan Obati Sayangi Balita *Stunting*) yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan mendukung Program Unggulan Gubernur Jawa Barat untuk Mewujudkan Jabar *New Zero Stunting*.



Sumber: Kementerian Kesehatan (2025), data diolah

Gambar 2.60 Prevalensi *Stunting* Tahun 2020-2024

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Garut menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebagai hasil dari intensifikasi program penanggulangan *stunting* secara multisektor. Pada tahun 2021, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 35,2%, kemudian berhasil ditekan menjadi 23,6% pada tahun 2022. Meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 24,1%, capaian tahun 2024 menunjukkan penurunan tajam hingga mencapai 14,2%.



Catatan: Angka stunting tahun 2024 Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, dan Kota Sukabumi belum dipublikasikan
Sumber: Kementerian Kesehatan, data diolah 2025.

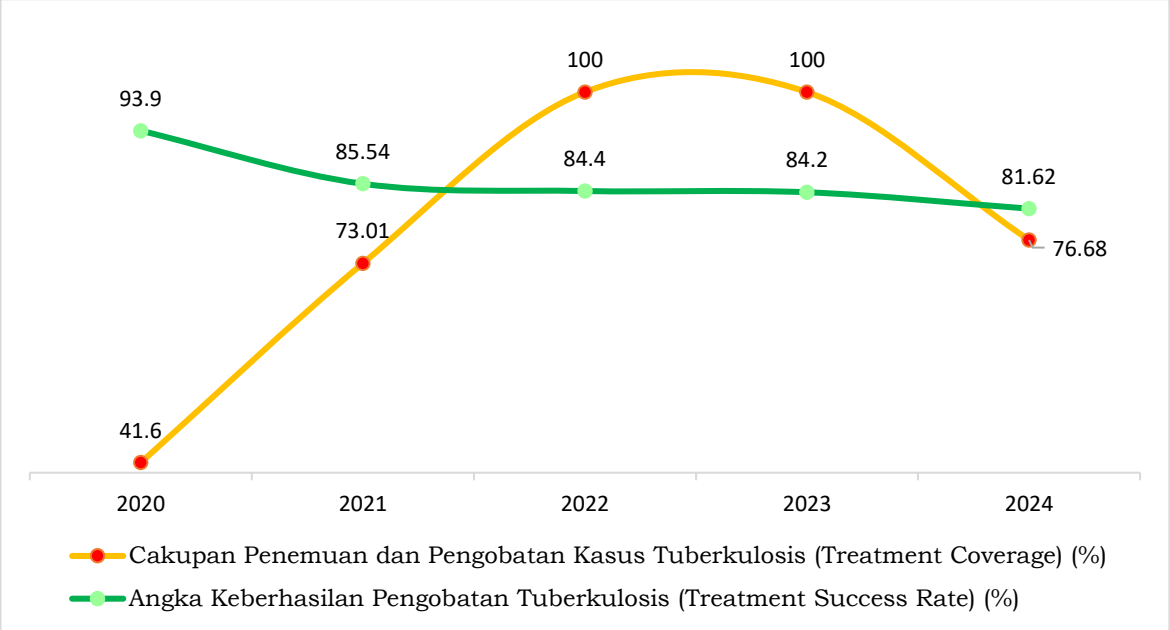
Gambar 2.61 Perbandingan Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

Adapun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, angka prevalensi *stunting* Kabupaten menempati posisi ke-6

prevalensi *stunting* paling rendah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata stunting di Provinsi Jawa Barat (15,9%) dan Nasional (19,8%). Capaian penurunan pervalensi *stunting* Kabupaten Garut mencerminkan adanya peningkatan efektivitas intervensi yang bersifat sensitif dan spesifik, seperti peningkatan cakupan gizi balita dan ibu hamil, edukasi pola asuh, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan mitra pembangunan. Keberhasilan penurunan prevalensi hingga mencapai dua digit di tahun 2024 menjadi indikator positif bahwa strategi percepatan pencegahan *stunting* yang telah dilaksanakan berada pada jalur yang tepat.

5) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis, serta Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkuloasis

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Garut menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam aspek cakupan penemuan dan pengobatan kasus. Treatment Coverage mengalami peningkatan tajam dari 41,6% pada tahun 2020 menjadi 73,01% pada tahun 2021, dan berhasil mencapai angka maksimal 100% pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 76,68%. Capaian ini menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam deteksi dini dan perluasan akses pengobatan, meskipun perlu diantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan cakupan di tahun terakhir.



Sumber: Dinas Kesehatan (2025), data diolah 2025.

Gambar 2.62 Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB serta Angka Keberhasilan Pengobatan TB Tahun 2020-2024

Di sisi lain, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) mengalami penurunan secara bertahap dari 93,9% pada

tahun 2020 menjadi 81,62% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam fase retensi dan keberlanjutan pengobatan pasien TBC, yang dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regimen terapi atau hambatan dalam akses layanan lanjutan. Meski cakupan penemuan kasus telah menunjukkan progres signifikan, penurunan keberhasilan pengobatan menjadi perhatian penting untuk perbaikan strategi penanganan pasien, penguatan sistem monitoring dan edukasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan pemutusan rantai penularan dan peningkatan angka kesembuhan.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS meningkat sebesar 0,33 tahun (4,39%), dari 7,52 tahun pada 2020 menjadi 7,85 tahun pada 2024. Artinya, pada 2024, penduduk Garut usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menyelesaikan hampir 8 tahun pendidikan atau sekitar kelas 2 SMP, dibandingkan dengan sebelumnya kelas 1 SMP pada 2020. Namun demikian, capaian RLS tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat (8,87 tahun) dan Nasional (8,85 tahun) yaitu masing-masing terpaut 1,02 tahun dan 1 tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

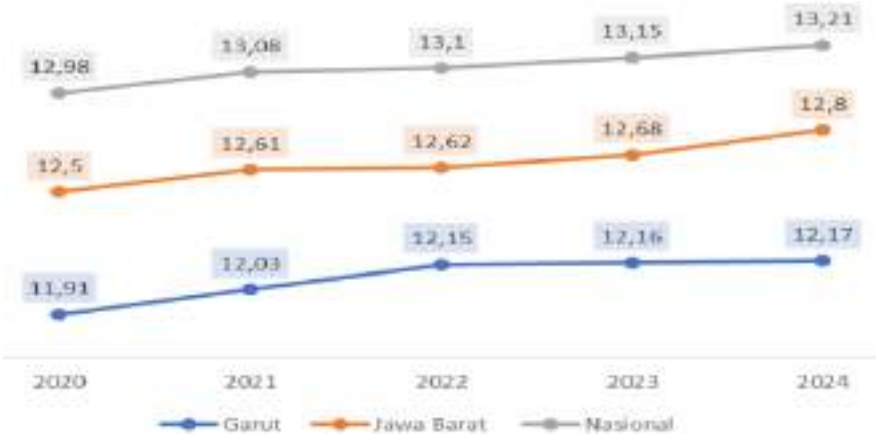
Gambar 2.63 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tren kenaikan RLS mengindikasikan adanya peningkatan pendidikan masyarakat dan perbaikan sistem pendidikan dan aksesibilitas yang didorong oleh berbagai faktor seperti penambahan ruang kelas baru, perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, atau adanya program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa perlengkapan

sekolah untuk siswa dari kelompok masyarakat miskin, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan kesetaraan, dan lainnya. Namun, rata-rata penduduk Kabupaten Garut belum mencapai wajib belajar 12 tahun, angka RLS 7,85 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Garut usia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini menjadi sebuah tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut, meskipun mengalami tren peningkatan yang positif namun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut masih berada di bawah 9 tahun.

2) Harapan Lama Sekolah

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun berlangsung secara bertahap. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 11,91 tahun dan meningkat menjadi 12,03 tahun di tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga mencapai 12,17 tahun pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan ekspektasi rata-rata lama sekolah yang dapat dicapai oleh anak-anak di Kabupaten Garut apabila mengikuti pendidikan sesuai standar saat ini. Peningkatan HLS ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan formal semakin membaik, baik dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan, keterjangkauan biaya, maupun dukungan kebijakan daerah dalam sektor pendidikan. Meskipun peningkatan per tahun relatif kecil, namun tren yang stabil menunjukkan adanya keberlanjutan dalam pembangunan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini menjadi salah satu fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Garut secara jangka panjang.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

Gambar 2.64 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian HLS Kabupaten Garut tahun 2024 sebesar 12,17 tahun masih terpaut 0,63 tahun dari HLS Jawa Barat (12,8 tahun) dan masih terpaut 1,04 tahun dari HLS Nasional (13,21 tahun). Capaian HLS berada

pada peringkat ke-24 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

3) Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional (Indeks Literasi dan Indeks Numerasi)

Capaian persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi dan numerasi di Kabupaten Garut menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2021–2024. Indikator ini menjadi tolok ukur kritis dalam menilai kualitas pembelajaran dasar, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan upaya pemenuhan target nasional.

Tabel 2.27 Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Indeks Literasi dan Indeks Numerasi) Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
i)	Indeks Literasi				
a	SD	54,02	64,87	76,1	72,42
b	SMP	48,27	60,13	70,64	74,03
c	SD Kesetaraan	60	41,46	44	56,25
d	SMP Kesetaraan	21,99	24,01	22,55	33,96
ii)	Indeks Numerasi				
a	SD	34,57	53,32	72,2	74,81
b	SMP	35,08	40,52	70,51	71,84
c	SD Kesetaraan	31,11	14,63	42,67	59,38
d	SMP Kesetaraan	21,04	21,07	31,28	37,25

Sumber: Dinas Pendidikan (2025), data diolah yang dikelola dalam SIPD

Secara umum, terlihat tren peningkatan capaian di hampir semua jenjang, meskipun dengan laju dan konsistensi yang bervariasi. Pencapaian tertinggi terjadi pada jenjang SD, sementara pendidikan kesetaraan (paket A/B) masih menghadapi tantangan berat.

Berikut merupakan capaian literasi per jenjang pendidikan:

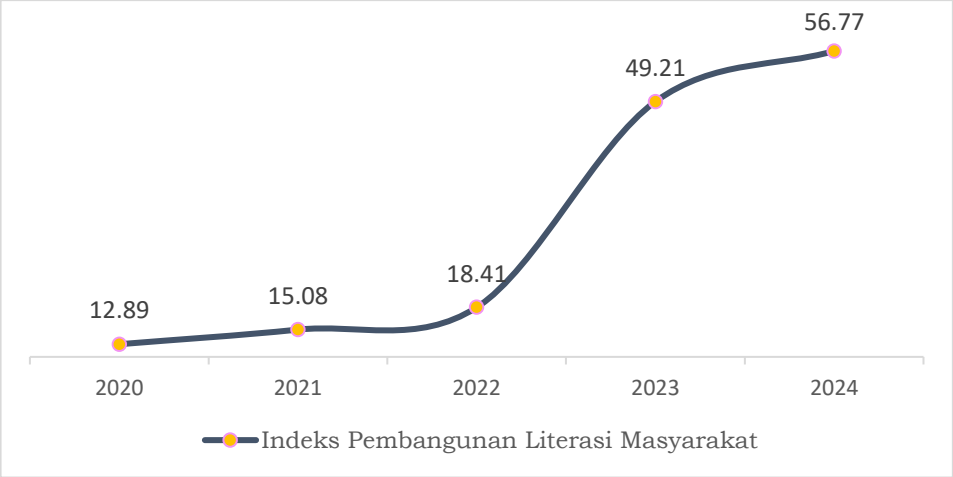
a. Jenjang SD, meningkat stabil dari 54,02% (2021) menjadi 72,42% (2024), dengan lonjakan tertinggi pada 2023 (76,1%). Capaian ini merefleksikan keberhasilan program penguatan literasi dasar;
b. Jenjang SMP, pertumbuhan solid dari 48,27% (2021) ke 74,03% (2024), meski sempat turun pada 2022 (60,13%);
c. Pendidikan SD Kesetaraan turun drastis dari 60% (2021) ke 41,46% (2022), kemudian pulih ke 56,25% (2024). SMP Kesetaraan tetap rendah (rata-rata 25%), meski naik menjadi 33,96% (2024). Hal ini mengindikasikan kerentanan sistem pembelajaran nonformal.

Adapun capaian numerasi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Jenjang SD, Kemajuan luar biasa dari 34,57% (2021) ke 74,81% (2024), dengan percepatan pada 2023 (+18,88). Ini menunjukkan respons positif terhadap pelatihan guru berbasis numerasi kontekstual;
b. Jenjang SMP, Naik dari 35,08% (2021) menjadi 71,84% (2024), dengan kenaikan cukup signifikan pada tahun 2023 (+29,99);
c. Pendidikan SD Kesetaraan berfluktuasi tajam (terendah 14,63% pada 2022), tetapi mencapai 59,38% di 2024. SMP Kesetaraan konsisten rendah (puncak 37,25% di 2024), menegaskan kebutuhan pendekatan khusus.

4) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, IPLM tercatat sebesar 12,89 dan mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 18,41 pada tahun 2022. Percepatan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2023, di mana indeks melonjak tajam menjadi 49,21, dan kembali meningkat menjadi 56,77 di tahun 2024.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2025), data diolah

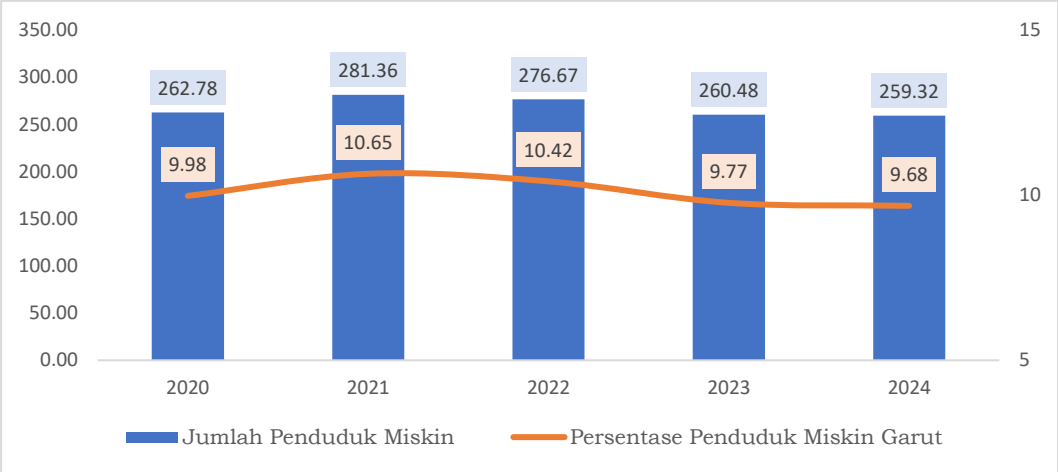
Gambar 2.65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang nyata dalam akses dan kualitas layanan literasi, termasuk fasilitas perpustakaan, kegiatan literasi berbasis masyarakat, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Hal ini juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran literasi di masyarakat, baik melalui kebijakan pendidikan formal maupun kegiatan literasi non-formal dan digital. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Garut menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan siap menghadapi tantangan global berbasis literasi.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1) Tingkat Kemiskinan

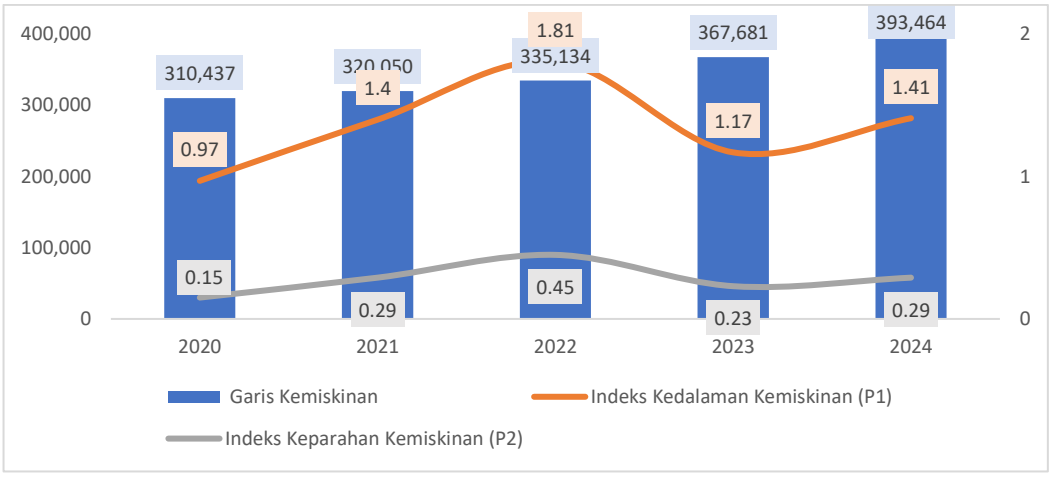
Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan 0,09% dari 9,77% menjadi 9,68% (Maret 2024). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (7,46%) dan Nasional (9,03%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 1.160 jiwa menjadi 259.320 jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi ke 9 tertinggi dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun berdasarkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Garut dengan jumlah 259.320 jiwa menempati posisi ke-dua diantara Kabupaten/Kota di Jawa Barat dibawah Kabupaten Bogor sebanyak 446.790 jiwa.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.66 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Tingkat kemiskinan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika ditinjau berdasarkan garis kemiskinan tahun 2024 menujukan peningkatan cukup signifikan dari Tahun 2020 menjadi Rp. 393.464,- perkapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan masih fluktuatif setelah pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menurun pada tahun 2023 dan kembali meningka hingga kepada nilai 1,41 pada tahun 2024. Kemudian untuk indeks keparahan kemiskinan juga masih fluktuatif dimana sempat meningkat hingga nilai 0,45 pada tahun 2022 dan menurun kembali pada tahun 2023 namun kembali meningkat pada tahun 2024 mencapai 0,29.



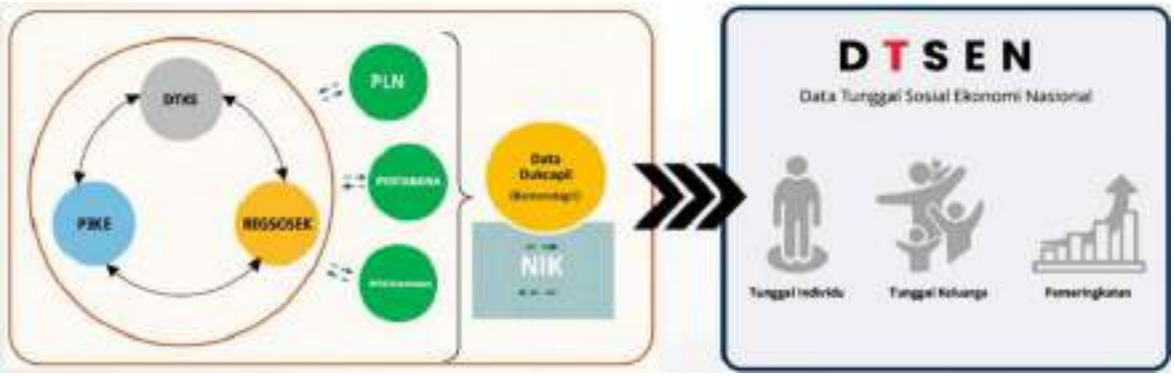
Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), diolah Bappeda

Gambar 2.67 Garis Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Adapun indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan yang masih fluktuatif mengindikasikan bahwa masih terdapat kemiskinan yang tersisa dan merupakan kemiskinan yang lebih kompleks, sebagian masyarakat miskin masih jauh di bawah garis kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan efektivitas bantuan belum merata serta fluktuasi ekonomi sektor informal.

Disisi lain penduduk dengan kategori miskin ekstrem masih terdapat di wilayah Kabupaten Garut. Seseorang termasuk kedalam kategori miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1,9 PPP atau Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Tingkat kemiskinan ekstrim Kabupaten Garut mengalami fluktuasi dari 3,1% per Tahun 2022 menjadi 0,36% (Tahun 2023) lalu naik kembali menjadi 0,88% di Tahun 2024.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah didorong untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, dibangun dari 3 sumber data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang kemudian ditunggalkan dan telah dipadankan dengan data kependudukan sebagaimana ilustrasi gambar dibawah.



Gambar 2.68
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
sebagai Basis Data Tunggal dan Sumber Data Utama

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala daerah perlu menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dan melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*). Di Kabupaten Garut terdapat 1.766.482 orang yang tersebar dari Desil 1-Desil 5 yang perlu dilakukan verifikasi. Kementerian sosial berdasarkan Kepmensos No.79/HUK/2025 menetapkan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial. Peringkat kesejahteraan keluarga merupakan urutan tingkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 10 (sepuluh) yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Desil 1 merupakan kelompok kesejahteraan 10% terbawah, desil 2 adalah 20% terbawah dan seterusnya.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, DTSEN dapat dilakukan pemutakhiran melalui sinkronisasi data baik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial, maupun masyarakat. Berikut merupakan persebaran jumlah keluarga dan jumlah penduduk desil 1 per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2025.

Tabel 2.28 Persebaran Jumlah Keluarga dan Jumlah Penduduk Desil 1 per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Keluarga dari Desil 1	Jumlah Individu dari Desil 1	Jumlah Keluarga yang Belum Menerima Bansos Bersyarat Tetapi Memenuhi Syarat	Jumlah Keluarga dengan Rumah Kurang Layak Huni	Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Aset Produktif
Banjarwangi	4,076	14,058	1,127	1,237	4,076
Banyuresmi	1,772	5,689	634	58	1,772
Bayongbong	2,735	9,947	862	268	2,735
Balubur Limbangan	3,032	9,517	901	314	3,032
Bungbulang	3,331	11,282	1,253	1,054	3,331
Caringin	1,821	5,261	689	399	1,821
Cibalong	4,318	11,960	1,435	963	4,318
Cibatu	1,731	5,649	507	126	1,731
Cibiuk	837	3,045	259	55	837
Cigedug	1,983	7,528	754	321	1,983
Cihurip	822	2,234	215	346	822
Cikajang	3,730	12,050	1,316	499	3,730
Cikelet	2,161	7,148	564	360	2,161
Cilawu	4,025	12,396	1,091	567	4,025
Cisewu	1,554	3,772	479	211	1,554
Cisompet	3,298	10,021	895	1,030	3,298
Cisurupan	3,315	10,560	979	295	3,315
Garut kota	2,804	8,038	890	138	2,804
Kadungora	1,652	5,099	471	67	1,652
Karangtengah	684	2,372	205	68	684
Karangpawitan	2,668	8,424	936	80	2,668
Kersamanah	824	2,627	295	61	824
Leles	1,843	5,472	574	94	1,843
Leuwigoong	955	2,934	286	37	955
Malangbong	3,849	13,589	1,109	374	3,849
Mekarmukti	841	2,617	186	299	841
Pakenjeng	5,375	17,841	1,601	1,629	5,375
Pameungpeuk	1,190	3,301	387	202	1,190
Pamulihan	1,105	3,389	362	226	1,105
Pangatikan	1,204	3,954	380	98	1,204
Pasirwangi	2,791	9,236	916	177	2,791
Peundeuy	1,185	3,662	224	206	1,185
Samarang	2,191	7,163	814	219	2,191
Selaawi	997	2,908	299	79	997
Singajaya	3,151	10,399	645	1,075	3,151
Sucinaraja	1,006	2,939	303	58	1,006

Kecamatan	Jumlah Keluarga dari Desil 1	Jumlah Individu dari Desil 1	Jumlah Keluarga yang Belum Menerima Bansos Bersyarat Tetapi Memenuhi Syarat	Jumlah Keluarga dengan Rumah Kurang Layak Huni	Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Aset Produktif
Sukaresmi	1,861	6,221	605	257	1,861
Sukawening	1,495	4,838	471	138	1,495
Talegong	1,869	4,603	545	334	1,869
Tarogong Kaler	1,778	5,496	586	36	1,778
Tarogong Kidul	1,620	5,191	522	29	1,620
Wanaraja	960	2,702	326	38	960
Jumlah	90,439	287,132	27,898	14,122	90,439

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (2025) melalui website https://pemberdayaan.go.id.

2) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengindikasikan bahwa seseorang menjadi bagian dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan jaminan sosial dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan fokus mereka dalam bekerja. Capaian kinerja indikator Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut menunjukkan adanya dinamika selama periode dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah peserta tercatat sebanyak 58.962 orang, namun mengalami penurunan menjadi 54.297 orang pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ketenagakerjaan informal yang tinggi, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap manfaat jaminan sosial, atau keterbatasan kepatuhan sektor usaha dalam mendaftarkan pekerjanya.

Secara umum, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, khususnya terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Oleh karena itu, penurunan jumlah peserta pada tahun 2024 menjadi perhatian penting yang harus direspons melalui kebijakan dan program yang lebih intensif dan inklusif. Upaya ke depan perlu difokuskan pada peningkatan sosialisasi, sinergi lintas sektor, serta fasilitasi terhadap sektor informal untuk memperluas jangkauan kepesertaan, sebagai bagian dari penguatan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut.

3) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal merupakan salah satu bentuk pengukuran penting terhadap inklusivitas dunia kerja di Kabupaten Garut. Indikator ini baru mulai

digunakan dan dihitung pada tahun 2024 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesempatan kerja yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 218 orang penyandang disabilitas telah bekerja di sektor formal dari total 370.000 tenaga kerja formal di Kabupaten Garut. Dengan demikian, persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sebesar 0,059%.

Capaian ini menunjukkan langkah awal yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Meskipun angkanya masih relatif kecil, pencatatan indikator ini membuka ruang evaluasi serta perumusan kebijakan afirmatif yang lebih baik di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Garut ke depan perlu memperkuat regulasi, program pelatihan keterampilan, serta kemitraan dengan sektor swasta guna memperluas akses pekerjaan formal bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan hak-hak kelompok rentan dalam pembangunan daerah.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Garut yang religius dan berbudaya, aspek “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama dalam aspek ini adalah Indeks Kesalehan Sosial yang mencerminkan sejauh mana masyarakat mematuhi dan mengamalkan nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis, adil, dan sejahtera mencakup kepatuhan terhadap norma sosial, solidaritas sosial, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta penerapan nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Garut mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu dari 82,53 pada tahun 2022 menjadi 83,56 di tahun 2023, dan naik kembali menjadi 84,49 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan penguatan dalam aspek keagamaan, solidaritas sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial di berbagai tingkatan wilayah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga tengah mempersiapkan perhitungan awal terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai indikator baru yang akan mulai dihitung pada tahun 2025. Indeks ini akan menjadi ukuran penting dalam menilai pencapaian pembangunan kebudayaan di daerah, termasuk pelestarian warisan budaya, penguatan identitas lokal, kreativitas seni, serta peran kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kedua indikator ini, Kabupaten Garut memiliki fondasi kuat untuk menyusun kebijakan yang berimbang antara aspek religiusitas dan budaya sebagai pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1) Indeks Perlindungan Anak

Selama periode tahun 2021 hingga 2023, kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan perlindungan anak menunjukkan tren yang cukup positif. Indeks Perlindungan Anak yang sebelumnya belum tercatat pada tahun 2020, mulai diperoleh sebesar 50,47 pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 57,09 pada tahun 2022, serta mencapai 59,41 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.



Sumber : DPPKBPPPA (2025), data diolah

Gambar 2.69 Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021-2023

Sampai Triwulan III Tahun 2024 jumlah kasus kekerasan (*trafficking*) terhadap anak sebanyak 101 kasus dengan persentase *trafficking* yang tertangani pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% atau mencapai dari target. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga berita atau informasi mengenai kasus kekerasan dapat segera ditangani, serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait (DPPKBPPPA, P2TP2A Kabupaten Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, P2TP2A Provinsi Jawa Barat, Kepolisian resort Garut, Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan lain-lain).

Peningkatan Indeks Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai hasil dari penguatan sinergi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta keberpihakan anggaran terhadap isu-isu perlindungan anak. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah angka ideal, sehingga pada periode perencanaan 2025–2029 dibutuhkan langkah yang lebih sistematis dan terarah untuk mendorong peningkatan kualitas layanan perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk melalui peningkatan

kapasitas kelembagaan, pendataan yang akurat, serta penguatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

2) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.



Sumber : DPPKBPPPA (2025), data diolah

Gambar 2.70 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024

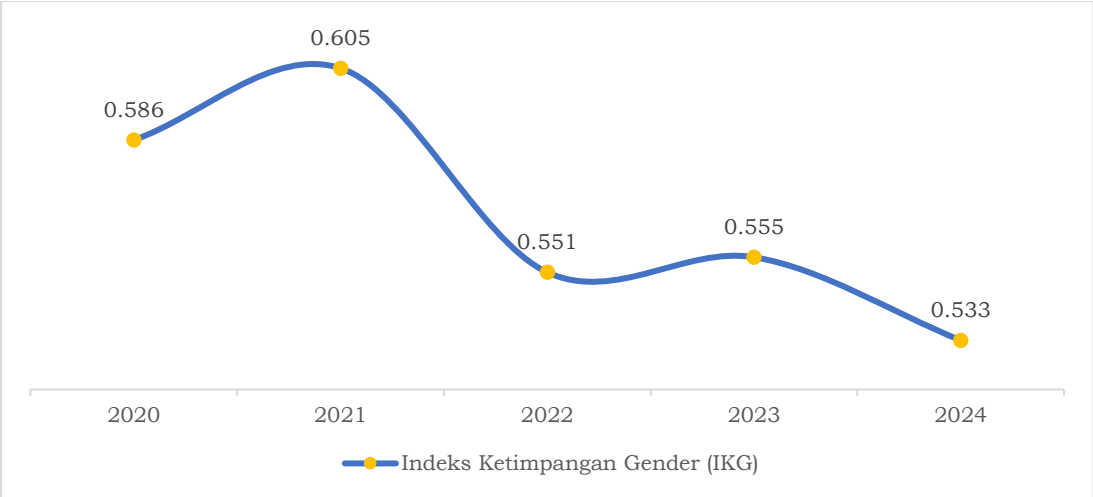
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan positif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, iBangga tercatat sebesar 52,2 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadi 53,79 pada 2022, 56,36 pada 2023, dan mencapai 61 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas keluarga di Kabupaten Garut dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, yang menjadi indikator utama dalam pengukuran indeks tersebut.

Kenaikan iBangga mengindikasikan bahwa berbagai program pemberdayaan dan pembinaan keluarga yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Garut telah memberikan dampak positif. Intervensi melalui penyuluhan keluarga, penguatan peran institusi keluarga, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga turut memperkuat ketahanan keluarga. Namun demikian, pencapaian ini tetap perlu ditingkatkan pada periode RPJMD selanjutnya, terutama untuk memperkuat fondasi keluarga sebagai unit

terkecil dalam masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan manusia secara menyeluruh.

3) Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat penting untuk mengidentifikasi area dimana kesenjangan gender masih ada dan untuk mengarahkan kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar.

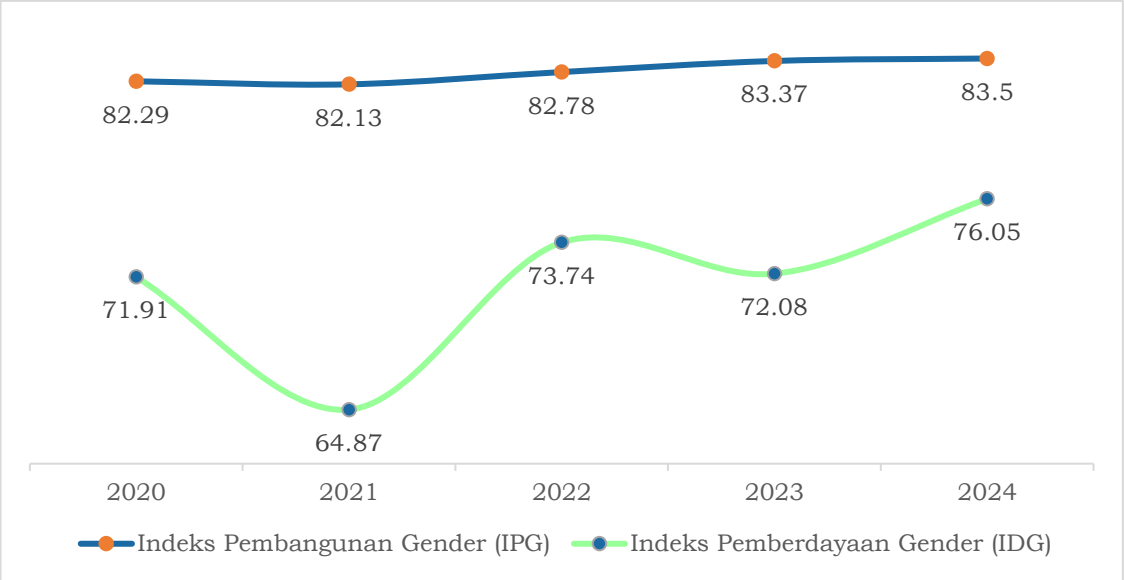


Sumber : BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

Gambar 2.71 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024

Kinerja Kabupaten Garut dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong kesetaraan gender menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan selama periode 2020-2024. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,586 pada tahun 2020 menjadi 0,533 pada tahun 2024. Penurunan nilai IKG ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam mengurangi ketimpangan gender, terutama dalam dimensi kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, dan representasi politik.

Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan dari 82,29 pada tahun 2020 menjadi 83,5 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Garut semakin inklusif terhadap perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga memperlihatkan kemajuan positif, naik dari 71,91 pada tahun 2020 menjadi 76,05 pada tahun 2024, setelah sempat turun pada 2021. Kenaikan IDG mencerminkan semakin banyaknya perempuan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah ke depan.

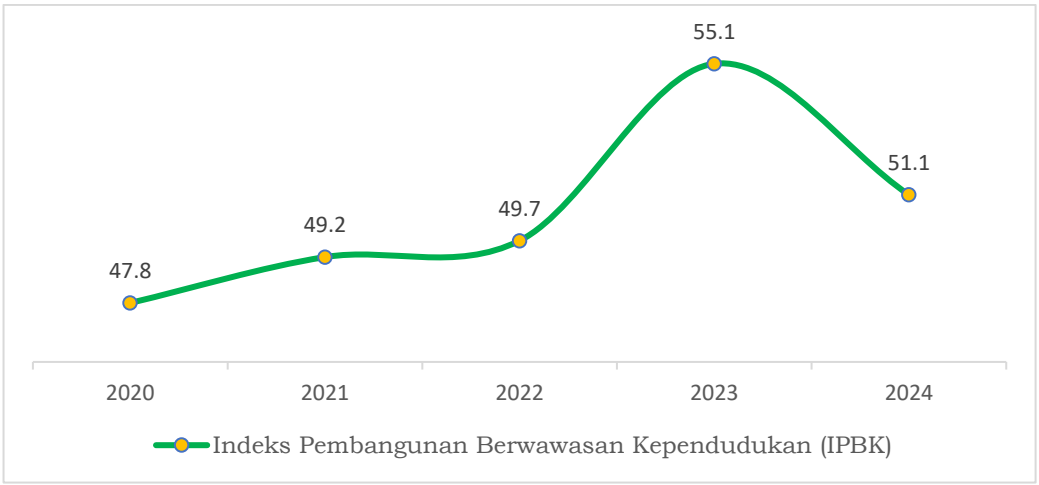


Sumber : BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

Gambar 2.72 Indeks Pembangunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020-2024

4) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Pembangunan Berwawasan Kependudukan merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pusat dalam proses pembangunan. Sedangkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia. Pembangunan Berwawasan Kependudukan dijabarkan ke dalam lima dimensi yakni: Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistik Integratif dan Kesetaraan. Pembangunan Berwawasan Kependudukan harus dikaitkan dan berkontribusi terhadap pembangunan manusia.



Sumber : BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

Gambar 2.73 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Tahun 2020-2024

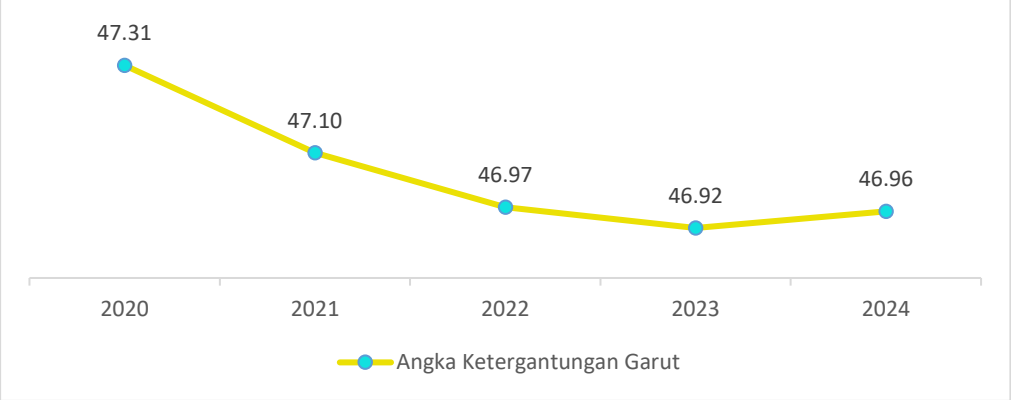
Selama periode 2020–2024, kinerja Kabupaten Garut dalam aspek pembangunan berwawasan kependudukan menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun disertai fluktuasi. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) mengalami kenaikan dari 47,8 pada tahun 2020 menjadi 51,1 pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 55,1, sebelum sedikit menurun di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya penguatan dalam upaya integrasi isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengelolaan jumlah, persebaran, struktur, serta kualitas penduduk.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPBK menunjukkan bahwa Kabupaten Garut telah berupaya membangun sinergi antara dinamika kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, fluktuasi pada tahun 2024 menjadi catatan penting agar ke depan diperlukan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program berbasis kependudukan, guna memastikan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika demografi di tingkat lokal.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Salah satu indikator penting yang merefleksikan struktur penduduk dan kapasitas produktif masyarakat adalah angka ketergantungan, yaitu rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Selama periode 2020–2024, angka ketergantungan di Kabupaten Garut menunjukkan tren yang stabil dan cenderung menurun, dari 47,31 pada tahun 2020 menjadi 46,96 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam struktur demografi daerah, dimana proporsi penduduk usia produktif semakin dominan dibandingkan kelompok usia non-produktif.

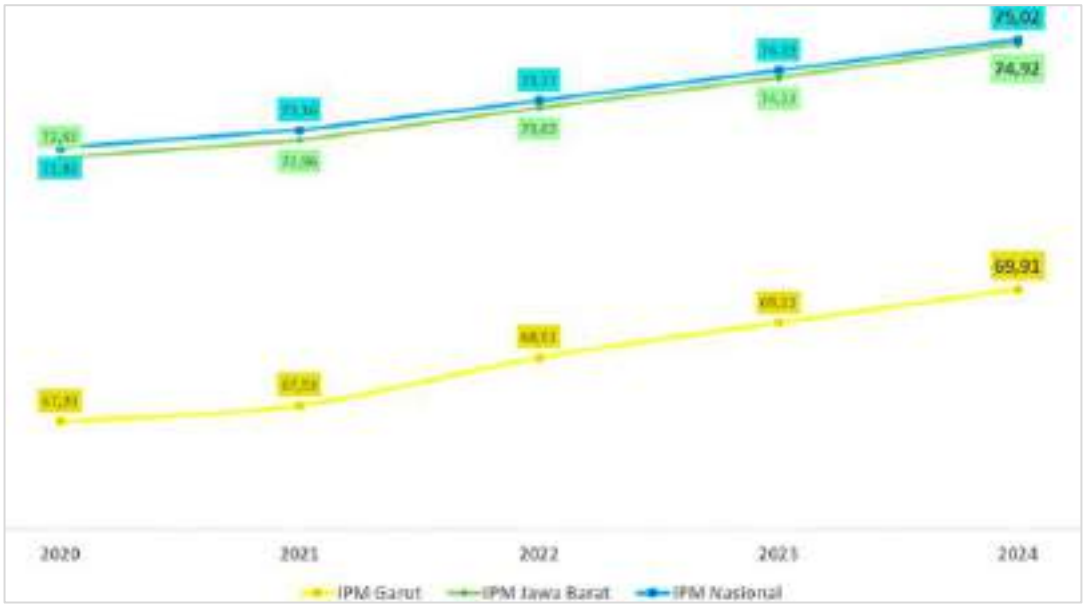


Sumber: BPS Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar 2.74 Angka Ketergantungan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Angka ketergantungan (*depencency rasio)* turun dari 47,31% pada tahun 2020 sampai 46,92% di Tahun 2023. Selanjutnya ada sedikit kenaikan menjadi 46,96% di Tahun 2024. Meskipun perubahan terlihat relatif kecil dari tahun ke tahun, kestabilan ini menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk usia kerja terhadap kelompok usia belum produktif dan lansia relatif terkendali. Dengan angka *depencency ratio* dibawah 50%, hal ini mengindikasikan adanya peluang besar bagi Kabupaten Garut untuk memanfaatkan bonus demografi, yakni dominasi jumlah penduduk usia produktif, yang dapat dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung oleh kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, dan kewirausahaan. Namun demikian, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam mengelola kelompok usia muda agar dapat terserap dalam dunia kerja yang produktif dan inovatif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyiapan tenaga kerja kompeten, dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan menjadi prioritas penting dalam meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.

Adapun dari sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM Garut berada pada angka 67,20 dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga mencapai 69,91 pada tahun 2024. Kenaikan IPM ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Namun demikian capaian ini masih dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Barat (74,92) dan nasional (75,02).



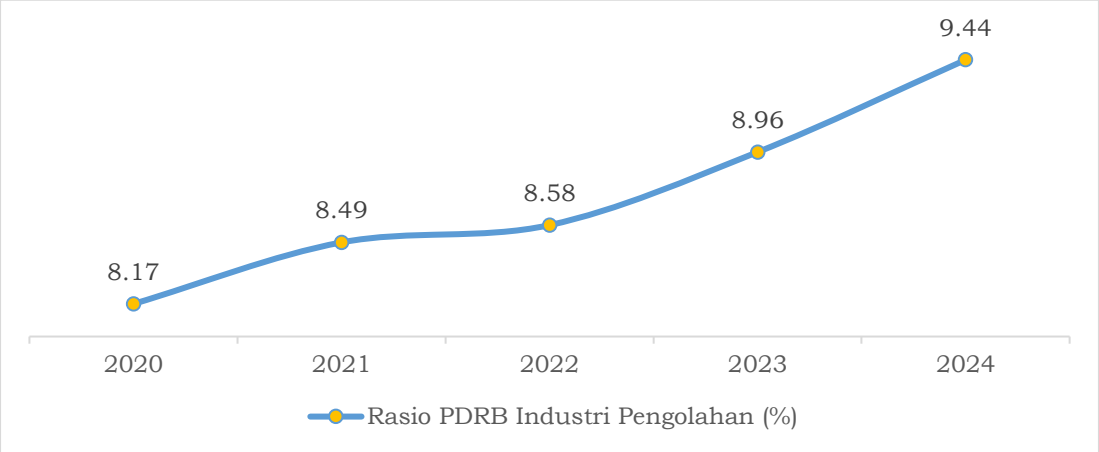
Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun (2025) diolah Bappeda

Gambar 2.75 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Kenaikan IPM Garut sebesar 2,71 poin selama lima tahun menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif, khususnya melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Meskipun IPM Kabupaten Garut masih berada pada peringkat ke-26 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tren pertumbuhan yang positif ini menjadi indikator bahwa arah kebijakan dan program pembangunan yang telah dijalankan cukup efektif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut.

B. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

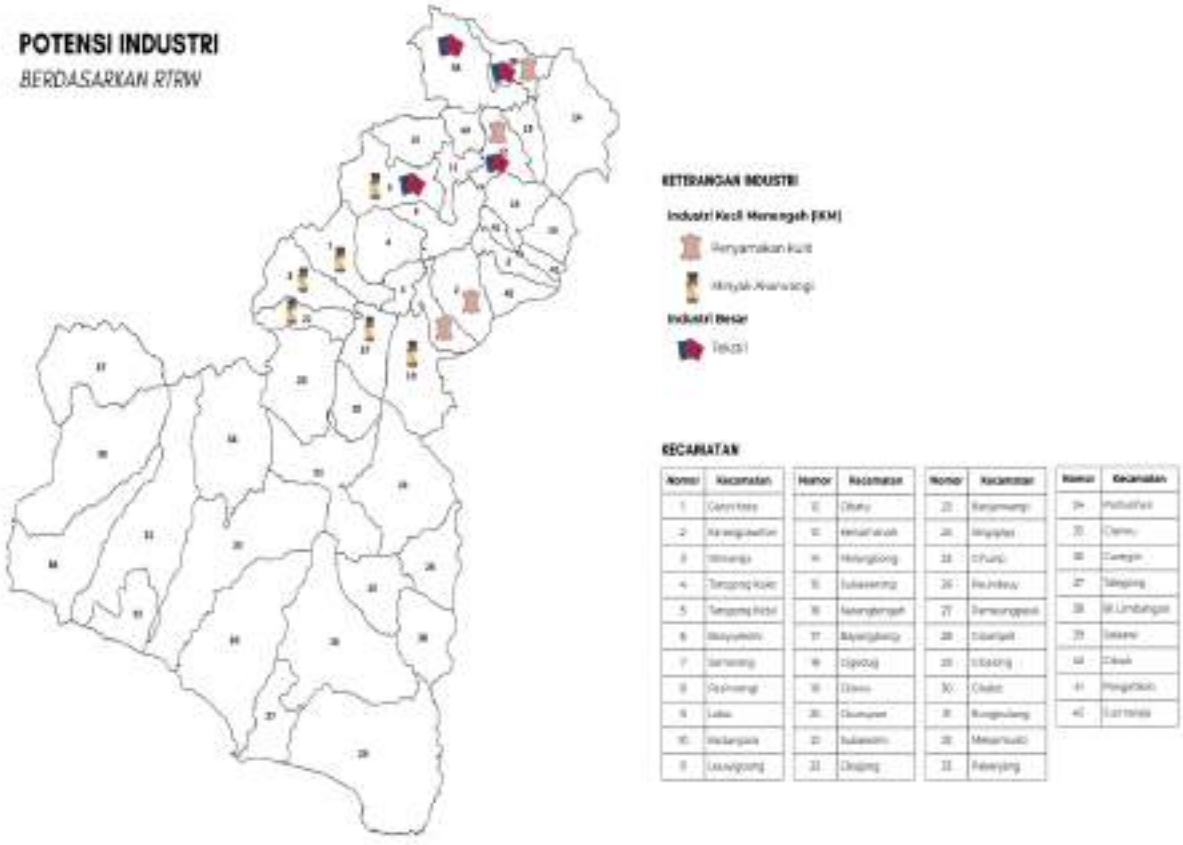
Transformasi ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi membutuhkan dukungan dari sektor-sektor produktif yang mampu mendorong nilai tambah, inovasi, dan efisiensi. Inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta produktivitas ekonomi menjadi fondasi penting dalam membangun perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2025 (diolah)

Gambar 2.76 Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

Di Kabupaten Garut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 8,17% pada tahun 2020 menjadi 9,44% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Garut mulai berkembang secara konsisten, mencerminkan perbaikan dalam kapasitas produksi dan pengembangan nilai tambah komoditas lokal, memperkuat struktur ekonomi yang sebelumnya lebih didominasi oleh sektor primer, meskipun kontribusinya masih di bawah sektor pertanian dan perdagangan. Salah satu peningkatan kontribusi sektor industri dapat dilakukan dengan optimalisasi industri di Kabupaten Garut diantaranya penyamakan kulit, minyak akar wangi serta tekstil. Adapun sebaran potensi industri dapat dilihat pada gambar.

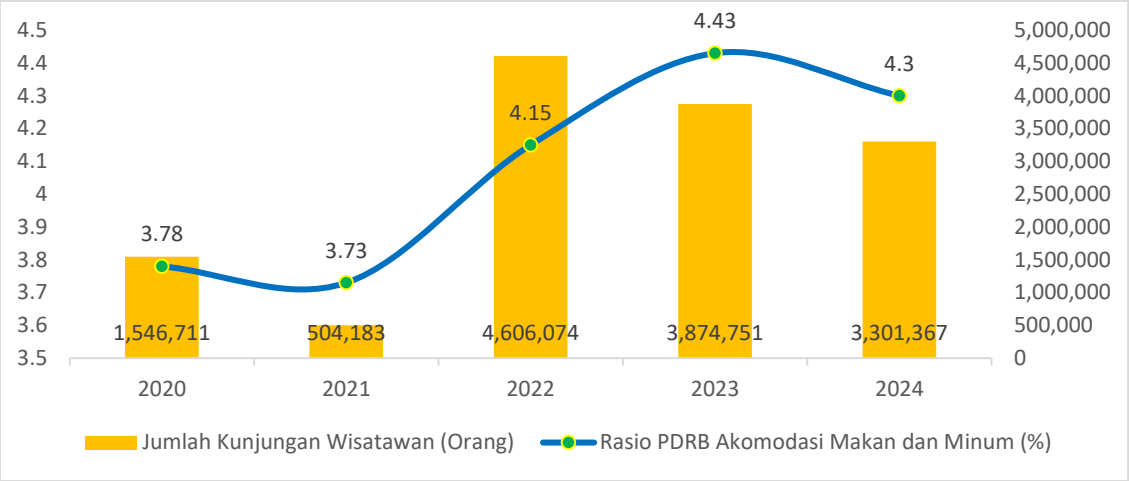


Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.77 Sebaran Potensi Industri di Kabupaten Garut

Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, pengembangan industri diarahkan di wilayah utara dan wilayah tengah kabupaten. Pengembangan industri tekstil diarahkan di Kecamatan Leles, Cibatu, Balubur Limbangan dan Selaawi. Pengembangan industri penyamakan kulit diarahkan di Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, Cibatu dan Selaawi. Kemudian industri akar wangi diarahkan di Kecamatan Samarang, Pasirwangi, Leles, Bayongbong, Cilawu dan Sukaresmi.

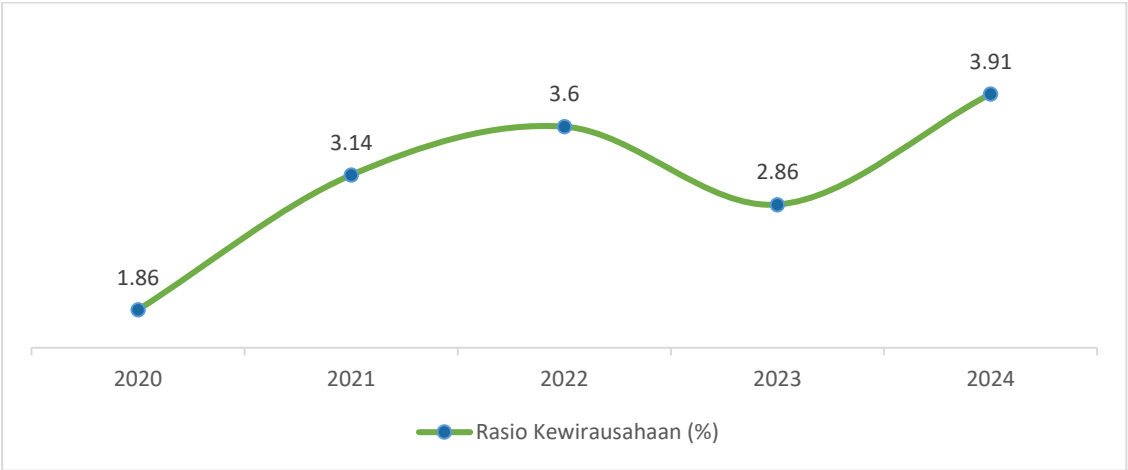
Selaras dengan itu, rasio PDRB sektor akomodasi, makan dan minum juga mengalami peningkatan signifikan dari 3,78% pada tahun 2020 menjadi 4,3% di tahun 2024. Kenaikan ini sangat berkorelasi dengan tumbuhnya aktivitas pariwisata di daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yang melonjak dari hanya 504.183 orang pada tahun 2021 menjadi lebih dari 3,3 juta orang pada 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan BPS Kabupaten Garut, 2025 (diolah)

Gambar 2.78 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024

Hal Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif di berbagai lini.



Sumber: Diskop UKM, 2025 (diolah)

Gambar 2.79 Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

Dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, Kabupaten Garut mencatat Indeks Ekonomi Kreatif sebesar 86,88 poin pada tahun 2024, yang menandakan ekosistem ekonomi kreatif telah mulai terbentuk dengan baik. Selain itu, rasio kewirausahaan daerah menunjukkan tren positif, meningkat dari 1,86% pada tahun 2020 menjadi 3,91% pada 2024, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mandiri dan UMKM. Meskipun cenderung meningkat namun nilai tersebut masih terbilang rendah, hal ini menginterpretasikan bahwa usaha di Kabupaten Garut yang dibantu pekerja tetap dan dibayar masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan usaha yang dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak

dibayar. Kondisi demikian menggambarkan karakteristik dari pelaku usaha di Kabupaten Garut yang lebih bersifat *necessity entrepreneur*, yang artinya para pelaku usaha membuka usahanya secara mandiri dan cenderung memulai usahanya karena keterpaksaan untuk mencukupi kebutuhan karena tidak dapat menemukan pekerjaan formal yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

Tabel 2.29 Jumlah UMKM Kabupaten Garut berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Banjarwangi	851	1.124	1.548	3.520
2	Banyuresmi	536	1.587	3.402	7.026
3	Bayongbong	568	1.343	2.765	5.792
4	Bl. Limbangan	467	2.569	6.593	8.884
5	Bungbulang	538	801	2.520	4.298
6	Caringin	132	282	555	1.961
7	Cibalong	120	687	1.584	3.344
8	Cibatu	408	849	1.547	3.679
9	Cibiuk	132	353	790	2.083
10	Cigedug	256	481	671	1.570
11	Cihurip	46	143	357	847
12	Cikajang	551	1.057	1.627	3.245
13	Cikelet	127	477	1.150	2.850
14	Cilawu	607	1.511	3.349	6.903
15	Cisewu	105	278	759	2.157
16	Cisompet	95	385	860	1.985
17	Cisurupan	470	1.103	2.056	4.778
18	Garut Kota	1.249	3.626	8.052	15.512
19	Kadungora	587	999	1.751	5.120
20	Karangpawitan	1.144	3.375	7.447	14.599
21	Karangtengah	55	121	335	711
22	Kersamanah	153	414	889	2.131
23	Leles	365	695	1.815	4.849
24	Leuwigoong	204	528	1.562	3.895
25	Malangbong	559	1.282	3.311	7.169
26	Mekarmukti	79	132	504	793
27	Pakenjeng	282	671	1.654	4.390
28	Pameungpeuk	186	770	1.723	3.145
29	Pamulihan	58	206	689	1.126
30	Pangatikan	150	348	810	1.922
31	Pasirwangi	291	656	1.169	3.566
32	Peundeuy	130	226	422	1.177
33	Samarang	908	1.713	2.251	5.100

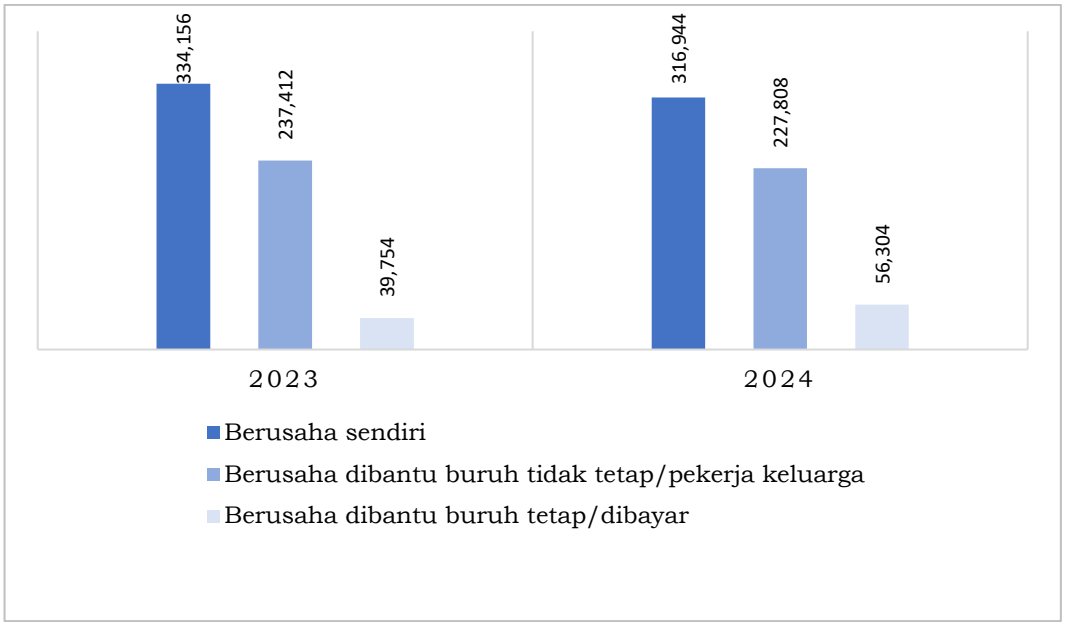
No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
34	Selaawi	157	406	1.266	2.420
35	Singajaya	194	541	1.309	2.238
36	Sucinaraja	112	354	785	2.341
37	Sukaresmi	131	485	1.022	1.727
38	Sukawening	254	451	1.079	2.960
39	Talegong	147	232	566	932
40	Tarogong Kaler	686	1.522	4.229	8.014
41	Tarogong Kidul	1.319	3.014	8.157	15.449
42	Wanaraja	276	575	1.259	2.613
	Jumlah	15.685	38.372	86.189	178.821

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025

Berdasarkan data jumlah UMKM Kabupaten Garut per kecamatan pada periode 2021–2024, terlihat adanya pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah UMKM secara keseluruhan meningkat dari 15.685 unit pada tahun 2021 menjadi 178.821 unit pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 11 kali lipat dalam kurun waktu empat tahun. Lonjakan terbesar terjadi pada rentang tahun 2023 ke 2024, di mana jumlah UMKM hampir dua kali lipat, yaitu dari 86.189 menjadi 178.821 unit.

Peningkatan jumlah pelaku UKM Kabupaten Garut merupakan salah satu wujud dari kemudahan berusaha yang diberlakukan melalui sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Namun disisi lain masih rendah kepedulian pelaku UKM untuk memiliki perizinan berusaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha, sehingga penyelenggaraan urusan UKM dilaksanakan dalam program pengembangan usaha mikro dengan bentuk fasilitasi pendaftaran merk, hak kekayaan intelektual, SPP-IRT, sertifikasi halal, inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan pelaku UKM dari mulai penyediaan sarana prasarana, manajemen usaha, bantuan perkuatan modal, hingga penggunaan teknologi digital agar pelaku UKM lebih bernilai tambah, berdaya saing, dan produktif. Perwujudan upaya peningkatan daya saing pelaku UKM di Kabupaten Garut dalam lima tahun terakhir seperti fasilitas Garut *Packaging House* dan Rumah Produksi Bersama Kulit Garut.

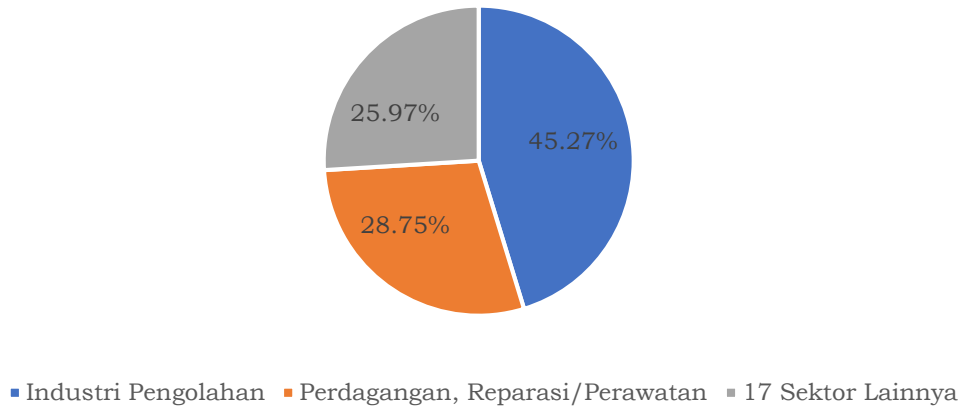
Selama kurun waktu 2020-2024 pelaku usaha di Kabupaten Garut terus meningkat dalam, dari total 1,44 juta angkatan kerja pada tahun 2024, sebanyak 601.056 orang merupakan pelaku usaha dengan berbagai jenis klasifikasi berusaha, yaitu berusaha sendiri sejumlah 316.944 pelaku usaha, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga sejumlah 227.808 pelaku usaha, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 56.304 pelaku usaha.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi dan UKM, 2024

Gambar 2.80 Pelaku Usaha berdasarkan Jenis Usaha Kabupaten Garut Tahun 2023-2024

Dari total pelaku usaha Kabupaten Garut 2024 sejumlah 601.056, hanya sebesar 23% atau sejumlah 134.548 pelaku usaha yang merupakan pelaku usaha formal, dengan total usaha formal sejumlah 178.821, yang artinya terdapat satu pelaku usaha yang memiliki usaha lebih dari satu. Pelaku usaha formal ini dinilai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

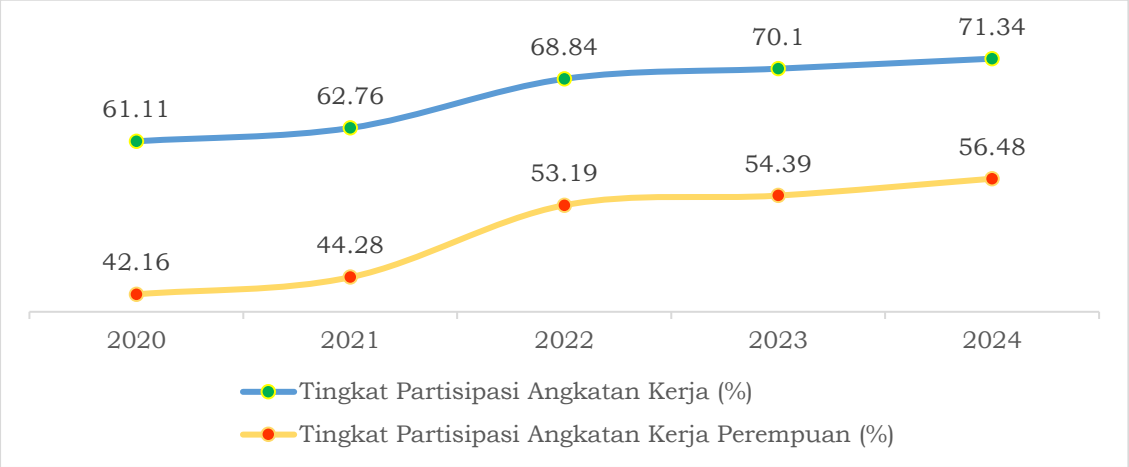


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi dan UKM, 2025

Gambar 2.81 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Garut

Pada tahun 2024 sebesar 45,27% atau 80.955 usaha bergerak di sektor industri pengolahan dari total 178.821 usaha yang terdaftar. Berdasarkan turunan sektor industri pengolahan, pelaku UKM Kabupaten Garut sebagian besar bergerak di pengolahan makanan dan minuman

yaitu mencapai 88,17%. Sektor produksi makanan dan minuman merupakan sektor industri pengolahan dan termasuk sektor andalan, yaitu sektor yang memiliki prospektif dengan kontribusi yang terus tumbuh dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di Kabupaten Garut yaitu rata – rata pertumbuhan sebesar 7,8 %.

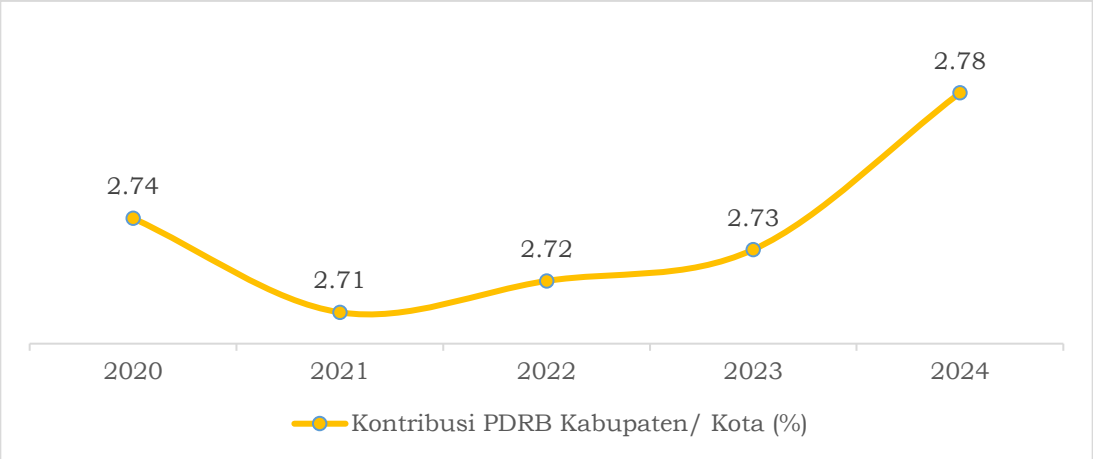


Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2025 (diolah)

Gambar 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

Di sisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terus menunjukkan tren peningkatan, dari 61,11% pada tahun 2020 menjadi 71,34% di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Terlebih lagi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat signifikan dari 42,16% di tahun 2020 menjadi 56,48% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan serta meningkatnya kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Untuk mendorong inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Garut juga terus mengembangkan sistem dan kebijakan yang mendorong munculnya ide-ide kreatif dan teknologi tepat guna. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Garut menunjukkan dinamika capaian selama periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2022 indeks inovasi tercatat sebesar 54,13 poin. Namun, capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 42,96 poin, yang mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program inovatif di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, pada tahun 2024, kinerja inovasi daerah berhasil meningkat kembali ke angka 52,16 poin, menunjukkan adanya pemulihan dan upaya perbaikan dalam tata kelola inovasi publik. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya penguatan ekosistem inovasi daerah secara berkelanjutan, baik melalui dukungan kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi multipihak.



Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2025 (diolah)

Gambar 2.83 Kontribusi PDRB Kabupaten Garut terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Selanjutnya jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Kontribusi PDRB Kabupaten Garut terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren yang stabil, dengan sedikit peningkatan dari 2,74% pada tahun 2020 menjadi 2,78% pada tahun 2024. Meski kontribusi ini tergolong masih rendah secara agregat, peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi daerah Kabupaten Garut semakin berkembang dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, Kabupaten Garut mulai mengadopsi pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing daerah. Pada tahun 2024, pemerintah mulai menghitung dua indikator penting, yakni Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*/GEI) dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan rendah emisi dan berbasis ekosistem.

Pada prinsipnya Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari tiga pilar yakni pilar sosial, pilar ekonomi dan pilar lingkungan. Namun dengan menyesuaikan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan pada tingkat Kabupaten/Kota maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke Kabupaten/Kota dikhususkan pada "Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi". Terkait Pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat Kabupaten/Kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan Kabupaten/Kota sebagai turunan indikator dari provinsi. Dengan demikian, parameter yang digunakan untuk Indeks Ekonomi Hijau adalah parameter-parameter yang terdapat pada pilar ekonomi, diantaranya produktivitas akuakultur,

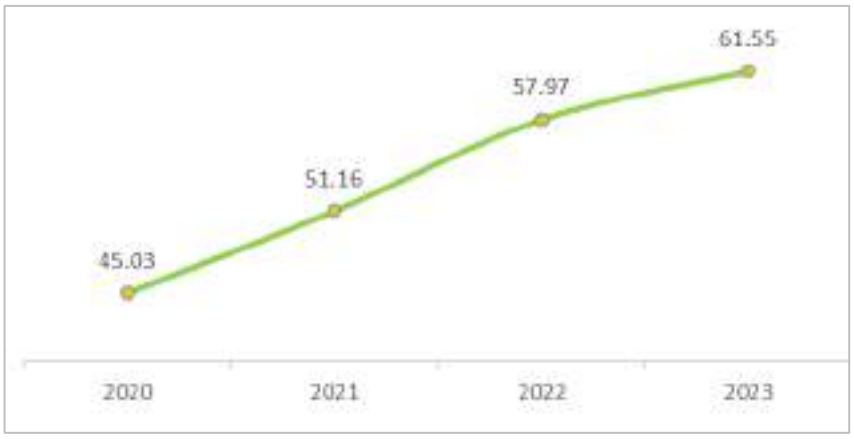
produktivitas padi, produktivitas tenaga kerja industri, produktivitas tenaga kerja jasa, dan PDRB Per kapita.

Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Garut pada tahun 2023 sebesar 30,58 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 33,66, yang menggambarkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Garut berada pada kategori sedang, sehingga diperlukan upaya-upaya konkret yang dapat mendorong peningkatan pada kelima parameter penyusun Indeks Ekonomi Hijau.

Di sisi lain, Kabupaten Garut memiliki potensi perairan laut dan perairan umum daratan. Garut memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keterbatasan infrastruktur dan akses pasar menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Index*) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dan perkembangan ekonomi biru di suatu wilayah atau negara. Ekonomi biru sendiri adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesehatan lingkungan. Indeks Ekonomi Biru Indonesia dibentuk oleh tiga pilar utama yang meliputi pilar lingkungan, sosial dan ekonomi. Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang menggambarkan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan tercatat sebesar 6,86 di tahun 2023, dan meskipun masih tergolong awal, capaian ini menjadi pijakan penting dalam memulai integrasi pendekatan ekonomi biru, terutama pada sektor perikanan budidaya dan pengelolaan air darat yang berkelanjutan.

D. Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah di era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempercepat proses pelayanan publik dan kegiatan ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan peluang usaha. Salah satu indikator kunci yang mencerminkan capaian transformasi digital di Kabupaten Garut adalah Persentase Penduduk Usia di Atas 5 Tahun yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir. Indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk memiliki akses dan keterampilan dalam memanfaatkan internet untuk berbagai aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, komunikasi, maupun transaksi digital.



Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2025 (diolah)

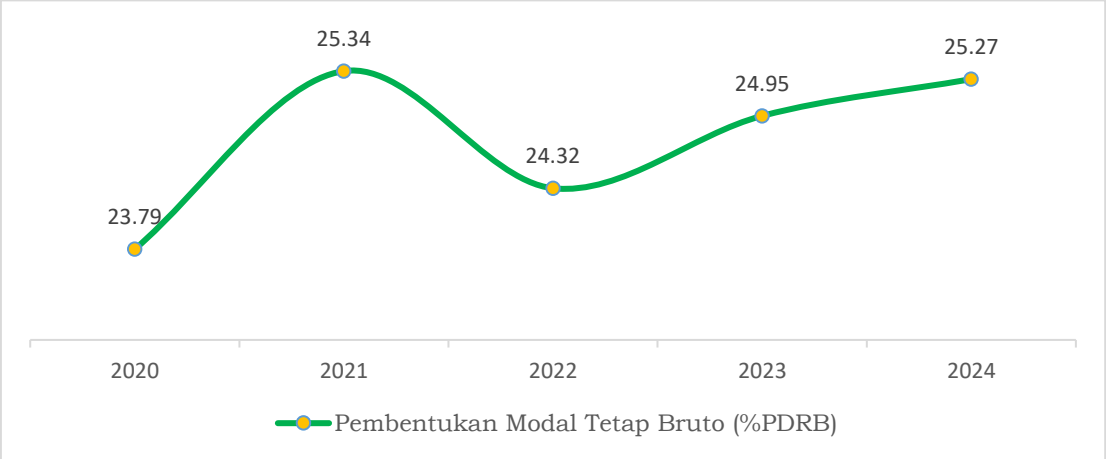
Gambar 2.84 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Internet dalam 3 bulan terakhir Tahun 2020-2023

Selama periode 2020–2023, terjadi peningkatan signifikan terhadap indikator ini. Pada tahun 2020, hanya 45,03% penduduk yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Angka ini naik menjadi 51,16% pada tahun 2021, kemudian 57,97% pada tahun 2022, dan mencapai 61,55% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi semakin merata dan diakses oleh lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perdesaan dan sub-perkotaan. Capaian ini sejalan dengan peningkatan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet, program literasi digital, serta penggunaan platform digital oleh pemerintah dan masyarakat. Meski demikian, angka ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 38% penduduk yang belum terhubung secara aktif ke internet, sehingga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Selanjutnya, transformasi digital akan difokuskan tidak hanya pada penyediaan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pemanfaatan internet, seperti untuk pembelajaran daring, kewirausahaan digital, layanan kesehatan berbasis teknologi, dan interaksi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat melalui platform digital pelayanan publik.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Dalam upaya memperkuat daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan perekonomian domestik maupun global, Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan investasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Hal ini tercermin dari tren Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai indikator yang menggambarkan besarnya investasi dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Selama periode 2020–2024, PMTB Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar 23,79%, kemudian meningkat menjadi 25,34% pada tahun 2021. Meski mengalami sedikit penurunan

pada tahun 2022 menjadi 24,32%, tren kembali meningkat menjadi 24,95% di tahun 2023, dan mencapai 25,27% pada tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2025 (diolah)

Gambar 2.85 Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan iklim investasi serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam aktivitas pembangunan fisik, baik oleh sektor swasta maupun publik. Pertumbuhan PMTB juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Garut semakin terkonsolidasi dalam skala produksi jangka panjang, melalui pembangunan infrastruktur, pembukaan kawasan ekonomi, serta penguatan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, industri kecil menengah, dan perdagangan.

Tren positif ini menjadi indikasi awal kesiapan Kabupaten Garut untuk terintegrasi secara lebih kuat dalam rantai pasok regional dan nasional, serta membuka peluang untuk peningkatan kerja sama investasi dengan mitra internasional di masa mendatang. Ke depan, penguatan kapasitas promosi investasi, penyederhanaan perizinan, dan pembangunan infrastruktur penunjang akan menjadi kunci untuk mendorong akselerasi PMTB secara lebih luas dan merata.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah berbasis perkotaan dan perdesaan yang berimbang menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Kabupaten Garut sebagai wilayah dengan struktur geografis dan demografis yang beragam, mengembangkan pendekatan terintegrasi untuk menjadikan kawasan perdesaan dan sub-perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dari sisi infrastruktur dasar, berikut merupakan kondisi capaian infrastruktur dasar Kabupaten Garut:

a. Kemantapan jalan

Tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2024 mencapai 56,94% dengan dengan panjang jalan mantap (kondisi Baik dan Sedang) yaitu 2.221,8 km dari total panjang 3.902 km. Total panjang jalan yang berada di Kabupaten Garut per tahun 2024 yaitu sepanjang 4.284,02 Km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 95,99 km, jalan provinsi 286,03 km, jalan kabupaten sepanjang 1.022,24 km dan jalan desa sepanjang 2.879,76 km.

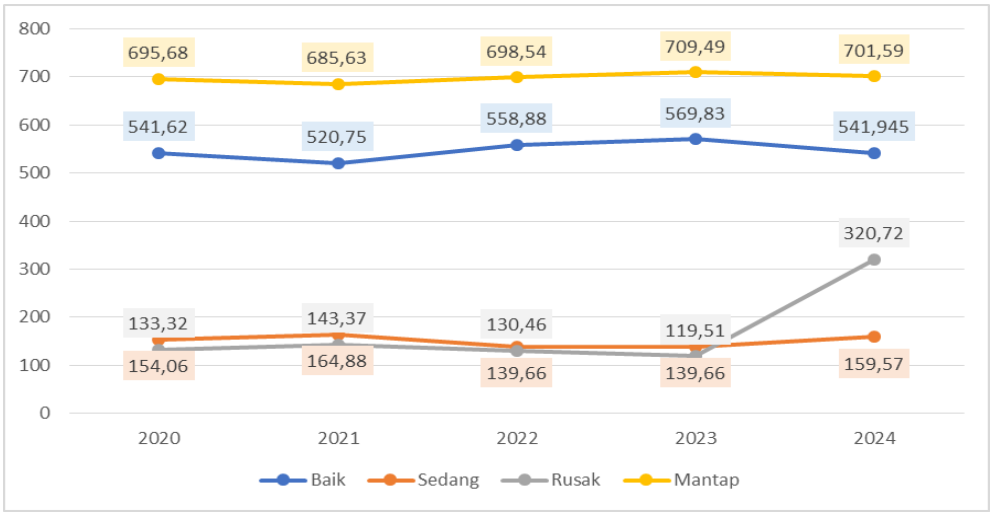
Tabel 2.30 Kondisi Jalan (Kabupaten dan Desa) Tahun 2024

No	Kondisi	Panjang (km)			Kemantapan (%)		
		Jalan Kabupaten	Jalan Desa	Total	Jalan Kabupaten	Jalan Desa	Total
1	Baik	541,95	529,53	1.071,48			
2	Sedang	159,57	990,75	1.150,32			
	Mantap (Baik dan Sedang)	*701,52*	*1.520,28*	*2.221,80*	68,63%	52,79%	56,94%
3	Rusak Ringan	106,71	443,28	549,99	10,44%	15,39%	14,10%
4	Rusak Berat	214,01	916,20	1.130,21	20,94%	31,82%	28,96%
Total		1.022,24	2.879,76	3.902,00	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

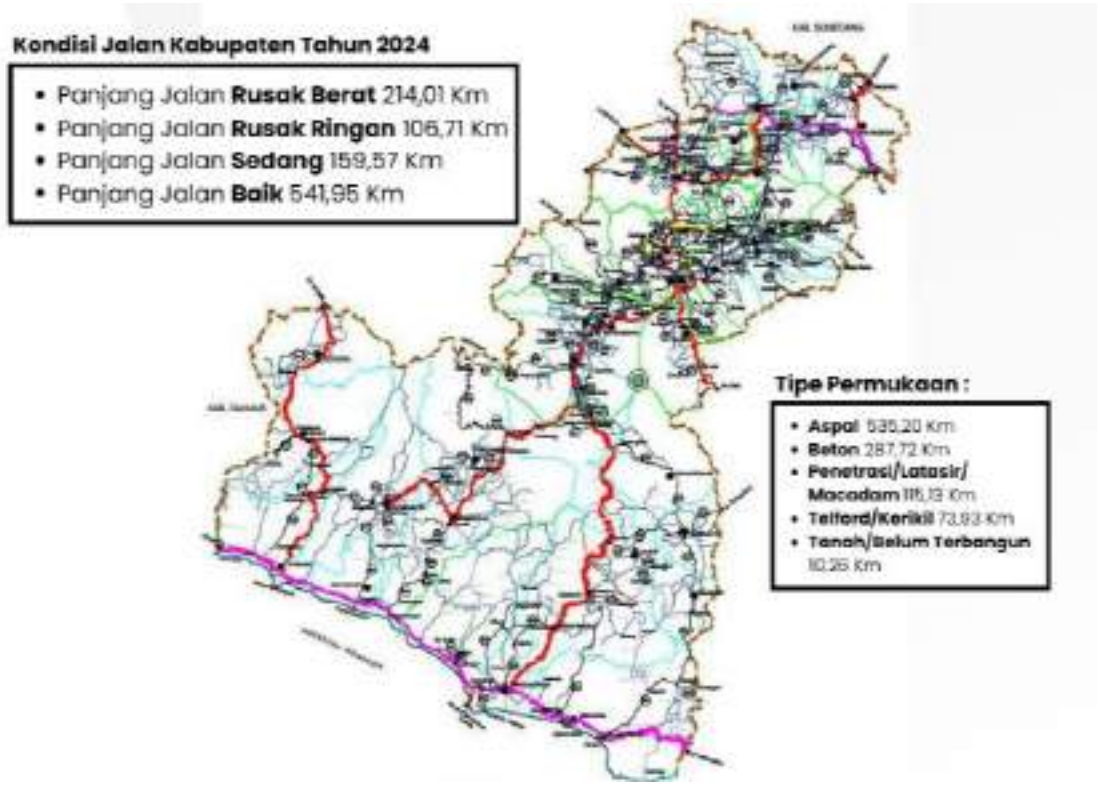
Adapun untuk kondisi jalan desa, terdapat 1.520,28 km jalan desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang) atau 52,79% dari total jalan desa, serta 31,83% jalan rusak berat dari total 2.879,76 km jalan sebagaimana terlihat pada tabel. Sampai dengan akhir tahun 2024, jalan dalam kondisi rusak baik rusak ringan maupun rusak berat didominasi oleh status jalan desa, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemeliharaan rutin pada status jalan desa.

Pada tahun 2024 status jalan kewenangan kabupaten mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/ Kep.774-PUPR/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten. Semula panjang jalan Kabupaten adalah 829 km dengan jumlah ruas 128, menjadi sepanjang 1.022,24 km dengan jumlah ruas 162. Hal ini turut berpengaruh terhadap penghitungan kondisi jalan Kabupaten, tercatat tahun 2024 panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Rusak (Rusak berat dan Sedang) mencapai 320,72 Km meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan jalan rusak pada tahun 2023 yang hanya mencapai 119,51 Km. Secara tren, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Garut terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.86 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024



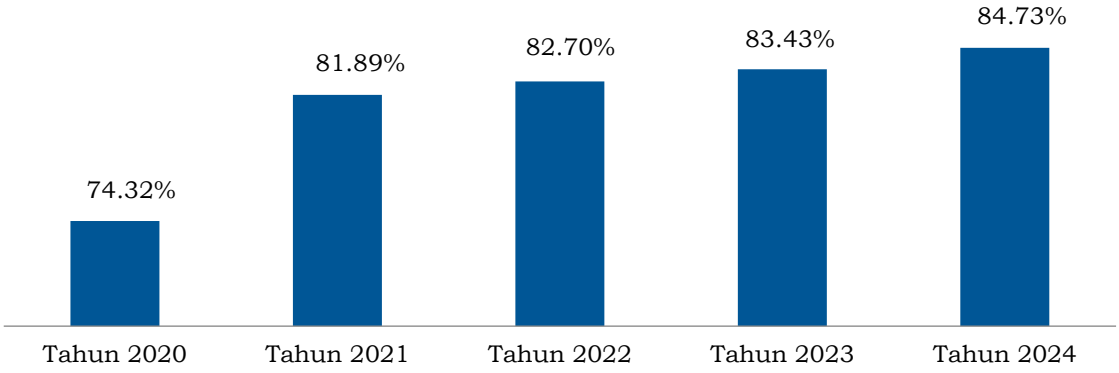
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.87 Peta Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2024

Adapun berdasarkan tipe permukaan, jalan kabupaten didominasi oleh aspal 535,20 km, disusul oleh aspal 535,20 km, penetrasi/latasir/macadam 115,13 km, telford/kerikil 73,93 km dan tanah/belum terbangun 10,26 km. Berikut merupakan peta kondisi jalan Kabupaten Garut per tahun 2024.

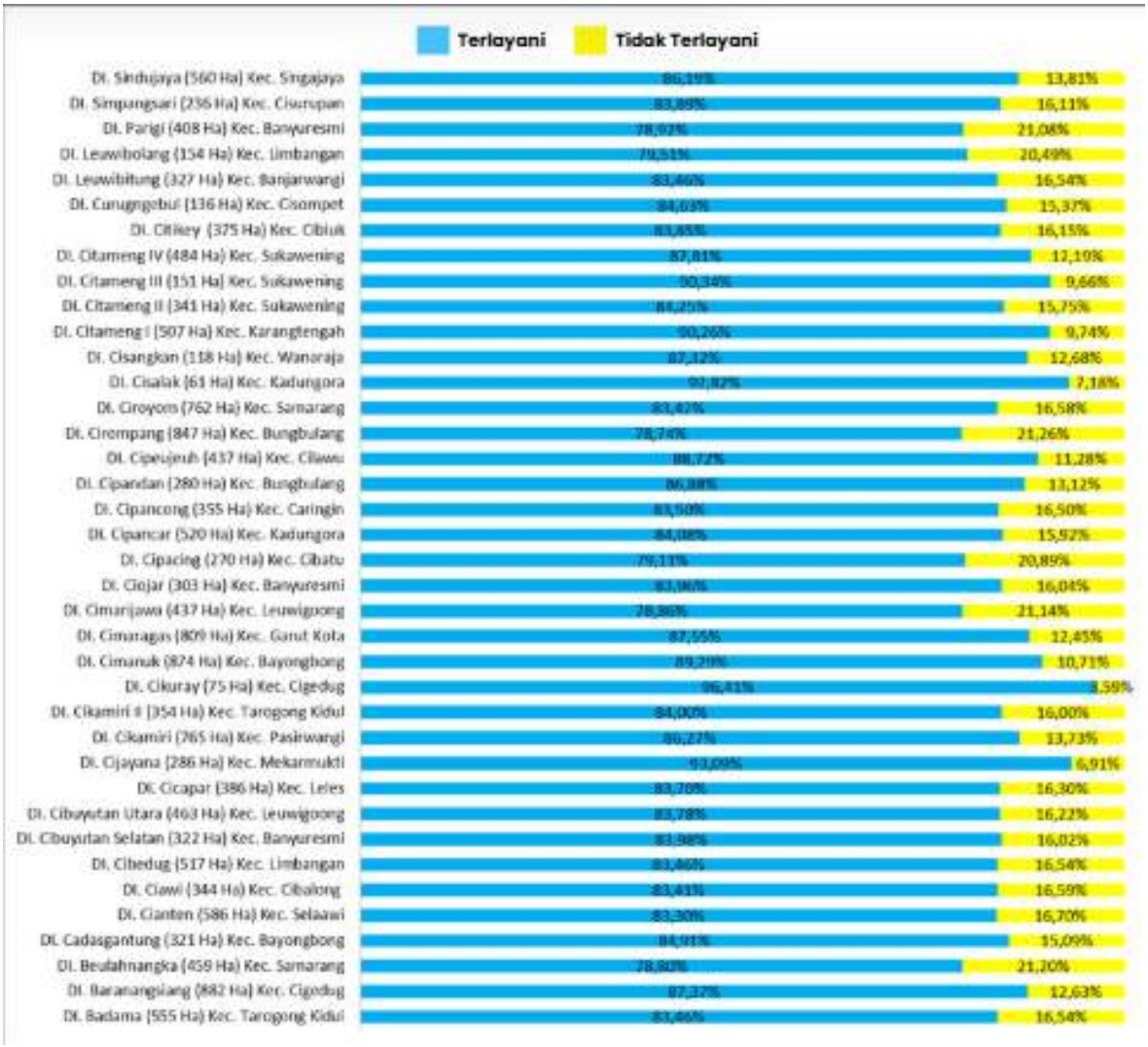
b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, hingga tahun 2024 areal yang terlayani adalah seluas 13.614 Ha atau 84,73% Luas daerah irigasi teknis kewenangan Pemerintah Daerah. Capaian hingga akhir tahun 2024 meliputi: jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten yang telah direhabilitasi sepanjang 35,50 km dan jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan sepanjang 120 km. Hasil pembangunan telah meningkatkan ketersediaan air, terutama untuk kebutuhan irigasi. Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA yaitu peningkatan luas areal yang terlayani air irigasi. Sampai akhir tahun 2024 luas areal irigasi kewenangan kabupaten yang terlayani air seluas 13.614 ha atau 84,73% dari total luas layanan 16.067 ha.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.88 Persentase Luas Areal Irigasi Kewenangan Kabupaten Terlayani Air Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Gambar 2.89 Persentase Layanan Areal Per Daerah Irigasi Tahun 2024

c. Air Bersih dan Sanitasi

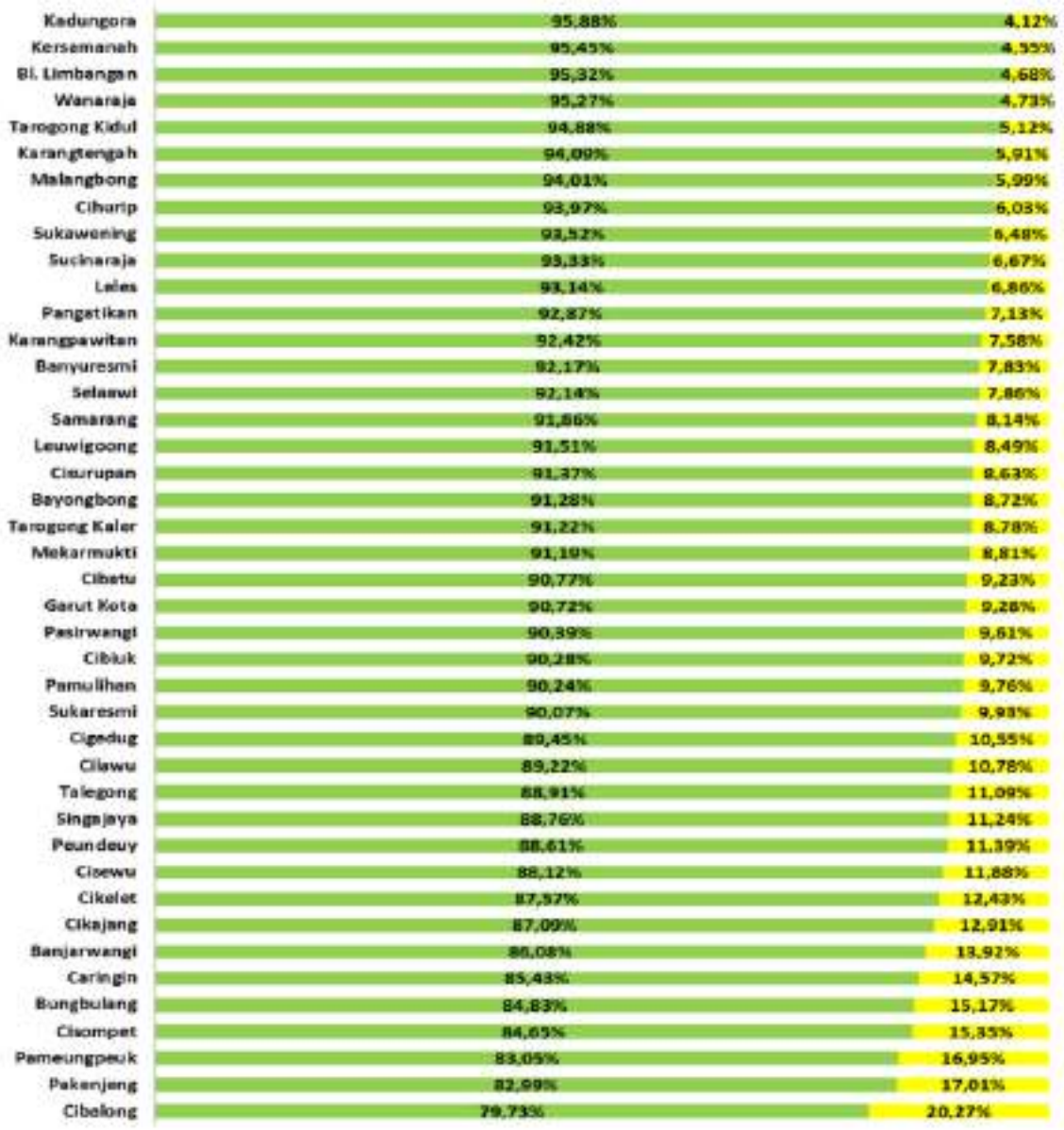
Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dinilai melalui cakupan air minum layak dan cakupan sanitasi layak. Persentase Air Minum Layak artinya dimana air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum sedangkan sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik.

Pencapaian kinerja cakupan air minum layak pada tahun 2024 sebesar 90,74% mengalami peningkatan 0,70 dari tahun 2024. Meskipun

cenderung meningkat dari capaian di tahun sebelumnya namun beberapa permasalahan masih ditemui diantaranya ketersediaan air yang semakin menurun, belum optimalnya pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan serta perlindungan sumber-sumber air yang belum dilakukan secara maksimal. Jumlah jiwa yang terlayani air minum layak sebanyak 2.532.041 jiwa (90,74%). Layanan penyediaan air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan, PAMSIMAS, PDAM, sumur gali dan sumur bor.

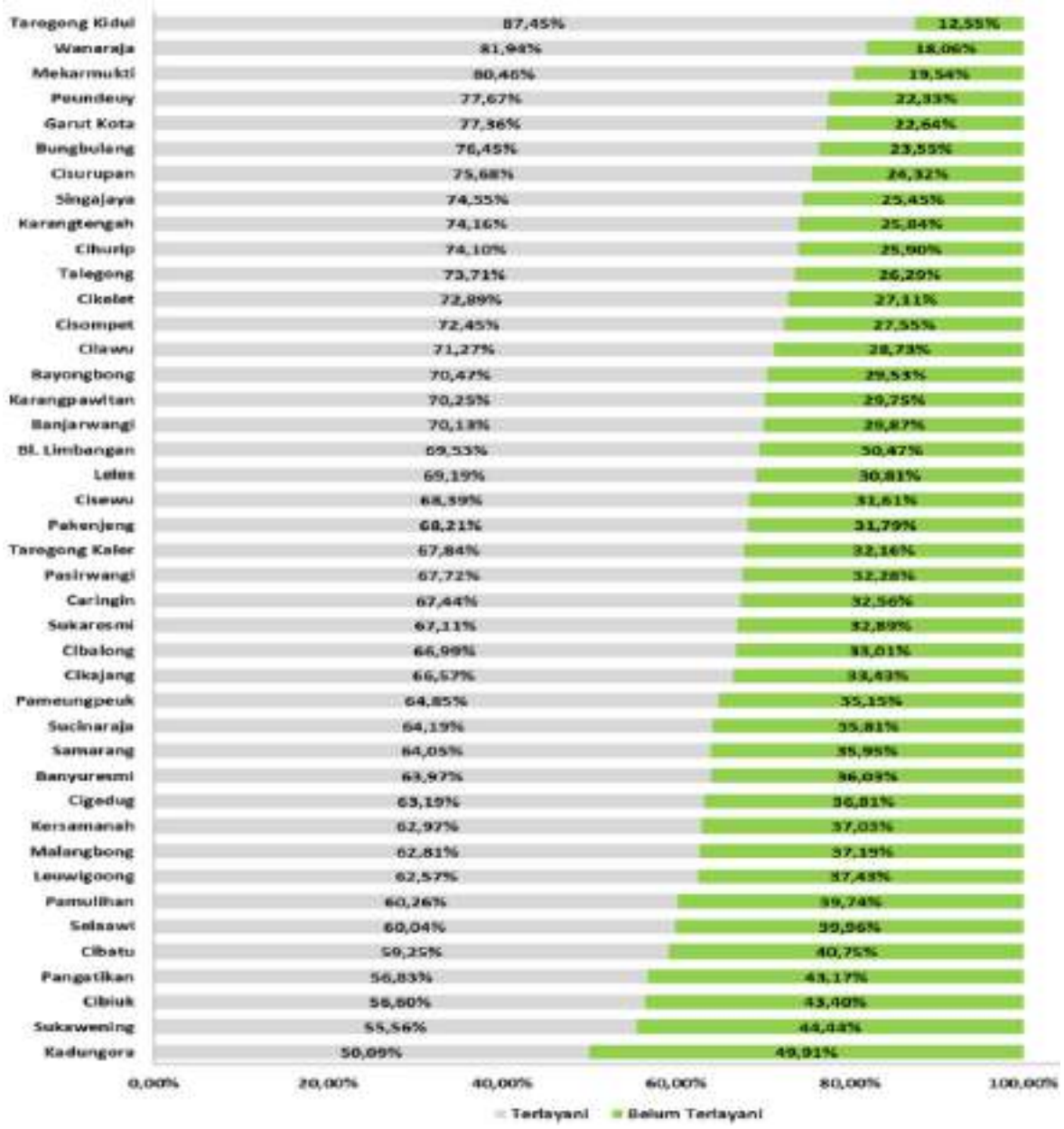
Pencapaian kinerja cakupan sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 68,53% mengalami peningkatan 0,42% dari tahun 2023 yang mencapai 68,11%. Adapun jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah domestik mencapai 627.847 rumah tangga (68,53%). Layanan melalui pengelolaan air limbah domestik setempat (MCK dan Tangki Septik), dan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman (IPAL Komunal). Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian cakupan sanitasi layak di Kabupaten Garut yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, pengelolaan air masih belum dilaksanakan, pengelolaan pasca pembangunan belum dilakukan, dan pengelolaan air limbah berskala kawasan belum dilakukan serta belum terdapat unit-unit kerja khusus dalam pengelolaan air limbah.

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2024, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan capaian SPM Pekerjaan umum capaian tahun 2024 belum mampu mencapai 100 persen dikarena capaian pelayanan dihitung secara akumulatif setiap tahunnya, namun secara pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum telah mencapai 100 persen. Adapun persentase cakupan air minum per kecamatan dan cakupan air limbah domestik berdasarkan kecamatan tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.90 Persentase Cakupan Air Minum Per Kecamatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2025)

Gambar 2.91
Persentase Cakupan Air Limbah Domestik Per Kecamatan

d. Penataan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2024 mencapai 90,7 4% meningkat dibanding tahun sebelumnya dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersusun, tetapi belum ditetapkan melalui Perkada. Sesuai kebijakan bahwa Perda RTRW perlu dilakukan reviu/revisi. Progres sampai tahun 2024 berupa pengajuan surat peninjauan kembali RTRW ke Kementerian

ATR/BPN dan Penyusunan Raperda, Materi Teknis, dan Album Peta Revisi RTRW Kabupaten Garut. Selama periode tahun 2020-2024. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang akhir tahun 2024 sebesar 85,08% meningkat 2,58% dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,05%. Luas wilayah yang penggunaannya sesuai pola ruang sampai dengan akhir tahun 2024 seluas 269.200,82 ha dari luas wilayah yang seharusnya berdasarkan rencana ruang 316.409,50 ha.

d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Sampai dengan tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang belum ditangani yaitu sebanyak 27.590 unit. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 20204 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Garut yaitu sebanyak 34,61%, berarti sebanyak 65,39% rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.



Sumber: BPS (Tahun 2025)

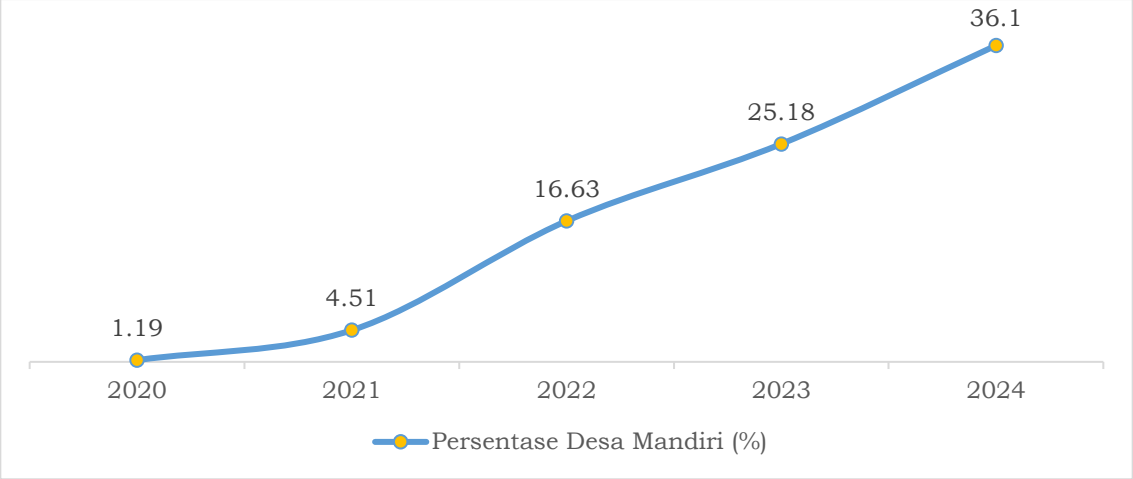
Gambar 2.92
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni
Kabupaten Garut Tahun 2024

Adapun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi kedua terendah untuk persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni yaitu sebesar 34,61%, satu peringkat diatas Kabupaten Sukabumi (32,83%).

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan wilayah berbasis perkotaan dan perdesaan yang berimbang, mulai tahun 2025 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Kualitas Infrastruktur, yang akan mengukur kondisi dan berfungsinya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan akses digital. Indeks ini akan menjadi alat ukur penting untuk mengetahui sejauh mana pemerataan dan

kualitas infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dan sub-perkotaan. Karena indikator ini masih baru, penghitungan indeks akan dimulai pada tahun 2025, dan akan menjadi bagian dari evaluasi daya saing wilayah dalam periode mendatang.

Demikian pula, indikator baru lainnya adalah Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan proporsi rumah tangga yang menghuni tempat tinggal dengan kondisi fisik memadai, terjangkau dari sisi biaya, serta dilengkapi dengan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses ke transportasi umum. Pengukuran indikator ini juga baru akan dimulai pada tahun 2025, dan sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi ketimpangan wilayah.



Sumber: Kementerian Desa (2025), data diolah

Gambar 2.93 Persentase Desa Mandiri Tahun 2020-2024

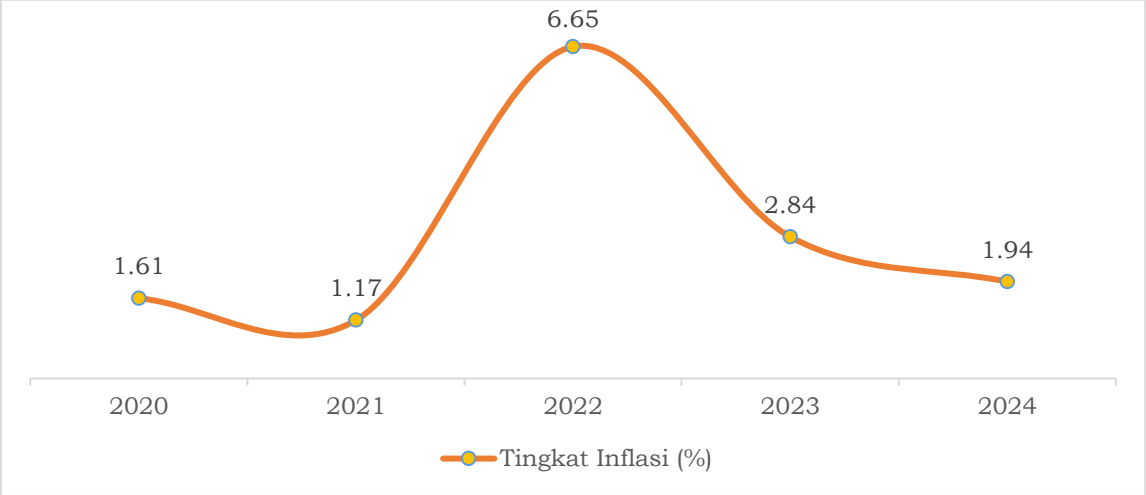
Dari sisi percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan, selama periode 2020–2024, Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya 1,19% pada tahun 2020 menjadi 36,10% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan berbasis desa yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan desa, ketersediaan layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal. Desa mandiri menjadi indikator penting dalam menggambarkan kemandirian desa dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Garut secara konsisten menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan fiskal daerah dan kestabilan harga, guna menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dan berkelanjutan.

1. Tingkat Inflasi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat stabilitas harga adalah tingkat inflasi. Tingkat Inflasi Kabupaten Garut menunjukkan kondisi yang relatif stabil, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami lonjakan hingga 6,65% akibat tekanan eksternal dan gangguan pasokan pangan nasional. Setelah itu, inflasi kembali terkendali di kisaran 2,84% pada 2023 dan 1,94% pada 2024. Pengendalian inflasi yang efektif menunjukkan kapasitas daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kestabilan harga barang kebutuhan pokok.



Sumber: BPS Kabupaten Garut (2025), data diolah

Gambar 2.94 Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024

2. Pengeluaran per Kapita

Selanjutnya, indikator untuk mengukur daya beli masyarakat yaitu Pengeluaran per Kapita dengan capaian Kabupaten Garut yaitu sebesar 9,17 juta Rupiah per kapita per tahun di tahun 2024. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun masih berada dibawah angka pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat (12,16 juta Rupiah) dan nasional (12,34 juta Rupiah) sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Sumber: BPS (2025), data diolah

Gambar 2.95 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Jawa Barat, pengeluaran per kapita Kabupaten Garut masih berada pada peringkat kedua terendah. Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 1.083.996 per bulan yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan (*food*) sebesar Rp. 647.995 (59,78%) dan pengeluaran konsumsi non pangan (*non-food*) sebesar Rp. 436.001 (40,22%). Proporsi pengeluaran pangan yang lebih besar dari proporsi pengeluaran non-pangan (akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, transportasi dan komunikasi) menunjukkan adanya indikasi daya beli masyarakat yang masih rendah dan rendahnya kualitas hidup.

3. Indeks Akses Keuangan Daerah

Sebagai salah satu elemen pendukung penguatan ekonomi inklusif, indikator Indeks Akses Keuangan Daerah yang baru dirilis oleh Bappenas pada tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Garut Tahun 2024 adalah sebesar 3,42. Nilai ini mencerminkan kondisi awal inklusi keuangan di daerah, di mana akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi masih perlu diperluas. Akses keuangan yang baik akan menjadi penopang pertumbuhan UMKM, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

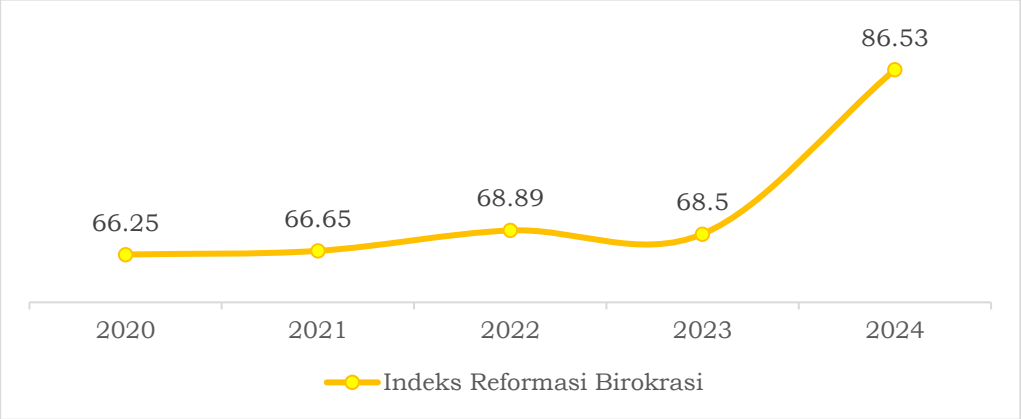
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB mencerminkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis kegiatan ekonomi. Selama periode 2020-2024, rasio ini mengalami peningkatan dari 0,201 pada tahun 2020 menjadi 0,208 (Tahun 2021), 0,237 (Tahun 2022) dan puncaknya di angka 0,241 pada tahun 2023, lalu sedikit menurun menjadi 0,215 pada tahun 2024. Kecenderungan

peningkatan hingga 2023 mencerminkan kinerja fiskal yang cukup baik dalam menggali potensi pajak daerah, walaupun pada tahun 2024 perlu penguatan kembali dalam optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, responsif, dan modern, Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penguatan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif selama periode 2020–2024. Sejumlah indikator utama yang mencerminkan reformasi birokrasi, transformasi digital, kualitas pelayanan, serta penguatan integritas telah menunjukkan tren peningkatan positif. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator kunci dalam mengukur sejauh mana birokrasi daerah mampu bertransformasi menjadi institusi yang profesional, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap telah menerapkan reformasi kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN).

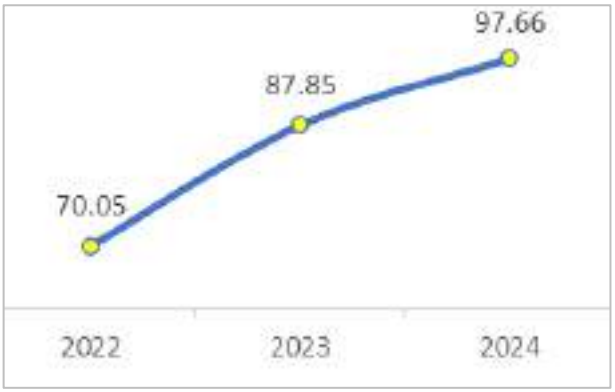


Sumber: Kementerian PANRB (2025), data diolah

Gambar 2.96 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yang konsisten, dari 66,25 pada tahun 2020 menjadi 86,53 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Garut dalam menerapkan prinsip-prinsip birokrasi modern, seperti penyederhanaan struktur, peningkatan kinerja ASN, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal. Peningkatan ini juga menjadi indikasi kuat atas komitmen daerah dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Selaras dengan itu, peningkatan Indeks Reformasi Hukum menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses penyusunan dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) terus dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan

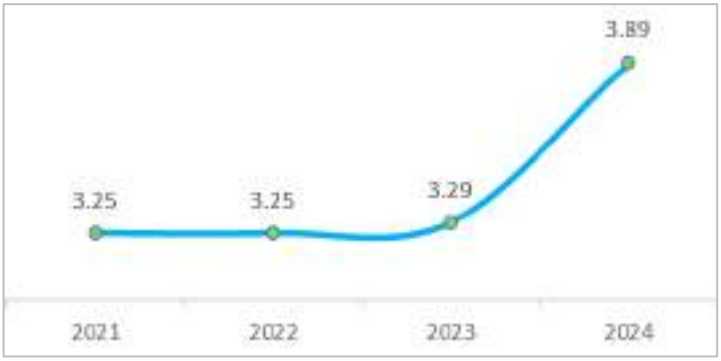
hukum di tingkat daerah selaras dengan peraturan nasional dan menjawab kebutuhan lokal secara efektif. Indeks Reformasi Hukum mengalami lompatan signifikan, dari 70,05 pada Tahun 2022 lalu naik menjadi 87,85 (Tahun 2023) dan 97,66 (Tahun 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan pembenahan sistem regulasi secara serius, termasuk harmonisasi peraturan daerah, penyusunan regulasi berbasis kebutuhan masyarakat, serta peningkatan akses dan kepastian hukum.



Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (2025), data diolah

Gambar 2.97 Capaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022-2024

Transformasi digital dalam birokrasi tercermin dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong peningkatan efisiensi layanan, integrasi data antar-perangkat daerah, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. SPBE menjadi tulang punggung modernisasi birokrasi untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.

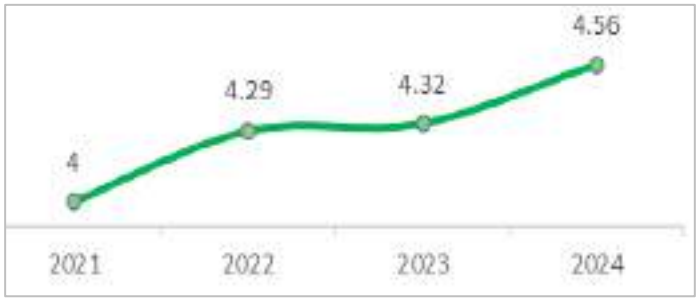


Sumber: Kementerian PANRB (2025), data diolah

Gambar 2.98 Capaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024

Kualitas layanan kepada masyarakat juga mengalami peningkatan yang konsisten berdasarkan capaian Indeks Pelayanan Publik, dari nilai 4 pada tahun 2021 menjadi 4,56 pada tahun 2024. Hal ini menjadi bukti

bahwa reformasi yang dilakukan mulai berdampak nyata terhadap kemudahan, kecepatan, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dan sistem pengaduan berbasis elektronik telah diimplementasikan untuk mempercepat akses dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan.



Sumber: Kementerian PANRB (2025), data diolah

Gambar 2.99 Capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024

Di sisi lain, Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan fluktuasi namun tetap dalam tren yang cukup baik. Dimulai dari 63,84 pada tahun 2021, capaian ini meningkat menjadi 69,07 pada tahun 2024. Survei ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai risiko dan potensi penyimpangan dalam proses pelayanan publik serta menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan korupsi secara lebih terfokus dan berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi, termasuk melalui pelatihan, pengawasan internal, dan pelaporan yang transparan.



Sumber: KPK RI (2025), data diolah

Gambar 2.100 Capaian Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021-2024

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pemerintah Kabupaten Garut menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi

dan fisik semata, tetapi juga sangat bergantung pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang menegakkan hukum secara adil, menjaga stabilitas sosial, serta menjamin kehidupan demokratis dan toleran bagi seluruh warga.

Hal ini tercermin melalui indikator-indikator strategis seperti persentase penegakan peraturan daerah (Perda) yang konsisten berada pada angka 66% sepanjang tahun 2020–2024. Meski stabil, capaian ini mengindikasikan perlunya optimalisasi dalam pengawasan dan pelaksanaan regulasi agar lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Capaian Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi indikator penting dalam memastikan keberlakuan hukum daerah dapat diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kapasitas aparatur penegak Perda serta membangun kesadaran hukum masyarakat agar tercipta keteraturan sosial yang berbasis pada aturan yang sah dan adil.

Tabel 2.31 Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penegakan Perda	66	66	66	66	66
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP (2025), data diolah

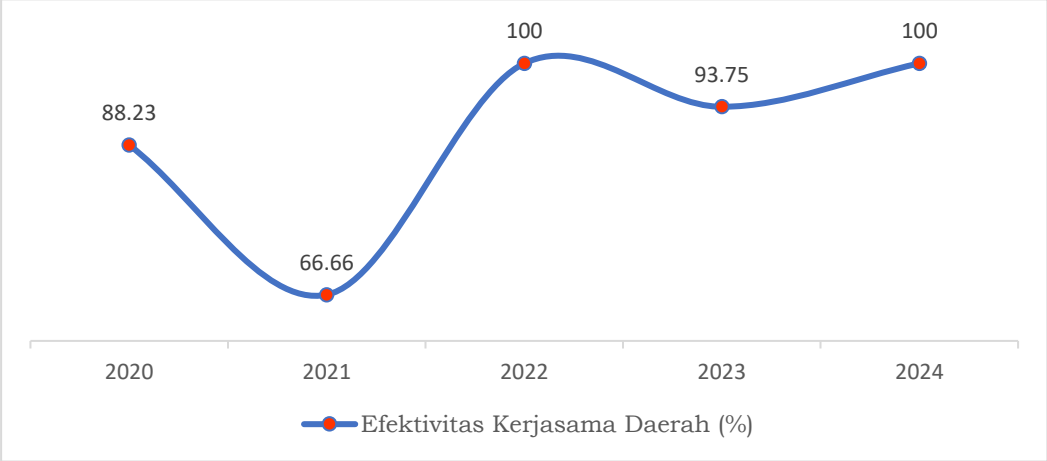
Di sisi lain, penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian 100% selama lima tahun terakhir, menandakan bahwa aparat dan perangkat daerah mampu menjaga stabilitas sosial secara cepat dan responsif. Keberhasilan ini menjadi modal penting dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dari sisi keamanan daerah, angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2024 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 1.526 kasus menurun 1.067 kasus dari kondisi Tahun 2023 sebanyak 2.593 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2024 mencapai 5,6 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 5 tindak kriminal, kondisi tersebut menurun dari tahun 2023 sebanyak 9,6 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, penguatan demokrasi lokal tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengukur kualitas proses politik, hak-hak sipil, dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. Selain demokrasi, Indeks Toleransi menjadi refleksi penting dari iklim sosial yang inklusif dan saling menghormati perbedaan. Pemerintah daerah terus mendorong harmoni antar kelompok masyarakat, termasuk antar agama, antarbudaya, dan antar wilayah, sebagai pondasi kuat untuk menciptakan kedamaian, stabilitas sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun data spesifik capaian dua indeks ini belum tersedia, penting bagi daerah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, menjamin kebebasan sipil, serta menumbuhkan semangat toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kombinasi antara penegakan hukum yang adil, keamanan yang terjaga, dan demokrasi yang substansial akan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam menghadapi tantangan regional maupun global, Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan ketangguhan diplomasi daerah sebagai elemen strategis untuk memperkuat posisi dan daya saing daerah di tingkat kawasan. Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, guna memperluas ruang gerak pembangunan serta memperkuat ketahanan wilayah. Efektivitas Kerja Sama Daerah menjadi indikator utama yang mencerminkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Garut dalam membangun hubungan yang produktif dan saling menguntungkan, baik dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, lembaga swasta, mitra internasional, maupun organisasi non-pemerintah. Kerja sama ini meliputi berbagai bidang, seperti pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan sumber daya alam lintas batas, ketahanan pangan, serta mitigasi bencana dan penguatan infrastruktur pelayanan publik.



Sumber: Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah (2025), data diolah

Gambar 2.101 Efektivitas Kerja sama Daerah Tahun 2020-2024

Capaian Efektivitas Kerja sama Daerah Kabupaten Garut mengalami fluktuasi, dimulai dari capaian 88,23% pada tahun 2020, menurun menjadi 66,66% pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi 100% pada 2022, sedikit menurun menjadi 93,75% di tahun 2023, dan kembali mencapai 100% di tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan konsolidasi kerjas ama lintas sektor yang semakin efektif di akhir periode, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan daya gentar kawasan. Kolaborasi yang efektif bukan hanya memperluas jejaring kerja, tetapi juga meningkatkan daya gentar kawasan dalam menghadapi potensi ancaman sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Melalui kesepakatan bersama, pertukaran data dan sumber daya, serta harmonisasi kebijakan antarwilayah, Kabupaten Garut mampu membangun sistem pertahanan daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kawasan.

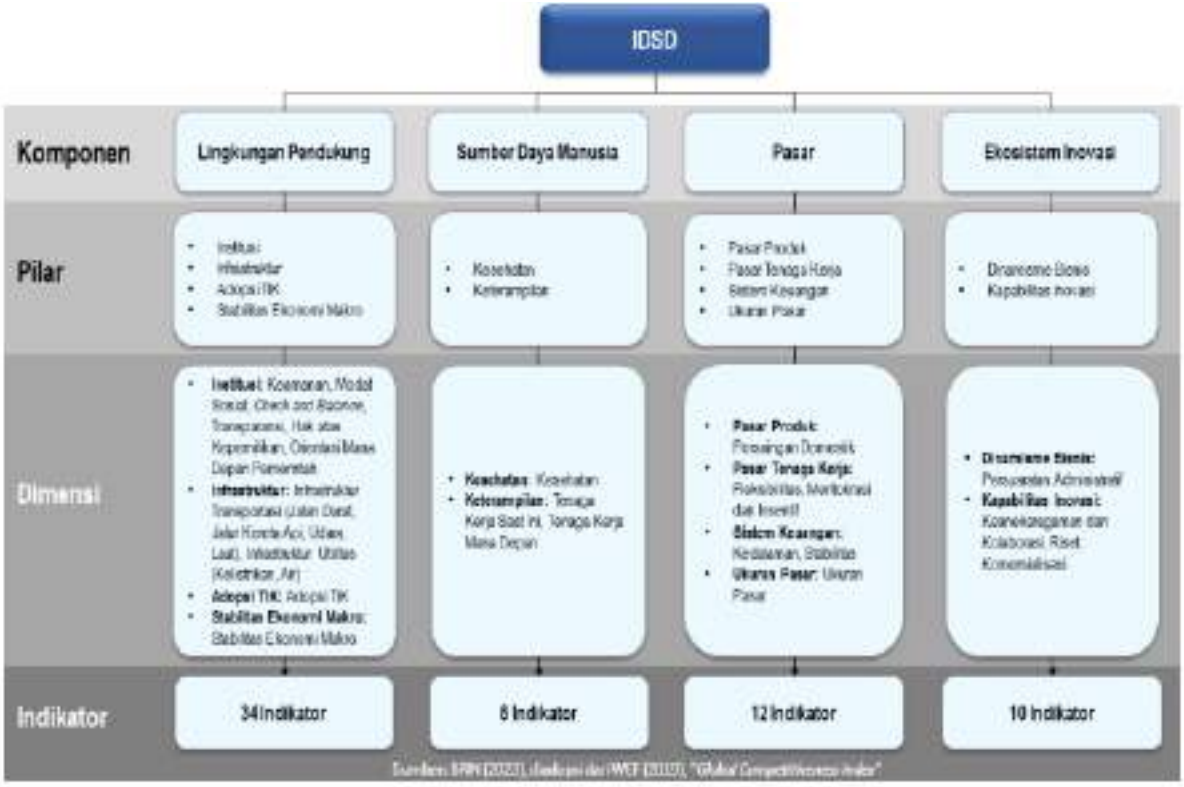
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Diplomasi daerah yang efektif memungkinkan terbangunnya jaringan kerja sama lintas wilayah, nasional, maupun internasional, yang berperan penting dalam menarik investasi, mendorong alih teknologi, serta memperluas pasar bagi produk dan potensi lokal. Hal ini berdampak langsung pada dimensi daya saing ekonomi dan kapasitas inovatif suatu daerah.

Sementara itu, pertahanan kawasan yang kuat dan adaptif terhadap berbagai ancaman – baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan – menjadi landasan stabilitas yang esensial bagi tumbuhnya iklim usaha dan investasi yang sehat. Kombinasi dari kedua aspek ini menjadikan daerah tidak hanya reaktif terhadap tantangan global dan regional, tetapi juga proaktif dalam memanfaatkan peluang strategis bagi penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing sebagaimana gambar dibawah.

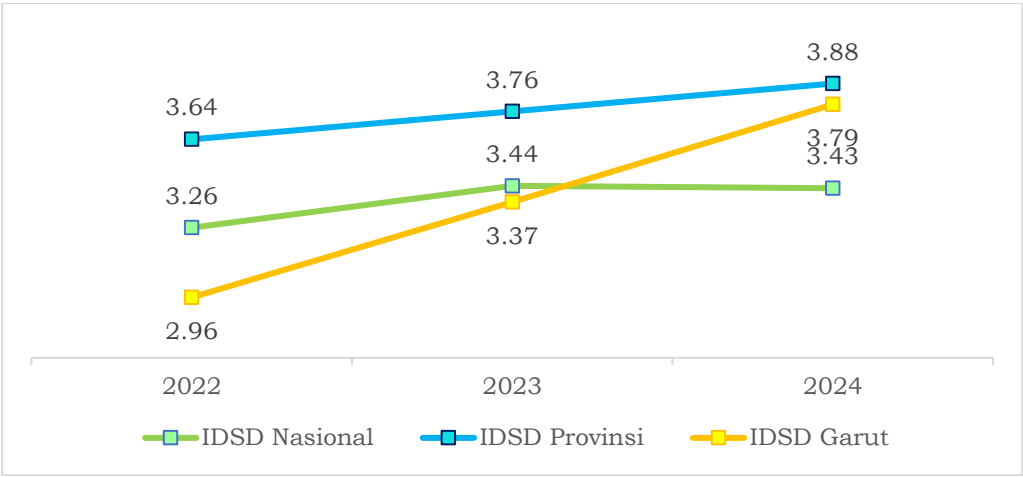
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Garut pada tahun 2024 mencatat skor sebesar 3,79 naik dari tahun sebelumnya yaitu 3,37. Angka ini berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,88, dan juga lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 3,43. Meskipun tidak tergolong rendah, capaian ini menunjukkan bahwa Garut memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap, terutama dalam aspek inovasi dan pasar. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Garut agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka pembangunan ekonomi, keterkaitan antara kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, kemudahan iklim berinvestasi serta ketersediaan Sumber Daya Manusia adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya adalah komponen paling penting untuk mendorong aktifitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Garut.

Mengenali potensi wilayah dan potensi unggulan secara baik menjadi salah satu alternatif untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus membangun kekuatan perekonomian secara mantap dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Gambar 2.102 Kerangka IDSD Tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Gambar 2.103 Skor IDSD Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Secara umum, kekuatan utama Kabupaten Garut terletak pada kondisi institusional dan dinamisme bisnis. Pilar "Institusi" memperoleh skor tinggi, yang mengindikasikan bahwa iklim tata kelola pemerintahan

dan pelayanan publik sudah cukup baik. Begitu pula dengan dinamisme dunia usaha, di mana pelaku ekonomi lokal relatif aktif, khususnya UMKM dan pelaku usaha mikro yang tersebar luas di berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, dan makanan olahan. Dari 12 (dua belas) pilar yang dinilai, sebagian besar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya pilar 5, 8, 9 dan 12 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada pilar 5 yaitu kesehatan, terdapat penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia salah satunya disebabkan oleh tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencapai 50 kasus kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang berjumlah 357 bayi meninggal. Banyak sekali faktor penyebab utama yang menjadi tantangan dalam menurunkan kasus AKI AKB, salah satunya adalah akses dan kualitas layanan kesehatan yang terbatas, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kurangnya pemantauan kehamilan dan pasca melahirkan, gizi buruk, kurang optimalnya sistem rujukan, dan kurangnya dukungan keluarga. Dengan meningkatnya jumlah kasus kematian Ibu menyebabkan Garut menempati peringkat kedua tertinggi dalam Angka Kematian Ibu (AKI) dan peringkat ketiga untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Barat.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan ukuran pasar yang terdapat pada pilar 8 yang juga mengalami penurunan. Perekonomian Kabupaten Garut masih didominasi sektor-sektor tradisional yang belum terintegrasi penuh ke dalam rantai nilai industri skala besar. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil. Selain itu, daya serap pasar terhadap produk lokal masih terbatas karena akses distribusi dan promosi digital yang belum optimal.

Dalam aspek sistem keuangan atau pada pilar 9, Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam hal inklusi keuangan, hal ini disebabkan antara lain akses terhadap kredit produktif terutama bagi pelaku UMKM masih terbatas, tingkat *Non Performing Loan* (NPL) tinggi, rasio penyaluran kredit swasta terhadap PDRB masih rendah yang berdampak pada lambatnya ekspansi usaha lokal dan rendahnya investasi sektor riil. Sedangkan untuk pilar ke 12 juga cenderung melemah pada aspek kapabilitas inovasi, ukuran pasar, dan sistem keuangan. Kapabilitas inovasi menjadi titik lemah paling mencolok. Meskipun aktivitas usaha cukup tinggi, namun tidak diiringi dengan peningkatan riset, pengembangan teknologi, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Jumlah publikasi ilmiah, belanja riset, dan pencatatan merek dagang di Garut masih sangat minim, menunjukkan belum terbangunnya budaya inovasi dan kolaborasi riset di tingkat daerah.

Dari 12 pilar, hanya 4 pilar yang mengalami penurunan, sedangkan 8 pilar lainnya mengalami kenaikan seperti pada pilar 7 yaitu pasar produk dan pilar 11 Dinamisme Bisnis yang mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding 6 pilar lainnya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah adanya peningkatan fasilitasi akses pasar UMKM melalui platform promosi digital dan bazar lokal serta peningkatan kemudahan memulai usaha (*ease of doing business*) sehingga pelaku UMKM mikro makin banyak bermunculan dan lebih inovatif.

Tabel 2.32 Perbandingan Capaian 12 (Dua Belas) Pilar Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Garut Tahun 2023-2024

Tahun	Tingkat	Lingkungan Pendukung				Sumber Daya Manusia (SDM)				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2023	Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
	Provinsi	3,61	4,05	4,13	3,09	4,05	3,34	1,83	3,79	3,61	5,00	4,21	4,4	3,76
	Garut	4,36	2,96	4,03	2,84	3,98	2,79	3,16	3,15	2,89	4,74	2,78	2,75	3,37
2024	Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
	Provinsi	4,07	4,07	4,09	4,36	4,09	3,46	1,74	3,62	3,34	5,00	4,08	4,63	3,88
	Garut	4,74	3,95	4,31	3,64	3,93	3,17	4,24	3,10	2,47	4,77	4,66	2,50	3,79

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, 2024

Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Garut yang menunjukkan tren positif, yaitu dari capaian 2,96 pada tahun 2022 menjadi 3,80 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam daya saing struktural dan kelembagaan, termasuk dalam dimensi inovasi, tata kelola, serta kolaborasi pembangunan lintas wilayah. Dengan penguatan kapasitas diplomasi daerah dan strategi pertahanan yang adaptif terhadap dinamika regional, Kabupaten Garut diarahkan menjadi daerah yang lebih resilien, kompetitif, dan kolaboratif di tingkat kawasan.

D. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra. Capaian kinerja urusan bidang pendidikan selama tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Angka partisipasi kasar						
1	APK PAUD/TK	%	55,05	85,4	85,4	59,48	66,32
2	APK SD sederajat	%	105,66	98,58	106,54	101,80	101,3
3	APK SMP sederajat	%	115,11	79,66	99,6	102,87	100,31

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Angka pendidikan yang ditamatkan						
1.	APT SD sederajat	%	40,16	32,63	n/a	n/a	n/a
2.	APT SMP sederajat	%	18,09	16,6	n/a	n/a	n/a
	Angka Partisipasi Murni:						
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	99,3	94,45	97,18	97,97	93,01
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98	67,13	83,28	79,9	89,31
	Angka partisipasi sekolah :						
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/ Paket A	%	100	99,85	98,49	99,59	99,03
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	95,32	95,29	95,76	94,17
	Angka Putus Sekolah:						
1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,036	0,003	0,001	0,001	0,001
2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	0,004	0,021	0,005	0,005	0,005
	Angka Kelulusan:						
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM):						
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,67	77,17	80,75	85,50	97,38
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	80,81	n/a	n/a	n/a	89,95
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%			71,58	72,93	75,33
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%		99,85	98,49	99,59	99,03
3	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%		95,32	95,29	95,76	94,17
4	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%			19,86	24,71	38,85
5	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%		49,14	53,42	60,43	60,31
6	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%		36,12	41,86	51,71	56,27
7	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%		57,40	61,35	66,62	68,35
8	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%		53,08	53,61	61,53	61,71
9	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%		43,46	42,39	43,34	43,81
10	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%			61,60	74,39	63,63
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Angka		69,66	71,84	76,90	77,65
12	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Angka		67,67	65,34	68,76	69,43
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Angka		59,93	68,42	73,59	72,32
14	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Angka		58,31	63,38	70,54	68,30

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Angka		53,51	56,49	58,52	61,31
16	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Angka		52,14	54,61	55,07	55,57

Sumber: Dinas Pendidikan dan Rapor Pendidikan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Capaian indikator pendidikan di Kabupaten Garut selama periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun terdapat tantangan yang memerlukan perhatian dalam perencanaan ke depan. Selama periode 2020–2024, partisipasi pendidikan menunjukkan dinamika signifikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK melonjak dari 55,05% (2020) menjadi 85,4% (2021–2022), meskipun turun menjadi 66,32% pada 2024. Untuk jenjang SD/sederajat, APK stabil di atas 100% (101,80% pada 2023), menunjukkan cakupan yang luas termasuk peserta didik di luar kelompok usia ideal. Sementara itu, APK SMP/sederajat pulih dari penurunan drastis di 2021 (79,66%) menjadi 100,31% (2024). Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP mengalami pemulihan pasca-turbulensi 2021, dengan APM SMP mencapai 89,31% (2024). Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun dalam pendidikan dasar cukup tinggi, masing-masing mencapai di atas 99,03% dan 94,17%, mencerminkan akses pendidikan dasar yang hampir merata, tetapi partisipasi PAUD (usia 5–6 tahun) masih perlu ditingkatkan (75,33% pada 2024). Demikian pula dengan APS pendidikan kesetaraan untuk usia 7–18 tahun yang masih rendah, dengan capaian tertinggi hanya 38,85%, menunjukkan masih rendahnya minat atau akses terhadap jalur pendidikan non-formal.

Terdapat peningkatan positif dalam Angka Melanjutkan (AM). Transisi SD ke SMP meningkat dari 77,17% (2021) menjadi 97,38% (2024), bahkan melampaui capaian 2020 (96,67%). Transisi SMP ke SMA/SMK juga naik menjadi 89,95% (2024) dari sebelumnya 80,81% (2020). Angka Putus Sekolah (APTS) SD dan SMP berhasil ditekan hingga 0,001% (SD) dan 0,005% (SMP) pada 2024, menunjukkan efektivitas intervensi terhadap pencegahan drop-out. Angka Kelulusan SD dan SMP konsisten mencapai 100% sepanjang periode, mencerminkan kualitas output yang terjamin.

Dari sisi kualitas pembelajaran, kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan Asesmen Nasional baik di jenjang SD maupun SMP mengalami tren peningkatan. Rata-rata literasi di jenjang SD meningkat hingga 60,43%, sementara numerasi mencapai 56,27%. Di jenjang SMP, literasi mencapai 68,35% dan numerasi 61,71%, menandakan perbaikan kualitas pembelajaran dasar meskipun masih di bawah target nasional. Akreditasi satuan PAUD menunjukkan stabilitas di angka sekitar 43%, menandakan bahwa sebagian besar PAUD masih berada pada tingkat akreditasi menengah ke bawah. Sementara itu, proporsi guru PAUD formal berkualifikasi S1/D-IV telah mencapai lebih dari 63%, dengan tren peningkatan, namun tetap perlu diperluas untuk mendukung mutu

pendidikan anak usia dini. Pada aspek lingkungan sekolah, indeks iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas baik di jenjang SD maupun SMP menunjukkan perbaikan. Iklim keamanan SD mencapai skor 77,65, sementara SMP mencapai 69,43. Iklim kebinekaan dan inklusivitas juga mengalami tren positif, walau nilai indeks di SMP cenderung lebih rendah dibanding SD. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan karakter, toleransi, dan inklusi dalam sistem pendidikan.

2) Urusan Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan jangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, *screening* faktor risiko penyakit tidak menular. Capaian kinerja urusan bidang kesehatan selama tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelayanan medis (RSUD dr. Slamet)	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan penunjang medis (RSUD dr. Slamet)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan profesi medis (RSUD dr. Slamet)	%	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan keperawatan (RSUD dr. Slamet)	%	99,9	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan asuhan keperawatan (RSUD dr. Slamet)	%	85,5	100	100	100	100
6	Persentase Capaian SPM yang mencapai target (RSUD dr. Slamet)	%	n/a	70,83	94,68	97,17	97,25
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	rasio	4,08 (210 orang)	4,43 (225 orang)	6,40 (300 orang)	7,26 (320 orang)	8,07 (357 orang)
	Jumlah kelahiran hidup		*51.486*	*50.793*	*46.852*	*44.078*	*44.237*

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Angka kelangsungan hidup bayi	orang	44.778	51.175	48.178	44.078	44.237
9	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	rasio	0,11 (7 orang)	0,22 (6 orang)	0,08 (11 orang)	0,09 (8 orang)	0,07 (3 orang)
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	rasio	4,17	4,31	6,86	6,60	7,46
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	orang	112,65 (58 orang)	220,5 (112 orang)	121,66 (57 orang)	136,12 (60 orang)	113,03 (50 orang)
12	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	1/53	1/53	1/53	1/100	1/100
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1/7.784	1/13.235	1/7.600	1/9.184	1/8.507
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	1/439.440	1/396.825	1/382.221	1/385.714	1/310.048
15	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1/7.965	1/5.419	1/11.291	1/4.770	1/3.346
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	1/5.795	1/4.916	1/7.304	1/4.285	1/3.097
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	rasio	22,04	100	100	100	100
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	87,05	93,64	88,45	88,02	81,19
19	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	72,17	50,68	76,92	88,01	82,13
20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
21	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	93,60	87,71	96,45	96,77	92,27
23	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	0,042	2,13	2,6	11,35	6,52
24	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	41,19	35,64	63,15	50,21	80,72
25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	41,6	73,01	100	100	76,68
26	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	183	184	298	323	275
27	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	2	4	4	7	6
28	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	41,6	73,01	100	100	76,68
29	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	93,9	85,54	84,44	84,2	81,62

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
31	Penderita diare yang ditangani	%	36	100	89,57	100	100
32	Angka kejadian Malaria	Kasus/ 100.000	4	0,27	0,34	0,41	1,1
33	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus/ 1000	0	0	0	0	0
34	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0
35	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
36	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,13	0,23	0,32	0,38	0,5
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	n/a	45	50	50	50
38	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	15	17,7	31,2	40,6	42,3
39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	25,75	100	100	100	100
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	58	112	57	60	50
2	Jumlah Kematian Balita	Orang					
3	Prevalensi *Stunting* (Pendek Dan Sangat Pendek) pada balita	%	n/a	35,2	23,6	24,1	14,2
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	97,88	94,41	95,58	95,99	90,93
5	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	86,77	87,89	94	89,77	89,14
6	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	99,3	93,45	94,5
7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	84,96	66,3	92	87,91	96,05
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	64,08	42,2	100	98,27	98,85
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	64,08	42,2	100	98,27	100
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	66,79	58,9	91,43	98,86	97,6

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	25,7	35,71	94,38	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	53,25	39,66	100	100	100
13	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	84	68,7	84,6	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	45,19	82,74	100	100	100
15	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	52,8	52,6	69,83	100	100
16	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%					
17	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%					91,07
18	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%					64,19
19	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%					
20	Persentase lanjut usia yang mandiri	%					
21	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%					
22	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	1,36
23	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%					
24	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%					
25	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	%					
26	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%					
27	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	76,61
28	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	16,4
29	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%					

Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah 2025 2025 yang dikelola dalam SIPD

Capaian Kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan strategis. Dari sisi pelayanan dasar medis, capaian menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi, di mana pelayanan medis, penunjang medis, dan profesi medis berada di angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Demikian pula, pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan menunjukkan perbaikan signifikan dari 85,5% pada 2020 menjadi 100% sejak 2021, sementara itu persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) meningkat dari 70,83% di tahun 2021 menjadi 83,70% di 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya komitmen pemerintah daerah atas pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, walaupun masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian indikator SPM kesehatan.

Indikator kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian penting. Angka kematian bayi (AKB) dan kematian neonatal masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat pada tahun-tahun terakhir. AKB naik dari 210 kasus pada 2020 menjadi 354 kasus di 2024. Meskipun angka kelangsungan hidup bayi tetap tinggi, tantangan dalam penanganan neonatal dan balita masih perlu diperkuat. Di sisi lain, angka kematian ibu menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan capaian terbaik di tahun 2022 (48 kasus) dan kembali meningkat menjadi 60 kasus di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan ibu perlu terus diperkuat secara merata, termasuk melalui peningkatan akses dan kompetensi tenaga kesehatan.

Capaian pelayanan imunisasi, gizi, dan pengendalian penyakit menular menunjukkan tren positif. Cakupan imunisasi campak dan UCI berada di atas 90% pada 2023–2024, sementara penanganan pneumonia, DBD, diare, dan TBC mengalami peningkatan drastis, bahkan mencapai 100% di beberapa tahun terakhir. Tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat tajam dari 86 per 100.000 penduduk pada 2020 menjadi lebih dari 275 per 100.000 penduduk pada 2024, namun diimbangi dengan penemuan dan pengobatan kasus yang semakin baik. Tingkat kematian akibat malaria tetap di angka nol, mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian penyakit ini, meskipun proporsi balita dengan perlindungan kelambu masih nihil.

Dalam aspek ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan, terdapat peningkatan signifikan pada rasio dokter, tenaga medis, rumah sakit, dan puskesmas per jumlah penduduk, mencerminkan peningkatan kapasitas layanan. Rasio dokter membaik dari 1:7.965 pada 2020 menjadi 1:3.346 pada 2024, sedangkan rasio rumah sakit membaik dari 1:439.439 menjadi 1:130.048. Namun demikian, persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar masih rendah (16,4% pada 2024), dan persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar belum tersedia

datanya, yang menandakan perlunya peningkatan kualitas distribusi dan pengembangan SDM kesehatan.

Beberapa indikator baru seperti prevalensi *stunting*, menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dari 35,2% pada 2021 menjadi 14,2% di 2024. Begitu juga tingkat kepuasan pasien mencapai 76,61%, mencerminkan persepsi positif terhadap layanan kesehatan publik. Meski begitu, cakupan JKN yang masih di angka 64,19% serta rendahnya persentase desa STBM (1,36%) menandakan bahwa aspek perlindungan jaminan sosial dan sanitasi lingkungan masih perlu didorong secara lebih intensif.

Secara umum, capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Garut tahun 2020–2024 memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti di berbagai indikator utama, terutama dalam aspek pelayanan dasar, penanggulangan penyakit menular, dan penurunan *stunting*. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti peningkatan kematian bayi dan ibu, rendahnya cakupan SDM kesehatan sesuai standar, serta capaian SPM yang belum optimal. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi komprehensif dan kolaboratif guna memperkuat sistem layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berperan sebagai denah induk pembangunan daerah yang menjamin keterpaduan infrastruktur dasar, keberlanjutan ekologis, dan efisiensi spasial melalui pengelolaan konstruksi fisik, pengendalian pemanfaatan ruang, serta mitigasi risiko bencana berbasis karakteristik wilayah. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas PUPR, bertanggung jawab membangun dan memelihara infrastruktur strategis (jalan, jembatan, drainase, air baku), menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW/RDTR) berorientasi keseimbangan kawasan lindung-budidaya, serta mengawasi kesesuaian izin mendirikan bangunan (IMB)/izin lokasi dengan peruntukan lahan. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi (untuk infrastruktur lintas kabupaten) dan masyarakat ini tidak hanya mencegah *urban sprawl*, banjir akibat alih fungsi lahan, dan kesenjangan akses transportasi—tetapi juga menciptakan fondasi bagi pengembangan kawasan produktif, permukiman layak huni, dan ketahanan infrastruktur menghadapi perubahan iklim melalui penerapan *green infrastructure* dan standar konstruksi berkelanjutan.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 11 (sebelas) sub urusan yaitu Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi,

dan Penataan Ruang. Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kemantapan Jalan	%	n/a	49,92	51,42	55,25	56,94
2	Cakupan air Minum layak	%	85,08	86,96	88,51	90,04	90,74
3	Cakupan sanitasi layak	%	67,03	67,20	67,69	68,11	68,53
4	Persentase Luas areal yang terlayani oleh Jaringan irigasi	%	n/a	81,89	82,70	84,4	84,73
5	Persentase penurunan luas genangan air	%	n/a	60	50	27,5	27,5
6	Persentase tampungan air yang tersedia	%	6,93	23,81	34,92	38,1	46
7	Persentase bangunan yang Layak Teknis dan fungsi	%	0,05	8,4	9,52	10,31	11,25
8	Persentase Luas Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	%	n/a	6	12	32,48	32,48
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	82,5	83	83,50	83,92	85,08
10	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	8,33	19,64	23,73	32,27	36,46
11	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	n/a	100	100	100	100
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%					
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	74,32	81,89	82,7	83,43	84,73
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	58,72	59,05	59,85	60,71	62
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	85,08	86,96	88,51	90,04	90,74
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	67,03	67,2	67,69	68,11	68,53
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%					
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	83,92	82,34	84,26	85,58	68,63
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	8,33	19,64	23,73	32,27	36,46
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari					

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data diolah 2025 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cenderung meningkat secara bertahap di berbagai indikator strategis. Salah satu indikator utama yaitu kemantapan jalan kabupaten mengalami perbaikan signifikan, dari 49,92% pada tahun 2021 menjadi 56,94% di tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan ruang perbaikan, terutama dalam upaya pemerataan infrastruktur jalan yang mantap di seluruh wilayah kabupaten. Capaian kemantapan jalan ini sejalan dengan tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota berdasarkan IKK, yang sempat meningkat hingga 85,58% di tahun 2023 namun menurun menjadi 68,63% pada 2024, yang perlu menjadi perhatian serius untuk dikaji penyebabnya.

Dalam aspek penyediaan layanan dasar permukiman, terjadi tren peningkatan cakupan secara konsisten. Akses terhadap air minum layak meningkat dari 85,08% pada 2020 menjadi 90,74% di tahun 2024, sedangkan cakupan sanitasi layak juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun lambat, dari 67,03% menjadi 68,53% dalam lima tahun. Di sisi irigasi, luas areal yang terlayani jaringan irigasi mengalami peningkatan dari 81,89% pada 2021 menjadi 84,73% di 2024, mencerminkan penguatan dukungan terhadap produktivitas sektor pertanian. Kondisi irigasi kewenangan kabupaten juga menunjukkan pertumbuhan dari 58,72% menjadi 62% selama periode yang sama, menandakan adanya perbaikan kualitas infrastruktur pertanian secara gradual.

Sementara itu, capaian penurunan luas genangan air menunjukkan hasil kurang optimal, stagnan di angka 27,5% sejak 2023. Namun demikian, peningkatan persentase tampungan air yang tersedia dari hanya 6,93% pada 2020 menjadi 46% di 2024 menjadi sinyal positif dalam memperkuat ketahanan air daerah. Dalam aspek penataan ruang dan bangunan, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang terus mengalami peningkatan dari 82,5% pada 2020 menjadi 85,08% di 2024, disertai perbaikan pada indikator persentase bangunan yang layak teknis dan fungsi, meski masih cukup rendah (11,25% di 2024). Selain itu, luas bangunan dan lingkungan yang tertata meningkat pesat dari 6% pada 2021 menjadi 32,48% di 2023 dan stagnan di tahun 2024, menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam penataan ruang wilayah.

Dari sisi sumber daya manusia, persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat mengalami lonjakan dari 8,33% pada 2020 menjadi 36,46% pada 2024. Capaian ini menjadi indikator positif terhadap peningkatan kualitas SDM sektor konstruksi yang lebih kompeten dan aman. Hal ini didukung oleh keberhasilan pemerintah daerah menjaga

persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi pada angka 100% selama empat tahun terakhir, mencerminkan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Di sisi lain, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi juga terlaksana secara maksimal dengan capaian 100% kepatuhan terhadap peraturan sepanjang periode 2021–2024.

Secara umum, capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Garut selama tahun 2020–2024 memperlihatkan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang positif. Meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan atau stagnasi seperti penurunan luas genangan dan ketersediaan bangunan layak teknis, sebagian besar indikator mengalami pertumbuhan, baik dari sisi kualitas layanan dasar, penguatan ketahanan infrastruktur, maupun penataan ruang yang semakin tertib. Ke depan, tantangan utama yang perlu menjadi fokus adalah peningkatan efisiensi dalam tata ruang, optimalisasi pengendalian banjir, dan pemerataan kualitas infrastruktur jalan serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah memegang peran krusial dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga atas tempat tinggal layak huni yang terjangkau, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar. Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, kabupaten/kota menyelenggarakan pendataan warga berpenghasilan rendah (MBR), alokasi dana stimulan perumahan, legalisasi aset tanah permukiman liar, penyediaan sarana prasarana lingkungan (PSU), dan penataan kawasan rawan bencana. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, developer, dan komunitas lokal tidak hanya mengurangi kesenjangan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan, tetapi juga akan menciptakan ekosistem hunian yang resilien, terintegrasi dengan transportasi publik, ruang terbuka hijau, serta akses air bersih dan sanitasi sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Penanganan Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Penurunan luasan permukiman kumuh*	Ha	11,12	0	86,75	81,49	67,81
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	36.138	32.504	31.010	28.936	27.590
4	Luas Kawasan Permukiman dengan PSU yang representatif	Ha	n/a	6.727	346,5	6936	7.009,06
5	Jumlah Pengembang yang Terregistrasi dan tersertifikasi**	Perusahaan					
	IKK Periode Tahun 2025-2029						

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%			0	10,24	21,66
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0,84	0,51	0,28	0,27	0,12
5	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%					

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan upaya yang konsisten dalam menjamin hak atas hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator penanganan korban bencana dan warga yang terdampak program pemerintah menunjukkan hasil sangat baik, dengan tingkat pemenuhan rumah layak huni mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan respon pemerintah daerah yang cepat dan inklusif dalam menangani dampak sosial dari bencana maupun program strategis yang memerlukan relokasi warga.

Penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu capaian signifikan, dari 36.138 unit pada tahun 2020 menjadi 27.590 unit pada tahun 2024. Meski progresnya menurun dari segi persentase tahunan (dari 0,83% di 2020 menjadi 0,12% di 2024), arah perbaikannya tetap positif dan konsisten. Demikian pula dengan upaya penanganan kawasan kumuh, yang berhasil menurunkan luas kumuh dari 86,75 hektar pada tahun 2022 menjadi 67,81 hektar di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas permukiman di kawasan padat, meskipun cakupan persentase kawasan kumuh <10 ha yang ditangani masih relatif rendah, yakni 21,66% pada tahun 2024.

Dalam hal peningkatan kualitas lingkungan permukiman, luas kawasan dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang representatif juga mengalami perkembangan, dari hanya 346,5 hektar di tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 7.009 hektar pada 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah semata, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur pendukung yang

menunjang kualitas hidup penghuni. Meskipun data jumlah pengembang teregistrasi dan tersertifikasi belum tersedia, hal ini menjadi catatan penting untuk penguatan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan perumahan.

Secara keseluruhan, ketercapaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang inklusif, responsif terhadap bencana, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama dalam percepatan penanganan RTLH dan kawasan kumuh kecil (<10 ha), serta perlunya integrasi data pengembang yang tersertifikasi untuk memastikan kualitas pembangunan perumahan ke depan.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah memegang peran vital dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai garda terdepan penjaga keamanan kolektif melalui koordinasi strategis dengan kepolisian, pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta respons cepat terhadap gangguan ketertiban, bencana, dan kerentanan sosial. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran, kabupaten/kota menyelenggarakan penegakan perda, pengendalian kerumunan massa, evakuasi korban darurat, pencegahan konflik komunal, perlindungan kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas), dan mitigasi bencana berbasis komunitas dengan memanfaatkan teknologi *early warning system* dan jejaring relawan siaga bencana.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	80	75	64	96	100
2	Prosentase Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	%	45	60	75	70	100
3	Rasio Linmas/10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	62	62	62	62	53
4	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	n/a	100	100	87,27	98,44

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,46	0,39	0,65	0,72	0,73
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66	66	66	66	66
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	5	6	7	7
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	66,19	66,19	66,19	66,19	66,19
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	82,5	62,59	63,5	54	68,08
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	54,6	20,07	6,16	34	0,41
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	97,22	100	100	100
10	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP, BPBD, dan Dinas Pemadam Kebakaran, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode tahun 2020–2024, kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Garut menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) mengalami peningkatan yang mencolok, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, mencerminkan penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat daerah. Di sisi lain, efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Tibum Tranmas) juga mengalami tren positif, naik dari 45% di tahun 2020 menjadi 100% pada 2024, menunjukkan kesiapan dan kecepatan respons Satpol PP dalam menanggulangi gangguan keamanan lokal.

Upaya penyelamatan dan layanan kebakaran turut mengalami perbaikan, dengan cakupan layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran mencapai 98,44% pada tahun 2024, setelah sempat berada di angka 87,27% pada tahun 2023. Meskipun rasio Linmas per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 62 menjadi 53 pada

tahun 2024, fungsi-fungsi perlindungan masyarakat tetap dijalankan secara optimal, dibuktikan dengan tingkat penanganan pasca bencana dan layanan penyelamatan korban bencana yang konsisten di angka 100%.

Dari sisi kelembagaan dan peningkatan kapasitas, Indeks Kapasitas Daerah meningkat dari 0,46 pada 2020 menjadi 0,73 pada 2024, menunjukkan penguatan institusi dan kesiapan sumber daya dalam penyelenggaraan Tibumtranmas. Ketersediaan SOP penegakan Perda dan Perkada serta keberadaan sarana prasarana minimal juga sudah terjaga pada level konstan sebesar 66,19%, walau masih terdapat ruang untuk perbaikan. Sementara itu, partisipasi anggota Satpol PP dalam diklat dasar masih stagnan di angka 13,37%, menandakan perlunya investasi lebih besar dalam pengembangan kapasitas aparatur.

Namun demikian, tantangan masih terlihat dari rendahnya persentase warga yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana dan layanan pencegahan bencana, yang bahkan turun drastis menjadi 0,41% pada tahun 2024. Hal ini menandakan perlunya penguatan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Secara umum, kinerja bidang ini menunjukkan capaian positif dalam menciptakan kondisi aman dan tertib, meskipun upaya peningkatan kualitas layanan kebencanaan dan edukasi publik masih menjadi agenda penting ke depan.

6) Urusan Sosial

Pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan urusan sosial yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan melalui kebijakan inklusif, penanganan kemiskinan terstruktur, serta respons krisis kemanusiaan berbasis komunitas. Melalui Dinas Sosial, kabupaten/kota menyelenggarakan program afirmatif seperti penyaluran bansos (PKH, BPNT, BST), rehabilitasi sosial difabel dan lansia terlantar, penguatan kelembagaan sosial (LSM, karang taruna), mitigasi dampak bencana (logistik darurat, trauma *healing*), dan pendampingan kelompok marginal (pekerja migran, anak jalanan, korban kekerasan) dengan memadukan pendekatan *case management*, kearifan lokal, serta integrasi data terpadu (SIKS-NG, DTKS). Kolaborasi dengan pusat (Kemensos/TNP2K), dunia usaha (CSR), dan masyarakat sipil ini tidak hanya mengurangi disparitas kesejahteraan dan kerentanan ekstrim, tetapi juga membangun ekosistem ketahanan sosial yang memberdayakan melalui pelatihan kewirausahaan, dukungan akses kesehatan dasar, dan penguatan modal sosial sebagai fondasi masyarakat berkeadilan.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Sosial selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sosial
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	39,95	56,73	70	75
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	100	59,77	35,24	77	75
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	76,82	57,93	n/a	n/a
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	6,13	8,02	n/a	n/a
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	75,01	100	100	100
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	0,57	1,68	n/a	50,5
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	76,21	96	100	75
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	73,68	100	100	75
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	76,02	86,59	100	75
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	71,42	98,67	100	75
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	96,07	94,62	96,4	80	80
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	-	74,33	100	100	75
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan	%	85	85	80	63,77	75

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar						
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%				72	100
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	62,88	63	63,23	63,39	77%
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	58,5	66,02	66,33	68,29	74,19

Sumber: Dinas Sosial, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja urusan sosial Kabupaten Garut selama tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi capaian pada beberapa indikator. Secara umum, berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta korban bencana telah menunjukkan progres positif. Misalnya, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat serta evakuasi dengan sarana prasarana lengkap secara konsisten mencapai 100% sejak tahun 2022, mencerminkan kesiapsiagaan yang baik dalam penanganan bencana.

Namun demikian, indikator lain seperti persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dan yang tertangani, sempat mengalami fluktuasi. Capaian terendah terjadi pada tahun 2021 dengan hanya 39,95% PPKS yang mendapatkan bantuan, namun meningkat secara bertahap hingga 75% pada tahun 2024. Demikian pula, persentase penyandang disabilitas fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial masih belum optimal, baru mencapai 50,5% di tahun 2024.

Di sisi lain, indikator pelayanan sosial luar panti menunjukkan tren pencapaian yang baik. Beberapa indikator seperti pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas luar panti menunjukkan capaian 100% pada tahun 2023, sebelum kembali turun ke 75% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kesinambungan program. Adapun indikator pekerja sosial dan relawan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar telah mencapai 100% secara konsisten, menandakan kesiapan SDM yang cukup baik di lapangan.

Selain itu, indikator terkait peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat menunjukkan tren yang positif dari 62,88% pada tahun 2020 menjadi 77% pada tahun 2024, menandakan keberhasilan sebagian program pemberdayaan sosial. Tingkat pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan juga terus meningkat, dari 58,5% di tahun 2020 menjadi 74,19% di tahun 2024, yang sangat penting untuk dasar perencanaan intervensi sosial yang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, kinerja urusan sosial Kabupaten Garut tahun 2020–2024 telah menunjukkan arah yang positif dalam aspek tanggap darurat bencana, pelayanan luar panti, dan pemberdayaan sosial. Namun demikian, perlu ditingkatkan lagi konsistensi pencapaian bantuan dan pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan agar pemerataan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal pada periode RPJMD berikutnya.

7) Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja perlu dilaksanakan secara komprehensif dari mulai tahap *pre-employment*, *during employment* dan *post employment*. Pada tahap *pre-employment* dimana para pencari kerja dapat disiapkan melalui peningkatan kompetensi atau *up-skilling* dan *re-skilling* serta sertifikasi kompetensi, disertai dengan dukungan pendataan pencari maupun pemberi kerja serta platform digital yang memungkinkan bertemunya pencari kerja dengan pemberi kerja hingga akhirnya ditempatkan. Kemudian pada tahap *during employment* perlu adanya penjaminan bagi upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pengawasan kerja. Terakhir pada tahap *post employment* yang menyangkut jaminan pesangon, pensiun, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan dan tunjangan kematian yang juga perlu dijamin bagi pekerja.

Ketiga tahapan tersebut tercakup dalam 3 sub urusan bidang tenaga kerja meliputi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial dan Jamsostek. Adapun capaian kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	23	16	21	30	18
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	17	8	14	26	13
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2.362	11.210	9.377	5970	21.325
4	Keselamatan dan perlindungan (Kewenangan Provinsi)	-	-	-	-	-	-
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	31.559	40.317	50.363	58.962	54.297
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	560	1.372	304	32	416
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	656	320	0	176	448
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	n/a	100	0	0	0
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	5,51	5,96	n/a	n/a	n/a
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	13.61
2	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5.63	5.74	11.32	10.68	6.3
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Orang	36,670,549.22	36,474,728.45	34,178,607.86	34,182,896.62	34,572,282.05
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	70.32	71.17	63.49	62.73	61.31
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	15.93	50.84	38.57	30.77	58.01

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja cenderung berfluktuasi: dari 23 kasus pada 2020 turun menjadi 16 pada 2021, kembali naik ke puncak 30 kasus pada 2023, dan menurun lagi menjadi 18 kasus pada 2024. Proporsi penyelesaian sengketa melalui Perjanjian Bersama (PB) juga berubah-ubah, paling rendah 8 kasus pada 2021 dan tertinggi 26 kasus pada 2023, menunjukkan upaya pemda dalam memfasilitasi mediasi yang menjadi tumpuan resolusi sengketa. Ketiadaan perselisihan buruh–pengusaha atas kebijakan pemerintah daerah (selalu 0 kasus) mencerminkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah relatif diterima semua pihak.

Dari sisi penempatan tenaga kerja, Kabupaten Garut berhasil menempatkan 2.362 pencari kerja pada 2020, melonjak tajam ke 11.210 orang pada 2021, menurun di dua tahun berikutnya, dan mencapai rekor tertinggi 21.325 orang pada 2024. Rasio penempatan (persentase tenaga kerja yang ditempatkan) menguat signifikan dari 15,93 % pada 2020 menjadi 58,01 % pada 2024. Produktivitas tenaga kerja (output per orang) relatif stabil di kisaran Rp34–36,7 juta, menandakan kondisi industri dan usaha mikro, kecil, menengah yang relatif konstan. Peserta Jamsostek terus bertambah dari 31.559 orang pada 2020 menjadi 58.962 pada 2023, lalu sedikit turun ke 54.297 pada 2024, menandai perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada pelatihan, capaian tertinggi pelatihan berbasis kompetensi terjadi tahun 2021 (1.372 orang), kemudian menurun drastis hingga 32 peserta pada 2023 dan naik kembali ke 416 pada 2024. Pelatihan berbasis masyarakat juga berfluktuasi, sedangkan pelatihan kewirausahaan berjumlah 100 peserta pada 2021. Persentase kegiatan yang sesuai rencana tenaga kerja konsisten 100 % hingga 2023, namun turun drastis ke 13,61 % pada 2024—indikator yang perlu segera dievaluasi. Persentase pencari kerja bersertifikat kompetensi sempat mencapai 11,32 % pada 2022, lalu menurun ke 6,3 % pada 2024. Penerapan tata kelola kerja yang layak di perusahaan (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan tren menurun dari 70,32 % pada 2020 menjadi 61,31 % pada 2024.

Secara umum, Kabupaten Garut mampu menekan sengketa ketenagakerjaan dan memaksimalkan penempatan tenaga kerja, namun di beberapa indikator—khususnya pelatihan terencana, sertifikasi kompetensi, dan tata kelola perusahaan—terdapat penurunan capaian pada 2024. Untuk periode RPJMD 2025-2029, perlu prioritas penguatan program pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, peningkatan sertifikasi kompetensi pencari kerja, serta pembinaan perusahaan agar terus menerapkan tata kelola kerja yang layak demi mengoptimalkan produktivitas dan perlindungan pekerja.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang memegang peran krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui bidang ini, pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program peningkatan keterampilan, akses ekonomi, dan pendidikan, sekaligus menjamin perlindungan holistik bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Implementasinya melibatkan sinergi multisektor mulai dari penyediaan layanan terpadu (seperti Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak), penguatan regulasi daerah, kampanye kesetaraan gender, hingga respons cepat terhadap kasus kekerasan dengan tujuan akhir mewujudkan kesetaraan hak, memperkuat ketahanan keluarga, dan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal sebagai investasi masa depan daerah.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 6 (enam) sub urusan yaitu Kualitas Hidup Perempuan; Perlindungan Perempuan; Kualitas Keluarga; Sistem Data Gender dan Anak; Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	62	47,28	52,41	52,35	52,35
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	18	18	16	10	24
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	54	39,97	77,6	45,74	45,74
4	Rasio KDRT	%	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	2,65	2,65	2,65	2,56	2,56
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38,73	43,19	34,2	39,53	39,53
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100	50,4	98,73	97,27	97,27
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	93,4	44,63	85,2	77,84	77,84
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	62,4	41,59	42,56	55,83	55,83
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	12,2	53,68	53,66	19,64	19,64
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,36	103	99,56	99,53	99,53
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	%	35	35	35	35,05	35,05
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	82,29	82,13	82,78	83,37	83,5
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,586	0,605	0,551	0,555	0,533
3	Persentase ARG Daerah	%					18
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	84,4	84,5	85	85	85
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif						

Sumber: DPPKBPPPA, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak serta perlindungan terhadap kelompok rentan, meskipun tantangan dalam kesetaraan partisipasi dan ketimpangan gender masih terlihat. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani secara optimal, ditandai dengan capaian 100% pada cakupan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial hingga pemulangan korban, yang menunjukkan efektivitas mekanisme Unit Pelayanan Terpadu dan koordinasi antar sektor. Meski demikian, indikator partisipasi perempuan dalam berbagai bidang belum sepenuhnya merata. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta mengalami fluktuasi dan belum mencapai paritas. Pada tahun 2024, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tercatat sebesar 52,35%, sementara di lembaga swasta hanya 45,74%. Proporsi kursi perempuan di DPR pun cenderung rendah dan tidak konsisten, meski meningkat dari 10% (2023) menjadi 24% (2024). Hal ini menandakan masih adanya ruang besar untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dan kepemimpinan publik.

Dari sisi akses pendidikan, rasio APM perempuan terhadap laki-laki di jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan tren positif, walau belum sepenuhnya setara, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi yang pada tahun 2024 baru mencapai 19,64%. Sementara itu, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15–24 tahun tetap tinggi di atas 99%, mengindikasikan capaian literasi dasar yang merata antara gender. Di sektor ketenagakerjaan, kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian stagnan pada kisaran 35%, mencerminkan perlunya strategi afirmatif agar perempuan lebih banyak berperan dalam sektor formal. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Garut juga mengalami peningkatan dari 82,29 (2020) menjadi 83,5 (2024), sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan perbaikan dari 0,586 menjadi 0,533, menandakan perbaikan ketimpangan gender, meski belum sepenuhnya ideal. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan perempuan korban kekerasan/TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif konsisten pada tingkat 85% dan 100%, yang menunjukkan sistem layanan perlindungan sosial yang cukup solid.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan capaian signifikan dalam aspek perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan substantif, perlu upaya berkelanjutan dalam memperluas akses

partisipasi, pendidikan tinggi, pemberdayaan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan gender yang masih tersisa

9) Urusan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan; dan Keamanan Pangan. Capaian kinerja Urusan Bidang Pangan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	78,6	79,7	83,1	91,7	91,54
2	Penguatan cadangan pangan	%	50	n/a	85,5	473	236,31
3	Penanganan daerah rawan pangan	%	6,26	n/a	7,92	9,28	9,95
4	Ketersediaan pangan utama	Ton	230.702,67	459.341,32	568.770	297.194,12	428.958,50
5	Ketersediaan energi dan protein per kapita:						
	Energi per kapita	kkal/kap/hari	5.909	5.925	5.888	1488,86	3101,74
	Protein per kapita	gram/kap/hari	177,4	177,8	176,9	39,9	85,64
6	Konsumsi energi dan protein per kapita:						
	Energi per kapita	kkal/kap/hari	2.229	2.257	2.268	2.130	3.102
	Protein per kapita	gram/kap/hari	59,6	61	61,8	59,78	85,64
7	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras)	%	<10	<9	<8	<6	5,5
8	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	%	70,3	78,26	83,35	82,33	84,86
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%				196.24	158
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten/Kota	Poin	78.6	79.7	83.1	91.7	91.54
3	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten/Kota	Poin			94,7	95,4	95.45
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%		28.28	16.74	9.28	3.85
5	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	78.05	78.26	83.35	82.33	84.86

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja urusan pangan di Kabupaten Garut pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup positif dan progresif dalam berbagai indikator utama, meskipun masih terdapat tantangan di aspek ketersediaan gizi dan penanganan daerah rawan pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH), sebagai indikator komposisi konsumsi pangan yang ideal dan beragam, meningkat secara konsisten dari 78,6 poin pada tahun 2020 menjadi 91,54 poin pada tahun 2024, menandakan perbaikan kualitas

konsumsi pangan masyarakat Garut yang semakin mendekati pola konsumsi gizi seimbang.

Dalam hal penguatan cadangan pangan, terdapat lonjakan signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 473%, meskipun kemudian mengalami penurunan menjadi 236,31% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan stok pangan daerah yang masih perlu distabilkan. Upaya penanganan daerah rawan pangan juga menunjukkan perbaikan, dengan persentase yang meningkat dari 6,26% (2020) menjadi 9,95% (2024). Namun, pada indikator IKK terlihat bahwa persentase daerah rentan rawan pangan justru berhasil ditekan dari 28,28% (2021) menjadi hanya 3,85% pada tahun 2024, yang mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Terkait ketersediaan pangan utama, terdapat fluktuasi yang cukup besar antar tahun, dari 230.702 ton (2020) hingga mencapai 568.770 ton (2022), dan kemudian turun menjadi 428.958 ton (2024). Sementara itu, indikator ketersediaan energi dan protein per kapita menunjukkan penurunan tajam pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat di 2024. Pada tahun 2024, ketersediaan energi mencapai 3.101,74 kkal/kap/hari dan protein 85,64 gram/kap/hari, nilai yang mendekati konsumsi aktual masyarakat yang juga tercatat pada level serupa.

Kinerja dalam pengawasan dan keamanan pangan juga memperlihatkan kemajuan signifikan. Pembinaan dan pengawasan pangan meningkat dari 70,3% (2020) menjadi 84,86% (2024), dan stabilitas harga pangan (CV beras) berhasil dipertahankan di bawah ambang batas toleransi nasional, yakni hanya 5,5% pada tahun 2024, mencerminkan kestabilan pasokan dan pengendalian inflasi bahan pokok yang cukup baik. Secara keseluruhan, capaian urusan pangan di Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir menandakan kemajuan dalam aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan, serta penguatan pengawasan mutu dan keamanan. Meski begitu, perhatian terhadap peningkatan konsumsi gizi yang merata dan keberlanjutan cadangan pangan perlu terus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

10) Urusan Pertanahan

Pemerintah daerah memegang peran krusial dalam urusan pertanahan sebagai mitra pemerintah pusat untuk menjamin kepastian hukum, pengelolaan aset lahan yang berkeadilan, dan dukungan terhadap pembangunan wilayah. Melalui kewenangan ini, daerah terlibat dalam perencanaan tata ruang berbasis kebutuhan lokal, resolusi konflik agraria, pendataan tanah terlantar, fasilitasi sertifikasi hak milik masyarakat (termasuk tanah ulayat/adat), serta pengendalian alih fungsi lahan sesuai rencana pembangunan berkelanjutan. Sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga terkait dioptimalkan guna mempercepat reforma agraria, meningkatkan akses ekonomi warga terhadap tanah, dan mencegah praktik spekulasi yang merugikan kepentingan publik sehingga

tanah tidak hanya menjadi aset produktif tetapi juga instrumen pemersatu dan penggerak kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja bidang urusan pertanahan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.42 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase bidang lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	22,86	28,15	49,01	60,28	68,26
2	Jumlah Kasus Pertanahan Yang di tangani	kasus	5	8	8	30	29
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%					11,5
2	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100	100	100	100	100
3	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	19,18

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam upaya legalisasi aset milik pemerintah daerah. Persentase bidang lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat mengalami peningkatan signifikan dari 22,86% pada tahun 2020 menjadi 68,26% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dalam penataan aset serta menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dikuasai pemerintah.

Namun demikian, jumlah kasus pertanahan yang ditangani menunjukkan tren meningkat tajam, dari hanya 5 kasus pada tahun 2020 menjadi 30 kasus pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 29 kasus pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kasus ini bisa diartikan sebagai adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah, atau juga mencerminkan konflik agraria yang masih perlu penanganan serius. Hal ini diperkuat oleh data indikator kinerja kunci (IKK), di mana penyelesaian kasus tanah garapan melalui mediasi yang sebelumnya selalu mencapai 100% pada tahun 2020–2023, justru menurun drastis menjadi 19,18% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai atau administratif di tahun terakhir periode.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut mampu menjaga konsistensi dalam penetapan subjek penerima tanah hasil redistribusi, dengan capaian 100% realisasi dari target setiap tahun. Hal ini menunjukkan kinerja yang solid dalam pengelolaan program redistribusi tanah, khususnya dalam mendukung Reforma Agraria di daerah. Selain itu, pada tahun 2024 juga tercatat bahwa potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang dapat ditindaklanjuti untuk pemberdayaan masyarakat berada pada angka 11,5%, yang menjadi dasar penting untuk pelaksanaan program penataan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Secara umum, meskipun terdapat tantangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, terutama pada tahun terakhir periode, namun kinerja urusan pertanahan Kabupaten Garut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal sertifikasi aset pemerintah dan keberhasilan redistribusi tanah.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah memikul tanggung jawab strategis dalam urusan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan ekologis, perlindungan sumber daya alam, dan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui kewenangan otonomi, daerah merumuskan kebijakan tata kelola lingkungan berbasis karakteristik lokal seperti pengelolaan sampah terpadu, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pemantauan kualitas udara dan air, penegakan aturan AMDAL, serta pemberdayaan masyarakat dalam praktik ekonomi hijau. Kolaborasi dengan pemerintah pusat (melalui KLHK), dunia usaha, dan komunitas digalakkan untuk memperkuat kapasitas penanganan limbah B3, mitigasi bencana ekologis, dan implementasi pembangunan rendah karbon—sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya inklusif tetapi juga berwawasan lingkungan jangka panjang. Capaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup selama tahun 2020– 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	56,22	67,82	70,75	66,89	62,37
2	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	20	100	100	100	100
4	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	%	n/a	n/a	100	n/a	100
5	Persentase desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan	%	n/a	25	25	25	25
6	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	%	n/a	20	20	n/a	50
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,148	0,146	0,164	0,188

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	25,27	25,66	29,95	31,48	35,05
9	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	%	n/a	4	2	n/a	2
10	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	2	n/a	2
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,22	67,82	69,25	66,89	62,37
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	n/a	42,44	37,44	38,54	44,3
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, data diolah 2025.

Selama periode 2020–2024, kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun terdapat dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan signifikan dari 56,22 poin pada tahun 2020 menjadi 70,75 poin pada tahun 2022, namun mengalami penurunan kembali menjadi 62,37 poin pada tahun 2024. Adapun penyebab penurunan diantaranya diakibatkan oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk kabupaten Garut sehingga berkorelasi terhadap aktivitas penghasil limbah domestik yang mencemari lingkungan dan kebutuhan akan lahan, air dan energi yang juga turut meningkat menyebabkan jumlah penumpukan sampah yang turut meningkat yang disertai dengan kurangnya kesadaran lingkungan dari masyarakat. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan kualitas lingkungan, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi hasil yang dicapai, terutama terkait tekanan lingkungan yang terus meningkat. Selain itu realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung menurun dipengaruhi oleh adanya metode perhitungan baru yang menyebabkan adanya penambahan parameter pada Indeks Kualitas Udara.

Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, capaian 100% penyelesaian kasus lingkungan hidup secara konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan respons cepat pemerintah daerah terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini juga diperkuat dengan capaian 100% evaluasi dokumen lingkungan sejak tahun 2021, serta pelaporan pengendalian B3 dan limbah B3 yang telah mencapai 100% pada dua tahun terakhir tersedia data (2022 dan 2024). Peningkatan kemitraan lingkungan juga mulai menunjukkan perkembangan, dari 20% pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 50% pada tahun 2024, menunjukkan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pengelolaan lingkungan lainnya. Tingkat pengelolaan sampah, meski meningkat dari 25,27% pada tahun 2020 menjadi 35,05% pada 2024, masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan untuk mencapai standar nasional yang ideal. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mulai terukur sejak tahun 2021, dengan capaian awal sebesar 42,44 poin. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 37,44 poin. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pengelolaan sampah, seperti keterbatasan infrastruktur persampahan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta tingginya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia dan berdampak pada capaian nilai Adipura yang masih rendah (capaian *outcome* sebagai salah satu komponen penilaian IKPS).

Tabel 2.44 Capaian Komponen Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2021-2024

Tahun	Indikator IKPS										Nilai IKPS
	Input (30)				Proses (10)		*Output* (40)		*Outcome* (10)	Dampak (10)	
	Kebijakan (15)	SDM (5)	Sarana Prasarana (5)	Anggaran (5)	Sosialisasi dan Pemahaman (5)	*Acceptability* dan Implementasi (5)	Capaian *Output* (20)	Efisiensi Anggaran (20)			
2021	11,00	2,78	1,00	1,00	4,00	1,00	-	10,00	8,00	3,67	42,44
2022	11,00	2,78	1,00	1,00	4,00	1,00	-	10,00	3,00	3,67	37,44
2023	11,00	2,78	1	1	4	1	0,00	10	3	4,76	38,54
2024	12	2	3	2	5	1	2,3	9	3	5	44,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, tahun 2025.

Memasuki tahun 2023, IKPS Kabupaten Garut mengalami sedikit perbaikan dengan capaian 38,54 poin, dan pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan hingga mencapai 44,3 poin. Kenaikan tersebut menandakan adanya upaya nyata dalam memperkuat program pengelolaan sampah, termasuk pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), peningkatan layanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat dan kelompok swadaya dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Secara keseluruhan, meskipun masih fluktuatif, tren capaian IKPS Kabupaten Garut menunjukkan arah perbaikan menuju pengelolaan sampah yang lebih baik. Peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan, meskipun konsistensi peningkatan perlu terus dijaga. Ke depan, penguatan kebijakan dan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dengan mendorong skema pembiayaan alternatif, pengembangan kapasitas SDM (pengelola TPS/ Bank Sampah), serta penerapan inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular menjadi kunci dalam mencapai target kinerja lingkungan hidup yang lebih optimal.

Sementara itu, persentase ruang terbuka hijau yang dikelola juga masih terbatas, meskipun telah mengalami peningkatan bertahap dari

0,115% menjadi 0,188% selama lima tahun terakhir. Capaian desa/kelurahan berbudaya lingkungan stagnan di angka 25% sejak tahun 2021, yang menandakan perlunya pendekatan partisipatif yang lebih luas dalam edukasi dan pembinaan masyarakat terkait pelestarian lingkungan. Selain itu, hadirnya status masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan langkah awal yang baik dalam pengakuan hak masyarakat adat dan integrasi pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Garut telah menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam beberapa indikator utama, meskipun masih diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan serta mendukung agenda pembangunan hijau di masa mendatang.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tulang punggung pelayanan dasar yang menjamin hak konstitusional warga atas identitas hukum, sekaligus pondasi akurat untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten/kota menyelenggarakan pendaftaran penduduk (penerbitan KTP-el, KK), pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), serta pengelolaan basis data kependudukan terpadu berbasis teknologi (SIAK). Implementasi layanan yang inklusif, terdesentralisasi hingga tingkat desa/kelurahan, dan terintegrasi dengan sistem nasional tidak hanya mencegah *statelessnes*s, memerangi pemalsuan identitas, dan mempermudah akses warga pada pelayanan publik—tetapi juga menyediakan data real-time bagi formulasi kebijakan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Capaian kinerja bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98,4	98,82	72,45	99,71	99,99
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	%	80,1	79,03	85,62	92,31	86,97
3	Rasio pasangan ber-akte nikah	%	43,9	100	112,7	84	71,73
4	Ketersediaan *database* kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada				
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah				
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,3	96,78	72,60	95	99,99
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	34,9	71,6	90	80,11	86,97
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	75	75	75	80	20

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
**Indikator Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 beririsan dengan Permendagri Nomor 00096-5384-DUKCAPIL 2023 sehingga untuk tahun 2023 menggunakan perubahan berdasarkan Permendagri Nomor 5483-disdukcapil*							
1	Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%			Perekaman 98,90% dan Pencetakan 98,08%	98,08	99,99
2	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%			17,83	17,83	60,25
3	Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%			n/a	13,47	25
4	Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%			83,17	83,17	86,97
5	Kepemilikian Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Keluarahan/Pemakaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	%			n/a	75	75
6	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	%			0	4	14
7	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	%			4	4	15
8	Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%			n/a	0	15
9	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	%			Ada	Ada	Ada
10	Keluaran/*output* kinerja pelayanan dokumen lainnya	%			0	1	1
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%			83,17		85,83
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%					100,42
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	0	0	0	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%					17,41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut menunjukkan capaian yang cukup progresif di berbagai indikator strategis, meskipun masih menyisakan beberapa tantangan yang perlu diperbaiki ke depan. Salah satu indikator utama, yaitu rasio penduduk ber-KTP, berhasil meningkat secara signifikan dari 98,4% pada tahun 2020 menjadi hampir sempurna 99,99% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin identitas kependudukan seluruh penduduk. Dalam aspek pencatatan sipil, rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga menunjukkan peningkatan, dari 80,1% tahun 2020 menjadi 86,97% pada 2024, mendekati target universal. Sementara itu, rasio pasangan ber-akte

nikah mengalami fluktuasi tinggi, dengan lonjakan pada tahun 2022 (112,7%), namun menurun ke 71,73% pada tahun 2024. Ini mengindikasikan perlunya penyesuaian dan stabilisasi pelayanan pencatatan perkawinan.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan tersedianya *database* kependudukan skala provinsi telah berjalan baik sejak awal periode, yang menjadi landasan penting untuk digitalisasi administrasi kependudukan. Di sisi lain, cakupan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) menunjukkan lonjakan signifikan dari 17,83% tahun 2023 menjadi 60,25% tahun 2024, yang merupakan prestasi besar dalam perlindungan hak sipil anak. Kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital) pun mulai berkembang, meskipun masih perlu ditingkatkan dari 13,47% pada 2023 menjadi 25% pada 2024.

Adapun dalam pemanfaatan data kependudukan, meskipun cakupan sempat meningkat menjadi 80% pada 2023, namun mengalami penurunan tajam ke 20% pada 2024. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dalam hal pemanfaatan, perjanjian kerja sama, dan integrasi lintas sektor yang memanfaatkan data Dukcapil. Namun, upaya konsolidasi dan penyusunan profil data kependudukan telah berhasil dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2023 dan 2024, menandai kemajuan dalam penyediaan data yang valid dan akurat untuk perencanaan pembangunan.

Kinerja pelayanan lainnya seperti penerbitan akta kematian, akta perkawinan, dan perceraian bagi pelapor, juga telah mencapai 100% selama periode 2020–2024, mencerminkan pelayanan yang responsif. Keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan tata kelola kependudukan yang inklusif, adaptif terhadap digitalisasi, dan berbasis data.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pilar strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian komunitas lokal melalui pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pembangunan partisipatif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Melalui Dinas PMD, pemerintah kabupaten/kota menjalankan fungsi pengalokasian dan pengawasan Dana Desa (sesuai UU Desa No. 6/2014), pendampingan penyusunan RPJMDes, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti LPMD dan PKK. Implementasinya mencakup pelatihan aparatur desa, sinkronisasi program *bottom-up* melalui Musyawarah Desa (Musdes), audit partisipatif penggunaan anggaran, pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal, hingga resolusi konflik sumber daya alam dengan tujuan mewujudkan tata kelola desa yang transparan-akuntabel, mengurangi kesenjangan desa-kota, mengakselerasi pencapaian SDGs tingkat komunitas, dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang berdaulat secara ekonomi-sosial.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan Desa; Kerjasama Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	%	20	30	40	60	73
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Nilai	42	42	42	42	42
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Nilai	442	442	442	442	442
4	Persentase LSM Aktif	%	70	72	75	87	
5	Persentase LPM Berprestasi	%	7	8	9	10	25
6	Persentase PKK Aktif	%	100	70	80	87	93
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	70	80	87	90
8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	70	72	75	79	87
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	400	280	268,42	51,43	50,94
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%		5	10	15	20
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%		0,55	1,66	5,23	7,36
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	%					
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%					20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Garut menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Peningkatan cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik tercatat naik dari 20% pada tahun 2020 menjadi 73% di tahun 2024. Ini mencerminkan adanya perhatian yang kuat dari pemerintah daerah terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK tetap konsisten masing-masing pada angka 42 dan 442, menunjukkan keberlanjutan pembinaan masyarakat berbasis kelembagaan. Selain itu, peningkatan persentase LPM berprestasi dari 7% ke 25% serta tingginya tingkat swadaya masyarakat (mencapai 87% di tahun 2024) menunjukkan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

Sementara itu, aktivitas kelembagaan masyarakat seperti PKK dan Posyandu juga menunjukkan tren positif, dengan tingkat keaktifan yang meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat pun berjalan konsisten dengan capaian 100% selama lima tahun terakhir. Dari sisi indikator kinerja kunci, terjadi peningkatan status desa mandiri, meskipun dengan tren menurun dari lonjakan besar pada tahun 2020 ke peningkatan yang lebih moderat di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan juga terlihat dalam fasilitasi penataan desa, kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga adat yang mulai diperkuat pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut berada dalam jalur yang baik dalam membangun desa yang berdaya dan mandiri sebagai basis pembangunan wilayah.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instrumen krusial pemerintah daerah dalam mengelola dinamika kependudukan guna mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui upaya penurunan angka kelahiran (fertilitas), pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan kualitas generasi muda. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), pemerintah kabupaten/kota menjalankan layanan kontrasepsi terjangkau, kampanye keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan, serta pembinaan ketahanan remaja berbasis sekolah/masyarakat.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Capaian kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,1	1,1	0,86	0,84	0,71
2	*Total Fertility Rate* (TFR)	%	2,34	2,3	2,45	2,33	2,37
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	4,05	6,05	8,12	8,3	12
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	20	100	100	100	100
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Perda	0	0	-	-	3
6	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan	Sektor	0	8	8	8	11

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan						
7	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	2	5	5	5	5
8	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	anak	2,98	2,77	1,37	2,64	2,37
9	Ratio Akseptor KB	%	71,29	71,96	72,39	73,21	68,54
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	71,29	71,96	72,39	73,21	68,54
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19)	Angka	49/1000	49/1000	36/1000	36,36/1000	32.5/1000
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	3,89	3,44	3,36	3.36	1,2
13	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13,66	13,44	13,13	13,13	9,43
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	29,72	30,93	32,16	24,46	24,76
15	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	70,67	70,91	71,48	71,49	68,54
16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	83,04	84,15	84,32	84,45	91,43
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	78,94	80,74	82,94	82,95	84,64
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	78,24	80,79	79,88	79,9	78,13
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%	2	2	2	4,76	57,14
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	55	60	78,69	78,7	79,08
21	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	291	280	280	53,2	100
22	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	%	87	84,92	86,41	86,5	83,23
23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	442	100	442	442	100
24	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	67	100	100	90	100
26	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100
27	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	16 orang*	-		-
28	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	55	60	101	72	80
29	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	65	68	81	81	90
30	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	19	19,01	19,01	19,09	19,29

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	1,25	2	-	1,2	-
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2,34	2,3	2,45	2,37	2,35
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai		52,2	53,79	56,36	58,6
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	47,8	49,2	49,7	55,1	51,1
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	71,29	71,96	72,39	73,21	91,3
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per- 1000 WUS 15-19 Tahun	15,18	36,3	36,3	32,5	26,9
6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%					15,7
7	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Nilai					79,9
8	Indeks Lansia Berdaya	Nilai					56,3
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%					36

Sumber: DPPKBPPPA, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama kurun waktu 2020–2024, kinerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam aspek pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penguatan kelembagaan program KB. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) berhasil ditekan dari 1,1% pada tahun 2020 menjadi 0,71% di tahun 2024, yang menandakan keberhasilan program pengendalian penduduk secara umum. Meskipun Total Fertility Rate (TFR) sempat naik pada 2022 (2,45), indikator ini kembali stabil di kisaran 2,35 pada 2024, mendekati angka pengganti ideal (2,1).

Peran serta perangkat daerah dalam mendukung program Kampung KB juga meningkat signifikan, dari hanya 4,05% tahun 2020 menjadi 12% pada 2024. Seluruh perangkat daerah telah menyusun dan memanfaatkan Rencana Induk Pengendalian Penduduk, yang menjadi fondasi perencanaan berbasis demografi. Selain itu, peningkatan jumlah sektor yang memanfaatkan data proyeksi penduduk dari 0 menjadi 11 sektor menunjukkan integrasi lintas sektor yang semakin baik dalam pembangunan berbasis kependudukan.

Dalam hal pengaturan kebijakan, pada 2024 telah ditetapkan 3 regulasi yang mengatur pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk, menunjukkan keseriusan pemda dalam menginstitusionalisasi kebijakan kependudukan. Sementara itu, rata-rata jumlah anak per keluarga berhasil ditekan dari 2,98 pada 2020 menjadi 2,37 pada 2024, selaras dengan upaya peningkatan kualitas keluarga. Pada aspek pelayanan KB,

Rasio Akseptor KB dan CPR stabil di atas 70% pada awal periode, meskipun menurun ke 68,54% di akhir 2024, yang perlu menjadi perhatian ke depan. Namun demikian, cakupan penggunaan kontrasepsi modern (MKJP) masih di bawah target, hanya mencapai 24,76% pada 2024, turun dari 32,16% pada 2022. Hal ini disertai dengan turunnya tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi 68,54%, menandakan perlunya revitalisasi edukasi dan pelayanan KB jangka panjang.

Keberhasilan juga terlihat dari penurunan angka kelahiran remaja (ASFR 15–19) dari 49 per 1.000 menjadi 32,5 per 1.000 di 2024, bahkan mencapai 26,9 per 1.000 menurut data IKK. Capaian *unmet need* juga mengalami penurunan dari 13,66% ke 9,43%, yang mencerminkan perbaikan dalam pemenuhan layanan KB. Di sisi kelembagaan, perkembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan meningkat dari hanya 2% di 2020 menjadi 57,14% di 2024, serta meningkatnya cakupan Informasi dan Konseling Remaja dari 55% menjadi 79,08%. Program integratif seperti BKB, BKR, dan BKL juga mengalami penguatan, dengan cakupan keikutsertaan yang semakin luas.

Indikator pendukung lainnya, seperti Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meningkat dari 52,2 di 2021 menjadi 58,6 di 2024, dan IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) juga membaik meskipun sempat turun sedikit di 2024. Selain itu, proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan alat/cara modern mencapai 91,3% di 2024, yang merupakan prestasi signifikan. Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Garut tahun 2020–2024 menunjukkan progres yang konsisten dalam aspek pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan cakupan layanan KB, penguatan kelembagaan, serta pengarusutamaan isu keluarga dalam pembangunan daerah. Namun demikian, beberapa indikator seperti penggunaan MKJP dan keberlangsungan kontrasepsi memerlukan perhatian dan strategi khusus di periode RPJMD selanjutnya.

15) Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan tulang punggung mobilitas dan logistik daerah yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan sistem transportasi terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan pemeliharaan infrastruktur transportasi, pengaturan lalu lintas, perizinan angkutan umum, serta penguatan keselamatan berkendara, termasuk penertiban pelanggaran dan penanggulangan kemacetan.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan mencakup 4 (empat) sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Pelayaran; Penerbangan; dan Perkeretaapian. Capaian kinerja Urusan Bidang Perhubungan pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0,385	0,4368	105.82	120.25	16.142
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,128	0,061	0,082	0,03	0,15
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	8.035	8.662	9.035	12,296	5.220
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	2	2	2	2	3
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	38,5	0,43	0,1026	0,06	0,06
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	13	18,07	29,57	5,97	52,61
7	Pemasangan Rambu- Rambu	%	100	158	158	89,20	110
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/Km	0,14	0.062	0.062	0.06	0,06
9	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	65.340	501.224	1.031.637	341.836	830.160
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Org/Thn	65.340	501.224	1.031.637	341,836	830.160
11	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan	%	n/a	68,29	80,88	90,69	90,33
12	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	n/a	58,64	71,5	85.4	87,56
13	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	%	n/a	65,45	77,13	85.99	84,15
14	Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	n/a	50,06	63,85	81.96	58
15	Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	%	n/a	52,08	68,58	85.07	83,13
16	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	%	n/a	83,33	88,89	94.44	90,97
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	26,20	26,51	28,39	29,33	36,52
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	92,19	92,24	92,26	85,60	87,17

Sumber: Dinas Perhubungan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan perhubungan Kabupaten Garut mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai indikator strategis, meskipun terdapat fluktuasi yang menandai tantangan dalam konsistensi pelayanan dan regulasi transportasi. Salah satu capaian utama terlihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang melonjak drastis dari 0,385% di tahun 2020 menjadi 105,82% di tahun 2022, bahkan mencapai 120,25% di tahun 2023, sebelum turun di 2024. Kenaikan ini berbanding lurus dengan jumlah orang/barang yang terangkut, yang meningkat dari 65.340 orang pada 2020 menjadi lebih dari 1 juta penumpang pada 2022, meskipun terjadi penurunan pada 2023 (341.836) dan kembali naik di 2024 (830.160). Peningkatan ini

mencerminkan pemulihan mobilitas masyarakat pasca pandemi serta efektivitas layanan transportasi umum.

Dari sisi layanan teknis, jumlah kendaraan angkutan umum yang diuji KIR meningkat dari 8.035 unit di tahun 2020 menjadi 12.296 unit di 2023, sebelum turun menjadi 5.220 unit pada 2024, yang perlu dikaji lebih lanjut mengingat hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan angkutan. Namun demikian, persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat pesat dari 13% di tahun 2020 menjadi 52,61% di tahun 2024, menandakan peningkatan kesadaran operator dalam memenuhi standar kelaikan kendaraan. Dalam aspek infrastruktur, pemasangan rambu-rambu lalu lintas mencapai 158% di tahun 2021 dan 2022, dan tetap tinggi di 2024 (110%), serta ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan meningkat dari 68,29% di 2021 menjadi 90,33% di 2024. Hal serupa terjadi pada penerangan jalan umum (PJU) yang melonjak dari 58,64% (2021) menjadi 87,56% (2024), dan fasilitas pengendalian lalu lintas yang meningkat menjadi 84,15% pada tahun terakhir.

Kinerja dalam pelayanan angkutan umum juga menunjukkan tren positif, naik dari 50,06% di 2021 menjadi 81,96% di 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 58% di 2024, yang dapat menjadi bahan evaluasi pelayanan ke depan. Sosialisasi keselamatan transportasi juga mengalami penguatan, mencapai 83,13% di tahun 2024. Dalam aspek pelayaran, persentase sarana pelayaran yang laik layar meningkat dari 83,33% (2021) menjadi 90,97% (2024), mengindikasikan perhatian yang cukup baik terhadap keamanan transportasi air. Selain itu, jumlah terminal/ pelabuhan juga bertambah dari 2 lokasi menjadi 3 lokasi pada tahun 2024.

Dari indikator kinerja kunci (IKK), konektivitas antardaerah Kabupaten Garut berada pada rasio tetap 0,57, dan kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal mengalami peningkatan dari 26,20% di tahun 2020 menjadi 36,52% di tahun 2024. Namun, persentase perusahaan angkutan yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan cenderung stagnan, dengan penurunan dari 92,26% (2022) menjadi 87,17% (2024), yang menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Secara keseluruhan, bidang perhubungan Kabupaten Garut telah mencatatkan kemajuan yang menggembirakan, terutama dalam peningkatan pelayanan transportasi, kelaikan sarana prasarana, serta pemenuhan standar keselamatan. Namun demikian, beberapa indikator seperti stabilitas layanan angkutan dan konsistensi uji KIR memerlukan perhatian dan strategi penanganan terpadu dalam RPJMD mendatang agar tercapai sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan wajib strategis pemerintah daerah yang berperan mendorong transformasi digital, mempercepat pelayanan publik, dan membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengembangan infrastruktur digital (seperti jaringan internet desa dan fiber optik), integrasi sistem *e-government* (termasuk aplikasi pelayanan terpadu dan data *center* daerah), peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengamanan siber untuk perlindungan data warga. Penyelenggaraan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Informasi dan Komunikasi Publik; dan Aplikasi Informatika. Capaian kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut	%	3,26	3,25	3,25	3,29	3,89
2	Persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat	%	37	52	75	82	100
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Garut menunjukkan capaian yang progresif, khususnya dalam penguatan infrastruktur digital dan keterbukaan informasi publik. Salah satu indikator utama yaitu tingkat kematangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan tren stabil di angka 3,25–3,29 sejak tahun 2020 hingga 2023, dan mengalami lonjakan menjadi 3,89 pada tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan kualitas penerapan layanan digital pemerintah daerah serta perbaikan integrasi sistem dan manajemen data pemerintahan.

Sementara itu, persentase informasi publik yang didiseminasikan kepada masyarakat meningkat secara signifikan dari 37% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Peningkatan ini juga sejalan dengan penguatan fungsi kehumasan pemerintah daerah dan pemanfaatan saluran digital sebagai media komunikasi publik.

Dari sisi indikator kinerja kunci (IKK), capaian 100% keterhubungan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis dengan akses internet dan jaringan intra pemerintah daerah yang konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam

menyediakan konektivitas digital yang merata dan mendukung operasional pemerintahan yang efisien. Selain itu, pada tahun 2024, seluruh perangkat daerah telah memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), yang menjadi fondasi penting dalam interoperabilitas sistem dan percepatan layanan berbasis digital.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selama lima tahun terakhir menandakan kemajuan signifikan menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, dan terbuka. Hal ini menjadi landasan kuat dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah yang akan berlanjut pada periode RPJMD 2025–2029, sejalan dengan tuntutan era digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan responsif.

17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Koperasi dan UKM menjadi salah satu penyelenggaraan urusan pemerintah untuk sektor perekonomian. Koperasi dan UKM menjadi perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Garut diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi lokal. Hal tersebut diupayakan dengan peningkatan pada kualitas dan kuantitas dari koperasi dan UKM yang meliputi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, kapasitas kelembagaan usaha, skema dan perluasan akses pembiayaan, nilai tambah produk, jangkauan pemasaran, kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Pencapaian indikator kinerja urusan Koperasi dan UKM didasarkan pada pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM melalui alokasi APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, ditambah juga adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan berbagai entitas, diantaranya seperi Mercy Corp melalui Program Strive. Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan UKM selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Aktif	%	81	63,06	64,17	66,21	52,73
2	Jumlah Koperasi aktif	Angka	1559	980	1.028	1071	868
3	Jumlah koperasi baru	Angka	20	43	48	35	25
4	Jumlah Koperasi Sehat	Angka	51	50	58	32	52
5	Jumlah wirausaha	Angka	2019	8299	11.489	13.099	
6	Jumlah UKM yang meningkat omsetnya	Angka	720	1.306	1.235	1.291	2117
7	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	10,6	7,9	6,2	7,35

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	UKM	n/a	1537	1347	1435	850
9	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru	%	n/a	215	48	35	25
10	Persentase koperasi yang diawasi	%	n/a	5	6.12	4,29	5,10
11	Persentase koperasi sehat	%	n/a	5	3,74	3,19	5.2
12	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	%	n/a	15	4.9	n/a	2.2
13	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	%	n/a	1,36	1,25	2,2	2%
14	Jumlah wirausaha Baru	Wirausaha Baru	n/a	737	3795	1411	1129
15	Jumlah UKM yang terbina	Pelaku Usaha Mikro	n/a	975	1689	1141	2117
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%					7,04
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%					23
3	Pertumbuhan Wirausaha	%					36,71

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Garut menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun dengan beberapa capaian positif yang menjadi dasar penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di masa mendatang. Pada awal periode, persentase koperasi aktif masih tinggi yakni 81% pada tahun 2020, namun mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 52,73% pada tahun 2024, seiring dengan penyesuaian terhadap regulasi, pembubaran koperasi tidak aktif, serta peningkatan pengawasan dan penertiban legalitas koperasi. Jumlah koperasi aktif pun turut menurun dari 1.559 pada tahun 2020 menjadi 868 pada tahun 2024.

Meskipun demikian, indikator kualitas dan dampak dari pembinaan koperasi dan pelaku usaha menunjukkan tren yang positif. Jumlah UKM yang meningkat omzetnya terus mengalami kenaikan signifikan dari 720 UKM di tahun 2020 menjadi 2.117 UKM di tahun 2024, menunjukkan efektivitas pendampingan dan program pengembangan usaha. Selain itu, jumlah wirausaha baru juga meningkat tajam pada tahun 2022, meskipun sedikit menurun pada dua tahun terakhir, dengan 1.129 wirausaha baru tercatat di tahun 2024.

Capaian lainnya adalah pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha, yang walaupun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2024, tetap menjadi penanda adanya proses transformasi ekonomi masyarakat dari sektor informal ke sektor formal. Di sisi lain, jumlah koperasi sehat berfluktuasi, namun berhasil mencapai 52 koperasi pada tahun 2024, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Persentase koperasi yang diawasi dan koperasi yang berkualitas masih tergolong rendah, yang

menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Dari sisi indikator kinerja kunci (IKK) untuk periode berikutnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 7,04%, transformasi usaha mikro dari informal ke formal sebesar 23%, serta pertumbuhan wirausaha sebesar 36,71%. Ini menjadi arah strategis dalam RPJMD 2025–2029 untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan koperasi dan UKM, serta mendorong formalitas dan produktivitas ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

18) Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah pada sektor perekonomian. Investasi dapat menjadi salah satu indikator kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah, karena dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Garut diarahkan untuk peningkatan nilai realisasi investasi. Pencapaian indikator kinerja urusan Penanaman Modal didasarkan pada pelaksanaan perizinan dan penanaman modal melalui alokasi APBD Kabupaten Garut, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN. Berikut capaian kinerja urusan Penanaman Modal.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMD/PMA	4.426	466	711	146	122
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp	1,11	1,29	1,165	1,357	2.39
3	Rasio Penanam Modal (PMA-PMDN) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	-	n/a	20	36	n/a
4	Rasio realisasi investasi dari minat investasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	256,99	n/a	33	n/a	n/a
5	Persentase penyelesaian pengaduan tepat waktu	%	n/a	100	100	100	100
6	Persentase penyelesaian Perizinan tepat waktu	%	n/a	100	100	100	100
7	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan	%	n/a	100	100	100	100
8	Indeks kepastian hukum berusaha	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Baik
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	−42,27	34,41	9,56	16,45	76,39
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	56,52	73,4	79,74	93,53	157,47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Garut mengalami dinamika yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah investor maupun nilai investasi yang terealisasi.

Jumlah investor berskala nasional (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun Penanaman Modal Asing/PMA) sempat mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 4.426 investor, namun menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya, dan stabil di angka ratusan, dengan 122 investor pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai investasi justru menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp1,11 triliun di tahun 2020 menjadi Rp2,39 triliun di tahun 2024, mencerminkan bahwa meskipun jumlah investor menurun, kualitas dan skala investasi yang masuk cenderung lebih besar.

Capaian rasio realisasi investasi terhadap minat investasi melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sempat sangat tinggi pada 2020 (256,99%), meski turun menjadi 33% di 2022, dan tidak tersedia pada tahun-tahun setelahnya. Hal ini mencerminkan adanya fluktuasi antara minat dan realisasi investasi, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun kesiapan daerah dalam mendukung iklim investasi.

Dari sisi pelayanan publik di bidang investasi, kinerja Kabupaten Garut patut diapresiasi. Penyelesaian pengaduan, perizinan, dan penyediaan data perizinan/non-perizinan seluruhnya mencapai 100% tepat waktu dari tahun 2021 hingga 2024. Selain itu, indeks kepastian hukum berusaha secara konsisten berada dalam kategori "Baik" pada rentang tahun 2021–2024, menunjukkan perbaikan iklim regulasi dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Berdasarkan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk periode tersebut, terlihat bahwa realisasi investasi terhadap target terus meningkat hingga mencapai 157,47% pada tahun 2024, yang menjadi capaian tertinggi selama periode lima tahun. Pertumbuhan investasi tahunan juga mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2024 dengan lonjakan sebesar 76,39%, menandakan kinerja promosi investasi dan pelayanan perizinan yang semakin membaik.

Secara keseluruhan, Kabupaten Garut menunjukkan kemajuan yang menjanjikan dalam pengelolaan urusan penanaman modal, dengan penekanan pada peningkatan nilai investasi, efisiensi pelayanan, serta kepastian hukum. Kinerja ini menjadi fondasi yang kuat untuk strategi peningkatan daya tarik investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam RPJMD 2025–2029.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan wahana strategis pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui pembinaan potensi generasi muda dan pengembangan ekosistem olahraga terintegrasi. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan program peningkatan kapasitas kepemimpinan pemuda (kewirausahaan, kepeloporan, literasi digital), penguatan karakter kebangsaan, penyediaan fasilitas olahraga publik, serta pembinaan bakat atletik sejak usia dini.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Kepemudaan; Keolahragaan; dan Kepramukaan. Capaian kinerja bidang urusan kepemudaan dan olahraga selama tahun 20202024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	40,8	60	58	85	100
2	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	1,00	n/a	n/a	38	41,37
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%		n/a	n/a	82	86,73
4	Persentase nomor cabang olahraga diikuti	%		85	100	100	100
5	Persentase olahraga masyarakat secara rutin	%		n/a	n/a	n/a	62,24
6	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%		28,5	51,65	n/a	100
7	Persentase Wirausaha Muda	%	0,12	1	30,91	34,45	34,45
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	71,43	n/a	100	100	100
9	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	80,95	n/a	n/a	n/a	12,63
10	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	29,2	n/a	n/a	n/a	56,58
11	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	133	n/a	n/a	73	68
12	Jumlah Prestasi Olahraga	Atlet		n/a	n/a	117	51
13	Tingkat partisipasi masyarakat yang berolahraga	%			63,98	62,48	60,3
14	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%		100	100	100	100
15	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%					10,04

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode tahun 2020–2024, kinerja bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membina generasi muda dan memajukan olahraga sebagai bagian penting dari pembangunan manusia. Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami kenaikan tajam dari 40,8% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Demikian pula dengan persentase pemuda berprestasi yang melonjak dari hanya 1% pada 2020 menjadi 41,37% pada tahun 2024, menunjukkan hasil dari pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Organisasi kepemudaan yang dibina juga meningkat pesat hingga mencapai 86,73% pada tahun 2024.

Di bidang olahraga, seluruh cabang olahraga yang tersedia telah diikuti secara maksimal sejak tahun 2022. Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga juga konsisten berada di atas 60%, meskipun mengalami sedikit penurunan. Upaya pengembangan wirausaha muda menunjukkan hasil menggembirakan dengan lonjakan dari 0,12% pada 2020 menjadi 34,45% pada 2024. Sementara itu, cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda berhasil mencapai 100% dan 56,58% di tahun 2024.

Meskipun terdapat penurunan jumlah atlet berprestasi dan prestasi olahraga pada tahun terakhir, hal ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas pembinaan di masa mendatang. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sektor kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Garut telah berkembang pesat, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pelatih bersertifikasi dan kesinambungan prestasi atlet.

20) Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatannya berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; koordinasi penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2020-2024 antara lain tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Statistik
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Kategori	50	69	79	100	100
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku " Profil Daerah"	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin				2,84	2,86

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja bidang Urusan Statistik di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam pemanfaatan data statistik sektoral oleh perangkat daerah. Pada tahun 2020, baru 50% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral, dan angka ini meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Garut dalam mendorong budaya berbasis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah.

Penerbitan publikasi statistik strategis daerah juga konsisten terjaga. Selama lima tahun terakhir, Buku "Kabupaten Dalam Angka", "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)", dan "Profil Daerah" secara rutin diterbitkan. Keberadaan buku-buku ini tidak hanya memperkuat peran

statistik sebagai basis informasi pembangunan, tetapi juga menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sebagai indikator makro yang mencerminkan kualitas tata kelola statistik daerah, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) juga mengalami kemajuan. Pada tahun 2023 dan 2024, IPS Garut berada di angka 2,84 dan 2,86, menandakan adanya peningkatan koordinasi, pemanfaatan, dan pengelolaan data statistik yang terstandar dan terintegrasi antarsektor pemerintahan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut telah berhasil membangun fondasi statistik daerah yang kokoh. Upaya ini menjadi modal penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

21) Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan bidang persandian terkait dengan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi secara aman menggunakan persandian. Urusan Persandian diselenggarakan melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan Sandi dan Telekomunikasi untuk pelayanan sanditel yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk radiogram dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara cepat dan akurat. Pencapaian kinerja urusan persandian selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang Urusan Persandian di Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun secara umum masih memerlukan penguatan lebih lanjut dalam perluasan pemanfaatan sandi oleh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi tercatat stagnan di angka 1,33% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan bahwa aspek penggunaan sandi belum menjadi praktik umum dalam komunikasi resmi perangkat daerah, sehingga perlu strategi percepatan dan sosialisasi lebih masif ke depan.

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
2	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Poin	125	250	291	342	377
	IKK Periode Tahun 2025-2029						

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%/ Angka		289	291	342	377

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Namun, perkembangan signifikan terlihat pada Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), yang menunjukkan kemajuan berarti dari 125 poin pada tahun 2020 menjadi 377 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya nyata dalam memperkuat sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, baik dari sisi tata kelola, perlindungan data, maupun kesiapan teknis dalam menghadapi ancaman siber. Capaian Indeks KAMI tersebut juga sejalan dengan indikator kinerja kunci (IKK) terkait tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah, yang terus meningkat dari 289 poin pada tahun 2021 menjadi 377 poin pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengamanan data dan informasi penting pemerintah, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas informasi publik serta mencegah kebocoran data.

Kesimpulannya, meskipun pemanfaatan sandi masih terbatas, Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan komitmen dan progres signifikan dalam aspek pengamanan informasi. Upaya ke depan perlu difokuskan pada peningkatan literasi keamanan siber di seluruh perangkat daerah dan penerapan sandi secara lebih luas untuk menjamin keamanan komunikasi dan informasi pemerintahan.

22) Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya sebagai pondasi identitas bangsa serta penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan inventarisasi dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan (adat, tradisi lisan, naskah kuno, cagar budaya), penguatan ekosistem seni-budaya (sanggar, komunitas, maestro), pemajuan industri kreatif budaya, serta diplomasi budaya melalui festival dan jejaring internasional.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman. Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Pagelaran	0	8	15	42	15

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	CB/ ODCB	20	25	20	25	30
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	5	0	3	1	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	CB/ ODCB	5	3	4	4	5
5	Jumlah Karya Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Buah	3	3	4	4	1
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%					88,46
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%					5,52
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%					1,92

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan kebudayaan Kabupaten Garut menunjukkan dinamika yang positif dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan signifikan, dari yang semula tidak terlaksana pada tahun 2020 menjadi puncaknya sebanyak 42 pagelaran pada tahun 2023, sebelum turun kembali menjadi 15 pagelaran pada 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas kebudayaan sekaligus tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaannya.

Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya juga menunjukkan tren membaik, dengan jumlah yang dilestarikan naik dari 20 objek pada 2020 menjadi 30 objek pada 2024. Begitu pula dengan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang tetap konsisten, berkisar antara 3–5 objek setiap tahunnya. Meski demikian, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih fluktuatif, bahkan tidak ada capaian pada tahun 2021 dan 2024, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap dokumentasi dan revitalisasi budaya lokal.

Untuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Kabupaten Garut berhasil mendaftarkan beberapa karya budaya setiap tahun, meskipun terdapat penurunan pada 2024 menjadi hanya satu karya. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode menunjukkan bahwa 88,46% warisan budaya telah dilestarikan, namun baru 5,52% karya budaya yang didaftarkan, dan 1,92% tenaga kebudayaan yang memiliki sertifikasi profesi. Ini mengindikasikan masih terbukanya ruang untuk peningkatan profesionalisme pelaku budaya serta pengakuan hukum terhadap warisan budaya lokal.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Garut pada periode 2020–2024 telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam hal pelestarian dan promosi budaya. Namun, tantangan tetap ada dalam

hal pendataan, revitalisasi karya budaya, serta peningkatan kapasitas SDM bidang kebudayaan. Hal ini menjadi dasar penting untuk penguatan kebijakan kebudayaan di masa mendatang melalui RPJMD 2025–2029

23) Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan merupakan pilar strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat berpengetahuan dan berdaya saing melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran, inovasi, dan pemberdayaan komunitas. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pemerintah kabupaten/kota perlu menyelenggarakan pengembangan koleksi literatur multidimensi (digital/fisik), penyediaan akses informasi merata hingga desa/kelurahan, penguatan literasi berbasis kebutuhan lokal, serta integrasi layanan perpustakaan dengan program pembangunan seperti pencegahan stunting, pengembangan UMKM, dan adaptasi teknologi.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perpustakaan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	9.333	6.219	32.112	41.249	42.737
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksemplar	59.446	61.696	62.516	64.716	66.829
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	%	0,25	0,75	0,75	0,403	0,32
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	36	24	123	151	165
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	7.707	8.156	8.240	14.858	15.745
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	2	8	8	6	6
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	52,33	64,83	65,92	55,87	68,64
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	12,89	15,08	18,41	49,21	56,77

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama kurun waktu 2020–2024, kinerja bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dalam aspek pemanfaatan layanan dan penguatan literasi masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun melonjak dari 9.333 orang pada tahun 2020 menjadi 42.737 orang pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Peningkatan ini juga tercermin dalam rata-rata pengunjung tahunan yang meningkat dari hanya 36 orang di tahun 2020 menjadi 165 orang pada tahun 2024.

Dari sisi koleksi, jumlah eksemplar buku yang tersedia terus bertambah dari 59.446 eksemplar pada tahun 2020 menjadi 66.829 eksemplar pada tahun 2024, serta judul buku yang meningkat hampir dua kali lipat dari 7.707 menjadi 15.745 judul. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyediakan bahan bacaan yang lebih beragam dan relevan bagi masyarakat. Namun demikian, rasio perpustakaan per satuan penduduk menunjukkan fluktuasi, dengan tren penurunan dari 0,75% pada 2021–2022 menjadi 0,32% di tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya peningkatan aksesibilitas dan distribusi perpustakaan secara merata di seluruh wilayah.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pustakawan bersertifikat masih tergolong rendah, yaitu hanya 6 orang pada tahun 2024, menurun dari puncaknya 8 orang di tahun 2021–2022. Hal ini menjadi catatan penting dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan ke depan. Kinerja literasi masyarakat mengalami lompatan positif, tercermin dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari 12,89 poin di tahun 2020 menjadi 56,77 poin di tahun 2024, serta tingkat kegemaran membaca masyarakat yang meningkat dari 52,33 menjadi 68,64 poin. Ini merupakan indikator bahwa kebijakan literasi mulai membuahkan hasil yang nyata.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan dalam rasio fasilitas dan SDM pustakawan bersertifikat, capaian di bidang literasi dan peningkatan akses layanan menunjukkan bahwa kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir telah menunjukkan arah perkembangan yang sangat positif dan perlu terus diperkuat di periode perencanaan selanjutnya.

24) Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan merupakan tulang punggung akuntabilitas dan memori kolektif daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen vital pemerintahan melalui preservasi, aksesibilitas, dan nilai guna arsip sebagai bukti hukum, alat pengawasan, serta sumber sejarah pembangunan. Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan mencakup 2 (dua) sub urusan yaitu Pengelolaan Arsip; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan Perizinan. Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan penerapan aturan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Kearsipan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	30,53	36,15	40,76	47,12	57,88
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	0,4	6	6	6	6
	IKK Periode Tahun 2025-2029						

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Kategori	B	C	BB	A	A

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan kearsipan di Kabupaten Garut menunjukkan tren positif dalam peningkatan tata kelola arsip yang tertib dan profesional. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat cukup signifikan, dari 30,53% pada tahun 2020 menjadi 57,88% di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran serta kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi penguatan kapasitas, peningkatan SDM pengelola kearsipan juga mengalami kemajuan, meskipun angkanya masih stagnan di angka 6% sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang kearsipan telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menjangkau lebih banyak pengelola arsip di seluruh perangkat daerah.

Capaian signifikan lainnya ditunjukkan melalui Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan, yang meningkat secara konsisten dari kategori B pada tahun 2020, menurun ke kategori C pada 2021, namun kemudian terus membaik hingga mencapai kategori A pada tahun 2023 dan 2024. Perbaikan ini menandakan bahwa pengelolaan arsip di lingkup pemerintahan daerah sudah menuju tingkat kematangan yang tinggi, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana pendukung.

Secara keseluruhan, capaian kinerja bidang kearsipan menunjukkan bahwa Kabupaten Garut telah berhasil membangun fondasi yang kuat dalam tata kelola arsip yang akuntabel dan transparan. Tantangan ke depan adalah memperluas cakupan pengelolaan arsip yang baku ke seluruh perangkat daerah serta mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan guna mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih tertib administrasi.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan pada Kabupaten Garut yang pertama yakni Bidang Kelautan dan Perikanan, pada urusan pilihan bidang kelautan ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dimana kewenangan Kabupaten hanya pada pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Maka dalam urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan fokus terhadap dua sub urusan yakni perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Capaian kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Ikan	kg	25,7	37,5	28,86	30,77	33,91
2	Nilai Tukar Nelayan	poin	108,01	101,5	103,00	105,4	104,2
3	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	60,884	66.442,04	67.933	69056,03	67.569,62
4	Produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	ton	655	764,6	788	832,3	792.55
5	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Kelompok	n/a	7	12	9	13
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-11.8	4.6	-3.7	9.7	4
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	%	-6.6	7.9	2.6	0.2	1

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun tetap mengarah pada tren positif, khususnya dalam hal konsumsi ikan, produksi perikanan, dan pemberdayaan masyarakat. Data mencatat bahwa konsumsi ikan per kapita mengalami peningkatan dari 25,7 kg di tahun 2020 menjadi 33,91 kg pada tahun 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam kampanye gemar makan ikan dan peningkatan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.

Dari sisi nilai tukar nelayan, indikator ini sempat mengalami penurunan dari 108,01 (2020) ke 101,5 (2021), namun kembali mengalami perbaikan hingga mencapai 104,2 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan nelayan secara umum tetap relatif stabil, meskipun tetap perlu diwaspadai adanya tekanan biaya produksi dan fluktuasi harga hasil tangkapan. Produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan pertumbuhan positif secara umum. Volume produksi naik dari 60.884 ton pada tahun 2020 menjadi 67.569,62 ton pada 2024. Capaian ini diperkuat dengan peningkatan produksi dan pemasaran olahan hasil perikanan pada kelompok binaan, dari 655 ton di tahun 2020 menjadi 792,55 ton di tahun 2024, menandakan adanya kemajuan dalam sektor hilirisasi dan pemberdayaan UMKM sektor perikanan.

Indikator penting lainnya adalah jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, yang meningkat dari 7 kelompok pada 2021 menjadi 13 kelompok pada 2024. Hal ini memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan secara aktif. Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam persentase peningkatan

produksi perikanan tangkap dan budidaya di tahun-tahun tertentu (seperti -11,8% untuk tangkap pada 2020 dan -6,6% untuk budidaya), secara keseluruhan arah pertumbuhan tetap menguat di tahun-tahun selanjutnya, dengan pertumbuhan positif sebesar 9,7% (2023) dan 4% (2024) untuk perikanan tangkap.

Kesimpulannya, bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Garut telah menunjukkan capaian yang progresif dalam hal konsumsi ikan, produksi, nilai tukar nelayan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan pelestarian ekosistem kelautan secara berkelanjutan.

26) Urusan Pariwisata

Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam pengembangan pariwisata sebagai urusan wajib konkuren yang bertujuan menjadikan sektor ini penggerak ekonomi lokal, pelestari budaya, dan pemersatu masyarakat. Melalui kewenangan ini, daerah merancang destinasi unggulan, membangun infrastruktur pendukung, mempromosikan daya tarik wisata alam dan budaya, serta memberdayakan pelaku usaha mikro dan komunitas adat. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan mulai dari pelaku industri hingga kelompok masyarakat dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan yang menjamin kualitas layanan, keamanan wisatawan, dan pelestarian lingkungan. Implementasinya tidak hanya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat identitas lokal dan memperluas jejaring ekonomi kreatif berbasis kearifan daerah.

Kinerja bidang urusan pariwisata Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dengan kecenderungan pertumbuhan positif, khususnya pasca-pandemi COVID-19. Capaian kinerja bidang urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan Wisata	orang	1.489.011	2.152.000	4.406.083	3.874.751	3.301.367
2	Lama Kunjungan Wisata	hari	1	2	2	2	2
3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	755.078.488	781.453.625	2.391.591.411	2.105.327.876	2.339.261.572
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	-97.89	2243.55	-0.07	-22.55	339.8
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%					1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan tajam dari 1.489.011 orang pada tahun 2020 menjadi 4.406.083 orang pada tahun 2022, sebelum kemudian sedikit menurun menjadi 3.301.367 orang pada tahun 2024. Peningkatan tajam tersebut menjadi indikasi pulihnya sektor pariwisata, seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat dan promosi destinasi wisata yang semakin gencar. Lama kunjungan wisatawan yang konsisten berada pada angka 2 hari sejak tahun 2021 mencerminkan mulai berkembangnya daya tarik wisata dan fasilitas akomodasi yang mampu mempertahankan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, yang melonjak drastis dari Rp755 juta di tahun 2020 menjadi lebih dari Rp2,3 miliar pada 2024, menandakan peran strategis sektor ini terhadap kontribusi pendapatan daerah.

Dari sisi investasi pariwisata, meskipun terjadi fluktuasi, terutama dengan kontraksi besar di tahun 2020 (-97,89%) dan 2023 (-22,55%), namun pada tahun 2021 dan 2024 terjadi lonjakan besar investasi hingga 2243,55% dan 339,8%. Hal ini menunjukkan adanya minat investor terhadap sub-sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebagai penunjang utama sektor pariwisata Garut. Capaian pertumbuhan wisatawan asing tercatat tetap positif dengan angka 100% secara berturut-turut selama lima tahun, menandakan potensi daya tarik internasional meskipun data absolut kunjungan wisatawan asing tidak dirinci.

Sementara itu, dalam mendukung sektor kreatif yang menjadi bagian integral dari pariwisata, masih diperlukan dorongan besar karena persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (KI) masih rendah, yakni baru mencapai 1%. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan literasi dan fasilitasi KI agar pelaku UMKM pariwisata dapat melindungi dan memonetisasi produknya secara optimal. Secara keseluruhan, sektor pariwisata Kabupaten Garut telah menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif selama periode 2020–2024. Keberlanjutan tren ini ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi dalam pengembangan destinasi, investasi berkelanjutan, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang adaptif dan inovatif.

27) Urusan Pertanian

Urusan Pertanian merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang memegang peran kritis dalam menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sektor primer. Melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi pengembangan budidaya tanaman pangan/hortikultura, pemberdayaan petani (termasuk penyuluhan pertanian dan akses permodalan), pengawasan mutu benih/pupuk, serta pengelolaan infrastruktur pertanian seperti irigasi tersier dan embung. Implementasinya mencakup program intensifikasi (sekolah lapang, demplot teknologi), ekstensifikasi (penggunaan lahan *idle*), diversifikasi komoditas unggulan daerah,

pendampingan pemasaran hasil panen, hingga mitigasi dampak perubahan iklim melalui sistem peringatan dini dan adaptasi pola tanam dengan tujuan strategis meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan impor pangan, mengentaskan kemiskinan pedesaan, serta menjamin keberlanjutan ekologi lahan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi wilayah.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian; Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Pertanian selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	37,97	37,35	37,38	36,32	36,00
2	Produktivitas padi sawah	kw/ha	51,51	60,38	61,28	67,89	68,58
3	Produktivitas jagung	kw/ha	74,63	76,21	76,77	76,86	76,47
4	Produktivitas Kopi	kg/ha	930	967	813	781	799
5	Produktivitas Teh	kg/ha	1720	1649	1648	1889	1628
6	Produktivitas komoditas Tembakau	kg/ha	807	863	876	1088	856
7	Produktivitas Cabai	kw/ha	149,94	149,72	151,05	147,87	88,09
8	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	90,72	99,86	99,86	99,73	78,57
9	Produktivitas Kentang	kw/ha	234,04	235,18	235,59	235,61	283,97
10	Produktivitas Jahe	kg/m2	2,66	3,13	2,95	2,96	2,97
11	Produktivitas Jeruk	kg/pohon	36	50,25	50,42	50,51	41,89
12	Indeks Penanaman	Poin	1,89	2,65	2,77	2,76	2,67
13	Cakupan bina kelompok petani	%	5	7,25	8,53	9	10
14	Prosentase peningkatan sarana prasarana pemasaran pertanian	%	20	20	20	10	10
15	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%	20	5	11	11	10
16	prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	2	4	5,31	5	5
17	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	0,125	0,108	0,085	0,113
18	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	point	n/a	0,102	0,103	0,103	0,103
19	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%	n/a	10	100	100	100
20	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	n/a	50	100	100	100
21	Produksi Peternakan dan Olahan Hasil Peternakan (daging, telur, susu)	ton	42.303	34.992,39	31.816	30.392,32	55111,09
22	Peningkatan layanan keswan dan kesmavet	%	n/a	5	5	5	49
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan	%	0.38	-1.2	0.04	0.85	0,5

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura	%	34.17	32.94	0.52	-1.18	0,5
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%					1
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	-7.2	13.44	0.57	0.18	0,4
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%					10
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%					

Sumber : Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja bidang urusan pertanian Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi iklim maupun dinamika pasar komoditas. Secara makro, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memang mengalami penurunan dari 37,97% pada 2020 menjadi 36,00% pada 2024, namun secara kualitas dan produktivitas, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Produktivitas padi sawah meningkat tajam dari 51,51 kw/ha pada tahun 2020 menjadi 68,58 kw/ha pada tahun 2024, menandakan adanya perbaikan pada penggunaan benih unggul, irigasi, serta pola budidaya. Demikian pula dengan komoditas jagung, yang stabil pada kisaran 74–76 kw/ha. Namun, beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah menunjukkan penurunan produktivitas di tahun 2024 yang cukup signifikan, diduga akibat anomali cuaca serta gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Komoditas kentang menjadi salah satu yang menonjol, dengan lonjakan produktivitas dari 234,04 kw/ha pada 2020 menjadi 283,97 kw/ha pada 2024. Komoditas perkebunan seperti teh dan kopi cenderung fluktuatif, dengan tren menurun, sehingga menjadi perhatian dalam penyusunan strategi revitalisasi komoditas perkebunan.

Indikator Indeks Penanaman yang meningkat dari 1,89 menjadi 2,67 menggambarkan intensifikasi pertanian semakin membaik. Peningkatan juga terjadi pada cakupan pembinaan kelompok tani, dari hanya 5% di tahun 2020 menjadi 10% di tahun 2024, menunjukkan perluasan peran penyuluh dalam mendampingi petani. Meski demikian, peningkatan penyuluh tersertifikasi dan peningkatan kelas kelompok tani berjalan lambat, sehingga perlu strategi akseleratif ke depan.

Pada sektor peternakan, produksi daging, telur, dan susu sempat menurun pada 2021–2023, namun kembali melonjak tajam pada 2024 mencapai 55.111 ton, menunjukkan adanya pemulihan yang kuat. Begitu pula layanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

(keswan dan kesmavet) meningkat drastis pada 2024 menjadi 49%, sebagai refleksi penguatan pelayanan di lapangan. Capaian lain yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan rekomendasi ijin usaha pertanian secara penuh sejak tahun 2022, serta fasilitasi penanggulangan bencana pertanian yang mencapai 100% dalam tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pertanian Kabupaten Garut tahun 2020-2024 menunjukkan kemajuan signifikan di banyak aspek, meskipun masih terdapat tantangan pada stabilisasi produktivitas hortikultura dan peningkatan kualitas kelembagaan petani. Untuk periode 2025-2029, fokus dapat diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penguatan SDM penyuluhan, optimalisasi hilirisasi serta pengendalian risiko bencana pertanian dan penyakit hewan menular strategis.

28) Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan merupakan motor penggerak dinamika ekonomi lokal yang bertanggung jawab atas terciptanya ekosistem niaga berkeadilan melalui pengendalian harga pokok, pengawasan distribusi pangan strategis, pemberdayaan pasar tradisional, dan optimalisasi potensi ekspor komoditas unggulan daerah. Pemerintah kabupaten/kota melalui perlu menyelenggarakan stabilisasi pasokan dan harga sembako (beras, minyak goreng, gula), penertiban pasar dari praktik monopoli dan pemalsuan produk, fasilitasi sertifikasi UMKM (SNI, Halal, Indikasi Geografis), serta pengembangan digitalisasi perdagangan seperti e-*marketplace* lokal dan integrasi rantai pasok logistik terpadu.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan mencakup 5 (lima) sub urusan yaitu Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; dan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perdagangan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%		2,95	3	3	4
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%		35	36	34	78,45
3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah yang berlaku	%		41,4	41,8	38	14,08
4	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	unit		3	5	1	4
5	Jenis Produk yang dipromosikan	jenis		10	12	14	15
6	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha		16	18	20	20

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%		9	10	12	13
8	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Sektor usaha		7	7	7	7
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-6,72	3,08	4,53	4,81	5,51
2	Nilai Ekspor Pelaku Usaha	Rupiah					20.280.778
3	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%		41,6	41,8	38	14,08

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja urusan perdagangan Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan arah yang progresif dalam upaya peningkatan tata kelola perdagangan dan fasilitasi pelaku usaha. Salah satu indikator penting adalah laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, yang mengalami pemulihan dari kontraksi -6,72% pada 2020 menjadi 5,51% pada 2024, menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan aktivitas sektor perdagangan.

Dari sisi pelaku usaha, terdapat peningkatan persentase pelaku yang memperoleh izin sesuai ketentuan, yaitu dari 2,95% pada 2021 menjadi 4% pada 2024, serta jumlah pelaku yang difasilitasi untuk penerbitan izin meningkat dari 16 menjadi 20 pelaku usaha. Ini mencerminkan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong legalitas dan kemudahan berusaha. Peningkatan juga terlihat pada aspek promosi produk lokal, di mana jenis produk yang dipromosikan meningkat dari 10 jenis pada 2021 menjadi 15 jenis pada 2024. Ini menunjukkan komitmen dalam memperluas akses pasar UMKM. Selain itu, jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor konsisten berada di angka 7 sektor, menandakan adanya basis usaha yang telah siap untuk ekspansi pasar internasional.

Namun, capaian pada pengawasan alat ukur (UTTP) mengalami penurunan signifikan, dari 41,8% pada 2022 menjadi hanya 14,08% pada 2024, yang menjadi catatan penting untuk pembenahan pengawasan dan tera ulang alat ukur sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan keadilan transaksi perdagangan.

Pada indikator ketersediaan harga barang kebutuhan pokok, terdapat tren positif dari 9% pada 2021 menjadi 13% pada 2024, yang menunjukkan penguatan pengawasan ketersediaan barang strategis masyarakat. Adapun nilai ekspor pelaku usaha mulai tercatat pada tahun 2024, yaitu mencapai Rp 20.280.778, yang meskipun masih kecil, menandakan awal positif terhadap geliat ekspor dari sektor perdagangan di Kabupaten Garut.

Secara umum, kinerja urusan perdagangan Kabupaten Garut dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam hal regulasi, fasilitasi, promosi, serta kontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi. Meski demikian, diperlukan penguatan pengawasan alat ukur dan pemanfaatan potensi ekspor yang lebih besar agar sektor perdagangan dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi lokal ke depan.

29) Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan mesin penggerak industrialisasi daerah yang bertanggung jawab atas transformasi ekonomi berbasis nilai tambah melalui pengembangan kawasan industri terpadu, pemberdayaan IKM (Industri Kecil Menengah), dan hilirisasi sumber daya lokal. Sektor industri memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Capaian kinerja bidang Urusan Bidang Perindustrian selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil	%		1	1,14	4,86	2,3
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	%		39,8	100	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%		100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		100	100	100	100
5	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut	IKM		200	250	705	350
6	Jumlah Industri memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dimonitor dan dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM		50	10	10	10
7	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	%		0,15	0,18	0,2	1,2
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:						
	a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	-0,46	5,91	6,29	8,05	9,45
	b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	8,73	8,92	9,02	9,29	9,44
	c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Orang	258.720	277.880	326.065	339.637	309.412
	d. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Rupiah					422.419.408.544

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%					17,65
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%					100
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%					80
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%					105

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan perindustrian Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan jumlah dan pengawasan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Pertumbuhan IKM meningkat cukup tajam, dengan penambahan dari 200 IKM pada 2021 menjadi 705 IKM pada 2023, meskipun pada 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 350 IKM. Hal ini menandakan adanya dinamika ekspansi usaha kecil yang cukup kuat namun memerlukan strategi keberlanjutan yang lebih baik.

Kinerja perencanaan dan regulasi juga mengalami kemajuan penting. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda sejak 2022, mencapai 100% realisasi, yang menjadi dasar strategis pengembangan sektor industri jangka panjang. Di sisi pengawasan, pemantauan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menengah tercapai sempurna pada 2021–2024, yang menunjukkan penguatan peran pemerintah dalam pengendalian industri.

Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB mengalami tren kenaikan, dari 8,73% pada 2020 menjadi 9,44% pada 2024, dengan pertumbuhan PDRB sektor tersebut mencapai 9,45% pada 2024. Ini memperlihatkan bahwa sektor industri memberikan kontribusi yang semakin penting terhadap ekonomi daerah. Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan juga meningkat hingga mencapai 339.637 orang pada 2023, meskipun turun menjadi 309.412 orang pada 2024, yang bisa menjadi indikasi adanya efisiensi atau perubahan pola rekrutmen industri.

Dari aspek kepatuhan dan pengawasan, tercatat bahwa 100% perusahaan industri telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan, dan 80% memiliki tingkat kepatuhan minimal ‘Baik’. Selain itu, tersedianya informasi industri yang lengkap dan akurat telah mencapai

105%, mencerminkan kinerja administrasi dan sistem informasi yang sangat baik.

Secara keseluruhan, kinerja sektor perindustrian Kabupaten Garut menunjukkan kemajuan yang berarti, baik dari sisi pertumbuhan industri, kontribusi ekonomi, maupun aspek pengawasan dan kepatuhan regulatif. Namun, untuk mendorong daya saing industri yang berkelanjutan, tantangan ke depan mencakup peningkatan kualitas IKM, perluasan akses pasar, serta digitalisasi dalam pengelolaan dan pelayanan sektor industri.

30) Unsur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah berfungsi sebagai *nerve center* pemerintahan daerah yang menjamin koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan otonomi. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah, Setda mengemban tugas strategis mulai dari penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi pemerintahan, pembinaan sumber daya aparatur, hingga fasilitasi kerja sama antar lembaga dan pelayanan protokol. Melalui pengelolaan dokumen perencanaan (seperti RPJMD dan Renstra), penguatan kapasitas birokrasi, serta optimalisasi sistem informasi, Sekretariat Daerah menciptakan tata kelola yang efektif dan responsif guna mendukung implementasi program prioritas, akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara holistik. Capaian kinerja bidang unsur Sekretariat Daerah selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru Ngaji Aktif Dalam "Garut Mengaji"	%	73	76	80	81	85
2	Cakupan Magrib Mengaji	%	70	80	80	90	0
3	Rasio Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tingkat Kabupaten Garut Aktif Mengelola Masjid	%	45	45	50	50	65
4	Persentase Masjid Dalam Kondisi Baik	%	63	65	68	68	80
5	Persentase Pesantren Salafiah Dalam Kondisi Baik	%	45	50	60	60	90
6	Rasio Lembaga Pendidikan Keagamaan Aktif	%	45	50	60	94	95
7	Persentase SKPD Yang Menerapkan Aktifitas Keagamaan Di Lingkungannya	%	75	75	80	90	95
8	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat	%	85	90	90	95	95
9	Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,05	3,05			
10	Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,09	3,09			
11	Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	-	4	4	4,02	
12	Prosentase Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Perbankan Dan Non	%	85	85	n/a	95	

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perbankan Daerah Sebagai Daya Dukung Ekonomi Kerakyatan						
13	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
14	Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Produk Hukum	10 Perda, 84 Perbup, 850 Kepbup	10 Perda, 230 Perbup, 850 Kepbup	15 Perda, 219 Perbup, 864Kepbup	12 Perda, 184 Perbup, 824 Kepbup	9 Perda, 62 Perbup,
15	Prosentase Capaian Kinerja KDH/WKDH	%	80	85	90	95	98
16	Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	80	100	95	95	98
17	Prosentase Kasus Pertanahan Yang Difasilitasi	%	60	50	Dipindah-kan ke Perkim		
18	Nilai LPPD	Angka	3,5117	3,5117	n/a	3,5117	3,5136
19	Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	100	100	100	100	100
20	Prosentase Kesepakantan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama	%	91	73	100	90	90
21	Prosentase Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	%	n/a	n/a	Dipindah-kan ke DPMD		
22	Prosentase Pelayanan Publik Dan Pembinaan Pegawai	%	100	100	100	100	100
23	Persentase Sarana Dan Prasarana Berkondisi Baik	%	95	95	96	80	98
24	Prosentase Kepuasan Layanan Internal Sekretariat Daerah	%	93	93	95	98	98
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
	Pengadaan						
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin		19,10	22,50	23,73	26,83
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin		2,00	7,30	18,00	20,00
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin		4,44	22,20	40,00	40,00
	Pelayanan Publik						
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai		65.58	72.67	95.05	94.76

Sumber : Sekretariat Daerah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020-2024, kinerja bidang urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut menunjukkan capaian positif dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Di bidang keagamaan, program seperti Garut Mengaji, Magrib Mengaji, serta fasilitasi terhadap Dewan Masjid Indonesia (DMI) menunjukkan peningkatan partisipasi dan efektivitas pelaksanaan. Rasio guru ngaji aktif meningkat dari 73% pada 2020 menjadi 85% pada 2024, sementara cakupan Magrib Mengaji mencapai puncaknya di 90% pada 2023 meskipun tidak dilanjutkan pada 2024. Kondisi fisik fasilitas keagamaan juga mengalami perbaikan, terlihat dari meningkatnya persentase masjid dan pesantren *salafiah* dalam kondisi baik masing-masing menjadi 80% dan 90% pada 2024. Aktivitas keagamaan di

lingkungan perangkat daerah pun semakin meluas, mencapai 95% SKPD yang melaksanakannya.

Dari sisi birokrasi dan pelayanan, tingkat kualitas pelayanan publik tetap stabil di angka 4 dari skala 5, dan laporan pelaksanaan pembangunan disampaikan tepat waktu oleh 100% SKPD setiap tahun. Reformasi birokrasi juga didorong melalui penguatan unsur organisasi dan ketatalaksanaan yang tercermin dalam nilai indeks reformasi birokrasi, walaupun sempat tidak tercatat di tahun 2022–2024. Capaian kinerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meningkat signifikan dari 80% di 2020 menjadi 98% di 2024. Dalam aspek hukum dan administrasi, jumlah produk hukum daerah relatif stabil, walau mengalami penurunan pada 2024. Sementara itu, pelayanan internal Sekretariat Daerah terhadap aktivitas kedinasan dan kepuasan layanan internal tetap tinggi, dengan capaian 98% di 2024.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, tingkat kematangan UKPBJ melonjak dari 4,44 poin pada 2021 menjadi 40 poin pada 2023–2024, menunjukkan peningkatan profesionalisme dan sistem pengadaan yang semakin baik. Nilai penilaian kepatuhan pelayanan publik juga terus meningkat, dari 65,58 di 2021 menjadi 94,76 di 2024, mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, kinerja urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut selama tahun 2020-2024 memperlihatkan sinergi antara peningkatan kualitas layanan birokrasi, penguatan kelembagaan keagamaan, dan pelayanan administrasi pemerintahan yang semakin efektif, menjadi modal penting untuk menyongsong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif pada periode RPJMD 2025-2029.

31) Unsur Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD berperan sebagai tulang punggung administratif dan pendukung teknis yang memastikan kelancaran fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui pengelolaan rapat, penyusunan risalah, pengarsipan dokumen hukum daerah (seperti Perda dan Keputusan DPRD), serta koordinasi pelayanan protokol, Sekretariat DPRD menciptakan ekosistem kerja yang terstruktur bagi anggota dewan. Unsur ini juga bertanggung jawab atas penyediaan analisis kebijakan, fasilitasi konsultasi publik, pengelolaan anggaran DPRD, dan peningkatan kapasitas kelembagaan—sehingga memungkinkan DPRD menjalankan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis, responsif, dan akuntabel terhadap aspirasi masyarakat. Capaian kinerja bidang unsur Sekretariat DPRD selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
	Hubungan dengan Perwakilan Daerah						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam mendukung optimalisasi fungsi kelembagaan DPRD. Seluruh indikator utama menunjukkan hasil yang stabil dan menggambarkan ketersediaan perangkat perencanaan, penganggaran, dan fasilitasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD secara efektif. Sepanjang lima tahun terakhir, rencana kerja tahunan alat kelengkapan DPRD selalu tersedia, menunjukkan bahwa perencanaan internal kelembagaan berjalan secara sistematis. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah, dan penganggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) secara konsisten setiap tahun.

Integrasi program DPRD ke dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD juga selalu terlaksana, menegaskan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dengan perangkat eksekutif. Tingkat fasilitasi terhadap pelaksanaan peran legislasi dan pengawasan oleh Sekretariat DPRD dinilai selalu tersedia, menandakan dukungan administratif dan teknis terhadap kegiatan DPRD berlangsung memadai.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga menunjukkan hasil yang maksimal, di mana penetapan Perda APBD setiap tahunnya dilakukan secara tepat waktu, dan seluruh Ranperda yang diajukan pada tahun berjalan telah ditetapkan 100%, mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Garut dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu legislasi. Secara keseluruhan, kinerja urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut selama tahun 2020–2024 telah mendukung secara optimal fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD melalui fasilitasi, integrasi

dokumen, dan perencanaan yang tepat. Hal ini menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong penguatan peran DPRD dalam mendukung agenda pembangunan daerah pada periode RPJMD 2025–2029.

32) Urusan Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan motor penggerak pembangunan daerah yang berfungsi mengintegrasikan visi jangka panjang, kebijakan strategis, dan sumber daya terbatas guna mewujudkan tata kelola yang terarah, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Pemerintah daerah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyusun dokumen perencanaan berjenjang mulai dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), hingga RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilaksanakan secara berjenjang atau multi-level, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta analisis data berbasis *evidence*.

Proses ini tidak hanya memastikan alokasi anggaran dan program prioritas selaras dengan kebutuhan riil masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, dan percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan kerangka evaluasi kinerja yang akuntabel, mitigasi risiko pembangunan, dan adaptasi terhadap disrupsi global melalui inovasi perencanaan adaptif berbasis teknologi dan data spasial. Capaian kinerja bidang urusan perencanaan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	97	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	82,5	83	83,50	83,92	85,08
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode tahun 2020–2024, kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Seluruh dokumen perencanaan utama seperti

RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW telah tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga kelengkapan, legalitas, dan keberlanjutan dokumen perencanaan sebagai dasar pembangunan daerah.

Konsistensi antara dokumen perencanaan juga tergolong tinggi. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD berhasil mencapai tingkat konsistensi sebesar 100% selama lima tahun berturut-turut. Demikian pula, konsistensi antara RKPD dengan APBD juga mencapai 100% pada hampir seluruh tahun, dengan sedikit deviasi di tahun 2021 yang tercatat sebesar 97%. Hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Lebih lanjut, kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW menunjukkan tren peningkatan, dari 82,5% pada tahun 2020 menjadi 85,08% di tahun 2024. Capaian ini memperlihatkan upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa pembangunan daerah tetap selaras dengan arah tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Dari sisi integrasi dengan kebijakan nasional, capaian dukungan terhadap Program Prioritas Nasional juga menunjukkan hasil yang sempurna, yaitu 100% setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Garut tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga sinergis dengan agenda pembangunan nasional. Kesimpulannya, capaian kinerja bidang urusan perencanaan di Kabupaten Garut selama 2020–2024 telah menunjukkan tata kelola yang sangat baik dan strategis. Hal ini menjadi pondasi kuat untuk perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan pada periode RPJMD Tahun 2025–2029.

33) Urusan Keuangan

Urusan keuangan daerah merupakan tulang punggung otonomi daerah yang menjamin efektivitas pembangunan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel, transparan, dan berorientasi kinerja. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan DPRD menyelenggarakan siklus perencanaan fiskal (penyusunan RKA-SKPD, pembahasan KUA-PPAS, penetapan APBD), eksekusi anggaran berbasis output, pengendalian internal oleh Inspektorat, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK. Proses ini tidak hanya memastikan alokasi sumber daya optimal untuk prioritas lokal seperti pengentasan kemiskinan dan infrastruktur dasar, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, dan sinergi kebijakan transfer pusat (DAU, DAK, DBH) dengan prinsip keuangan berkelanjutan guna meminimalkan risiko defisit dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Capaian kinerja bidang urusan keuangan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Keuangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	6,73	3,22	5,37	3,78	3,46
3	Persentase Belanja Pendidikan (20)	%	32,33	34,12	33,59	20	38,73
4	Persentase Belanja Kesehatan (10)	%	13,95	14,14	12,81	10	18,66
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	41,00	37,98	41,98	48,83	35,17
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	59,00	62,02	58,11	51,17	64,83
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa	%	0,32	0,34	0,36	0,35	0,39
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90	%	92	95	95	95	98
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	8	80	85	90	100
13	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	%	98,98	99,72	100	n/a	100
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	%	100	100,74	101,37	n/a	101,17
15	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	%	98,43	99,58	99,77	n/a	101,09
16	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	%	98,72	98,94	99,62	n/a	96,91
17	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	%	99,05	99,12	100	n/a	100
18	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	%	99,23	100	100	n/a	100
19	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	99,25	100	100	n/a	100
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	30.52	28.37	28.69	28.43	34.74
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10.55	11.97	10.50	11.20	10.83
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94.73	93.11	94.61	94.99	95.00
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	08.09	11.02	-10.59	10.17	0.64
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	16.22	28.29	28.55	27.59	26.96
6	Persentase Penurunan SILPA	%	26.92	-9.83	28.92	23.85	-19.17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja bidang urusan keuangan Kabupaten Garut selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang stabil dan positif, mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut. Dari sisi ketepatan perencanaan dan pelaporan, semua indikator menunjukkan konsistensi yang tinggi. Penetapan APBD selalu dilakukan tepat waktu, dengan seluruh dokumen perencanaan keuangan disusun sesuai SOP, dan seluruh SKPD berhasil menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset secara tepat waktu dan sesuai standar.

Persentase SILPA terhadap APBD mengalami tren penurunan dari 6,73% pada tahun 2020 menjadi 3,46% pada tahun 2024, menandakan efisiensi dalam realisasi anggaran. Persentase belanja pendidikan dan kesehatan juga melampaui batas minimal yang diamanatkan undang-undang, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan masing-masing sebesar 38,73% dan 18,66%. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik tetap terjaga, meskipun sedikit menurun dari 28,55% pada 2022 menjadi 26,96% pada 2024.

Dari aspek pengelolaan pajak daerah, hampir seluruh indikator menunjukkan performa sangat baik. Tingkat verifikasi dan integrasi objek dan subjek pajak mencapai 101,09% pada 2024, diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan yang mencapai 100%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga berada di atas 100%, mencerminkan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Pengelolaan aset daerah pun menunjukkan kemajuan signifikan, dari hanya 8% aset yang terinventarisasi pada 2020 menjadi 100% pada 2024. Meskipun terjadi penurunan nilai aset tetap pada tahun 2022 (-10,59%), indikator ini kembali pulih pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja urusan keuangan Kabupaten Garut pada periode 2020–2024 dapat dikategorikan sangat baik. Pemerintah Daerah mampu mempertahankan akuntabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memberikan pelayanan publik berbasis data yang berkualitas, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah ke depan.

34) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan pondasi strategis penguatan kapasitas birokrasi daerah yang menjamin tersedianya aparatur sipil negara (ASN) berkompetensi tinggi, berintegritas, dan adaptif melalui pengelolaan siklus manajemen SDM, mulai dari rekrutmen berbasis sistem merit, pengembangan karir, pembinaan disiplin, hingga pemberhentian serta penyelenggaraan diklat struktural, teknis, dan fungsional yang terstandar. Pemerintah daerah, melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), bertanggung jawab menciptakan ekosistem

pembelajaran berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi, menyelaraskan program diklat dengan kebutuhan strategis organisasi, dan memastikan kesejahteraan ASN sebagai fondasi pelayanan publik yang efektif. Sinergi dengan BKN, LAN, dan Kementerian PANRB ini tidak hanya memperkuat kapasitas institusi dalam menjawab tantangan *governance* kontemporer, tetapi juga membangun budaya kinerja berbasis nilai-nilai ASN: akuntabel, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Capaian kinerja bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	orang	37	39	36	38	33
2	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	orang	258	250	255	259	2736
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	orang	10.059	9.463	8.888	8469	7,887
4	Kebijakan kepegawaian Kabupaten Garut yang ditetapkan	Kebijakan	n/a	5	2	4	0
5	Persentase penempatan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi	%	80	95,36	97,5	82	88
6	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Pegawai	%	112	30,30	97,5	82	82
7	Prosentase Data Pegawai yang Telah Diperbaharui	%	98,68	99,13	99,57	97	97
8	Persentase ASN yang Disiplin	%	99,9	99,90	99,77	99,96	99,96
9	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20
10	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	15	n/a	3	3	2,1
11	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	43	44	46	93	82
12	Persentase Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi PNS	%	14	82	77	86	88
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Angka			83,83	87,75	87,75

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020-2024, kinerja bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menunjukkan tren positif dalam penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi meningkat dari 80% pada tahun 2020 menjadi 97,5% pada 2022, meski sempat menurun menjadi 82% pada 2023, dan kembali naik menjadi 88% di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penempatan SDM secara tepat sasaran.

Dari sisi pengadaan pegawai, meskipun sempat sangat tinggi di tahun 2020 (112%), terjadi fluktuasi di tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 82% pada 2023 dan 2024. Sementara itu, pembaharuan data pegawai tetap terjaga di atas 97%, menandakan sistem manajemen data kepegawaian yang cukup baik. Tingkat disiplin ASN juga sangat tinggi dan stabil, dengan capaian konsisten di atas 99,9% sepanjang lima tahun

terakhir. Dalam aspek pengembangan kapasitas, rata-rata jam pendidikan dan pelatihan (diklat) tetap konsisten di 20 JP (jam pelajaran) per tahun, namun partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan formal masih rendah, menurun dari 15% di 2020 menjadi hanya 2,1% di 2024. Sebaliknya, partisipasi dalam diklat struktural meningkat tajam dari 43% pada 2020 menjadi 93% pada 2023, meskipun sedikit menurun di 2024 menjadi 82%. Pengembangan kompetensi PNS juga mengalami perbaikan signifikan, dari 14% di 2020 menjadi 88% di tahun 2024, menandakan adanya perhatian besar terhadap penguatan kualitas SDM aparatur.

Secara keseluruhan, implementasi NSPK manajemen ASN menunjukkan peningkatan nilai indeks dari 83,83 pada 2022 menjadi 87,75 pada 2023 dan 2024, mencerminkan semakin baiknya penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan ASN. Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Garut telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing, meski penguatan pelatihan formal dan kebijakan kepegawaian masih perlu menjadi perhatian pada periode RPJMD selanjutnya.

35) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan berperan sebagai *knowledge hub* strategis bagi pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), inovasi pelayanan publik, dan percepatan pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi tantangan lokal, eksperimen solusi terukur, serta transfer pengetahuan kontekstual. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit khusus, pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan riset terapan, mulai dari pemetaan potensi ekonomi unggulan, evaluasi efektivitas program, analisis dampak sosial-lingkungan, hingga pengembangan model tata kelola inovatif, yang hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), penyusunan regulasi (Perda/Ranperda), dan desain intervensi publik. Sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional (BRIN/BPPT), serta *startup* teknologi tidak hanya memperkaya perspektif ilmiah tetapi juga mengakselerasi adopsi solusi seperti *smart city*, ekonomi sirkular, dan sistem layanan digital berbasis kearifan lokal, sehingga transformasi kebijakan tidak bersifat reaktif melainkan antisipatif dan terukur dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja bidang urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	75	6,82	56,1	66,7	100
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	50	66,67	51,22	75	76
	Penerapan SIDa:						
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	9,09	27,27	100	100	50

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	60	78,95	36,84	100	50
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%					100
2	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio					23,2

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Kinerja bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Garut pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Persentase implementasi rencana kelitbangan sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 hanya sebesar 6,82%, namun secara bertahap meningkat signifikan hingga mencapai angka maksimal 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam konsistensi pelaksanaan rencana kelitbangan yang menjadi dasar dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, indikator pemanfaatan hasil kelitbangan juga menunjukkan tren meningkat dari 50% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa hasil-hasil kelitbangan semakin banyak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan daerah.

Dari sisi penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), terdapat kemajuan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, di mana seluruh perangkat daerah telah difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (100%). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 50%, yang menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi pendampingan inovasi lintas perangkat daerah. Hal serupa juga terjadi pada indikator kebijakan inovasi yang diterapkan, di mana sempat mencapai 100% pada 2023, tetapi turun menjadi 50% di tahun 2024. Secara umum, kinerja urusan penelitian dan pengembangan selama lima tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang berarti dan menunjukkan peran strategis kelitbangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data, inovasi, dan efisiensi.

36) Urusan Pengawasan

Unsur pengawasan merupakan pilar krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi menjamin akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Melalui mekanisme pengawasan yang terintegrasi, baik secara preventif, represif, internal, maupun eksternal, pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan, kinerja aparatur, penyerapan anggaran, dan kesesuaian tindakan administrasi dengan peraturan perundang-undangan. Aktivitas ini melibatkan peran strategis Inspektorat Daerah sebagai auditor internal, pengawasan fungsional oleh DPRD, serta

partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial, sehingga menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif untuk mencegah penyimpangan, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan memastikan pembangunan daerah berjalan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Capaian kinerja bidang urusan pengawasan selama tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP PEMDA	Nilai	73,51	74,28	74,38	74,91	75,93
2	Persentase SKPD Nilai SAKIP "A"	%	21,33	25,33	29,33	32	34,67
3	Tingkat Maturitas SPIP*	Level				L3	L3
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	%	78	82	82	94,54	95,73
5	Persentase Pengaduan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kapabilitas APIP*	Level				L3	L3
7	Persentase MCP (*Monitoring Center Prevention*) Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	%	92	77,04	93	92	97,4
8	Jumlah SKPD/Unit Kerja berpredikat ZI WBK WBBM dari TPN (Tim Penilai Nasional)*	unit	n/a	0	0	0	1
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	Nilai				3,17	3,15
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	Nilai				3,09	3,29
4	Nilai/Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah*	Nilai				3,08	3,097
5	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)*	Nilai				2,77	2,83
6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	63,49	42,7	80,3	53,16	73

Sumber : Inspektorat Daerah, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD
*Keterangan : * Realisasi indikator mulai dihitung pada tahun 2023*

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan pengawasan di Kabupaten Garut menunjukkan kemajuan yang konsisten dan progresif dalam berbagai aspek utama pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah meningkat secara bertahap dari 73,51 pada tahun 2020 menjadi 75,93 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja. Sejalan dengan itu, jumlah SKPD yang memperoleh nilai SAKIP kategori "A" juga mengalami peningkatan dari 21,33% di tahun 2020 menjadi 34,67% pada tahun 2024.

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level 3 (L3) sejak tahun 2023, mencerminkan penguatan peran pengawasan internal yang semakin profesional dan sistematis. Keberhasilan ini turut didukung dengan peningkatan signifikan pada indikator tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dari 78% pada tahun 2020 menjadi 95,73% pada tahun 2024. Selain itu, tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat juga dijaga tetap maksimal di angka 100% selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan responsivitas dan kepedulian tinggi terhadap pelayanan publik.

Persentase capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sebagai indikator pelaksanaan aksi pencegahan korupsi mengalami fluktuasi, tetapi secara keseluruhan meningkat dari 92% pada tahun 2020 menjadi 97,4% pada tahun 2024. Sementara itu, capaian predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mulai menunjukkan hasil di tahun 2024 dengan satu unit kerja berhasil meraih predikat tersebut.

Secara keseluruhan, bidang urusan pengawasan di Kabupaten Garut berhasil membangun sistem pengendalian yang kuat dan adaptif, ditandai oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terus dipertahankan, peningkatan indeks manajemen risiko, serta peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada hasil di periode RPJMD 2025–2029.

37) Urusan Kewilayahan

Urusan Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menjembatani kebijakan kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat di tingkat *grassroots*. Melalui satuan kerja Kecamatan yang dipimpin Camat, pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi lintas desa/kelurahan, pengawasan pembangunan, pelayanan administrasi publik (seperti penerbitan surat domisili dan pengesahan dokumen kependudukan), serta penanganan dini konflik sosial. Implementasinya mencakup sinkronisasi program dinas teknis di wilayah kerja, fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, penguatan ketertiban umum, hingga respons cepat terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, bencana lokal, atau gangguan keamanan dengan tujuan memastikan kebijakan daerah terlaksana efektif, pelayanan dasar tersalur merata, dan keharmonisan sosial terjaga di seluruh wilayah administrasi. Capaian kinerja bidang urusan kewilayahan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	100	100			
2	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	100	100			
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar kelurahan	%	70	70			
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan	%	75	75			
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	n/a	n/a	82,91	83,19	82,48
6	Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	Nilai	70,75	68,5	69,37	76,34	79,9
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	n/a	n/a	100	100	100
8	Nilai SAKIP Kecamatan	Kategori	n/a	n/a	B	B	CC
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	70,75	68,5	69,37	76,34	79,9
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin					67,09

Sumber: Kecamatan, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama kurun waktu 2020-2024, kinerja urusan kewilayahan atau kecamatan di Kabupaten Garut menunjukkan pencapaian yang cukup stabil dan progresif dalam berbagai indikator penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara konsisten telah memenuhi standar pelayanan sebesar 100% selama dua tahun awal, yakni 2020 dan 2021. Hal ini mencerminkan kesiapan dan kedisiplinan aparatur kecamatan dalam melayani masyarakat secara terpadu dan sesuai prosedur.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan pun menunjukkan pencapaian maksimal, yaitu 100% pada tahun yang sama. Sementara itu, dalam hal dukungan terhadap pelayanan sosial dasar, persentase pemenuhan sarana dan prasarana kelurahan berada di angka 70% dan belum mengalami peningkatan, yang menandakan perlunya perencanaan lebih lanjut untuk pemerataan dan penguatan fasilitas di wilayah kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan juga masih stagnan di angka 75% untuk dua tahun awal, namun indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah secara umum meningkat signifikan dengan capaian 100% selama tiga tahun terakhir (2022–2024), menunjukkan tren positif dalam keterlibatan publik terhadap agenda pembangunan daerah.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mulai terdata sejak 2022 menunjukkan hasil cukup tinggi dan stabil, yakni 82,91 (2022), meningkat menjadi 83,19 (2023), dan sedikit menurun menjadi 82,48 (2024). Sementara itu, nilai sinergitas kinerja kecamatan juga terus meningkat dari 70,75 pada 2020 menjadi 79,9 pada 2024,

mengindikasikan penguatan koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas organisasi di tingkat kecamatan.

Adapun rata-rata nilai SAKIP Kecamatan, meskipun sempat berada di kategori "B" pada 2022 dan 2023, mengalami penurunan pada 2024 menjadi "CC", yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan sistem pengukuran capaian yang perlu segera diperbaiki. Secara keseluruhan, kinerja kecamatan dalam menjalankan urusan kewilayahan menunjukkan tren positif pada beberapa aspek strategis, seperti sinergitas kinerja dan partisipasi masyarakat, namun masih perlu perhatian khusus pada aspek penguatan kelembagaan, peningkatan sarana pelayanan dasar, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mendukung perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Tahun 2024 tercatat sebesar 67,09. Capaian yang relatif rendah ini terjadi karena sebagian besar perangkat daerah belum sepenuhnya memahami pentingnya dan jenis bukti dukung yang diperlukan untuk mencapai nilai IRB yang optimal. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya akan dilakukan langkah perbaikan melalui sosialisasi pemetaan bukti dukung agar perangkat daerah memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, pembentukan tim penilai untuk melakukan verifikasi serta penghitungan IRB secara obyektif, dan pemetaan target IRB di setiap perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian IRB di Kabupaten dapat meningkat signifikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

38) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah daerah memegang peran krusial dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang bertujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan stabilitas politik di tingkat lokal. Melalui fungsi ini, daerah aktif membina kerukunan warga, memelihara harmoni sosial, serta memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di masyarakat. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab melakukan pencegahan dini terhadap konflik, mengelola kerawanan sosial, mendukung pemantapan wawasan kebangsaan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik yang damai. Upaya strategis ini tidak hanya memperkokoh pondasi persatuan bangsa tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	%	66,67	80	100	100	100
2	Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	%	99,98	80	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat Kebebasan Berpendapat	%	85,94	97,29	100	99,13	98,86
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam politik	%	n/a	78,91	n/a	79,57	83,6
5	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	n/a	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	IKK Periode Tahun 2025-2029						
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka					
2	Indeks Kinerja Ormas	Angka					
3	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka					
4	Indeks Harmoni Indonesia	Angka					

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, data diolah 2025 yang dikelola dalam SIPD

Selama periode 2020–2024, kinerja bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan capaian yang sangat positif dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan pada indikator-indikator kebebasan sipil yang menjadi cerminan iklim demokrasi di daerah. Tingkat kebebasan berkeyakinan meningkat dari 66,67% pada 2020 menjadi 100% sejak 2022 hingga 2024, menunjukkan adanya penguatan jaminan hak-hak dasar warga negara. Begitu pula kebebasan berkumpul dan berserikat, yang mengalami peningkatan dari 80% pada 2021 menjadi 100% pada 2022 dan tetap stabil hingga 2024. Tingkat kebebasan berpendapat pun mengalami peningkatan dari 85,94% pada 2020 hingga mencapai 100% pada 2022, dengan sedikit fluktuasi namun tetap tinggi di kisaran 99,13%–98,86% pada 2023–2024. Ini menggambarkan adanya ruang yang luas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam politik, yang mulai diukur sejak 2021, menunjukkan tren meningkat dari 78,91% pada 2021 menjadi 83,6% pada 2024, menandakan peningkatan kesadaran politik warga serta efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan pemerintah daerah. Dari sisi kelembagaan, tingkat akuntabilitas pelayanan publik dan kinerja Badan Kesbangpol secara konsisten berada pada kategori "Sangat Baik" dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan manajemen kelembagaan yang profesional dan responsif. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Garut berhasil menjaga dan memperkuat pilar-pilar demokrasi serta kohesi sosial selama lima tahun terakhir. Ke depan, penilaian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas, Indeks Kewaspadaan Nasional, dan Indeks Harmoni Indonesia akan menjadi instrumen penting dalam memetakan dan meningkatkan kualitas tata kelola politik dan ketahanan sosial di daerah secara lebih terukur dan sistematis.

2.1.5 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi karateristik Kabupaten Garut, didapatkan 184 indikator

TPB yang relevan bagi Kabupaten Garut. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Garut ini memiliki 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “tidak ada data”, dan “belum dilaksanakan”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional serta nantinya akan dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB).

Tabel 2.72 Capaian TPB Kabupaten Garut

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Jmlh Indikator	Capaian Indikator TPB			
			(SS)	(SB)	(N/A)	(BB)
1	Tanpa Kemiskinan	23	14	8	1	
2	Tanpa Kelaparan	11	6	2	3	
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	26	8	10	8	
4	Pendidikan Berkualitas	13	8	3		2
5	Kesetaraan Gender	14	10	2	2	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	6	3	2	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Kewenangan Pusat / Provinsi				
8	Energi Bersih dan Terjangkau	19	5	3	4	7
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	10	2		7	1
10	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	6	3	1	2	
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	8	4	3	1	
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	4	3	1		
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	2	1	1		
14	Ekosistem Laut	Kewenangan Pusat / Provinsi				
15	Ekosistem Darat	1				1
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	21	12	1	8	
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	6	2	6	
Total		184	88	40	44	12
Persentase (%)		100	47,83	21,74	23,91	6,52

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Keterangan: SS (Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional)
SB (Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)
NA (Tidak Ada Data)
BB (Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional)

Dari 184 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Garut didapatkan beberapa hasil diantaranya 47,83% Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS), 21,74% Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (SB), 23,91% Tidak Ada Data (N/A) dan 6,52% Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB). Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kabupaten Garut. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya, untuk capaian indikator TPB yang ada di Kabupaten Garut.

Adapun capaian target indikator SDGs/TPB berdasarkan 4 (empat) pilar meliputi pilar Ekonomi dengan jumlah 49 indikator, pilar hukum dan tata kelola berjumlah 21 indikator, pilar lingkungan berjumlah 27 indikator dan pilar sosial berjumlah 87 indikator yang kemudian diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73 Capaian TPB di Kabupaten Garut berdasarkan Pilar

PILAR	SS (Sudah Mencapai Target Nasional)	SB (Belum Mencapai Target Nasional)	NA (Tidak Ada Data)	BB (Belum dilaksanakan)	Total
Ekonomi	16	6	19	8	49
Hukum dan Tata Kelola	12	1	8		21
Lingkungan	14	8	3	2	27
Sosial	46	25	14	2	87
Total	88	40	44	12	184

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, yang dikelola dalam SIPD

2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yaitu pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan usia dini, capaian sampai tahun 2024 untuk ketiganya masih dibawah 100%, namun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.74 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	99,27	89,50	97,50	96,03	97,73
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	30,54	15,06	81,68	91,10	95,80
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	97,30	85,40	46,32	91,55	95,68

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

2. Kesehatan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan, terdapat 12 jenis pelayanan dasar dengan rincian capaian Tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.75 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100,00	100	95,58	95,99	90,49
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,05	94,6	94,00	91,81	89,31
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	104,00	100	99,30	94,76	93,43
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	84,96	66,3	92,00	90,33	95,5
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	66,78	46,7	82,99	97,06	99,95
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	64,08	42,2	113,95	98,61	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	66,79	58,9	78,89	98,86	97,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	25,70	35,71	91,99	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	53,25	39,66	89,10	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	84,00	68,7	84,66	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	45,19	82,74	124,33	98,57	101,58
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100	62,60	52,6	100	100	101,8

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
	tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan						

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Garut, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Capaian Pelayanan Dasar Kesehatan telah di targetkan mencapai 100 persen pada tahun 2024, namun hanya terdapat 6 pelayanan yang telah mencapai target yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia dan masih terdapat 6 pelayanan lain yang belum mampu mencapai target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar dan usia lanjut.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2024, meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan capaian SPM Pekerjaan umum capaian tahun 2024 belum mampu mencapai 100 persen karena capaian pelayanan dihitung secara akumulatif setiap tahunnya, namun secara pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum telah mencapai 100 persen.

Tabel 2.76 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	81,27	86,97	88,51	90,04	90,74
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,38	67,20	67,69	68,11	68,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut (2024), yang dikelola dalam SIPD

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut.

Tabel 2.77 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Garut (2025), yang dikelola dalam SIPD

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan realisasi capaian 100.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas yang mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100. Dari kelima jenis pelayanan dasar masih terdapat satu pelayanan dasar yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang belum mampu mencapai 100, hal ini disebabkan oleh beberapa akses jalan kejadian kebakaran memiliki akses jalan yang tidak memungkinkan masuk kendaraan unit pemadam kebakaran dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal dalam rangka pencegahan dini bahaya kebakaran.

Tabel 2.78 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian (%)	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian (%)	Perangkat Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	98,44	Dinas Pemadam Kebakaran

Sumber : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

6. Sosial

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100 sebagai berikut.

Tabel 2.79 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.7 Kerjasama Daerah

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Bahwa Kerja Sama Daerah merupakan Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan / atau antara Daerah dan Lembaga / Pemerintah di Luar Negeri, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Perjanjian kerja sama berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di dalam kerja sama termaktub hak dan kewajiban yang harus di laksanakan. Perjanjian kerja sama di lakukan antar negara, antar provinsi, antar daerah dan yayasan/lembaga serta perguruan tinggi.

Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerja-samakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib.

Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi serta kerja sama lainnya untuk mendukung akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Adapun kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Sepanjang periode tahun 2020 sampai tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melaksanakan kerjasama meliputi:

a. Kerja sama luar negeri dengan The W20 dan Sue Prefektur Fukuoka, Jepang
b. Kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Cimahi
c. Kerja sama dengan 23 institusi pendidikan tinggi
d. Kerja sama dengan lembaga keuangan yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Garut, PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Garut
e. Kerja sama dengan institusi pemerintah/kementerian/lembaga/ instansi vertikal sebanyak 32 lembaga
f. Lembaga swasta/yayasan sebanyak 11 lembaga

Melalui kolaborasi *stakeholder* pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 yang masih berlaku sampai akhir tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.80 Rekapitulasi Penyelenggaraan Kerja Sama Kabupaten Garut

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
Pemerintah Daerah				
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan Program *Layad Rawat*	15 Jul 2020	5 Tahun
		Sinergitas Program Intensifikasi, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kab. Garut	20 Mar 2020	5 Tahun
		Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya	27 Okt 2021	akhir masa kerja sama KPBU
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Jawa Barat	30 Jun 2022	3 tahun
		Komponen Pendanaan Bersama pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	21 Jun 2023	2 tahun
		Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2025	9 Ags 2023	2 Tahun
		Integrasi dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Dibayarkan oleh Pemerintah Daerah	9 Jul 2024	5 tahun
		Pengembangan Agribisnis Sapi Pasundan	25 Jul 2024	5 tahun
2	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Kerja Sama Urusan Pemerintahan	17 Sep 2020	5 Tahun
3	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Kerja Sama Urusan Pemerintahan	15 Nov 2021	5 tahun
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik	1 Des 2021	5 tahun
5	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Hibah Aplikasi e-Office dan e-SAKIP	11 Apr 2022	sampai selesainya pendampi-ngan implemen-tasi aplikasi
		Pemasaran Komoditas Padi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	12 Okt 2023	3 tahun
		Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah	2 Ags 2024	
6	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Perdagangan Barang Pokok antar Daerah	5 Apr 2023	3 tahun
7	Pemerintah Kota Bandung	Kerja Sama Daerah	30 Ags 2023	5 tahun
8	Pemerintah Kota Bogor	Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan pengembangan Potensi Daerah	29 Nov 2023	5 Tahun
		Fasilitasi Penyediaan Pasokan Pangan Strategis Komoditas Aneka Cabai dan Bawang Merah	11 Des 2024	5 tahun
9	Pemerintah Kota Cimahi	Kerja Sama antar Daerah	29 Nov 2023	5 Tahun

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
Institusi Pendidikan				
1	Universitas 'Aisyiyah Bandung	Kerja Sama Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat	24 Feb 2021	5 tahun
2	Universitas Garut	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	2 Mar 2021	5 tahun
3	Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung	Kerja Sama Pengembangan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Garut	5 Apr 2021	5 tahun
4	IKOPIN (Universitas Koperasi Indonesia)	Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	4 Okt 2021	5 tahun
5	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kab. Garut melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi terapan	26 Okt 2021	5 tahun
6	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	20 Jan 2022	3 tahun
		Tri Dharma Perguruan Tinggi (Fakultas Syariah dan Hukum)	20 Jan 2022	3 tahun
7	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia	24 Mei 2022	5 tahun
8	Universitas Terbuka	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan	11 Jul 2022	5 tahun
9	Universitas Padjadjaran	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat	29 Ags 2022	4 tahun
		Kajian dan Implementasi Pengembangan Domba Garut (Fakultas Peternakan)	27 Nov 2023	3 Tahun
10	Universitas Telkom	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Institusi	7 Nov 2022	5 Tahun
		Pelatihan, Penelitian dan pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat (Fakultas Komunikasi dan Bisnis)	7 Nov 2022	4 Tahun
11	Universitas Brawijaya	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Jan 2023	2 tahun
12	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV	Sinergitas Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Implementasi Tridarma serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka	3 Mar 2023	5 tahun
13	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan *Tridharma* Perguruan Tinggi	3 Apr 2023	5 tahun
14	Universitas Krisnadwipayana	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	28 Jul 2023	5 Tahun
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Pembangunan di Kabupaten Garut	28 Jul 2023	5 Tahun
16	Universitas Al-Ghifari	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah	11 Sep 23	5 tahun
17	Universitas Sali Al-Aitaam	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	16 Okt 2023	5 tahun
18	Universitas Muhammadiyah Bandung	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Kelembagaan	18 Des 2023	5 Tahun

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
19	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Sinergi Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi	28 Mar 2024	5 tahun
20	Universitas Langlangbuana	Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi	8 Mei 2024	5 tahun
21	Universitas Siliwangi	Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi	17 Mei 2024	3 tahun
22	Universitas Pancasila	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	27 Ags 2024	2 tahun
23	Institut Teknologi Garut	Tri Dharma Perguruan Tinggi	4 Sep 2024	5 tahun
Lembaga Keuangan/ Perbankan				
1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Garut	Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	10 Feb 2023	5 tahun
		Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet	13 Feb 2023	5 tahun
		Pengelolaan dan Penyaluran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	18 Jul 2023 & 31 Okt 2023	5 tahun
2	PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garut	Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan pada PT. LKM Garut	21 Feb 2023	5 tahun
3	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	17 Nov 2023	3 Tahun
4	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Garut	Pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Garut	19 Jan 2024	5 tahun
Institusi Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Instansi Vertikal				
1	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Garut	Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah	18 Jun 2020	5 Tahun
2	Ditjen Pajak	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Garut	26 Ags 2020	5 Tahun
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Garut	Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Garut	23 Nov 2020	5 Tahun
4	Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR	Penataan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit Kabupaten Garut	11 Nov 2020	5 Tahun
5		Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut	18 Ags 2021	5 tahun

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
	BPJS Ketenagakerjaan Cab. Tasikmalaya	Sinergi Penyelenggaraan program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut	20 Nov 2023	3 Tahun
		Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Garut	23 Des 2024	31 Mei 2025
6	PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan Garut	Kelistrikan di Wilayah Kabupaten Garut	29 Nov 2021	5 tahun
7	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut	Pengelolaan Zakat di Kabupaten Garut	17 Jan 2022	3 tahun
8	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, dan BJB Cabang Garut	Optimalisasi Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	17 Jan 2022	3 tahun
9	Kantor Cabang Dinas (KSD) 11 Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama Kab. Garut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut dan Kepolisian Resor Garut	Lingkungan Pendidikan Ramah Anak	15 Feb 2022	3 tahun
10	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	30 Mar 2022	5 tahun
11	TNI AU cq. Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara	Kerja Sama Perjanjian Pinjam Pakai Aset Tanah	27 Mei 2022	5 tahun
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD, Bank BJB Garut, Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG), BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Kepolisian Resor Garut	Pemulihan Ekonomi Profesi Pangkas Rambut di Kabupaten Garut	22 Jun 2022	3 tahun
13	TNI AU cq. Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara	Penggunaan Aset TNI AU Guna Pembangunan Pos Tiket di Lingkungan Lanud Husein Sastranegara	27 Jun 2022	5 tahun
14	Perum Bulog Kantor Cabang	Stabilisasi Ketahanan Pangan Daerah	21 Okt 2022	5 Tahun

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
	Ciamis Jawa Barat			
15	Kementerian Keuangan	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Instansi Pemerintah Daerah	24 Okt 2022	5 Tahun
16	Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut	Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut	13 Mar 2023	2 tahun
17	Dewan Pendidikan Kab. Garut	Informasi dan Solusi Pendidikan di Kab. Garut melalui Media Sosial dan Radio Siaran Pemerintah Daerah	23 Ags 2023	31 Desember 2024
18	Kepolisian Resor Garut	Sinergi dan Percepatan Program Kampung Bebas Narkoba melalui Program Presisi Polri di Wilayah Kab. Garut Jawa Barat	5 Sep 2023	2 Tahun
19	Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penggiat Angklung Indonesia	Penyelenggaraan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Angklung di Kabupaten Garut	11 Sep 2023	5 tahun
20	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut	27 Sep 2023	4 tahun
21	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas Berupa Pembangunan Jalan Lingkar Garut (Ruas Jalan Lingkar Cipanas) di Cagar Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	2 Nov 2023	10 tahun
22	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut	Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut	16 Nov 2023	3 tahun
23	PT. PLN (Persero)	Pemungutan dan Penyetoran Pajak barang dan jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	5 Jan 2024	5 tahun
24	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Tasikmalaya	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	22 Jan 2024	s.d. 31 Des 2028
		Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	22 Januari 2024	s.d. 31 Des 2024
		Addendum Rencana Kerja tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatanan Nasional bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	7 Februari 2024	s.d. 31 Des 2024
		Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kab. Garut	19 Agustus 2024	s.d. 31 Ags 2026

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
		Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut	4 Desember 2024	s.d. 31 Des 2025
25	Pengadilan Negeri Garut Kelas IB	Pelayanan Terpadu Sidang Keliling bagi Masyarakat kabupaten Garut	26 Feb 2024	31 Des 2024
26	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	Jejaring Pengampuan Pelayanan Rujukan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian	4 Apr 2024	5 Tahun
27	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi	14 Mei 2024	2 tahun
28	PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Tasikmalaya	Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Garut	1 Jul 2024	12 Bulan
29	Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Eksplorasi Penggunaan Platform Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PADI UMKM)	26 Jul 2024	1 tahun
30	Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah serta Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Tanah yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	8 Ags 2024	5 tahun
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Program Bantuan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Produksi Melalui Dana Tugas Pembantuan	27 Sep 2024	2 tahun
32	Kejaksaan Negeri Garut	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	30 Okt 2024	2 tahun
Yayasan/Lembaga Swasta Lainnya				
1	IKA UNPAD	Pengembangan dan Pembinaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut	11 Jan 2021	5 tahun
2	Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgers) Indonesia	Implementasi Program *Power To You(th)* di Kabupaten Garut	8 Des 2022	3 Tahun
3	Yayasan SEMAK (Sekretariat Masyarakat Anak)	Pelaksanaan Program Pencegahan Perkawinan Anak, Kehamilan Remaja, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Program *Power To You(th)*	12 Des 2022	3 Tahun
4	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Program Peningkatan Derajat Kehidupan Perempuan dan Anak	28 Jan 2023	3 tahun
5	PT. Superintending Company of Indonesia	Kerja Sama Pengembangan dan Penguatan Ekonomi di Wilayah Kabupaten Garut	24 Jul 2023	3 Tahun
6	PT. Panji Dadel Nusantara	Pengelolaan Sampah dan Pengolahan Air Bersih di Kabupaten Garut	4 Des 2023	2 Tahun
7	Mercy Corps Indonesia	Kerja Sama dalam Pemberdayaan dan pengembangan usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Garut.	12 Des 2023	3 Tahun
8	Grab Indonesia	Kolaborasi dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Garut	17 Feb 2024	3 tahun

No	Lembaga/ Institusi	Perihal	Tanggal Penanda-tanganan	Jangka Waktu
9	Yayasan Bakti Barito	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup melalui Pendidikan	4 Jul 2024	2 tahun
		Penguatan Kurikulum, Sistem, dan Kelembagaan pada Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Garut	8 Jul 2024	2 tahun
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan di Kabupaten Garut	8 Jul 2024	2 tahun
		Pemanfaatan Sampah Plastik sebagai Bahan Campuran *Hotmix* pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Garut	10 Juli 2024	2 tahun
10	CV. Santosa Global Creative (PT. Grab Teknologi Indonesia)	*Branding* Gapura Sentra Industri Kulit Sukaregang Garut	20 Sep 2024	1 tahun
11	Yayasan Bhakti Tanoto	Kolaborasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Garut	26 Sep 2024	30 Juni 2025
Kerjasama Luar Negeri				
1	*The W20*	*The W20 to collaborate and provide support for the achievement of W20 concrete deliverables*	20 Jul 2022	
2	Pemkot Sue Prefektur Fukuoka, Jepang	Pengembangan Hubungan Kerja Sama Kota Kembar antara Pemkab Garut, Prov. Jawa Barat, Indonesia dengan Pemkot Sue Prefektur Fukuoka, Jepang	22 Apr 2024	
		Pertukaran Personel antara Kabupaten Garut (Indonesia) dengan Kota Sue (Jepang)	22 Apr 2024	31 Mar 2025

Sumber: Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah, 2025

2.1.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD adalah salah satu instrumen yang memainkan peran strategis dalam pembangunan daerah. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan bisnis yang memiliki dampak langsung pada pembangunan daerah. BUMD menjadi aktor penting yang menjembatani antara kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Garut memiliki 4 BUMD yaitu sebagai berikut:

1. PDAM TIRTA INTAN, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
2. PT BPR Intan Jabar, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas;
3. PD. BPR Garut, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
4. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, diperlukan upaya menciptakan iklim usaha yang nyata,

dinamis, dan bertanggung jawab yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah untuk memperkuat perekonomian sekaligus mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan BUMD. Adapun tujuan dilakukan penyertaan modal adalah untuk:

a. Meningkatkan pendapatan daerah;
b. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; dan
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Garut telah melaksanakan strategi penyertaan modal yang berbeda-beda untuk setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Pemenuhan penyertaan modal pada BUMD sampai dengan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

a. Perumda Air Minum Tirta Intan sebesar Rp97.503.180.650,00
b. Perumda BPR Garut sebesar Rp46.059.376.540,00
c. PT. LKM Garut sebesar Rp15.400.000.000,00
d. PT. BPR Intan Jabar sebesar Rp34.320.000.000,00
e. Bank BJB sebesar Rp12.591.674.120,00

Adapun realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada BUMD secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah mencapai Rp 65,3 Milyar dimana dalam pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah terkait dengan pendirian masing-masing BUMD dan Perda terkait Penyertaan Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah. Adapun pendapatan yang diterima (dividen) dari BUMD dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 21,3 Milyar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.81 Penyertaan Modal dan Dividen Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi (Ribu Rupiah)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyertaan Modal	13.913.000	11.150.000	14.780.400	12.500.000	12.969.645	65.313.045
1. PDAM TIRTA INTAN	7.913.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	-	22.413.000
2. PT BPR Intan Jabar	1.500.000	1.500.000	6.780.400	5.000.000	9.469.645	24.250.045
3. PD. BPR Garut	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.750.000	13.750.000
4. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	1.500.000	1.650.000	-	-	1.750.000	4.900.000
Dividen	4.580.039,28	3.930.718,96	3.992.302,28	4.116.879,3	4.662.387,96	21.282.327,78
1. PDAM TIRTA INTAN	-	-	-	-	-	
2. PT BPR Intan Jabar	968.113,47	569.015,15	-	-	-	1.537.128,62
3. PD. BPR Garut	3.350.691,53	3.221.633,22	3.812.821,84	4.116.879,3	4.662.387,96	19.164.413,85
4. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	261.234,283	140.070,59	179.480,44	-	-	580.785,31

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, 2025

Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut menunjukkan bahwa penyertaan modal ke BUMD digunakan untuk operasional dan pengembangan usaha. Keuntungan yang dihasilkan akan berkontribusi pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan BUMD harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyertaan modal yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendirian BUMD, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2.2 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.2.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Perhitungan proyeksi penduduk dalam penyusunan dokumen perencanaan memegang peranan penting bagi Pemerintah dalam membuat rencana pembangunan tahunan, 5 tahunan maupun 20 tahunan. Berikut merupakan proyeksi penduduk sampai tahun 2030 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sehingga dapat teridentifikasi kepadatan penduduk, sex ratio, penduduk usia sekolah, penduduk produktif, *dependency ratio* serta bonus demografi tahun 2025-2030.

A. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk yang digunakan yaitu Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2035. Adapun hasil proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.82 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

No	Keterangan	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.716.950	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	874,44	884,67	894,65	904,42	913,94	923,23	932,23

Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS

Jumlah penduduk Kabupaten Garut diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 2.896.490 jiwa pada tahun 2030. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2030 sekitar 1,7 persen setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, kepadatan penduduk juga diproyeksikan naik mencapai 932,23 jiwa/Km^2 di tahun 2030. Keterbatasan ruang dapat menjadi kendala apabila tidak disikapi dengan benar. Untuk itu, perlu adanya pengendalian dan inovasi pemanfaatan lahan khususnya pada wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik padat penduduk.

B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin dijelaskan pada tabel serta gambar proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Garut berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2030. Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2030 diproyeksikan akan didominasi oleh penduduk laki-laki sejumlah 1.474.709 jiwa. Adapun besaran *sex ratio* diproyeksikan mengalami penurunan dari 104,57 pada tahun 2024 menjadi 103,72 pada tahun 2030, dimana terdapat 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Penurunan tersebut menunjukan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.83 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

No	Penduduk	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laki-laki (Jiwa)	1.388.850	1.404.181	1.419.100	1.433.640	1.447.750	1.461.460	1.474.709
2	Perempuan (Jiwa)	1.328.100	1.344.518	1.360.620	1.376.430	1.391.900	1.407.050	1.421.781
3	*Sex Ratio* (%)	104,57	104,44	104,3	104,16	104,01	103,87	103,72

Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS, yang dikelola dalam SIPD

C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah serta struktur penduduk Kabupaten Garut Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.84 Proyeksi Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030

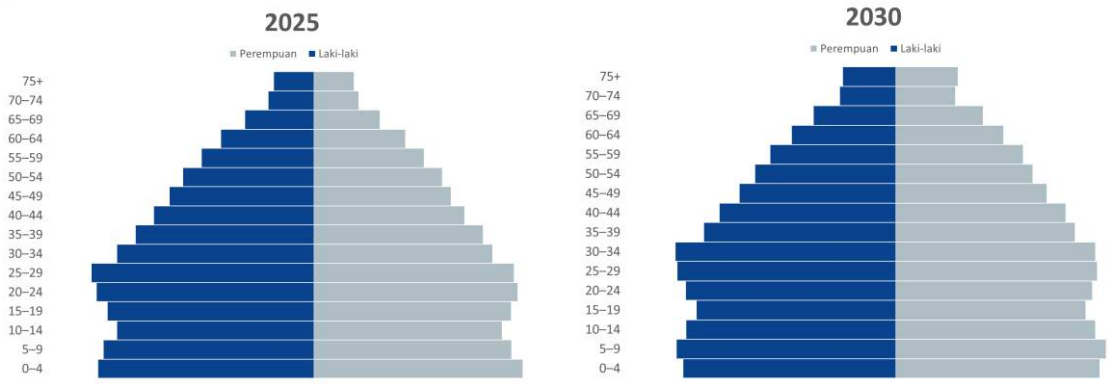
Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-laki	0-4	125.624	126.489	125.520	124.560	123.580	122.590	121.611
	5-9	119.364	120.212	122.240	123.580	124.300	124.710	125.594
	10-14	115.144	114.374	114.480	115.520	117.260	119.110	119.988
	15-19	123.711	121.939	120.030	118.030	116.140	114.690	113.945
	20-24	129.206	127.729	126.320	124.910	123.460	121.910	120.201
	25-29	126.776	128.630	129.300	128.980	127.940	126.560	125.162
	30-34	109.346	111.525	114.430	117.880	121.370	124.280	126.159
	35-39	100.432	102.191	103.630	104.820	106.030	107.610	109.793
	40-44	89.615	91.232	93.070	95.100	97.180	99.160	100.930
	45-49	81.722	82.858	84.030	85.220	86.490	87.910	89.520
	50-54	73.408	74.882	76.180	77.360	78.460	79.560	80.686
	55-59	62.310	63.809	65.440	67.140	68.850	70.470	71.909
	60-64	50.936	52.648	54.170	55.530	56.830	58.150	59.589
	65-69	36.734	38.422	40.190	42.010	43.820	45.540	47.104
	70-74	23.807	25.311	26.570	27.860	29.200	30.580	32.039
	75+	20.715	21.930	23.500	25.140	26.840	28.630	30.479

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah	1.388.850	1.404.181	1.419.100	1.433.640	1.447.750	1.461.460	1.474.709
Perempuan	0-4	120.236	121.413	120.490	119.570	118.620	117.670	116.722
	5-9	114.423	114.824	116.720	117.990	118.750	119.300	120.484
	10-14	109.911	109.438	109.670	110.690	112.250	113.800	114.221
	15-19	116.034	114.606	113.150	111.660	110.280	109.260	108.805
	20-24	119.248	118.413	117.480	116.380	115.170	113.880	112.515
	25-29	115.015	116.414	117.070	117.150	116.770	116.120	115.373
	30-34	102.614	103.910	105.830	108.220	110.720	112.850	114.286
	35-39	96.709	98.263	99.340	100.000	100.540	101.350	102.667
	40-44	85.896	87.611	89.530	91.630	93.750	95.660	97.219
	45-49	78.898	79.681	80.690	81.880	83.250	84.810	86.528
	50-54	73.303	74.701	75.720	76.440	77.010	77.620	78.419
	55-59	62.437	64.128	65.980	67.930	69.860	71.570	72.969
	60-64	51.099	53.320	55.250	56.940	58.490	60.050	61.714
	65-69	36.375	38.386	40.620	43.030	45.500	47.850	49.982
	70-74	24.025	26.054	27.610	29.130	30.680	32.370	34.237
	75+	21.877	23.356	25.470	27.790	30.260	32.890	35.640
	Jumlah	1.328.100	1.344.518	1.360.620	1.376.430	1.391.900	1.407.050	1.421.781
Laki laki + Perempuan	0-4	245.860	247.902	246.010	244.130	242.200	240.260	238.333
	5-9	233.787	235.036	238.960	241.570	243.050	244.010	246.078
	10-14	225.055	223.812	224.150	226.210	229.510	232.910	234.209
	15-19	239.745	236.545	233.180	229.690	226.420	223.950	222.750
	20-24	248.454	246.142	243.800	241.290	238.630	235.790	232.716
	25-29	241.791	245.044	246.370	246.130	244.710	242.680	240.535
	30-34	211.960	215.435	220.260	226.100	232.090	237.130	240.445
	35-39	197.141	200.454	202.970	204.820	206.570	208.960	212.460
	40-44	175.511	178.843	182.600	186.730	190.930	194.820	198.149
	45-49	160.620	162.539	164.720	167.100	169.740	172.720	176.048
	50-54	146.711	149.583	151.900	153.800	155.470	157.180	159.105
	55-59	124.747	127.937	131.420	135.070	138.710	142.040	144.878
	60-64	102.035	105.968	109.420	112.470	115.320	118.200	121.303
	65-69	73.109	76.808	80.810	85.040	89.320	93.390	97.086
	70-74	47.832	51.365	54.180	56.990	59.880	62.950	66.276
	75+	42.592	45.286	48.970	52.930	57.100	61.520	66.119
	Jumlah	2.716.950	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490

Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, struktur penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan pada penduduk yang berusia diatas 64 tahun (lanjut usia). Jumlah penduduk yang berusia diatas 64 tahun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 163.533 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia diatas 64 tahun pada tahun 2030 yaitu mengalami peningkatan signifikan menjadi sebanyak 229.481 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Garut mulai memasuki fase struktur umur penduduk menua sebagaimana terlihat pada gambar dibawah. Hal ini ditandai dengan proporsi penduduk berusia diatas 64 tahun sudah

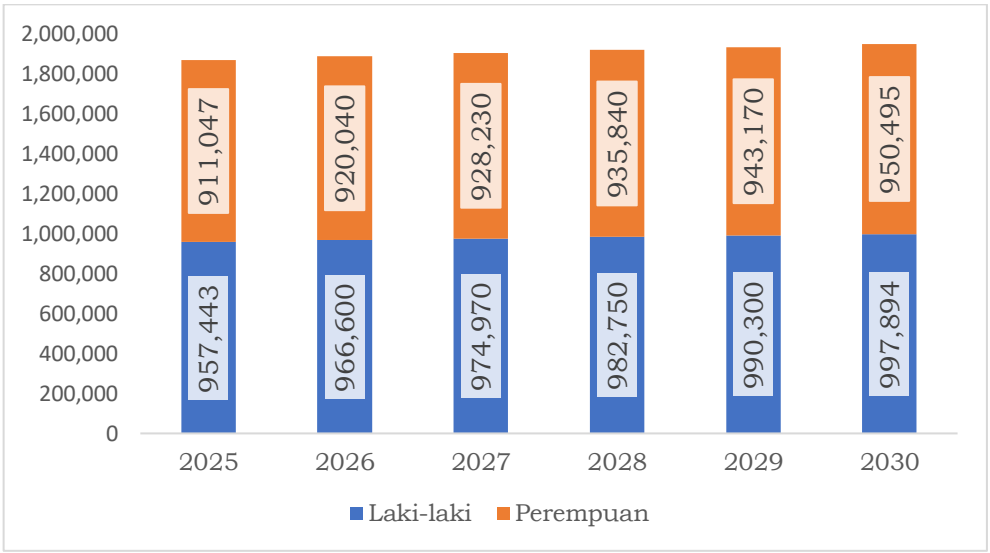
mencapai 7,9 persen dari total penduduk (2.896.490 jiwa) akibat peningkatan harapan hidup atau penurunan angka kelahiran.



Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045

Gambar 2.104 Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

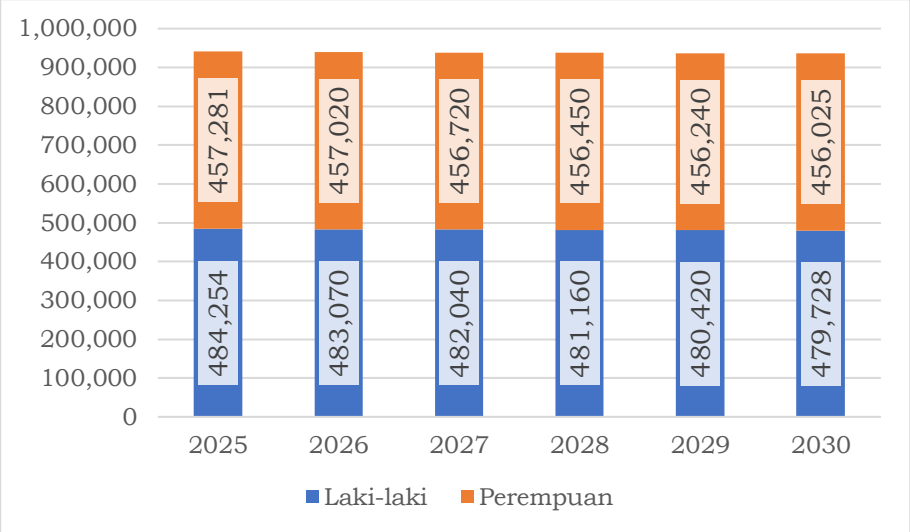
Jika merujuk pada tren penduduk usia 0-4 Tahun, penduduk pada umur tersebut mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2025 mencapai 126.489 jiwa sedangkan pada tahun 2030 sebanyak 121.611 jiwa yang berarti bahwa angka kelahiran cenderung menurun di Kabupaten Garut pada jangka waktu 2025-2030. Peningkatan jumlah penduduk pada kelompok ini akan meningkatkan rasio ketergantungan dan beban ekonomi serta sosial terhadap usia produktif. Tentunya kebijakan daerah untuk menghadapi perubahan struktur ini perlu dipersiapkan termasuk pelayanan kesehatan lansia dan ketahanan ekonomi masyarakat.



Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045

Gambar 2.105 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2025-2030. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 997.894 jiwa pada tahun 2030. Peningkatan jumlah penduduk produktif dapat menjadi tantangan bagi Kabupaten Garut, hal tersebut perlu diiringi dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan akses pelatihan untuk pengembangan kompetensi penduduk.



Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045

Gambar 2.106 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Jumlah penduduk usia sekolah (5-24 tahun) di Kabupaten Garut pada tahun 2025-2030 mengalami penurunan. Pada tahun 2025 jumlah penduduk usia sekolah terdiri dari 484.254 penduduk laki-laki dan 457.281 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia sekolah pada tahun 2030 berkurang jumlahnya menjadi 479.728 penduduk laki-laki dan 456.025 penduduk perempuan. Namun jika merujuk pada data per kelompok umur penduduk usia sekolah usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun atau usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih mengalami tren peningkatan, berbeda dengan penduduk usia sekolah 15-19 tahun setara sekolah menengah atas dan 20-24 tahun setara sekolah tinggi yang mengalami tren penurunan. Perbedaaan tren per kelompok umur penduduk usia sekolah memerlukan kebijakan pemerintah yang berbeda, peningkatan kapasitas mutu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) perlu diarahkan kepada pemerataan tenaga pendidik dan jumlah ruang kelas, sedangkan untuk penduduk usia 15-24 menyiapkan beasiswa afirmatif dan peningkatan akses sekolah menengah atas (SMA) serta menekan angka *dropout*.

D. Proyeksi Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan diproyeksikan menggunakan proyeksi penduduk Kabupaten Garut tahun 2025-2030 berdasarkan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 yang dikalikan

dengan besaran distribusi penduduk per kecamatan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Garut Tahun 2024-2030.

Tabel 2.85 Proyeksi Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	2025	2030
1	Banjarwangi	58.541	58.214
2	Banyuresmi	94.821	97.312
3	Bayongbong	109.112	114.400
4	Balubur Limbangan	81.353	82.831
5	Bungbulang	55.243	51.552
6	Caringin	33.806	35.044
7	Cibalong	48.647	52.421
8	Cibatu	84.102	94.706
9	Cibiuk	41.776	49.815
10	Cigedug	49.197	55.028
11	Cihurip	19.514	20.273
12	Cikajang	82.728	80.514
13	Cikelet	45.349	45.470
14	Cilawu	116.533	123.957
15	Cisewu	35.180	36.782
16	Cisompet	59.916	66.902
17	Cisurupan	94.821	90.072
18	Garut Kota	131.375	133.225
19	Kadungora	97.569	101.367
20	Karangpawitan	154.461	172.903
21	Karangtengah	23.636	29.831
22	Kersamanah	43.425	47.787
23	Leles	90.973	97.892
24	Leuwigoong	59.641	75.301
25	Malangbong	137.146	142.783
26	Mekarmukti	21.438	25.197
27	Pakenjeng	67.611	66.033
28	Pameungpeuk	46.448	50.104
29	Pamulihan	20.338	22.011
30	Pangatikan	45.899	49.235
31	Pasirwangi	66.237	66.323
32	Peundeuy	26.660	29.831
33	Samarang	83.002	87.755
34	Selaawi	51.121	61.399

No	Kecamatan	2025	2030
35	Singajaya	48.922	49.815
36	Sucinaraja	35.730	42.864
37	Sukaresmi	39.577	38.519
38	Sukawening	68.436	82.831
39	Talegong	26.385	23.749
40	Tarogong Kaler	100.867	104.553
41	Tarogong Kidul	98.119	82.252
42	Wanaraja	53.045	57.634
Kabupaten Garut		2.748.699	2.896.490

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil proyeksi, mayoritas penduduk menempati Kawasan Perkotaan Garut yang terdiri dari Kecamatan Garut Kota, Karangpawitan, Cilawu, Bayongbong, Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Karangpawitan dengan jumlah 172.903 jiwa pada tahun 2030. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Cihurip dengan jumlah 20.273 jiwa pada tahun 2030.

2.2.2 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Garut tahun 2025-2030 dijelaskan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.86 Proyeksi *Dependency Ratio* dan Bonus Demografi Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Komposisi Umur (%)	2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–14	704.690	706.750	709.120	711.910	714.760	717.180	718.620
15–64	1.848.740	1.868.490	1.886.640	1.903.200	1.918.590	1.933.470	1.948.389
65+	163.550	173.459	183.960	194.960	206.300	217.860	229.481
Dependency Ratio (%)	46,96	47,11	47,34	47,65	48,01	48,36	48,66

Sumber: Hasil Pengolahan Data Long Form SP 2020, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Garut rentang tahun 2025-2030 menunjukan tren yang meningkat. Pada tahun 2024 berada pada nilai 46,96% sedangkan pada tahun 2030 mencapai 48,66%. Hal tersebut menunjukan terdapat 48 penduduk usia non-produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Tentunya kebijakan pemerintah daerah perlu direncanakan diantaranya peningkatan produktivitas penduduk usia produktif, perlindungan sosial

kelompok non-produktif dan mengurangi ketergantungan melalui peningkatan partisipasi ekonomi.

2.2.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

A. Proyeksi Kebutuhan Hunian

Proyeksi kebutuhan hunian di Kabupaten Garut dianalisis untuk mengetahui seberapa besar jumlah rumah yang perlu disediakan hingga akhir tahun perencanaan. Apabila terdapat gap/kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan (*backlog)* maka kebijakan dalam pemenuhan perumahan/permukiman menjadi salah satu *concern* pemerintah. Analisis kebutuhan hunian menggunakan jumlah rumah tahun 2022 dan kebutuhan tahun 2022 sebagai dasar perhitungan. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87 *Backlog* Kabupaten Garut Tahun 2023-2030

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (2022)	*Backlog* 2022	*Backlog* (Unit)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cisewu	12.410	1.278	1.567	1.675	1.784	1.893	2.001	2.110
2	Caringin	11.011	1.043	1.628	1.845	2.062	2.278	2.495	2.712
3	Talegong	10.538	1.451	2.511	2.611	2.711	2.812	2.912	3.012
4	Bungbulang	21.279	0	0	-205	-185	-166	-146	-127
5	Mekarmukti	5.878	981	1.631	1.835	2.040	2.244	2.449	2.653
6	Pamulihan	5.391	1.645	1.995	2.112	2.228	2.345	2.462	2.578
7	Pakenjeng	22.929	1.860	2.325	2.575	2.825	3.076	3.326	3.576
8	Cikelet	12.814	3.148	3.533	3.715	3.897	4.079	4.261	4.442
9	Pameungpeuk	12.226	3.512	4.251	4.507	4.763	5.019	5.274	5.530
10	Cibalong	14.526	2.614	3.486	3.785	4.085	4.385	4.685	4.985
11	Cisompet	16.494	2.671	3.889	4.270	4.650	5.031	5.411	5.792
12	Peundeuy	6.947	1.366	1.974	2.168	2.362	2.556	2.749	2.943
13	Singajaya	15.092	1.942	2.512	2.739	2.965	3.192	3.418	3.645
14	Cihurip	6.163	1.018	1.203	1.276	1.349	1.422	1.495	1.568
15	Cikajang	23.005	6.819	7.058	7.271	7.483	7.696	7.908	8.120
16	Banjarwangi	17.238	3.214	4.158	4.531	4.904	5.276	5.649	6.022
17	Cilawu	31.359	7.692	9.098	9.597	10.097	10.596	11.095	11.594
18	Bayongbong	29.119	4.769	6.244	6.794	7.344	7.894	8.444	8.994
19	Cigedug	12.107	2.356	3.585	3.989	4.393	4.797	5.201	5.605
20	Cisurupan	29.568	5.779	5.964	6.205	6.446	6.687	6.928	7.169
21	Sukaresmi	11.307	2.417	2.574	2.685	2.795	2.906	3.016	3.127
22	Samarang	20.276	6.324	7.536	7.970	8.404	8.837	9.271	9.705
23	Pasirwangi	21.852	1.496	2.302	2.637	2.971	3.306	3.640	3.975
24	Tarogong Kidul	27.340	10.232	17.433	18.080	18.727	19.374	20.021	20.668
25	Tarogong Kaler	25.144	7.951	9.060	9.512	9.963	10.415	10.866	11.317
26	Garut Kota	30.587	14.626	14.583	14.654	14.725	14.796	14.867	14.938
27	Karangpawitan	35.296	11.339	14.952	16.148	17.345	18.541	19.737	20.933

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (2022)	*Backlog* 2022	*Backlog* (Unit)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Wanaraja	12.831	4.834	5.940	6.315	6.690	7.064	7.439	7.814
29	Sucinaraja	8.452	2.323	3.389	3.708	4.026	4.344	4.663	4.981
30	Pangatikan	10.493	4.048	4.804	5.065	5.326	5.586	5.847	6.108
31	Sukawening	14.412	5.190	7.099	7.668	8.236	8.805	9.374	9.942
32	Karangtengah	5.277	1.119	1.879	2.101	2.323	2.545	2.767	2.989
33	Banyuresmi	22.605	8.887	9.637	9.959	10.281	10.603	10.925	11.247
34	Leles	23.316	6.097	7.808	8.398	8.987	9.577	10.166	10.755
35	Leuwigoong	12.190	4.490	6.465	7.037	7.609	8.181	8.753	9.325
36	Cibatu	17.806	8.467	10.047	10.541	11.034	11.527	12.021	12.514
37	Kersamanah	9.880	3.258	3.963	4.190	4.417	4.644	4.871	5.098
38	Cibiuk	8.058	3.288	4.357	4.683	5.008	5.333	5.659	5.984
39	Kadungora	23.865	9.540	10.108	10.349	10.591	10.832	11.073	11.315
40	Balubur Limbangan	21.655	6.669	7.448	7.764	8.080	8.396	8.712	9.029
41	Selaawi	11.218	4.032	5.428	5.842	6.255	6.669	7.082	7.496
42	Malangbong	34.633	9.064	10.961	11.673	12.384	13.096	13.808	14.520
Total *Backlog*		724.587	190.740	236.163	250.271	264.379	278.487	292.595	306.703

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2022 jumlah rumah terbangun di Kabupaten Garut sebanyak 724.587 unit. Jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hunian di Kabupaten Garut yaitu sebanyak 915.327 unit, sehingga pada tahun 2022 terdapat *backlog* rumah/hunian sebesar 190.740 unit. Apabila tidak ada peningkatan jumlah rumah maka *backlog* yang terjadi hingga tahun 2030 sejumlah 306.703 unit. Permasalahan *backlog* perumahan ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan ketersediaan hunian, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas permukiman, salah satunya dengan masih adanya kawasan kumuh.

Luas kawasan kumuh perkotaan Garut pada tahun 2022 tercatat 88,08 Ha, dengan pembagian 15,82 Ha kewenangan pusat, 40,84 Ha kewenangan provinsi dan 40,24 Ha kewenangan kabupaten. Hingga tahun 2024, telah dilakukan pengurangan seluas 8,71 Ha (21,65%), sehingga menyisakan 31,53 Ha kawasan kumuh di kewenangan kabupaten. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Garut digambarkan melalui proyeksi pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Garut tahun 2025–2030 sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Tabel 2.88 Proyeksi Pengurangan Kawasan Kumuh 2025-2030

Proyeksi	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Penanganan Kumuh (%)	47,4	74,71	91,92	100	5	10

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman (2025), yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan proyeksi penanganan, kawasan kumuh akan ditangani secara bertahap hingga seluruh sisa kumuh dapat diselesaikan pada tahun

2028 (100%). Adapun pada tahun 2029–2030, penanganan diarahkan untuk lokasi baru sesuai SK penetapan kawasan kumuh. Dengan demikian, penanganan *backlog* perumahan dan penghapusan kawasan kumuh menjadi dua aspek yang saling terkait dalam perencanaan proyeksi kebutuhan hunian di Kabupaten Garut. Upaya penyediaan hunian baru harus diiringi dengan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, agar kebutuhan tempat tinggal masyarakat terpenuhi sekaligus tercipta kawasan yang layak huni dan berkelanjutan.

B. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

1) Air Minum

Perhitungan kebutuhan air tahun 2025-2045 berdasarkan proyeksi pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 yang mengacu pada SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya–Bagian 1: Sumber Daya Air Spasial dan Peraturan Bupati Garut Nomor 261 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2042. Kebutuhan air untuk kepentingan domestik dihitung melalui pendekatan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan dengan asumsi proporsi penduduk pada tahun 2023 yaitu 41,83% penduduk pedesaan dan 58,17% penduduk perkotaan.

Asumsi kebutuhan air berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 untuk penduduk perkotaan 120L/hari/kapita, sedangkan penduduk pedesaan 60L/hari/kapita. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.89 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m3/tahun)	76.640.215	77.505.154	78.351.383	79.176.422	80.538.476	80.760.977
Perdesaan (liter/per orang)	68.986.848	69.765.413	70.527.137	71.269.787	72.495.824	72.696.106
Perkotaan (liter/per orang)	143.902.639	145.526.681	147.115.595	148.664.720	151.222.164	151.639.941

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2025 kebutuhan air di Kabupaten Garut sejumlah 76.640.215 m^3/tahun dan pada tahun 2030 sejumlah 80.760.977 m^3/tahun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan air penduduk perdesaan dan penduduk perkotaan. Adapun kebutuhan air penduduk pada tahun 2025 yaitu penduduk perdesaan 68.986.848 liter/orang dan penduduk perkotaan 143.902.639 liter/orang. Sedangkan kebutuhan air penduduk pada tahun 2030 yaitu penduduk perdesaan 72.696.106 liter/orang dan penduduk perkotaan 151.639.941 liter/orang. Kebutuhan Air berdasarkan perhitungan dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Garut Tahun 2022-2042, disajikan dalam 2 klasifikasi yaitu kebutuhan air SPAM jaringan perpipaan

perkotaan (domestik dan non domestik) serta kebutuhan air SPAM jaringan perpipaan sistem perdesaan yang ditentukan sebesar 60 liter/orang/hari.

Tabel 2.90 Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan

ZONA	Cabang/Unit/Sistem	Q RATA-RATA (L/DET)			
		2020	2022	2027	2032
UTARA	CAB 5 BANYURESMI_LEUWIGOONG_CIBIUK	48	50	112	143
	KADUNGORA (CIKEMBULAN)	3	4	9	14
	KARANGTENGAH	-	-	5	10
	LELES (MA SUKAHEJO)	15	17	20	27
	LELES-LEUWIGOONG (MA CIBUYUT)	5	7	20	34
	KERSAMANAH-MALANGBONG (MA CIBUYUT)	-	-	9	21
	MALANGBONG (LEUWI MONYET)	-	-	7	15
TENGAH	BAYONGBONG	18	19	24	37
	CAB 1 GARUT KOTA	135	158	175	192
	CAB 2 TAROGONG KIDUL	96	102	145	178
	CAB 3 TAROGONG KALER	67	72	87	108
	CAB 4 SAMARANG	31	39	74	99
	CAB 6 KARANGPAWITAN	51	59	91	127
	CAB 7 CILAWU	92	94	141	149
	CIBUNAR	8	8	11	14
	CIKAJANG	13	15	36	50
	CISURUPAN	21	34	44	57
	PASIRWANGI	8		13	17
	WANARAJA, PANGATIKAN, CIBATU	39	40	116	131
SELATAN	BANJARWANGI	2	4	7	10
	BANJARWANGI-SINGAJAYA	-	-	14	27
	BUNGBULANG	-	-	7	15
	CIBALONG	18	5	31	35
	CISEWU	2	4	7	10
	MEKARMUKTI	-	-	3	7
	PAMEUNGPEUK	18	21	62	79
	RANCABUAYA	-	-	14	33
JUMLAH		690	761	1.283	1.639

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Garut Tahun 2022-2042

Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Perkotaan dibagi kedalam 3 zona yaitu utara, tengah dan selatan dengan total kebutuhan sejumlah 1.639 l/det pada tahun 2032. Adapun Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Sistem Perdesaan sejumlah 617,50 l/det pada tahun 2032.

Tabel 2.91 Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Sistem Perdesaan

ZONA	KECAMATAN	Q RATA-RATA (L/DET)			
		2020	2022	2027	2032
UTARA	Blubur Limbangan	-	0,30	1,07	1,86
	Cibiuk	5,09	6,09	8,80	11,85
	Cibatu	4,32	5,81	9,72	13,95
	Kadungora	18,98	20,17	23,26	26,53
	Karangtengah	3,39	3,60	4,16	4,77
	Kersamanah	3,14	3,84	5,68	7,67
	Leles	11,98	12,69	14,55	16,57
	Leuwigoong	5,92	6,56	8,29	10,19
	Malangbong	21,76	22,17	31,27	41,13

ZONA	KECAMATAN	Q RATA-RATA (L/DET)			
		2020	2022	2027	2032
	Selaawi	16,59	17,37	19,44	21,70
	Sukawening	9,78	10,32	11,77	13,34
Jumlah Zona Utara		100,96	108,92	138,01	169,55
TENGAH	Banyuresmi	3,29	4,06	5,69	7,44
	Bayongbong	23,99	25,55	29,65	34,11
	Cempaka	7,98	8,81	11,05	13,54
	Cikajang	9,75	11,71	16,83	22,29
	Cilawu	16,94	17,66	19,52	21,49
	Cisurupan	13,11	15,37	21,15	27,13
	Garut Kota	4,37	4,84	6,02	7,20
	Karangpawitan	4,31	5,73	9,63	14,07
	Pangatikan	0,95	1,53	3,07	4,75
	Pasirwangi	12,71	20,37	25,00	29,83
	Samarang	23,38	24,24	26,47	28,85
	Sucinaraja	11,87	12,17	12,97	13,83
	Sukaresmi	15,64	16,88	19,30	21,87
	Tarogong Kaler	3,92	4,83	7,30	10,05
	Wanaraja	6,99	7,21	7,78	8,38
Jumlah Zona Tengah		159,21	180,95	221,42	264,83
SELATAN	Banjarwangi	10,86	11,86	14,43	17,07
	Bungbulang	15,63	16,42	19,54	22,58
	Caringin	2,77	2,85	3,03	3,23
	Cihurip	2,50	2,77	3,45	4,15
	Cibalong	11,73	12,47	14,42	16,51
	Cikelet	10,96	11,61	13,32	15,16
	Cisewu	9,45	9,99	11,34	12,71
	Cisompet	12,43	12,71	13,43	14,18
	Peundeuy	1,52	1,61	1,84	2,08
	Singajaya	4,47	4,82	5,73	6,68
	Pakenjeng	22,53	26,04	30,51	35,13
	Pameungpeuk	3,77	3,87	4,13	4,40
	Pamulihan	8,45	8,81	9,73	10,68
	Talegong	14,33	15,09	16,89	18,56
Jumlah Zona Selatan		131,41	140,91	161,78	183,12
Total Jumlah Kebutuhan Air SPAM Jaringan Perpipaan Pedesaan		391,58	430,78	521,20	617,50

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Garut Tahun 2022-2042

Adapun berdasarkan proyeksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berikut tabel proyeksi kebutuhan air bersih Tahun 2025-2030.

Tabel 2.92 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH/MINUM					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**TARGET LAYANAN AIR BERSIH/MINUM***	**Jiwa**	**2,851,877**	**2,908,915**	**2,967,093**	**3,026,435**	**3,086,963**	**3,148,703**	**3,211,677**
2	**RINCIAN KEBUTUHAN AIR BERSIH/MINUM**								
A	Kebutuhan Domestik (rata-rata per orang 100 ltr/detik)	Ltr/Detik	2,995	3,367	3,434	3,503	3,573	3,644	3,717
-	Pemakaian Rata-rata Air per Orang	Ltr/Hari	100	100	100	100	100	100	100
-	Kebutuhan Air	Ltr/Hari	258,779,319	290,891,454	296,709,283	302,643,469	308,696,338	314,870,265	321,167,670
-	Pembagi	Detik	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
-	Kebutuhan Air	Ltr/Detik	2,995	3,367	3,434	3,503	3,573	3,644	3,717
-	Asumsi Kebutuhan 20% dari Kebutuhan Domestik	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
-	Kebutuhan Non Domestik	Ltr/Detik	599.026	673.360	686.827	700.564	714.575	728.866	743.444
B	Faktor Kehilangan Air (20%)	Ltr/Detik	719	808	824	841	857	875	892
-	Koefisien Kehilangan Air	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
-	Rata-rata Kehilangan Air dari Domestik + Non Domestik	Ltr/Detik	718.831	808.032	824.192	840.676	857.490	874.640	892.132
-	Kebutuhan Air	Ltr/Detik	3,714	4,175	4,258	4,343	4,430	4,519	4,609
C	Kebutuhan Hari Maksimal	Ltr/Detik	4,085	4,592	4,684	4,778	4,873	4,971	5,070
D	Kebutuhan Air Bersih Jam Puncak (150% X C)	Ltr/Detik	6,128.04	6,888.47	7,026.24	7,166.77	7,310.10	7,456.30	7,605.43
	KEBUTUHAN AIR BERSIH/MINUM	**Ltr/Detik**	**6,128.04**	**6,888.47**	**7,026.24**	**7,166.77**	**7,310.10**	**7,456.30**	**7,605.43**

**Baseline menggunakan jumlah penduduk menurut SIAK*
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025-2030, kebutuhan layanan air bersih di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk dari 2.908.915 jiwa pada tahun 2025 menjadi 3.211.677 jiwa pada tahun 2030. Hal ini berdampak pada kenaikan kebutuhan rata-rata air minum per orang dari 2.995 liter/detik pada tahun 2025 menjadi 3.211 liter/detik pada tahun 2030. Total kebutuhan air domestik juga terus meningkat dari 599.026 liter/detik pada tahun 2025 hingga mencapai 743.444 liter/detik pada tahun 2030, sementara kebutuhan non-domestik naik dari 71.615 liter/detik menjadi 88.274 liter/detik pada periode yang sama. Secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan air bersih/minum, baik untuk pemakaian domestik maupun non-domestik, diperkirakan naik dari 6.188,04 liter/detik pada tahun 2024 menjadi 7.605,43 liter/detik pada tahun 2030.

2) Pengelolaan Air Limbah

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hunian dan air bersih, proyeksi pengolahan air limbah domestik juga perlu diperhatikan, mengingat kapasitas layanan yang tersedia harus mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas rumah tangga.

Tabel 2.93 Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik 2025-2030

NO	URAIAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET PENYEDIAAN KAPASITAS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (m3/hari)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Target Layanan	Rumah	484.567	222.612	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
2	Jumlah Jiwa Terlayani	Jiwa	1.938.268	2.160.880	2.162.880	2.165.080	2.167.380	2.169.780	2.172.280
3	Kebutuhan Air Domestik (rata-rata per orang 100 ltr/detik)	Liter/Detik	2.243	2.501	2.503	2.506	2.509	2.511	2514
4	Produksi air limbah domestik (rata-rata 70%-80%)	Liter/Detik	1.570	1.751	1.752	1.754	1.756	1.758	1.760
5	Faktor debit maksimum	-	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
6	Debit harian maksimum	Liter/Detik	1.806	2.013	2.015	2.017	2.019	2.022	2.024
Kebutuhan Kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik			**156.031**	**173.951**	**348.063**	**522.352**	**696.826**	**871.493**	**1.046.362**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Tabel Proyeksi Kebutuhan Kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik 2025-2030 berikut, kebutuhan kapasitas pengolahan limbah domestik di Kabupaten Garut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Target layanan pada 2025 diproyeksikan mencakup 222.612 rumah, kemudian meningkat bertahap hingga mencapai 2.500 rumah pada tahun 2030. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan air domestik per orang naik dari 2.501 liter/detik di tahun 2025 menjadi 2.514 liter/detik pada tahun 2030, sementara produksi air limbah domestik diproyeksikan meningkat dari 1.751 liter/detik menjadi 1.760 liter/detik pada periode yang sama. Akumulasi kebutuhan kapasitas pengolahan air limbah pun melonjak signifikan, dari 173.951 m^3/hari di tahun 2025 hingga mencapai 1.046.362 m^3/hari pada tahun 2030. Peningkatan kebutuhan kapasitas pengolahan air limbah tersebut dapat dikaitkan dengan capaian pelayanan serta target penanganan yang telah diproyeksikan untuk periode 2025-2030.

Tabel 2.94 Proyeksi Pelayanan dan Penanganan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2030

Uraian	2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Capaian Pelayanan SPALD (%)	68,53	68,57	68,61	68,66	68,72	68,79	68,87
Pengembangan SPALD (Rumah)	484.567	222.612	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
- SPALD-S (Cubluk, Tangki Septik)	481.635	84.350	1.500	1.540	1.500	1.500	1.500
- SPALD-T (Skala Permukiman)	3.232	138.262	500	660	800	900	1.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Jika dibandingkan dengan capaian pelayanan air limbah pada tahun 2024 yang baru mencapai 68,53% atau setara dengan 484.567 rumah, maka proyeksi kebutuhan kapasitas pengolahan air limbah 2025-2030 menunjukkan upaya peningkatan cakupan layanan secara bertahap. Target 2025-2030 diarahkan pada penambahan layanan baru mulai dari 222.612 rumah pada tahun 2025 hingga mencapai 2.500 rumah pada tahun 2030, dengan pembagian sistem layanan meliputi SPALD-S (cubluk/tangki septik), SPALD-T skala permukiman, hingga sistem komunal/terpusat. Pada tahun 2030, target pelayanan limbah diproyeksikan mencapai 68,87%, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas layanan. Dengan demikian, proyeksi peningkatan kapasitas pengolahan air limbah ini selaras dengan strategi pemerintah daerah untuk memperluas akses sanitasi yang layak, menekan risiko pencemaran lingkungan, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

3) Jaringan Irigasi

Setelah membahas proyeksi kebutuhan air minum dan pengelolaan air limbah, aspek penting berikutnya adalah ketersediaan dan pengelolaan air untuk sektor pertanian melalui jaringan irigasi.

Tabel 2.95 Proyeksi Pelayanan dan Penanganan Air Limbah Domestik 2025-2030

Uraian	Satuan	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target Luas Areal Terlayani Air	(Ha)	13.697	13.802	13.906	13.978	14.067	14.139
Kebutuhan Air Baku	m^3/detik	35,15	34,70	35,50	36,60	37,40	38
Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten/Kota	%	85,25	85,9	86,55	87	87,55	88
Persentase Kondisi Baik Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	63,96	67,1	70,43	73,69	76,86	80
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Km	5	8	8,5	8,3	8,1	8
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	120	185	193	202	210	220

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel proyeksi jaringan irigasi tahun 2025-2030 menunjukkan bahwa target luas areal terlayani air diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 13.697 Ha pada tahun 2025 menjadi 14.139 Ha pada tahun 2030. Seiring dengan itu, kebutuhan air baku juga mengalami peningkatan dari 35,15 m^3/detik pada tahun 2025 menjadi 38 m^3/detik pada tahun 2030. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kabupaten/kota juga menunjukkan tren kenaikan dari 85,25% di tahun 2025 hingga mencapai 88% pada tahun 2030. Sementara itu, persentase kondisi baik irigasi kewenangan kabupaten/kota naik dari 63,96% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2030, yang mencerminkan peningkatan kualitas infrastruktur. Dari sisi rehabilitasi, jaringan irigasi diproyeksikan bervariasi antara 5 hingga 8,5 km per tahun, sedangkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan ditargetkan naik dari 120 km pada 2025 menjadi 220 km pada 2030.

Keterkaitan antar indikator dalam tabel menunjukkan bahwa peningkatan luas areal irigasi yang terlayani harus diimbangi dengan ketersediaan air baku yang memadai, sehingga pasokan air untuk sektor pertanian dapat terjaga. Peningkatan persentase kondisi baik jaringan irigasi menandakan adanya upaya rehabilitasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung efisiensi distribusi air ke

lahan pertanian. Rehabilitasi jaringan serta operasi dan pemeliharaan irigasi berperan sebagai faktor pendukung yang memastikan sistem irigasi dapat berfungsi optimal dalam memenuhi target layanan. Proyeksi ini saling terkait dan mendukung pencapaian ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Garut.

C. Proyeksi Kebutuhan Energi/Kelistrikan

Perhitungan proyeksi kebutuhan listrik dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan listrik berdasarkan jumlah proyeksi penduduk. Asumsi yang digunakan yaitu kebutuhan listrik 450 VA/jiwa ditambah 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Garut Tahun 2025 dan 2030

	2025	2030
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.748.699	2.896.490
Kebutuhan Listrik (VA)	1.731.680.370	1.824.788.700

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan listrik di Kabupaten Garut pada tahun 2025-2030 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2025 kebutuhan listrik mencapai 1.731.680.370 VA, meningkat pada tahun 2030 menjadi 1.824.788.700 VA. Di Kabupaten Garut, masih terdapat 10.375 rumah yang belum berlistrik yang tersebar di 27 kecamatan dan 89 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.97 Jumlah Rumah Belum Berlistrik

Kecamatan	Jumah Rumah	Desa
Banjarwangi	412	Jayabakti, Tanjungjaya, Wangunjaya
Banyuresmi	3	Cipicung
Bayongbong	239	Panembong
Balubur Limbangan	100	Cigagade
Bungbulang	128	Cihikeu, Mekarbakti, Tegallega
Caringin	516	Cimahi, Purbayani, Sukarame
Cibatu	886	Cibunar, Girimukti, Karyamukti, Kertajaya, Mekarsari, Padasuka, Sindangsuka, Sukalilah
Cibiuk	92	Cibiuk kaler
Cibalong	24	Cigaronggong
Cikajang	135	Simpang
Cikelet	209	Cikelet, Tipar
Cilawu	1670	Cilawu, Dawungsari, Karyamekar, Mekarmukti, Mekarsari, Ngamplangsari, Pasanggrahan, Sukamaju, Sukamukti, Sukamurni, Sukatani
Cisewu	90	Karangsewu

Kecamatan	Jumah Rumah	Desa
Cisompet	58	Margamulya, Neglasari
Cisurupan	74	Situsari
Karangtengah	157	Sindanggalih
Kersamanah	46	Girijaya
Leuwigoong	134	Leuwigoong, Margacinta
Malangbong	405	Campaka, Mekarasih
Pameungpeuk	164	Paas, Pameungpeuk, Sirnabakti
Pamulihan	426	Garumukti, Linggarjati, Pakenjeng, Panawa
Pangatikan	62	Karangsari
Pasirwangi	1408	Barusari, Karyamekar, Padaawas, Padasuka, Pasirwangi, Sarimukti, Sinarjaya
Peundeuy	115	Peundeuy
Samarang	806	Cintakarya, Cintarakyat, Cisarua, Samarang, Sukakarya
Sukawening	840	Mekarhurip, Mekarluyu, Mekarwengi, Pasanggrahan, Sudalarang, Sukahaji, Sukaluyu, Sukamukti, Sukawening
Tarogong Kaler	194	Panjiwangi, Pasawahan
Tarogong Kidul	191	Mekargalih, Sukabakti
Wanaraja	791	Cinunuk, Sindangmekar, Sindangprabu, Sindangratu, Sukamenak, Wanajaya, Wanamekar, Wanaraja, Wanasari
Jumlah	10.375	

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, data diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

D. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Transportasi

1) Jalan dan Jembatan

Kabupaten Garut dilalui jalan sepanjang 4.284,02 Km yang terdiri dari Jalan Nasional 95,99 Km, Jalan Provinsi 286,03 Km, Jalan Kabupaten 1.022,24 Km dan Jalan Desa 2.879,76 Km. Pada tahun 2024, kemantapan jalan kabupaten dan desa mencapai 56,94%. Angka tersebut merepresentasikan jumlah panjang jalan kabupaten dan desa dengan kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan, diantaranya 701,52 Km pada jalan kabupaten dan 1.520,28 Km pada jalan desa. Sisanya merupakan jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat, dengan rincian jalan kabupaten 106,71 Km rusak ringan dan 214,01 Km rusak berat serta jalan desa 443,28 Km rusak ringan dan 916,2 Km rusak berat. Kondisi jalan tersebut akan semakin menuntut perhatian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2030, jumlah penduduk Kabupaten Garut diproyeksikan sejumlah 2.896.490 jiwa. Semakin banyak proyeksi penduduk, semakin besar pula kebutuhan pembangunan, pelebaran, dan peningkatan kualitas jalan. Untuk mendukung mobilitas penduduk, mencegah kemacetan dan menjaga kelancaran distribusi barang serta jasa, dibutuhkan pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan kualitas jalan baik

dengan pemeliharaan rutin, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Berikut proyeksi jalan dan jembatan tahun 2025-2030.

Tabel 2.98 Proyeksi Jalan dan Jembatan 2025-2030

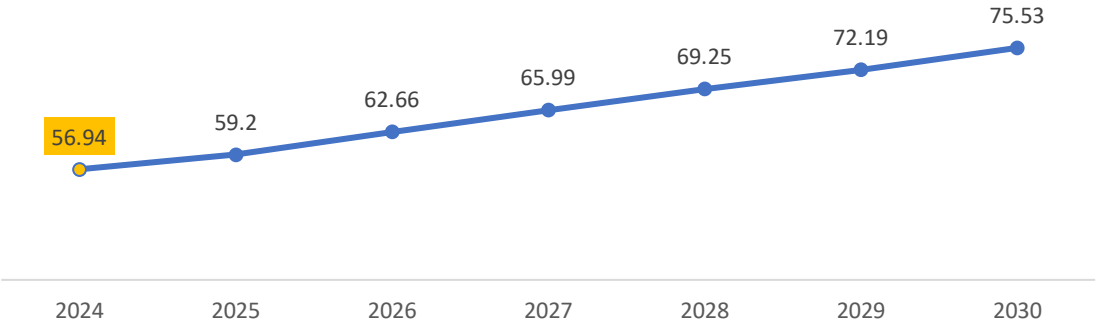
Uraian		Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemeliharaan Rutin Jalan (Km)	174	175	225	275	325	365
2	Pembangunan Jalan (Km)	10	10,2	1,89	6	11,7	1,9
3	Rehabilitasi Jalan (Km)	25	60	60	60	50	50
4	Rekonstruksi Jalan (Km)	50	75	70	67	65	60
5	Pemeliharaan Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan

Sumber: Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (2025), yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan jalan dan jembatan pada periode 2025–2030 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada pemeliharaan rutin jalan. Pada tahun 2025, pemeliharaan jalan tercatat sepanjang 174 km, dan secara bertahap meningkat hingga mencapai 365 km pada tahun 2030. Pembangunan jalan baru diproyeksikan antara 1,89 km hingga 11,7 km. Sementara itu, rehabilitasi jalan diproyeksikan stabil di angka 60 km mulai tahun 2026 sampai 2030. Rekonstruksi jalan menunjukkan tren menurun dari 75 km pada tahun 2026 menjadi 60 km pada tahun 2030. Selain jalan, infrastruktur penting lain yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Garut adalah jembatan. Total pemeliharaan jembatan tahun 2025-2030 sebanyak 20 unit.

Secara umum, hasil proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur transportasi, khususnya jalan, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan aktivitas wilayah. Hal ini menandakan pentingnya strategi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang berkelanjutan. Besarnya penanganan yang dilakukan, baik berupa pembangunan, pemeliharaan, maupun rehabilitasi, maka akan berpengaruh pada persentase kemantapan jalan. Proyeksi kemantapan jalan di Kabupaten Garut mengalami peningkatan secara bertahap dari 59,2% pada tahun 2025 menjadi 75,53% pada tahun 2030. Tren ini memperlihatkan adanya perbaikan kondisi jalan yang cukup konsisten selama periode lima tahun. Kecenderungan peningkatan ini sejalan dengan data proyeksi jalan, yang memperlihatkan proyeksi total penanganan jalan meningkat dari 259 km pada tahun 2025 menjadi 476,9 km pada tahun 2030. Peningkatan terbesar terlihat pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan, dari 174 km (2025) menjadi 365 km (2030), yang berkontribusi signifikan dalam menjaga kualitas jalan agar tetap dalam kondisi mantap. Selain itu, adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang

dilakukan secara konsisten turut memperkuat tren kenaikan kemantapan jalan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.107 Proyeksi Kemantapan Jalan Tahun 2025-2030

Peningkatan kemantapan jalan akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mampu menurunkan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi ekonomi daerah. Selain itu, kualitas jalan yang semakin mantap juga mendukung pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun pariwisata karena aksesibilitas menjadi lebih baik. Lebih jauh, pencapaian target kemantapan jalan ini berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah, mengurangi disparitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

2) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Proyeksi kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kabupaten disusun dengan asumsi kebutuhan ideal sebanyak 25 unit PJU per kilometer jalan. Pada tahun 2024, panjang jalan kabupaten tercatat sekitar 1.022,24 km, sehingga kebutuhan ideal PJU seharusnya mencapai kurang lebih 25.806 unit. Namun, kondisi eksisting baru tersedia sekitar 11.778 unit, yang berarti jumlah PJU masih jauh dari standar kebutuhan ideal dan belum mampu memberikan tingkat penerangan jalan yang memadai.

Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)

No	Uraian	2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jalan (Km)	1.022,24	1.032,24	1.042,44	1.044,33	1.050,33	1.062,03	1.063,93
2	PJU (25 Unit/Km)	11.778	25.806	26.061	26.108	26.258	26.551	26.598

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan BAPPEDA (2025), yang dikelola dalam SIPD

Seiring dengan proyeksi pembangunan dan penambahan panjang jalan kabupaten hingga tahun 2030 yang diperkirakan mencapai 1.063,93 km, maka kebutuhan PJU juga meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 26.598 unit. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan

PJU tidak hanya bergantung pada penambahan panjang jalan, tetapi juga pada upaya percepatan penyediaan fasilitas penerangan yang masih tertinggal sejak kondisi awal tahun 2024.

3) Perkeretaapian

Upaya reaktivasi jalur-jalur kereta api direncanakan sejalan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat serta penguatan konektivitas antarwilayah. Dari 11 jalur kereta api tidak aktif di wilayah Jawa Barat yang menjadi target program reaktivasi, terdapat 5 reaktivasi jalur kereta api yang menjadi prioritas salah satunya Koridor Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang.

Tabel 2.100 Reaktivasi Jalur Kereta Api

Nama Jalur	Progres	Kendala	Estimasi	Potensi
Cibatu – Garut - Cijakang	2016 : Studi kelayakan reaktivasi jalur KA antara Cibatu-Garut-Cikajang 2020 : Segmen Cibatu-Garut sepanjang 19,7 km sudah diselesaikan reaktivasinya oleh PT KAI sedangkan segmen Garut-Cikajang ditunda dikarenakan masalah lahan 2022: beroperasi KA Cibatu-Garut	- Dokumen perencanaan (FS, SID/BED, DED, AMDAL, LARAP dan ANDALALIN) perlu dilakukan reviu dan penyusunan - Terjadi banyak alih status lahan sehingga perlu pengadaan lahan	- Panjang trase 47,5 km - Cibatu-Garut 19,29 km - Garut-Cikajang 28,214 km - 2 Statiun 4 Halte - Potensi penumpang +/- 1.113 penumpang/hari - Perkiraan Biaya (Tahun 2022) Sarana +/- Rp 1 T Lokasi: Kabupaten Garut	Potensi Wisata Kawasan Garut

Sumber: Hasil Kajian FS Jalur Tidak Aktif di Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang dikelola dalam SIPD

E. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Penyelesaian pengelolaan persampahan di Kabupaten Garut hingga tahun 2030 dirancang melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan ambisi untuk mencapai target 100% sampah terolah, mengatasi tantangan signifikan yang ada saat ini, yaitu masih terdapatnya sekitar 64,95% sampah yang belum terkelola di Kabupaten Garut. Skenario pengembangan fasilitas pengolah sampah ini difokuskan pada optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah melalui diversifikasi infrastruktur, sejalan dengan kebijakan modern yang tidak lagi merekomendasikan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah secara tunggal.

Tabel 2.101 Parameter Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut

No	Parameter	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penduduk						
	- Total (Jiwa)	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490
	- Total (KK)	687.175	694.930	702.518	709.913	717.128	724.123
2	Timbulan Sampah						

No	Parameter	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Timbulan Sampah (kg/hari)	1.346.863	1.362.063	1.376.934	1.391.429	1.405.570	1.419.280
	- Timbulan Sampah (ton/hari)	1.347	1.362	1.377	1.391	1.406	1.419
3	Target Pengurangan (ton/hari)	404	409	413	417	422	426
4	Target Penanganan (ton/hari)	943	953	964	974	984	993

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, timbulan sampah di Kabupaten Garut diproyeksikan akan bertambah secara signifikan. Dari estimasi 1.347 ton/hari pada tahun 2025, angka ini diperkirakan akan mencapai 1.419 ton/hari pada tahun 2030. Peningkatan ini menuntut strategi yang progresif dan terukur untuk memastikan seluruh sampah dapat dikelola secara efektif.

Untuk memenuhi target 100% sampah terolah dan mengatasi kesenjangan layanan yang ada, Kabupaten Garut merumuskan skenario pengembangan fasilitas pengolah sampah yang terintegrasi. Adapun rencana pengadaan infrastruktur pengurangan dan penanganan sampah tahun 2025-2030 di Kabupaten Garut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.102 Rencana Pengurangan Sampah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Garut

Pengurangan Sampah		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Optimalisasi **Bank Sampah** (Unit)	23	30	35	40	45	55
	• Target Pengurangan Sampah dari Bank Sampah 5 ton/hari/unit	115	150	175	200	225	275
2	***Eco Office* SKPD dan Kecamatan**						
	• Target Pengurangan 0,011 - 0.25 ton/hari/kantor (setara 10 Kg Sampah/Hari/Kantor)	1	1	2	2	2	2
3	**Sekolah Adiwiyata** (sekolah)	108	135	169	211	264	330
	• Target Pengurangan Melalui Sekolah Adiwiyata 0,027 ton/hari/sekolah (setara 20 Kg/Hari/Sekolah)	2,9	3,6	4,6	5,7	7,1	8,9
4	**Hotel, Restauran dan Kafe (Horeka)** (unit)	393	393	393	393	393	393
	• Target pengurangan Melalui HOREKA 0,033 ton/hari/lokasi (setara 30 Kg/hari)	13	16	19	25	31	38
Total Jumlah Pengurangan (ton/hari)		**132**	**170**	**201**	**232**	**265**	**323**
Target Pengurangan (ton/hari)		**404**	**409**	**413**	**417**	**422**	**426**
Sisa Residu dari Proses Pengurangan		***272***	***239***	***212***	***185***	***157***	***102***

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Optimalisasi Bank Sampah memegang peran vital dalam strategi pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang. Pada tahun 2025, target pengurangan sampah dari Bank Sampah adalah 115 ton/hari dengan 23 unit Bank Sampah. Pengembangan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 55 unit Bank Sampah pada tahun 2030, dengan target pengurangan sampah yang signifikan mencapai 225 ton/hari. Selain itu, upaya pengurangan sampah juga didukung melalui program *Eco Office* pada perangkat daerah dan Kecamatan, serta Sekolah Adiwiyata, dan optimalisasi pengurangan dari Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). Berdasarkan rencana pengurangan sampah 2025-2030, terdapat sisa residu sampah dari proses penguragan sejumlah 102 ton/hari pada tahun 2030.

Tabel 2.103 Rencana Penanganan Sampah Tahun 2025 -2030 di Kabupaten Garut

Penanganan Sampah		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Optimalisasi **TPS 3R** Kapasitas 5 ton/hari	16	48	80	112	132	144
	• Target Penanganan Melalui TPS 3R (ton/hari)	80	240	400	560	660	720
2	Optimalisasi **TPST** Kapasitas 100 ton/hari (unit)	0	1	2	3	4	4
	• Target Penanganan Melalui TPST Kapasitas 100 ton/hari	0	100	200	300	400	400
3	• Target Penanganan **TPPAS Legok Nangka** (ton/hari)	0	0	0	0	125	125
Total Target Penanganan Per Hari		**80**	**340**	**600**	**860**	**1185**	**1245**
Target Penanganan (ton/hari)		**943**	**953**	**964**	**974**	**984**	**993**
Sisa Residu dari Proses Penanganan		***863***	***613***	***364***	***114***	***Sampah Habis Terkelola***	
Sisa Residu dari Proses Pengurangan & Penanganan		***1.135***	***852***	***576***	***299***	***Sampah Habis Terkelola***	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Rencana Penanganan Sampah Tahun 2025-2030, meliputi:

- Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS 3R)

TPS 3R menjadi tulang punggung dalam upaya penanganan sampah di tingkat lokal, memungkinkan pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah di dekat sumbernya. Model ini sangat didorong mengingat kebijakan pengelolaan sampah modern yang meminimalisir ketergantungan pada TPA tunggal. Pada tahun 2025, Kabupaten Garut menargetkan optimalisasi 16 unit TPS 3R, dengan kapasitas penanganan total 80 ton/hari. Jumlah TPS 3R akan ditingkatkan secara drastis menjadi 48 unit pada tahun 2026, yang mampu menangani 240 ton/hari. Puncaknya, pada tahun 2029, Kabupaten Garut akan memiliki 132 unit TPS 3R yang beroperasi, dengan total kapasitas penanganan mencapai 660 ton/hari. Pembangunan TPS 3R ini merupakan wujud nyata dari

pergeseran paradigma pengelolaan sampah menuju pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan berbasis sumber.

- Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berkapasitas Besar

Selain TPS 3R, strategi ini juga mencakup pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala lebih besar yang dikenal sebagai TPST (*Transfer Processing Solid Waste*). Pada tahun 2026, direncanakan adanya 1 unit TPST dengan kapasitas 100 ton/hari. Jumlah TPST akan bertambah menjadi 2 unit pada tahun 2027 (200 ton/hari) dan 3 unit pada tahun 2028 (300 ton/hari). Pada tahun 2029, targetnya adalah 4 unit TPST dengan total kapasitas penanganan mencapai 400 ton/hari. TPST ini berperan sebagai fasilitas pengolahan antara sebelum residu akhir dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir atau fasilitas penanganan lanjutan.

- Keterlibatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka

Untuk penanganan sampah skala regional, Kabupaten Garut juga akan memanfaatkan TPPAS Legok Nangka. Mulai tahun 2029, TPPAS Legok Nangka diharapkan mulai beroperasi dan akan menangani 125 ton/hari sampah dari Kabupaten Garut. Keterlibatan TPPAS ini menunjukkan adanya sinergi antar daerah dalam pengelolaan sampah skala besar.

- Transisi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Konvensional

Rencana peningkatan TPA Pasir Bajing menjadi *full controlled landfill*, merupakan salah satu strategi Kabupaten Garut, selain pada pengurangan dan penanganan melalui Bank Sampah, TPS 3R, TPST, dan TPPAS Legok Nangka, secara implisit menunjukkan pergeseran dari ketergantungan tunggal pada TPA konvensional. Pendekatan pengelolaan sampah modern, yang saat ini banyak dianut dan menjadi acuan kebijakan nasional, memang sudah tidak diperbolehkan untuk membangun hanya TPA saja. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di TPA dan meningkatkan nilai tambah sampah melalui daur ulang dan pemanfaatan energi, sehingga TPA yang ada bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan residu akhir dengan standar lingkungan yang lebih tinggi (seperti *controlled landfill* atau *sanitary landfill*). Dengan tercapainya target "Sampah Habis Terkelola" pada tahun 2029, ini berarti tidak ada lagi sisa residu dari proses pengurangan dan penanganan yang perlu dikelola lebih lanjut di TPA secara konvensional.

Sinergi dari seluruh upaya ini - mulai dari peningkatan Bank Sampah, penambahan dan optimalisasi TPS 3R, pembangunan TPST, hingga pemanfaatan TPPAS Legok Nangka - ditujukan untuk secara progresif mengurangi sisa residu sampah yang belum tertangani. Pada tahun 2025, sisa residu dari proses pengurangan dan penanganan awal masih sekitar 1.135 ton/hari. Angka ini akan terus menurun menjadi 852 ton/hari pada tahun 2026, 576 ton/hari pada tahun 2027, 299 ton/hari pada tahun 2028, puncaknya, pada tahun 2029, dengan total target pengurangan sebesar 422 ton/hari dan penanganan sebesar 984 ton/hari,

Kabupaten Garut menargetkan kondisi di mana "Sampah Habis Terkelola". Ini mengindikasikan bahwa seluruh timbulan sampah harian dapat dikelola dan tidak ada lagi residu yang mencemari lingkungan, mencapai pelayanan pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan.

F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Perhitungan kebutuhan sarana kesehatan 2025-2030 mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Infrastruktur kesehatan adalah seluruh fasilitas, sumber daya, sistem dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pemenuhan infrastruktur kesehatan salah satunya dilakukan melalui pemenuhan jumlah kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024, standar minimal jumlah puskesmas pada suatu daerah adalah 1:30.000 yang artinya 1 puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada 30.000 penduduk. Pada Tahun 2024, jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Garut sebanyak 67 Puskesmas terdiri dari 33 Puskesmas rawat inap dan 34 Puskesmas non-rawat inap. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.716.950 jiwa maka Proporsi Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Garut sebesar 1:40.551 jiwa atau 2,47 per 100.000 penduduk. Untuk mencapai target nasional sebesar 1:30.000, dengan jumlah penduduk Tahun 2030 diproyeksikan 2.896.490 jiwa, maka minimal jumlah Puskesmas yang dimiliki Kabupaten Garut yaitu 97 sehingga diperlukan penambahan 30 Puskesmas.

Tabel 2.104 Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Garut

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas (*Existing*)	Jumlah Puskesmas (Rasio Puskesmas terhadap Penduduk 1: 30.000)	Kebutuhan Penambahan Puskesmas
2024	2.716.950	67	91	-
2030	2.896.490	-	97	30

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

b. Rumah Sakit

Dalam merencanakan pengembangan fasilitas rumah sakit dapat dilakukan dengan menghitung kebutuhan tempat tidur terhadap jumlah penduduk. Menurut WHO, suatu negara idealnya memiliki 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk, sehingga kecukupan tempat tidur suatu daerah dihitung dengan rasio tersebut. Begitu pula dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Berikut proyeksi kebutuhan penambahan tempat tidur dan Rumah Sakit Tahun 2025-2030.

Tabel 2.105 Proyeksi Kebutuhan *Bed* dan Rumah Sakit di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Bed (*Existing*)	Jumlah Bed (Rasio terhadap Penduduk 1: 1.000)	Kebutuhan Penambahan Bed
2024	2.716.950	1.201	-	-
2025	2.748.699	-	-	300 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
2026	2.779.720	-	-	300 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
2027	2.810.070	-	-	300 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
2028	2.839.650	-	-	300 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
2029	2.868.510	-	-	300 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
2030	2.896.490	-	2.896	195 Bed, 2 RS (Tipe B,C)
Total penambahan 2025-2030			**1.695**	

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

Selanjutnya berdasarkan data pada Profil Kesehatan Kabupaten Garut Tahun 2024, jika dilihat ketersediaan *bed* dari Rumah Sakit, ditambah dengan Puskesmas Rawat Inap serta Klinik di kabupaten berjumlah 2.200, dengan rasio 1 berbanding 1.235 penduduk. Untuk mencapai rasio 1 *bed* berbanding 1.000 penduduk, Kabupaten Garut membutuhkan *bed* sebanyak 2.717 *bed*. Sehingga masih kekurangan sejumlah 517 *bed*.

G. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Perhitungan kebutuhan sarana pendidikan 2025-2030 berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 yang mengacu pada SNI 03-1733-2004

tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Proyeksi fasilitas pendidikan dihitung menggunakan standar minimum jumlah sarana terhadap proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2025-2030. Kebutuhan fasilitas pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Proyeksi jumlah rombongan belajar dihitung menggunakan standar minimum jumlah siswa pada setiap rombongan belajar terhadap proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia pendidikan Kabupaten Garut tahun 2025-2030. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi jumlah rombongan belajar (rombel) pada tahun 2030 meliputi Paud 3.211 rombel, TK 2.398 rombel, SD/MI 6.835. Jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2025 relatif mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun 2030.

Tabel 2.106 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Uraian	2023	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk	2.683.690	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490
Penduduk Usia 3-6 (PAUD)		180.625	182.460	185.052	188.121	190.997	192.635
Penduduk Usia 4-6 (TK)		134.605	135.791	137.781	140.308	142.706	143.889
Penduduk Usia 7-12 (SD)		275.670	273.593	272.614	272.671	273.308	273.394
Penduduk Usia 13-15 (SMP)		146.141	144.010	141.686	139.346	137.294	135.942
Fasilitas Pendidikan							
- PAUD dan TK (unit)	2.401	2.199	2.224	2.248	2.272	2.295	2.317
- SD/MI (unit)	1.539	1.718	1.737	1.756	1.775	1.793	1.810
- SMP/MTS (unit)	422	573	579	585	592	598	603
Rombongan Belajar							
- Paud (Rombel)	3.384	3.010	3.041	3.084	3.135	3.183	3.211
- TK (Rombel)	1.709	2.243	2.263	2.296	2.338	2.378	2.398
- SD/MI (Rombel)	10.742	6.892	6.840	6.815	6.817	6.833	6.835

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yang dikelola dalam SIPD

Jumlah sarana pendidikan serta jumlah rombongan belajar perlu diimbangi dengan jumlah dan kondisi ruang kelas yang memadai. Berdasarkan kondisi tahun 2024, diproyeksikan jumlah ruang kelas baru dan jumlah rehab ruang kelas pada tahun 2025-2030.

Tabel 2.107 Proyeksi Ruang Kelas di Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Jenjang/Keterangan		2024	Kegiatan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
PAUD	Ruang Kelas	3.899	RKB	20	20	20	20	20	20
	Ruang Kelas Rusak Sedang dan Berat	1.084	Rehab Ruang Kelas	35	50	60	70	85	95
SD	Ruang Kelas	9.812	RKB	8	200	200	200	200	200

Jenjang/Keterangan		2024	Kegiatan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ruang Kelas Rusak Sedang dan Berat	3.485	Rehab Ruang Kelas	224	210	220	230	260	280
SMP	Ruang Kelas	3.677	RKB	5	15	18	11	11	11
	Ruang Kelas Rusak Sedang dan Berat	1.011	Rehab Ruang Kelas	144	62	80	55	55	55
Pendidikan Kesetaraan	Ruang Kelas	486	RKB	5	6	8	12	15	20
	Ruang Kelas Rusak Sedang dan Berat	134	Rehab Ruang Kelas	2	5	8	12	15	20

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (2025), yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2024, jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan masih memiliki ruang kelas dengan kondisi rusak sedang dan berat. Kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi ruang kelas sampai dengan akhir tahun 2030 masing-masing diproyeksikan sejumlah 120 unit RKB dan 395 unit rehab ruang kelas pada jenjang PAUD, 1.008 unit RKB dan 1.424 unit rehab ruang kelas pada jenjang SD, 71 unit RKB dan 451 unit rehab ruang kelas pada jenjang SMP, 66 unit RKB dan 62 unit rehab ruang kelas pada jenjang Pendidikan Kesetaraan.

2.3 Gambaran Keuangan Daerah

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan

didasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan.

2.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya mengacu pada kinerja keuangan pada periode RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut pada kurun waktu lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020-2024 berpedoman pada 2 (dua) aturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perbedaan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 2.108 Perbandingan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah ● Pajak daerah; ● Retribusi daerah; ● Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; ● Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Pendapatan Transfer ● Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; ● Dana Alokasi Umum (DAU); ● Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ● Pendapatan Hibah;	a. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah ● Pajak Daerah; ● Retribusi Daerah; ● Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; ● Lain-lain PAD yang Sah. 2. Pendapatan Transfer ● Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; ● Pendapatan Transfer Antar Daerah 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ● Pendapatan Hibah; ● Dana Darurat;

Klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
● Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; ● Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; ● Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	● Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
b. Belanja Daerah 1. Belanja Langsung ● Belanja pegawai; ● Belanja barang dan jasa; ● Belanja modal 2. Belanja Tidak Langsung ● Belanja pegawai; ● Belanja bunga; ● Belanja subsidi; ● Belanja hibah; ● Belanja bantuan sosial; ● Belanja bagi hasil; ● Belanja bantuan keuangan; ● Belanja tidak terduga	b. Belanja Daerah 1. Belanja Operasi ● Belanja Pegawai; ● Belanja Barang dan Jasa; ● Belanja Hibah; ● Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal ● Belanja Modal Tanah; ● Belanja Modal Peralatan dan Mesin; ● Belanja Modal Gedung dan Bangunan; ● Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; ● Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ● Belanja Modal Aset Lainnya 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer ● Belanja Bagi Hasil; dan ● Belanja Bantuan Keuangan
c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan ● Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); ● Penerimaan pinjaman daerah; ● Penerimaan kembali pemberian pinjaman; ● Pencairan dana cadangan; ● Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; ● Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan ● Pembentukan dana cadangan; ● Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; ● Pembayaran pokok utang; ● Pemberian pinjaman daerah.	c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan ● Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; ● Pencairan Dana Cadangan; ● Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; ● Penerimaan Pinjaman Daerah; ● Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan ● Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2. Pengeluaran Pembiayaan ● Pembentukan Dana Cadangan; ● Penyertaan Modal Daerah; ● Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; ● Pemberian Pinjaman Daerah; dan ● Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: BPKAD (2025), diolah

Rincian objek dari masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut periode sebelumnya menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun

2025-2029. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2020-2024 dibagi berdasarkan pedoman perundang-undangan yaitu tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 2021-2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan sebagai berikut.

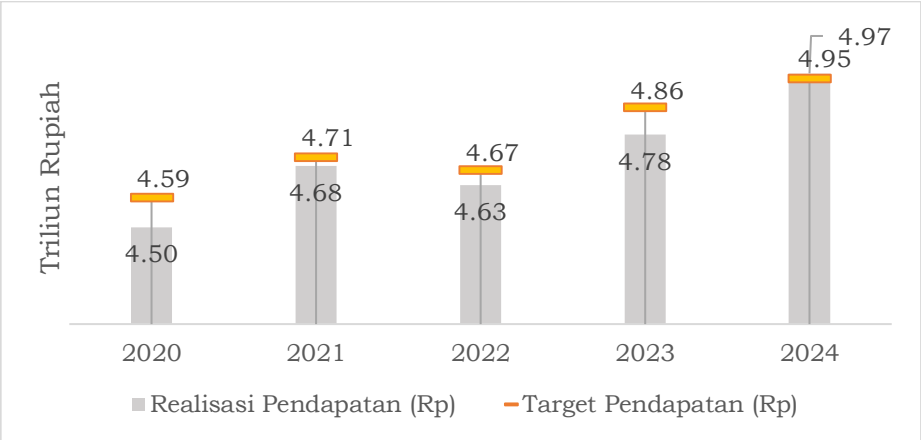
2.3.1.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selama tahun 2020-2024, secara umum kinerja Pendapatan Daerah mengalami tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,80% per tahun seiring dengan dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Garut. Pada rentang waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021 sebesar 4,17%. Periode 2022-2024 adalah masa pemulihan perekonomian dimana perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kabupaten Garut mulai pulih dan berangsur tumbuh kembali. Tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 dibandingkan dengan target secara rata-rata mencapai 99,05%.

Tabel 2.109 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	4.585.588.350.799	4.496.835.424.030	98,06%	-5,07%	-6,22%
2021	4.709.453.806.651	4.684.404.923.197	99,47%	2,70%	4,17%
2022	4.670.657.405.901	4.626.954.746.948	99,06%	-0,82%	-1,23%
2023	4.863.337.415.288	4.780.438.457.960	98,30%	4,13%	3,32%
2024	4.951.630.834.514	4.968.925.212.933	100,35%	1,82%	3,94%
Rata-rata			99,05%	0,55%	0,80%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA 2020 s.d. 2024



Sumber: BAPPEDA (2025), data diolah

Gambar 2.108 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2020- 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.110 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

No	URAIAN	Tahun	Kode	URAIAN	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2020-2024 (%)
		2020			2021	2022	2023	2024	
1.	PENDAPATAN	4.496.835.424.030	4.	PENDAPATAN	4.684.404.923.197	4.626.954.746.948	4,780,438,457,960	4,968,925,212,933	0,80%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	474.636.531.980	4.1.	Pendapatan Asli Daerah	560.783.376.919	486.038.766.410	535,631,250,765	538,184,227,757	2,61%
1.1.1.	Pajak Daerah	116.413.508.912	4.1.01.	Pajak Daerah	126.527.804.958	157.569.982.468	173,835,653,663	169,748,620,641	5,92%
1.1.2.	Retribusi Daerah	11.970.216.330	4.1.02.	Retribusi Daerah	15.259.959.070	15.711.817.595	20,913,150,084	59,705,306,393	43,89%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.059.036.226	4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.455.066.625	7.044.369.160	7,336,469,580	7,589,428,181	6,49%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	339.193.770.512	4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	412.540.546.266	305.712.597.187	333,545,977,438	301,140,872,542	-0,56%
1.2.	Dana Perimbangan	2.533.357.077.529	4.2.	Pendapatan Transfer	3.784.572.413.274	4.081.264.360.586	4,219,407,436,264	4,402,584,390,621	10,81%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	191.255.229.849	4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	3.261.973.058.051	3.413.296.605.794	3.595.893.557.321	3,958,424,743,578	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.663.193.753.000	4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	522.599.355.223	667.967.754.792	623.513.878.943	444,159,647,043	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	678.908.094.680							
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.488.841.814.521	4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	339.049.133.004	59.651.619.952	25.399.770.931	28.156.594.555	-40,91%
1.3.1.	Hibah	323.750.659.964	4.3.01.	Pendapatan Hibah	20.133.542.423	46.365.278.610	10.507.849.500	28.156.594.555	
1.3.2	Dana darurat	-	4.3.03.	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	318.915.590.581	13.286.341.342	14.891.921.431	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	211.395.791.683							
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	567.652.838.863							
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	386.042.524.011							

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

Jika dilihat dari 3 komponen sumber pendapatan daerah, rata-rata pertumbuhan terbesar dialami oleh Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan sebesar 10,81%, diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,61%.

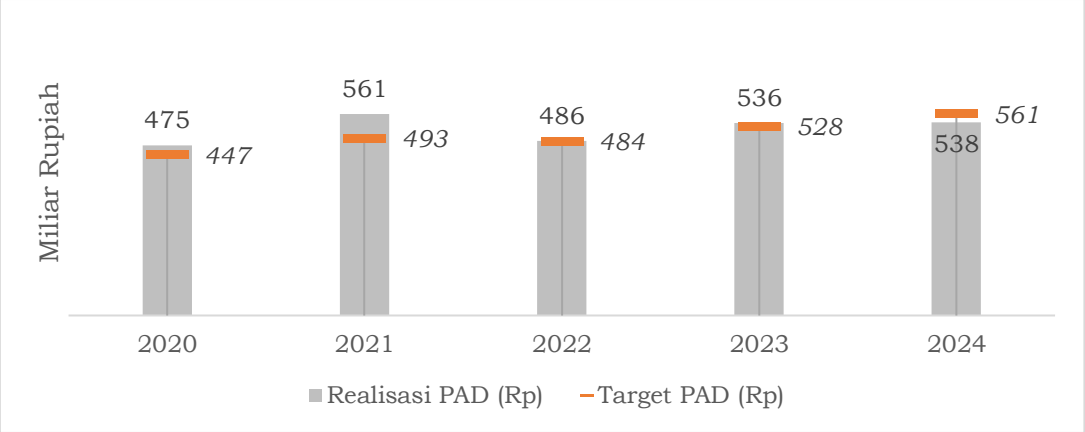
Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari Rp474.636.531.980,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp538.184.227.757,00 pada tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,61%. Pertumbuhan penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 18,15%. Tingkat realisasi PAD selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut rata-rata mencapai 103,55%.

Tabel 2.111 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	446.798.360.174	474.636.531.980	106,23%	-10,86%	-2,45%
2021	492.892.942.188	560.783.376.919	113,77%	10,32%	18,15%
2022	484.443.369.392	486.038.766.410	100,33%	-1,71%	-13,33%
2023	527.550.074.727	535.631.250.765	101,53%	8,90%	10,20%
2024	561.144.584.719	538.184.227.757	95,91%	6,37%	0,48%
Rata-rata			103,55%	2,60%	2,61%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024



Sumber: BAPPEDA (2025, diolah)

Gambar 2.109 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2024

b. Dana perimbangan/ Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Provinsi mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp2.533.357.077.529,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.402.584.390.621,00 pada tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,81%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari sebesar Rp1.488.841.814.521,00 pada tahun 2020 menjadi Rp28.156.594.555,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 40,91%. Hal ini disebabkan karena mulai

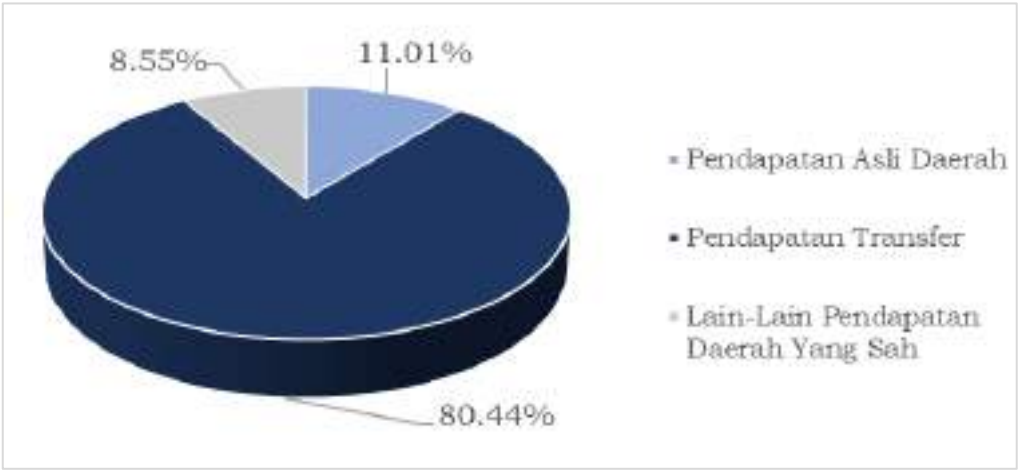
tahun 2021 terjadi perubahan kode rekening dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi yang berpindah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Pendapatan Transfer.

Adapun ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 didominasi oleh sumber dana perimbangan/pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 80,44%, disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,01% dan Lain-Lain Pendapatan Derah yang Sah sebesar 8,55% sebagaimana terlihat pada tabel dan gambar dibawah.

Tabel 2.112 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Kode	Uraian		Komposisi Realisasi Pendapatan				Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	PENDAPATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10.55%	11.97%	10.50%	11.20%	10.83%	11.01%
	Pajak Daerah	2.59%	2.70%	3.41%	3.64%	3.42%	3.15%
	Retribusi Daerah	0.27%	0.33%	0.34%	0.44%	1.20%	0.51%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.16%	0.14%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.54%	8.81%	6.61%	6.98%	6.06%	7.20%
4.2	Pendapatan Transfer	56.34%	80.79%	88.21%	88.26%	88.60%	80.44%
	Transfer Pemerintah Pusat		69.63%	73.77%	75.22%	79.66%	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		11.16%	14.44%	13.04%	8.94%	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.11%	7.24%	1.29%	0.53%	0.57%	8.55%
	Pendapatan Hibah		0.43%	1.00%	0.22%	0.57%	
	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.81%	0.29%	0.31%	0.00%	

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA 2020 s.d. 2024



Sumber: BAPPEDA (2025), data diolah

Gambar 2.110 Rata-rata Kontribusi Sumber Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan selama tahun 2020-2024 sebesar 11,01%, menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.

Selanjutnya tingkat realisasi pendapatan daerah terhadap target anggaran pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.113 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun	Kode	Uraian	Tahun			
		2020			2021	2022	2023	2024
4.	PENDAPATAN	98,06%	4.	PENDAPATAN	99.47%	99.06%	98.30%	100.35%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	106,23%	4.1.	Pendapatan Asli Daerah	113.77%	100.33%	101.53%	95.91%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	110,62%	4.1.01.	Pajak Daerah	103.39%	100.81%	101.08%	94.30%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	59,52%	4.1.02.	Retribusi Daerah	86.91%	70.93%	86.99%	24.94%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100,00%	4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.00%	100.00%	97.61%	100.00%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107,89%	4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.06%	102.27%	102.94%	224.44%
4.2	Dana Perimbangan	97,56%	4.2.	Pendapatan Transfer	97.65%	98.55%	98.19%	100.70%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90,23%	4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	100.09%	98.47%	98.52%	100.94%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	97,96%	4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.73%	98.97%	96.31%	98.65%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	98,84%						
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	96,54%	4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99.49%	132.47%	65.86%	151.16%
4.3.1	Pendapatan Hibah	98,03%	4.3.01.	Pendapatan Hibah	64.68%	119.42%	51.11%	151.16%
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83,86%	4.3.03.	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	102.98%	214.08%	82.69%	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Transfer Lainnya	100,56%						

No	Uraian	Tahun	Kode	Uraian	Tahun			
		2020			2021	2022	2023	2024
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	97,65%						

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA 2020 s.d. 2024

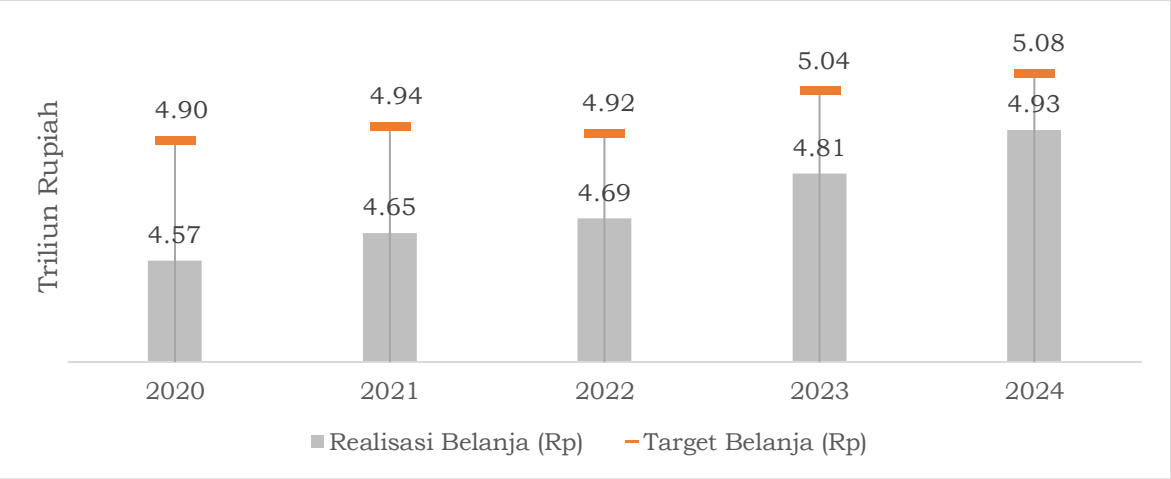
2.3.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Selama tahun 2020-2024, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari Rp4.573.907.976.515,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.928.486.622.097,00 pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,42%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2020-2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 95,06%. Realisasi belanja daerah mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.114 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	4.900.110.755.023	4.573.907.976.515	93,34%	-2,22%	-0,45%
2021	4.938.938.117.892	4.649.602.155.581	94,14%	0,79%	1,65%
2022	4.919.944.484.758	4.688.455.777.826	95,29%	-0,38%	0,84%
2023	5.035.205.820.470	4.812.745.818.050	95,52%	2,34%	2,59%
2024	5.081.689.879.606	4.928.486.622.097	96,99%	0,92%	2,47%
Rata-rata			95,06%	0,29%	1,42%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024



Sumber: BAPPEDA (2025, diolah)

Gambar 2.111 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.115 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

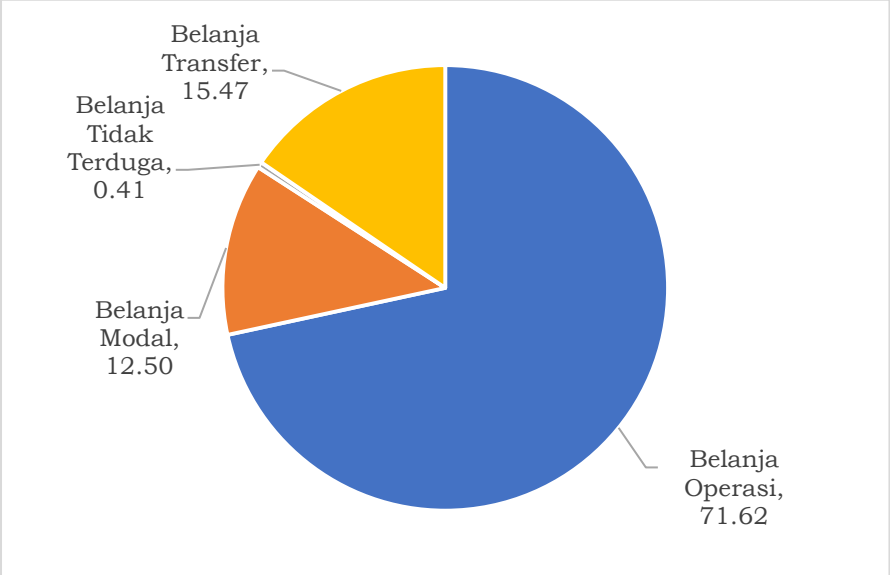
No	Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)	Pertumbuhan 2019-2020 (%)	Kode	Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)				Rata-rata Pertumbuhan 2022-2024 (%)
		2020				2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	4.573.907.976.515	-0,45%	5.	BELANJA DAERAH	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.745.818.050	4.928.486.622.097	1,96%
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.642.720.297.365	6,14%	5.1.	Belanja Operasi	3.289.003.496.580	3.228.017.251.870	3.409.465.190.272	3.747.249.917.123	4,56%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.570.103.614.714	-5,33%	5.1.01.	Belanja Pegawai	1.711.698.801.354	1.678.298.468.729	1.623.923.894.714	2.073.084.985.590	7,49%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.088.825.013.582	1.142.669.871.121	1.324.307.932.451	1.142.104.172.390	2,36%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	5.1.04.	Belanja Subsidi	-	951.000.000	1.111.000.000	24.000.000	-40,51%*
2.1.4	Belanja Hibah	91.202.497.202	26,66%	5.1.05.	Belanja Hibah	477.437.424.029	380.223.522.021	426.855.242.357	512.541.794.143	3,99%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.107.400.000	-50,65%	5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.042.257.615	25.874.389.999	33.267.120.750	19.494.965.000	40,50%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	15.517.586.117	3,40%							
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes.	785.860.032.845	9,35%	5.2.	Belanja Modal	558.797.286.428	700.943.778.898	680.967.695.485	438.182.142.740	-4,35%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	167.929.166.487	14200,56%	5.2.01.	Belanja Modal Tanah	34.923.261.221	21.374.678.883	17.710.354.017	12.870.200.910	-27,76%
2.2	Belanja Langsung	1.931.187.679.150	-8,25%	5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.413.219.545	115.797.914.649	164.947.127.598	158.445.537.120	13,24%
2.2.1	Belanja Pegawai	185.791.658.941	36,82%	5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.878.310.049	149.847.397.573	290.110.589.529	178.722.152.650	9,45%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.282.353.337.243	-9,43%	5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.540.470.291	394.817.632.912	191.233.976.444	69.251.048.394	-0,47%
2.2.3	Belanja Modal	463.042.682.966	-16,28%	5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.042.025.322	19.106.154.881	16.965.647.897	18.831.853.666	-1,62%
				5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	61.350.000	-

No	Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)	Pertumbuhan 2019-2020 (%)	Kode	Uraian	REALISASI BELANJA DAERAH (Rp)				Rata-rata Pertumbuhan 2022-2024 (%)
		2020				2021	2022	2023	2024	
				5.3.	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	3.454.649.291	-49,35%
				5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903	28.771.620.642	5.907.754.376	3.454.649.291	-49,35%
				5.4.	Belanja Transfer	762.348.449.670	730.723.126.416	716.405.177.917	739.599.912.943	-0,96%
				5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	13.045.583.078	17.422.666.527	19.333.448.767	19.149.257.961	14,52%
				5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	749.302.866.592	713.300.459.889	697.071.729.150	720.450.654.982	-1,24%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

Seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19 pada periode 2022-2024, belanja daerah mengalami tren pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,96%. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditunjang oleh beberapa komponen yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan Tahun 2022-2024 sebesar 40,5%. Selain itu juga terdapat komponen Belanja yang mengalami penurunan seperti Belanja Tidak terduga dengan rata-rata penurunan Tahun 2022-2024 sebesar 49,35% sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Adapun ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi Belanja daerah selama tahun 2020-2024 rata-rata didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 71,62%, disusul dengan Belanja Transfer 15,47% dan Belanja Modal sebesar 12,5% sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Sumber: BAPPEDA (2025, diolah)

Gambar 2.112 Rata-rata Kontribusi Sumber Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Adapun secara rinci, proporsi tiap jenis belanja daerah Kabupaten Garut untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116 Proporsi Jenis Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Uraian	Komposisi Realisasi Belanja (%)	Kode	Uraian	Komposisi Realisasi Belanja (%)				
		2020			2021	2022	2023	2024	Rata-rata
2.1	Belanja Tidak Langsung	57,78	5.1.	Belanja Operasi	70,74	68,85	70,84	76,03	71,62
2.1.1	Belanja Pegawai	34,33	5.1.01.	Belanja Pegawai	36,81	35,80	33,74	42,06	37,10
2.1.2	Belanja Bunga	-	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23,42	24,37	27,52	23,17	24,62
2.1.3	Belanja Subsidi	-	5.1.04.	Belanja Subsidi	0,00	0,02	0,02	0,0005	0,01
2.1.4	Belanja Hibah	1,99	5.1.05.	Belanja Hibah	10,27	8,11	8,87	0,0005	9,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,26	5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,24	0,55	0,69	0,40	0,47
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes	0,34							
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes.	17,18	5.2.	Belanja Modal	12,02	14,95	14,15	8,89	12,50
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,67	5.2.01.	Belanja Modal Tanah	0,75	0,46	0,37	0,26	0,46
2.2	Belanja Langsung	42,22	5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,46	2,47	3,43	3,21	2,89

No	Uraian	Komposisi Realisasi Belanja (%)	Kode	Uraian	Komposisi Realisasi Belanja (%)				
		2020			2021	2022	2023	2024	Rata-rata
2.2.1	Belanja Pegawai	4,06	5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,41	3,20	6,03	3,63	4,31
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,04	5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,97	8,42	3,97	1,41	4,44
2.2.3	Belanja Modal	10,12	5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,43	0,41	0,35	0,38	0,39
			5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	0,001	0,001
			5.3.	Belanja Tidak Terduga	0,85	0,61	0,12	0,07	0,41
			5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	0,85	0,61	0,12	0,07	0,41
			5.4.	Belanja Transfer	16,40	15,59	14,89	15,01	15,47
			5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	0,28	0,37	0,40	0,39	0,36
			5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	16,12	15,21	14,48	14,62	15,11

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

Pada tabel di atas, terlihat bahwa struktur pengalokasian belanja daerah paling besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar rata-rata 37,10%, dimana komposisi terbesar ASN di Kabupaten Garut merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib. Selanjutnya, tingkat realisasi belanja daerah terhadap target anggaran belanja daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.118 Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (%)	Kode	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
	BELANJA	93,34	5.	BELANJA	94,14	95,29	95,58	96,99
2.1	Belanja Tidak Langsung	91,41	5.1.	Belanja Operasi	92,99	95,10	95,16	96,90
2.1.1	Belanja Pegawai	93,3	5.1.01.	Belanja Pegawai	95,07	94,30	91,91	96,40
2.1.4	Belanja Hibah	97,28	5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93,93	95,91	98,18	96,89
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	96,48	5.1.04.	Belanja Subsidi		100,00	100,00	100,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	99,53	5.1.05.	Belanja Hibah	84,43	96,03	98,85	98,87
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	99,99	5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	94,92	98,61	96,59	99,89
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	55,91						
2.2	Belanja Langsung	96,12	5.2.	Belanja Modal	93,83	93,92	96,65	96,31
2.2.1	Belanja Pegawai	97,41	5.2.01.	Belanja Modal Tanah	82,06	74,16	97,93	97,37
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96,97	5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92,23	93,86	93,94	95,09

No	Uraian	2020 (%)	Kode	Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
2.2.3	Belanja Modal	93,36	5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,09	95,66	96,64	96,63
			5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95,47	94,38	98,70	97,22
			5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99,88	99,99	99,94	99,85
			5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	94,19
			5.3.	Belanja Tidak Terduga	94,25	60,14	20,41	17,96
			5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	94,25	60,14	20,41	17,96
			5.4.	Belanja Transfer	99,69	99,89	99,68	99,91
			5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	92,94	97,38	97,83	96,58
			5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	99,81	99,95	99,74	100,00

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

2.3.1.3 Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama tahun 2020-2024, realisasi pembiayaan daerah cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari sebesar Rp317.706.863.724,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp130.089.400.092,00 pada tahun 2024, meningkat 146,19% dari tahun 2019-2020 dan mengalami penurunan sebesar 18,65% pada kurun waktu 2021-2024. Adapun penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah terhadap BUMD. Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah.

Tabel 2.118 Kinerja Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	Pertumbuhan 2019-2020 (%)	No	Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan 2021-2024 (%)
3	PEMBIAYAAN	317.706.863.724	146,19%	6.	PEMBIAYAAN	229.484.311.241	249.287.079.237	175.366.405.182	130.089.400.092	-18,65%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	331.619.863.724	110,13%	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	143.059.045.092	-17,59%
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	331.619.863.724	110,13%	6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	143.059.045.092	-17,59%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13.913.000.000	-51,64%	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	12.969.645.000	0,44%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	12.969.645.000	0,44%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.913.000.000	34,46%							
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	-100,00%							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	240.634.311.241	-26,92%		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	264.287.078.857	187.786.048.359	143.059.045.092	170.527.990.928	-5,93%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

2.3.1.4 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Garut

Kemampuan keuangan daerah salah satunya dilihat dari indikator Kapasitas Fiskal Daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, definisi dari Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
PAD	= pendapatan asli daerah;
TKD	= transfer ke daerah;
PTAD	= pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	= lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	= sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	= dana otonomi khusus;
DTI	= dana tambahan infrastruktur;
DD	= dana desa;
ADD	= alokasi dana desa;
BP	= belanja pegawai;
BBH	= belanja bagi hasil;
BB	= belanja bunga;
PUD	= pembiayaan utang daerah.

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
$Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,905	Sangat Rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	Rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	Sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	Tinggi
1,615 ≤ RKFD	Sangat Tinggi

Sumber: PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 2,142 (berkategori "Sedang") dan Kabupaten Garut sebesar 0,909 (berkategori "Rendah") sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah.



Sumber: BAPPENAS (Mei, 2025)

Gambar 2.113 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

2.3.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Garut serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah.

1. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,78%. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset lancar 20,25%, Aset Tetap 2,81%, dan Investasi Jangka Panjang 3,88%. Sementara itu aset lainnya mengalami penurunan rata-rata -10.54%.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kenaikan cukup signifikan pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 116,75%. Peningkatan kewajiban ini berasal dari peningkatan pada komponen kewajiban jangka pendek yaitu utang belanja sebesar 136,14% dan utang kepada pihak ketiga sebesar 64,74%, sedangkan untuk komponen utang perhitungan kepada pihak ketiga (PFK) selama periode tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 408,09%.

Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Garut dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.119 Neraca Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	215.181.873.738,00	171.361.576.205,00	154.118.430.385,00	123.001.909.957,00	149.606.662.545,00	-7,25%
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	759.890,00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	148.585.994,00	26.229.764,00	146.404.697,00	555.593.793,00	1.181.505.366,00	191,99%
	Kas di BLUD	25.099.517.088,29	92.846.454.662,90	33.493.270.003,00	19.474.562.464,00	18.992.246.777,00	40,41%
	Kas Lainnya	631.400.862,00	181.893.584,00	84.662.280,00	5.992.922,00	45.804.736,00	111,69%
	Kas Lainnya PFK	0	0	0	0	64.587.268,00	-
	Kas di Bendahara BOS	292.911.433,00	52.818.225,00	108.300.097,00	26.978.878,00	39.595.276,00	-1,31%
	Kas di Bendahara BOK	0	0	0	0	661.416.338,00	-
	Piutang Pajak	23.165.892.632,26	27.541.096.663,26	33.503.535.473,26	38.673.904.081,26	44.915.631.007,26	18,03%
	Piutang Retribusi	3.506.380.507,00	5.760.890.587,00	7.367.946.067,00	7.843.692.103,00	15.642.269.035,00	49,52%
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.349.648.984,00	11.966.283.727,56	19.902.476.862,58	30.227.913.352,72	41.013.967.397,66	39,83%
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah	7.211.994.803,00	14.898.229.979,00	17.607.906.445,00	8.243.525.364,00	8.906.565.100,00	19,91%
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-16.032.722.299,74	-21.439.742.326,90	-29.756.383.635,62	-36.981.873.491,15	-43.530.744.774,72	28,63%
	Beban Dibayar Dimuka	7.142.319.007,92	453.822.101,37	31.216.707.809,52	38.569.992.632,12	31.703.350.585,61	1672,68%
	Persediaan	32.874.133.868,23	44.491.642.946,08	322.841.804.929,17	316.780.427.681,80	313.873.394.121,35	164,54%
	Jumlah Aset Lancar	310.571.936.617,96	348.141.196.118,27	590.635.061.412,91	546.422.619.737,75	583.117.010.668,16	20,25%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Dana Bergulir	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	1.302.948.050,00	0	-25%
	Penyisihan Dana Bergulir	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	-1.302.948.050,00	0	-25%

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	131.172.261.381,82	144.602.116.559,43	3.88%
	Jumlah Investasi Permanen	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	131.172.261.381,82	144.602.116.559,43	3.88%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	124.733.136.460,36	122.970.043.852,73	131.444.400.447,72	131.172.261.381,82	144.602.116.559,43	3.88%
1.3	ASET TETAP						
	Tanah	878.053.906.763,26	913.245.248.469,55	935.732.588.575,55	978.207.845.700,55	1.014.960.961.587,84	3.69%
	Peralatan dan Mesin	1.015.944.481.525,01	1.133.254.213.793,12	1.236.770.587.536,39	1.328.470.238.933,66	1.473.436.855.761,97	9.75%
	Gedung dan Bangunan	1.817.782.528.483,29	1.972.306.275.177,09	2.120.888.626.215,82	2.567.190.132.690,68	2.743.133.173.958,16	10.98%
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.320.942.045.325,65	1.549.985.889.907,39	1.967.498.635.786,12	2.214.027.598.153,43	2.316.419.084.477,16	15.36%
	Aset Tetap Lainnya	307.448.913.105,48	327.386.193.182,25	328.340.495.624,81	319.865.603.761,16	322.131.364.813,04	1.23%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	77.592.989.046,53	119.536.041.613,76	131.453.014.072,78	34.063.522.890,73	24.443.076.585,73	-9.58%
	Akumulasi Penyusutan	-1.799.038.400.642,41	-1.998.249.206.088,86	-3.128.651.380.856,56	-3.484.328.822.450,80	-3.912.438.451.238,97	22.82%
	Jumlah Aset Tetap	3.618.726.463.606,81	4.017.464.656.054,30	3.592.032.566.954,91	3.957.496.119.679,41	3.982.086.065.944,93	2.81%
1.4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	12.000.000.000,00	14.978.884.044,00	12.789.440.899,00	13.080.189.298,00	13.642.231.543,00	4.19%
	Jumlah Dana Cadangan	12.000.000.000,00	14.978.884.044,00	12.789.440.899,00	13.080.189.298,00	13.642.231.543,00	4.19%
1.5	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0.00%
	Tuntutan Ganti Rugi	498.229.500,00	489.829.500,00	486.629.500,00	483.729.500,00	483.729.500,00	-0.73%
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00	0.00%
	Aset Tak Berwujud	10.773.587.528,48	11.345.093.604,48	13.024.898.638,48	14.336.343.749,17	14.836.090.682,12	8.42%
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-8.042.812.664,12	-9.257.727.399,68	-10.329.281.263,72	-11.525.036.188,51	-12.516.148.458,40	11.71%
	Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0	0	22.061.002.709,00	0	0,00	-
	Dana Bergulir	0	0	0	0	1.302.948.050,00	-
	Penyisihan Dana Bergulir	0	0	0	0	-1.302.948.050,00	-

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Aset lain-lain	308.033.397.509,01	310.024.284.132,53	57.098.908.833,85	98.818.944.970,52	107.105.820.242,04	0.13%
	Jumlah Aset Lainnya	316.361.208.043,37	317.700.286.007,33	87.440.964.587,61	107.212.788.201,18	115.008.298.135,76	-10.54%
1.6	PROPERTI INVESTASI						
	Properti Investasi	0	0	0	0	6.747.350.323,00	-
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0	-2.632.908.479,20	-
	JUMLAH ASET	4.382.392.744.728,50	4.821.255.066.076,63	4.414.342.434.302,15	4.755.383.978.298,16		
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PFK)	495.220.848,00	171.633.101,00	60.135.484,00	3.300.047,00	64.587.268,00	408.09%
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.524.668.336,68	1.660.584.342,01	2.409.880.371,34	2.413.902.523,73	2.012.646.617,49	9.40%
	Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.579.340,00	0	0	0	247.198.953,00	-
	Utang Belanja	21.542.148.166,00	59.911.711.173,55	10.868.397.704,00	42.749.532.760,80	108.993.619.221,35	136.14%
	Utang Jangka Pendek Lainnya :						
	Utang Kepada Pihak Ketiga	122.516.075,00	534.226.462,00	122.516.075,00	122.516.075,00	122.516.075,00	64.74%
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	23.692.132.765,68	62.278.155.078,56	13.460.929.634,34	45.289.251.406,53	111.440.568.134,84	116.75%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.692.132.765,68	62.278.155.078,56	13.460.929.634,34	45.289.251.406,53	111.440.568.134,84	116.75%
2.3	EKUITAS DANA						
	JUMLAH EKUITAS DANA:	4.358.700.611.962,82	4.758.976.910.998,07	4.400.881.504.667,81	4.710.094.726.891,63	4.731.129.596.560,24	2.28%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.382.392.744.728,50	4.821.255.066.076,63	4.414.342.434.302,15	4.755.383.978.298,16	4.842.570.164.695,08	2.78%

Sumber: Data LKPD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024, diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas terkait neraca daerah Kabupaten Garut, dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan solvabilitas selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Garut
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rasio Lancar	13,11	5,59	43,88	12,07	5,23
2	Rasio Cepat	11,42	4,87	17,58	4,22	2,42
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset	0,005	0,013	0,003	0,010	0,023
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,005	0,013	0,003	0,010	0,024

Sumber: BPKAD (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada tabel di atas, menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Garut dalam kondisi sehat sebagaimana hasil perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas yang menghasilkan angka positif.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya.

1. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah rasio likuiditas paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya (dibayar dalam satu tahun) dengan total aset lancarnya, seperti kas, piutang, dan persediaan. Semakin besar perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 selalu berada pada angka positif, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 5,23%.

2. Rasio Cepat

Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling likuid. Hasil penghitungan rasio cepat jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu berada pada angka positif, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 2,42%.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan.

1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset pada tahun 2020 sebesar 0,005 dan pada tahun 2024 sebesar 0,023.

2. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Garut sebesar 0,005 dan tahun 2023 sebesar 0,024.

2.3.3 Kinerja Pendanaan Non-APBD

Selain pendanaan dari APBD, pembangunan daerah juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non-APBD Kabupaten Garut, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2.3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota. Berikut beberapa pendanaan yang diperoleh Kabupaten Garut dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian:

1. Kegiatan Irigasi Perpompaan
2. Irigasi Perpipaan Penambahan Target - Penambahan Anggaran
3. Irigasi Perpompaan Penambahan Target - Penambahan Anggaran
4. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)

2.3.3.2 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Jika ditinjau dari penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Garut masih belum dapat terlaksana secara optimal, inisiasi Forum CSR masih terkendala dengan langkah inisiasi yang belum sistematis dan terukur, belum sejalannya susunan keanggotaan tim fasilitasi TJSLP dengan amanat peraturan daerah tentang TJSLP, dan belum efektifnya pelaporan data realisasi program TJSLP serta belum terlaksananya *monitoring* dan evaluasi program TJSLP.

Tabel 2.121 Realisasi CSR di Kabupaten Garut tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi (Rp)	Perusahaan
2021	4.643.332.492	Dexa Medica Groups
		Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Indocement Tunggal Prakarsa (Palimanan-Cirebon) Tbk
		PT Jasa Sarana
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pos Indonesia (Persero)
		PT Tirta Gemah Ripah
2022	3.768.171.000	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Badjatex
		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		PT TD Automotive Compressor Indonesia
		Star Energy Group
2023	4.154.010.000	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten
		PT Bank Jabar Banten Syariah
		PT Migas Utama Jabar (Perseroda)
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pupuk Kujang Cikampek
		Star Energy Group
2024	4.341.508.160	PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat
		PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang
		PT Jasa Sarana
		PT Badjatex
		Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

Sumber : Realisasi CSR Kabupaten Garut dalam website https://csr.jabarprov.go.id/ diolah Bappeda (2025)

Adapun berdasarkan realisasi CSR pada tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1. PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat:
   - Pelatihan dan Pengembangan Konversi Kendaraan Listrik SMKN 2 Garut;
   - Desa Berdaya PLN : Peningkatan sarana Edukasi Pendidikan bagi wisatawan;

- Desa Berdaya PLN : Peningkatan kapasitas keberadaan pabrik es dan *cold storage* oleh Bumdes Motekar bagi para UMKM Nelayan di Samudera Jaya;
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Lingkungan.

2. PT Pertamina *Geothermal Energy* Area Kamojang:
   - Program Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) untuk mendukung SDGs poin ke-2, 8, dan 15;
   - Program Srikandi Kamojang: Ibu-ibu yang berjuang untuk stabilitas lingkungan (sanitasi dan air bersih) serta upaya mitigasi kebencanaan di daerah untuk mendukung SDGs poin ke-1 dan 13;
   - Program Mitigasi dan Tanggap Bencana Kecamatan Samarang untuk mendukung SDGs poin ke-13 dan 15.
3. PT Jasa Sarana: Program CSR Jabar Caang tahun 2024
4. PT Badjatex: Pekerjaan instalasi listrik rumah sederhana dan penyambungan listrik bagi masyarakat miskin / tidak mampu di Jawa Barat
5. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten: Pengembangan Prasarana Ibadah.

2.3.3.3 Dana Umat

Berikut merupakan jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut selama Tahun 2024.

Tabel 2.122 Realisasi Penyaluran Dana BAZNAS Tahun 2024

No.	Program	Jumlah
1	Garut Cerdas	2,768,750,000
2	Garut Sehat	1,008,740,300
3	Garut Taqwa	2,395,930,555
4	Garut Peduli	4,666,515,000
5	Garut Makmur	250,082,397
6	Administrasi	3,090,000
TOTAL		11,093,108,252

Sumber: BAZNAS (2025)

2.3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah yang digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah untuk berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah maupun skema transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan menjadi faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Garut periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah selama Periode Tahun Anggaran 2020-2024, terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

b) Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan) dari Pemerintah Provinsi;

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang melipui Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Adanya perubahan regulasi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan di tingkat daerah tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk Tahun Anggaran 2023 maupun 2024. Beberapa penyesuaian yang dilakukan selama tahun 2022 atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diantaranya:

1. Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

2. Penetapan Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Masa Transisi;
3. Penetapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan;
4. Penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
5. Penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.63-Hukham/2017, ditetapkan pula Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

2. Kebijakan Belanja

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain:

1) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya pemenuhan ketentuan perundang-undangan (*mandatory spending*), dukungan pencapaian target pembangunan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat. Adapun ketentuan *mandatory spending* yang diatur dalam regulasi pemerintah antara lain sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.123 Ketentuan *Mandatory Spending*

Jenis Belanja	Ketentuan	Dasar Hukum
Belanja Pendidikan	1. Belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja Daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal 145 ayat 1-2
	Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Jenis Belanja	Ketentuan	Dasar Hukum
	2. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan (2027).	Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal 147 ayat 1-3
Belanja pegawai	1. Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD. 2. Dalam ha1 persentase belanja pegawai tersebut telah melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan (2027).	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) Pasal 146 ayat 1-3
Belanja Unsur Pengawasan	0,3%-0,9% dari total belanja APBD **0,5% dari total Belanja APBD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)*	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Belanja Peningkatan kapasitas SDM	Minimal 0,16% untuk pemerintah Kab/Kota dari total belanja APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dana Kelurahan	1. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 2. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK. Besaran alokasi anggaran 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK; 3. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota; dan	Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah).	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA (2025)

2) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan operasional;
3) Memenuhi pelaksanaan program/proyek Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
4) Meng-akomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;

6) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
7) Memenuhi pelaksanaan program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi:

1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD.
2) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

2.3.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran:

Proporsi realisasi belanja pegawai terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi

dengan adanya kenaikan proporsi belanja pegawai di tahun 2021 dan 2024. Proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran Kabupaten Garut Tahun 2024 mencapai 41,95 %, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.124 Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja Pegawai	1.570.103.614.714	1.711.698.801.354	1.678.298.468.729	1.623.923.894.714	2.073.084.985.590
B	Total Pengeluaran (1+2)	4.587.820.976.515	4.660.752.155.581	4.703.455.777.446	4.825.245.818.050	4.941.456.267.097
1	Belanja Daerah	4.573.907.976.515	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.745.818.050	4.928.486.622.097
2	Pengeluaran Pembiayaan	13.913.000.000	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	12.969.645.000
C	Persentase (A/B*100)	34,22%	36,73%	35,68%	33,65%	41,95%

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA 2020 s.d. 2024, diolah

2.3.6 Proporsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.125 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Defisit Riil Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.496.835.424.030	4.684.404.923.197	4.626.954.746.948	4.780.438.457.960	4.968.925.212.933
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	4.573.907.976.515	4.649.602.155.581	4.688.455.777.826	4.812.745.818.050	4.928.486.622.097
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.913.000.000	11.150.000.000	14.999.999.620	12.500.000.000	12.969.645.000
A (1-2-3)	Defisit riil	-90.985.552.485	23.652.767.616	-76.501.030.498	-44.807.360.090	27.468.945.836

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024, diolah

Untuk menutup total pengeluaran yang ada, maka defisit riil ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel 2.126 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Defisit Riil Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	331.619.863.724	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	143.059.045.092
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	
B (1+2+3)	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	331.619.863.724	240.634.311.241	264.287.078.857	187.866.405.182	143.059.045.092
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	240.634.311.241	264.287.078.857	187.786.048.359	143.059.045.092	170.527.990.928

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024, diolah

Tabel 2.127 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA	Rp. (Milyar)	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	240,63	100	264,28	100	187,78	100	143,06	100	170,53	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	240,63	100	264,28	100	187,78	100	143,06	100	170,53	100

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024, diolah

2.3.7 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

2.3.7.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

a. Proyeksi Pendapatan

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta pendapatan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Adanya perubahan regulasi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang ditindak lanjuti dengan penyesuaian peraturan di tingkat daerah tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2025 maupun 2030. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun dalam UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD.

UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di mana 7 di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Air Tanah;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB. Wajib pajak untuk opsen merupakan wajib pajak atas jenis pajak PKB dan BBNKB. Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan melakukan reformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan layanan publik.

UU HKPD memberi kepastian alokasi DBH sehingga pengalokasian menjadi lebih presisi. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya (T-1) dan dengan memperhatikan kinerja daerah. Sebelumnya pada UU 33/2004, pengalokasian didasarkan pada rencana penerimaan tahun berikutnya. Artinya, potensi penerimaan DBH di 2024 akan dihitung berdasarkan realisasi di 2023, bukan berdasarkan proyeksi 2024. Pengalokasian DBH pada UU HKPD juga menekankan aspek keadilan. Berbeda dengan UU 33/2004 yang hanya mengatur pembagian DBH kepada daerah penghasil dan pemerataan atau semua daerah di dalam suatu provinsi. Dalam UU HKPD, selain menerapkan *prinsip by origin*, artinya kabupaten/kota penghasil memperoleh persentase pembagian yang lebih besar daripada kabupaten/kota lainnya non-penghasil, pengalokasian DBH juga memperhatikan eksternalitas atau dampak negatif. Kabupaten/kota yang terdampak eksternalitas negatif dari kegiatan eksplorasi sumber daya alam mendapatkan alokasi DBH sebagai kompensasi, sekaligus untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut dalam menanggulangi dampak negatif lingkungan yang terjadi.

DAU juga mengalami perubahan kebijakan dengan adanya UU HKPD. DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal. Pemerintah pusat dapat memberikan sanksi sesuai dengan kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan DAU. Jika kinerjanya baik, maka pemerintah pusat akan meng-kategorikan DAU sebagai *block grant* sehingga DAU dapat digunakan dengan leluasa. Namun, pemerintah pusat akan mengkategorikan DAU sebagai *spesific grant* apabila pemerintah daerah berkinerja buruk.

Dana Alokasi Khusus (DAK) direstrukturisasi dengan adanya penambahan komponen hibah daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pemerintah (*spesific grant*). Melalui UU HKPD, pemerintah daerah dapat menerima pengalihan belanja kementerian/ lembaga yang bersinggungan dengan daerah tersebut apabila pemerintah daerah terbukti berkinerja baik. Dana desa pun mengalami pengetatan aturan. Dana tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan target kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri.

Memasuki masa daya saing global, diperlukan pendekatan-pendekatan optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Fenomena kenaikan kunjungan wisatawan dipotret sebagai peluang ekstensifikasi pendapatan pada sektor hotel, restoran, dan jasa lain yang berkaitan dengan pariwisata. Geliat ekonomi kreatif pun harus ditangkap sebagai stimulus baru transformasi ekonomi yang secara alamiah akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kabupaten Garut termasuk salah satu daerah terdepan dalam ekonomi kreatif.

Kondisi ini diproyeksikan akan berlanjut sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang dengan asumsi pembangunan jalan tol yang melalui Kabupaten Garut dengan 2 (dua) pintu keluar, sehingga dapat mempercepat dan mengefisiensikan pergerakan barang dan jasa. Perkiraan waktu tempuh menuju ke ibu kota provinsi semula memakan waktu 2-3 jam, dapat dipangkas menjadi kurang dari 1 (satu) jam perjalanan, hal ini dapat memecah persebaran wisatawan yang berpusat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung untuk berkunjung ke Kabupaten Garut.

Optimalisasi capaian pajak kendaraan bermotor merupakan isu lain mengenai intensifikasi pendapatan daerah. Pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak berada di kisaran 52%, dengan kata lain 48% pemilik kendaraan bermotor yang notabenenya menggunakan fasilitas infrastruktur belum mendukung capaian pendapatan daerah.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah-langkah strategi secara umum yang akan dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun *roadmap* peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Penguatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi:
    a) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak
    b) Perluasan basis pajak

c) Perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi

3. Optimalisasi pemanfaatan potensi PAD daerah:
   a) Analisis potensi pajak per sektor ekonomi dan wilayah
   b) Penerapan nilai jual objek pajak (NJOP) berbasis zonasi/ZNT
4. Inovasi layanan dan kemudahan pembayaran pajak:
   a) Kanal pembayaran digital (QRIS, *marketplace*, *mobile banking*)
   b) Insentif pajak untuk peningkatan kepatuhan
5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak:
   a) Kemitraan dengan desa, kecamatan, dan pihak ketiga (ritel, perhotelan, perbankan)
   b) Integrasi data lintas perangkat daerah dan instansi vertikal
6. Menguatkan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
7. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pendapatan:
   a) *Monitoring* dan evaluasi realisasi pendapatan berbasis kinerja
   b) Audit internal terhadap piutang dan pelaporan penerimaan

Strategi-strategi tersebut bersesuaian dengan program pada Agenda Transformasi Garut Hebat terkait peningkatan pendapatan daerah yaitu Hebat Pemerintahannya (Optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi). Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025-2030, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

b. Proyeksi Belanja

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sehingga proyeksi pendapatan tahun 2025-2030 dilakukan dengan mempertimbangkan diberlakukannya UU HKPD dan proyeksi belanja mempertimbangkan dampak yang muncul dari diberlakukannya UU HKPD tersebut terhadap kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD juga secara spesifik mengatur bahwa “Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai tersebut telah melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan (2027).” Dengan kondisi proporsi belanja pegawai Kabupaten Garut Tahun 2024 sebesar 41,95% (Tabel 2.122 Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Garut Tahun 2020-2024), maka perlu dilakukan upaya kebijakan untuk mengendalikan belanja pegawai.

Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal daerah serta mendorong efisiensi dan produktivitas belanja rutin, belanja pegawai harus diupayakan untuk tetap stabil dengan mengimplementasikan skema *zero growth*. Pemerintah daerah mengacu pada arahan pemerintah pusat sesuai dengan Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 bahwa pemerintah diwajibkan menyelesaikan proses penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Mulai 1 Januari 2025, instansi pemerintah tidak diizinkan lagi untuk mengangkat tenaga non-ASN atau honorer baru.

Pada tanggal 15 April 2025, pemerintah daerah menyelenggarakan pelantikan CASN sebanyak 1.727 orang dengan rincian 156 orang CPNS (143 tenaga teknis dan 13 tenaga kesehatan) dan 1.571 orang PPPK (896 tenaga teknis, 599 guru, 76 tenaga kesehatan). Untuk selanjutnya, penataan tenaga honorer akan dilakukan sesuai dengan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu disesuaikan dengan kapasitas fiskal Kabupaten Garut.

Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menerapkan kebijakan pengendalian belanja pegawai yang lebih ketat. Apabila tidak dilakukan langkah korektif, tingginya proporsi belanja pegawai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja publik lainnya yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut akan menetapkan dan mengimplementasikan strategi pengendalian belanja pegawai secara komprehensif, antara lain melalui:

1) Optimalisasi Formasi ASN
- Melakukan perencanaan kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) secara ketat.
- Mengutamakan pengisian formasi pada jabatan yang benar-benar strategis dan mendukung pelayanan publik prioritas
- Pengadaan jumlah CASN berdasarkan jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)

2) Pengendalian Rekrutmen dan Kenaikan Pangkat
- Menyesuaikan proses rekrutmen ASN/PPPK dengan kapasitas fiskal daerah
- Mengendalikan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional yang berdampak signifikan terhadap kenaikan belanja pegawai. Pemberian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala akan diberikan tidak hanya berdasarkan masa kerja minimal, tetapi akan lebih didasarkan pada penilaian kinerja secara komprehensif dan akuntabel.

3) Efisiensi Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
- Melakukan evaluasi kelembagaan yang berdampak pada pengurangan pejabat struktural (*esselonnering*)
- Melakukan review kebijakan pemberian TPP agar lebih berbasis kinerja (*performance-based*) dan produktivitas didasarkan pada output kinerja secara akurat dan transparan

- Menyesuaikan besaran tunjangan secara proporsional terhadap kemampuan keuangan daerah

4) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Layanan

- Mengoptimalkan teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi termasuk dalam pemberian layanan serta penguatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, sehingga kebutuhan penambahan pegawai dapat ditekan

5) Penguatan Disiplin Anggaran

- Menerapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi triwulanan untuk memastikan realisasi belanja pegawai tetap terkendali.
- Mengupayakan ketercapaian target rasio belanja pegawai maksimal 30% dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan proporsi belanja pegawai secara bertahap sehingga rasio belanja pegawai dapat kembali berada pada batas ideal 30%. Dengan demikian, ruang fiskal daerah akan lebih leluasa digunakan untuk pembiayaan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya risiko pemotongan penyaluran Dana Transfer ke Daerah akibat pelampauan batas belanja pegawai.

Adapun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode tahun 2020-2024, maka dilakukan proyeksi untuk pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.128 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	5,003,417,039,778.00	4.949.585.896.424,00	5.009.918.013.408,70	5.083.463.298.175,63	5.161.395.476.355,43	5.238.972.793.227,39
4.1	Pendapatan Asli Daerah	744,670,990,352.00	770.321.164.730,00	779.819.281.530,00	801.570.158.467,00	826.715.313.713,00	850.479.332.845,00
4.1.01	Pajak Daerah	327,429,569,546.00	376.648.801.502,00	389.490.641.654,00	402.000.125.534,00	415.396.305.536,00	429.299.052.975,00
4.1.02	Retribusi Daerah	55,563,035,554.00	58.196.264.279,00	54.857.962.306,00	56.700.062.153,00	59.952.430.657,00	62.216.790.822,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,398,376,190.00	7.336.469.580,00	7.274.562.970,00	7.212.656.360,00	7.150.749.750,00	7.088.843.140,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	354,280,009,062.00	328.139.629.369,00	328.196.114.600,00	335.657.314.420,00	344.215.827.770,00	351.874.645.908,00
4.2	Pendapatan Transfer	4,248,430,708,872.00	4.179.264.731.694,00	4.230.098.731.878,70	4.281.893.139.708,63	4.334.680.162.642,43	4.388.493.460.382,39
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	3,973,063,798,000.00	3.953.230.910.000,00	3.992.763.219.100,00	4.032.690.851.291,00	4.073.017.759.803,91	4.113.747.937.401,95
4.202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	275,366,910,872.00	226.033.821.694,00	237.335.512.778,70	249.202.288.417,64	261.662.402.838,52	274.745.522.980,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10,315,340,554.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,315,340,554.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	5.159.835.739.512,00	5.296.688.327.365,46	5.807.729.669.430,70	5.871.377.299.420,30	5.872.811.265.967,83	5.860.343.358.442,62
5.1	Belanja Operasi	4.003.027.665.693,11	4.065.450.752.918,92	4.434.025.495.551,29	4.492.050.166.902,19	4.490.328.556.596,67	4.471.200.269.004,30
5.1.01	Belanja Pegawai	2.300.867.387.518,00	2.284.004.228.650,01	2.169.804.017.217,51	2.167.634.213.200,29	2.165.466.578.987,09	2.163.301.112.408,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.243.560.274.817,11	1.318.560.274.817,11	1.810.798.246.430,26	1.884.189.307.990,53	1.891.709.702.782,72	1.917.406.844.144,32
5.1.04	Belanja Subsidi	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	437.921.003.358,00	442.014.993.526,28	433.174.693.655,75	420.179.452.846,08	413.503.745.818,87	371.234.474.024,05

Kode	Uraian	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.565.000.000.00	20.757.255.925,53	20.134.538.247,77	19.933.192.865,29	19.534.529.007,98	19.143.838.427,82
5.2	Belanja Modal	360.681.183.742,00	439.053.082.346,54	573.211.590.473,41	577.279.858.430,32	578.730.652.800,58	583.733.995.198,82
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.984.292.100,00	23.199.165.251,00	30.501.096.805,21	31.111.118.741,31	31.422.229.928,73	31.736.452.228,02
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.702.889.161,00	120.821.955.037,22	158.850.635.654,91	159.027.648.368,01	159.147.924.851,69	161.784.404.100,20
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.853.784.270,00	102.805.984.297,42	135.164.142.557,88	136.367.425.409,04	136.746.099.663,13	137.138.560.660,76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.099.538.402,00	176.035.338.518,74	232.312.293.418,77	234.062.575.434,57	234.536.196.974,88	236.027.594.815,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.943.089.909,00	14.073.439.612,63	14.241.012.799,59	14.525.833.055,58	14.671.091.386,14	14.817.802.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.097.589.900,00	2.117.199.629,52	2.142.409.237,06	2.185.257.421,80	2.207.109.996,02	2.229.181.096,98
5.3	Belanja Tidak Terduga	23.750.219.312,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.750.219.312,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	772.376.670.764,89	767.184.492.100,00	775.492.583.406,00	777.047.274.087,80	778.752.056.570,59	780.409.094.239,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	34.754.788.367,26	40.000.000.000,00	44.354.860.396,00	45.870.018.768,70	47.534.873.619,30	49.151.584.379,70
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	737.621.882.397,63	727.184.492.100,00	731.137.723.010,00	731.177.255.319,00	731.217.182.951,29	731.257.509.860,80
	Surplus/Defisit	-156,418,699,734.00	-347,102,430,941.47	-797,811,656,022.00	-787,914,001,244.67	-711,415,789,612.41	-621,370,565,215.23

Sumber : BPKAD dan BAPENDA Kabupaten Garut, 2025

2.3.7.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:

a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
b. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Tabel 2.129 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.	PEMBIAYAAN	163,527,990,928.00	170,527,990,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	170,527,990,928.00	170,527,990,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170,527,990,928.00	170,527,990,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	7,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	7,109,291,194.00	-176,574,440,013.47	-797,811,656,022.00	-787,914,001,244.67	-711,415,789,612.41	-621,370,565,215.23

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2020 s.d. 2024

**Penyertaan modal akan disesuaikan dengan hasil kajian investasi setiap tahunnya.*

2.3.7.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, merupakan gambaran kemampuan pendanaan prioritas pembangunan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Tabel 2.130 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	5,003,417,039,778.00	4,949,585,896,424.00	5,009,918,013,408.70	5,083,463,298,175.63	5,161,395,476,355.43	5,238,972,793,227.39
2	Pencairan cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	7,109,291,194.00	(176,574,440,013.47)	(797,811,656,022.00)	(787,914,001,244.67)	(711,415,789,612.41)	(621,370,565,215.23)
	Total Penerimaan	5,010,526,330,972.00	4,773,011,456,410.54	4,212,106,357,386.70	4,295,549,296,930.97	4,449,979,686,743.02	4,617,602,228,012.16
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	2,300,867,387,518.00	2,284,004,228,650.01	2,169,804,017,217.51	2,167,634,213,200.29	2,165,466,578,987.09	2,163,301,112,408.11
5	Pengeluaran Pembiayaan	7,000,000,000.00	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2,702,658,943,454.00	2,489,007,227,760.52	2,042,302,340,169.19	2,127,915,083,730.67	2,284,513,107,755.93	2,454,301,115,604.05

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, 2025

2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan kedalam 2 (dua) kelompok prioritas alokasi yaitu :

1) Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2) Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kerangka pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, disamping dari jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang ada, juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

2.3.7.4 Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Walau demikian, peluang untuk sumber-sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2025-2030 telah mengidentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD, antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam rangka pembangunan Kabupaten Garut, selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Provinsi. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/koa.

b. APBD Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis

dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

b. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP merupakan sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. TJSLP dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber kolaborasi pendanaan pembangunan yang potensial untuk dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan TJSLP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kabupaten Garut diturunkan kedalam 2 (dua) kebijakan yakni:

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengatur mengenai Perencanaan dan Program Pembangunan, Pelaksanaan, Program dan Bidang Kerja, Kelembagaan, Penghargaan dan Sistem Informasi TJSLP;
- Keputusan Bupati Garut Nomor 446/Kep.1184.Bappeda/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menetapkan susunan keanggotaan beserta uraian tugas dari Tim Fasilitasi TJSLP;

c. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Pemerintah Kabupaten Garut menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu,

teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar".

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiayaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai akselerasi pembangunan.

d. Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan Kabupaten Garut adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kabupaten Garut yang relatif besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. Namun demikian, potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait zakat, pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

e. Pendanaan Non-Pemerintah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Govermental Organization* (NGO)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Govermental Organization* (NGO) dapat berperan sebagai *co-funding partner* bersama pemerintah daerah dalam berbagai sektor prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. LSM atau NGO dapat juga berkontribusi melalui dana hibah atau bantuan dari donor nasional maupun internasional

sehingga menjadi sumber pendanaan pembangunan tambahan bagi pemerintah daerah.

Beberapa LSM atau NGO yang telah menginisiasi kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut diantaranya yaitu Mercy Corps Indonesia dengan program *Brewing Change: Women Empowerment in Coffee Origin Communities in Indonesia* (BENTANI), PD Aisyiah dan UNFPA terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) dan BRAC Indonesia yang mengawal pendekatan graduasi dalam penanggulangan kemiskinan. Kedepannya, diharapkan akan lebih banyak LSM dan NGO yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Garut.

2.4 Permasalahan Dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Garut merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Aspek Geografis

1. <u>Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup</u>

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Garut masih dihadapkan dengan pemenuhan kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih rendah dari kewajiban minimal 10% dan baru terpenuhi 6%. Permasalahan persampahan masih dihadapkan dengan pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce,* dan *Recycle* (TPS3R) yang belum berjalan secara optimal, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, dikuti dengan area TPA yang masih belum ideal mengakibatkan sering terjadinya kebakaran di area TPA yang juga menyebabkan longsor pada bangunan *leachate*/ air lindi. Dalam hal pengelolaan limbah Kabupaten Garut belum memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ideal dan penanganan limbah industri kulit belum optimal serta ketaatan pelaku usaha masih rendah dalam hal komitmen pengelolaan lingkungan, termasuk gedung kantor milik pemerintahan. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca belum optimal karena memerlukan kolaborasi antar sektor. Penanganan lahan kritis kurang efisien dan anggaran belanja yang dikeluarkan tidak sebanding dengan peningkatan IKL (Indeks Kualitas Lahan).

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang pada tahun 2024 telah mencapai 85,08%. Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam pemanfaatan fungsi tata ruang adalah seperti alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lahan non pertanian, permasalahan perkotaan masih dihadapkan dengan wajah perkotaan beserta jaringan utilitasnya masih belum tertata dengan baik, penggunaan badan jalan untuk kegiatan sektor informal (Pedagang Kaki Lima, pasar tumpah, parkir liar dan lain sebagainya) masih ditemui dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan zonasi pemanfaatan ruang maupun pengaturan penerbitan perizinan.

Dari sisi pemenuhan dokumen Rencana Tata Ruang, dokumen Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) yang masih berlaku perlu dilakukan reviu untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini dan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih dalam proses penyusunan dan belum ada yang ditetapkan. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, masih dilakukan secara pasif karena kurangnya Sumber Daya Manusia. Proyek strategis masih terbentur dengan regulasi kawasan strategis yang menjadi dasar penataan lingkungan, masih terdapat proyek strategis yang belum tuntas di periode pembangunan sebelumnya seperti jalan poros, jalan dan jembatan baru, bangunan gedung serta belum tersedia Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk penataan kawasan strategis.

3. Tingginya Risiko Bencana

Kondisi wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai karakteristik pegunungan yang berbukit-bukit, memiliki curah hujan yang tinggi serta berada pada jalur gempa tektonik, dan perairan pantai selatan yang merupakan daerah lempengan lapisan bumi menjadikan Kabupaten Garut sebagai kawasan rawan bencana, diantaranya sebagai kawasan rawan bencana gunung api, gerakan tanah, tsunami, abrasi dan tanah longsor. Penanganan bencana di Kabupaten Garut masih dihadapkan pada belum maksimalnya upaya pencegahan dan mitigasi yang mengakibatkan tingginya kerentanan yang berdampak pada kerugian ekonomi yang besar, belum dimilikinya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang menjadi panduan penanggulangan bencana, serta belum adanya rencana Kontinjensi Sungai Cimanuk dalam rangka pengurangan risiko serta peningkatan kesiapsiagaan banjir dan longsor. Selain itu, mekanisme penanganan tanggap darurat bencana masih belum jelas serta Kabupaten Garut masih perlu melaksanakan upaya penurunan kerentanan serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Dalam penanganan bencana kebakaran masih ditemui permasalahan manajemen cakupan luas wilayah penanganan kebakaran yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana pemadam

kebakaran, kualitas dan kuantitas SDM pemadam kebakaran, Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan prosedur darurat mengurangi efektivitas upaya manajemen kebakaran, serta belum dimilikinya keterampilan atau SOP penanganan bahan berbahaya dan beracun.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Meskipun kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut menunjukkan kinerja yang cukup positif yang mencerminkan ketangguhan daerah dalam menghadapi tekanan eksternal, khususnya akibat pandemi COVID-19, capaian LPE Kabupaten Garut sejak tahun 2022 selalu berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat, capaian LPE Kabupaten Garut Tahun 2024 menempati peringkat 8 terrendah. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kontribusi dari masing-masing kategori lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Garut menunjukkan masih relatif tradisionalnya perekonomian Garut, dimana kategori (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih sangat mendominasi dengan *share* mencapai 36 persen. Namun demikian, dari sisi produktifitas dan nilai tambah produk pertanian masih perlu dioptimalkan. Selain itu, hilirisasi produk pertanian belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari belum optimalnya *share* industri pengolahan. Keterkaitan sektor pertanian ke hilir (*foreward linkage*) yang sangat potensial pun masih belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Angka kemiskinan Kabupaten Garut pada tahun 2024 masih berada pada angka 9,68%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 259.320 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 7,46 % dan Nasional sebesar 9,03%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut berada dalam urutan ke-9 tertinggi dari 27 Kabupaten/Kota. Adapun berdasarkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Garut menempati posisi ke-dua diantara Kabupaten/Kota di Jawa Barat dibawah Kabupaten Bogor.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Garut Tahun 2024 masih berada pada angka 6,96% dan masih lebih tinggi dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tingkat Provinsi Jawa Barat (6,75 persen) dan nasional (4,91 persen). Tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Garut diantaranya yaitu dominasi sektor informal dan rendahnya kualitas atau kompetensi angkatan kerja. Diperlukan upaya-upaya serius dalam rangka menciptakan lapangan kerja

berkualitas, mengurangi kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*) melalui pelatihan vokasi, meningkatkan partisipasi angkatan kerja muda, serta mitigasi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk para pekerja pun perlu diperhatikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaannya termasuk untuk para pekerja rentan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Status pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 mencapai 69,91. Angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/ kota lain, Kabupaten Garut masih berada pada peringkat ke-26, masih menjadi Kabupaten dengan capaian IPM ke-2 terendah di Provinsi Jawa Barat dan terpaut cukup jauh dengan IPM Jawa Barat (74,92) dan Nasional (75,02). Faktor yang menyebabkan kendala akselerasi peningkatan IPM diantaranya karena komponen-komponen IPM tidak secara bersama-sama mengalami kenaikan, yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak yang diukur dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli.

Dari dimensi pendidikan, pencapaian Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS tahun 2024 sebesar 7,85 tahun atau setara dengan kelas VII, hanya meningkat 0,01 tahun dari tahun sebelumnya. Pencapaian RLS tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat (8,87 tahun) dan Nasional (8,85 tahun) yaitu masing masing terpaut 1,02 tahun dan 1 tahun. Kondisi tahun 2024, dari sisi nilai RLS berada pada peringkat ke-21 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Garut tahun 2024 sebesar 12,17 tahun masih terpaut 0,63 tahun dari HLS Jawa Barat (12,8 tahun) dan masih terpaut 1,04 tahun dari HLS Nasional (13,21 tahun). Kondisi tahun 2024, capaian HLS berada pada peringkat ke-24 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita penduduk Garut tahun 2024 mencapai Rp 9,168 juta per kapita per tahun. Namun demikian, capaian pengeluaran per kapita tahun 2024 berada dibawah angka pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat (12,16 juta Rupiah) dan nasional (12,34 juta Rupiah). Kondisi tahun 2024, dari sisi nilai pengeluaran per kapita berada pada peringkat ke-25. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut masih berada di peringkat 2 terbawah jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Jawa Barat.

4. Prevalensi *Stunting*

Prevalensi *Stunting* Garut terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, tercatat pada tahun 2021 prevalensi *stunting* sebesar

35,2%, dan pada tahun 2024 menurun signifikan menjadi 14,2%. Angka *stunting* Kabupaten Garut tahun 2024 merupakan angka *stunting* terendah ke-6 dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata stunting di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Meskipun sudah jauh menurun, berarti sekitar 14 dari setiap 100 balita masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan belum mencapai target pada RPJMD Tahun 2019-2024 sebesar 14 %.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Beli masyarakat relatif rendah

Hal ini sebagaimana tercermin dari indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Garut yang masih berada di peringkat 25 atau 2 terbawah dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar Rp 9,168 juta per kapita per tahun. Rendahnya pengeluaran per kapita salah satunya diakibatkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Dominasi sektor pertanian tradisional serta ketergantungan terhadap sektor informal, masih tingginya tingkat kemiskinan serta upah pekerja yang cenderung rendah menjadi faktor-faktor penyebab kondisi ini.

2. Belum optimalnya pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan rumah tangga per kapita

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Garut secara nominal mencapai Rp. 1.083.996 per bulan yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan (*food*) sebesar Rp. 647.995 (59,78%) dan pengeluaran konsumsi non pangan (*non-food*) sebesar Rp. 436.001 (40,22%). Proporsi pengeluaran pangan yang lebih besar dari proporsi pengeluaran non-pangan (akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, transportasi dan komunikasi) menunjukkan adanya indikasi daya beli masyarakat yang masih rendah dan rendahnya kualitas hidup. Mengacu pada Engel's Law atau Hukum Engel, semakin miskin suatu rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi pengeluaran yang digunakan untuk pangan. Masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lebih maju akan memiliki proporsi konsumsi non-pangan (barang dan jasa selain makanan) yang lebih besar seiring dengan kenaikan pendapatan.

3. Belum optimalnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian.

Meskipun sektor pertanian menjadi kontributor tertinggi terhadap PDRB Lapangan usaha Kabupaten Garut yakni sebesar 36% namun masih ditemui berbagai permasalahan. Tidak prospektifnya sektor ini dikarenakan saat ini mayoritas produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Upaya peningkatan nilai hasil pertanian, peternakan, perikanan dari hulu hingga hilir belum optimal dilakukan di Kabupaten Garut. Hilirisasi sektor ini terkendala karena belum adanya basis data kondisi dan kebutuhan

infrastruktur pertanian, serta masih terdapat kondisi infrastruktur pertanian yang rusak akibat dari bencana alam. Masih rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur pertanian, yang terlihat dari belum bersinerginya kewenangan pembangunan infrastruktur pertanian yang lintas instansi. Selain itu, sulitnya akses penerapan teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan di Kabupaten Garut, akibat literasi teknologi masyarakat yang kurang serta karakteristik medan dari Kabupaten Garut sendiri yang cukup beragam secara geografis.

4. Belum optimalnya nilai tambah ekonomi dari pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Nilai tambah ekonomi sektor pariwisata masih terbentur dengan karakteristik atraksi pariwisata yang masih homogen, kurangnya promosi pariwisata, aksesibilitas relatif belum memadai, durasi tinggal wisatawan masih singkat, moda transportasi untuk mencapai objek wisata masih minim, serta masih minimnya pemahaman wisata di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.

5. Pembangunan antar wilayah belum merata.

Kabupaten Garut memiliki luas wilayah mencapai 3.107,05 km2, secara administratif terbagi menjadi 42 kecamatan. Dalam bidang infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pada tahun 2024 mencapai 56,94% dengan kondisi jalan mantap sepanjang 2.221,80 Km, jalan rusak ringan sepanjang 549,99 Km, dan rusak berat 1.130,21 Km. Kondisi jalan rusak didominasi pada Kawasan Pedesaan, berdasarkan data pada tahun 2024 terdapat 916,2 Km jalan desa dengan kondisi rusak berat dan 443,28 Km dengan kondisi rusak ringan. Kemudian masih belum terlayaninya seluruh luas areal pertanian oleh irigasi teknis di Kabupaten Garut. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas secara merata untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah, terlebih lagi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, strategi untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan salah satunya adalah melalui penyediaan infrastruktur daerah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

6. Kasus kriminal, kerukunan umat beragama serta ketahanan sosial, ekonomi dan budaya

Per tahun 2024, jumlah kasus kejahatan cenderung menurun dari tahun 2023 dari 2.593 kasus menjadi 1.526. Dengan Angka Kriminalitas pada tahun 2024 mencapai 5,6 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 5 tindak kriminal. Kondisi ini masih perlu menjadi perhatian bersama dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal penyebaran paham intoleransi dan radikalisme masih perlu menjadi perhatian, belum optimalnya kerukunan antar umat beragama juga masih dipengaruhi oleh adanya aliran

menyimpang, masih terdapatnya organisasi kemasyarakatan destruktif dan angka konflik sosial.

7. Rasio Ketergantungan semakin meningkat

Semakin bertambahnya penduduk usia lanjut di Kabupaten Garut akan meningkatkan Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif (64+) terhadap penduduk usia produktif (14-64). Rasio ketergantungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga jika rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Garut meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut dapat melambat jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat terhadap hak usia lanjut. Begitu pula jika penduduk usia produktif tidak dibekali dengan kapasitas atau kompetensi yang memadai untuk dapat berkontribusi terhadap perekonomian, maka penduduk usia produktif ini pun akan menjadi beban untuk perekonomian daerah.

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kualitas dan Akses Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut adalah 86,53. Secara kumulatif, hasil tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 yaitu 68,5. Berikut merupakan catatan pada evaluasi RB tahun 2024 meliputi RB General dan RB Tematik :

a. RB General:

- Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
- Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
- Penganggaran atas Rencana Aksi berpotensi tidak efisien.

b. RB Tematik:

- Pentapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait;
- Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan;
- Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
- Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan;
- Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;

Selanjutnya, meskipun Indeks Kepuasan Masayarakat sudah mencapai kategori ”Baik”, kondisi di lapangan masih menunjukan adanya ketidakpuasan dalam pelayanan publik sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat melalui akun media sosial.

2. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara untuk berkehidupan layak yang memiliki target 100% di setiap jenis pelayanan. Sampai tahun 2024, Capaian pelayanan dasar SPM Pendidikan masih dibawah standar yang ditetapkan. Seluruh jenis pelayanan pada bidang pendidikan seharusnya mencapai 100 tidak dapat mencapai target tersebut, diantaranya jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 95,68%, kemudian untuk indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru dapat mencapai 95,8% dan untuk indikator jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/SMP) sebesar 97,73%.

3. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

Mayoritas Capaian pelayanan dasar SPM kesehatan pada tahun 2023 belum mampu mencapai target, kisaran pencapaian pelayanan dasar berada pada rentang 89% hingga 100%, adapun capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian jenis pelayanan dasar lainnya adalah pada jenis pelayanan dasar pelayanan pada kesehatan ibu bersalin, hal ini diakibatkan oleh akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan atau kelahiran seperti puskesmas, klinik maupun bidan masih terbatas dikarenakan aksesibilitas yang masih terbatas terutama di wilayah perdesaan.

Permasalahan kesehatan lainnya yakni angka kematian bayi, pada tahun 2024 terdapat 357 kasus kematian, walaupun angka tersebut menurun dari tahun 2023 yakni mencapai 320 kasus kematian. Jika dibandingkan dengan kejadian di tahun 2020 telah bertambah 147 kasus kematian. Sama halnya dengan angka kematian neonatal yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian, tingkat prevalensi tuberkulosis dan tingkat kematian akibat tuberkulosis menjadi permasalahan yang harus memperoleh perhatian khusus.

4. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Permukiman

Capaian pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2024 masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yakni cakupan sanitasi layak yang baru mencapai 68,53 %. Kabupaten Garut juga masih memiliki permasalahan terkait kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah yang belum optimal karena belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan. Adapun cakupan air minum layak

masih terkendala oleh kualitas air baku serta kuantitas dan ketersediaan air baku yang belum merata. Persoalan lain terkait dengan penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang yakni persentase kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) yang baru mencapai 56,94%. Hal ini terjadi belum optimalnya kelengkapan jalan seperti drainase, belum optimalnya pemeliharaan jalan dan pengecekan kualitas konstruksi. Kondisi jalan yang belum mantap masih ditemui di area perkotaan dan perdesaan. Kemudian, pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya di wilayah perkotaan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang berakibat pada munculnya area genangan hingga banjir. Pembangunan yang tidak diiringi oleh perbaikan saluran drainase, pengelolaan sampah serta keterbangunan ruang terbuka hijau menjadikan aliran *run off* bahkan banjir tidak dapat terhindarkan ketika terjadinya hujan. Selain itu, masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut sejumlah 27.590 unit. Kabupaten Garut masih menempati urutan kedua terbawah untuk persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Barat dengan capaian 34,61%.

5. Belum Optimalnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat Sasaran

Akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum optimal dan Perlindungan dan mitigasi bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan belum optimalnya integrasi layanan sistem administrasi kependudukan sebagai basis data perencanaan pembangunan masih menjadi permasalahan dalam perwujudan perlindungan sosial di Kabupaten Garut masih menjadi permasalahan. Permasalahan dalan upaya perlindungan sosial ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi data, keterbatasan sarana dan prasarana, serta fasilitas operasional untuk perlindungan dan mitigasi bencana, belum dilakukannya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan sistem data lainnya.

6. Penurunan Produksi Pertanian dan Sistem Pangan Masyarakat

Kabupaten Garut dihadapkan dengan penurunan produksi pertanian yang disebabkan oleh adanya hama dan penyakit, efek samping pupuk kimia, keterbatasan akses pupuk dan air yang mayoritas lahan hanya mengandalkan air hujan untuk pengairannya (contoh: sentra bawang merah), serta penurunan kualitas benih. Tingginya alih fungsi pertanian dikarenakan oleh kebijakan LP2B/ LSD tidak diimbangi dengan insentif, sanksi dan pengawasan (baru akan didata). Selain itu regenerasi petani rendah dan stigma profesi petani sebagai pekerjaan kotor, mahal, mekanisasi lambat, serta pendapatan stabil rendah. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas petani merupakan usia diatas 45 tahun sedangkan lahan

pertanian di Kabupaten Garut yang cenderung berkontur tentunya memerlukan teknologi dalam kegiatan pertanian.

Sementara itu, sistem pangan daerah masih dihadapkan kepada harga pangan yang fluktuatif, daerah rentan rawan pangan masih ditemui, serta pemanfaatan pangan masih rendah termasuk konsumsi protein yang masih rendah. Sektor peternakan masih dihadapkan dengan sulitnya akses pakan ruminansia dan unggas, terjadi penurunan jumlah peternak sapi perah sebesar 40% karena regenerasi peternak rendah serta kualitas sumber daya genetik menurun berpengaruh terhadap produktivitas, terindikasi *inbreeding* atau penyakit pasca PMK. Disisi lain sektor perikanan dihadapkan dengan mahalnya pakan budidaya ikan yang mencapai 70% dari biaya produksi. Tidak tersedianya pelabuhan berkapasitas besar sehingga kapal dengan tonase besar tidak bisa melabuhkan ikan di Kabupaten Garut, serta terbatasnya alat tangkap nelayan menyebabkan hasil perikanan tangkap belum optimal.

7. Belum Optimalnya Pengembangan Daya Tarik dan Penguatan Manajemen Kepariwisataan

Pengembangan pariwisata masih dihadapkan pada sistem tiket yang belum terintegrasi dan menggunakan *e-ticketing*, data pengunjung dan pajak perhotelan masih sukar diverifikasi, terdapat anggapan bahwa berwisata di Garut masih mahal dan belum terdapatnya suasana kekhasan berwisata di Garut serta belum terpasarkannya budaya di destinasi wisata dan hal yang mayoritas ditemui di setiap objek wisata adalah sarana dan prasarana yang kurang terpelihara serta akses ke destinasi wisata yang rusak.

8. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan yang dilatarbelakangi oleh ketidakakuratan data administrasi kependudukan dengan data sistem lainnya berdasarkan kerja sama dengan lintas sektor, dan keterbatasan akses terhadap layanan terutama di daerah pelosok, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan serta pengembangan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan.

Dalam pelaksanaan sistem merit, pengelolaan kepegawaian masih ditemui permasalahan belum adanya sistem penilaian terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja belum diterapkannya manajemen talenta secara merata, sistem dan layanan kepegawaian masih memerlukan proses yang panjang, belum terpenuhinya seluruh jabatan oleh ASN pada setiap perangkat daerah dan belum mutakhirnya *database* kepegawaian serta kurangnya akuntabilitas dan pengawasan. Selain itu, indeks profesionalitas ASN masih dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pendidikan formal berdasarkan kompetensi jabatan dan strategi pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun non-klasikal.

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi teknologi pelayanan yang ada oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, daerah *blank spot*, kurangnya sosialisasi, sumber daya aparatur yang kurang kompeten, adanya sikap apatis dari masyarakat.

9. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta penanganan ketertiban umum

Pelanggaran yang masih ditemui dalam hal penegakan hukum dilatarbelakangi oleh belum intensnya pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada melalui Sosialisasi Perda dan Perkada serta pengawasan terhadap Masyarakat, Badan Hukum dan Aparatur dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang diharapkan bisa menjadi agen dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat. Terjadinya pelanggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

10. Belum optimalnya perlindungan keluarga, anak, pemuda, dan kesetaraan gender

Permasalahan masih dipengaruhi oleh komitmen, koordinasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kesediaan data terpilah Gender, Alat Analisis Gender, serta partisipasi masyarakat. Masih tingginya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak tahun 2024 sebanyak 127 kasus dipengaruhi oleh Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Masih kurang masifnya sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta masih minimnya sarana Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu, dalam hal perlindungan keluarga masih dihadapkan pada Kualitas Kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, Rendahnya Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga serta belum sinergisnya layanan kepemudaan penunjang Indeks Pembangunan Pemuda.

2.4.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Garut tahun 2025-2029.

A. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2025-2029, beberapa hal yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Perlunya pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan DDDTLH

Bila ditinjau dari hasil analisis Daya dukung dan daya tampung baik pangan maupun air di Kabupaten Garut bahwa status daya dukung pangan di Kabupaten Garut menunjukkan masih ada 91,53% dari total luas Kabupaten Garut yang belum melampaui daya dukung pangan. Terdapat beberapa kecamatan yang seluruh wilayahnya belum melampaui daya dukung pangan, yaitu Kecamatan Cihurip, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng, dan Kecamatan Pendeuy. Selain itu, terdapat pula kecamatan yang luas wilayah belum melampaui daya dukung pangannya di bawah 50%, yaitu Kecamatan Tarogong Kidul dan Kecamatan Wanaraja. Isu pembangunan berkelanjutan ini dipengaruhi oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 yakni menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

2. Kerentanan perubahan iklim, rawan bencana dan pemulihan DAS

Dalam Isu ke 2 yang berkaitan dengan TPB 11 Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan dan TPB 13 mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, masih ditemui beberapa permasalahan, hal ini dicerminkan oleh adanya peningkatan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan indeks resiko bencana yang belum mampu mencapai target nasional.

3. Belum optimalnya pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan

Isu ke 3 yang berkaitan dengan TPB 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, masih dihadapkan pada permasalahan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan yang belum mampu mencapai 100% target nasional sama halnya dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%.

4. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan ke 4 yang berkaitan dengan TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua dan TPB 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan/ gap utamanya dalam ketersediaan data juga dari segi pencapaian. Seperti PDB per Kapita, Persentase tenaga kerja formal, dan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB belum mencapai target.

5. Belum optimalnya penguatan SDM berdaya saing, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

Isu ke 5 berkaitan dengan TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, TPB 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia dan TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, masih dihadapkan kepada masalah antara lain angka kemiskinan yang masih tinggi, Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan perlu ditingkatkan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan, Angka kematian balita dan angka kematian bayi yang masih tinggi, serta Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat masih perlu ditingkatkan.

6. Belum optimalnya infrastruktur berkualitas terpadu dan penataan utilitas

Isu ke 6 yang berkaitan dengan TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk dan TPB 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan, masih dihadapkan pada permasalahan seperti Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan, serta masih perlunya Peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

7. Belum optimalnya tata kelola dan kerjasama dengan wilayah berbatasan

Isu ke 7 yang berkaitan dengan TPB 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan TPB 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

B. Isu Strategis Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu :

1. <u>Isu Pembangunan Jangka Menengah</u>

   a. *Aging Population* Negara Maju

      Pada periode pertama pelaksanaan RPJMN diprediksi bahwa usia produktif di negara maju akan mengalami penurunan, penduduk usia lanjut terus meningkat bahkan di Jepang penduduk usia lanjut mencapai lebih darri 30%. Indonesia memiliki jumlah pendudukan usia lanjut mencapai 12% pada tahun 2023 sehingga berbagai fasilitas pelayanan lansia harus dipersiapkan. Potensi pariwisata Indonesia yang beranekaragam

dapat dimanfaatkan dan didorong untuk penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

b. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia

   Hilirisasi dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong pengembangan teknologi dan keahlian tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di sektor industri yang lebih maju dan lebih berkembang. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

c. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral

   Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.

d. Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global

   Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan. Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan sebagai langkah untuk menembus pasar ekspor dan tetap bersaing di pasar global.

e. Tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan

   Transisi energi akan membuka peluang baru dan lapangan kerja baru, peningkatan kebutuhan keahlian inovasi teknologi dan digitalisasi, terbukanya peluang ekonomi baru, ekonomi hijau untuk mempercepat pemulihan global. Perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya Pembangunan PLT EBT di luar pulau jawa untuk mendorong pemerataan.

2. <u>Isu Kewilayahan Jawa-Bali</u>

   a. Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur, serta daerah kepulauan
   b. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa
   c. Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri
   d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian
   e. Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri

f. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19

C. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan permasalahan signifikan yang dihadapi sampai tahun 2024, isu pembangunan dalam West Jawa Development Forum (WJDF), serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode tahun 2025-2029 meliputi isu global, isu nasional dan isu regional Jawa Bali. Adapun Isu Strategis Provinsi Jawa Barat 2025-2029 sebagai berikut:

1. *Green dan Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan dalam berinvestasi di dunia pendidikan, pelatihan, inovasi pendidikan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penanganan kesenjangan pembangunan melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perlunya perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan di Jawa Barat.

5. Keberlanjutan Penataan Ruang

Penataan ruang perlu menciptakan keberlanjutan pembangunan sekaligus keberlanjutan lingkungan yang sehat, produktif, dan inklusif bagi generasi saat ini dan masa depan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang.

6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep dan implementasi tata kelola yang baik (*good governance*) dan optimal dalam mendukung pembentukan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan seta mendorong pengelolaan daerah dengan adil, efektif, dan transparan.

D. Telaah Isu Strategis Kabupaten Berbatasan

Secara Geografis Kabupaten Garut berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Barat di sebelah utara, Garut berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Di sebelah timur, Garut berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Dalam menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut dengan Kabupaten berbatasan maka ditelaah isu strategis pembangunan kabupaten berbatasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sumedang

   Berdasarkan isu strategis yang diuraikan Kabupaten Sumedang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) isu strategis yang diuraikan sebagai berikut:
   a. Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
   b. Tata Kelola Pemerintahan Dan Profesionalitas Aparatur;
   c. Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah;
   d. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif;
   e. Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.

2. Kabupaten Tasikmalaya

   Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dihasilkan 9 (Sembilan) Isu Strategis yang kemudian disandingkan dengan Isu Strategis Kabupaten Garut diuraikan sebagai berikut:
   a. Peningkatan Infrastruktur;
   b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
   c. Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan;
   d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana;
   e. Percepatan Pembangunan Desa berbasis Potensi Lokal yang Didukung Sektor Digital;
   f. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Potensial;
   g. Penciptaan Iklim Investasi untuk Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja;
   h. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   i. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

3. Kabupaten Cianjur

   Kabupaten Cianjur memiliki 9 (Sembilan) Isu Strategis yang kemudian disandingkan dengan Isu Strategis Kabupaten Garut diuraikan sebagai berikut:
   a. Penataan Daerah;
   b. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
   c. Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan;

d. Transformasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
e. Pariwisata Berkelanjutan;
f. Kemiskinan dan Pengangguran;
g. Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan Serta Reformasi Birokrasi Hulu dan Hilir;
h. Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Daerah;
i. Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah.

4. Kabupaten Bandung

Isu Strategis Kabupaten Bandung disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan di Kabupaten Bandung, Isu global, isu nasional, isu regional, dan Isu RPJPD dan Isu KLHS Kabupaten Bandung. Adapun Isu Strategis Kabupaten Bandung Berjumlah 7 (tujuh) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana;
b. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
c. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan;
d. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
e. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
f. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan;
g. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

E. Isu Strategis Kabupaten Garut

Isu Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan permasalahan signifikan yang dihadapi sampai tahun 2024, isu pembangunan aktual, isu pembangunan berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2045 serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode tahun 2025-2029 meliputi isu global, isu nasional dan isu Provinsi Jawa Barat.

Secara ringkas, teknik penyimpulan isu strategis daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.131 Teknik Penyimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS	ISU STRATEGS
Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.716.950 jiwa dan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	*Aspek Kesejahteraan Masyarakat:* • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih ke 3 terendah di Jawa Barat dengan akar masalah masih rendahnya pemerataan akses dan pendidikan berkualitas, ketimpangan layanan kesehatan dan pendapatan atau daya beli masyarakat yang masih rendah. • Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan pada level Provinsi dan Nasional serta menempati peringkat kedua jumlah penduduk miskin paling banyak dibandingkan Kab/Kota di Jawa Barat. • Prevalensi *stunting* masih berada diatas provinsi Jawa Barat dengan akar masalah kurangnya edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu balita dan belum meratanya pelayanan kesehatan ibu dan anak. *Aspek Daya Saing Daerah:* Kasus kriminal, kerukunan umat beragama serta ketahanan sosial, ekonomi dan budaya *Aspek Pelayanan Umum:* • Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dengan akar masalah distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum merata serta sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan yang masih terbatas dan tidak merata. • Belum optimalnya ketahanan keluarga, pembangunan pemuda dan olahraga, serta kesetaraan gender. • Rendahnya literasi gender dan hak anak, belum maksimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak • Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dengan akar masalah basis data kemiskinan dan kerentanan sosial belum akurat dan terbarukan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi program belum berjalan maksimal	1. Belum optimalnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial	Global: 1. Demografi global 2. Disrupsi teknologi 3. Urbanisasi dunia Nasional: Bonus demografi Indonesia Provinsi Jawa Barat: Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya Saing

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS	ISU STRATEGS
Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa Barat Bagian Selatan dengan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yaitu agribisnis, perikanan dan pariwisata. Dalam perspektif kewilayahan, Kabupaten Garut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan.	*Aspek Kesejahteraan Masyarakat:* • Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masih belum optimal dengan akar masalah belum optimalnya nilai tambah dan daya saing sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan dan perikanan, pariwisata, serta sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, UMKM dan industri. • Angka pengangguran masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran pada level Provinsi dan Nasional dengan akar masalah terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan formal, kapasitas angkatan kerja yang belum memadai salah satunya akibat *mismatch* antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan *Aspek Daya Saing Daerah:* • Daya beli masyarakat relatif rendah (3 (tiga) terendah dalam pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi non pangan rumah tangga per kapita) • Belum optimalnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, sektor pariwisata dan jasa produktif lainnya *Aspek Pelayanan Umum*: Belum optimalnya pengembangan daya tarik dan penguatan manajemen kepariwisataan dengan akar masalah promosi pariwisata yang belum terkoordinasi dan masih bersifat parsial, infrastruktur pendukung pariwisata yang belum optimal, serta kolaborasi dan sinergi *pentahelix* yang perlu ditingkatkan.	2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Global: 1. Geopolitik dan geoekonomi 2. Perdagangan internasional Nasional: Ekonomi hijau dan ekonomi biru Provinsi Jawa Barat: *Green* dan *Blue Economy* serta pembangunan inklusif	Penguatan pondasi perekonomian sektor unggulan daerah
Kabupaten Garut memiliki 19.064 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 10.656 PNS dan 8.408 PPPK yang tersebar di 32	*Aspek Pelayanan Umum:* • Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kualitas dan akses pelayanan publik dengan akar masalah antara lain penerapan sistem merit yang belum optimal, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau digitalisasi pelayanan publik belum terintegrasi secara menyeluruh, akses serta kualitas layanan publik belum merata. Selain itu juga dari sisi akuntabilitas	3. Belum optimalnya tata kelola dan kerja sama dengan wilayah berbatasan	Global: 1. Disrupsi teknologi 2. Urbanisasi dunia Nasional: Desentralisasi dan otonomi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan bersih

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS	ISU STRATEGS
Perangkat Daerah dan 42 Kecamatan.	kinerja, pengelolaan keuangan daerah (penataan aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)), inovasi daerah, penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan kolaborasi *pentahelix* masih perlu dioptimalkan. • Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada serta penanganan ketertiban umum dengan akar masalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program pemerintah, serta sistem pengelolaan data dan informasi pemerintahan yang belum terintegrasi secara optimal.		Provinsi Jawa Barat: Kualitas tata kelola pemerintahan	
Dalam perspektif pengembangan wilayah provinsi, Kabupaten Garut merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat yaitu PKW Cidaun-Rancabuaya yang diarahkan sebagai destinasi wisata pada pusat pertumbuhan kelautan.	*Aspek Geografis*: • Rendahnya kualitas lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu degradasi lingkungan, masih rendahnya komitmen pengelolaan lingkungan dan belum terbangunnya kesadaran masyarakat. • Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal dengan akar masalah alih fungsi lahan, kelemahan kelembagaan dan regulasi yang belum memadai, zonasi dan batas ruang yang masih belum jelas • Kawasan rawan bencana dan penanganan bencana belum optimal. *Aspek Daya Saing Daerah*: Pembangunan antar wilayah belum merata dengan akar masalah luas wilayah Kabupaten Garut yang relatif luas (3.107,05 km^2) sehingga rentang kendali menjadi cukup menantang. Dalam bidang infrastruktur jalan, kondisi jalan rusak didominasi jalan desa. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, penyediaan infrastruktur daerah berkualitas secara merata sangat diperlukan. *Aspek Pelayanan Umum:*	4. Perlunya pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) 5. Kerentanan perubahan iklim, rawan bencana dan pemulihan DAS 6. Belum optimalnya pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan 7. Belum optimalnya infrastruktur Berkualitas terpadu dan penataan utilitas	Global: 1. Perubahan iklim Nasional: 1. Konektivitas dan infrastruktur dasar 2. Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sera ketahanan bencana Provinsi Jawa Barat: 1. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar 2. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. Keberlanjutan penataan ruang	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS	ISU STRATEGS
	• Belum optimalnya capaian pelayanan dasar SPM pekerjaan umum seperti cakupan sanitasi layak yang baru mencapai 68,53% per tahun 2024. Selain itu kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah belum optimal karena belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan. Adapun cakupan air minum layak masih terkendala oleh kualitas air baku serta kuantitas dan ketersediaan air baku yang belum merata. Dari sisi kemantapan jalan (jalan kabupaten dan jalan desa) pun baru mencapai 56,94%. • Dari sisi perumahan dan permukiman, masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Garut sejumlah 27.590 unit. Kabupaten Garut masih menempati urutan kedua terbawah untuk persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat.			

Sumber: analisis BAPPEDA, 2025

Adapun berdasarkan tabel diatas, ditetapkan 4 Isu Strategis Kabupaten Garut 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
2. Penguatan pondasi perekonomian sektor unggulan daerah
3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan bersih

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Dasar Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Landasan Visi Bernegara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, adalah acuan utama dalam setiap pembangunan. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia telah mempersiapkan diri pada perayaan 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045 menjadikan Indonesia Emas 2045 meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang memuat 5 sasaran visi, dengan strategi besar untuk mencapainya melalui 8 misi agenda pembangunan, yang diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembgunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama pembangunan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Sebagai tahap pertama implementasi RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang mengintegrasikan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, yang mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, yang dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yaitu:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Gambar 3.1 8 (Delapan) Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional

Pelaksanaan Asta Cita didukung oleh 17 (tujuh belas) program prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*, dan 320 Program Kerja. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan dan dilaksanakan secara transformatif di berbagai bidang untuk menjawab

permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 (Tujuh Belas) Program Prioritas RPJMN Tahun 2025–2029 meliputi :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* pada RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%

Perencanaan pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi sektor riil dan SDM menjadi strategi kunci dalam pencapaian Trisula Pembangunan (Penurunan Kemiskinan, Peningkatan SDM Indonesia yang Berkualitas, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan).

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, Pulau Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Provinsi Jawa Barat, maka telah dirumuskan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 yaitu Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, yang memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai landasan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan selama periode tahun 2025-2045.

Sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, maka Tema Pembangunan untuk RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola, sebagai bentuk keselarasan dengan tujuan Indonesia Emas 2025 yang dalam nilai sunda digambarkan sebagai suatu keadaan yang *Gemah Ripah Repeh Rapih* yang dilaksanakan melalui kebijakan dan langkah pembentukan masyarakat Jawa Barat yang berkarakter, sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi keunggulan yang membawa kemakmuran. Bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kata transformatif erat kaitannya dengan filosofi dasar kasundaan yang diwakili oleh pepatah "*Miindung ka waktu mibapa ka zaman*". Kata '*indung-bapa*' menyiratkan bahwa transformasi yang adaptif berpegang pada tradisi dan jati diri nilai-nilai Sunda yang abadi.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat periode 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 di Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Provinsi. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu "Jawa Barat Istimewa, *Lembur Diurus Kota Ditata*" yang mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan *lembur*/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.



. *Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029*

Gambar 3.2 Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

Visi Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapainya yang disusun sesuai dengan filosofi Sunda sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan, sebagaimana berikut:

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif;
3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Penahapan pembangunan Tahun 2025-2029 diawali pembangunan tahunan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan dasar-dasar pengembangan SDM dan kewilayahan. Selanjutnya barulah dilakukan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah melalui produktivitas, inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Tematik untuk pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



. *Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029*

Gambar 3.3 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Terdapat 9 (sembilan) langkah strategis sebagai program super prioritas pembangunan Jawa Barat (*9 Lengkah Ngawangun* Jabar), yang mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu:

1) Langkah Pertama *(Lengkah Kahiji)* yaitu pembangunan infrastruktur jalan sampai ke pelosok desa dan infrastruktur permukiman perkotaan, dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa (*jalan leucir*), pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani jaringan listrik, penataan sanitasi lingkungan dan penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.
2) Langkah Kedua *(Lengkah Kadua)* yaitu pembangunan, pengembangan dan peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di seluruh wilayah

pertanian dan ekosistem pertanian organik serta pengembangan benih dan bibit unggul melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang untuk memperkuat Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional.

3) Langkah Ketiga *(Lengkah Katilu)* yaitu pengembangan pendidikan berkarakter dengan kurikulum pancawaluya, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manajer-manajer baru di Jawa Barat; serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3 untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.
4) Langkah Keempat *(Lengkah Kaopat)* yaitu mengembangkan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan.
5) Langkah Kelima *(Lengkah Kalima)* yaitu penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus serta pemberian beasiswa dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat. Penambahan layanan khusus meliputi 10 (sepuluh) layanan prioritas diantaranya *stroke*, kanker, jantung, penyakit infeksi *emerging*, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, *uronefrologi* (ginjal dan saluran kemih), respirasi (sistem pernafasan), *diabetes melitus* dan *gastrohepatologi* (pencernaan dan hati). Layanan prioritas ini menjadi salah satu upaya dalam penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
6) Langkah Keenam *(Lengkah Kagenep)* yaitu penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT serta pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan. Penanganan stunting dan gizi buruk dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi kepada ibu hamil, ibu menyusui (ASI Eksklusif) dan balita. Langkah ini sejalan dengan program prioritas nasional pencegahan dan percepatan penurunan *stunting,* terdapat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
7) Langkah Ketujuh *(Lengkah Katujuh* yaitu mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan. Pemulihan kondisi lingkungan didukung oleh pembangunan infrastruktur rendah

emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global.

8) Langkah Kedelapan *(Lengkah Kadalapan)* yaitu pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan pengolahan sampah menjadi energi lainnya.
9) Langkah Kesembilan *(Lengkah Kasalapan)* yaitu peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah bangunan dari relasional insan, kehidupan sosial, dan alam yang menjadi ikatan dalam kehidupan Jawa Barat yang gemah, ripah, repeh, rapih, sebagai cerminan prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan harmonis, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah serta untuk mewujudkan Visi Kabupaten Garut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 yaitu Terwujudnya Garut Pangirutan Yang Tata Tengtrem Kerta Raharja Menuju Ridho Allah, maka sebagai perwujudan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah, telah dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 adalah “Unggul, Maju dan Berkelanjutan”, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Adapun uraian penjelasan makna yang terkandung pada visi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

“Unggul” bermakna Kabupaten Garut 2045 mampu membangun kemandirian ekonomi yang berdaya saing dengan mengelola sumber daya ekonomi yang berfokus pada pemenuhan pangan dan pertanian serta akselerasi peningkatan nilai tambah ekonomi, terutama pada sektor industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital. Unggul juga mencerminkan harapan Kabupaten Garut menjadi daerah yang berdaya saing dari berbagai aspek, pengelolaan sumber daya alam, serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang andal. Keunggulan Kabupaten Garut diwujudkan dengan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah.

“Maju” merupakan harapan Kabupaten Garut 2045 menjadi daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Pelaksanaan

pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang berakhlak dengan berlandaskan pendidikan berkualitas tinggi dan pembangunan infrastruktur yang merata serta terintegrasi. Kemajuan Kabupaten Garut diwujudkan dengan daya saing daerah yang tinggi, daerah sangat inovatif, serta kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, unggul dan berdaya saing yang ditunjukan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

"Berkelanjutan" merupakan komitmen Kabupaten Garut terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Kabupaten Garut sebagai kabupaten konservasi yang dalam setiap pembangunannya menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Keberlanjutan di Kabupaten Garut diwujudkan dengan kualitas lingkungan hidup yang tinggi serta emisi gas rumah kaca yang rendah.

Pada tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, maka tema pembangunan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi, sebagaimana tersaji pada Gambar berikut. Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan yang dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.



. *Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045*

Gambar 3.4 Tema dan Tahapan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2045

Adapun sasaran dari penguatan fondasi diantaranya:

1) Terwujudnya penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;

2) Terciptanya nilai tambah perekonomian Kabupaten Garut;
3) Terwujudnya fasilitasi penyiapan ekosistem digital pemerintahan dengan berbasis pada regulasi, merit sistem serta berpedoman pada prinsip akuntabilitas publik;
4) Terselenggaranya keamanan dan ketertiban politik, serta stabilitas ekonomi daerah;
5) Terwujudnya penerapan nilai-nilai masyarakat madani mulai dari pembiasaan dan perbaikan perilaku;
6) Tersedianya infrastruktur wilayah dengan merata;
7) Tersedianya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas secara merata;
8) Terwujudnya penerapan pelaksanaan konservasi dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Garut masa jabatan Tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dijabarkan dalam operasional perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1.2 Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut masa jabatan Tahun 2025-2030 yang menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode tahun 2025-2029. Visi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yaitu:

"TERWUJUDNYA GARUT HEBAT DAN BERKELANJUTAN"

Adapun uraian penjelasan makna yang terkandung pada visi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Hebat”: memiliki elemen keunggulan, baik dalam hal dampak, skala dan inovasi. Serta dengan persatuan, kesatuan dan kebersamaan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Berkelanjutan”: berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



Sumber: diolah Bappeda, 2025

Gambar 3.5 Visi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Sasaran utama visi pembangunan Kabupaten Garut pada RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahap pertama pada RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Visi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2025	Target 2029
1.	Meningkatnya pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita ADHB* (Rp Juta)	30,49-31,68	34,59-38,74
		b. Indeks Ekonomi Biru (Poin)	10,78	12,94
		c. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan* (%)	9,42	9,78
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8,20-9,06	6,94-7,64
		b. Rasio Gini (Poin)	0,355-0,362	0,341-0,364
		c. Kontribusi PDRB Kabupaten Garut terhadap PDRB Provinsi (%)	2,72	2,72
		d. Laju Pertumbuhan Ekonomi* (%)	5,06	5,42-7,88
3.	Meningkatnya daya saing daerah	a. Indeks Daya Saing Daerah* (Poin)	3,85	4,04
		b. Indeks Inovasi Daerah* (Poin)	52,66	54,66
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,57	73,68
5.	Menurunnya intensitas emisi GRK dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/Milyar)	4,76	6,30
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,12	69,13

**disesuaikan dengan target dan baseline pada Indikator Kinerja Daerah (Bab IV)*

Sumber: RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045

3.1.3 Misi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Visi Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan diterjemahkan kedalam misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yang memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengacu pada rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut dan telah dilakukan pembahasan secara Teknokratik. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 sebanyak 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4. Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;
6. Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;
7. Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang dan penanggulangan bencana;
8. Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.



Sumber: diolah Bappeda, 2025

Gambar 3.6 8 (Delapan) Misi Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Konstruksi visi dan misi pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 digambarkan bahwa untuk mewujudkan visi Garut Hebat dan Berkelanjutan ditopang oleh 3 (tiga) pilar pembangunan daerah yang mengacu pada pencapaian Trisula Pembangunan yang merupakan fokus

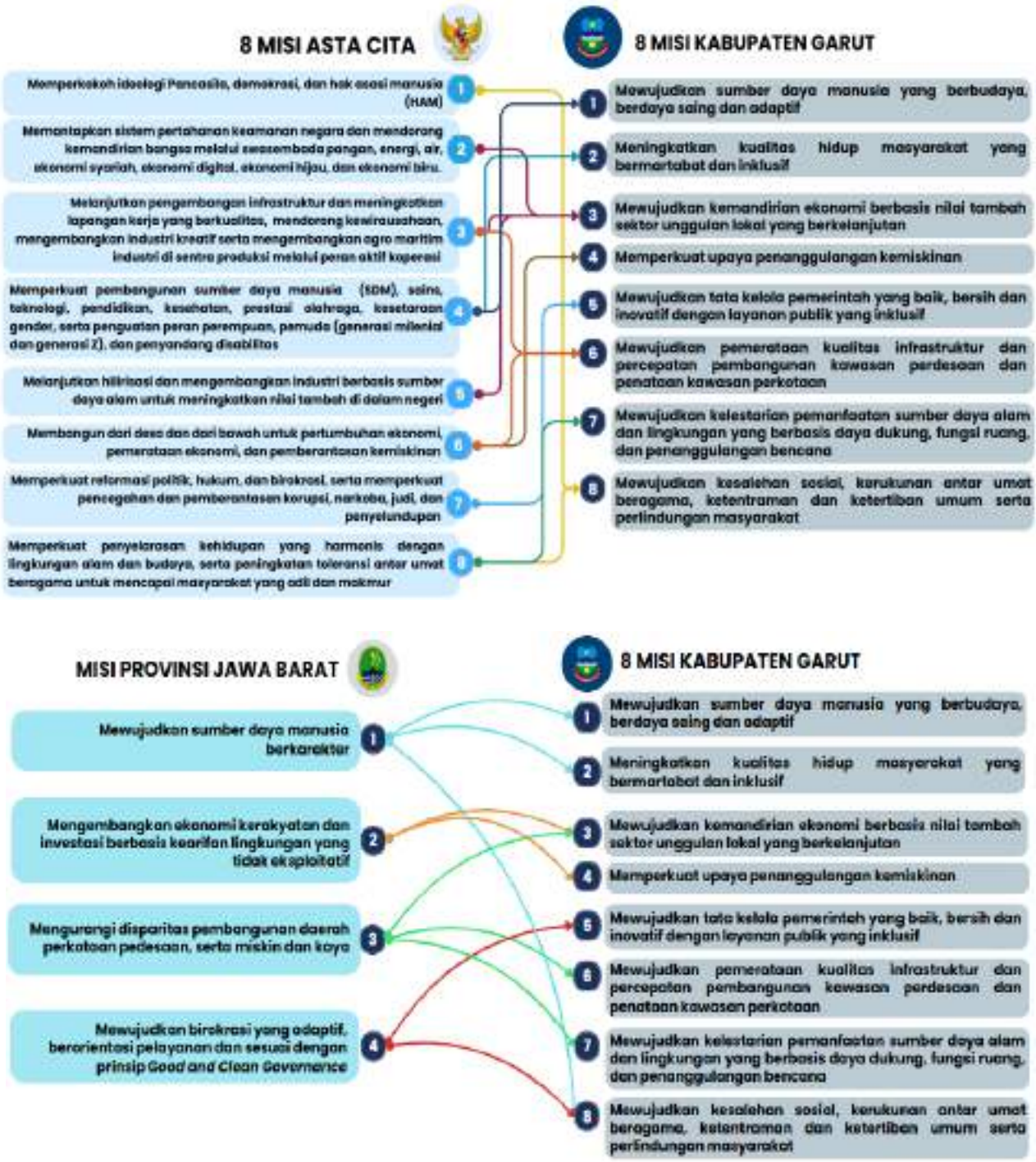
pembangunan nasional yaitu Penurunan Kemiskinan, Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Pencapaian visi juga ditunjang dengan misi tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif; infrastruktur berkualitas dan merata; kelestarian lingkungan dan ketahanan bencana serta masyarakat yang religius sebagai pondasi sebagaimana tersaji pada Gambar berikut.



Sumber: diolah Bappeda, 2025

Gambar 3.7 Konstruksi Visi Misi Kabupaten Garut
Tahun 2025-2029

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dengan uraian keterkaitan dukungan setiap misi pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 terhadap Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:



Sumber: diolah Bappeda, 2025

Gambar 3.8 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita) dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 selain sebagai penjabaran visi dan misi, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 pada tahap pertama, yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan prima untuk seluruh masyarakat;
2. Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata;
3. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran;
4. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah;
5. Terwujudnya penerapan ekonomi hijau;
6. Meningkatnya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau talenta digital;
7. Terintegrasinya rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global;
8. Terwujudnya pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan;
9. Terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif dan inovatif;
10. Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
11. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
12. Meningkatnya kerjasama antar daerah baik regional maupun internasional;
13. Meningkatnya kerukunan umat beragama;
14. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender;
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
16. Meningkatnya ketahanan pangan dan air;
17. Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) guna memastikan keterpaduan antar sektor, antar wilayah, serta konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang dan menengah. Pendekatan “tematik” memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran berfokus pada penyelesaian isu-isu prioritas daerah; “holistik” menjamin keterhubungan antar dimensi pembangunan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan; “integratif” menekankan pada sinergi yang menyatukan beberapa kewenangan antar perangkat daerah maupun antar level pemerintahan; dan “spasial” memperhatikan karakteristik kewilayahan dalam pencapaian target pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yang dirumuskan, menjadi dasar dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yang didukung oleh Indikator Kinerja utama (IKU)

Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil perumusan, maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 dijabarkan secara operasional terhadap rangkaian kinerja sebanyak 8 Tujuan dan 19 Sasaran, sebagai berikut:

1. Perwujudan Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif
   Tujuan: Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; dan
   2) Meningkatnya pembangunan kebudayaan.
2. Perwujudan Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif
   Tujuan: Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   2) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender; dan
   3) Meningkatnya pembangunan keolahragaan dan kepemudaan.
3. Perwujudan Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan
   Tujuan: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, serta mendukung kemandirian pangan, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan;
   2) Meningkatnya daya saing UMKM dan industri;
   3) Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan;
   4) Meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata;
   5) Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja; dan
   6) Meningkatnya kemandirian pangan.
4. Perwujudan Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan
   Tujuan: Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, dengan Sasaran:
   1) Menurunnya tingkat kemiskinan.
5. Perwujudan Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif
   Tujuan: Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
   2) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
6. Perwujudan Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan

Tujuan: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, dengan Sasaran:

1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas; dan
2) Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

7. Perwujudan Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang dan penanggulangan bencana
   Tujuan: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
   2) Menurunnya risiko bencana.
8. Perwujudan Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
   Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib, dan aman, dengan Sasaran:
   1) Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Uraian rumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang dilengkapi dengan indikator dan target pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

TUJUAN		SASARAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI	TARGET					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*			*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Visi: Terwujudnya Garut HEBAT dan Berkelanjutan													
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif													
1.1	Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			1	Indeks Pendidikan	Poin	59,97	60,13	60,28	60,44	60,59	60,75	60,91
				2	Indeks Pembangunan Kebudayaan*	Poin	55,5 (2023)	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45
		1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	7,88	7,91	7,94	7,97	8,00	8,03
				2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	12,19	12,21	12,23	12,25	12,27	12,29
		1.1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan*	Poin	55,5 (2023)	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif													
2.1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			1	Indeks Kesehatan	Poin	84,42	84,68	84,98	85,28	85,57	85,88	86,17
				2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,87	75,04	75,24	75,43	75,62	75,82	76,01
				2	Prevalensi *Stunting***	%	14,2	13,35	12,8	12,1	11,4	10,7	9,9
		2.1.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender		Indeks Pembangunan Gender	Poin	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1
		2.1.3	Meningkatnya pembangunan ke-olahragaan dan kepemudaan		Indeks Pembangunan Olahraga*	Poin	0,409	0,413	0,418	0,423	0,427	0,432	0,437
Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan													
3.1	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan,			1	Laju Pertumbuhan Ekonomi***	%	4,95	5,06	5,54	5,16-7,41	5,29-7,56	5,42-7,88	5,95-6,45
				2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,99	79,59	80,19	80,80	81,40	82,00	82,60

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI	TARGET					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*			*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan	3.1.1	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan	%	1,14	3,85	4,54	5,29	6,25	6,81	6,07
		3.1.2	Meningkatnya daya saing UMKM dan industri		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,44	9,42	9,49	9,58	9,68	9,78	9,79
		3.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Rasio PDRB Perdagangan	%	18,42	20,2	20,16	20,12	20,08	20,04	20,00
		3.1.4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,3	4,78	4,98	5,22	5,47	5,75	5,2
		3.1.5	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	25,27	25,46	25,5	25,54	25,58	25,62	25,67
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka***	%	6,96	6,48-7,19	6,34	6,33-6,92	6,3-6,89	6,28-6,87	6,24-6,83
		3.1.6	Meningkatnya kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,99	79,59	80,19	80,80	81,40	82,00	82,60
Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan													
4.1	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan				Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20-9,06	8,55	7,65-8,36	7,32-8,03	6,94-7,64	6,42-7,11
		4.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20-9,06	8,55	7,65-8,36	7,32-8,03	6,94-7,64	6,42-7,11
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif													
5.1	Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki			1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88	89	90	91	92	93
				2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	%	10,83	14,88	15,56	15,57	15,77	16,02	16,23

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI	TARGET					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*			*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	kemandirian fiskal	5.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53 (A-)	88	89	90	91	92	93
		5.1.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	%	10,83	14,88	15,56	15,57	15,77	16,02	16,23
Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan													
6.1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan			1	Indeks Kualitas Infrastruktur****	Poin	51,75	60,2	61,32	62,44	63,53	64,56	66,19
				2	Persentase Desa Mandiri	%	38	38,72	39,9	40,86	41,81	43,04	44,42
		6.1.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Infrastruktur****	Poin	51,75	60,2	61,32	62,44	63,53	64,56	66,19
		6.1.2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	%	36,1	38,72	39,9	40,86	41,81	43,04	44,42
Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana													
7.1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana			1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2Eq/Miliar	n/a	4,76	5,07	5,41	5,85	6,30	6,65
				2	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132	131	130	129	128
		7.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,37	68,12	68,37	68,62	68,88	69,13	69,38
		7.1.2	Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132	131	130	129	128
Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat													
8.1	Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman			1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	84,49	85,04	85,87	86,14	86,69	87,24	87,79
		8.1.1	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan	1	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	84,49	85,04	85,87	86,14	86,69	87,24	87,79

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI	TARGET					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*			*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			masyarakat serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat										

Sumber: Analisis Bappeda Kabupaten Garut 2025

Catatan:

*Data kondisi 2024 dan Target 2025-2030 menggunakan data dan target Provinsi Jawa Barat (Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Pembangunan Olahraga)

**Target *prevalensi stunting* berbeda dengan target pada RPJPD Kab Garut 2025-2045 sehubungan adanya *update* angka kondisi Kab Garut tahun 2024 sebagai *baseline* menjadi 14,2%

***Target LPE 2026 sesuai hasil Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2025 (Nomor 3150/BP.01/PPEPD), untuk target 2027-2029 batas bawah menggunakan target RPJPD Tahun 2025-2045 dan batas atas menggunakan angka hasil simulasi Bappeda Provinsi seusai arahan target dari Pemerintah Pusat secara imperatif, target 2030 kembali menggunakan target RPJPD Tahun 2025-2045

***Target TPT 2026 sesuai hasil Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2025 (Nomor 3150/BP.01/PPEPD), target Tahun 2027-2030 menggunakan target RPJPD Tahun 2025-2045

**** Perhitungan angka *baseline* Tahun 2024 belum memperhitungkan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur dikarenakan ketidaktersediaan data

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025–2045, dengan tema "Penguatan Fondasi Transformasi". Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut untuk membangun dasar yang kuat dalam mendukung transformasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Garut.

Dalam rangka penguatan fondasi tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada delapan hal utama sebagai berikut:

1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
2) Penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Garut;
3) Fasilitasi penyiapan ekosistem digital pemerintahan dengan berbasis pada regulasi, merit sistem serta berpedoman pada prinsip akuntabilitas publik;
4) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban politik, serta stabilitas ekonomi daerah;
5) Penerapan nilai-nilai masyarakat madani mulai dari pembiasaan dan perbaikan perilaku;
6) Penyediaan infrastruktur wilayah dengan merata;
7) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas secara merata;
8) Penerapan pelaksanaan konservasi dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Garut Tahun 2024-2045 yang mencakup 5 (lima) pilar utama yaitu: Pengendalian kuantitas penduduk; Peningkatan kualitas penduduk; Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; Pembangunan keluarga berkualitas; dan Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Pembangunan berbasis kependudukan ini diarahkan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, telah dirumuskan strategi sebagai rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Selanjutnya, ditetapkan arah kebijakan sebagai kerangka kerja yang selaras dengan strategi tersebut, guna menjabarkan misi pembangunan dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Uraian lengkap rumusan Strategi dan Arah Kebijakan per tujuan dan sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			
Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Akselerasi Indeks Rata-rata Lama Sekolah dengan meningkatkan pemerataan akses dan kualitas Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan*	Meningkatkan partisipasi pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan
			Meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan kompetensi siswa
			Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk ketersediaan toilet yang memadai
			Meningkatkan pengembangan dan pengendalian kurikulum di satuan pendidikan, termasuk penambahan tematik pendidikan lingkungan hidup dan muatan lokal lainnya
			Meningkatkan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui sertifikasi dan beasiswa pendidikan untuk tenaga pendidik*
			Meningkatkan pemerataan distribusi institusi pendidikan
			Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan
			Mendukung Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (diantaranya Pesantren, Madrasah, kursus keagamaan, dan sebagainya)
			Meningkatkan kualitas data sektoral pendidikan
		Meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Meningkatkan kompetensi keahlian SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi
			Meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan termasuk penyediaan bahan bacaan berkualitas
			Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Meningkatkan penguatan identitas budaya lokal	Menguatkan identitas budaya lokal dengan meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Memantapkan Garut sebagai Kota Kreatif di bidang seni dan kreativitas karya budaya lokal*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			
Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menciptakan pelayanan Kesehatan prima dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pembudayaan perilaku hidup sehat*	Memperluas cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer
			Meningkatkan layanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Meningkatkan ketersediaan sektor farmasi dan alat kesehatan serta kesiapsiagaan krisis kesehatan
			Meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman
			Menyusun rencana kebutuhan SDM dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
			Meningkatkan *Universal Health Coverage* (UHC) melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*
			Melakukan transformasi teknologi kesehatan dalam hal integrasi sistem informasi kesehatan, sistem informasi rujukan terintegrasi, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk *hotline* pengaduan dan pelaporan
			Melakukan intervensi spesifik dan sensitif penanganan *stunting**
			Meningkatkan kualitas data sektoral kesehatan
	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatkan pengetahuan Ibu dan keluarga terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender
			Meningkatkan pelayanan dan cakupan kepesertaan keluarga berencana
			Melakukan optimalisasi penyelenggaraan dan pemanfaatan Pendataan Keluarga
		Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak untuk menjadikan kota ramah perempuan dan anak*	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan*
			Meningkatkan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, meningkatkan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak
			Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas data sektoral terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pembangunan keolahragaan dan kepemudaan	Meningkatkan pembudayaan olahraga masyarakat dan capaian olahraga prestasi	Melakukan renovasi sarana olahraga*
			Meningkatkan kualitas pembinaan atlet yang didukung oleh pelatih yang berkualitas serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai*
		Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk remaja/pemuda
			Mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda
			Meningkatkan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan
Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan			
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan produksi komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kualitas SDM Pertanian*
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung pertanian (meliputi sarana dan prasarana produksi dan pasca panen)*
			Melakukan pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi*
			Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas strategis dan unggulan pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian
			Meningkatkan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian*
			Meningkatkan akses pemasaran produk pertanian dan menjaga stabilitas harga jual komoditas pertanian*
			Meningkatkan upaya pengolahan pasca panen termasuk penggunaan inovasi dan teknologi
			Meningkatkan kualitas data sektoral pertanian
			Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan dan peternakan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan serta pelaku usaha peternakan
			Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dan peternakan
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi perikanan dan peternakan*
			Mengendalikan kesehatan hewan ternak dan peningkatan kualitas pangan hewani
			Meningkatkan kualitas dan hilirisasi produk perikanan dan peternakan*
			Meningkatkan pengawasan peredaran produk asal hewan
			Meningkatkan akses pemasaran hasil peternakan dan perikanan
			Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan dan pelaku usaha peternakan
			Meningkatkan kualitas data sektoral perikanan dan peternakan
	Meningkatnya daya saing UMKM dan industri	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan UMKM (peningkatan kemampuan internal UMKM seperti manajemen keuangan, pemasaran, kualitas produk dan penggunaan teknologi)*
			Meningkatkan pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis mencakup peningkatan produksi, penguatan akses permodalan dan perluasan akses pasar)*
			Melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren*
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi*
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM koperasi
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha Koperasi
			Meningkatkan kualitas data sektoral Koperasi dan UMKM
		Meningkatkan daya saing industri	Mengembangkan kawasan industri
			Mengelola sistem informasi industrial
			Meningkatkan promosi produk industri lokal
			Meningkatkan kapasitas sumber daya industri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan
			Melindungi dan menggunakan produk lokal Garutan
			Meningkatkan sarana distribusi perdagangan pasar rakyat*
			Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Perlindungan terhadap hak konsumen
			Meningkatkan dan mengembangkan ekspor
			Meningkatkan kualitas data sektoral perindustrian dan perdagangan
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Meningkatkan kualitas pariwisata daerah	Meningkatkan daya tarik wisata dengan amenitas serta atraksi di destinasi pariwisata berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan
			Mendukung peningkatan 6A pariwisata (*Attraction* (Daya Tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenities* (Fasilitas), *Activity* (Aktivitas), *Accommodation* (Akomodasi), dan *Ancillary Services* (Layanan Tambahan)) terutama di Santolo dan Leuweung Sancang**
			Mengembangkan wisata alam berbasis konservasi, wisata ekologi hutan, wisata petualangan dan ekstrim, wisata budaya sejarah dan wisata kuliner lokal*
			Membangun infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisata berkelanjutan*
			Meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata termasuk melalui promosi wisata digital*
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah
			Meningkatkan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata*
			Meningkatkan kualitas data sektoral pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan	Meningkatkan serapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang kerja sektor formal maupun informal yang berkualitas*
			Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi kerja*
			Menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	penciptaan lapangan kerja		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatkan perlindungan hubungan industrial
			Meningkatkan kualitas data sektoral ketenagakerjaan
		Meningkatkan promosi dan iklim investasi daerah	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, dan peluang investasi*
			Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
			Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
			Meningkatkan kualitas data sektoral investasi
	Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas
			Meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan
			Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas konsumsi pangan
			Meningkatkan pengawasan mutu keamanan pangan
			Meningkatkan kualitas data sektoral terkait ketahanan pangan
Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan			
Percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial	Melakukan pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nama dan alamat (*by name by addres*s) untuk meningkatkan akurasi dan konvergensi program bantuan sosial*
			Memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Mengintegrasikan program bantuan sosial daerah guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program*
			Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
			Mendorong perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Memperkuat sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan dan mengoptimalkan peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan
			Mengembangkan mekanisme graduasi untuk penerima manfaat yang sudah tidak layak dan mengintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi
			Menjamin akses masyarakat miskin terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi dengan harga terjangkau diantaranya melalui program cadangan pangan pemerintah
			Menyediakan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan dan meningkatkan literasi digital SDM pengelola
		Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas	Membina dan mengerakkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa
			Melakukan revitalisasi koperasi desa dalam rangka optimalisasi penurunan kemiskinan
			Memberikan fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro
			Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi
			Memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin
			Meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi penempatan kerja
			Melakukan revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah
			Percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan	Meningkatkan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar dan menengah secara tepat sasaran
			Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan Mendorong kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
			Menyiapkan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan
			Memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi pemukiman bagi keluarga miskin
			Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
			Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik
			Mengembangkan akses listrik dan energi serta mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah pelosok untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif			
Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Melakukan penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi*	Melakukan penguatan dan penataan organisasi termasuk evaluasi kelembagaan
			Melakukan optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten
			Melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel
			Mengoptimalkan penerapan Reformasi birokrasi dengan didukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi diantaranya peningkatan infrastruktur jaringan dan penyediaan media komunikasi
			Meningkatkan kualitas kebijakan melalui *evindence-based policy*
			Meningkatkan kualitas data sektoral pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan standar pelayanan publik pada unit pelayanan publik	Melakukan transformasi layanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan inklusif*
			Meningkatkan integritas dan kualitas SDM pelayanan
			Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai*
			Optimalisasi penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan standar pelayanan publik
			Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
			Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi*
			Meningkatkan riset dan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah	Melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi*
			Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Menyusun *roadmap* peningkatan penerimaan pajak
			Menguatkan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
			Meningkatkan kualitas data sektoral terkait pajak dan retribusi daerah
Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan			
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah	Mendukung program pembangunan jalan tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya**
			Mendukung peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat**
			Meningkatkan pemantapan jalan dan jembatan*
			Mengoptimalkan penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan
			Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*
			Meningkatkan kinerja sistem irigasi*
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Meningkatkan pemenuhan akses terhadap sanitasi (layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik)*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas penataan bangunan sesuai standar melalui layanan sertifikat layak fungsi dan penataan kawasan strategis kabupaten
			Menyusun perencanaan tata ruang berbasis sumberdaya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana dan meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang
			Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan jasa konstruksi yang sesuai standar
			Membangun sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan
			Melakukan penataan infrastruktur kabel udara (kabel listrik, *fiber optic*, kabel telepon, dan sebagainya)
			Meningkatkan kualitas data sektoral infrastruktur terkait pekerjaan umum dan penataan ruang
		Menyediakan kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan	Melakukan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan
			Melakukan penataan kawasan perkotaan*
			Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman
			Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman
			Membangun dan meningkatkan kualitas rumah layak huni*
			Menyediakan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi)
			Mendukung pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pameungpeuk**
			Meningkatkan kualitas data sektoral perumahan dan permukiman
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
			Meningkatkan sarana prasarana serta infastruktur perdesaan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik*
			Menguatkan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa serta kapasitas kelembagaan badan kerja sama antar desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat untuk percepatan pembangunan desa	Menguatkan kerjasama antar desa melalui pembangunan kawasan perdesaan dengan dilengkapi infrastruktur dasar penunjang pengembangan kawasan seperti jalan, irigasi dan pengolahan limbah
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa*
			Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata sesuai kebutuhan dan potensi desa*
			Mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi**
			Meningkatkan kualitas data sektoral pembangunan desa
Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana			
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait
			Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup, terutama penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah industri penyamakan kulit*
			Melindungi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati lokal dan mengembangkan ekowisata berbasis konservasi
			Meningkatkan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi lahan kritis dan mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
			Mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat (perhutanan sosial dan pengembangan kawasan terintegrasi)
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan
			Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang berkelanjutan*
			Mendorong ekonomi sirkular berbasis sampah
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perubahan iklim*
			Meningkatkan kualitas data sektoral persampahan
	Menurunnya risiko bencana		Melakukan perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Meningkatkan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana
			Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten; pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan logistik dan peralatan
			Meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
			Meningkatkan pelayanan penanganan pemulihan pasca bencana
			Meningkatkan kualitas data sektoral kebencanaan
Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman	Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat	Membangun iklim kehidupan masyarakat yang beragama, demokratis, dan toleran	Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan Masyarakat*
			Memberikan bantuan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa*
			Melakukan optimalisasi peran lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren
			Melaksanakan fasilitasi aktivitas keagamaan
			Melakukan perbaikan dan penyaluran hibah sarana prasarana keagamaan dan lembaga keagamaan
			Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Forkopimda
			Melakukan pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik
			Meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap Perda/Perkada
			Melaksanakan penguatan peran partai politik
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Kabupaten Garut 2025

*Bersesuaian dengan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati

**Mengacu pada arah pembangunan kewilayahan Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai tahapan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh langkah pembangunan dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Setiap tahapan memuat fokus tematik pembangunan yang mencerminkan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan yang berkembang. Tema pembangunan tahunan ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, serta menjadi instrumen pengendali dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Adapun penahapan pembangunan beserta tema pembangunan tiap tahun dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah Bappeda, 2025

Gambar 3.9 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Tahun 2025-2029

Secara detail, penahapan pembangunan beserta tema pembangunan tiap tahun dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema Pembangunan Tahunan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah	Penguatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Daya Saing melalui Peningkatan Produktivitas dan Pemantapan Infrastruktur
Fokus Pembangunan Tahunan	*difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan layanan pendidikan serta kesehatan sebagai fondasi pelayanan kepada masyarakat*	*diarahkan pada pemerataan akses layanan dasar dan pengembangan produktivitas daerah melalui produksi pertanian dan peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri potensial.*	*fokus pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik berbasis digital serta pengembangan sumber daya manusia dan potensi unggulan daerah*	*mendorong nilai tambah sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis kearifan lokal untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat*	*menitikberatkan pada penguatan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkualitas*
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	- Penyediaan data dasar pendidikan yang berkualitas terutama identifikasi anak usia sekolah (PAUD, SD, SMP, kesetaraan) yang belum terlayani, termasuk anak putus sekolah dengan pendataan berbasis spasial - Peningkatan kualitas layanan pendidikan - Perluasan akses layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta pemberian bantuan pendidikan dan penguatan kerjasama kemitraan.	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral pendidikan yang berkualitas terutama data sarana prasarana serta kondisinya secara spasial - Peningkatan kualitas layanan pendidikan - Perluasan akses layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta pemberian bantuan pendidikan dan penguatan kerjasama kemitraan.	- Penyediaan data dasar pendidikan yang berkualitas terutama identifikasi anak usia sekolah (PAUD, SD, SMP, kesetaraan) yang belum terlayani, termasuk anak putus sekolah dengan pendataan berbasis spasial - Peningkatan kualitas layanan pendidikan - Perluasan akses layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas serta pemberian bantuan pendidikan dan penguatan kerjasama kemitraan.	- Digitalisasi data sektoral pendidikan yang terintegrasi - Peningkatan kualitas layanan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengendalian kurikulum, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan - Perluasan akses layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pemberian bantuan pendidikan, pemerataan distribusi institusi pendidikan dan penguatan kerjasama kemitraan.	- Digitalisasi data sektoral pendidikan yang terintegrasi - Peningkatan kualitas layanan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengendalian kurikulum, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan - Perluasan akses layanan pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pemberian bantuan pendidikan, pemerataan distribusi institusi pendidikan dan penguatan kerjasama kemitraan.

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Identifikasi tingkat literasi masyarakat, ketersediaan dan akses perpustakaan, taman baca dan pojok baca serta - Penguatan regulasi terkait minat baca dan literasi masyarakat - Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi	- Peningkatan kualitas layanan perpustakaan termasuk penyediaan bahan bacaan berkualitas - Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi	- Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi - Optimalisasi perpustakaan digital - Peningkatan kolaborasi dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	- Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi - Optimalisasi perpustakaan digital - Optimalisasi kolaborasi dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	- Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM) dan relawan literasi - Optimalisasi perpustakaan digital - Penyelenggaraan kolaborasi dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat secara konsisten melalui *event* literasi tahunan
	- Pemetaan dan inventarisasi Seni dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan penyusunan *database* kebudayaan daerah berbasis digital - Peningkatan promosi budaya - Penguatan identitas budaya lokal	- Pemetaan dan inventarisasi Seni dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan pemutakhiran *database* kebudayaan daerah berbasis digital - Pemeliharaan dan penyelenggaraan kegiatan adat serta seni budaya - Peningkatan promosi budaya	- Penguatan identitas budaya lokal dengan meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan - Pemeliharaan dan penyelenggaraan kegiatan adat serta seni budaya - Pemberdayaan desa adat dan komunitas budaya	- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya - Penerapan gerakan "Cinta Budaya Garut" khususnya untuk anak muda - Penguatan identitas budaya lokal di lingkungan pendidikan dan sosial	- Pemantapan Garut sebagai Kota Kreatif di bidang seni dan kreativitas karya budaya lokal - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif serta pengintegrasian dengan pariwisata daerah - Peningkatan promosi melalui Festival budaya tahunan
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	- Peningkatan pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dengan perluasan secara bertahap lokus penurunan AKI, AKB dan *stunting.* - Perluasan akses layanan kesehatan, melalui : a. Perluasan cakupan CKG ke komunitas-komunitas terpilih,	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral kesehatan yang berkualitas. - Penguatan mutu layanan dan cakupan akses dengan prioritas penanganan penyakut menular - Peningkatan kualitas layanan kesehatan, melalui peningkatan kualitas layanan pada Puskesmas (reakreditasi) dan Rumah Sakit Umum Daerah	- Perluasan akses layanan kesehatan, melalui : a. Pengembangan Posyandu terintegrasi layanan primer, difokuskan pada kecamatan atau desa yang belum menunjukkan penurunan signifikan pada indikator utama penyakit menular piroritas	- Perluasan akses layanan kesehatan, melalui : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas skrining penyakit tidak menular dan intervensi penanganannya b. Memastikan konsistensi pelaksanaan CKG secara masif. c. Optimalisasi capaian *Universal Health Coverage* (UHC)	- Pondasi percepatan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penguatan keberlanjutan penurunan AKI, AKB, *Stunting*, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular - Perluasan akses layanan kesehatan, melalui : a. Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer.

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	kantor pemerintahan serta lingkungan industri (pabrik) sekolah dll. b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kematian. c. Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama untuk Ibu Hamil dan kelompok masyarakat miskin rentan - Optimalisasi layanan promotif dan preventif seperti Posyandu, Kelas Ibu dan Balita.	(RSUD), dan peningkatan cakupan layanan neonatal dan antenatal. - Peningkatan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. - Perluasan akses layanan kesehatan, melalui : a. Perluasan cakupan integrasi pelayanan kesehatan primer, CKG ditargetkan untuk menjangkau lebih luas sasaran rumah tangga melalui kunjungan rumah. b. Peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC) melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama untuk Ibu Hamil dan kelompok masyarakat miskin rentan	b. Memastikan konsistensi pelaksanaan CKG secara masif. c. Optimalisasi capaian *Universal Health Coverage* (UHC) - Peningkatan kualitas layanan kesehatan, melalui peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), peningkatan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. - Optimalisasi transformasi teknologi kesehatan dalam hal integrasi sistem informasi kesehatan dan sistem informasi rujukan terintegrasi - Intervensi terstruktur terrutama untuk penurunan AKI, AKB dan *stunting*	- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, melalui peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), peningkatan pengawasan dan edukasi keamanan obat, makanan dan minuman, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. - Optimalisasi transformasi teknologi kesehatan dalam hal integrasi sistem informasi kesehatan, sistem informasi rujukan terintegrasi, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk *hotline* pengaduan dan pelaporan - Penguatan kolaborasi lintas sektor terutama dalam penurunan AKI, AKB dan *stunting.*	b. Konsistensi optimalisasi capaian *Universal Health Coverage* (UHC) - Optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif penanganan *stunting* - Penguatan transformasi teknologi kesehatan - Penguatan kolaborasi lintas sektor terutama dalam penurunan AKI, AKB dan *stunting.*
	- Peningkatan kualitas data sektoral terkait pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakserta pemanfaatan Pendataan Keluarga - Peningkatan pengetahuan terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral serta pemanfaatan Pendataan Keluarga - Peningkatan pengetahuan terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral serta pemanfaatan Pendataan Keluarga - Peningkatan pengetahuan terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral serta pemanfaatan Pendataan Keluarga - Peningkatan pengetahuan terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral serta pemanfaatan Pendataan Keluarga - Peningkatan pengetahuan terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi, serta kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) - Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan - Peningkatan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak - Peningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi	- Peningkatan pelayanan dan cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) - Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan - Peningkatan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak - Peningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi	- Optimalisasi dan pemerataan pelayanan dan cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) - Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan - Peningkatan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak - Peningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi	- Optimalisasi dan pemerataan pelayanan dan cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) - Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan - Peningkatan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak - Optimalisasi kolaborasi dalam rangka peningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi	- Optimalisasi dan pemerataan pelayanan dan cakupan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) - Optimalisasi peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan - Peningkatan partisipasi anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak - Optimalisasi kolaborasi dalam rangka peningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
	- Peningkatan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan - Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kelembagaan/aktivitas untuk remaja/pemuda - Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan atlet berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan - Optimalisasi penyediaan sarana prasarana olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	- Peningkatan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan - Pengembangan kepemimpinan pemuda melalui peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan sosial - Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan atlet berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan - Optimalisasi penyediaan sarana prasarana olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan - Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda - Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan atlet berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan - Optimalisasi penyediaan sarana prasarana olahraga prestasi dan olahraga masyarakat	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan - Pemanfaatan potensi lokal dan kearifan budaya oleh pemuda - Peningkatan kompetisi dan *event* keolahragaan - Penguatan kelembagaan dan dukungan multi pihak dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral kepemudaan dan keolahragaan - Penguatan kelembagaan, kemitraan, dan tata kelola kepemudaan dalam program kepemudaan - Penguatan kelembagaan dan dukungan multi pihak dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	- Peningkatan kualitas data sektoral pertanian, perikanan dan peternakan - Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas strategis hasil pertanian, perikanan dan peternakan melalui peningkatan kualitas SDM (petani dan nelayan), peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas, diversifikasi dan upaya hilirisasi - Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan - Penguatan kelembagaan ketahanan pangan	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral pertanian, perikanan dan peternakan - Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas strategis hasil pertanian, perikanan dan peternakan melalui peningkatan kualitas SDM (petani dan nelayan), peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas, diversifikasi dan upaya hilirisasi - Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas - Peningkatan kualitas konsumsi pangan	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral pertanian, perikanan dan peternakan - Optimalisasi peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas strategis hasil pertanian, perikanan dan peternakan melalui peningkatan kualitas SDM (petani dan nelayan), peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi - Peningkatan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral pertanian, perikanan dan peternakan - Optimalisasi peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas strategis hasil pertanian, perikanan dan peternakan melalui peningkatan kualitas SDM (petani dan nelayan), peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi - Peningkatan pemasaran produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan - Peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral pertanian, perikanan dan peternakan - Optimalisasi peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas strategis hasil pertanian, perikanan dan peternakan melalui peningkatan kualitas SDM (petani dan nelayan), peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas, diversifikasi dan hilirisasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi - Optimalisasi kolaborasi untuk peningkatan pemasaran produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Peningkatan kualitas data sektoral koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan - Peningkatan pemberdayaan UMKM (peningkatan internal UMKM) - Peningkatan pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis) - Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi, SDM koperasi dan usaha koperasi	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan - Peningkatan pemberdayaan UMKM (peningkatan internal UMKM) - Peningkatan pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis) - Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi, SDM koperasi dan usaha koperasi	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan - Optimalisasi pemberdayaan UMKM (peningkatan internal UMKM) - Optimalisasi pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis) - Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi, SDM koperasi dan usaha koperasi	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan - Optimalisasi pemberdayaan UMKM (peningkatan internal UMKM) - Optimalisasi pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis) - Optimalisasi peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi, SDM koperasi dan usaha koperasi	- Pemutakhiran dan pengembangan kualitas data sektoral koperasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan - Optimalisasi pemberdayaan UMKM (peningkatan internal UMKM) - Optimalisasi pengembangan UMKM (peningkatan fasilitasi kewirausahaan, regulasi dan ekosistem bisnis) - Optimalisasi peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi, SDM koperasi dan usaha koperasi
	- Peningkatan kapasitas organisasi, validasi data sektoral, pemetaan potensi, dan pembentukan tim lintas sektor untuk penguatan ekosistem industri dan perdagangan	- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, baik dalam pembinaan pelaku usaha industri/perdagangan maupun dalam penyediaan sarana prasana industri dan perdagangan terutama revitalisasi pasar rakyat	-Optimalisasi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, baik dalam pembinaan pelaku usaha industri/ perdagangan maupun dalam penyediaan sarana prasana industri dan perdagangan terutama revitalisasi pasar rakyat - Pemerataan pembangunan sektor industri dan perdagangan ke wilayah potensial	- Optimalisasi pemerataan pembangunan sektor industri dan perdagangan ke wilayah potensial, serta memperkuat dukungan terhadap pelaku industri dan perdagangan - Integrasi sistem tata kelola industri dan perdagangan yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital serta transisi keberlanjutan.	- Optimalisasi pemerataan pembangunan sektor industri dan perdagangan ke wilayah potensial, serta memperkuat dukungan terhadap pelaku industri dan perdagangan - Optimalisasi integrasi sistem tata kelola industri dan perdagangan yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital serta transisi keberlanjutan.

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisara daerah melalui strategi branding dan promosi destinasi berbasis digital - Pemetaan, penataan dan peningkatan 6A pariwisata (Attraction (Daya Tarik), Accessibility (Aksesibilitas), Amenities (Fasilitas), Activity (Aktivitas), - Accommodation (Akomodasi), dan Ancillary Services (Layanan Tambahan)) destinasi wisata prioritas yang berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan - Peningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah - Peningkatan kualitas data sektoral kepariwisataan dan ekonomi kreatif	- Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisara daerah melalui strategi branding dan promosi destinasi berbasis digital - Peningkatan 6A pariwisata terutama infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisata berkelanjutan - Peningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan kepariwisataan daerah - Peningkatan kolaborasi dan kemitraan promosi dengan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional - Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata	- Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisara daerah melalui strategi branding dan promosi destinasi berbasis digital - Peningkatan 6A pariwisata terutama pemantapan infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisata berkelanjutan - Peningkatkan kualitas sumber daya manusia - Peningkatan kolaborasi dan kemitraan promosi dengan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional - Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata	- Peningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata termasuk melalui promosi wisata digital - Peningkatan 6A pariwisata terutama pemantapan infrastruktur pariwisata yang memadai dan mendorong pariwisata berkelanjutan - Peningkatkan kualitas sumber daya manusia - Optimalisasi kolaborasi pentahelix untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif - Optimalisasi pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata - Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral kepariwisataan dan ekonomi kreatif	- Optimalisasi jangkauan dan efektivitas pemasaran pariwisata termasuk melalui promosi wisata digital - Peningkatan 6A pariwisata yang berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan - Peningkatkan kualitas sumber daya manusia - Optimalisasi kolaborasi pentahelix untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif - Optimalisasi pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata - Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral kepariwisataan dan ekonomi kreatif

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Peningkatan kualitas data sektoral ketenaga kerjaan dan investasi - Peningkatan kualitas pelatihan vokasi termasuk pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas - Penguatan kelembagaan dan sarana prasarana UPT-BLK - Peningkatan perlindungan hubungan industrial - Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing - Penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi	- Pemutahiran dan pengembangan data sektoral ketenaga kerjaan dan investasi - Peningkatan kualitas pelatihan vokasi termasuk pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas - Perluasan kesempatan kerja melalui penempatan kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri - Peningkatan kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing - Perluasan jangkauan informasi potensi, promosi dan peluang investasi	- Ekspansi layanan pelatihan dan penempatan berbasis digital dan kewilayahan -Perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru - Peningkatan kualitas pelatihan vokasi - Evaluasi pelaksanaan prinsip kerja layak dan kelembagaan hubungan industrial - Penguatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing - Perluasan jangkauan informasi potensi, promosi dan peluang investasi	- Optimalisasi hasil pelatihan dan link and match dengan sektor industri daerah -Pembinaan lanjutan wirausaha alumni BLK - Peningkatan kualitas pelatihan vokasi - Penguatan tripartit dan penanganan perselisihan hubungan industrial yang efektif - Penguatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing - Perluasan jangkauan informasi potensi, promosi dan peluang investasi - Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	- Pemantapan data sektoral ketenaga kerjaan dan investasi - Peningkatan kualitas pelatihan vokasi termasuk pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas - Akselerasi dampak ekonomi lokal dari alumni pelatihan yang bekerja di sektor formal dan wirausaha produktif - Perluasan cakupan perusahaan yang menerapkan prinsip kerja layak - Pemantapan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing - Perluasan jangkauan informasi potensi, promosi dan peluang investasi - Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
Misi 4 : Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial meliputi: - Pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan nama dan alamat (by name by address) untuk meningkatkan akurasi	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial meliputi: - Pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) - Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial meliputi: - Pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) - Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial meliputi: - Pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) - Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial meliputi: - Pengelolaan, pemanfaatan serta pemutakhiran Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) - Perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	dan konvergensi program bantuan sosial - Sinergi program bantuan pusat, provinsi, dan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas - Percepatan integrasi program bantuan sosial daerah dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program - Penguatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial	sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin - Optimalisasi peran pendamping dalam meningkatkan kemandirian penerima bantuan. - Penyediaan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan dan meningkatkan literasi digital SDM pengelola - Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa - Pengembangan mekanisme graduasi untuk penerima manfaat yang sudah tidak layak - Sinergi bansos dengan pelatihan keterampilan - Kolaborasi pentahelix dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin - Penguatan sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan. - Pengembangan mekanisme graduasi untuk penerima manfaat yang sudah tidak layak - Penguatan program bantuan sosial berbasis komunitas melalui konversi bantuan konsumtif ke produktif untuk kelompok mampu kerja. - Kolaborasi pentahelix dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin - Pengembangan mekanisme graduasi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi - Sinergi bansos dengan pelatihan keterampilan - Penguatan program bantuan sosial berbasis komunitas melalui konversi bantuan konsumtif ke produktif untuk kelompok mampu kerja. - Kolaborasi pentahelix dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin - Optimalisasi mekanisme graduasi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi -Penguatan sistem rujukan untuk penanganan keluhan dan pengaduan. - Penguatan kelembagaan lokal untuk pengentasan kemiskinan berkelanjutan - Kolaborasi pentahelix dalam intervensi penanggulangan kemiskinan
	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas meliputi: - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan koperasi desa (Koperasi Merah Putih) untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa - Fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses pasar serta pendampingan dan	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas meliputi: - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan koperasi desa (Koperasi Merah Putih) untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa - Fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses pasar	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas meliputi: - Optimalisasi pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan koperasi desa (Koperasi Merah Putih) untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa - Optimalisasi fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan,	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas meliputi: - Optimalisasi pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan koperasi desa (Koperasi Merah Putih) untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa - Optimalisasi fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan,	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas meliputi: - Pemantapan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan koperasi desa (Koperasi Merah Putih) untuk optimalisasi penurunan kemiskinan di tingkat desa - Pemantapan fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses pasar serta

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	pelatihan bagi usaha mikro - Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi - Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin - Peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat - dan fasilitasi penempatan kerja - Revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah - Percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.	serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro - Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi - Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin - Peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat - dan fasilitasi penempatan kerja - Revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah - Percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.	akses pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro - Optimalisasi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi - Optimalisasi pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin - Optimalisasi peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat - dan fasilitasi penempatan kerja - Revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah - Optimalisasi percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.	akses pasar serta pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro - Optimalisasi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi - Optimalisasi pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin - Optimalisasi peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat - dan fasilitasi penempatan kerja - Revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah - Optimalisasi percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.	pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro - Pemantapan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta peningkatan infrastruktur ekonomi - Pemantapan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang tergolong keluarga miskin - Pemantapan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat - dan fasilitasi penempatan kerja - Revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah - Pemantapan percepatan pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial yang meliputi hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan meliputi: - Peningkatan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar secara tepat sasaran - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; - Penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Peningkatan kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Penyiapan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan - Perbaikan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan meliputi: - Peningkatan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar secara tepat sasaran - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; - Penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Peningkatan kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Penyiapan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan - Perbaikan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi pemukiman bagi keluarga miskin	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan meliputi: - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar secara tepat sasaran - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; - Optimalisasi penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Optimalisasi peningkatan kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Optimalisasi penyiapan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan - Optimalisasi perbaikan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan meliputi: - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar secara tepat sasaran - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; - Optimalisasi penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Optimalisasi peningkatan kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Optimalisasi penyiapan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan - Optimalisasi perbaikan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan meliputi: - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan dasar secara tepat sasaran - Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin; - Optimalisasi penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); - Optimalisasi peningkatan kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Optimalisasi penyiapan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan - Optimalisasi perbaikan rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	pemukiman bagi keluarga miskin - Penyelenggaraan sekolah rakyat - Peningkatan akses listrik dan energi serta jaringan internet di daerah pelosok - Program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin - Peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui kemitraan	- Penyelenggaraan sekolah rakyat - Peningkatan akses listrik dan energi serta jaringan internet di daerah pelosok - Program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin - Peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui kemitraan	pemukiman bagi keluarga miskin - Optimalisasi penyelenggaraan sekolah rakyat - Peningkatan akses listrik dan energi serta jaringan internet di daerah pelosok - Program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin - Optimalisasi peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui kemitraan	pemukiman bagi keluarga miskin - Optimalisasi penyelenggaraan sekolah rakyat - Peningkatan akses listrik dan energi serta jaringan internet di daerah pelosok - Program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin - Optimalisasi peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui kemitraan	pemukiman bagi keluarga miskin - Optimalisasi penyelenggaraan sekolah rakyat - Peningkatan akses listrik dan energi serta jaringan internet di daerah pelosok - Program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin - Optimalisasi peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui kemitraan
	- Penguatan dan penataan organisasi termasuk evaluasi kelembagaan dan tata kerja birokrasi - Penerapan merit sistem secara konsisten - Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel - Penguatan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. - Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	- Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu - Penerapan merit sistem secara konsisten - Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi diantaranya melalui peningkatan infrastruktur jaringan dan penyediaan media komunikasi - Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemeritahan (SPIP) - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai	- Optimalisasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel - Penyajian data dan informasi kinerja pemerintah yang mudah diakses publik - Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten - Peningkatan kualitas kebijakan melalui *evindence-based policy* - Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemeritahan (SPIP)	- Optimalisasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel - Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten - Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemeritahan (SPIP) - Integrasi pelayanan publik berbasis satu pintu dan berbasis elektronik melalui aplikasi *Garut Hebat*. - Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.	- Optimalisasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara transparan dan akuntabel - Optimalisasi penerapan merit sistem secara konsisten - Penguatan dan penataan organisasi termasuk evaluasi kelembagaan - Optimalisasi kolaborasi *pentahelix* dalam penyelenggaraan dan inovasi pemerintahan. - Optimalisasi peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif	- Pemetaan dan perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan standar pelayanan publik - Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Pembentukan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam pelayanan	- Optimalisasi penerapan *Standard Operating Procedure (*SOP) dan standar pelayanan publik - Penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Pemetaan potensi inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah	- Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan - Pemerataan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai - Peningkatan transformasi layanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan inklusif melalui Aplikasi *Garut Hebat.* - Peningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik	- Peningkatan kolaborasi *pentahelix* dalam penyelenggaraan dan inovasi pemerintahan. - Peningkatan riset dan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah - Pemerataan penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi	- Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemeritahan (SPIP) - Optimalisasi *evindence-based policy* untuk kebijakan publik yang lebih berkualitas - Optimalisasi riset dan inovasi daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah
	- Peningkatan kualitas data sektoral terkait pajak dan retribusi daerah meliputi: a. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara komprehensif b. Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak berbasis spasial dan sektoral - Penyusunan *roadmap* peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral terkait pajak dan retribusi - Peningkatan kapasitas SDM - Penerapan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan optimalisasi digitalisasi - Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral terkait pajak dan retribusi - Peningkatan kapasitas SDM untuk optimalisasi pelayanan - Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Penguatan pengawasan dan penegakan terhadap wajib pajak tidak patuh - Penerapan *roadmap* peningkatan penerimaan pajak	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral terkait pajak dan retribusi - Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Penyesuaian tarif retribusi yang belum optimal - Penerapan insentif pajak untuk mendorong kepatuhan - Kolaborasi kemitraan untuk optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral terkait pajak dan retribusi - Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Optimalisasi peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi daerah - Evaluasi dan pemutakhiran *roadmap* peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 6 : Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan	- Peningkatan kualitas data sektoral infrastruktur terkait pekerjaan umum dan penataan ruang - Pemetaan kondisi dan kesenjangan infrastruktur dasar antar wilayah - Penetapan kawasan prioritas pembangunan infrastruktur berbasis potensi dan kebutuhan wilayah - Pemantapan jalan dan jembatan -Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Peningkatan kinerja sistem irigasi - Penyusunan perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana - Pemutakhiran basis data sektoral rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan kumuh, *backlog* perumahan - Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni - Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan - Penataan kawasan perkotaan (penataan jalan, trotoar, drainase, ruang publik, taman kota) - Perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman	- Pemutakhiran data sektoral infrastruktur terkait pekerjaan umum dan penataan ruang - Akselerasi penetapan kebijakan penataan ruang - Pemantapan jalan dan jembatan prioritas - Optimalisasi penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan -Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Peningkatan kinerja sistem irigasi - Peningkatan cakupan sanitasi layak - Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang - Penanganan kawasan kumuh melalui program terpadu (air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penerangan) - Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar wilayah - Penataan kawasan perkotaan (penataan jalan, trotoar, drainase, ruang publik, taman kota) - Peningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman - Kolaborasi pendanaan untuk perbaikan rutilahu	- Pemerataan pemantapan jalan dan jembatan - Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan - Optimalisasi penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan -Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Optimalisasi peningkatan kinerja sistem irigasi - Peningkatan cakupan sanitasi layak - Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang - Identifikasi dan pemetaan infrastruktur kabel udara (kabel listrik, fiber optic, kabel telepon, dan sebagainya) - Penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi) - Pemantapan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar wilayah - Penataan kawasan perkotaan (penataan jalan, trotoar, drainase, ruang publik, taman kota) - Peningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman - Optimalisasi kolaborasi pendanaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh	- Pemerataan pemantapan jalan dan jembatan - Optimalisasi penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan -Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Optimalisasi peningkatan kinerja sistem irigasi - Peningkatan cakupan sanitasi layak - Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang - Peningkatan kualitas penataan bangunan sesuai standar melalui layanan sertifikat layak fungsi dan penataan kawasan strategis kabupaten - Penataan infrastruktur kabel udara (kabel listrik, fiber optic, kabel telepon, dan sebagainya) - Peningkatan penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi) - Pemantapan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar wilayah - Penataan kawasan perkotaan (penataan jalan, trotoar, drainase, ruang publik, taman kota) - Peningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman - Optimalisasi kolaborasi pendanaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh	- Pemerataan pemantapan jalan dan jembatan - Optimalisasi penyediaan air baku yang andal dan berkelanjutan -Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Optimalisasi peningkatan kinerja sistem irigasi - Peningkatan cakupan sanitasi layak - Peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang - Peningkatan kualitas penataan bangunan sesuai standar melalui layanan sertifikat layak fungsi dan penataan kawasan strategis kabupaten - Penataan infrastruktur kabel udara (kabel listrik, fiber optic, kabel telepon, dan sebagainya) - Pemerataan penyediaan perumahan untuk memangkas *backlog* (komersil dan bersubsidi) - Pemantapan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar wilayah - Penataan kawasan perkotaan (penataan jalan, trotoar, drainase, ruang publik, taman kota) - Peningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman - Optimalisasi kolaborasi pendanaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	- Peningkatan kualitas data sektoral pembangunan desa - Pemetaan kapasitas pemerintahan desa - Perbaikan sarana prasarana serta infastruktur perdesaan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik - Identifikasi potensi desa dan peluang kerjasama antar desa - Reviu regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata - Penyiapan ekosistem kawasan perdesaan untuk mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi	- Peningkatan kapasitas pemerintahan dan tata kelola kelembagaan masyarakat desa - Peningkatan kelembagaan badan kerja sama antar desa - Peningkatan sarana prasarana serta infastruktur perdesaan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik - Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal - Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata sesuai kebutuhan dan potensi desa	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral pembangunan desa - Optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan dan tata kelola kelembagaan masyarakat desa - Pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata sebagai *engine of growth*, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta pengembangan produk unggulan desa - Penguatan inovasi desa untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral pembangunan desa - Optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau inovasi digitalisasi - Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata - Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi *pentahelix* dalam setiap tahapan pembangunan	- Pemutakhiran dan pengembangan data sektoral pembangunan desa - Optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau inovasi digitalisasi - Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Merah Putih maupun Desa Wisata - Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi *pentahelix* dalam setiap tahapan pembangunan desa mendorong kemajuan dan kemandirian desa - Optimalisasi inovasi desa untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa
	- Peningkatan kualitas data sektoral persampahan dan lingkungan hidup - Penataan sistem layanan persampahan (penguatan bank sampah, TPS3R, regulasi pengelolaan sampah) - Penyusunan *baseline* kualitas air sungai dan air tanah	- Perluasan layanan persampahan, pembangunan/rehabilitasi TPS3R baru, peningkatan *pilot project* pengelolaan sampah mandiri - Pemantauan berkala kualitas air sungai dan air tanah - Penataan konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan rencana penetapan taman kehati Kabupaten Garut	- Layanan pengelolaan sampah diperluas ke seluruh wilayah pelayanan utara dan selatan - Penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	- Penerapan model ekonomi sirkular antara lain kerjasama dengan industri daur ulang plastik; pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai 30% - Program ekowisata berbasis konservasi; penyusunan Rencana Aksi Daerah Keanekaragaman Hayati (RAD-KH).	- Sistem persampahan terintegrasi (pengumpulan, pemilahan, daur ulang, energi) mencakup >80% rumah tangga; *zero waste event* untuk pariwisata Garut. - Terbentuk kawasan konservasi daerah; minimal 50% desa/kelurahan masuk kategori berbudaya lingkungan

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 7 : Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana	-- Identifikasi ekosistem penting (RTH kewenangan Pemerintah Kabupaten, RTH dalam konsep Indeks Hijau Biru Indonesia) dan penyusunan dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati - Pendataan spasial lahan kritis dan penyusunan rencana rehabilitasi berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	- Kolaborasi rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kawasan penyangga kota	- Penguatan kebijakan perlindungan spesies endemik dan program adopsi pohon - Kolaborasi rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kawasan penyangga kota	- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan	- Kolaborasi rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kawasan penyangga kota dan pengembangan hutan rakyat dengan skema insentif karbon
	- Pemutakhiran data dan peta spasial resiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana - Perencanaan tata ruang berbasis sumber daya lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mitigasi berbasis komunitas dan pengembangan desa tangguh bencana	- Penguatan infrastruktur dasar kebencanaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan logistik dan peralatan - Penyusunan rencana induk mitigasi bencana berbasis tata ruang - Peningkatan layanan informasi rawan bencana kabupaten - Pelatihan masyarakat dan integrasi edukasi kebencanaan dalam kurikulum sekolah	- Penataan sistem dasar penanggulangan bencana - Replikasi desa/kelurahan tangguh bencana di seluruh kecamatan - Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan logistik dan peralatan - Peningkatan pelayanan penanganan dan pemulihan pasca bencana	- Pemutakhiran data dan peta spasial resiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana - Pemantapan desa/kelurahan tangguh bencana di seluruh kecamatan - Penataan kawasan rawan bencana melalui relokasi, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung	- Pemutakhiran data dan peta spasial resiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana - Pemantapan pelayanan penanganan dan pemulihan pasca bencana - Pengembangan model kemitraan dalam kesiapsiagaan dan rehabilitasi pascabencana serta penguatan sistem pendanaan berkelanjutan untuk penanggulangan bencana

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Misi 8 : Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	- Pembangunan nilai dasar keagamaan, toleransi, dan demokrasi di masyarakat melalui: a. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan masyarakat termasuk bantuan pendidikan untuk mahasiswa b. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Forkopimda c. Peningkatan peran partai politik - Penguatan regulasi dan penyelarasan antar perangkat daerah untuk mendukung penegakan Perda/Perkada. - Peningkatan layanan perlindungan terhadap masyarakat	- Pembangunan nilai dasar keagamaan, toleransi, dan demokrasi di masyarakat - Penguatan forum dan kelembagaan sosial keagamaan melalui: a. Peningkatan peran lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren b. Fasilitasi aktivitas keagamaan c. Perbaikan dan penyaluran hibah sarana prasarana keagamaan dan lembaga keagamaan - Penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum daerah - Peningkatan layanan perlindungan terhadap masyarakat	- Pemetaan, pembinaan dan pengendalian kerawanan konflik - Pembangunan nilai dasar keagamaan, toleransi, dan demokrasi di masyarakat - Penguatan forum dan kelembagaan sosial keagamaan - Penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum daerah - Peningkatan layanan perlindungan terhadap masyarakat - Penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada	- Pembangunan nilai dasar keagamaan, toleransi, dan demokrasi di masyarakat - Penguatan forum dan kelembagaan sosial keagamaan - Penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum daerah - Peningkatan kualitas perlindungan masyarakat (linmas) berbasis komunitas melalui peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	- Pemantapan nilai dasar toleransi, dan demokrasi di masyarakat melalui penguatan peran partai politik - Penguatan forum dan kelembagaan sosial keagamaan - Penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum daerah - Evaluasi dan pemantapan mekanisme penegakan Perda/Perkada berbasis spasial - Perwujudan kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam menjaga ketertiban

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Kabupaten Garut, 2025

Penahapan ini diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, terintegrasi antar sektor dan wilayah, serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan bagian dari strategi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Program prioritas ini ditetapkan melalui proses *cascading* kinerja, yaitu penjenjangan kinerja mulai dari tujuan, sasaran, sampai *outcome* program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah secara sistematis.

Program-program prioritas ini sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Berikut disajikan proses perumusan program prioritas Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	1.1. Penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif			Indeks Pembangunan Kebudayaan(Poin)	
				Indeks Pendidikan(Angka)	
		1.1.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
			Meningkatnya Kompetensi Literasi Siswa	Skor kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Literasi Dasar PAUD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kompetensi Numerasi Siswa	Skor kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Pengelolaan kurikulum PAUD & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				Persentase Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan Dasar (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Indeks Iklim inklusivitas dan kebinekaan jenjang PAUD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang PAUD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kualitas pembelajaran Pendidikan kesetaraan Paket c (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kuantitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
				Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
				Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				Indeks Distribusi Guru Pendidikan Dasar (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Partisipasi Warga Belajar	Jumlah Lulusan warga belajar (Orang)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Tenaga Pendidik ASN yang Memiliki Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
			Meningkatnya capaian Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung nilai-nilai sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung nilai nilai-sosial dan keagamaan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		1.1.2. Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	
			Meningkatnya akses terhadap informasi sejarah Daerah	Persentase Pertumbuhan masyarakat yang mendapat Infomasi sejarah daerah (%)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			Meningkatnya kapasitas Pelaku Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional Daerah yang tersertifikasi (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK yang dimanfaatkan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Situs Budaya Daerah (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	2.1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif			Indeks Kesehatan(Angka)	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Indeks)	
		2.1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	
			Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Indeks Keluarga Sehat (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Ibu dan Anak	*Case fatality rate* ibu hamil/bersalin/pasca persalinan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di fasyankes (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditingkatkan mutunya (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Meningkatnya pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pengelolaan pangan yang memenuhi syarat	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 thn) (Angka)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (PHS) (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	KLB / Bencana / Krisis yang terdeteksi dan direspons sesuai waktu standar (<24 jam pelaporan) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai target > 80% (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka Non Polio AFP Rate (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan Skrining Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Insidensi HIV baru (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Tata laksana Kasus Malaria Import (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Indeks Kesehatan Lingkungan (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Desa yang mencapai Target Imunisasi Rutin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya upaya penanganan masalah gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi kurang (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.1.2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			Menigkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Ekploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		2.1.3. Meningkatnya pembangunan keolahragaan dan kepemudaan		Indeks Pembangunan Olahraga (Poin)	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda Jawa Barat (Orang)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	3.1. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)(Indeks)	
		3.1.1. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan (%)	
			Meningkatnya fasilitasi layanan pengembangan usaha pertanian	Persentase fasilitasi layanan pengembangan usaha pertanian (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
			Meningkatnya fasilitasi prasarana pasca panen pertanian	Persentase fasilitasi prasarana alat pasca panen pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya fasilitasi sarana alat pasca panen pertanian	Persentase fasilitasi sarana alat pasca panen pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya kapasitas kelompok pengolahan hasil pertanian	Persentase Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya kapasitas kelompok peternak	Persentase Sertifikasi Kelompok Peternak (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya luasan layanan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya luasan layanan prasarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani prasarana produksi pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya luasan layanan sarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani sarana produksi pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya pembinaan kesmavet pada unit usaha	Persentase unit usaha yang dibina (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya penanganan bencana peternakan	Persentase Penanganan Wilayah Bencana Peternakan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase cakupan wilayah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kejadian Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) pada Populasi Hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Produksi Olahan Komoditas Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Komoditas Perikanan (Ton)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya Ternak yang Bersertifikat	Persentase Ternak Yang Bersertifikat (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		3.1.2. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
			Meningkanya Standarisasi Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah yang Tersatandarisasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya kepatuhan perusahaan pemanfaat langsung panas bumi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase Perusahaan Pemanfataan Langsung Panas Bumi yang memenuhi standar (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	persentase koperasi sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
			Meningkatnya koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang memiliki izin	Persentase KSP/USP Berizin (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian yang Tersertifikasi (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro Naik Kelas (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah	Persentase pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya Pertumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah	Persentase jumlah sentra idustri kecil menengah yang produkif (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang terdaftar dalam SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang terdaftar dalam SII Nas (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Meningkatnya produkivitas industri pengolahan	Produktivitas sektor industri pengolahan (Angka)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya tingkat kepatuhan koperasi sesuai ketentuan	Persentase tingkat Kepatuhan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha formal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		3.1.3. Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Rasio PDRB Perdagangan (%)	
			Meningkatnya alat UTTP ditera dan tera ulang	Persentase alat UTTP yang ditera dan tera ulang (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Meningkatnya fasilitasi pelaku usaha pada pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan pada pemasaran produk Dalam Negeri (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya fasilitasi sarana distribusi perdagangan di luar pasar tradisional	Persentase fasilitasi sarana distribusi perdagangan diluar pasar tradisional (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhana pokok dan barang penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan pasar rakyat	Persentase sarana perdagangan pasar rakyat yang fungsional (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		3.1.4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Indeks Kota Kreatif (Poin)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Lapor LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kualitas hubungan industrial	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		3.1.5. Meningkatnya produktivitas daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada rencana tenaga kerja daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
				Persentase perusahaan yang terfasilitasi penyusunan RTK mikro (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya minat penanaman modal	Persentase Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas calon transmigran	persentase calon transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya pencari kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kerja layak	Jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak pekerja PK/PP/PKB, LKS Bipatrit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Angka)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		3.1.6. Meningkatnya kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya diversifikasi ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandiringan pangan yang fungsional (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
			Terkendalinya harga pangan pokok utama	CV Harga Beras (%) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	4.1. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan			Tingkat Kemiskinan(%)	
		4.1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan (%)	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Meningkatnya luasan layanan prasarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani prasarana produksi pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya luasan layanan sarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani sarana produksi pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Standarisasi Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah yang Tersatandarisasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya fasilitasi sarana distribusi perdagangan di luar pasar tradisional	Persentase fasilitasi sarana distribusi perdagangan diluar pasar tradisional (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Indeks Keluarga Sehat (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhana pokok dan barang penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya Kompetensi Literasi Siswa	Skor kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Literasi Dasar PAUD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kompetensi Numerasi Siswa	Skor kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di fasyankes (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Indeks Iklim inklusivitas dan kebinekaan jenjang PAUD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang PAUD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kualitas pembelajaran Pendidikan kesetaraan Paket c (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada rencana tenaga kerja daerah (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase perusahaan yang terfasilitasi penyusunan RTK mikro (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan pasar rakyat	Persentase sarana perdagangan pasar rakyat yang fungsional (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya Kuantitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
				Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
				Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditingkatkan mutunya (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Meningkatnya Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya minat penanaman modal	Persentase Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Partisipasi Warga Belajar	Jumlah Lulusan warga belajar (Orang)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Pemerlu Atensi Sosial (PAS) (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (PHS) (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya pencari kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	KLB / Bencana / Krisis yang terdeteksi dan direspons sesuai waktu standar (<24 jam pelaporan) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai target > 80% (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Angka Non Polio AFP Rate (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan Skrining Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Insidensi HIV baru (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Tata laksana Kasus Malaria Import (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Indeks Kesehatan Lingkungan (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Desa yang mencapai Target Imunisasi Rutin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro Naik Kelas (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya Pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah	Persentase pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya Pertumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah	Persentase jumlah sentra idustri kecil menengah yang produkif (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya produkivitas industri pengolahan	Produktivitas sektor industri pengolahan (Angka)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya upaya penanganan masalah gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi kurang (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha formal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Terpenuhinya Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan	5.1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiska			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)	
				Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan(%)	
		5.1.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Persentase jumlah bidang tanah yang diredistribusi (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
				Persentase jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
			Meningkatnya cakupan Perangkat Daerah/unit kerja yang memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (Perangkat Daerah)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya capaian standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Capaian SPM Pemerintah Daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Implementasi Manajemen Talenta Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta melalui Pengembangan Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Jumlah PPNS pada Satpol PP (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya kesesuaian penganggaran Program Prioritas Daerah	persentase kesesuaian program pada KUA PPAS dan APBD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan Labkesda (Poin)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan sistem kerja	Efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang disusun oleh Perangkat Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Kompetensi dan Karier ASN	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Pengembangan Karier (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Kualitas Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi ASN (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD yang tepat waktu dan sesuai SAP (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas Manajemen Kinerja, Penghargaan dan Disiplin	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja dan Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan Indeks SPBE (poin)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kualitas Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kualitas Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya kualitas praktik profesional serta peran dan layanan pengawasan	Nilai praktik profesional PK-APIP (Poin)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Promosi dan Mutasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya Layanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Meningkatnya layanan pengaduan penanaman modal	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya NIlai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk Komponen Pelaporan Kinerja (Poin)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya pelaksanaan reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemutakhiran Data dan Sistem Informasi PTSP (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	Persentase Jumlah permasalahan pertanahan yang tertangani (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
			Meningkatnya pencegahan korupsi	Nilai evaluasi MCP KPK (poin)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya penerapan manajemen risiko pemerintah daerah	Indeks Manajemen Risiko (poin)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya Pengadaan ASN secara Terbuka, Kompetitif dan Transparan	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan ASN Secara Terbuka, Kompetitif dan transparan yang sesuai dengan Formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya penganggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	persentase pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang ditentukan peggunaannya (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (poin)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai rekomendasi	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran sesuai target (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sektor ekonomi dan SDA	Persentase Pelaku Usaha Sektor Ekonomi dan SDA yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sektor infrastruktur dan sosial	Persentase Pelaku Usaha Sektor Infrastruktur dan Sosial yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan pemindahtanganan BMD (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		5.1.2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan (%)	
			Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya penerapan transaksi elektronik pajak dan retribusi daerah	Rasio elektronifikasi pajak dan retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Persentase wajib pajak dan objek retribusi yang mengimplementasikan transaksi elektronik (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pungut retribusi	Persentase kepatuhan wajib pungut retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Tercapainya target realisasi pajak daerah dan retribusi	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana	6.1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan			Persentase Desa Mandiri(%)	
				Indeks Kualitas Infrastruktur(Poin)	
		6.1.1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berkualitas		Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	
			Meningkatnya Bangunan Gedung yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persentase bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya keselamatan pelayaran	Tingkat Laik Layar Sarana Pelayaran (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Konektivitas Darat (poin)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Kawasan Strategis Kabupaten (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Terlatih dan Tersertifikasi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Terlatih dan Tersertifikasi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Terpenuhinya Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		6.1.2. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri (%)	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	7.1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana			Penurunan Intensitas Emisi GRK(TON CO2 EQ)	
				Indeks Risiko Bencana(Indeks)	
		7.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan hidup	Persentase titik lokasi pemantauan kualitas air dan udara (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		7.1.2. Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya layanan Penyebaran Informasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	8.1. Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib dan aman			Indeks Kesalehan Sosial (IKS)(Angka)	
		8.1.1. Meningkatnya kesalehan sosial, toleransi dan kerukunan masyarakat serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial (IKS) (Angka)	
			Meningkatnya capaian Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung nilai-nilai sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung nilai nilai-sosial dan keagamaan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Jumlah PPNS pada Satpol PP (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			Meningkatnya Layanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Meningkatnya layanan Penyebaran Informasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (Orang)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda, 2025

Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, disusun langkah strategis pembangunan dengan mengacu pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati yaitu 8 Agenda Transformasi Garut Hebat yang meliputi 8 Program Unggulan sebagai berikut:

1. Hebat Ekonominya
   1) 100.000 lapangan pekerjaan baru (Program Unggulan)
   2) Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui Layanan Rumah Produksi dan Kemasan; Kredit Garut Hebat untuk *Startup* dan UMKM (Program Unggulan); Bantuan modal; penyelenggaraan pameran atau bazar
   3) WIRA HEBAT: Satu Desa, Satu Wirausaha Baru HEBAT (Program Unggulan)
   4) Revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur pasar (perbaikan drainase, perbaikan akses jalan, perbaikan jongko dan permasalahan penumpukan sampah) dan pembatasan pasar modern
   5) Garut *Digital Valley*: Pusat Kegiatan Kreatif Milenial dan Gen Z, *Start-up*, *Up-skill*, Digitalisasi, *E-sport* dan Komunitas

   Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Ekonominya yang telah diadopsi dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi ke-3.

2. Hebat Pendidikannya
   1) Beasiswa Pendidikan SDM Hebat: Program Satu Desa Satu Sarjana, 5.000 bantuan pendidikan mahasiswa (Program Unggulan)
   2) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan baik jenjang PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), maupun pendidikan kesetaraan
   3) Pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas

   Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Pendidikannya yang telah diadopsi dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi ke-1 dan Misi ke-3.

3. Hebat Kesehatannya
   1) Pelayanan Kesehatan Prima (Program Unggulan):
   a. Jaminan persalinan "Ibu Hebat"
   b. Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama untuk masyarakat kurang mampu (miskin)
   c. Penanganan *Stunting* dan Makan Bergizi Gratis

   Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Kesehatannya yang telah diadopsi dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi ke-2.

4. Hebat Pemerintahannya
   1) Kemudahan layanan e-KTP (Program Unggulan)
   2) BUMD Dekat dengan Rakyat
   3) *Contact Centre* Layanan Cepat Tanggap Kedaruratan

4) Implementasi SPBE: Smart Kampung dan *E-village Budgeting & Monitoring System*
5) Optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi

Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Pemerintahannya yang telah diadopsi dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi ke-5.

5. Hebat Infrastrukturnya
   1) Infrastruktur Jalan Mulus: Satgasus Jalan Berlubang untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan (Program Unggulan)
   2) Optimalisasi jaringan irigasi pertanian

Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Infrastrukturnya yang telah diadopsi dalam Arah Kebijakan pada Misi ke-6.

6. Hebat Desa dan Warganya
   1) Insentif guru ngaji, pesantren, RW dan RT, aparatur desa, dan kepala desa (Program Unggulan)
   2) 40 BUMDES Hebat (Program Unggulan)
   3) Bantuan santunan bagi penduduk miskin yang belum menjadi penerima bantuan sosial
   4) Desa Mandiri Pangan HEBAT
   5) Satu Desa Satu Lapang Olahraga
   6) *Ambulance* Gratis
   7) Optimalisasi Bank Sampah Unit (BSU), Pembangunan TPS3R, dan Penguatan Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan/RW

Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Desa dan Warganya yang telah diadopsi dalam Strategi Arah Kebijakan pada Misi ke-2, Misi ke-4 Misi ke-6 dan Misi ke-7.

7. Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
   1) Petani Jawara Hebat
   2) Kemudahan akses pupuk (penyediaan dan pemerataan subsidi pupuk)
   3) Kemitraan Pertanian dengan Industri
   4) Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu

Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya yang telah diadopsi dalam Strategi Arah Kebijakan pada Misi ke-3.

8. Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya
   1) Penyelenggaraan ruang pertunjukan Seni Budaya diantaranya *event* festival budaya
   2) Pengembangan 30 Desa Wisata HEBAT (Program Unggulan)
   3) Pengembangan pariwisata Garut Selatan dengan peningkatan sarana dan prasarana wisata pesisir selatan
   4) Penyusunan narasi wisata Garut

Selain itu, terdapat Agenda Transformasi Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya yang telah diadopsi dalam Arah Kebijakan pada Misi ke-1 dan Misi ke-3.

Berikut merupakan keselarasan program prioritas dengan 8 Agenda Transformasi Garut Hebat serta 9 Lengkah Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.6 Keselarasan Program Prioritas dengan 8 Agenda Transformasi Garut Hebat dan 9 *Lengkah* Provinsi Jawa Barat

Misi	Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif	*Hebat Pendidikannya* 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan baik jenjang PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), maupun pendidikan kesetaraan 2) Beasiswa Pendidikan SDM Hebat: Program Satu Desa Satu Sarjana, 5.000 bantuan pendidikan mahasiswa	*Lengkah Katilu*
	Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya 1) Penyelenggaraan ruang pertunjukan Seni Budaya diantaranya *event* festival budaya	
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif	*Hebat Kesehatannya* 1) Pelayanan Kesehatan Prima (Program Unggulan): a. Jaminan persalinan "Ibu Hebat" b. Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama untuk masyarakat kurang mampu (miskin) c. Penanganan *Stunting* dan Makan Bergizi Gratis	*Lengkah Kalima* *Lengkah Kagenep*
	Hebat Desa dan Warganya 1) Satu Desa Satu Lapang Olahraga 2) *Ambulance* Gratis	
Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	*Hebat Ekonominya* 1) 100.000 lapangan pekerjaan baru (Program Unggulan) 2) Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui Layanan Rumah Produksi dan Kemasan; Kredit Garut Hebat untuk *Startup* dan UMKM (Program Unggulan); Bantuan modal; Penyelenggaraan pameran atau bazar, UMKM *Awards* 3) WIRA HEBAT: Satu Desa, Satu Wirausaha Baru HEBAT (Program Unggulan) 4) Revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur pasar (perbaikan drainase, perbaikan akses jalan, perbaikan jongko dan permasalahan penumpukan sampah) dan pembatasan pasar modern	*Lengkah Kadua &* *Lengkah Kaopat*

Misi	Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
	5) Garut *Digital Valley*: Pusat Kegiatan Kreatif Milenial dan Gen Z, Start-up, Up-skill, Digitalisasi, E-sport dan Komunitas	
	Hebat Pendidikannya: 1) Pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas	
	Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya 1) Pengembangan 30 Desa Wisata HEBAT (Program Unggulan) 2) Pengembangan pariwisata Garut Selatan dengan peningkatan sarana dan prasarana wisata pesisir selatan 3) Penyusunan narasi wisata Garut	
	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya 1) Petani Jawara Hebat 2) Kemudahan akses pupuk (penyediaan dan pemerataan subsidi pupuk) 3) Kemitraan Pertanian dengan Industri 4) Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu	
Misi 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan	*Hebat Desa dan Warganya* 1) Bantuan santunan bagi penduduk miskin yang belum menjadi penerima bantuan sosial	*Lengkah Kahiji* & *Lengkah Kasalapan*
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif	*Hebat Pemerintahannya* 1) Kemudahan layanan e-KTP (Program Unggulan) 2) BUMD Dekat dengan Rakyat 3) *Contact Centre* Layanan Cepat Tanggap Kedaruratan 4) Implementasi SPBE: Smart Kampung dan *E-village Budgeting & Monitoring System* 5) Optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi	*Lengkah Kasalapan*
Misi 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan	*Hebat Infrastrukturnya* 1) Infrastruktur Jalan Mulus: Satgasus Jalan Berlubang untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan (Program	*Lengkah Kahiji* & *Lengkah Kadua*:

Misi	Agenda Transformasi Garut Hebat	9 Lengkah Provinsi Jawa Barat
perdesaan dan penataan kawasan perkotaan	Unggulan) 2) Optimalisasi jaringan irigasi pertanian	
	Hebat Desa dan Warganya 1) Desa Mandiri Pangan HEBAT 2) 40 BUMDES Hebat (Program Unggulan)	
Misi 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana	*Hebat Desa dan Warganya* 1) Optimalisasi Bank Sampah Unit (BSU), Pembangunan TPS3R, dan Penguatan Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan/RW	*Lengkah Katujuh & Lengkah Kadalapan*
Misi 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	*Hebat Desa dan Warganya* 1) Insentif guru ngaji, pesantren, RW dan RT, aparatur desa, dan kepala desa (Program Unggulan)	*Lengkah Kasalapan:*

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

3.4.1 Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

Tabel 3.7 Proyek/Kegiatan Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
I	PPD 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif								
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak jenjang PAUD, SD dan SMP	Tersebar			v			Dinas Pendidikan	Hebat Pendidikannya
2	Beasiswa sampai dengan Sarjana untuk 442 orang (421 desa dan 21 kelurahan),	42 Kecamatan			v			Sekretariat Daerah	Hebat Pendidikannya
3	5.000 bantuan pendidikan mahasiswa	Tersebar			v	v	v	Sekretariat Daerah	Hebat Pendidikannya
4	Penyelenggaraan ruang pertunjukan Seni Budaya	42 Kecamatan			v			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya
II	PPD 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif								
1	Pelayanan Kesehatan Prima: *a) Jaminan persalinan "Ibu Hebat";* *b) Peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)* *c) Penanganan Stunting dan Makan Bergizi Gratis*	42 Kecamatan	v		v	v	v	Dinas Kesehatan	Hebat Kesehatannya
2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	42 Kecamatan			v			Dinas Kesehatan	Hebat Kesehatannya

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
3	442 Lapangan Olah Raga (421 desa dan 21 kelurahan)	42 Kecamatan			v			Dinas Pemuda dan Olahraga	Hebat Desa dan Warganya
4	*Ambulance* Gratis	42 Kecamatan						Dinas Kesehatan	Hebat Desa dan Warganya
II	PPD 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan								
1	Pelatihan Tenaga Kerja	BLK Garut			v			Dinas Tenaga Kerja	Hebat Ekonominya
2	WIRA HEBAT: Satu Desa, Satu Wirausaha Baru HEBAT	Kabupaten Garut			v			Dinas Koperasi dan UKM	Hebat Ekonominya
3	Revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur pasar (perbaikan drainase, perbaikan akses jalan, perbaikan jongko dan penanganan sampah) dan pembatasan pasar modern	Pasar Guntur Ciawitali dan pasar di kecamatan			v			Dinas Perindusterian dan Perdagangan dan ESDM	Hebat Ekonominya
4	Pembinaan keterampilan dan kursus khusus bagi para penyandang disabilitas	Kabupaten Garut			v			Dinas Koperasi dan UMKM	Hebat Pendidikannya:
5	Pengembangan 30 Desa Wisata HEBAT (Program Unggulan)	30 Desa			v			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya
6	Pengembangan pariwisata Garut Selatan dengan peningkatan sarana dan prasarana wisata pesisir	4 Kecamatan (Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Caringin)			v			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Hebat Pariwisata, Hutan dan Lautnya

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
	selatan dan penyusunan narasi wisata Garut								
7	Petani Jawara Hebat	4 Kecamatan (Bayongbong, Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang)			v			Dinas Pertanian	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
8	Penyediaan dan pemerataan subsidi pupuk	4 Kecamatan (Bayongbong, Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang)	v		v			Dinas Pertanian	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
9	Pengembangan kawasan peternakan terpadu	Kawasan Peternakan		v	v			Dinas Perikanan dan Peternakan	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kawasan Pertanian						Dinas Pertanian	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
11	Pembangunan irigasi pertanian	Kawasan Pertanian						Dinas Pertanian	Hebat Pertanian, Peternakan dan Perikanannya
IV	PPD 4: Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan								
1	Bantuan santunan bagi penduduk miskin yang belum menjadi penerima bantuan sosial	Tersebar sesuai DTSEN			v	v	v	Dinas Sosial	Hebat Desa dan Warganya

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
2	Lapad Ruhama (bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan)	RSU milik Pemerintah			v	v	v	Dinas Sosial	Hebat Desa dan Warganya
3	Penanganan Kawasan Kumuh	Sesuai SK. Kumuh			v	v	v	Dinas Perumahan dan Permukiman	Hebat Desa dan Warganya
V	PPD 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif								
1	*Contact Centre* Layanan Cepat Tanggap Kedaruratan	Kabupaten Garut			v			Dinas Komunikasi dan Informatika	Hebat Pemerintahannya
2	Implementasi SPBE: *Smart* Kampung dan *E-village Budgeting & Monitoring System*	42 Kecamatan			v			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Hebat Pemerintahannya
3	Digitalisasi layanan pajak dan retribusi*	Kabupaten Garut			v			Badan Pendapatan Daerah	Hebat Pemerintahannya
4	Kemudahan Pelayanan melalui Aplikasi Garut Hebat	Kabupaten Garut			v			Dinas Komunikasi dan Informatika	Hebat Pemerintahannya
VI	PPD 6: Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan								
1	Pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi Jalan	Jalan Kabupaten dan Desa	v	v	v			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hebat Infrastrukturnya

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
2	Rehabilitasi jaringan irigasi	38 Irigasi Teknis dan Irigasi Non Teknis	v	v	v			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hebat Infrastrukturnya
3	Penataan Kota	Kawasan Perkotaan Garut			v			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hebat Infrastrukturnya
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Daerah yang belum terlayani	v	v	v			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hebat Infrastrukturnya
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Daerah yang belum terlayani	v	v	v			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hebat Infrastrukturnya
6	Pembangunan Penerangan jalan Umum pada ruas Jalan Kabupaten	Jalan kabupaten yang belum terlayani		v	v			Dinas Perhubungan	Hebat Infrastrukturnya
7	40 BUMDES Hebat	40 Desa			v			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hebat Desa dan Warganya
VII	PPD 7: Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana								
1	Optimalisasi Bank Sampah Unit (BSU), Pembangunan TPS3R, dan Penguatan Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan/RW	Kabupaten Garut			v			Dinas Lingkungan Hidup	Hebat Infrastrukturnya

No.	Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Sumber Pendanaan					Sektor Penanggung jawab	Transformasi Garut Hebat
			APBN	Bantuan Keuangan Provinsi	APBD	Dana Umat	CSR		
2	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa	Kabupaten Garut		v	v		v	Dinas Lingkungan Hidup	Hebat Infrastrukturnya
3	Peningkatan Fungsi TPA Pasir Bajing	TPA Pasir Bajing Kecamatan Banyuresmi			v			Dinas Lingkungan Hidup	Hebat Infrastrukturnya
4	Penanganan Permukiman Dampak Bencana Alam	Permukiman terdampak			v	v	v	Dinas Lingkungan Hidup	Hebat Infrastrukturnya
5	Penanganan Lahan kritis	Lahan Kritis terdampak hasil evaluasi			v		v	Dinas Lingkungan Hidup	Hebat Infrastrukturnya
VIII	PPD 8: Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat								
1	Insentif guru ngaji, pesantren, RW dan RT, aparatur desa, dan kepala desa	42 Kecamatan			v			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hebat Desa dan Warganya

Sumber : Analisis BAPPEDA (2025

3.4.2 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima (*acceptable risk*) guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Adapun menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, pengelolaan risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko pembangunan daerah bertujuan untuk a) meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kinerja dan b) melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dinamis membutuhkan respons kebijakan yang adaptif. Oleh karenanya, kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan potensi kejadian dan kondisi yang berdampak pada pencapaian sasaran. Di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, manajemen risiko sudah diterapkan pada intervensi program dan kegiatan terutama dalam penyusunan program prioritas atau proyek strategis. Desain kebijakan perencanaan tersebut mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Indikasi risiko strategis pemerintah daerah yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut antara lain meliputi:

a. Risiko kebijakan yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal pemerintah. Salah satunya kebijakan terkait pendapatan daerah yang menyebabkan ketidakmampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan disebabkan oleh kondisi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah yang membuat pencapaian target berisiko tanpa dukungan pembiayaan alternatif. Keterbatasan ruang fiskal disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pusat disebabkan oleh kondisi perubahan prioritas nasional yang dapat memengaruhi pencapaian target daerah.
b. Risiko pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten dengan pemangku kepentingan dan atau antar perangkat daerah. Salah satunya berupa konflik antar pemangku kepentingan yang disebabkan kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah dengan kondisi potensi tumpang tindih atau kesenjangan program yang memengaruhi pada pencapaian tujuan pembangunan.
c. Risiko operasional berupa ketidaklengkapan dan ketidakakuratan hasil analisis yang disebabkan oleh kondisi perbedaan sumber dan

metode pengumpulan data sektoral yang dapat memengaruhi *baseline* dan evaluasi capaian.

d. Risiko kepatuhan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional atau ketentuan lain,
e. Risiko bencana yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
f. Risiko kecurangan yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau perangkat daerah.

Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan bentuk implementasi dari Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dimana kebijakannya diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan operasional Perangkat Daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko (UPR). Adanya Manajemen Risiko mendorong seluruh entitas untuk mengelola risiko secara kolaboratif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan. Implementasi Manajemen Risiko sekaligus memperkuat pengendalian prioritas, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pendekatan Manajemen Risiko memperkuat pengendalian pelaksanaan yang selama ini lebih bersifat reaktif atas masalah yang sudah terjadi. Dengan adanya Manajemen Risiko, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat proaktif-kolaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisir dampak atas masalah yang terjadi.

Pengendalian pelaksanaan berbasis MR diintegrasikan dengan manajemen kinerja pembangunan yang memanfaatkan sistem informasi terpadu. Sistem tersebut digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan, dan Unit Pengawas Internal dalam proses manajemen risiko sebagai sarana dalam membangun budaya risiko, menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko, menjaga kualitas data terkait risiko, dan mempercepat proses pelaporan. Sedangkan dalam pengelolaan risiko secara kolaboratif diharapkan dapat mendorong kinerja pembangunan, dengan terus melakukan perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan

risiko, dan implementasi unsur penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

3.4.3 Kerangka Dukungan Regulasi

Dalam mendukung pencapaian Misi atau Prioritas Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, dengan pendekatan *adaptive governance*, diperlukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap regulasi dan kebijakan baik secara substansi, pelaksanaan, dan dukungan teknis yang diperlukan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, serta memiliki kepastian hukum. Regulasi merupakan salah satu bentuk produk kebijakan yang menjadi fondasi agar pembangunan daerah memiliki kebijakan yang berjalan terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Rincian identifikasi kebutuhan regulasi yang diperlukan dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kerangka Dukungan Regulasi dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Adaptif	1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif 3. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kurikulum Muatan Lokal 4. Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar		Dinas Pendidikan
			Raperkada Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat	Sekretariat Daerah
		1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cagar Budaya 2. Keputusan Bupati Nomor 432/KEP.29-DISPARBUD/2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2021		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Bermartabat dan Inklusif	1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Sektor Kesehatan 2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan 3. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi	1. Raperda / Raperkada Penanggulangan Tuberkulosis 2. Raperkada Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Raperkada Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong Pada Dinas Kesehatan 4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Blud UOBK RSUD Dr Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan 6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan 7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 8. Surat Edaran Nomor 400.7/3204/Kesra tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Bagi Anak Usia Sekolah Di Kabupaten Garut 9. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.336-DINKES/2025 tentang tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.291-Dinkes/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis 11. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.721-DINKES/2023 Tentang Pembentukan Tim Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon 12. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.720-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 13. Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.756-DINKES/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Kematian Bayi	Masyarakat pada Dinas Kesehatan	

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		1. Keputusan Bupati Nomor 440/Kep. 1119-Bappeda/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten 2. Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.98-BAPPEDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Daerah Program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Tingkat Kabupaten		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Keolahragaan 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan	Raperkada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Garut Tahun 2024-2045 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak 4. Peraturan Bupati Garut Nomor 138 Tahun 2021 Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* 5. Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur	Raperkada Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu	Dinas PPKBPPPA
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Sektor Unggulan Lokal yang Berkelanjutan	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor 3. Rencana Umum Penanaman Modal 2018-2025	1. Rencana Umum Penanaman Modal 2. Raperkada Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 3. Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan		Dinas Perindustrian Peraturan Daerahgangan Energi dan Sumber Daya Mineral
		1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut	Raperkada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		1. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.178Disparbud/2025 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Masa Bakti 2025-2030	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2. Raperkada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1. Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 – 2029 2. Peraturan Bupati Garut Nomor 224 Tahun 2021 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Raperkada Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Dinas Pertanian

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Raperkada Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Raperkada Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
4	Memperkuat Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Badan Pendapatan Daerah
		Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Raperkada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Inovatif dengan Layanan Publik yang Inklusif	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Badan Usaha Milik Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Lembaga Keuangan Mikro Garut 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 6. Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah 9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah 10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga 11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut 4. Raperkada Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut 5. Raperkada Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut	Sekretariat Daerah

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil 13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri		
		Perbup Nomor 53 Tahun 2024 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD	Raperkada Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		1. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Garut Satu Data 3. Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2022 tentang Pedoman, Kriteria dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.642-BAPPEDA/2023 tentang Pembentukan Struktur Penyelenggaraan Garut Satu Data	Raperkada Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Raperkada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Perencanaan

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
			Daerah (RIPJPID) Tahun 2025-2029	Pembangunan Daerah
		1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 3. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 4. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6. Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Izin Mendirikan Bangunan 8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum 9. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha 10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu 11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara On-line 12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status	Raperkada Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa	Badan Pendapatan Daerah

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik 13. Keputusan Bupati Nomor 26 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 973/Kep.171-Bapenda/2017 tentang Pembentukan Tim Pemerikasaan dan Penertiban Pajak Daerah		
		1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko 2. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah 3. Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 4. Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Melalui *Whistle Blowing System*		Inspektorat
		Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		1. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 3. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2023 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara 4. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 5. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil		Badan Kepegawaian Daerah

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
		6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Displin Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 229 Tahun 2021 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara		
6	Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penataan Kawasan Perkotaan	1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keungan Desa 2. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 4. Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa 5. Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	1. Keputusan Bupati SK Tim Pembina Pembangunan dan Pemerintahan Desa 2. Raperkada Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa 3. Raperkada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
		Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan		Dinas Perhubungan
		Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut		PDAM

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
7	Mewujudkan Kelestarian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berbasis Daya Dukung, Fungsi Ruang, dan Penanggulangan Bencana	1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. Keputusan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026	1. Raperkada Penerapan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Se Kabupaten Garut 2. Raperkada Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Di Kabupaten Garut 3. Raperkada Pengelolaan Sampah 4. Raperkada Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup
		1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Korban Bencana Dengan Pelayanan Cepat		
8	Mewujudkan Kesalehan Sosial, Kerukunan Antar Umat Beragama, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Pendidikan Wawasan Kebangsaan 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1. Raperkada Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan	Badan Kebangsaan Dan Politik

No	Misi/Prioritas Pembangunan Daerah	Regulasi Saat Ini (Termasuk Dokumen Perencanaan Sektoral)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi	Perangkat Daerah
	Perlindungan Masyarakat	3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* 8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat 9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat 10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut	Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pengawasan dan Penanggulangan Anti Maksiat	

Sumber : Analisis Bappeda dan Sekretariat Daerah (2025)

**) Identifikasi kebutuhan regulasi dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.*

Dalam proses penyusunan regulasi, idealnya dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, berbasis data, mempunyai keselarasan vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya dan transparan agar regulasi yang dihasilkan efektif, *legitimate*, serta dapat diukur kualitas kebijakannya berdasarkan dimensi perencanaan kebijakan yang baik, dimensi implementasi kebijakan yang efektif, dimensi evaluasi keberlanjutan dan dimensi transparansi serta adanya partisipasi publik.

3.4.4. Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi

RPJMD Kabupaten Garut 2025-2029 juga mendukung sejumlah Program Prioritas Nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 terutama Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai berikut:

1. Swasembada Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi dan berkaitan dengan salah satu poin dalam konsep human security. Untuk mewujudkan swasembada pangan, perlu diperhatikan 3 (tiga) pilar yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan.

Adapun peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini dapat meliputi:

a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
b. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau
c. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura
d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
f. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan
g. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi
h. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar,
i. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
j. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel Dukungan Daerah terhadap Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut.

2. Makan Bergizi Gratis

Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk:

a) peningkatan gizi dan partisipasi sekolah, meliputi: peningkatan akses dan pemenuhan makanan bergizi, penanaman perilaku dan gizi seimbang, peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran anak sekolah
b) pengurangan kemiskinan, meliputi: penciptaan lapangan kerja dan pengurangan beban rumah tangga dalam perolehan pangan
c) pemberdayaan ekonomi lokal, meliputi pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Adapun peran pemerintah daerah dalam mendukung program ini dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3.10 Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Kabupaten Garut telah membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.365-KESRA/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyusun perencanaan percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis
2) Melaksanakan identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kecamatan baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi kebutuhan
3) Melaksanakan percepatan penyelenggaraan Program MBG serta berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah
4) Mendorong ketersediaan, keterjangkauan akses rantai paok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan

5) Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nafional dan pihak lainnya dalam pelaksanaan tugas satuan tugas

3. Sekolah Rakyat

Progam ini merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses Pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar dalam kurikulum standar tetapi juga ditambah dengan Pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*) serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan sekolah terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pemerintah Kabupaten Garut mendukung program ini melalui penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen, perizinan, penyiapan guru serta tenaga pendidik. Adapun saat ini Kabupaten Garut sudah mempersiapkan Sekolah Rakyat Rintisan yang rencananya akan menampung 75 orang calon siswa (25 orang jenjang SD dan 50 orang jenjang SMP).

4. Koperasi Merah Putih

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah, disebutkan bahwa akan dilakukan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat sendiri akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 5.877 unit. Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah perdesaan diantaranya pendapatan penduduk desa yang masih minim, kurangnya lapangan kerja di desa, tidak stabilnya harga bahan pokok, fasilitas Kesehatan masih terbatas dan terjebak pinjaman online atau rentenir. Unit usaha pada Koperasi Merah Putih diantaranya took sembako, aktivitas simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, gudang penyimpanan dan penyediaan logistik desa.

Dukungan pemerintah Kabupaten Garut dalam pembentukan Koperasi Merah Putih diantaranya:

1) Menyediakan anggaran untuk pembuatan akta notaris koperasi
2) Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan koperasi
3) Melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Pemerintah Pusat
4) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM, Digitalisasi, Tata Kelola Kelembagaan dan Akses Pembiayaan bagi 442 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

5. Program 3 Juta Rumah

Program ini merupakan inisiatif strategis nasional dalam sektor perumahan yang diluncurkan untuk menjawab tantangan *backlog* perumahan nasional yang tinggi serta untuk memperluas akses

Masyarakat terhadap hunian layak terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan utama Program 3 Juta Rumah yaitu:

1) Mengurangi *backlog* kepemilikan rumah di Indonesia secara signifikan
2) Meningkatkan kualitas hunian Masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni
3) Memastikan akses perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok Masyarakat.

Program ini terdapat dalam Program Prioritas Nomor 13 "Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan" Dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nomor 7 yaitu "Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)".

Dukungan pemerintah Kabupaten Garut dalam Program 3 Juta Rumah diantaranya yaitu:

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
b. Perbaikan rumah bagi korban terdampak bencana dan pembangunan rumah bagi korban relokasi terdampak program pemerintah
c. Fasilitasi kolaborasi peran swasta maupun BUMD dan pihak lainnya
d. Fasilitasi kelembagaan dan regulasi daerah antara lain Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selain itu, berikut merupakan daftar Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada Tabel Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029 serta sandingannya dengan dukungan program/proyek strategis oleh Provinsi Jawa Barat dan dukungan Kabupaten Garut. Daftar proyek ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah dam ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. Pemerintah Kabupaten Garut akan selalu mendukung Proyek Strategis Nasional sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 3.9 Dukungan Daerah Terhadap Indikasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut

No	Proyek Strategis Nasional*	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi	Dukungan Kabupaten Garut
Makan Bergizi Gratis			
1	Program Makan Bergizi Gratis	• Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik • Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	• Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik 10 Komoditas strategis dan unggulan • Fasilitasi Sertifikasi Organik dan Uji Mutu (Padi dan Jagung) • Sosialisasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) • Peningkatan produksi dan populasi ayam ras petelur • Peningkatan produksi perikanan • Peningkatan produksi daging dan susu • *Monitoring* Dapur MBG/SPPG • Pemberian PMT pada balita s*tunting*, balita tidak naik timbangannya dan pemantauan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	• Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal/kesetaraan • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal/kesetaraan • Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana, prasarana dan utilitas sekolah untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan non formal/kesetaraan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Pembangunan Unit Sekolah Baru Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan	
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus	• Pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Bungbulang • Penguatan operasional RSUD Malangbong • Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk merealisasikan UHC • Pemberian jaminan kesehatan terutama bagi ibu hamil dengan resiko

No	Proyek Strategis Nasional*	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi	Dukungan Kabupaten Garut
5	Program Penuntasan TBC	Program Sanitasi Lingkungan	● Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) ● Penyusunan regulasi-regulasi yang diperlukan terkait penanggulangan TBC di tingkat daerah ● Inovasi program pengendalian TBC antara lain Rumah Singgah Pasien TBC, santunan bagi pasien TBC, kerja sama dengan perusahaan swasta untuk dilakukan skrining TB kepada para pegawai ● Penemuan (*Case finding*) dan penanganan penderita TBC ● Pembangunan IPLT dan IPAL Bojonglarang
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	● Pendidikan berkarakter ● Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat	● Pemberian Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana, 421 desa dan 21 kelurahan (442 orang mahasiswa) ● Bantuan pendidikan untuk 1.000 orang mahasiswa ● Bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi bagi 150 guru honorer PAUD yang sedang menyelesaikan S1
Swasembada Pangan			
7	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	▪ Pengamanan Mata Air ▪ Reboisasi hutan dan lahan ▪ Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai	● Evaluasi lahan kritis ● Pembentukan Satgas Penanganan Lahan Kritis ● Edukasi terhadap warga ● Rehabilitasi lahan kritis ● Gerakan "*Leuweung Hejo*" ● Perhutanan sosial dengan membentuk tim kerja lintas sektor, penyusunan *masterplan* dan regulasi pendukung ● Gerakan perlindungan hutan, DAS, mata air dan situ ● Pembangunan embung untuk pertanian ● Rekomendasi dan dukungan perubahan fungsi kawasan hutan, pelestarian kawasan Gunung Cikuray menjadi kawasan hutan pelestarian tinggi dan Pegunungan Mandalagiri, Gunung Gelap dan Sancang sebagai taman hutan raya
8	Layanan Irigasi Pendukung	▪ Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ▪ Normalisasi Sungai dan Muara;	● Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi usaha tani ● Operasi, Pemeliharaan dan rehabilitasi 38 Daerah Irigasi Teknis

No	Proyek Strategis Nasional*	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi	Dukungan Kabupaten Garut
	Lumbung Pangan Nasional	▪ Pengamanan Mata Air; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	● Pembangunan SPAM Mata Air antara lain Mata Air Cihaneut, Cipulus dan Cibolerang
9	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi ● Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	● Peningkatan produksi dan populasi ternak: o Peningkatan kualitas genetik ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) o Optimalisasi hijauan pakan ternak melalui Pengembangan kawasan rumput ciptakan ternak andalan (PAKAR CINTA) o Perbaikan Manajemen Kandang Ruminansia Intensif dan Unggulan (PERMAK RINDU) ● Penguatan kelembagaan peternak ● Pelayanan kesehatan hewan ● Pengendalian penyakit hewan menular strategis ● Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner ● Sosialisasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
10	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	● Pembangunan Kampung Adat Nelayan ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	● Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas nelayan kecil ● Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil ● Penerapan teknologi perikanan tepat guna ● Sistem usaha perikanan mandiri melalui budidaya ikan di perairan umum (Serikandi Biru)
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
11	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	● Peningkatan kapasitas sumber daya industri ● Sosialisasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik	● Peningkatan kapasitas sumber daya industri ● Sertifikasi Auditor Mutu dan Penilai Usaha Perkebunan ● Fasilitasi nelayan pengumpul rumput laut ● Fasilitasi usaha pengolahan rumput laut ● Fasilitasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

No	Proyek Strategis Nasional*	Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi	Dukungan Kabupaten Garut
13	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Transformasi Birokrasi	● Digitalisasi layanan administrasi keuangan dan pelaporan ● Digitalisasi sistem informasi aset ● Digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah ● Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) ● Pengembangan Aplikasi Garut Satu Data ● Optimalisasi *Data Center* Pemerintah Daerah ● Layanan jaringan internet Pemerintah Kabupaten Garut untuk 32 SKPD, 42 Kecamatan, 21 Kelurahan, 22 UPT dan 60 WIFI Titik Area Publik
Konektivitas dan Kawasan			
14	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan *Leucir*);	● Rehabilitasi jalan ● Rekonstruksi jalan ● Pembangunan jembatan ● Rehabilitasi jembatan
Perumahan dan Permukiman			
15	Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan rumah rakyat miskin	● Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ● Penuntasan penanganan SK Kawasan Kumuh Tahun 2021 ● Penataan kawasan pedesaan untuk bangkitan potensi wisata dan ketahanan pangan ● Penanganan Kawasan Kumuh untuk kawasan diluar SK Kawasan Kumuh Tahun 2021 ● Fasilitasi bagi pengembang perumahan dalam penyediaan rumah di kawasan perkotaan Pameungpeuk ● Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghalisan Rendah (MBR)

**Keterangan:*

a) Daftar Proyek Strategis Nasional merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas Proyek-Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di carry-over dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

b) Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

3.4.5 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi

Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat serta APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana dan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut, baik itu lingkup proyek/program yang dibiayai oleh APBN maupun rencana pembangunan infrastruktur oleh APBD provinsi di kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Dukungan Daerah terhadap Program/Proyek Strategis Provinsi Bidang Infrastruktur Tahun 2025-2030

		Sumber Anggaran				
Program/Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha	Dukungan Pemerintah Daerah
Rekonstruksi dan Pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat Wilayah Timur	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran	√	√	√		- APBN: Dukungan melalui DAK - APBD Provinsi dan Kab/Kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
Reaktivasi Kereta Api Banjar Cijulang	Kota Banjar, Kab. Garut, Kab. Pangandaran	√	√	√	√	- APBN: Pembangunan Prasarana, Kereta Api - APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan, dukungan infrastruktur, akses simpul transportasi dan dampak sosial - BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Lahan
Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	Kolaborasi pendanaan
Penataan kawasan pemukiman kumuh	27 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	Kolaborasi pendanaan
Sanitasi lingkungan	27 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	Kolaborasi pendanaan
Pengelolaan sampah: pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah mandiri	27 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	- APBD Provinsi: Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah (Bukan Armada);

Program/Proyek Strategis Provinsi	Lokasi	Sumber Anggaran				
		APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha	Dukungan Pemerintah Daerah
						- APBD Kab/kota: Sarana Prasarana, Armada dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OM); - Swasta/Badan Usaha: CSR
100% Elektrifikasi: - Listrik per kapita di kawasan perdesaan - Pembangunan PLTS ATAP SMK - Pembangunan PLTS ATAP Gedung	27 Kabupaten/Kota		√	√	√	Kolaborasi pendanaan termasuk CSR Kolaborasi pendanaan (7 Gedung per tahun) Kolaborasi pendanaan (2 s.d. 3 Gedung per tahun)
Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi (*Cai Ngalir*)	27 Kabupaten/Kota	√	√	√	√	- APBN: Melalui Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP); - APBD Provinsi: OP Irigasi dan situ kewenangan provinsi; Rehab dan Pembangunan Jaringan Irigasi
Penyelamatan sumber mata air	19 Kabupaten		√	√	√	Kolaborasi pendanaan untuk pembebasan dan pengelolaan mata air

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Selanjutnya, mengacu pada arah pembangunan kewilayahan pada Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029, berikut merupakan lokasi prioritas dan indikasi intervensi untuk Kabupaten Garut serta dukungan daerah terhadap arah kebijakan kewilayahan yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.11 Dukungan Daerah terhadap Intervensi Arah Kebijakan Kewilayahan Program Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 di Kabupaten Garut

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A2	Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Bandung dan sekitarnya • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota. Cimahi	• Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya;	Gerbang Tol Pamekarsari Kec. Banyuresmi dan Gerbang Tol Cimaragas Kec. Garut Kota	• Pembebasan Lahan Akses Tol Cimaragas • Pembangunan Akses Tol Banyuresmi • Penataan Tata Ruang wilayah Akses Tol • Pembebasan lahan, Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Lingkar Luar Kota Garut (lanjutan Jalan Soekarno–Hatta /*exit* tol Pamekarsari, Jalan By Pass II dan Jembatan Cimanuk Copong, Jalan Cimaragas–Gandasari, Jalan Gandasari–Tarogong–Letjen Ibrahim Ajie dan Rekonstruksi Jalan Anwar Musaddad)
C2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan- Cilaki • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Ciamis • Kab. Pangandaran	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, Situ Bagendit, Situ Gede		• Operasionalisasi, Pemeliharaan dan rehabilitasi 38 Daerah Irigasi Teknis dan Irigasi usaha tani.
		• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura	Kecamatan Garut Kota	• Pembangunan embung dan penampung air lainnya sebanyak 15 unit dan Kolam Retensi Cirumput
		• Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Tersebar 42 Kecamatan di Kabupaten Garut	• Reviu/Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
		• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan *antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.*		Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 • Verifikasi dan Validasi Penyerapan Pupuk Bersubsidi • Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) • Fasilitasi Pelayanan Gratis Pengolahan Lahan (GAS POLL) pada lahan sawah LP2B • Fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian (Pra-panen dan Pasca Panen) • Pengembangan perbenihan padi dan tanaman pangan Lainnya; tanaman hortikultura; tanaman tembakau dan perkebunan lainnya • Penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida • Pengembangan kawasan Bawang Merah, kawasan Aneka Cabai, dan kawasan Jahe berorientasi ekspor • Pengembangan luasan *Closed Loop* • Rehabilitasi kawasan Jeruk
		• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, *antara lain melalui penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.*	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	• Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui fasilitasi bantuan pestisida, pengembangan Agens Pengendali Hayati (APH), layanan Agroklinik, fasilitasi brigade perlindungan tanaman, dan penerapan pengendalian hama terpadu. • Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI). • Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha pertanian.

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
		• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, *antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.* • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.	• Wilayah rawan bencana (DPI/Banjir/Kekeringan dan serangan OPT) • Lokasi Sentra Pertanian	• Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Mikro Perlindungan Petani. • Fasilitasi serap gabah dan jagung; fasilitasi pameran pertanian; digitalisasi pemasaran; • Penerapan *Good Handling Practices* (GHP), pelaksanaan registrasi kebun; Fasilitasi sertifikasi padi organik; Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
		• Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)		• Peningkatan produksi dan populasi ternak: o Peningkatan kualitas genetik ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) o Optimalisasi Hijauan Pakan Ternak melalui Pengembangan kawasan rumput ciptakan ternak andalan (PAKAR CINTA) o Perbaikan Manajemen Kandang Ruminansia Intensif dan Unggulan (PERMAK RINDU) • Penguatan kelembagaan peternak • Pelayanan kesehatan hewan • Pengendalian penyakit hewan menular strategis • Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
		• Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut)	Sentra IKM Olahan Bambu, Kecamatan Selaawi	• Penguatan kelembagaan Badan Kerja sama antar desa pada kawasan perdesaan • Pembangunan infrastruktur dasar penunjang pengembangan kawasan perdesaan seperti jalan, irigasi, air minum dan pengolahan limbah atau sanitasi • Penguatan kelembagaan dan pengelola sentra IKM • *Business match* dan promosi nasional • Fasilitasi subsidi penyediaan bahan baku
D1	Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Cianjur	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik pedesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi dan pangan	Kecamatan Pasirwangi	• Pembangunan SPAM di 42 Kecamatan dengan target sebanyak 31.566 SR dan penyediaan SPALD tersebar di 42 Kecamatan target 1.770 Rumah Tangga, serta pemanfaatan mata air Cihaneut Kecamatan Pasirwangi
		Peningkatan ketahanan bencana		• Pengadaan *early warning system* banjir, longsor dan tsunami di daerah rawan bencana • Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana • Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana • Pembentukan Desa Tangguh Bencana • Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana
		Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pameungpeuk (PHTC)	Kawasan Perkotaan Pameungpeuk	• Fasilitasi bagi pengembang perumahan dalam penyediaan rumah di kawasan perkotaan Pameungpeuk • Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi MBR

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
		Peningkatan pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk, dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat;	Pengembangan jalur Tengah Selatan yang menghubungkan dari Kab. Bandung ke Kab. Tasikmalaya. Untuk wilayah Garut jalur yang dilalui Sumadra, Pamegatan Singajaya dan Taraju	Pembangunan Jalan Sukamurni (Cilawu) – Wangunjaya (Banjarwangi) untuk pendukung jalan Jalur Tengah Selatan (Sumadra–Cileuleuy– Pamegatan–Singajaya–Taraju) untuk membuka dan mengembangkan Desa tertinggal.
		Pemberdayan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan	Lokasi sentra pertanian	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
		Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti;	Kecamatan Cikelet	• Penguatan aspek keamanan berwisata • Peningkatan kualitas daya tarik wisata daerah • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif • *Event* promosi dan sinergi pariwisata • Peningkatan *branding* dan pengenalan kebudayaan Kabupaten Garut untuk pengembangan daya tarik pariwisata
		Penguatan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer di Pameungpeuk, serta penguatan kawasan Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan matra udara;	-	-

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
		Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital		• Program Bakti Komdigi (penyediaan akses internet di beberapa area *blankspot* khususnya daerah Garut Selatan • Penyediaan akses internet area publik (*Wifi*-publik) • Sosialisasi Garut Hebat *Super Apps* (literasi digital) • Siaran radio Intan Garut melalui *streaming* (www.radiointan.garutkab.go.id)
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan		• Pemanfaatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) • Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)) • Penyaluran bantuan sosial sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
		Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	-	-
		• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Pameungpeuk (PHTC)	-	- **RSUD Pameungpeuk merupakan kewenangan Provinsi*

KODE	Program Prioritas Nasional		Kabupaten Garut	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
	• Kab. Bogor • Kab. Bandung Barat • Kab. Garut • Kab. Bandung • Kab. Cianjur	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)		• Sosialisasi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) • Peningkatan produksi dan populasi ayam ras petelur. • Peningkatan produksi perikanan • Peningkatan produksi daging dan susu • *Monitoring* Dapur MBG/SPPG • Pemberian PMT pada balita s*tunting*, balita tidak naik timbangannya dan pemantauan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri

Sumber : Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, diolah Bappeda 2025

Terkait rencana pembangunan jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah utamanya terhadap industri lokal, adapun dampak tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Aksesibilitas dan Logistik
   - Pembangunan Jalan Tol akan mempercepat distribusi barang dan jasa dari dan ke Garut serta berpeluang membuka akses pasar baru serta mempercepat pergerakan input-output industri lokal;
   - Biaya logistik yang cenderung menurun akan menurunkan biaya produksi dan industri menjadi lebih kompetitif regional.
b. Peningkatan Investasi dan Properti
   - Pembangunan Jalan Tol dapat mendorong investasi baru, terutama di kawasan *exit* tol yang direncanakan akan berada di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Cilawu turut membuka peluang pengembangan industri, pergudangan, properti, dan bisnis *rest-area*;
   - Keberadaan Properti di sekitar koridor tol akan menjadi area yang diminati.
c. Pengembangan UMKM dan Industri Kreatif
   - Akses ke pusat distribusi mempermudah UMKM seperti kerajinan kulit, makanan, wisata dan produk UMKM daerah untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas;
   - *Multiplier effect*: akan mendukung peningkatan konsumsi karyawan dan jasa pendukung industri yang mendongkrak perputaran ekonomi daerah.
d. Sektor Pariwisata
   - Memperpendek jarak tempuh menuju daerah wisata akan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun regional, mendukung industri hotel, kuliner dan produk lokal lainnya.
e. Efek *Spillover* Regional
   - Pembangunan jalan tol memungkinkan kawasan industri di sekitar Garut , seperti Bandung dan Tasikmalaya terhubung sehingga dapat berbagi manfaat dalam pertumbuhan ekonomi regional.

3.5 Strategi Pencapaian Target Indikator Makro Kabupaten Garut

Dalam upaya pencapaian target Indikator makro Kabupaten Garut disusun strategi yang mengadopsi Konsep Trisula Pembangunan Kabupaten Garut dengan memotret strategi keterkaitan antar indikator makro. Trisula Pembangunan mengarahkan strategi investasi pada investasi sektor riil dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia baik dari dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peningkatan investasi sektor riil akan mendorong penciptaan lapangan kerja, begitu pula peningkatan kualitas SDM akan mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menurunkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selanjutnya, TPT yang rendah akan selaras dengan kenaikan daya beli masyarakat yang salah satunya tercermin dalam peningkatan indikator PDRB per kapita. Investasi sektor riil juga meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sisi produksi sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga mengalami kenaikan.



Sumber: analisis Bappeda (2025)

Gambar 3.11 Keterkaitan antar Indikator Makro

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inklusif dan berkelanjutan), sumber pertumbuhan ekonomi harus berbasis potensi lokal serta memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha lokal Kabupaten Garut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga perlu diciptakan dengan fokus pada investasi ramah lingkungan, energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada lingkungan ekologi daratan dan pemanfaatan sumber daya laut, kelautan dan pesisir secara berkelanjutan (ekonomi hijau dan ekonomi biru). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan selaras

dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (indeks gini) serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sebelum menjelaskan terkait strategi pencapaian target Pembangunan Kabupaten Garut, berikut merupakan hasil analisis SWOT yang dimiliki oleh Kabupaten Garut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi yang akan dilakukan.



Sumber: analisis Bappeda (2025)

Gambar 3.12 Analisis SWOT Kabupaten Garut

Selanjutnya, secara rinci strategi pencapaian indikator makro masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

A. Strategi Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pemerintahan Kabupaten Garut turut medukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 (delapan) persen pada tahun 2029 yang didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada Tahun 2029 diproyeksikan mencapai 5,42-7,88%. Berdasarkan analisis dan kajian percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Garut, dijelaskan bahwa secara garis besar tipe kebijakan pengembangan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan mendorong produksi (*Push Supply Side*)
   Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong volume produksi, contoh pada kategori pertanian antara lain program bantuan/subsidi pupuk, benih dan sebagainya atau penyuluhan, diklat metode

pertanian, penerapan inovasi dan teknologi pertanian dan lain sebagainya.

2. Kebijakan tarikan permintaan (*Pull Demand Side*)
   Kebijakan ini bertujuan menciptakan *demand* untuk menstimulus peningkatan produksi pada kategori tertentu, contoh pada kategori pertanian, regulasi penggunaan bahan-bahan lokal pada kegiatan industri agro, hotel dan restoran. Penciptaan aktivitas ekonomi seperti *car free day (CFD)*, pasar kaget, pasar desa, dan sebagainya. Pengembangan pariwisata untuk ekspansi *demand* pada kategori hotel, restoran, jasa travel, jasa hiburan yang efek *multiplier*-nya ke seluruh ketegori ekonomi.

Kombinasi penerapan kedua kebijakan tersebut harus dilakukan sesuai kebutuhan wilayah dengan menganalisis kondisi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Ketika produksi telah melimpah harus dikedepankan program-program yang menciptakan *demand*, sebaliknya ketika teridentifikasi *demand* telah tinggi perlu merealisasikan program-program yang mendorong produksi untuk memenuhi *demand* dengan produk lokal. Pada dasarnya kedua tipe tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Berikut merupakan hasil analisis kelebihan dan kelemahan Kabupaten garut berdasarkan analisis ekonomi dan struktur geografi serta sosial:

Tabel 3.12 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kabupaten Garut untuk Strategi Pertumbuhan Ekonomi

Kelebihan / Kekuatan	Kekurangan / Kelemahan
1. Memiliki lahan pertanian, kehutanan dan perairan yang relatif luas dan subur yang menyebabkan sebagian besar penduduk mudah membudidayakan komoditas-komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan. Kelebihan ini membuat petani di kabupaten Garut tergolong sebagai petani *poly culture* (membudi dayakan banyak komoditi pertanian) walaupun masih didominasi petani subsisten. Hal tersebut juga menyebabkan kinerja kategori pertanian memegang kunci perekonomian di Kabupaten Garut. 2. Relatif "murahnya tingkat upah" sehingga menjadi salah satu faktor penarik investasi dari luar, seperti adanya perpindahan lokasi industri dari wilayah lain yang menguntungkan Kabupaten Garut dari sisi penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) maupun penyerapan tenaga kerja. 3. Jumlah penduduk yang cukup banyak dan mencukupi kebutuhan tenaga kerja, dimana jumlah angkatan kerjanya jauh lebih tinggi dari kesempatan kerja. 4. Penduduk yang banyak dan akses ke wilayah-wilayah padat penduduk dan kutub pertumbuhan seperti Kota Bandung dan Jabodetabek relatif mudah, sehingga total permintaan (*demand*) terhadap barang/jasa sangat tinggi (dari permintaan lokal maupun luar wilayah) yang berpotensi mudah dalam mengembangkan ekonomi di berbagai kategori. 5. Keindahan alam, udara yang sejuk dan kelebihan lain menyebabkan banyak obyek Daya Tarik Wisata (DTW) yang dapat dikembangkan, sehingga sektor pariwisata mudah dikembangkan. Sektor pariwisata merupakan metode ekspansi *demand* terhadap barang/jasa yang sangat potensial dan berdampak positif terhadap kinerja di seluruh kategori perekonomian di Kabupaten Garut. Karakter pengeluaran wisatawan cenderung untuk konsumsi barang/jasa yang khas di wilayah destinasi, sehingga efek	1. Wilayah yang luas dengan kondisi geografis sebagian besar bukit dan pegunungan, menyebabkan rentang kendali yang tinggi menjadi "tantangan" dan berimplikasi pada jarak per kapita penduduk ke kutub-kutub pertumbuhan masih sangat tinggi dan dengan tingkat akses yang relatif sulit, sehingga partisipasi masyarakat dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau produktifitas masih relatif rendah. Responsivitas masyarakat dalam penciptaan NTB masih terkendala karena akses ke pasar yang masih kurang optimal serta sangat terbatas dari sisi kategori yang dapat di usahakan. 2. Proses bisnis pertanian belum dibarengi dengan teknologi dan pengolahan pasca panen yang memadai sehingga fluktuasi atau volatilitas harga produk pertanian masih relatif tinggi terutama pada produk hortikultura dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja kategori pertanian yang cenderung rendah dan berimplikasi pada kontribusi yang tidak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun pertanian merupakan kategori yang sangat dominan pada struktur ekonomi. Kondisi ekstrim pun dapat terjadi ketika iklim dan cuaca kurang memberi dukungan terhadap kinerja sektor pertanian, maka bukan tidak mungkin sektor andalan ini akan menyebabkan kontraksi pada LPE. 3. Hilirisasi terhadap produk kategori pertanian masih kurang optimal, yang terlihat dari kontribusi pertanian masih sangat dominan dan perkembangan kategori lainnya (seperti, industri pengolahan, tranportasi dan pengangkutan, dan lain-lain) masih kurang terlihat. Keterkaitan sektor ke hilir (*Foreward Linkage*) dari kategori pertanian masih relatif rendah sehingga pertanian belum maksimal dalam mengembangkan kategori-kategori lainnya. Begitupun sebaliknya, kategori-kategori lainnya di Kabupaten Garut belum cukup optimal dalam meningkatkan kinerja pertanian. Gambaran keterkaitan sektor yang masih belum optimal tersebut, menyebabkan struktur ekonomi Garut yang masih tampak tradisional dengan *share* pertanian yang sangat mendominasi, sedangkan *share* kategori penunjang belum cukup optimal.

Kelebihan / Kekuatan	Kekurangan / Kelemahan
multiplier-nya terhadap ekonomi lokal sangat tinggi dan menyebar pada seluruh sektor. Wilayah dengan sektor pariwisata yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pertumbuhan dengan distribusi merata), karena konsumsi wisatawan berbasis barang jasa lokal.	4. Masih relatif rendahnya perkembangan kategori industri manufaktur (khususnya yang memanfaatkan produk pertanian), sehingga tarikan permintaan terhadap pertanian kurang optimal yang juga menyebabkan volatilitas produk pertanian masih relatif tinggi. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu penghambat produktivitas kategori Pertanian yang merupakan sektor andalan di Kabupaten Garut. 5. Pada sektor pariwisata, lama tinggal wisatawan masih kurang optimal yang tampak dari rata-rata lama menginap di hotel-hotel masih sangat rendah, terutama hotel melati, yakni dibawah 2 hari. Lama tinggal yang rendah berimplikasi pada kurang optimalnya dampak pariwisata yang merupakan mesin pengungkit *demand* lokal yang sangat potensial. Hal tersebut sangat disayangkan, karena dengan banyaknya obyek Daya Tarik Wisata (DTW) yang merupakan magnet dari kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Garut. 6. Dari sisi pengeluaran, mesin pertumbuhan Garut masih sangat didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang sangat peka terhadap fluktuasi harga yang relatif sulit untuk di intervensi karena sistem perekonomian regional yang sangat terbuka. Di samping itu, daya beli masyarakat (konsumsi masyarakat) masih sangat rendah, yang tergambar dari indeks daya beli pada IPM, dimana Kabupaten Garut menempati urutan ke dua terbawah setelah Kabupaten Cianjur jika dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Barat. Dengan mesin pertumbuhan mengandalkan komponen Konsumsi Rumah Tangga, maka dorongan terhadap LPE tidak maksimal dan sangat rentan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Sumber : Analisis dan Kajian Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut (BPS, 2025)

Menurut BPS, peran pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi diantaranya yaitu:

1. Sisi Produksi:

Menyusun program-program yang mengarah pada peningkatan produktivitas seluruh Kategori, terutama yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian, baik melalui dorongan produksi maupun peningkatan *demand* terhadap produk lokal.

a. Meningkatkan kinerja kategori dominan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan karena LPE Kabupaten Garut sangat peka dengan kinerja Kategori ini, sehingga kontraksi yang terjadi pada kategori ini akan berpotensi menghambat upaya percepatan LPE. Selain itu, pertumbuhan pada kategori pertanian sangat efektif dalam mendorong LPE yang berkualitas dan berdampak pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan karena pertanian merup,'akan basis lapangan kerja sebagian besar penduduk Kabupaten Garut, khususnya penduduk kalangan menengah bawah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya melalui:
   - Program-program yang dapat mendorong produktivitas pertanian melalui peningkatan metode budidaya dan kapasitas petani, pemberian penyuluhan metode tani, bantuan benih, sarana produksi pertanian pupuk, *cold storage,* dan lain-lain.
   - Program-program yang mendorong perbaikan sistem pasca panen dan pengolahan hasil panen untuk menurunkan volatilitas produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bergerak di sektor pertanian.
   - Program-program yang mendorong peningkatan permintaan (*demand*) produk pertanian diantaranya:
     - Hilirisasi produk pertanian dengan menstimulus kegiatan industri manufaktur yang berbasis produk pertanian lokal. Hal ini juga dapat menurunkan volatilitas produk dan pengembangan kategori-kategori lain diluar pertanian.
     - Pembentukan jejaring dengan *Food Station* yang ada di luar Garut seperti Bandung, Jakarta, dan sebagainya yang dilakukan untk meningkatkan *demand* pertanian.
   - Kebijakan/regulasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Garut untuk menggunakan produk lokal, khususnya pertanian, sehingga proses hilirisasi berjalan optimal dan memperpanjang rantai penciptaan NTB khususnya pada agrobisnis.
   - Program peningkatan kategori-kategori penunjang petanian, seperti perdagangan alat dan bahan pertanian, angkutan barang, koperasi untuk penyerapan hasil dan permodalan, jasa pertanian dan sebagainya.
   - Program pembentukan pasar produk pertanian yang tersebar merata di wilayah Garut, sehingga akan meningkatkan animo masyarakat

dalam penciptaan NTB di sektor pertanian, dan kategori pertanian menjadi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) dan peningkatan produktivitas kategori-kategori di luar Pertanian melalui:
   - Percepatan realisasi investasi asing dan domestik, khususnya yang menciptakan banyak tenaga kerja lokal, dan dapat mendorong kinerja sektor andalan Kabupaten Garut.
   - Kemudahan perizinan usaha agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi.
   - Program-program atau kegiatan yang dapat menciptakan aktifitas ekonomi yang merata di seluruh wilayah seperti pasar kaget pada *event* Car Free Day (CFD), pasar desa, dan lain-lain. Hal ini juga dilakukan untuk memperkecil jarak per kapita masyarakat terhadap kutub-kutub pertumbuhan, sehingga menstimulus masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penciptaan NTB.
   - Program-program perbaikan infrastruktur agar masyarakat dapat mudah dalam mengakses kutub-kutub pertumbuhan (peningkatan konektivitas antar wilayah).
   - Program-program yang dapat menciptakan sentra-sentra industri terutama yang memanfaatkan produk pertanian lokal yang dominan di tingkat kecamatan atau desa.

c. Pengembangan pariwisata yang merupakan ekspansi *demand* yang sangat efektif. Sektor Pariwisata memiliki dampak *multiplier* yang sangat luas dan menyentuh seluruh kategori, karena konsumsi wisatawan cenderung berbasis produk lokal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu:
   - Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pariwisata baik Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)-nya maupun sarana lainnya seperti akomodasi, penyediaan makan minum dan kebutuhan wisatawan lainnya, agar lama tinggal wisatawan dapat lebih panjang sehingga penciptaan NTB di Kabupaten Garut lebih besar.
   - Peningkatan kualitas dampak pariwisata dengan mengarahkan konsumsi wisatawan yang berasal dari produk lokal Garut. Regulasi sarana akomodasi dan penyedia makan minum agar menginput barang-barang lokal Garut, karena dampak pariwisata dalam penciptaan NTB sangat bergantung dari struktur konten konsumsi wistawan, dimana semakin besar konten lokal yang dikonsumsi maka dampaknya terhadap perekoniman lokal Kabupaten Garut akan semakin besar.
   - Perbaikan sistem transportasi, khususnya di sekitar dan menuju destinasi wisata dan sarana-sarana pariwisata (hotel, restoran dan pusat perbelanjaan), sehingga para wisatawan tidak membawa kendaraan pribadi ke Garut yang akan membuat *trigger* pariwisata semakin meluas pada kategori-kategori ekonomi lainnya.

Pariwisata yang berkembang akan sangat efektif dalam peningkatan *demand* di Kabupaten Garut, namun membutuhkan *effort* yang tinggi dan kolaborasi seluruh sektor.

2. Sisi Pengeluaran:

a. Mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang sudah dianggarkan harus sesegera mungkin dibelanjakan agar menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu juga mengelola belanja barang/jasa dengan lokal konten yang tinggi pada belanja barang/jasa tersebut sehingga berdampak optimal terhadap perekonomian Kab. Garut.

b. Meningkatkan daya beli penduduk agar *trigger* dari konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal dengan langkah:

- Menyinambungkan program pengendalian inflasi, dengan pemenuhan *supply* barang pokok dan perbaikan sistem distribusi logistik, karena inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang dampaknya akan sangat terasa terhadap perlambatan LPE.
- Memperluas kesempatan kerja, terutama untuk angkatan kerja muda agar tidak migrasi keluar Garut untuk mencari pekerjaan. Program ini tentunya menunjang pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan NTB.



Sumber: Paparan "Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Regional melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 24 Juli 2025)*

Gambar 3.13 Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tanggal 11 Juli 2025,

terdapat 9 (Sembilan) langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Percepatan realisasi APBD;
2. Percepatan realisasi PMA dan PMDN;
3. Percepat realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah;
4. Pengendalian harga bahan pokok;
5. Pencegahan ekspor dan impor ilegal;
6. Perluasan kesempatan kerja;
7. Tingkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan sesuai potensi lokal;
8. Tingkatkan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal;
9. Mempermudah perizinan berusaha.



Sumber: Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tanggal 11 Juli 2025

Gambar 3.14 Langkah Konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Garut sesuai Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.374-BAPPEDA/2025.

Dalam upaya pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi, selain rekomendasi dari BPS dan selaras dengan arahan dari Pemerintah Pusat, strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut antara lain yaitu:

- Pengembangan infrastruktur ekonomi seperti revitalisasi pasar tradisional, irigasi pertanian, perluasan akses listrik, air bersih, dan internet serta peningkatan akses jalan untuk mendukung efisiensi logistik dan distribusi.

- Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam hal penyesuaian kurikulum dan penempatan tenaga kerja.
- Peningkatan investasi daerah, dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui : 1) kemudahan regulasi, perizinan dan kepastian hukum; 2) menjaga stabilitas sosial; 3) penguatan promosi potensi unggulan daerah, serta 4) penyusunan proposal proyek strategis daerah yang dapat menarik partisipasi swasta (*public-private partnership*).
- Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah, melalui optimalisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pengolahan skala kecil/menengah, termasuk penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal unggulan.
- Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal, dengan mengutamakan penataan destinasi wisata, pengembangan desa wisata, serta integrasi sektor pariwisata dengan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
- Penciptaan aktifitas ekonomi melalui *event-event* yang akan menciptakan pusat-pusat keramaian baik di pusat kota maupun di setiap kecamatan seperti pasar kaget, Car Free Day, Car Free Night atau event kebudayaan dan kreatif lainnya.
- Pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, yang dilaksanakan melalui fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan manajerial dan teknis, layanan rumah produksi dan kemasan, digitalisasi usaha, serta penguatan kelembagaan koperasi dan inkubasi wirausaha lokal melalui wira hebat.
- Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan dan bursa kerja, untuk memudahkan akses informasi lowongan kerja, pelatihan, dan rekrutmen tenaga kerja serta digitalisasi layanan ketenagakerjaan, salah satunya melalui *Garut Hebat Super App*.
- Perluasan kesempatan kerja produktif melalui program padat karya

B. Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Strategis dan Unggulan melalui Hilirisasi

Kabupaten Garut merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan. Produk-produk unggulan seperti jagung, kentang, cabai, bawang merah, kopi, dan kulit menjadi komoditas penting yang memiliki nilai jual tinggi. Namun, selama ini sebagian besar hasil alam Garut hanya dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lanjutan, sehingga nilai tambah ekonominya belum optimal. Potensi inilah yang menjadi dasar penting untuk mengembangkan hilirisasi di berbagai sektor.

Hilirisasi merupakan proses penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena mampu meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas pasar. Di Garut, jika

hilirisasi dikembangkan secara terencana, maka produk-produk lokal bisa bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Dengan begitu, pendapatan petani, peternak, dan pelaku UMKM pun dapat meningkat secara signifikan.

Salah satu sektor yang paling potensial untuk hilirisasi di Garut adalah pertanian dan perkebunan, seperti jagung, kopi, dan hortikultura. Jagung menjadi komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Garut dengan produksi tahun 2024 sejumlah 603.018 ton dan rata-rata produktivitas sebesar 8,17 ton/ha. Kabupaten Garut menjadi kontributor terbesar dengan nilai kontribusi pada tahun 2024 sebesar 51,75% dari total produksi jagung di Jawa Barat dan menjadi sentra jagung di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, masih banyak jagung yang dijual mentah tanpa diolah terlebih dahulu ke luar Garut sehingga nilai tambah nya masih relatif rendah.

Adapun di sektor perkebunan, komoditas kopi Garut juga dikenal sudah memasuki pasar ekspor, meskipun masih banyak yang dijual dalam bentuk *green bean*. Pengembangan pabrik *roasting* lokal, kemasan premium, dan *branding* bisa menjadikan kopi Garut bernilai lebih tinggi dan dikenal sebagai produk khas daerah. Dengan demikian, dalam rangka pengembangan hilirisasi diawali dengan penetapan komoditi unggulan dari sektor hulu yaitu melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Penetapan komoditi unggulan ini akan menjadi fokus bersama pengembangan hilirisasi yang melibatkan Perangkat Daerah lainnya, dalam meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, meningkatkan iklim investasi guna mendukung terwujudnya hilirisasi berbasis potensi lokal Garut.

Sumber daya manusia yang terampil menjadi kunci dalam proses hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan vokasional dan penguatan pendidikan kejuruan yang fokus pada keterampilan produksi, pengemasan, pemasaran, dan teknologi pengolahan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah kejuruan, dan dunia usaha dapat menciptakan SDM siap kerja dan inovatif. Integrasi antara Perangkat Daerah dalam memberikan pelatihan vokasional pun diperlukan, untuk menguatkan peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang hilirisasi di Kabupaten Garut, yaitu antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pengembangan hilirisasi juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan kawasan industri. Pemerintah Kabupaten Garut perlu mendorong kesiapan kawasan industri yang telah ditentukan yang belokasi di Kecamatan Leles, Cibatu, Bl. Limbangan, Selaawi dan perlu terintegrasi dengan pusat-pusat produksi. Hal ini akan mempercepat proses produksi, distribusi, dan ekspor produk hasil hilirisasi.

Sebagai salah satu langkah dalam mengawali pengembangan hilirisasi, pada tahun 2025 Kabupaten Garut telah mengusulkan dan menawarkan proyek investasi dalam ajang *West Java Investment Challenge* berupa Industri olahan tepung jagung dan industri olahan pakan silase. Proyek investasi ini diusulkan dan ditawarkan kepada investor dengan latar belakang dari potensi pertanian dan peternakan Kabupaten Garut. Perekonomian Kabupaten Garut sebagian besar didominasi dari sektor pertanian, yaitu sekitar 36%. Berdasarkan data lima tahun kebelakang, kontribusi sektor pertanian ini selalu menjadi yang terbesar, meskipun cenderung stagnan bahkan relatif menurun. Oleh karena itu, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian sangat penting dilakukan. Selain itu, dari sisi kesejahteraan petani, dari 431.138 orang yang bekerja di sektor pertanian, sekitar 82,23% nya merupakan petani gurem atau menggarap lahan kurang dari 0,5 ha.

Keberhasilan hilirisasi di Garut akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pihak swasta. Pemerintah berperan dalam regulasi, insentif, dan fasilitasi, sementara pelaku usaha harus aktif dalam inovasi dan pengembangan produk. Perusahaan besar juga dapat dilibatkan sebagai mitra strategis dalam transfer teknologi dan pembukaan pasar. Pengembangan hilirisasi di Garut tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial jangka panjang seperti pengurangan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan desa. Dengan pendekatan hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan, Garut dapat menjadi contoh daerah yang berhasil memanfaatkan kekayaan lokal untuk kesejahteraan warganya.

C. Strategi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam upaya mencapai target penurunan pengangguran terbuka di Kabupaten Garut, perlu dilaksanakan pendekatan multidimensi. Sehingga dalam upaya mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang di proyeksikan mencapai 6,24-6,83% pada tahun 2030, maka Pemerintah Kabupaten Garut menyusun strategi penanganan pengangguran terbuka sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Pemerintah Kabupaten Garut perlu secara aktif menarik investasi skala menengah dan besar melalui penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, dan penyediaan kawasan industri terpadu. Fokus harus diberikan pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, dan jasa profesional yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pembentukan forum investasi daerah yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi industri, dan lembaga keuangan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek penciptaan lapangan kerja. Selain itu, perlu dibangun skema kemitraan investasi antara pemodal besar dengan UMKM lokal untuk menciptakan rantai nilai yang inklusif.

2. Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Unggulan Daerah

Kabupaten Garut memiliki potensi besar di sektor pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang perlu dioptimalkan. Untuk pertanian, pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan seperti kopi, teh, dan hortikultura perlu didorong melalui mekanisasi dan pengolahan hasil. Sektor UMKM harus mendapatkan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pemasaran digital. Ekonomi kreatif dapat dikembangkan melalui pendirian sentra-sentra kreatif di bidang kerajinan, fashion, dan kuliner. Sementara pariwisata perlu diperkuat dengan pengembangan desa wisata, homestay, dan paket wisata berbasis alam dan budaya khas Garut.

3. Penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu yang memadukan data pencari kerja, lowongan pekerjaan, dan pelatihan vokasi sangat diperlukan. Sistem ini harus berbasis digital dan dapat diakses melalui platform *online* maupun *mobile application*. Integrasi dengan Dinas Pendidikan, BLK, dan asosiasi industri akan memastikan kesesuaian data. Fitur yang perlu disediakan meliputi pencocokan otomatis (*job matching*), pemetaan keterampilan (*skill mapping*), dan *monitoring* penempatan kerja. Sosialisasi intensif perlu dilakukan hingga ke tingkat desa agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal.

4. Pemantapan Kolaborasi Lembaga Pelatihan dengan Dunia Usaha

SMK dan lembaga pelatihan harus menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha melalui penyusunan kurikulum bersama, program magang terstruktur, dan *teaching factory*. Setiap SMK perlu memiliki minimal 5 mitra industri kuat di bidang relevan. Pembentukan bursa kerja khusus SMK yang terhubung dengan perusahaan mitra akan mempermudah penyaluran lulusan. Mekanisme sertifikasi kompetensi bersama industri perlu diterapkan untuk menjamin kualitas lulusan. Selain itu, perlu dibentuk forum rutin antara kepala SMK dengan asosiasi industri untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

5. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK perlu direvitalisasi melalui tiga aspek utama: sarana-prasarana, kualitas instruktur, dan kurikulum. Pembaruan peralatan pelatihan harus sesuai dengan standar industri terkini. Instruktur wajib mengikuti program penyegaran kompetensi secara berkala dan magang di industri. Kurikulum harus fleksibel, modular, dan dirancang berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja yang terus diperbarui. BLK juga perlu mengembangkan program pelatihan khusus untuk sektor-sektor prioritas daerah seperti agroindustri, otomotif, dan teknologi informasi. Kerja sama dengan perusahaan untuk program pelatihan khusus (customized training) akan meningkatkan relevansi output pelatihan.

6. Pengembangan Program Pemagangan dan Penempatan Kerja

Perlu dibangun skema pemagangan yang terstruktur dengan perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Program ini harus mencakup pembekalan bahasa, budaya kerja, dan keterampilan teknis sebelum penempatan. Untuk pasar luar negeri, perlu dijalin kerja sama dengan negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja terampil. Di tingkat lokal, program pemagangan harus melibatkan industri besar dan menengah dengan insentif pajak bagi perusahaan yang berpartisipasi. Mekanisme penempatan kerja pasca magang perlu dijamin melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan, pemerintah, dan peserta magang.

7. Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi perlu diarahkan pada pengembangan keterampilan teknis (*hard skills*) dan karakter kerja (*soft skills*) yang dibutuhkan industri. Pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dan metode pembelajaran di tempat kerja (*work-based learning*) harus menjadi pendekatan utama. Setiap lulusan wajib menguasai minimal satu sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Untuk meningkatkan relevansi, dewan kurikulum vokasi harus melibatkan praktisi industri secara aktif. Program kewirausahaan juga perlu diperkuat untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

8. Pemantapan Hubungan Industrial yang Harmonis

Pemerintah perlu memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah secara rutin. Penyusunan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja sekaligus mendukung iklim usaha harus segera dilakukan. Program penyuluhan hukum ketenagakerjaan perlu digencarkan hingga ke tingkat UMKM. Pembentukan lembaga mediasi perselisihan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten akan membantu menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, perlu dikembangkan program kesejahteraan pekerja seperti asuransi kesehatan, pelatihan keterampilan berkelanjutan, dan skema pensiun mandiri untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat turut menunjang tercapainya program unggulan pada Agenda Transformasi Garut Hebat yaitu terciptanya 100.000 lapangan pekerjaan dari tahun 2025-2030.

D. Strategi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut di proyeksikan mencapai 74,39 Poin pada Tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut tentunya Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan strategi yang meliputi 3 (tiga) dimensi yang meliputi dimensi pendidikan, Kesehatan dan ekonomi sebagai berikut:

1) Dimensi Pendidikan

a. Pengurangan Angka Putus Sekolah (*Drop Out*)
- Melaksanakan deteksi dini siswa yang berisiko *drop out* oleh pihak sekolah
- Pemberian bantuan pendidikan terintegrasi untuk pemenuhan kebutuhan sekolah bagi kelompok miskin rentan

b. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah
- Pendataan penduduk usia sekolah dan penduduk dewasa usia produktif yang status pendidikannya yang belum tamat jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Penyiapan kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan kualitas pembelajaran untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) (Paket A/B/C) bagi masyarakat usia produktif
- Penyiapan lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui dorongan tumbuhnya investasi daerah dan kewirausahaan produktif berbasis potensi ekonomi lokal

c. Perluasan Jenjang dan Akses Pendidikan
- Peningkatan akses pendidikan dan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus melalui penerapan pengembangan model sekolah inklusif dan fleksibel dengan memanfaatkan teknologi digital
- Penyelenggaraan integrasi program lintas sektor

2) Dimensi Kesehatan

a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
- Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA)
- Pelaksanaan digitalisasi pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi anak
- Peningkatan edukasi gizi dan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada ibu hamil
- Penyediaan tenaga kesehatan bidan dan dokter yang memadai
- Pelaksanaan sistem rujukan maternal yang terintegrasi antar fasilitas kesehatan

b. Perluasan layanan kesehatan bagi masyarakat
- Pelaksanaan layanan program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Penguatan dan perluasan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP)
- Perluasan layanan kesehatan melalui peningkatan cakupan UHC
- Penyediaan akses air bersih, sanitasi dasar, dan rumah layak huni, akses transportasi menuju fasilitas layanan kesehatan.
- Kemitraan dan kolaborasi dalam layanan kesehatan

3) Dimensi Ekonomi

a. Perluasan kesempatan kerja produktif

- Mendorong investasi padat karya
- Fasilitasi pengembangan UMKM dan daya saing berbasis potensi lokal

b. Peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja
- Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah
- Pelatihan vokasi dan sertifikasi untuk pencari kerja usia produktif

c. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- Membuka seluas-luasnya kesempatan kerja
- Pengembangan pasar rakyat dan UMKM berbasis digital

E. Strategi Penurunan Prevalensi *Stunting*

Strategi percepatan penurunan *stunting* berbasis siklus hidup mengikuti logika "*life cycle approach*" yang memiliki makna bahwa intervensi dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga remaja untuk memutus rantai kekurangan gizi lintas generasi.

1. Pra-Konsepsi (Remaja Putri & Calon Pasangan Usia Subur)

Adapun tujuannya adalah memastikan calon ibu memiliki status gizi optimal sebelum hamil. Kegiatannya dapat melalui:
- Peningkatan status gizi remaja & calon pasangan
- Skrining anemia (Hb) & suplementasi tablet tambah darah (TTD) mingguan bagi remaja putri
- Edukasi gizi seimbang & kesehatan reproduksi di sekolah/madrasah
- Cegah pernikahan anak (advokasi ke tokoh masyarakat)
- Pencegahan Anemia pada remaja
- Kegiatan pemberian TTD pada remaja putri

2. Kehamilan (Ibu Hamil)

Adapun tujuannya adalah mengurangi risiko bayi lahir dengan berat badan rendah & gizi buruk sejak awal. Kegiatannya dapat melalui:
- Pemantauan kesehatan & gizi ibu hamil
- ANC minimal 6 kali dengan kualitas tinggi
- Pemberian TTD 90 tablet selama kehamilan
- Pemantauan kenaikan berat badan ibu
- Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
- Semua ibu hamil melakukan *Antenatal Care* (ANC) 6x

3. Persalinan & Neonatal (0–28 Hari)

Adapun tujuannya adalah menurunkan risiko kematian dan masalah gizi sejak lahir. Kegiatannya dapat melalui:
- Optimalisasi layanan persalinan & ASI
- Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
- Optimalisasi IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 1 jam pertama
- Edukasi ASI eksklusif
- Pemantauan bayi risiko tinggi.
- Peningkatan pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan

4. Bayi (0–23 Bulan)

Adapun tujuannya adalah mencegah *stunting* melalui ASI, MP-ASI, dan imunisasi. Kegiatannya dapat melalui:

- Pemberian gizi dan imunisasi lengkap
- ASI eksklusif 0–6 bln, dan Makanan Pendamping (MP-ASI) tepat waktu, bergizi, aman
- Pemantauan pertumbuhan melalui Kartu Menuju Sehat (KMS)
- Imunisasi dasar lengkap
- Edukasi pola asuh
- Peningkatan cakupan ASI eksklusif

5. Balita (2–5 Tahun)

Adapun tujuannya adalah Menjaga pertumbuhan optimal & mencegah gizi buruk. Kegiatan prioritas diantaranya:

- Pemantauan pertumbuhan & gizi balita
- Penimbangan rutin di Posyandu
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita gizi kurang.
- Edukasi stimulasi tumbuh kembang (PAUD/pos PAUD)
- Sanitasi & air bersih
- Penanganan balita *stunting*
- Penanganan balita gizi buruk

6. Anak Usia Sekolah & Remaja

Adapun tujuannya adalah menjaga gizi dan kesehatan agar siap menjadi calon orang tua sehat. Kegiatan prioritas diantaranya:

- Melakukan intervensi gizi & pendidikan kesehatan
- Program makan bergizi di sekolah
- Skrining kesehatan berkala
- Edukasi pola makan & olahraga
- Pencegahan anemia berkelanjutan
- Pencegahan anemia remaja

Selain itu, strategi lainnya dengan melakukan integrasi program lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, infrastruktur); penguatan pendataan *baseline stunting* dan faktor risiko berbasis kewilayahan; pelatihan tenaga kesehatan, organisasi profesi, kader posyandu dan unsur masyarakat lainnya; digitalisasi pemantauan gizi dan pertumbuhan anak (aplikasi terintegrasi); serta peningkatan kualitas intervensi & keberlanjutan program berbasis desa.

F. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan target indikator makro pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, tingkat kemiskinan ditargetkan untuk turun sampai pada level 8,20-9,06 pada tahun 2025 dan 6,42-7,11% pada Tahun 2030 yang secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Target Penurunan Tingkat Persentase Penduduk Miskin dan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2025-2030

INDIKATOR	*BASELINE* 2024	TARGET (TAHUN)						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,68%	8,20-9,06	8,55	7,65 - 8,36	7,32 - 8,03	6,94 - 7,64	6,42 - 7,11	
Proyeksi Penduduk (Jiwa)	2.716.950	2.748.699	2.779.720	2.810.070	2.839.650	2.868.510	2.896.490	
Target Jumlah Penduduk Miskin								
Batas bawah (Optimis)	259.320 jiwa	225.393	-	214.970	207.862	199.075	185.955	
Batas atas (Pesimis)	259.320 jiwa	249.032	-	234.922	228.024	219.154	205.940	
Nilai tengah (Realistis)	259.320 jiwa	237.213	237.666	224.946	217.943	209.114	195.948	
Target Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dari *baseline* 2024								
Batas bawah (Optimis)		33.927	21.654	44.350	51.458	60.245	73.365	
Batas atas (Pesimis)		10.288	21.654	24.398	31.296	40.166	53.380	
Nilai tengah (Realistis)		22.107	21.654	34.374	41.377	50.206	63.372	

Sumber: Bappeda, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menurunkan jumlah penduduk miskin sampai sebanyak 63.372 jiwa selama 6 tahun dari tahun 2025-2030 untuk mencapai target persentase penduduk miskin sebesar 6,77% (median dari 6,42-7,11%) dengan asumsi jumlah penduduk mengikuti proyeksi penduduk dari BPS sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Berdasarkan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029 yang disusun oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, dalam rangka mencapai target pengentasan kemiskinan, dilakukan pendekatan holistik berbasis lima pilar utama sebagai berikut:

1. Sistem Penargetan Nasional, dengan mengandalkan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar pemetaan, perencanaan, dan pelaksanaan program;
2. Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif, dengan meningkatkan ketepatan sasaran dan daya tanggap bantuan sosial, jaminan sosial, serta intervensi lainnya terhadap dinamika sosial;
3. Graduasi Kemiskinan, melalui intervensi terpadu dan terikat waktu untuk membantu rumah tangga miskin keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan menuju kemandirian dan kesejahteraan (*from poverty to prosperity through productivity*);
4. Pemberdayaan Ekonomi, melalui pendekatan ekosistem rantai pasokan semi tertutup (*Semi Closed-Loop Supply Chain*), pengembangan model Koperasi Modern Multi Pihak, dan Kartu Kewirausahaan Sosial;
5. Satu Dana Pengentasan Kemiskinan, yaitu sistem pengelolaan pendanaan yang terintegrasi secara digital untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pada sektor-sektor industrialisasi yang memerdekakan rakyat miskin.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Adapun pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu juga menggunakan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program,

termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan.

Kabupaten Garut secara kelembagaan telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.206-BAPPEDA/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut. Kelompok pengelola program terdiri dari Pengelola Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Pengelola Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Program Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan dan Pengelola Program Graduasi Kemiskinan.

Graduasi kemiskinan sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan memiliki tahapan sebagai berikut.



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (2025)

Gambar 3.15 Tahapan Graduasi Penduduk: Dari Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi menuju Kemandirian

Secara detail akan dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut baik untuk jangka menengah (5 tahunan) maupun tahunan.

3.6 Implementasi Reformasi Birokrasi

Pemerintah saat ini sedang menyusun regulasi Reformasi Birokrasi nasional yaitu *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB, begitu

pula dengan pemerintah Kabupaten Garut yang akan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029. Oleh karena ini, sebagai arah kebijakan dan panduan teknis untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemanpan-RB) telah menyampaikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tetang Pelaksanaan Refromasi Birokrasi pada periode Transisi Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025. Dengan demikian, akselerasi Refromasi Birokrasi sebagai salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tetap dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan berdampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tujuan Reformasi Birokrasi dalam periode 2025-2029 adalah terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui penerapan *digital governance* yang berkualitas.

Sasaran dan agenda RB General mencakup transfromasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, dan penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah.
2) Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human based governance*. Agenda prioritas meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.
3) Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human based governance*. Agenda prioritas meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.
4) Terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human based governance*. Agenda prioritas meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan manajemen

risiko, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme APIP serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.

5) Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*), peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas pelayanan publik, serta pengembangan *open government* dan inovasi layanan.

Selain RB General pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik yang diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025-2029 dan intervensi yang dilakukan meliputi:

1) Reformasi Birokrasi (RB) - Pengentasan Kemiskinan

RB pengentasan Kemiskinan bertujuan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan efektivitas porgram, sinergi lintas instansi dan penguatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penguatan koordinasi lintas instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan mengintegrasikan seluruh skema perlindungan sosial dengan program pemberdayaan diharapkan bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan, mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin, menciptakan proses graduasi penerima bansos ke kelompok berdaya.
- Penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial melalui sistem digital terintegrasi.
- Peningkatan akurasi data kemiskinan dan penguatan pemanfaatan data kemiskinan.
- Penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM.
- Inovasi model intervensi berbasis lokal untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain intervensi di atas, pemerintah dapat berperan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan RB pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan atau bentuk intervesi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

a) Ketahanan pangan, melalui keterjangkauan pangan dengan menurunkan beban rumah tangga miskin.
b) Ketahanan energi, melalui akses energi terjangkau untuk masyarakat miskin.

c) Swasembada air, melalui kemudahan akses air bersih (kesejahteraan dasar).
d) Perluasan Makanan Bergizi Gratis (MBG), melalui bantuan nutrisi bagi keluarga miskin dan rawan *stunting*.
e) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, melalui kemudahan akses layanan dasar bagi penduduk miskin.
f) Pembangunan dan pengembangan Desa/Koperasi/UMKM yang berbasis ekonomi rakyat.
g) Percepatan investasi dan perdagangan, untuk penciptaan lapangan kerja terutama bagi warga rentan kemiskinan.

2) Reformasi Birokrasi (RB) - Peningkatan Investasi

Tema RB Peningkatan Investasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. RB Peningkatan Investasi difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Indikator dampak yang diharapkan meliputi realisasi investasi (PMA dan PMDN) serta jumlah pelaku usaha baru. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyederhanaan proses perizinan investasi pusat dan daerah.
- Penguatan pelayanan publik melalui pengembangan digitalisasi pelayanan publik terpadu.
- Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses perizinan
- Inovasi penyediaan layanan pendampingan bagi investor
- Pemberian insentif yang mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas
- Penguatan SDM pelayanan perizinan dan pengawasan investasi

Selain intervensi di atas, pemerintah dapat berperan dalam mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

a) Kemudahan berusaha dan investasi pada sektor yang menunjang ketahanan energi (industry penghasil energi), air, dan pangan (industri berbasis agro dan sumber daya alam)
b) Kemudahan berusaha dan investasi berbasis lokal berupa Pembangunan dan pengembangan desa, koperasi, dan UMKM.

3) Reformasi Birokrasi (RB) - Mendorong Hilirisasi

Tema RB Mendorong Hilirisasi diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain:

a) Penyederhanaan perizinan di sektor hilirisasi.
b) Insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri pengolahan.

c) Penguatan kolaborasi regulasi antar instansi pemerintah.
d) Pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi,
e) Peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur pendukung hilirisasi.

Selain intervensi di atas, diharapkan pemerintah dapat berperan dalam mendukung percepatan hilirisasi SDA melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainnya yang terkait prioritas pembangunan nasional, antara lain:

a) Pembangunan atau pengembangan kawasan sentra produksi pertanian terpadu berbasis komoditas lokal (misalnya jagung, padi, kedelai, singkong) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan diversifikasi pangan.
b) Skema insentif fiskal bagi investor industri pengolahan pangan lokal yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi.

4) Reformasi Birokrasi (RB) - Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Tema RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatanpeingkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan baik primer maupun lanjutan.

Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

a) Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis layanan Kesehatan, mulai dari pendaftaran, rekam medis, hingga pengelolaan antrian dan layanan konsultasi daring.
b) Penguatan interoperabilitas data kesehatan antar unit layanan dan antar tingkatan pemerintahan.
c) Peningkatan kapasitas SDM layanan kesehatan dalam pemanfaatan teknologi digital.
d) Penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dukungan *platform* digital.
e) Penguatan pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan mutu layanan.

Selain intervensi di atas, instansi pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainya yang terkait prioritas pembanbunan nasional, antara lain:

a. Peningkatan pemerataan akses dan kualitas layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin.
b. Kebijakan pelaksanaan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kesehatan masyarakat miskin.
c. Kebijakan pelaksanaan pemberian pangan sehat untuk mencegah *stunting*.

5) Reformasi Birokrasi (RB) - Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam meujudkan swasembeda

pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan melaksanakan perbaikan tata kelola dalam upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluh pertanian, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain:

a) Peningkatan produksi pangan nasional berbasis teknologi inovasi pertanian.
b) Penguatan tata kelola distribusi dan logistik pangan.
c) Diversifikasi pangan sesuai potensi lokal.
d) Pengurangan *food loss and waste* di seluruh rantai pasok pangan.
e) Peningkatan keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain intervensi di atas, pemerintah mendorong swasembada pangan melalui kebijakan atau bentuk intervensi lainya yang terkait prioritas Pembangunan nasional, antara lain:

a) Perluasan Makanan Bergizi (MBG) untuk meningkatkan pemerataan akses makanan sehat dan bergizi.
b) Kebijakan pelaksanaan swasembada air untuk irigasi pertanian.
c) Kebijakan Pembangunan dan pengembangan industri pengelohan hasil pertanian melalui BUMDes, koperasi, dan UMKM.

6) Reformasi Birokrasi (RB) - Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Tematik ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia guna membangun generasi emas Indonesia 2045. Hal ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola layanan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari Pendidikan anak usia dini, Pendidikan disar, Pendidikan menengah, serta Pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas Unggul Garuda. Tematik ini juga berfokus pada peningkatan akses yang setara, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta integrasi teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas Pendidikan. Bentuk intervensi yang dapat di lakukan antara lain;

a) Pembagunan dan revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan.
b) Penguatan kapasitas dan kualitas gurudan tenaga kependidikan.
c) Transformasi digital pembelajaran dan literasi digital.
d) Intervensi khusus untuk kelompok rentan.
e) Penguatan mutu layanan, kurikulum dan sistem pembelajaran.
f) Transformasi pendidikan vokasi yang adaptif dan produktif.
g) Penguatan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan transisi PAUD ke sekolah Dasar (SD).
h) Penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta.

Selain beberapa strategi pencapaian RB Tematik yang selaras dengan strategi pencapaian indikator makro yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ini, detail intervensi untuk

RB Tematik akan dijabarkan melalui *cascading* kinerja yang digambarkan oleh pohon kinerja atau *logical framework* yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

3.7. Arah Pengembangan Riset dan Inovasi Kabupaten Garut

Berdasarkan rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, sebagai upaya mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Garut serta mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah, telah disusun rencana aksi tahunan selama 5 tahun dimana setiap tahapan mencakup pengembangan pada 8 sektor utama prioritas daerah yaitu:

1. Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Pertanian
2. Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Perikanan
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif & Produk Lokal
4. Pengembangan Pariwisata
5. Pengembangan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan UMKM
6. Pengembangan Aspek Lingkungan dan *Green Inovation*
7. Pengembangan Infrastruktur Digital dan *Smart City*
8. Aspek Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Adapun program-program yang akan diselenggarakan meliputi:

1. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur
2. Penguatan kelembagaan dan daya dukung riset
3. Kemitraan riset dan inovasi
4. Penguatan budaya riset dan inovasi
5. Keterpaduan riset dan inovasi daerah
6. Penyelarasan riset dengan perkembangan global

Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah yang bertanggung jawab atau menjadi pengampu atas pelaksanaan program turut disiapkan untuk memastikan keberlanjutan dan ketercapaian tujuan, serta mendorong inovasi yang berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah.

3.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

3.8.1 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kabupaten adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah kabupaten untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah kabupaten. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi seimbang di seluruh wilayah kabupaten.

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif kabupaten dalam hal ini merujuk pada Perda Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019

tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 dan Materi Teknis (Buku Rencana) RTRW Kabupaten Garut Tahun 2025. Dalam hal ini kebijakan pengembangan kewilayahan dalam RTRW Kabupaten diterjemahkan melalui strategi kebijakan penataan ruang, rencana pusat-pusat pelayanan, kawasan strategis, arah kebijakan dan strategi pengembangan.

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Garut dijabarkan melalui strategi penataan ruang dalam bentuk langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

No	Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan Fungsi Pelestarian Kawasan Lindung Peningkatan Fungsi Ekosistem dan Jasa Lingkungan pada Kawasan Lindung	a. Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan; b. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan; c. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi ekosistem; d. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi dengan memperhatikan kualitas fungsi ekosistem dan jasa lingkungan; e. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan f. Meningkatkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan.
2	Pengembangan Agribisnis yang Berkelanjutan	a. Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan; b. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan; c. Mengembangkan budi daya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan yang ramah lingkungan; d. Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan; e. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya; f. Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan g. Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
3	Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal	a. Mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata Alam, budaya dan buatan; b. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah Lingkungan; c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan; d. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan budaya; dan e. Meningkatkan pengembangan agrowisata.
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Terpadu dan Berkelanjutan pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	a. Mengembangkan perikanan tangkap; b. Mengembangkan budi daya perikanan; c. Mengoptimalkan fungsi ekosistem dan jasa lingkungan hutan *mangrove*; d. Mengembangkan budi daya laut yang ramah lingkungan; e. Mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan f. Merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan strategi, meliputi: a. Membangun dan menata kawasan industri yang terpadu, ramah lingkungan dan berkelanjutan; b. Mengembangkan dan menata industri kecil dan menengah serta sentra industri; c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan

No	Kebijakan	Strategi
		d. Mengembangkan ruang terbuka, baik hijau dan non hijau, sebagai area penyangga antara kawasan industri dengan kawasan lain di sekitarnya.
5	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Prasarana dan Sarana Wilayah	a. Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran; b. Reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api; c. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air; d. Mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung; e. Mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat; f. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; g. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan air limbah, sistem pelayanan air minum, sistem pelayanan drainase; dan b. Mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
6	Pengembangan Pusat Kegiatan Peningkatan Upaya Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana	a. Mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan; b. Mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi; c. Mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah; d. Mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL - PPL dan menunjang PPK; dan b. Mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan. Peningkatan upaya mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan strategi, meliputi: a. Memanfaatkan teknologi mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini; b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana; c. Menetapkan tempat evakuasi bencana; d. Menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pasca bencana; dan e. Meningkatkan infrastruktur mitigasi pada kawasan rawan bencana.
7	Pengendalian Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana	a. Mengendalikan dan membatasi pemanfaatan ruang, khususnya pembangunan fisik dan pengembangan kawasan budi daya, pada kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami; b. Membangun ketangguhan terhadap bencana di kawasan budi daya dari bahaya gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami; dan c. Mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk pengendalian pengembangan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana.
8	Peningkatan Fungsi Kawasan	a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

No	Kebijakan	Strategi
	Pertahanan dan Keamanan Negara	b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan; c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Sumber: Perubahan RTRW Kabupaten Garut 2011-2031

B. Pusat Kegiatan Kabupaten

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Garut, direncanakan pusat-pusat pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Garut yang memiliki nilai strategis skala kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui penetapan:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kawasan yang berperan sebagai kawasan perkotaan yang melayani beberapa kecamatan atau perkotaan tersebut dan merupakan pusat kegiatan pada kawasan strategis kabupaten.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berperan melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/melayani wilayah *hinterland*.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), pusat permukiman yang berperan melayani kegiatan skala antar desa.

Tabel 3.15 Lokasi yang Ditetapkan menjadi PKL, PPK dan PPL sesuai amanat RTRW

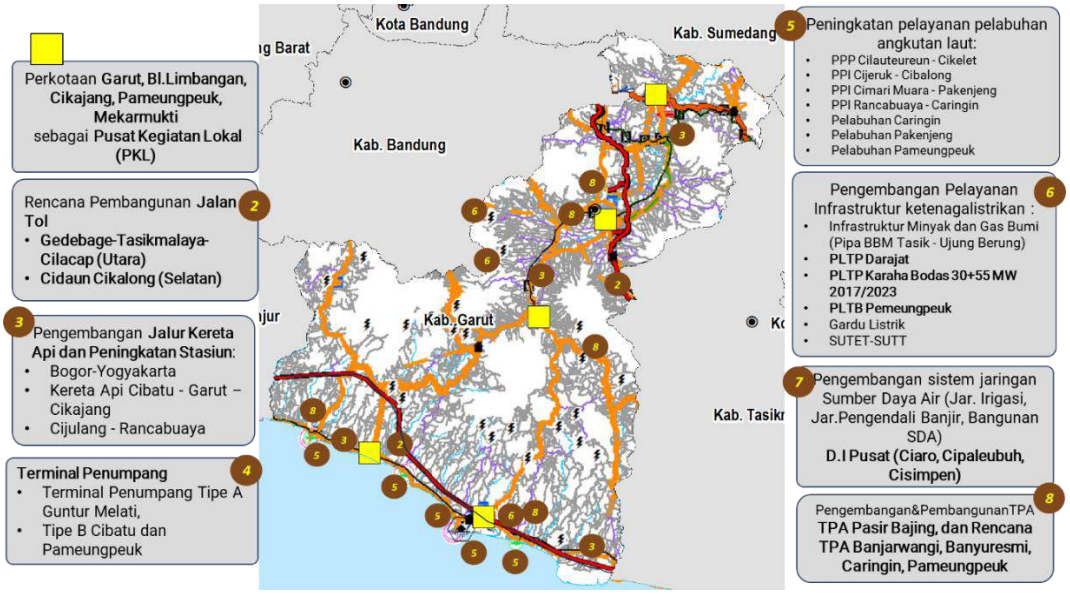
No	Fungsi	Perubahan RTRW 2011-2031	Materi Teknis RTRW 2025
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Perkotaan Garut; b. Perkotaan Pameungpeuk; c. Perkotaan Cikajang; dan d. Perkotaan Rancabuaya.	a. Perkotaan Garut; b. Perkotaan Pameungpeuk; c. Perkotaan Cikajang; d. Perkotaan Mekarmukti; e. Perkotaan Cibiuk-Limbangan.
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Perkotaan Cilawu; b. Perkotaan Bayongbong; c. Perkotaan Cigedug; d. Perkotaan Cisurupan; e. Perkotaan Sukaresmi; f. Perkotaan Samarang; g. Perkotaan Pasirwangi; h. Perkotaan Karangpawitan; i. Perkotaan Wanaraja; j. Perkotaan Pangatikan; k. Perkotaan Sucinaraja; l. Perkotaan Sukawening; m. Perkotaan Karangtengah; n. Perkotaan Banyuresmi; o. Perkotaan Leles; p. Perkotaan Leuwigoong; q. Perkotaan Kersamanah; r. Perkotaan Cibiuk; s. Perkotaan Balubur Limbangan; t. Perkotaan Selaawi. u. Perkotaan Singajaya; v. Perkotaan Malangbong; w. Perkotaan Cibatu; x. Perkotaan Kadungora;	a. Perkotaan Cibatu; b. Perkotaan Cilawu; c. Perkotaan Cisewu; d. Perkotaan Cisompet; e. Perkotaan Cisurupan; f. Perkotaan Karangtengah; g. Perkotaan Leles; h. Perkotaan Malangbong; i. Perkotaan Pakenjeng; j. Perkotaan Samarang; k. Perkotaan Singajaya; l. Perkotaan Wanaraja.

No	Fungsi	Perubahan RTRW 2011-2031	Materi Teknis RTRW 2025
		y. Perkotaan Cisewu; z. Perkotaan Talegong; aa. Perkotaan Mekarmukti; bb. Perkotaan Pamulihan; cc. Perkotaan Pakenjeng; dd. Perkotaan Cikelet; ee. Perkotaan Cibalong; ff. Perkotaan Cisompet; gg. Perkotaan Peundeuy; hh. Perkotaan Cihurip; ii. Perkotaan Banjarwangi.	
3	Pusat Pelayanan Lokal (PPL)	a. Desa Sukajaya Kec. Cisewu; b. Desa Sukarame Kec. Caringin; c. Desa Sukamulya Kec. Talegong; d. Desa Cijayana Kec. Mekarmukti; e. Desa Pananjung Kec. Pamulihan; f. Desa Panyindangan Kec. Pakenjeng; g. Desa Pamalayan Kec. Cikelet; h. Desa Gunamekar Kec. Bungbulang; i. Desa Sancang Kec. Cibalong; j. Desa Depok Kec. Cisompet; k. Desa Toblong Kec. Peundeuy; l. Desa Mancagahar Kec. Pameungpeuk; m. Desa Cisangkal Kec. Cihurip; n. Desa Wangunjaya Kec. Banjarwangi; o. Desa Ciudian Kec. Singajaya; p. Desa Mangkurayat Kec. Cilawu; q. Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong; r. Desa Barusuda Kec. Cigedug; s. Desa Cidatar Kec. Cisurupan; t. Desa Mekarjaya Kec. Sukaresmi; u. Desa Cibodas Kec. Cikajang; v. Desa Sukakarya Kec. Samarang; w. Desa Pasirkiamis Kec. Pasirwangi; x. Kelurahan Lebakjaya Kec. Karangpawitan; y. Desa Cinunuk Kec. Wanaraja; z. Desa Cimaragas Kec. Pangatikan;	a. PPL Banjarwangi; b. PPL Banyuresmi; c. PPL Bayongbong; d. PPL Bungbulang; e. PPL Caringin; f. PPL Cibalong; g. PPL Cibiuk; h. PPL Cigudeg; i. PPL Cihurip; j. PPL Cikelet; k. PPL Kadungora; l. PPL Karangpawitan; m. PPL Kersamanah; n. PPL Leuwigoong; o. PPL Pamulihan; p. PPL Pangatikan; q. PPL Pasirwangi; r. PPL Peundeuy; s. PPL Selaawi; t. PPL Sucinaraja; u. PPL Sukaresmi; v. PPL Sukawening; w. PPL Talegong.

No	Fungsi	Perubahan RTRW 2011-2031	Materi Teknis RTRW 2025
		aa. Desa Sukaratu Kec. Sucinaraja; bb. Desa Sukamukti Kec. Sukawening; cc. Desa Cintamanik Kec. Karangtengah; dd. Desa Bagendit Kec. Banyuresmi; ee. Desa Cangkuang Kec. Leles; ff. Desa Talagasari Kec. Kadungora; gg. Desa Tambaksari Kec. Leuwigoong; hh. Desa Keresek Kec. Cibatu; ii. Desa Nanjungjaya Kec. Kersamanah; jj. Desa Majasari Kec. Cibiuk; kk. Desa Galihpakuwon Kec. Balubur Limbangan; ll. Desa Mekarsari Kec. Selaawi; dan mm. Desa Sukaratu Kec. Malangbong.	

Sumber: - Perubahan RTRW Kabupaten Garut 2011-2031
- Materi Teknis (Buku Rencana) RTRW Tahun 2025

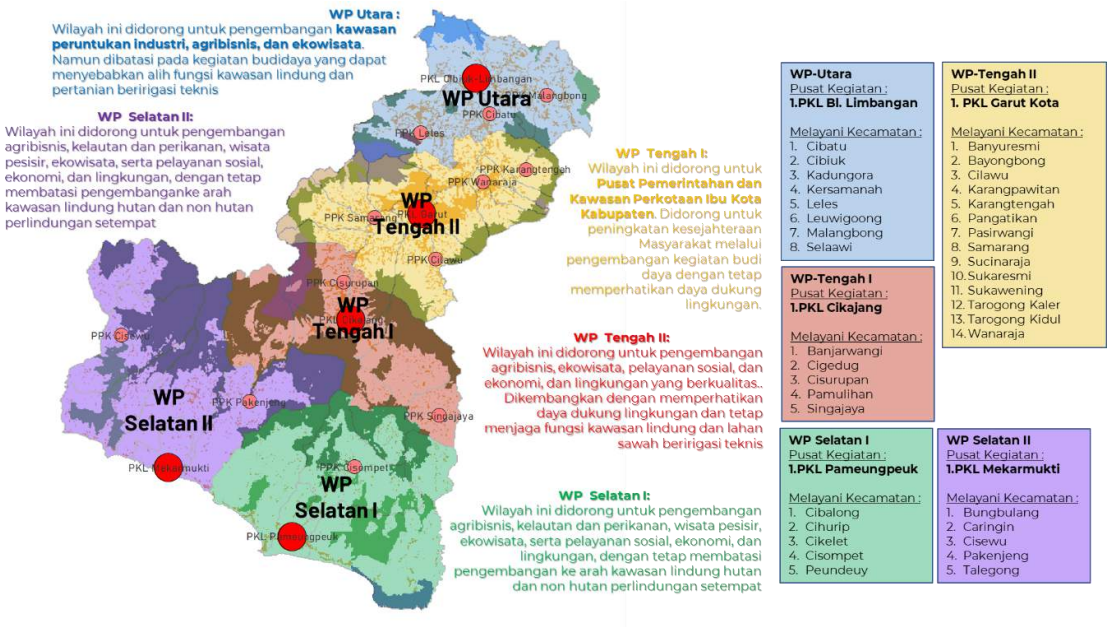
Berdasarkan tabel lokasi PKL, PPK, dan PPL, terdapat penambahan PKL di Kabupaten Garut dari 4 PKL menjadi 5 PKL diantaranya Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang, Perkotaan Mekarmukti dan Perkotaan Cibiuk-Limbangan. Begitu juga dengan PPK dan PPL, terdapat perubahan yang didasarkan pada hasil analisis kumpulan sebaran fasilitas pendukung dan keterwakilan pelayanan berdasarkan jumlah Wilayah Pengembangan (WP) Utara, Tengah, dan Selatan.



Sumber: Draft Revisi RTRW Tahun 2025

Gambar 3.16 Rancangan Struktur Ruang

Mengacu pada Materi Teknis (Buku Rencana) RTRW Tahun 2025, Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Garut direncanakan terbagi habis dalam 5 wilayah, yaitu WP Utara, WP Tengah I, WP Tengah II, WP Selatan I, WP Selatan II.



Sumber: Materi Teknis (Buku Rencana) RTRW Tahun 2025

Gambar 3.17 Rancangan Wilayah Pengembangan (WP)

Pengembangan Pusat Pemerintahan dan Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten diarahkan pada WP Tengah II. Pengembangan kawasan sebagai Kawasan Peruntukan Industri diarahkan pada WP Utara. Pengembangan kawasan dengan peruntukan Agribisnis dan Ekowisata

diarahkan pada WP Utara, WP Tengah I, WP Selatan I dan WP Selatan II. Pengembangan kawasan dengan peruntukan Kelautan dan Perikanan serta Wisata Pesisir diarahkan pada WP Selatan I dan WP Selatan II.

C. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, KSK merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta lingkungan hidup.

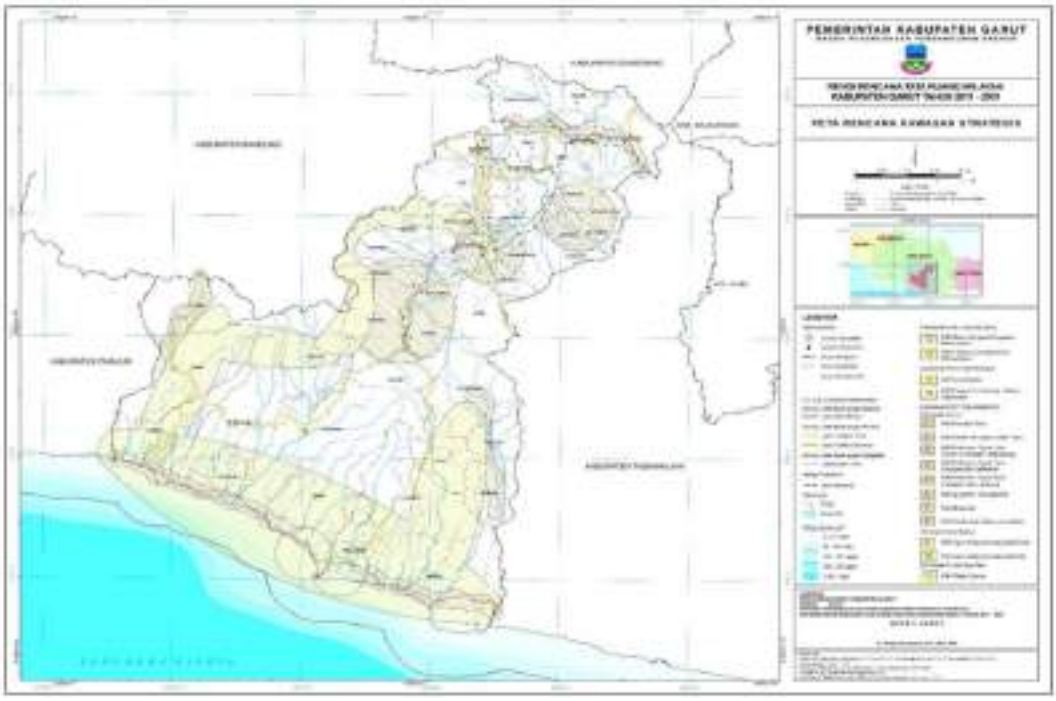
Terdapat 12 (dua belas) KSK yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, diantaranya 8 (delapan) KSK yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, 2 (dua) KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta 2 (dua) KSK yang memiliki nilai strategis fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut lebih jelas terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut

No	Sudut Kepentingan	Perubahan RTRW 2011-2031		Materi Teknis RTRW 2025	
		Kawasan Strategis Kabupaten	Lokasi	Kawasan Strategis Kabupaten	Lokasi
1	Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten	KSK Perkotaan Garut	a) Kec. Tarogong Kidul; b) Kec. Tarogong Kaler; c) Kec. Garut Kota; d) Kec. Banyuresmi; e) Kec. Cilawu; dan f) Kec. Karangpawitan.	KSK Perkotaan Garut	a) Kec. Tarogong Kidul; b) Kec. Tarogong Kaler; c) Kec. Garut Kota; d) Sebagian Kec. Banyuresmi; e) Sebagian Kec. Cilawu; f) Sebagian Kec. Karangpawitan.
		KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut	a) Kec. Kadungora; b) Kec. Leles; c) Kec. Tarogong Kaler; d) Kec. Tarogong Kidul.	KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut	a) Kec. Kadungora; b) Kec. Leles; c) Kec. Tarogong Kaler; d) Kec. Tarogong Kidul.
		KSK Perbatasan Bagian Utara	a) Kec. Balubur Limbangan; b) Kec. Selaawi; c) Kec. Kersamanah; d) Kec. Cibatu; e) Kec. Malangbong.	Koridor Jalan Nasional III Limbangan	a) Kec. Bl. Limbangan; b) Kec. Kersamanah; c) Kec. Cibiuk; d) Kec. Malangbong.
		KSK Perbatasan Bagian Timur	a) Kec. Singajaya; b) Kec. Banjarwangi; c) Kec. Peundeuy; d) Kec. Cihurip.	Perbatasan Bagian Timur	a) Kec. Singajaya; b) Kec. Banjarwangi; c) Kec. Peundeuy; d) Kec. Cihurip.
		KSK Perbatasan Bagian Barat	a) Kec. Caringin; b) Kec. Cisewu; c) Kec. Talegong.	Perbatasan Bagian Barat	a) Kec. Caringin; b) Kec. Cisewu; c) Kec. Talegong.
		KSK Agropolitan	a) Kec. Cisurupan; b) Kec. Cikajang;	Kawasan Agropolitan	a) Kec. Cisurupan; b) Kec. Cikajang;

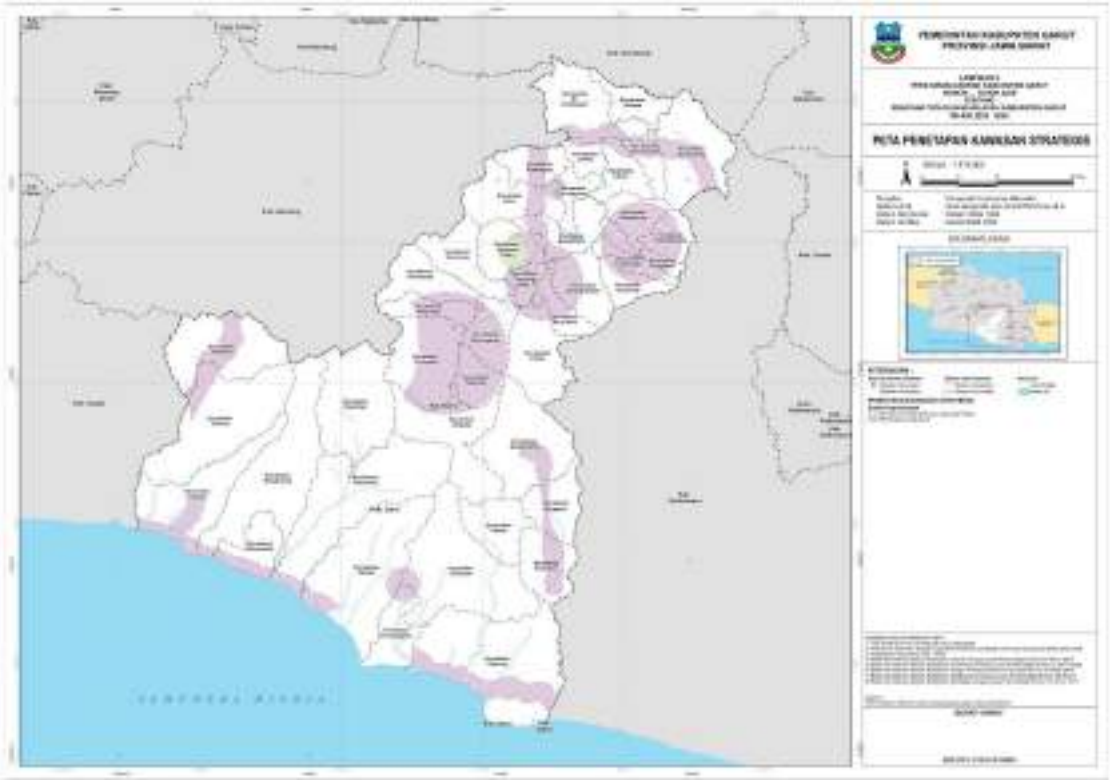
No	Sudut Kepentingan	Perubahan RTRW 2011-2031		Materi Teknis RTRW 2025	
		Kawasan Strategis Kabupaten	Lokasi	Kawasan Strategis Kabupaten	Lokasi
			c) Kec. Cigedug; d) Kec. Sukaresmi; e) Kec. Pasirwangi; f) Kec. Bayongbong.		c) Kec. Cigedug; d) Kec. Sukaresmi; e) Kec. Pasirwangi; f) Kec. Bayongbong.
		KSK Minapolitan	a) Kec. Tarogong Kaler; b) Kec. Sukawening; c) Kec. Pangatikan; d) Kec. Sucinaraja; e) Kec. Wanaraja; dan f) Kec. Karangpawitan.	Kawasan Minapolitan	Sentra Budidaya Perikanan (Garut Timur) a) Kec. Tarogong Kaler; b) Kec. Sukawening; c) Kec. Pangatikan; d) Kec. Sucinaraja; e) Kec. Wanaraja; dan f) Kec. Karangpawitan. Sentra Budidaya Perikanan (Garut Tengah) a) Kec. Garut Kota; b) Kec. Karangpawitan; c) Kec. Tarogong Kidul; d) Kec. Tarogong Kaler Sentra Budidaya Perikanan (Garut Selatan) a) Kec. Cibalong; b) Kec. Pameungpeuk; c) Kec. Cikelet; d) Kec. Mekarmukti; e) Kec. Pakenjeng; f) Kec. Bungbulang; dan g) Kec. Caringin.
		KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan	a) Kec. Cibalong; b) Kec. Pameungpeuk; c) Kec. Cikelet; d) Kec. Mekarmukti; e) Kec. Pakenjeng; f) Kec. Bungbulang; dan g) Kec. Caringin.	Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan	a) Kec. Cibalong; b) Kec. Pameungpeuk; c) Kec. Cikelet; d) Kec. Mekarmukti; e) Kec. Pakenjeng; f) Kec. Bungbulang; g) Kec. Caringin.
2	Sosial budaya (Kawasan Cagar Budaya)	Kampung Adat Dukuh	Kec. Cikelet	Kampung Adat Dukuh	Kec. Cikelet
		Kampung Adat Pulo, Kec. Leles	Kec. Leles	Kampung Adat Pulo	Kec. Leles
3	Fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Rawan Bencana Gunung api Guntur		Area Konservasi Tinggi	a) Gunung Papandayan; b) Guung Cikuray; dan c) Gunung Guntur.
		Kawasan Wisata Cipanas		Kawasan Rawan Bencana pada Kawasan Wisata Cipanas	
4	Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi			Potensi Bayu dan Energi Terbarukan Mandiri	Kecamatan Pameungpeuk
				Geowisata dan Energi Kamojang-Darajat	a) Kec. Samarang; b) Kec, Pasirwangi.

Sumber: - Perubahan RTRW Kabupaten Garut 2011-2031
- Materi Teknis (Buku Rencana) RTRW Tahun 2025



Sumber: RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

Gambar 3.18 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2011-2031



Sumber: Materi Teknis RTRW Tahun 2025

Gambar 3.19 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Garut Tahun 2025

3.8.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi seimbang di seluruh wilayah provinsi.

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi dalam hal ini merujuk Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat Tahun 2022-2042. Dalam hal ini kebijakan pengembangan kewilayahan dalam RTRWP diterjemahkan melalui rencana struktur ruang pusat-pusat permukiman, arah kebijakan dan strategi pengembangan Wilayah Pelayanan, serta rencana Kawasan Strategis Provinsi.

A. Pusat-pusat Permukiman

Dalam rencana struktur ruang RTRWP, direncanakan pusat-pusat pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai strategis mulai dari skala nasional, wilayah dan lokal. Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui penetapan:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PPL), yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan.

Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Jawa Barat yang diamanatkan dalam RTRWP terdiri dari 3 (tiga) PKN: Kawasan Perkotaan Bodebek; Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Cirebon, 9 (sembilan) PKW serta 29 (dua puluh sembilan) PKL. Adapun pusat-pusat permukiman provinsi lingkup wilayah Kabupaten Garut diuraikan pada tabel 2.50.

Tabel 3.17 Lokasi yang Ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat

No	Fungsi	Lingkup Kabupaten Garut	Integrasi dengan Pusat Pertumbuhan Kelautan
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan	

No	Fungsi	Lingkup Kabupaten Garut	Integrasi dengan Pusat Pertumbuhan Kelautan
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Cidaun - Rancabuaya	Sebagai destinasi wisata.
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Daerah Kabupaten Garut meliputi Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Mekarmukti dan Cibiuk-Limbangan.	Sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya serta pelabuhan perikanan.

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat Tahun 2022-2042

B. Wilayah Pengembangan

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 yaitu Pembangunan berbasis kewilayahan, dimana dalam hal ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Mengacu pada RTRWP, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi habis kedalam 6 (enam) WP meliputi WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung serta WP Sukabumi dan sekitarnya.

Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur dan Pangandaran. WP tersebut merupakan penjabaran dari Kawasan andalan Priangan Timur dan Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan Pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Adapun tema pengembangan, arah pengembangan, fokus pengembangan serta sektor unggulan dan potensi wilayah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.18 Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur dan Pangandaran

Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran,	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL mengembangk	1. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat	Kehutanan, pertanian, Perkebunan, perikanan tangkap,

Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
serta pengembangan secara terbatas Kawasan Daerah Bagian Selatan.	an pariwisata Pangandaran dan sekitarnya.	pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa. 2. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, Perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam. 3. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan holtikultura dan agroindustri, Perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam, serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya. 4. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan holtikultura, agroindustri, Perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam. 5. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 6. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan holtikultura, serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral.

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat Tahun 2022-2042

3.5.2 Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah NKRI, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional direpresentasikan melalui arahan *Draft* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Adapun terkait pusat-pusat permukiman yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat melalui RTRWN yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi:

1. Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur;
2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
3. Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan.

Kabupaten Garut termasuk kedalam **Kawasan REBANA (Cirebon-Patimban-Kertajati) dan Jawa Barat Bagian Selatan** yang dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Percepatan Pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Adapun percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, **Kabupaten Garut**, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Konsep yang digunakan dalam pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam. Konsep pengembangan wilayah terpadu diharapkan dapat menghasilkan *spread-effect* yang akan memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yaitu agribisnis, perikanan dan pariwisata. Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan, diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 mengamanatkan 170 *project* pengembangan yang terdiri dari 81 *project* di Kawasan Rebana dan 89 *project* di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam hal ini, Kabupaten Garut berperan sebagai penerima manfaat *project* dan pelaksana *project*. Daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai penerima manfaat diantaranya:

1. Jalan Tol GeTaCi Segmen 1;
2. JTS (Jalur Tengah Selatan) segmen timur;
3. Rekonstruksi jalur Bandung - Pengalengan – Rancabuaya;
4. Reaktivasi Rel KA Cibatu – Cikajang;
5. Pembangunan Daerah Irigasi Candra Goyang;
6. Penanganan banjir (sungai Cipalebuh, sungai Cikaso);
7. PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu);
8. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Gunung Papandayan;
9. Pembangunan Desa Digital;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun;
11. Pembangunan Kawasan Minapolitan;
12. Pembangunan Rumah Khusus Nelayan;
13. *Breakwater* pantai Rancabuaya.

Adapun daftar *project* pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pelaksana *project* diantaranya:

1. Jalan lingkar Garut;
2. TPA Garut (Pameungpeuk, Caringin, Banjarwangi);
3. Pasar Cikajang.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 7326/AR.01.01/BAPP tanggal 31 Juli 2024 hal Permohonan Revisi Lampiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, dilaksanakan revisi daftar *project* dengan rincian lingkup Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.19 Daftar Program/Proyek Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

NO	KETERANGAN	DAFTAR PROYEK
1	Proyek yang diusulkan tetap tercantum di Perpres	o Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap Segmen 1 (Gedebage-Tasikmalaya) o Pembangunan dan Peningkatan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat (Segmen Timur) o Pembangunan Jalan Lingkar Garut o Rekonstruksi Jalur Vertikal Bandung-Pangalengan-Rancabuaya o Reaktivasi Jaringan Rel KA Cibatu-Cikajang o Penanganan Banjir di Kabupaten Garut o Pembangunan Breakwater Pantai Rancabuaya o Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Candra Goyang o Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kab. Garut o Pembanggunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Galunggung o Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Papandayan o Pembangunan Pasar Cikajang o Pembangunan Kawasan Tambak Udang o Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan o Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Garut o Pengembangan Desa Wisata

NO	KETERANGAN	DAFTAR PROYEK
2	Proyek yang diusulkan diubah nomenklaturnya di Perpres	o "Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Garut" menjadi "Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Garut Selatan" o "Pembangunan Kawasan Pangkalan Pendaran Ikan (PPI)" menjadi "Pembangunan Pelabuhan Perikanan"
3	Proyek yang diusulkan dihapus dari Perpres	o Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan o Pembangunan Rumah Khusus Nelayan o Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun o Pembangunan *Creative Center*
4	Proyek yang statusnya telah selesai di Perpres	Pembangunan Desa Digital
5	Proyek baru yang diusulkan untuk dicantumkan ke Perpres	o Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Karang Papak Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut o Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pameungpeuk o Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu o Pembangunan dan Pengembangan Laboratorium Kesehatan Masyarakat o Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bungbulang o Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limbangan

Sumber: Lampiran III Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 7326/AR.01.01/BAPP tentang Daftar Program/ Proyek Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Selain dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, RTRWN juga secara langsung menetapkan Peta Struktur Ruang Nasional dimana pengembangan kewilayahan Kabupaten Garut menjadi bagian dari beberapa sistem jaringan nasional, yaitu:

1. Sistem Perkotaan Nasional, dimana di Kabupaten Garut terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cidaun yang berlokasi di Kecamatan Caringin (Lampiran I PP 17/2017 - hal. I-069). PKW Cidaun berpotensi difungsikan sebagai kawasan perkotaan baru simpul kedua ekspor-impor yang mendukung Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan ekonomi kelautan nasional;
2. Sistem Jaringan Transportasi, dimana Kabupaten Garut dilewati oleh Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Cileunyi-Tasikmalaya-Banjar), Arteri Primer, dan Kolektor Primer, juga Jaringan Jalur Kereta Api;
3. Sistem Jaringan Energi Nasional, dimana Kabupaten Garut difungsikan atau berpotensi menjadi salah satu pembangkit listrik terbanyak di Jawa Barat (8 titik Pembangkitan Listrik). Selain itu Kabupaten Garut juga dilewati oleh Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) - 500 KV;
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dimana Kabupaten Garut bagian utara termasuk pada Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Cimanuk-Cisanggarung) sehingga diperuntukkan untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

Sedangkan dari Peta Rencana Pola Ruang Nasional, RTRWN secara langsung menetapkan Kabupaten Garut menjadi bagian dari beberapa kawasan, yaitu:

1. **Kawasan Lindung**, dimana terdapat beberapa Cagar Alam yang berada di Kabupaten Garut seperti Cagar Alam Leuweung Sancang, Gunung Papandayan, Kawah Kamojang, dan Talaga Bodas dimana diarahkan ke pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional (kategori B/3);
2. **Kawasan Andalan**, dimana di Kabupaten Garut menjadi bagian dari Kawasan Andalan "Sukabumi dan Sekitarnya" (dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan panas bumi) dan Kawasan Andalan "Priangan Timur Pangandaran" (dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan panas bumi);
3. **Kawasan Strategis Nasional**, dimana Kabupaten Garut ditetapkan memiliki Kawasan Produksi dan Pengujian Roket di Kecamatan Pameungpeuk.

3.9 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Garut

Pemerintah telah menerbitkan peraturan kebijakan tata kelola data melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai langkah pasti untuk meningkatkan akurasi, kualitas, kemutakhiran, serta menjamin berbagi pakai data yang diproduksi oleh instansi pusat maupun daerah. Kabupaten Garut mewujudkan komitmen pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah melalui penetapan Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Garut Satu Data dan Pembentukan Struktur Penyelenggaraan Garut Satu Data melalui Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.642-BAPPEDA/2023. Keberadaan Garut Satu Data memberikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintahan termasuk data sektoral.

Pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah memungkinkan perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan efisien. Dengan memahami kondisi dan potensi masing-masing sektor, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih baik, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Data sektoral mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan membantu memastikan bahwa program pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

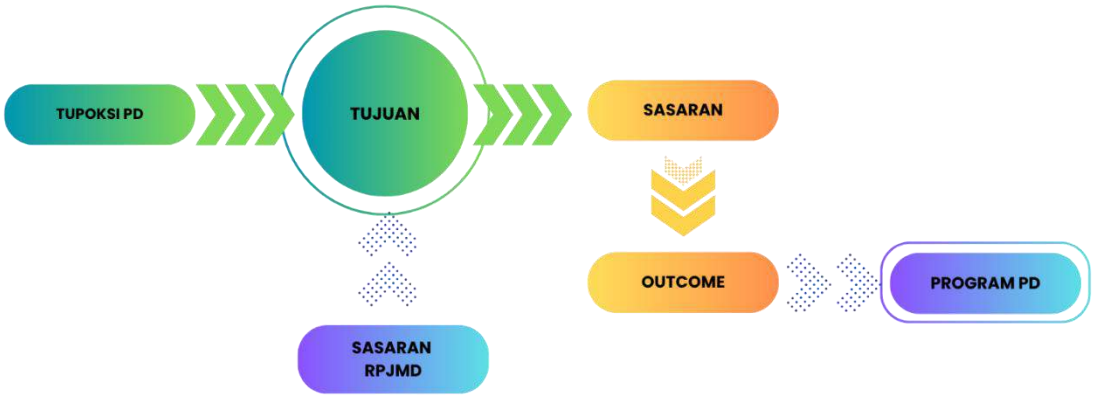
Kabupaten Garut telah memiliki Portal Garut Satu Data dapat diakses melalui https://satudata.garutkab.go.id/ yang merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintah Kabupaten Garut. Selain itu, dengan tata kelola data yang baik tentunya duplikasi data dapat berkurang yang secara langsung dapat mendukung kebijakan pemerintah menjadi lebih efektif serta menciptakan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang lebih baik. Sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan menghasilkan pembangunan yang optimal.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Garut Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan daerah diturunkan ke dalam program perangkat daerah yang bersifat strategis, integratif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Program perangkat daerah dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025–2029 merupakan komponen utama dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Setiap perangkat daerah berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Proses penentuan program perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis daerah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, serta berpedoman pada sasaran pembangunan jangka menengah. Disusun melalui pendekatan *cascading* kinerja, yaitu suatu metode penjabaran berjenjang dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Skema ini memastikan bahwa setiap program yang disusun oleh perangkat daerah memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran RPJMD. Mulai dari penyusunan tujuan berdasarkan tupoksi, penetapan sasaran dan indikator *outcome*, hingga pemilihan program, seluruh proses mengacu pada kerangka kerja sistematis agar hasil pembangunan dapat terukur secara efektif. Pelaksanaan program juga mengacu pada prinsip sinergitas antar level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program Perangkat Daerah

Secara garis besar, program perangkat daerah dirancang agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung delapan prioritas pembangunan daerah (PPD), yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4. Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;
6. Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;
7. Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana;
8. Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Seluruh proses tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang selaras dengan RPJMD. Penyusunan Renstra mengacu langsung pada arah kebijakan RPJMD dan menggunakan pendekatan *logical framework* serta *performance-based budgeting*, sehingga program dan kegiatan yang disusun tidak hanya menjawab tantangan pembangunan, tetapi juga dapat dievaluasi secara berkala melalui indikator capaian yang terukur. Dengan sinergi antara RPJMD dan Renstra PD, maka efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut dapat terjaga dan selaras dengan agenda pembangunan jangka menengah daerah.

Seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*), indikator kinerja, pagu indikatif, serta target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Adapun program perangkat daerah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya dan disusun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dimana program pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu sebagai pijakan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Program perangkat daerah disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.043.504.338.542		2.379.483.677.731		2.560.826.012.730		2.747.045.515.776		2.964.156.305.573	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.368.886.012.266		1.687.740.367.603		1.856.514.404.364		2.042.165.844.800		2.246.382.429.284	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi General (%)	67,18	77,38	77,68	1.368.886.012.266	78,08	1.687.740.367.603	78,58	1.856.514.404.364	79,18	2.042.165.844.800	79,78	2.246.382.429.284	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					654.454.491.084		676.360.855.205		688.635.732.663		688.901.781.132		701.201.145.520	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	94,17	95,01	95,84	627.948.778.602	96,67	641.789.151.747	97,5	652.581.936.312	98,34	651.756.352.787	99,17	662.373.194.893	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	75,33	78,37	81,4		84,37		87,34		90,31		92,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	99,03	99,17	99,31		99,45		99,59		99,72		99,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	38,85	43,82	48,8		53,78		58,76		63,73		68,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Literasi Siswa	Literasi Dasar PAUD (Nilai)	58,72	60,73	62,59	2.233.005.551	64,45	2.943.154.907	66,31	3.229.497.267	68,17	3.374.528.762	70	3.524.574.079	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Skor kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,31	62,81	65,31		67,81		70,31		72,81		75,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	68,35	69,45	70,55		71,65		72,75		73,85		74,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Numerasi Siswa	Skor kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	56,27	59,17	62,07	2.083.005.551	64,97	3.690.558.751	67,87	3.932.529.475	70,77	4.099.187.647	73,67	4.270.548.642	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	61,71	63,21	64,71		66,21		67,71		69,21		70,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Indeks Iklim inklusivitas dan kebinekaan jenjang PAUD (Indeks)	70,04	71,84	73,64	3.320.552.200	75,44	6.987.989.800	77,24	7.191.769.609	79,04	7.371.711.936	80,84	7.632.827.906	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD (Indeks)	61,31	63,81	66,31		66,81		71,31		73,81		76,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP (Indeks)	55,57	57,97	60,37		62,77		65,17		67,57		66,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang PAUD (Nilai)	69,34	71,14	72,94		74,74		76,54		78,34		80,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD (Indeks)	77,65	78,55	79,45		80,35		81,25		82,15		83,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP (Indeks)	69,43	70,93	72,43		73,93		75,43		76,93		78,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD (Indeks)	72,32	73,32	74,32		75,32		76,32		77,32		78,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP (Indeks)	68,3	69,3	70,3		71,3		72,3		73,3		74,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kualitas pembelajaran Pendidikan kesetaraan Paket c (%)	56,63	57,94	59,25	11.869.149.180	60,56	13.950.000.000	61,87	14.700.000.000	63,18	15.300.000.000	64,49	16.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	43,81	43,9	44,03		44,2		44,41		44,65		44,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4 (%)	74,4	75,15	75,9		76,65		77,4		78,15		78,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Warga Belajar	Jumlah Lulusan warga belajar (Orang)	0	7.000	7.000	7.000.000.000	7.000	7.000.000.000	7.000	7.000.000.000	7.000	7.000.000.000	7.000	7.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.265.000.000		1.460.476.190		1.486.904.761		1.498.333.332		1.670.714.284	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Pengelolaan kurikulum PAUD & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	0	57	57,6	1.265.000.000	58,2	1.460.476.190	58,8	1.486.904.761	59,4	1.498.333.332	60	1.670.714.284	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan Dasar (%)	58,45	59,06	59,67		60,28		61,5		62,11		62,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					16.706.335.192		11.423.228.733		11.485.345.942		11.550.569.012		11.619.053.235	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru Pendidikan Dasar (%)	0,62	0,65	0,68	16.706.335.192	0,71	11.423.228.733	0,74	11.485.345.942	0,77	11.550.569.012	0,8	11.619.053.235	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi PTK bersertifikat Jenjang Pendidikan Dasar (%)	40,4	44,2	48,1		52		55,9		59,8		63,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					660.000.000		813.000.000		849.300.000		889.230.000		1.039.230.000	
Meningkatnya Kuantitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	0	100	100	660.000.000	100	813.000.000	100	849.300.000	100	889.230.000	100	1.039.230.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.532.500.000		1.685.750.000		1.854.325.000		2.039.757.500		2.243.733.250	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Tenaga Pendidik ASN yang Memiliki Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) (%)	16,66	33,32	74,19	1.532.500.000	49,99	1.685.750.000	66,66	1.854.325.000	83,33	2.039.757.500	100	2.243.733.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.336.861.196.526		1.176.142.017.664		1.429.476.681.326		1.487.074.072.096		1.651.221.356.615	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					689.003.772.422		623.739.459.282		661.623.168.426		703.368.392.864		748.045.720.622	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,29	77,49	77,79	342.033.750.675	78,19	274.346.259.298	78,69	301.780.885.228	79,29	331.958.973.754	79,89	365.154.871.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Ibu dan Anak	Case fatality rate ibu hamil/bersalin/pasca persalinan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Angka)	0	2,75	2,28	198.879.400.942	1,82	193.898.048.139	1,36	196.572.373.760	0,9	199.976.014.201	0,9	202.885.774.342	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan Labkesda (Poin)	0	3,51	3,52	148.090.620.805	3,53	155.495.151.845	3,54	163.269.909.438	3,55	171.433.404.909	3,56	180.005.075.155	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					638.361.448.904		542.420.404.006		757.066.895.286		772.108.874.017		890.725.124.416	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di fasyankes (%)	79,14	88	89	6.349.019.200	91	9.361.235.400	93	9.706.442.900	95	10.086.171.150	97	10.503.872.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya upaya penanganan masalah gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi kurang (%)	3,48	3,5	3,4	7.651.891.600	3,3	34.716.229.800	3,2	35.541.229.800	3,1	36.448.729.800	3	37.446.979.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	81,62	90	90	12.940.510.594	90	26.395.234.469	90	27.000.096.828	90	26.472.785.419	90	27.841.687.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Non Polio AFP Rate (Angka)	5	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Skrining Penyakit Tidak Menular (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kesehatan Lingkungan (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi HIV baru (Angka)	12	12	9		8		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	KLB / Bencana / Krisis yang terdeteksi dan direspons sesuai waktu standar (<24 jam pelaporan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa yang mencapai Target Imunisasi Rutin (%)	75	80	85		85		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai target > 80% (%)	0	80	90		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Tata laksana Kasus Malaria Import (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	64,19	65	70	611.420.027.510	75	471.947.704.337	80	684.819.125.758	83,5	699.101.187.648	84	814.932.584.573	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,404	0,42	0,435		0,45		0,465		0,48		0,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	33,47	34	36		38		41		44		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	83	86		89		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	34	36		38		40		42		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	0	50	50		50		75		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					8.255.071.200		7.816.616.400		8.515.500.000		9.209.550.000		9.935.505.000	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditingkatkan mutunya (%)	0	10	11	8.255.071.200	12	7.816.616.400	13	8.515.500.000	14	9.209.550.000	15	9.935.505.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Angka)	0	1,67	1,7		1,73		1,76		1,79		1,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					743.279.000		845.000.000		894.500.000		948.950.000		1.008.845.000	
Meningkatnya pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pengelolaan pangan yang memenuhi syarat	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	70	91	92	743.279.000	94	845.000.000	96	894.500.000	98	948.950.000	98	1.008.845.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	10	19		29		58		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					497.625.000		1.320.537.976		1.376.617.614		1.438.305.215		1.506.161.577	
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Persentase Penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat (PHS) (%)	0	19	21	497.625.000	23	1.320.537.976	25	1.376.617.614	27	1.438.305.215	29	1.506.161.577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					600.234.975.000		649.767.000.000		548.508.950.000		565.126.610.000		440.570.530.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.968.600.000		44.588.000.000		44.546.000.000		46.636.720.000		47.338.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, Akuntabel, serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	75,09	75,79	76,09	41.968.600.000	76,49	44.588.000.000	76,99	44.546.000.000	77,59	46.636.720.000	78,19	47.338.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					48.185.000.000		57.215.600.000		54.937.400.000		53.904.500.000		54.135.000.000	
Meningkatnya Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Air oleh Jaringan Irigasi (%)	84,73	85,25	85,9	48.185.000.000	86,55	57.215.600.000	87	54.937.400.000	87,55	53.904.500.000	88	54.135.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					36.838.750.000		41.388.250.000		45.052.750.000		53.554.750.000		55.978.750.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Peningkatan Akses Air Minum Layak (%)	-	100	100	36.838.750.000	100	41.388.250.000	100	45.052.750.000	100	53.554.750.000	100	55.978.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					11.770.625.000		13.667.500.000		15.420.750.000		17.262.700.000		18.405.000.000	
Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	-	100	100	11.770.625.000	100	13.667.500.000	100	15.420.750.000	100	17.262.700.000	100	18.405.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					16.420.000.000		20.741.000.000		17.885.000.000		14.951.000.000		15.006.500.000	
Meningkatnya Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persentase Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik (%)	-	33,76	40,27	16.420.000.000	52,36	20.741.000.000	58,41	17.885.000.000	64,92	14.951.000.000	71	15.006.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.755.000.000		7.020.000.000		6.542.000.000		3.858.000.000		3.877.000.000	
Meningkatnya Bangunan Gedung yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persentase bangunan gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (%)	11,25	12,32	13,43	5.755.000.000	14,54	7.020.000.000	15,65	6.542.000.000	16,76	3.858.000.000	17,86	3.877.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.900.000.000		5.900.000.000		6.400.000.000		4.700.000.000		4.200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Kawasan Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Kawasan Strategis Kabupaten (%)	-	17	33	4.900.000.000	50	5.900.000.000	67	6.400.000.000	83	4.700.000.000	100	4.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					428.482.000.000		453.266.650.000		352.581.050.000		365.222.340.000		236.629.280.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	56,94	59,2	62,66	428.482.000.000	65,99	453.266.650.000	69,25	352.581.050.000	72,19	365.222.340.000	75,53	236.629.280.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					2.695.000.000		2.920.000.000		2.745.000.000		2.520.000.000		1.870.000.000	
Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Terlatih dan Tersertifikasi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Terlatih dan Tersertifikasi (%)	36,46	39,4	52,07	1.875.000.000	64,75	2.100.000.000	77,42	1.925.000.000	90,09	1.700.000.000	94,84	1.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)	100	100	100	820.000.000	100	820.000.000	100	820.000.000	100	820.000.000	100	820.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.220.000.000		3.060.000.000		2.399.000.000		2.516.600.000		3.131.000.000	
Meningkatnya Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang	Persentase Luas Wilayah yang Penggunaannya Sesuai Tata Ruang (%)	85,08	85,5	86	3.220.000.000	86,5	3.060.000.000	87	2.399.000.000	87,5	2.516.600.000	88	3.131.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					119.208.913.553		125.652.410.241		124.811.525.841		125.015.529.341		125.323.843.812	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.472.004.533		13.046.410.241		13.089.525.841		13.293.529.341		13.601.843.812	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	75,45	77,65	77,95	11.472.004.533	78,35	13.046.410.241	78,85	13.089.525.841	79,45	13.293.529.341	80,05	13.601.843.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					18.213.751.620		18.000.000.000		18.000.000.000		18.000.000.000		18.000.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	18.213.751.620	100	18.000.000.000	100	18.000.000.000	100	18.000.000.000	100	18.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.200.000.000		4.156.000.000		3.272.000.000		3.272.000.000		3.272.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	21,66	47,4	74,71	3.200.000.000	91,92	4.156.000.000	100	3.272.000.000	5	3.272.000.000	10	3.272.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					13.550.000.000		13.550.000.000		13.550.000.000		13.550.000.000		13.550.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	0,12	0,54	3	13.550.000.000	5,47	13.550.000.000	7,93	13.550.000.000	10,4	13.550.000.000	12,86	13.550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					72.773.157.400		76.900.000.000		76.900.000.000		76.900.000.000		76.900.000.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	-	43,89	45,25	72.773.157.400	46,38	76.900.000.000	47,51	76.900.000.000	48,64	76.900.000.000	50	76.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					59.677.499.939		62.487.062.415		65.115.285.865		67.059.848.395		69.652.082.903	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.419.689.450		30.372.687.786		31.806.973.750		32.466.217.205		32.557.335.234	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,38	77,58	77,88	13.037.896.900	78,28	14.187.971.330	78,78	14.273.776.630	79,38	14.368.771.330	79,98	14.474.076.630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	57,85	78,05	78,35	8.781.848.121	78,75	9.100.212.320	79,25	9.333.832.320	79,85	9.564.363.520	80,45	9.795.983.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,89	78,09	78,39	6.599.944.429	78,79	7.084.504.136	79,29	8.199.364.800	79,89	8.533.082.355	80,49	8.287.275.084	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11.058.012.370		9.581.434.400		9.745.480.000		9.912.618.000		10.073.371.940	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	66	70	75	628.890.680	79	691.768.000	83	760.944.800	87	837.037.500	91	920.740.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	9.683.877.960	100	8.140.213.600	100	8.205.144.400	100	8.263.257.900	100	8.304.084.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (Orang)	41	43	45	272.163.650	47	299.380.000	49	329.318.000	51	362.249.800	53	398.474.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Jumlah PPNS pada Satpol PP (Orang)	7	8	11	473.080.080	14	450.072.800	17	450.072.800	20	450.072.800	23	450.072.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					7.981.646.240		10.298.918.864		11.328.810.750		12.446.991.825		14.787.354.364	
Meningkatnya layanan Penyebaran Informasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	1.648.057.130	100	2.163.062.843	100	2.309.369.127	100	2.470.306.040	100	3.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	3.318.589.110	100	3.606.448.021	100	4.077.092.823	100	4.363.802.105	100	4.921.182.316	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	605.000.000	100	1.327.000.000	100	1.419.700.000	100	1.737.970.000	100	1.903.767.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana (%)	100	100	100	2.410.000.000	100	3.202.408.000	100	3.522.648.800	100	3.874.913.680	100	4.262.405.048	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					12.218.151.879		12.234.021.365		12.234.021.365		12.234.021.365		12.234.021.365	
Meningkatnya Layanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non kebakaran dan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	12.218.151.879	100	12.234.021.365	100	12.234.021.365	100	12.234.021.365	100	12.234.021.365	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					49.645.364.000		42.706.744.929		48.418.138.213		55.261.940.895		62.419.916.943	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.412.464.000		17.397.312.268		19.159.831.364		21.639.943.738		24.002.776.195	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	76,63	77,33	77,63	15.412.464.000	78,03	17.397.312.268	78,53	19.159.831.364	79,13	21.639.943.738	79,73	24.002.776.195	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.358.000.000		2.947.500.000		3.242.250.000		3.566.475.000		3.923.122.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/Pemerlu Atensi Sosial (PAS) (%)	75	75	75	2.358.000.000	77	2.947.500.000	80	3.242.250.000	83	3.566.475.000	85	3.923.122.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					178.000.000		195.800.000		215.380.000		236.918.000		260.609.800	
Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	100	100	100	178.000.000	100	195.800.000	100	215.380.000	100	236.918.000	100	260.609.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					10.642.900.000		13.752.232.661		16.545.386.849		19.617.856.457		22.997.573.024	
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	75	75	75	10.642.900.000	77	13.752.232.661	80	16.545.386.849	83	19.617.856.457	85	22.997.573.024	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					16.585.000.000		3.003.000.000		3.303.300.000		3.633.630.000		3.996.993.000	
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (%)	74,19	75	75	16.585.000.000	77	3.003.000.000	80	3.303.300.000	83	3.633.630.000	85	3.996.993.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	77	77	77		77		80		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3.920.000.000		4.807.000.000		5.287.700.000		5.816.470.000		6.398.117.000	
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	3.920.000.000	100	4.807.000.000	100	5.287.700.000	100	5.816.470.000	100	6.398.117.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					549.000.000		603.900.000		664.290.000		750.647.700		840.725.424	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	99,14	75,8	80	549.000.000	80	603.900.000	80	664.290.000	83	750.647.700	85	840.725.424	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					21.215.280.029		15.982.238.275		17.128.773.510		18.450.352.082		18.219.003.780	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.110.280.029		11.282.238.275		12.158.773.510		13.045.352.082		12.509.003.780	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,43	77,63	77,93	11.110.280.029	78,33	11.282.238.275	78,83	12.158.773.510	79,43	13.045.352.082	80,03	12.509.003.780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					80.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada rencana tenaga kerja daerah (%)	13,61	13	13,2	80.000.000	13,4	100.000.000	13,6	120.000.000	13,8	150.000.000	14	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang terfasilitasi penyusunan RTK mikro (%)	0	0	0,025		0,06		1,02		1,41		1,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.900.000.000		2.800.000.000		2.850.000.000		2.900.000.000		3.005.000.000	
Meningkatnya pencari kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja bersertifikat kompetensi (%)	6,3	6,25	6,5	6.900.000.000	6,75	2.800.000.000	7	2.850.000.000	7,25	2.900.000.000	7,5	3.005.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.825.000.000		950.000.000		1.050.000.000		1.255.000.000		1.400.000.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	58,01	57	57,25	1.825.000.000	57,5	950.000.000	57,75	1.050.000.000	58	1.255.000.000	58,25	1.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.300.000.000		850.000.000		950.000.000		1.100.000.000		1.155.000.000	
Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kerja layak	Jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan hak-hak pekerja PK/PP/PKB, LKS Bipatrit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Angka)	65.145	63.145	63.645	550.000.000	64.145	340.000.000	64.645	380.000.000	65.145	420.000.000	65.645	440.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas hubungan industrial	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (%)	100	100	100	750.000.000	100	510.000.000	100	570.000.000	100	680.000.000	100	715.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.886.914.900		4.160.000.000		4.370.000.000		4.580.000.000		4.800.000.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.200.000.000		1.260.000.000		1.310.000.000		1.360.000.000		1.410.000.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	18	20	22	1.200.000.000	24	1.260.000.000	26	1.310.000.000	28	1.360.000.000	30	1.410.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					619.000.000		660.000.000		690.000.000		720.000.000		750.000.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	619.000.000	100	660.000.000	100	690.000.000	100	720.000.000	100	750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					420.000.000		440.000.000		460.000.000		480.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	99	100	100	420.000.000	100	440.000.000	100	460.000.000	100	480.000.000	100	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	99	100	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					655.160.900		730.000.000		780.000.000		830.000.000		890.000.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	93	94	95	655.160.900	96	730.000.000	97	780.000.000	98	830.000.000	99	890.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					842.754.000		910.000.000		960.000.000		1.010.000.000		1.060.000.000	
Menigkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Ekploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	93	94	95	842.754.000	96	910.000.000	97	960.000.000	98	1.010.000.000	99	1.060.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					18.238.681.048		19.827.363.492		21.519.178.488		23.350.329.667		25.362.037.883	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.336.368.627		9.173.196.828		10.082.902.759		11.083.198.595		12.183.124.295	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	73,62	80,82	81,12	8.336.368.627	81,52	9.173.196.828	82,02	10.082.902.759	82,62	11.083.198.595	83,22	12.183.124.295	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN					1.763.522.485		1.939.874.734		2.133.862.207		2.347.248.428		2.581.973.270	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang fungsional (%)	51,72	55,72	59,72	1.763.522.485	63,72	1.939.874.734	67,72	2.133.862.207	71,72	2.347.248.428	75,72	2.581.973.270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					6.255.556.131		6.683.499.744		7.144.357.118		7.640.925.600		8.176.257.569	
Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (poin)	91,54	91,94	92,35	1.668.131.487	92,75	1.834.944.636	93,15	2.018.439.099	93,55	2.220.283.009	93,96	2.442.311.310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya diversifikasi ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (poin)	95,45	95,6	95,75	4.038.163.810	95,9	4.244.368.191	96,05	4.461.312.410	96,2	4.689.576.421	96,35	4.929.773.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Terkendalinya harga pangan pokok utama	CV Harga Beras (%) (%)	1,89	5	5	549.260.834	5	604.186.917	5	664.605.609	5	731.066.170	5	804.172.787	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					580.583.805		638.642.186		702.506.404		772.757.044		850.032.749	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,85	3,62	3,39	580.583.805	3,17	638.642.186	2,94	702.506.404	2,71	772.757.044	2,49	850.032.749	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.302.650.000		1.392.150.000		1.455.550.000		1.506.200.000		1.570.650.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	84,86	85,58	86,3	1.302.650.000	87,02	1.392.150.000	87,74	1.455.550.000	88,46	1.506.200.000	89,18	1.570.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.050.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	Persentase Jumlah permasalahan pertanahan yang tertangani (%)	19,8	10	22	250.000.000	24	250.000.000	26	250.000.000	28	250.000.000	30	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Persentase jumlah bidang tanah yang diredistribusi (%)	100	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Persentase jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Bidang Tanah yang Telah Dimanfaatkan PEMDA (%)	-	-	5	100.000.000	10	150.000.000	20	150.000.000	30	150.000.000	40	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					126.455.094.760		139.598.819.165		168.314.749.272		195.421.621.693		217.338.250.083	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.795.906.504		32.837.710.660		36.436.108.832		40.430.330.804		44.863.917.192	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	59,68	77,88	78,18	29.795.906.504	78,58	32.837.710.660	79,08	36.436.108.832	79,68	40.430.330.804	80,28	44.863.917.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					800.000.000		888.000.000		985.680.000		1.694.104.800		2.314.456.329	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	800.000.000	100	888.000.000	100	985.680.000	100	1.694.104.800	100	2.314.456.329	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					10.214.800.000		10.579.428.000		11.149.165.080		6.381.573.239		7.083.546.295	
Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan hidup	Persentase titik lokasi pemantauan kualitas air dan udara (%)	100	100	100	10.214.800.000	100	10.579.428.000	100	11.149.165.080	100	6.381.573.239	100	7.083.546.295	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.000.000.000		2.220.000.000		2.464.200.000		2.735.262.000		3.036.140.821	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,188	0,188	0,216	2.000.000.000	0,226	2.220.000.000	0,236	2.464.200.000	0,246	2.735.262.000	0,256	3.036.140.821	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					320.000.000		354.200.000		394.272.000		437.641.920		485.782.531	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	320.000.000	100	354.200.000	100	394.272.000	100	437.641.920	100	485.782.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					625.000.000		693.750.000		770.062.500		854.769.375		948.794.007	
Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)	2	2	2	625.000.000	2	693.750.000	2	770.062.500	2	854.769.375	2	948.794.007	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					100.000.000		111.000.000		123.210.000		136.763.100		151.807.041	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	123.210.000	100	136.763.100	100	151.807.041	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					225.000.000		249.750.000		277.222.500		307.716.975		341.565.843	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	20	20	20	225.000.000	20	249.750.000	20	277.222.500	20	307.716.975	20	341.565.843	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200.000.000		222.000.000		246.420.000		273.526.200		303.614.082	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	50	50	50	200.000.000	50	222.000.000	50	246.420.000	50	273.526.200	50	303.614.082	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		111.000.000		123.210.000		136.763.100		151.807.041	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani (%)	100	100	100	100.000.000	100	111.000.000	100	123.210.000	100	136.763.100	100	151.807.041	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					82.074.388.256		91.331.980.505		115.345.198.360		142.033.170.180		157.656.818.901	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	44,3	45	50	82.074.388.256	52	91.331.980.505	52	115.345.198.360	58	142.033.170.180	58	157.656.818.901	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					19.721.397.764		20.977.098.989		23.059.560.629		24.955.925.694		27.492.590.897	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.649.183.044		14.519.719.099		15.971.691.149		17.568.860.110		19.325.746.619	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	81,89	82,59	82,89	13.649.183.044	83,29	14.519.719.099	83,79	15.971.691.149	84,39	17.568.860.110	84,99	19.325.746.619	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					3.321.299.590		3.676.147.890		3.968.712.679		4.290.533.947		4.644.537.342	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	17,41	25	27	3.321.299.590	29	3.676.147.890	31	3.968.712.679	33	4.290.533.947	35	4.644.537.342	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62	62	64		66		68		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.246.120.300		1.509.231.067		1.611.210.285		1.731.796.967		1.874.952.651	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	1.246.120.300	100	1.509.231.067	100	1.611.210.285	100	1.731.796.967	100	1.874.952.651	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	85,83	87	89		91		93		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.278.163.830		1.151.072.183		1.356.785.578		1.175.783.498		1.411.165.320	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	1.278.163.830	100	1.151.072.183	100	1.356.785.578	100	1.175.783.498	100	1.411.165.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					226.631.000		120.928.750		151.160.938		188.951.172		236.188.965	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	226.631.000	100	120.928.750	100	151.160.938	100	188.951.172	100	236.188.965	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					37.758.876.475		36.714.344.483		37.499.344.483		40.049.344.483		42.049.344.483	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.390.967.247		10.141.435.255		10.126.435.255		10.126.435.255		10.126.435.255	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,46	77,66	77,96	9.390.967.247	78,36	10.141.435.255	78,86	10.126.435.255	79,46	10.126.435.255	80,06	10.126.435.255	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					7.595.000.000		3.750.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000		5.050.000.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0	23,8	24,7	7.595.000.000	24,9	3.750.000.000	25,7	3.800.000.000	26,1	3.800.000.000	26,6	5.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	15,20	17,58	1.000.000.000	19,95	1.000.000.000	22,33	1.000.000.000	24,70	1.000.000.000	27,08	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					9.492.909.228		9.892.909.228		8.992.909.228		9.892.909.228		8.992.909.228	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0	19,48	29,22	9.492.909.228	38,95	9.892.909.228	48,69	8.992.909.228	58,43	9.892.909.228	68,17	8.992.909.228	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					10.280.000.000		11.930.000.000		13.580.000.000		15.230.000.000		16.880.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	6,25	25	10.280.000.000	43,75	11.930.000.000	62,5	13.580.000.000	81,25	15.230.000.000	100	16.880.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					44.454.458.826		45.501.358.864		46.531.358.864		47.521.358.864		48.641.358.864	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.568.711.566		12.156.994.864		12.691.994.864		13.236.994.864		13.781.994.864	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	59,09	77,95	78,25	11.568.711.566	78,65	12.156.994.864	79,15	12.691.994.864	79,75	13.236.994.864	80,35	13.781.994.864	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					7.813.320.000		7.843.120.000		7.873.120.000		7.903.120.000		7.933.120.000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,35	2,33	2,32	7.813.320.000	2,3	7.843.120.000	2,29	7.873.120.000	2,17	7.903.120.000	2,1	7.933.120.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					16.103.154.000		16.436.944.000		16.801.944.000		17.116.944.000		17.561.944.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR) (Persentase)	68,54	69,06	69,48	16.103.154.000	69,9	16.436.944.000	70,32	16.801.944.000	70,74	17.116.944.000	71,84	17.561.944.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6,94	7,94	7,86		7,69		7,59		7,46		7,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					8.969.273.260		9.064.300.000		9.164.300.000		9.264.300.000		9.364.300.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 thn) (Angka)	26,9	23,8	21,5	8.969.273.260	19,8	9.064.300.000	18,5	9.164.300.000	17,6	9.264.300.000	16,9	9.364.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					199.397.321.506		186.441.186.058		187.132.414.975		193.189.505.346		190.101.809.373	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.753.900.000		27.003.900.000		27.003.900.000		27.003.900.000		27.753.900.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	57,66	77,86	78,16	27.753.900.000	78,56	27.003.900.000	79,06	27.003.900.000	79,66	27.003.900.000	80,26	27.753.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					169.128.131.506		157.427.118.058		158.214.753.475		164.548.679.518		161.417.783.373	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (poin)	0,57	0,59	0,61	169.128.131.506	0,63	157.427.118.058	0,64	158.214.753.475	0,65	164.548.679.518	0,67	161.417.783.373	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten (%)	36,52	37,25	39,04		41,79		44,29		47,02		49,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	35,88	36,44	46,62		70,27		90,73		96,05		99,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					575.035.000		388.535.000		414.686.000		522.501.400		430.126.000	
Meningkatnya keselamatan pelayaran	Tingkat Laik Layar Sarana Pelayaran (%)	4,38	4,38	16,77	575.035.000	36,54	388.535.000	59,62	414.686.000	73,14	522.501.400	86,95	430.126.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.940.255.000		1.621.633.000		1.499.075.500		1.114.424.428		500.000.000	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	20,07	20,57	29,1	1.940.255.000	48,06	1.621.633.000	62,14	1.499.075.500	71,68	1.114.424.428	88,38	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					30.924.295.089		20.901.832.290		22.224.708.540		23.642.290.916		24.557.302.819	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.574.306.989		11.226.282.290		11.327.282.290		11.428.282.290		11.428.282.290	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	72,82	78,02	78,32	18.574.306.989	78,72	11.226.282.290	79,22	11.327.282.290	79,82	11.428.282.290	80,42	11.428.282.290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					5.253.325.000		3.275.000.000		3.812.500.000		4.350.000.000		4.375.000.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	-	80	81	5.253.325.000	82	3.275.000.000	83	3.812.500.000	84	4.350.000.000	85,05	4.375.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.096.663.100		6.400.550.000		7.084.926.250		7.864.008.626		8.754.020.529	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan Indeks SPBE (poin)	1,63	1,35	1,5	7.096.663.100	1,65	6.400.550.000	1,9	7.084.926.250	2,09	7.864.008.626	2,09	8.754.020.529	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.258.475.609		22.253.784.003		24.458.385.903		26.872.724.494		29.508.273.443	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.539.179.276		10.493.097.203		11.542.406.923		12.696.647.616		13.966.312.377	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	75,83	81,03	81,33	9.539.179.276	81,73	10.493.097.203	82,23	11.542.406.923	82,83	12.696.647.616	83,43	13.966.312.377	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang memiliki izin	Persentase KSP/USP Berizin (%)	0	0,6	1,1	120.000.000	1,7	130.000.000	2,3	140.000.000	2,8	150.000.000	3,4	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	
Meningkatnya tingkat kepatuhan koperasi sesuai ketentuan	Persentase tingkat Kepatuhan Koperasi (%)	15,78	17,28	23,04	500.000.000	28,8	550.000.000	34,56	605.000.000	40,32	665.500.000	46,08	732.050.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					226.958.333		245.115.000		272.350.000		299.585.000		326.820.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	persentase koperasi sehat (%)	5,88	6,91	14,4	226.958.333	15,55	245.115.000	17,28	272.350.000	19,01	299.585.000	20,74	326.820.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					390.000.000		405.000.000		425.000.000		440.000.000		450.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian yang Tersertifikasi (%)	0	0	5,95	390.000.000	6,26	405.000.000	6,57	425.000.000	6,87	440.000.000	7,18	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.290.000.000		1.419.000.000		1.560.900.000		1.716.990.000		1.888.689.000	
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	7,04	7,74	8,52	1.290.000.000	9,37	1.419.000.000	10,31	1.560.900.000	11,34	1.716.990.000	12,47	1.888.689.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					6.742.338.000		7.416.571.800		8.158.228.980		8.974.051.878		9.871.457.066	
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha formal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Formal (%)	1,18	2,26	3,35	6.742.338.000	4,43	7.416.571.800	5,51	8.158.228.980	6,59	8.974.051.878	7,67	9.871.457.066	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.450.000.000		1.595.000.000		1.754.500.000		1.929.950.000		2.122.945.000	
Meningkatnya pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro Naik Kelas (%)	-	12	13	1.450.000.000	14	1.595.000.000	15	1.754.500.000	16	1.929.950.000	17	2.122.945.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					15.470.000.000		15.445.000.000		15.812.500.000		15.307.500.000		15.817.500.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.840.000.000		11.825.000.000		11.732.500.000		11.237.500.000		11.237.500.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	60,55	77,75	78,05	11.840.000.000	78,45	11.825.000.000	78,95	11.732.500.000	79,55	11.237.500.000	80,15	11.237.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	157,47	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					700.000.000		700.000.000		900.000.000		750.000.000		1.200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya minat penanaman modal	Persentase Investor yang Berinvestasi (%)	-	5	6	700.000.000	7	700.000.000	8	900.000.000	9	750.000.000	10	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					950.000.000		925.000.000		1.070.000.000		1.190.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sektor infrastruktur dan sosial	Persentase Pelaku Usaha Sektor Infrastruktur dan Sosial yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	325.000.000	100	362.500.000	100	410.000.000	100	445.000.000	100	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sektor ekonomi dan SDA	Persentase Pelaku Usaha Sektor Ekonomi dan SDA yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	325.000.000	100	362.500.000	100	410.000.000	100	445.000.000	100	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya layanan pengaduan penanaman modal	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	300.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					805.000.000		820.000.000		920.000.000		930.000.000		930.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Lapor LKPM (%)	10	10	10	805.000.000	10	820.000.000	10	920.000.000	10	930.000.000	10	930.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					275.000.000		275.000.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemutakhiran Data dan Sistem Informasi PMPTSP (%)	100	100	100	275.000.000	100	275.000.000	100	290.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					116.404.960.454		123.173.499.185		135.127.516.526		157.624.168.175		187.915.094.992	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.908.847.012		17.399.731.713		17.817.704.885		20.097.475.374		21.575.222.910	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	42,3	77,66	78,66	15.908.847.012	79,66	17.399.731.713	80,66	17.817.704.885	81,16	20.097.475.374	81,66	21.575.222.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					9.953.823.184		10.949.205.503		12.044.126.053		13.248.538.658		14.573.392.523	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	3,7	3,75	3,8	9.953.823.184	3,85	10.949.205.503	3,9	12.044.126.053	3,95	13.248.538.658	4	14.573.392.523	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					87.788.880.257		91.567.768.283		100.674.545.113		120.691.999.621		146.211.199.585	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga (%)	60,3	60,78	61,27	87.788.880.257	61,75	91.567.768.283	62,24	100.674.545.113	62,72	120.691.999.621	63,21	146.211.199.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda Jawa Barat (Orang)	32	8	10		32		35		10		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					2.753.410.001		3.256.793.686		4.591.140.475		3.586.154.522		5.555.279.974	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	10,04%	10,16%	10,28%	2.753.410.001	10,40%	3.256.793.686	10,52%	4.591.140.475	10,64%	3.586.154.522	10,76%	5.555.279.974	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					582.500.000		682.000.000		750.200.000		825.120.000		907.742.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					582.500.000		682.000.000		750.200.000		825.120.000		907.742.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,8	2,9	3	582.500.000	3,05	682.000.000	3,1	750.200.000	3,15	825.120.000	3,2	907.742.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.488.023.700		2.050.500.000		2.376.075.000		2.851.270.000		3.369.684.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.488.023.700		2.050.500.000		2.376.075.000		2.851.270.000		3.369.684.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	391	450	450	1.488.023.700	450	2.050.500.000	450	2.376.075.000	450	2.851.270.000	450	3.369.684.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.800.000.000		4.890.000.000		5.250.000.000		5.600.000.000		5.680.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.350.000.000		2.960.000.000		3.175.000.000		3.450.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK yang dimanfaatkan (%)	-	60	60	2.350.000.000	60	2.960.000.000	60	3.175.000.000	60	3.450.000.000	60	3.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kapasitas Pelaku Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional Daerah yang tersertifikasi (%)	-	-	3	200.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					150.000.000		250.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya akses terhadap informasi sejarah Daerah	Persentase Pertumbuhan masyarakat yang mendapat Infomasi sejarah daerah (%)	-	-	11	150.000.000	11	250.000.000	11	350.000.000	11	400.000.000	11	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					700.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Situs Budaya Daerah (%)	-	-	3	700.000.000	3	850.000.000	3	850.000.000	3	850.000.000	3	850.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					400.000.000		430.000.000		475.000.000		500.000.000		530.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	-	16	16	400.000.000	16	430.000.000	16	475.000.000	16	500.000.000	16	530.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					14.337.184.545		21.054.837.326		21.920.000.000		22.554.000.000		23.173.000.000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.752.184.545		14.959.837.326		15.465.000.000		15.740.000.000		16.025.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,28	77,89	78,19	8.752.184.545	78,59	14.959.837.326	79,09	15.465.000.000	79,69	15.740.000.000	80,29	16.025.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.465.000.000		4.910.000.000		5.125.000.000		5.314.000.000		5.498.000.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,64	70	72	4.465.000.000	73	4.910.000.000	74	5.125.000.000	75	5.314.000.000	76	5.498.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					1.120.000.000		1.185.000.000		1.330.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	5	10	15	1.120.000.000	20	1.185.000.000	25	1.330.000.000	30	1.500.000.000	35	1.650.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					2.300.000.000		2.735.000.000		2.970.000.000		3.195.000.000		3.420.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.250.000.000		1.460.000.000		1.595.000.000		1.720.000.000		1.840.000.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	76	76	76,38	1.250.000.000	76,68	1.460.000.000	76,97	1.595.000.000	77,2	1.720.000.000	77,55	1.840.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					1.050.000.000		1.275.000.000		1.375.000.000		1.475.000.000		1.580.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	98	98	98	1.050.000.000	98	1.275.000.000	98	1.375.000.000	98	1.475.000.000	98	1.580.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					43.360.000.000		47.696.000.000		52.465.600.000		57.712.160.000		63.483.375.500	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.330.000.000		26.763.000.000		29.439.300.000		32.383.230.000		35.621.553.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	72,71	77,91	78,21	24.330.000.000	78,61	26.763.000.000	79,11	29.439.300.000	79,71	32.383.230.000	80,31	35.621.553.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					8.800.000.000		9.680.000.000		10.648.000.000		11.712.800.000		12.884.080.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.470	1.728	1,901	8.800.000.000	1,977	9.680.000.000	2,056	10.648.000.000	2,138	11.712.800.000	2,224	12.884.080.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					6.270.000.000		6.897.000.000		7.586.700.000		8.345.370.000		9.179.906.500	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	41.614	41.822	41.787	6.270.000.000	42.085	6.897.000.000	43.040	7.586.700.000	44.133	8.345.370.000	44.572	9.179.906.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.760.000.000		1.936.000.000		2.129.600.000		2.342.560.000		2.576.816.000	
Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase cakupan wilayah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	14,3	16,7	19	1.760.000.000	21,4	1.936.000.000	23,8	2.129.600.000	26,2	2.342.560.000	28,6	2.576.816.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		3.221.020.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Produksi Olahan Komoditas Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Komoditas Perikanan (Ton)	792	815	824	2.200.000.000	840	2.420.000.000	848	2.662.000.000	865	2.928.200.000	873	3.221.020.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					20.475.120.333		35.615.000.000		38.880.000.000		30.105.000.000		32.655.000.000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.955.120.333		14.735.000.000		24.145.000.000		15.600.000.000		16.750.000.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	68,4	77,6	77,9	11.955.120.333	78,3	14.735.000.000	78,8	24.145.000.000	79,4	15.600.000.000	80	16.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.300.000.000		5.330.000.000		5.385.000.000		5.555.000.000		5.605.000.000	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah (%)	-	5	5	3.300.000.000	5	5.330.000.000	5	5.385.000.000	5	5.555.000.000	5	5.605.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					820.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10	10	10	820.000.000	10	1.300.000.000	10	1.300.000.000	10	1.300.000.000	10	1.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					2.350.000.000		10.600.000.000		4.800.000.000		4.150.000.000		5.050.000.000	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Indeks Kota Kreatif (Poin)	86,88	87	88	2.350.000.000	89	10.600.000.000	91	4.800.000.000	91,5	4.150.000.000	92	5.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					2.050.000.000		3.650.000.000		3.250.000.000		3.500.000.000		3.950.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi (%)	10	10	10	2.050.000.000	10	3.650.000.000	10	3.250.000.000	10	3.500.000.000	10	3.950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					145.167.700.000		152.343.700.000		160.248.190.000		169.278.659.000		175.738.849.900	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.623.700.000		39.505.800.000		41.486.000.000		43.555.500.000		44.104.500.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	71,54	77,72	78,72	37.623.700.000	79,72	39.505.800.000	80,72	41.486.000.000	81,22	43.555.500.000	81,72	44.104.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					30.755.000.000		32.522.000.000		34.584.200.000		36.805.620.000		38.666.182.000	
Meningkatnya luasan layanan sarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani sarana produksi pertanian (%)	-	9	9	20.160.000.000	9	20.950.000.000	9	21.945.000.000	9	23.000.000.000	9	23.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi sarana alat pasca panen pertanian	Persentase fasilitasi sarana alat pasca panen pertanian (%)	-	5	5	1.575.000.000	5	1.650.000.000	5	1.725.000.000	5	1.800.000.000	5	1.860.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	27.345	27.618	28.005	7.150.000.000	28.509	7.865.000.000	29.136	8.651.500.000	28.894	9.516.650.000	30.791	10.468.315.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Ternak yang Bersertifikat	Persentase Ternak Yang Bersertifikat (%)	8	8,5	9	1.870.000.000	9,5	2.057.000.000	10	2.262.700.000	10,5	2.488.970.000	11	2.737.867.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					56.460.000.000		58.616.500.000		60.969.150.000		64.141.815.000		66.643.871.500	
Meningkatnya luasan layanan prasarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang terlayani prasarana produksi pertanian (%)	-	10	10	50.400.000.000	10	52.000.000.000	10	53.760.000.000	10	56.253.750.000	10	58.055.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya fasilitasi prasarana pasca panen pertanian	Persentase fasilitasi prasarana alat pasca panen pertanian (%)	-	5	5	945.000.000	5	990.000.000	5	1.020.000.000	5	1.080.000.000	5	1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan (%)	1	1	2	5.115.000.000	3	5.626.500.000	4	6.189.150.000	5	6.808.065.000	6	7.488.871.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					6.850.000.000		7.510.000.000		8.236.000.000		9.034.600.000		9.913.060.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kejadian Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) pada Populasi Hewan (%)	1,6	3	2,8	4.430.000.000	2,6	4.848.000.000	2,4	5.307.800.000	2,2	5.813.580.000	2	6.369.938.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pembinaan kesmavet pada unit usaha	Persentase unit usaha yang dibina (%)	34	42	46	2.420.000.000	50	2.662.000.000	54	2.928.200.000	58	3.221.020.000	60	3.543.122.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					3.525.000.000		3.762.000.000		4.047.200.000		4.336.920.000		4.602.612.000	
Meningkatnya luasan layanan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	-	10	10	2.205.000.000	10	2.310.000.000	10	2.450.000.000	10	2.580.000.000	10	2.670.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya penanganan bencana peternakan	Persentase Penanganan Wilayah Bencana Peternakan (%)	-	69	70	1.320.000.000	71	1.452.000.000	72	1.597.200.000	74	1.756.920.000	75	1.932.612.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					2.720.000.000		2.820.000.000		2.960.000.000		3.070.000.000		3.200.000.000	
Meningkatnya fasilitasi layanan pengembangan usaha pertanian	Persentase fasilitasi layanan pengembangan usaha pertanian (%)	-	5	5	2.720.000.000	5	2.820.000.000	5	2.960.000.000	5	3.070.000.000	5	3.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					7.234.000.000		7.607.400.000		7.965.640.000		8.334.204.000		8.608.624.400	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (%)	-	5	5	6.370.000.000	5	6.675.000.000	5	6.960.000.000	5	7.250.000.000	5	7.450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas kelompok pengolahan hasil pertanian	Persentase Kelompok Pengolahan Hasil Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	-	5	5	380.000.000	5	400.000.000	5	420.000.000	5	440.000.000	5	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas kelompok peternak	Persentase Sertifikasi Kelompok Peternak (%)	15	20	25	484.000.000	30	532.400.000	35	585.640.000	40	644.204.000	45	708.624.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					170.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					170.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000	
Meningkatnya kepatuhan perusahaan pemanfaat langsung panas bumi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase Perusahaan Pemanfataan Langsung Panas Bumi yang memenuhi standar (%)	-	10	16	170.000.000	32	175.000.000	48	200.000.000	64	225.000.000	80	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					114.725.000.000		115.725.000.000		118.050.000.000		119.350.000.000		120.925.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					104.300.000.000		105.250.000.000		107.500.000.000		108.750.000.000		110.250.000.000	
Meningkatnya fasilitasi sarana distribusi perdagangan di luar pasar tradisional	Persentase fasilitasi sarana distribusi perdagangan diluar pasar tradisional (%)	0	20	20	5.250.000.000	20	5.250.000.000	20	5.250.000.000	20	5.250.000.000	20	5.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan pasar rakyat	Persentase sarana perdagangan pasar rakyat yang fungsional (%)	59	60	63	99.050.000.000	68	100.000.000.000	72	102.250.000.000	76	103.500.000.000	80	105.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhana pokok dan barang penting (%)	13	15	15	2.750.000.000	15	2.750.000.000	15	2.750.000.000	15	2.750.000.000	15	2.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					5.350.000.000		5.350.000.000		5.350.000.000		5.350.000.000		5.350.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang berorientasi ekspor (%)	21	5	5	5.350.000.000	5	5.350.000.000	5	5.350.000.000	5	5.350.000.000	5	5.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					575.000.000		625.000.000		700.000.000		750.000.000		825.000.000	
Meningkatnya alat UTTP ditera dan tera ulang	Persentase alat UTTP yang ditera dan tera ulang (%)	14,08	42	42	575.000.000	43	625.000.000	44	700.000.000	45	750.000.000	46	825.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pelaku usaha pada pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan pada pemasaran produk Dalam Negeri (%)	50	33	25	1.350.000.000	20	1.350.000.000	15	1.350.000.000	15	1.350.000.000	15	1.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					58.072.794.272		59.623.000.000		61.428.000.000		63.238.000.000		64.808.000.000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.202.794.272		23.223.000.000		23.243.000.000		23.263.000.000		23.283.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,18	77,38	77,68	23.202.794.272	78,08	23.223.000.000	78,58	23.243.000.000	79,18	23.263.000.000	79,78	23.283.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					32.500.000.000		34.000.000.000		35.750.000.000		37.500.000.000		39.000.000.000	
Meningkatnya Pertumbuhan Sentra Industri Kecil Menengah	Persentase jumlah sentra idustri kecil menengah yang produkif (%)	-	20	40	12.500.000.000	50	13.000.000.000	60	13.750.000.000	80	14.500.000.000	100	15.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkanya Standarisasi Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah yang Tersatandarisasi (%)	0,35	1	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya produkivitas industri pengolahan	Produktivitas sektor industri pengolahan (Angka)	14.490.388	14.750.000	15.000.000	10.000.000.000	15.500.000	11.000.000.000	16.000.000	12.000.000.000	16.500.000	13.000.000.000	17.000.000	14.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000	
Meningkatnya Pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah	Persentase pengendalian Perizinan Industri Kecil menengah (%)	0,82	1	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					120.000.000		150.000.000		185.000.000		225.000.000		275.000.000	
Meningkatnya perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang terdaftar dalam SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang terdaftar dalam SII Nas (%)	0,44	0,5	0,7	120.000.000	0,95	150.000.000	1,2	185.000.000	1,4	225.000.000	1,5	275.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					250.000.000		140.000.000		200.000.000		240.000.000		240.000.000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					250.000.000		140.000.000		200.000.000		240.000.000		240.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas calon transmigran	persentase calon transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	35	43	48	250.000.000	53	140.000.000	58	200.000.000	63	240.000.000	68	240.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					104.177.511.407		111.601.669.410		114.572.470.529		129.444.515.644		138.073.354.020	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					58.912.601.278		63.465.192.008		63.591.977.351		73.268.985.571		75.355.595.247	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,56	4,57	4,58	162.618.325	4,59	165.749.241	4,6	170.351.688	4,61	177.386.857	4,62	186.673.280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya NIlai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk Komponen Pelaporan Kinerja (Poin)	9,59	9,6	9,61	120.242.950	9,62	121.255.098	9,63	122.742.954	9,64	125.017.250	9,65	128.019.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan sistem kerja	Efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang disusun oleh Perangkat Daerah (%)	100	100	100	520.077.525	100	539.081.402	100	564.667.100	100	606.133.809	100	557.669.867	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	76,57	77,77	78,07	58.109.662.478	78,47	62.639.106.267	78,97	62.734.215.609	79,57	72.360.447.655	80,17	74.483.232.780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN					43.551.298.714		46.337.185.416		49.055.250.755		54.057.763.407		60.345.860.106	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya capaian Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung nilai-nilai sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang mendukung nilai nilai-sosial dan keagamaan (%)	100	100	100	41.433.019.230	100	44.110.081.792	100	46.675.363.757	100	51.443.723.332	100	57.425.957.972	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya capaian standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Capaian SPM Pemerintah Daerah (%)	94,22	94,27	94,32	1.058.805.470	94,37	1.111.745.744	94,42	1.189.567.945	94,47	1.308.524.740	94,53	1.465.547.710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelaksanaan reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,66	88,4	88,5	589.008.105	88,6	618.458.510	88,7	661.750.605	88,8	724.090.041	88,9	803.158.095	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kerjasama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	470.465.909	100	496.899.370	100	528.568.448	100	581.425.294	100	651.196.329	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.713.611.415		1.799.291.986		1.925.242.423		2.117.766.666		2.371.898.667	
Meningkatnya kualitas Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kualitas Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	673.910.799	100	707.606.339	100	757.138.782	100	832.852.661	100	932.794.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan	Persentase Kualitas Kebijakan dan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100	493.835.856	100	518.527.649	100	554.824.584	100	610.307.042	100	683.543.887	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	100	100	100	272.181.630	100	285.790.711	100	305.796.061	100	336.375.667	100	376.740.748	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	273.683.130	100	287.367.287	100	307.482.996	100	338.231.296	100	378.819.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					113.633.710.016		119.580.897.318		125.559.942.184		131.837.939.293		138.429.836.258	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.321.186.788		69.902.747.929		73.397.885.326		77.067.779.592		80.921.168.572	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	57,29	77,49	77,79	66.321.186.788	78,19	69.902.747.929	78,69	73.397.885.326	79,29	77.067.779.592	79,89	80.921.168.572	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					47.312.523.228		49.678.149.389		52.162.056.858		54.770.159.701		57.508.667.686	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	11.215.001.400	100	11.775.751.470	100	12.364.539.043	100	12.982.765.995	100	13.631.904.295	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	89,77	90	90,1	36.097.521.828	90,15	37.902.397.919	90,2	39.797.517.815	90,25	41.787.393.706	90,3	43.876.763.391	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					16.749.634.306		17.199.834.919		17.533.073.532		17.935.465.618		18.333.641.571	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.421.865.906		11.747.399.019		11.962.261.532		12.201.505.118		12.475.155.571	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	81,94	82,44	82,64	11.421.865.906	82,94	11.747.399.019	83,34	11.962.261.532	83,84	12.201.505.118	84,44	12.475.155.571	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.811.268.400		1.865.605.900		1.912.245.400		1.969.612.300		2.018.852.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	99,07	100	100	1.811.268.400	100	1.865.605.900	100	1.912.245.400	100	1.969.612.300	100	2.018.852.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.516.500.000		3.586.830.000		3.658.566.600		3.764.348.200		3.839.634.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	23,72	23,76	23,78	1.195.000.000	23,79	1.218.900.000	23,8	1.243.278.000	23,81	1.280.575.800	23,82	1.306.186.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	22,13	22,2	22,21		22,22		22,24		22,25		22,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	26,04	26,37	26,46	939.500.000	26,27	958.290.000	26,62	977.455.800	26,68	1.002.804.900	26,73	1.022.860.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	26,4	26,49	26,58		26,67		26,85		26,86		26,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk Komponen Perencanaan Kinerja (poin)	26,64	26,97	27,24	1.382.000.000	27,36	1.409.640.000	27,48	1.437.832.800	27,6	1.480.967.500	27,61	1.510.586.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk Komponen Pengukuran Kinerja (poin)	26,1	26,7	27		27,01		27,02		27,03		27,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					935.910.792.800		955.902.571.000		988.066.157.600		1.023.054.719.500		1.062.394.718.600	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.026.810.000		49.427.491.000		53.777.240.000		58.752.464.000		64.132.710.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,74	77,94	78,24	13.620.000.000	78,64	14.880.000.000	79,14	15.775.000.000	79,74	16.950.000.000	80,34	18.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	70,55	77,75	78,05	31.406.810.000	78,45	34.547.491.000	78,95	38.002.240.000	79,55	41.802.464.000	80,15	45.982.710.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Badan Pendapatan Daerah)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					880.640.000.000		894.939.500.000		921.270.000.000		949.615.500.000		981.075.000.000	
Meningkatnya penganggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	persentase pengalokasian anggaran belanja dalam APBD yang ditentukan peggunaannya (%)	100	100	100	2.480.000.000	100	2.600.000.000	100	2.730.000.000	100	2.865.000.000	100	3.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kesesuaian penganggaran Program Prioritas Daerah	persentase kesesuaian program pada KUA PPAS dan APBD (%)	100	100	100	90.000.000	100	96.500.000	100	105.000.000	100	110.500.000	100	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran sesuai target (%)	100	100	100	877.210.000.000	100	891.295.000.000	100	917.385.000.000	100	945.485.000.000	100	976.590.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD yang tepat waktu dan sesuai SAP (%)	100	100	100	860.000.000	100	948.000.000	100	1.050.000.000	100	1.155.000.000	100	1.270.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.500.000.000		3.780.000.000		4.100.000.000		4.430.000.000		4.785.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan pemindahtanganan BMD (%)	100	100	100	3.500.000.000	100	3.780.000.000	100	4.100.000.000	100	4.430.000.000	100	4.785.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.743.982.800		7.755.580.000		8.918.917.600		10.256.755.500		12.402.008.600	
Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah (%)	8	8	8,25	1.457.962.400	8,5	1.676.656.800	8,75	1.928.155.300	9	2.217.378.600	9,5	3.156.726.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,5	82,2	82,25	590.066.300	82,5	678.576.200	82,55	780.362.700	82,6	897.417.000	82,65	1.032.029.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Tercapainya target realisasi pajak daerah dan retribusi	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah (%)	100	100	100	1.681.463.600	100	1.933.683.000	100	2.223.735.600	100	2.557.295.900	100	2.940.890.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah (%)	60	65	70	806.891.500	75	927.925.000	80	1.067.114.000	85	1.227.181.000	87	1.411.258.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pungut retribusi	Persentase kepatuhan wajib pungut retribusi daerah (%)	40	45	50	94.699.000	55	108.904.000	60	125.239.000	65	144.025.000	70	165.629.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan transaksi elektronik pajak dan retribusi daerah	Persentase wajib pajak dan objek retribusi yang mengimplementasikan transaksi elektronik (%)	20	20	25	2.112.900.000	30	2.429.835.000	35	2.794.311.000	40	3.213.458.000	45	3.695.476.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio elektronifikasi pajak dan retribusi daerah (%)	20	30	40		50		60		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					19.512.799.863		19.941.694.738		21.772.883.242		23.659.163.296		25.592.479.850	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.626.278.398		15.050.948.588		17.036.950.642		19.022.952.696		21.008.954.750	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	78,63	79,83	80,13	13.626.278.398	80,53	15.050.948.588	81,03	17.036.950.642	81,63	19.022.952.696	82,23	21.008.954.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.886.521.465		4.890.746.150		4.735.932.600		4.636.210.600		4.583.525.100	
Meningkatnya Pengadaan ASN secara Terbuka, Kompetitif dan Transparan	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit aspek Perencanaan Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan ASN Secara Terbuka, Kompetitif dan transparan yang sesuai dengan Formasi (%)	96,5	100	100	1.764.745.500	100	1.312.431.100	100	1.139.159.800	100	1.173.334.600	100	1.139.159.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Promosi dan Mutasi (%)	81,25	81,25	100	849.280.200	100	615.172.050	100	617.020.400	100	635.531.050	100	617.020.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kompetensi dan Karier ASN	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Pengembangan Karier (%)	59,62	59,62	71,15	2.539.642.250	71,15	2.129.817.100	75	2.193.712.300	75	2.129.817.100	75	2.129.817.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas Manajemen Kinerja, Penghargaan dan Disiplin	Persentase Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja dan Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (%)	93,75	93,75	93,75	732.853.515	93,75	833.325.900	93,75	786.040.100	93,75	697.527.850	93,75	697.527.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.824.192.700		7.394.892.200		7.759.229.850		7.935.798.000		8.324.476.150	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.824.192.700		7.394.892.200		7.759.229.850		7.935.798.000		8.324.476.150	
Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi ASN (%)	0	100	100	274.050.450	100	207.131.700	100	212.081.350	100	162.235.000	100	162.235.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Implementasi Manajemen Talenta Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta melalui Pengembangan Kompetensi (%)	0	10	20	2.550.142.250	30	7.187.760.500	40	7.547.148.500	50	7.773.563.000	60	8.162.241.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.497.502.170		2.715.705.000		2.987.280.000		3.286.005.000		3.614.600.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.442.502.170		2.413.205.000		2.654.530.000		2.919.985.000		3.211.980.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	75	78,75	882.710.400	82,69	1.135.255.000	86,82	1.248.785.000	91,16	1.373.665.000	95,72	1.511.030.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	80	84	559.791.770	88,2	1.277.950.000	90,2	1.405.745.000	92,61	1.546.320.000	93,85	1.700.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					55.000.000		302.500.000		332.750.000		366.020.000		402.620.000	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	85	86,7	55.000.000	88,43	151.250.000	90,2	166.375.000	92,01	183.010.000	93,85	201.310.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	-	-	-	0	82,69	151.250.000	86,82	166.375.000	91,16	183.010.000	95,72	201.310.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					38.564.167.923		39.089.344.915		41.104.069.043		40.399.095.025		40.566.942.004	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.943.501.123		26.483.763.333		28.435.459.556		27.667.142.492		27.771.329.708	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,58	77,78	78,08	26.943.501.123	78,48	26.483.763.333	78,98	28.435.459.556	79,58	27.667.142.492	80,18	27.771.329.708	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					9.163.753.800		9.496.816.544		9.544.300.626		9.592.022.127		9.639.982.237	
Meningkatnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,15	3,225	3,3	5.039.023.500	3,5	5.064.045.291	3,525	5.089.365.517	3,55	5.114.812.343	3,75	5.140.386.404	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Inspektorat Daerah
Meningkatnya implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	34,67	40	46,67	3.025.684.900	53,33	3.328.169.658	60	3.344.810.506	66,67	3.361.534.558	73,33	3.378.342.231	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai rekomendasi	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	73	76	77	1.099.045.400	79	1.104.601.595	82	1.110.124.603	85	1.115.675.226	88	1.121.253.602	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.456.913.000		3.108.765.038		3.124.308.861		3.139.930.406		3.155.630.059	
Meningkatnya penerapan manajemen risiko pemerintah daerah	Indeks Manajemen Risiko (poin)	3,144	3,145	3,146	1.199.205.000	3,147	1.742.563.812	3,148	1.751.276.630	3,149	1.760.033.014	3,15	1.768.833.179	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (poin)	2,83	2,9	2,95	216.563.000	3	217.646.247	3,1	218.734.478	3,15	219.828.151	3,2	220.927.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya pencegahan korupsi	Nilai evaluasi MCP KPK (poin)	92	92,28	92,74	608.700.000	92,92	611.756.992	93,11	614.815.777	93,57	617.889.855	93,85	620.979.305	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya cakupan Perangkat Daerah/unit kerja yang memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK (Perangkat Daerah)	1	1	1	216.555.000	1	217.646.247	1	218.734.478	1	219.828.150	1	220.927.291	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas praktik profesional serta peran dan layanan pengawasan	Nilai prkatik propesional PK-APIP (Poin)	3,29	3,39	3,49	215.890.000	3,59	319.151.740	3,69	320.747.498	3,79	322.351.236	3,89	323.962.992	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN					222.357.166.291		219.663.149.830		215.288.080.393		226.915.053.675		234.725.354.535	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					170.982.217.091		161.281.531.291		155.692.112.317		163.851.637.006		169.872.378.090	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	42	77,2	77,5	2.076.980.742	77,9	2.082.220.322	78,4	2.082.220.322	79	2.082.220.322	79,6	2.082.220.322	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	64,78	77,98	78,28	2.813.966.700	78,68	2.636.803.500	79,18	2.691.803.500	79,78	2.636.803.500	80,38	2.711.803.500	Kecamatan Banyuresmi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,2	77,4	77,7	2.516.299.692	78,1	2.529.499.742	78,6	2.529.499.742	79,2	2.782.449.716	79,8	2.782.449.716	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,69	77,89	78,19	2.611.880.404	78,59	2.899.282.652	79,09	3.172.210.917	79,69	3.490.734.008	80,29	3.799.175.509	Kecamatan Bungbulang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	53,51	77,71	78,01	2.809.659.052	78,41	2.542.693.214	78,91	2.559.511.267	79,51	2.580.077.345	80,11	2.605.065.129	Kecamatan Balubur Limbangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	61,92	78,12	78,42	2.413.343.376	78,82	2.466.605.083	79,32	2.713.265.591	79,92	2.984.592.150	80,52	3.283.051.365	Kecamatan Caringin
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	60,75	77,95	78,25	2.398.502.014	78,65	2.371.903.274	79,15	2.609.093.602	79,75	2.870.002.962	80,35	3.157.003.258	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	59,35	77,55	77,85	2.540.037.200	78,25	2.821.008.267	78,75	3.178.659.094	79,35	3.658.420.003	79,95	3.754.762.003	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	58,17	77,37	77,67	4.388.091.800	78,07	2.899.490.152	78,57	2.899.490.152	79,17	2.899.490.152	79,77	2.899.490.152	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	71,29	77,49	77,79	4.455.294.500	78,19	4.671.249.900	78,69	2.710.249.900	79,29	2.780.249.900	79,89	2.973.249.900	Kecamatan Cigedug
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	64,52	77,52	77,72	2.303.600.046	78,02	2.765.779.581	78,42	3.040.857.389	78,92	3.343.443.188	79,52	3.676.287.317	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	69,12	77,12	77,32	2.662.216.170	77,62	2.719.045.500	78,02	2.719.045.500	78,52	2.719.045.500	79,12	2.719.045.500	Kecamatan Cikajang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	46,12	77,32	77,62	2.300.985.900	78,02	2.612.500.000	78,52	2.687.100.000	79,12	2.761.700.000	79,72	2.836.300.000	Kecamatan Cikelet
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,06	77,26	77,56	2.663.784.795	77,96	3.075.395.095	78,46	2.980.266.942	79,06	3.248.490.966	79,66	3.545.921.099	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	58,4	77,6	77,96	2.286.926.823	78,3	2.379.606.700	78,8	2.339.606.700	79,4	2.379.606.700	80	2.359.606.700	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	68,35	77,55	77,85	2.527.700.974	78,25	2.845.100.000	78,75	2.924.700.000	79,35	3.004.300.000	79,95	3.135.400.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	66,14	77,34	77,64	2.757.024.200	78,04	3.475.183.010	78,54	3.604.051.435	79,14	3.897.607.796	79,74	4.268.563.795	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	62,23	77,43	77,73	20.093.879.869	78,13	13.145.184.127	78,63	13.172.984.127	79,23	13.215.984.127	79,83	13.249.984.127	Kecamatan Garut Kota

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	70,09	77,29	77,59	3.389.101.200	77,99	3.141.658.432	78,49	3.152.858.432	79,09	3.141.658.432	79,69	3.152.858.432	Kecamatan Kadungora
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	73,49	77,69	77,99	4.082.722.378	78,39	2.442.722.378	78,89	2.442.722.378	79,49	2.442.722.378	80,09	2.442.722.378	Kecamatan Karangtengah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,35	77,55	77,85	10.089.634.139	78,25	11.000.370.800	78,75	11.037.697.150	79,35	11.730.362.557	79,95	12.142.141.941	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	52,73	77,86	78,86	3.443.954.942	79,86	3.493.106.261	80,86	3.543.984.190	81,36	3.597.087.554	81,86	3.648.771.583	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,51	77,71	78,01	2.902.153.632	78,41	2.899.490.152	78,91	2.899.490.152	79,51	2.899.490.152	80,11	2.899.490.152	Kecamatan Leles
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	71,06	77,26	77,56	2.580.935.670	77,96	3.548.831.150	78,46	4.580.514.265	79,06	5.088.725.692	79,66	4.466.190.261	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	73,22	77,42	77,72	7.289.538.216	78,12	2.666.515.127	78,62	2.799.840.883	79,22	2.939.832.928	79,82	3.086.824.574	Kecamatan Malangbong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,08	77,58	77,78	2.569.660.254	78,08	3.435.700.000	78,48	2.536.200.000	78,98	2.536.200.000	79,58	2.534.400.000	Kecamatan Mekarmukti
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,63	77,83	78,13	2.403.104.752	78,53	2.981.304.752	79,03	3.078.474.752	79,63	3.174.534.752	80,23	3.279.901.652	Kecamatan Pakenjeng
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	63,71	77,91	78,21	2.373.437.113	78,61	2.456.070.134	79,11	2.700.931.929	79,71	2.707.817.323	80,31	2.971.369.392	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	65,2	77,4	77,7	2.041.673.456	78,1	2.436.393.941	78,6	2.685.033.335	79,2	2.927.036.668	79,8	3.224.740.334	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,75	77,95	78,25	4.376.033.660	78,65	2.785.976.886	79,15	2.858.076.886	79,75	2.819.176.886	80,35	2.890.276.886	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	76,26	77,58	77,78	3.083.670.603	78,08	6.676.149.613	78,48	3.488.499.613	78,98	3.886.499.613	79,58	4.231.159.613	Kecamatan Pasirwangi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	60,34	77,54	77,84	7.983.597.214	78,24	4.795.053.019	78,74	5.109.558.321	79,34	5.455.474.153	79,94	5.835.941.568	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	61,71	77,91	78,21	4.848.592.646	78,61	3.760.889.564	79,11	3.768.943.111	79,71	3.952.290.266	80,31	4.144.204.777	Kecamatan Samarang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	64,68	77,88	78,18	4.074.216.704	78,58	2.842.844.274	79,08	3.110.601.012	79,68	3.405.133.423	80,28	3.729.119.075	Kecamatan Selaawi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	58,12	77,32	77,62	2.261.525.118	78,02	2.438.077.993	78,52	2.435.000.000	79,12	2.277.000.000	79,72	2.484.000.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	67,47	77,68	77,98	2.185.322.642	78,38	2.185.322.642	78,88	2.185.322.642	79,48	2.185.322.642	80,08	2.185.322.642	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	66,68	77,88	78,18	4.272.471.940	78,58	4.282.369.500	79,08	2.799.479.056	79,68	2.799.479.056	80,28	2.799.479.056	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	66,98	78,18	78,48	3.299.561.383	78,88	3.462.182.849	79,38	3.676.434.933	79,98	3.774.567.749	80,58	3.989.979.849	Kecamatan Talegong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi General (%)	79,65	79,7	79,75	4.064.900.000	79,8	4.204.511.220	79,85	3.376.511.220	79,9	3.276.511.220	79,95	3.346.511.220	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	54,63	77,83	78,13	4.066.152.938	78,53	5.432.575.032	79,03	4.921.371.980	79,63	6.397.132.648	80,23	5.950.630.784	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	58,52	77,72	78,02	14.203.179.589	78,42	14.203.179.589	78,92	12.966.726.829	79,52	14.263.399.511	80,12	15.689.739.461	Kecamatan Tarogong Kidul
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	66,59	77,78	78,08	2.476.902.645	78,48	2.771.685.864	78,98	2.923.223.068	79,58	2.838.963.068	80,18	2.907.223.068	Kecamatan Wanaraja
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.945.129.144		10.578.186.393		11.215.462.855		11.745.635.189		12.379.707.765	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,59	82,09	82,59	122.500.000	83,09	122.500.000	83,59	122.500.000	84,09	122.500.000	84,59	122.500.000	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	87,33	87,55	87,75	409.999.300	88	404.600.000	88,5	405.600.000	88,8	406.600.000	89	407.600.000	Kecamatan Banyuresmi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,57	87,07	87,57	163.300.000	88,07	163.300.000	88,57	163.300.000	89,07	179.630.000	89,57	179.630.000	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,6	85	85,2	159.311.000	85,4	205.750.000	85,6	221.225.000	85,8	238.047.500	85,9	256.352.250	Kecamatan Bungbulang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,04	82,04	83,04	241.873.100	84,04	318.311.551	85,04	340.593.359	86,04	367.840.829	87,04	400.946.503	Kecamatan Balubur Limbangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,34	83,34	84,34	137.239.800	85,34	268.990.700	86,34	295.889.770	87,34	325.478.747	88,34	358.026.622	Kecamatan Caringin
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,56	84,06	84,56	114.099.900	85,06	205.750.000	85,56	170.908.173	86,06	187.998.990	86,56	206.798.889	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	85,78	86	86,25	193.280.000	86,5	211.860.000	86,75	233.046.000	87	256.350.600	87,25	281.985.660	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,97	84,47	84,97	146.160.400	85,47	172.500.000	85,97	187.500.000	86,47	202.500.000	86,97	217.500.000	Kecamatan Cigedug
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,91	83,41	83,91	136.226.800	84,41	420.000.000	84,91	420.000.000	85,41	420.000.000	85,91	420.000.000	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,35	84,45	84,5	129.500.000	84,65	113.412.400	84,75	124.753.600	84,85	137.228.900	84,95	150.951.800	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,16	86,5	86,75	266.102.480	87	289.378.340	87,25	289.378.340	87,5	289.378.340	87,75	289.378.340	Kecamatan Cikajang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,53	85,03	85,53	101.811.600	86,03	141.000.000	86,53	154.000.000	87,03	167.000.000	87,53	180.000.000	Kecamatan Cikelet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,93	84	84,1	313.852.450	84,2	332.683.597	84,3	355.971.449	84,4	382.586.137	84,5	417.018.889	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,45	86,95	87,45	188.850.000	87,95	191.800.000	88,45	191.800.000	88,95	191.800.000	89,45	191.800.000	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,53	83,03	83,53	141.552.200	84,03	205.000.000	84,53	207.000.000	85,03	213.000.000	85,53	219.000.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,95	85,45	85,95	114.089.200	86,45	174.962.296	86,95	174.962.296	87,45	174.962.296	87,95	174.962.296	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,45	83,95	84,45	251.782.944	84,95	267.156.498	85,45	267.156.498	85,95	267.156.498	86,45	267.156.498	Kecamatan Garut Kota
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,68	86,75	87	135.000.000	87,25	169.500.190	87,5	169.500.190	87,75	169.500.190	88	169.500.190	Kecamatan Kadungora

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,44	84,5	84,6	147.500.000	84,7	147.500.000	84,8	147.500.000	84,9	147.500.000	85	147.500.000	Kecamatan Karangtengah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,97	82	82,5	383.400.000	83	520.910.000	83,5	541.955.500	84	592.778.275	84,5	609.917.189	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,59	83,09	83,59	225.479.960	84,09	227.756.865	84,59	231.122.730	85,09	234.488.595	85,59	237.854.460	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,83	87,33	87,83	350.748.400	88,33	420.000.000	88,83	420.000.000	89,33	420.000.000	89,93	420.000.000	Kecamatan Leles
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	85,39	85,89	86,39	131.300.000	86,89	350.000.000	87,39	425.000.000	87,89	502.500.000	88,39	632.750.000	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	88,97	89,27	89,57	342.500.000	89,87	359.625.000	90,17	377.606.250	90,47	396.486.563	90,77	416.310.891	Kecamatan Malangbong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,58	83,08	83,58	172.000.000	84,08	150.000.000	84,58	150.000.000	85,08	150.000.000	85,58	170.000.000	Kecamatan Mekarmukti
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,63	81,83	82,03	122.500.000	82,23	151.250.000	82,43	166.375.000	82,63	182.435.000	82,83	201.300.000	Kecamatan Pakenjeng
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	85,27	86,12	86,98	280.529.100	87,85	261.475.515	88,73	274.549.291	89,62	288.276.755	90,52	302.690.593	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,85	84,35	84,85	122.510.000	85,35	231.500.000	85,85	231.500.000	86,35	231.500.000	86,85	231.500.000	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	85,09	85,59	86,09	208.106.100	86,59	182.231.260	87,09	182.231.260	87,59	182.231.260	88,09	182.231.260	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,98	83,48	83,98	122.500.000	84,48	122.500.000	84,98	122.500.000	85,48	122.500.000	85,98	122.500.000	Kecamatan Pasirwangi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,5	84	84,5	450.000.000	85	460.000.000	85,5	471.000.000	86	483.100.000	86,5	496.410.000	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,93	85,43	85,93	380.000.000	86,43	395.000.000	86,93	405.000.000	87,43	415.000.000	87,93	425.000.000	Kecamatan Samarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	86,66	87,16	87,66	167.500.000	88,16	184.250.000	88,66	202.675.000	89,16	222.942.500	89,66	245.236.750	Kecamatan Selaawi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	81,02	81,52	82,02	188.100.000	82,52	235.000.000	83,02	250.000.000	83,52	265.000.000	84,02	265.000.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,35	84	84,1	188.300.000	84,2	188.300.000	84,3	188.300.000	84,4	188.300.000	84,5	188.300.000	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	85,36	85,86	86,36	147.499.800	86,86	188.300.000	87,36	188.300.000	87,86	188.300.000	88,36	188.300.000	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	83,14	84,01	84,55	174.300.000	84,95	215.000.000	85,25	225.000.000	85,75	235.000.000	86,25	245.000.000	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,53	83,03	83,53	190.859.200	84,03	203.956.800	84,53	217.656.800	85,03	231.356.800	85,53	241.556.800	Kecamatan Talegong
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	88,61	88,7	88,75	497.099.710	88,8	519.309.681	88,85	599.240.649	88,9	628.364.714	88,95	722.561.185	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	82,65	83,15	83,65	137.500.000	84,15	137.500.000	84,65	351.500.000	85,15	386.650.000	85,65	425.315.000	Kecamatan Tarogong Kidul
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	84,45	84,85	85	348.365.700	85,25	348.365.700	85,5	351.365.700	85,75	351.365.700	90	351.365.700	Kecamatan Wanaraja
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					28.441.833.922		29.487.265.823		30.416.473.863		31.281.741.332		32.582.197.196	
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	17.000.300	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	Kecamatan Banyuresmi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	84,65	84,65	84,75	26.002.800	84,85	27.000.000	84,95	30.200.000	84,97	33.620.000	84,99	37.282.000	Kecamatan Bungbulang
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	99,33	100	100	20.878.000	100	23.465.602	100	25.108.194	100	27.116.849	100	29.557.366	Kecamatan Balubur Limbangan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.200	100	22.000.220	100	24.200.242	100	26.620.266	100	29.282.293	Kecamatan Caringin
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	56.330.000	100	56.330.000	100	73.205.000	100	80.525.500	100	88.578.050	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	76,02	76,25	76,5	29.155.770	76,75	29.150.000	77	32.065.000	77,25	35.271.500	77,5	38.798.650	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	40.184.800	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	13.000.000	100	12.000.000	100	17.000.000	100	22.000.000	100	27.000.000	Kecamatan Cigedug

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	100	56.367.850	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	90	91	92	49.980.000	93	78.000.000	94	78.000.000	95	78.000.000	96	78.000.000	Kecamatan Cikajang
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	60.253.500	100	66.000.000	100	69.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Kecamatan Cikelet
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	21.252.576	100	43.743.419	100	46.805.458	100	50.304.931	100	54.832.375	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	37.768.000	100	37.000.000	100	38.000.000	100	39.000.000	100	40.000.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	11.608.000	100	41.042.400	100	41.042.400	100	41.042.400	100	41.042.400	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	90	90	91	14.255.957.600	92	14.255.957.600	93	14.255.957.600	94	14.255.957.600	95	14.255.957.600	Kecamatan Garut Kota

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	40.000.000	100	25.606.600	100	25.606.600	100	25.606.600	100	25.606.600	Kecamatan Kadungora
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Karangtengah
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	90	91	91,5	5.104.978.800	92	5.650.890.000	92,5	5.711.784.500	93	5.775.723.725	93,5	5.842.859.911	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	20.300.000	100	20.600.000	100	20.900.000	100	21.200.000	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	34.158.320	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Kecamatan Leles
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	28.000.000	100	37.000.000	100	40.700.000	100	44.770.000	100	49.247.000	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	92,97	95	95,45	25.000.000	95,9	26.250.000	96,5	27.562.500	96,9	28.940.625	97	30.387.656	Kecamatan Malangbong
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	15.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Mekarmukti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	72.050.000	100	80.500.000	Kecamatan Pakenjeng
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	0	95,01	95,96	10.000.000	96,92	9.172.800	97,89	9.631.440	98,87	10.113.012	99,86	10.618.663	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	80	81	82	20.080.500	83	40.000.000	84	40.000.000	85	40.000.000	86	40.000.000	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	34.538.000	100	54.538.000	100	54.538.000	100	54.538.000	100	54.538.000	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	70.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Kecamatan Pasirwangi
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	82.000.000	100	90.200.000	100	99.220.000	100	109.142.000	100	120.056.200	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Samarang
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.243.500	Kecamatan Selaawi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	56.375.000	100	50.000.000	100	65.000.000	100	60.000.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	91	91	91,1	20.000.000	91,2	20.000.000	91,3	20.000.000	91,4	20.000.000	91,5	20.000.000	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	49.999.900	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	82,68	83,01	83,25	20.000.000	83,35	25.000.000	83,55	25.000.000	83,72	25.000.000	83,95	25.000.000	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	18.366.600	100	20.000.000	100	22.500.000	100	24.500.000	100	27.500.000	Kecamatan Talegong
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	1.395.528.536	100	1.567.832.462	100	1.697.171.929	100	1.681.795.824	100	2.039.054.682	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	6.634.811.720	100	6.634.811.720	100	7.302.840.000	100	8.033.124.000	100	8.836.436.400	Kecamatan Tarogong Kidul
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Presentase masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan (%)	100	100	100	20.000.000	100	24.250.000	100	24.250.000	100	25.250.000	100	25.250.000	Kecamatan Wanaraja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.344.661.084		6.197.723.691		6.051.256.982		6.803.881.258		6.659.175.854	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	90	92	94	39.778.300	95	33.000.000	96	33.000.000	98	33.000.000	100	33.000.000	Kecamatan Banyuresmi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	93,89	93,9	93,91	65.800.000	93,92	141.800.000	93,93	66.800.000	93,94	148.480.000	93,95	73.480.000	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	84,25	84,35	84,45	127.340.200	84,55	358.980.000	84,65	398.188.000	84,75	439.626.800	84,85	483.519.480	Kecamatan Bungbulang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	99,99	100	100	113.997.900	100	103.019.280	100	110.230.630	100	119.049.080	100	129.763.497	Kecamatan Balubur Limbangan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	115.219.400	100	201.741.340	100	139.415.474	100	228.357.021	100	168.692.724	Kecamatan Caringin
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	99.123.500	100	177.870.121	100	195.657.133	100	215.222.846	100	236.745.131	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	91,47	91,5	91,75	91.180.000	92	77.000.000	92,25	84.700.000	92,5	93.170.000	92,75	102.487.000	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	34.000.000	100	170.200.000	100	170.200.000	100	170.200.000	100	170.200.000	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	35.000.000	100	102.000.000	100	38.000.000	100	122.000.000	100	48.000.000	Kecamatan Cigedug

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	53.000.000	100	160.910.000	100	169.501.000	100	178.951.100	100	189.346.180	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	90	91	92	118.378.900	93	130.800.000	94	130.800.000	95	130.800.000	96	130.800.000	Kecamatan Cikajang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	128.178.900	100	162.000.000	100	179.000.000	100	196.000.000	100	213.000.000	Kecamatan Cikelet
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	81.085.654	100	165.531.353	100	177.118.548	100	190.361.056	100	207.493.551	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	131.800.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	98.031.800	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	22.544.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	80	80	81	79.873.900	82	80.390.800	83	81.500.000	84	82.500.000	85	83.500.000	Kecamatan Garut Kota
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	65.919.200	100	149.486.000	100	149.486.000	100	149.486.000	100	149.486.000	Kecamatan Kadungora
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	72.000.000	Kecamatan Karangtengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	90	91	91,5	53.000.000	92	111.300.000	92,5	116.865.000	93	122.708.250	93,5	128.843.663	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	78.892.400	100	80.077.400	100	81.262.400	100	82.447.400	100	83.632.400	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	100.800.000	100	170.200.000	100	170.200.000	100	170.200.000	100	170.200.000	Kecamatan Leles
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	144.762.330	100	251.081.050	100	192.016.000	100	294.279.355	100	231.116.820	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	82.000.000	100	86.100.000	100	90.405.000	100	94.925.250	100	99.671.513	Kecamatan Malangbong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	170.400.000	100	229.000.000	100	229.000.000	100	229.000.000	100	229.000.000	Kecamatan Mekarmukti
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	125.000.000	100	292.090.000	100	319.799.000	100	349.800.000	100	383.700.000	Kecamatan Pakenjeng
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	0	89,53	90,43	112.196.500	91,33	209.445.747	92,25	136.054.277	93,17	226.720.748	94,1	149.999.841	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	80	81	82	115.970.400	83	35.000.000	84	35.000.000	85	35.000.000	86	35.000.000	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	93.335.000	100	137.000.000	100	87.000.000	100	137.000.000	100	87.000.000	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	82,42	82,92	83,42	91.000.000	83,92	110.000.000	84,42	110.000.000	84,92	110.000.000	85,42	110.000.000	Kecamatan Pasirwangi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	366.025.000	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	195.800.000	100	200.000.000	100	208.000.000	100	215.000.000	100	223.000.000	Kecamatan Samarang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	100	161.051.000	100	177.156.100	Kecamatan Selaawi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	100	157.600.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	79,18	79,18	79,5	15.000.000	80	15.000.000	80,2	15.000.000	80,4	15.000.000	80,6	15.000.000	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	78.999.700	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	82,68	83,01	83,25	188.800.000	83,35	202.000.000	83,55	202.000.000	83,72	202.000.000	83,95	202.000.000	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	89.394.900	100	124.021.400	100	149.021.400	100	89.021.400	100	149.021.400	Kecamatan Talegong
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	176.792.000	100	250.471.200	100	213.918.320	100	298.030.152	100	237.663.254	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	99.400.000	100	99.400.000	100	135.350.000	100	148.885.000	100	163.773.500	Kecamatan Tarogong Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Trantibumlinmas (%)	100	100	100	74.666.200	100	101.508.000	100	111.658.800	100	111.658.800	100	111.658.800	Kecamatan Wanaraja
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					6.731.038.498		7.764.980.535		8.157.706.500		8.497.090.526		8.876.528.877	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	0	80	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	90	91	92	192.158.100	94	194.000.000	96	196.000.000	98	197.500.000	100	200.000.000	Kecamatan Banyuresmi
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	93,48	93,49	94,5	230.000.000	94,51	230.000.000	94,52	230.000.000	94,53	253.000.000	94,54	253.000.000	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	85,1	85,1	85,25	268.817.200	85,35	268.000.000	85,45	293.300.000	85,55	321.130.000	85,65	351.743.000	Kecamatan Bungbulang
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	98,86	100	100	231.380.100	100	260.654.806	100	278.900.642	100	301.212.694	100	328.321.836	Kecamatan Balubur Limbangan
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	99,99	100	100	126.518.900	100	172.170.900	100	189.387.990	100	208.326.789	100	229.159.468	Kecamatan Caringin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	133.958.400	100	163.351.150	100	179.686.264	100	197.654.891	100	217.420.380	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	80,98	81	81,25	250.646.000	81,5	275.710.600	81,75	303.281.660	82	333.609.826	82,25	366.970.809	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	129.999.600	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	65.404.600	100	70.404.600	100	75.404.600	100	80.404.600	100	85.404.600	Kecamatan Cigedug
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	130.000.000	100	148.400.000	100	153.240.000	100	158.564.000	100	164.420.400	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	80	82	82,25	199.975.200	83	230.000.000	83,5	230.000.000	84	230.000.000	85	230.000.000	Kecamatan Cikajang
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	248.850.600	100	248.000.000	100	262.000.000	100	276.000.000	100	290.000.000	Kecamatan Cikelet

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	232.732.788	100	224.719.775	100	262.634.470	100	258.427.742	100	305.867.136	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	229.999.690	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	121.336.500	100	210.000.000	100	215.000.000	100	220.000.000	100	225.000.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	230.135.000	100	231.642.400	100	231.642.400	100	231.642.400	100	231.642.400	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	191.393.200	100	192.393.200	100	193.393.200	100	194.374.200	100	195.624.200	Kecamatan Garut Kota
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	100	235.000.000	Kecamatan Kadungora
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Karangtengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	80	81	81,5	170.000.000	82	222.000.000	82,5	233.100.000	83	244.755.000	83,5	256.992.750	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	55.000.000	100	55.825.000	100	56.650.000	100	57.475.000	100	58.300.000	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	235.830.200	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Kecamatan Leles
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	99,59	100	100	130.002.000	100	190.300.000	100	276.230.000	100	283.853.000	100	291.923.000	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	190.000.000	100	199.500.000	100	209.475.000	100	219.948.750	100	230.946.188	Kecamatan Malangbong
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	25.000.000	100	151.250.000	100	166.375.000	100	182.435.000	100	201.300.000	Kecamatan Mekarmukti
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	30.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	Kecamatan Pakenjeng

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	0	91,32	92,24	243.802.300	93,16	253.233.556	94,09	265.895.234	95,03	279.189.995	95,98	293.149.495	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	80	81	82	130.000.000	83	130.000.000	84	130.000.000	85	130.000.000	86	130.000.000	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	30.702.240	100	60.702.240	100	60.702.240	100	60.702.240	100	60.702.240	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	82	82,5	83	130.000.000	83,5	70.000.000	84	72.000.000	84,5	72.000.000	85	72.000.000	Kecamatan Pasirwangi
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	318.880.980	100	313.500.000	100	344.850.000	100	379.335.000	100	417.268.500	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	196.791.700	100	236.750.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	280.000.000	Kecamatan Samarang
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000	100	59.895.000	100	65.884.500	Kecamatan Selaawi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	95	100	100	205.000.000	100	280.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	79,18	79,18	79,5	130.000.000	80	130.000.000	80,2	130.000.000	80,4	130.000.000	80,6	130.000.000	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	82,68	83,01	83,25	230.000.000	83,35	235.000.000	83,55	240.000.000	83,72	245.000.000	83,95	250.000.000	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	80.032.900	100	82.500.000	100	84.500.000	100	87.500.000	100	90.500.000	Kecamatan Talegong
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	156.750.000	100	180.532.008	100	189.667.500	100	217.714.099	100	229.497.675	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	230.000.000	100	230.000.000	100	255.000.000	100	280.500.000	100	308.550.000	Kecamatan Tarogong Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat (%)	100	100	100	129.940.300	100	129.940.300	100	129.940.300	100	129.940.300	100	129.940.300	Kecamatan Wanaraja
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.912.286.552		4.353.462.097		3.755.067.876		4.735.068.364		4.355.366.753	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	80	80	100	64.999.540	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Kecamatan Banjarwangi
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	95	95,5	96	63.000.800	96,5	90.500.000	97	61.000.000	97,5	111.500.000	100	62.000.000	Kecamatan Banyuresmi
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	88	88,01	88,02	65.000.000	88,03	98.700.000	88,04	65.000.000	88,05	101.400.000	88,06	71.500.000	Kecamatan Bayongbong
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	83,15	83,25	83,35	175.978.300	83,5	108.500.000	83,65	96.650.000	83,75	107.515.000	83,85	119.166.500	Kecamatan Bungbulang
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	53,51	77,51	77,71	40.088.600	100	64.113.450	100	36.501.392	100	69.421.503	100	42.969.438	Kecamatan Balubur Limbangan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	66.958.400	100	98.654.240	100	81.019.664	100	116.621.630	100	98.033.793	Kecamatan Caringin
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.704.800	100	88.666.501	100	97.533.151	100	107.286.466	100	118.015.113	Kecamatan Cibalong
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	97,37	97,4	97,45	49.900.000	97,5	69.890.000	97,55	60.379.000	97,6	66.416.900	97,65	73.058.590	Kecamatan Cibatu
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	71.497.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Cibiuk
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	85.140.500	100	125.140.500	100	115.140.500	100	130.140.500	100	145.140.500	Kecamatan Cigedug
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	145.200.000	100	159.720.000	100	175.692.000	100	193.261.350	Kecamatan Cihurip
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	87	88	89	53.347.250	90	110.000.000	91	85.000.000	92	85.000.000	94	85.000.000	Kecamatan Cikajang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	64.919.500	100	43.200.000	100	49.200.000	100	55.200.000	100	61.200.000	Kecamatan Cikelet
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	67.598.750	100	101.654.675	100	76.670.502	100	114.802.876	100	89.819.135	Kecamatan Cilawu
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	60.120.372	100	102.000.000	100	62.000.000	100	82.000.000	100	62.000.000	Kecamatan Cisewu
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	29.808.400	100	48.000.000	100	49.500.000	100	51.000.000	100	52.500.000	Kecamatan Cisompet
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	47.357.600	100	94.303.700	100	64.303.700	100	164.303.700	100	64.303.700	Kecamatan Cisurupan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Kelurahan Berkinerja Baik (%)	100	100	100	55.127.100	100	55.127.100	100	55.127.100	100	55.127.100	100	55.127.100	Kecamatan Garut Kota
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	54.979.600	100	54.979.600	100	54.979.600	100	54.979.600	100	54.979.600	Kecamatan Kadungora
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	84.419.620	100	84.419.620	100	65.000.000	100	65.000.000	Kecamatan Karangtengah
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	90	91	91,5	97.746.800	92	110.598.000	92,5	116.127.900	93	121.934.295	93,5	128.031.010	Kecamatan Karangpawitan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	85.043.300	100	121.131.100	100	87.405.700	100	88.679.700	100	89.953.700	Kecamatan Kersamanah
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	55.999.600	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Leles
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	99,59	100	100	35.000.000	100	77.000.000	100	84.700.000	100	293.170.000	100	102.487.000	Kecamatan Leuwigoong
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	88.250.000	100	71.662.500	100	95.245.625	100	100.007.906	Kecamatan Malangbong
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	70.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	Kecamatan Mekarmukti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	198.800.000	100	195.480.000	100	218.005.000	100	241.825.500	Kecamatan Pakenjeng
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	0	93,15	94,08	53.414.500	95,02	67.343.246	95,97	59.947.032	96,93	73.707.760	97,9	66.091.603	Kecamatan Pameungpeuk
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	80	81	82	65.254.500	83	65.000.000	84	65.000.000	85	115.000.000	86	85.000.000	Kecamatan Pamulihan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	57.285.000	100	71.300.200	100	71.300.200	100	121.300.200	100	71.300.200	Kecamatan Pangatikan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	82,42	82,92	83,42	65.000.000	83,92	260.000.000	84,42	60.000.000	84,92	60.000.000	85,42	90.000.000	Kecamatan Pasirwangi
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	185.000.000	100	219.500.000	100	211.250.000	100	252.995.000	100	243.012.500	Kecamatan Peundeuy
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	0	0	0	0	0	64.888.600	0	64.888.600	0	64.888.600	0	64.888.600	Kecamatan Samarang
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	71.500.000	100	78.650.000	100	86.515.000	100	95.166.500	Kecamatan Selaawi
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	99	100	100	65.000.000	100	144.271.875	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	Kecamatan Singajaya
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	79,18	79,18	79,5	65.000.000	80	65.000.000	80,2	65.000.000	80,4	65.000.000	80,6	65.000.000	Kecamatan Sucinaraja
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	64.999.500	100	90.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Kecamatan Sukaresmi
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	82,68	83,01	83,25	65.000.000	83,35	115.000.000	83,55	65.000.000	83,72	115.000.000	83,95	65.000.000	Kecamatan Sukawening
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	68.976.700	100	87.977.200	100	95.477.200	100	101.552.200	100	239.570.000	Kecamatan Talegong
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	197.040.140	100	317.852.490	100	238.418.569	100	375.501.763	100	288.486.469	Kecamatan Tarogong Kaler
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.500.000	100	83.050.000	100	91.355.000	Kecamatan Tarogong Kidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa yang akuntabel	Presentase Desa Berkinerja Baik (%)	100	100	100	45.000.000	100	65.000.000	100	60.115.946	100	80.115.946	100	80.115.946	Kecamatan Wanaraja
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					28.876.558.100		29.893.758.100		69.893.758.100		103.893.758.100		28.893.758.100	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.854.373.540		6.871.573.540		5.871.573.540		5.871.573.540		5.871.573.540	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	70,78	77,98	78,28	5.854.373.540	78,68	6.871.573.540	79,18	5.871.573.540	79,78	5.871.573.540	80,38	5.871.573.540	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.378.772.400		1.378.772.400		1.378.772.400		1.378.772.400		1.378.772.400	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	68	71	1.378.772.400	74	1.378.772.400	77	1.378.772.400	80	1.378.772.400	83	1.378.772.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					7.413.180.000		7.413.180.000		47.413.180.000		67.413.180.000		7.413.180.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	80	82	7.413.180.000	84	7.413.180.000	86	47.413.180.000	88	67.413.180.000	90	7.413.180.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.311.431.420		3.311.431.420		3.311.431.420		3.311.431.420		3.311.431.420	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	86,81	81	82	3.311.431.420	83	3.311.431.420	84	3.311.431.420	85	3.311.431.420	86	3.311.431.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.068.702.140		1.068.702.140		1.068.702.140		1.068.702.140		1.068.702.140	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	70	73	1.068.702.140	76	1.068.702.140	79	1.068.702.140	82	1.068.702.140	85	1.068.702.140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					9.850.098.600		9.850.098.600		10.850.098.600		24.850.098.600		9.850.098.600	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	-	85	87	9.850.098.600	89	9.850.098.600	91	10.850.098.600	92	24.850.098.600	93	9.850.098.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					6.753.200.402.446		7.054.028.992.540		7.550.710.094.638		8.002.184.360.068		8.339.846.414.951	

Sumber: Bappeda, Tahun 2025, diolah dalam SIPD

a. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bukan sekadar target kinerja, melainkan merupakan hak dasar warga negara dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhinya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan publik yang mendasar. Penerapan SPM di Kabupaten Garut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (PP 2/2018), serta peraturan pelaksanaannya di tingkat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait. PP 2/2018 ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan, pencapaian, pemantauan, dan evaluasi SPM secara nasional, menekankan pada prinsip kepastian, keadilan, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

Jenis Pelayanan Dasar yang tercakup dalam SPM meliputi 29 (dua puluh sembilan) layanan dasar yang dikelompokkan ke dalam enam bidang utama, yaitu Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (terutama penyediaan air minum dan sanitasi layak); Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial (meliputi layanan terhadap Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus). Pemenuhan SPM di bidang-bidang tersebut merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keadilan sosial. Dalam periode RPJMD 2025-2029, upaya pencapaian dan peningkatan kualitas seluruh jenis SPM ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan dan acuan utama dalam penyusunan program dan alokasi sumber daya, guna memastikan setiap warga Kabupaten Garut memperoleh pelayanan dasar yang memadai, terjangkau, dan bermutu sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel 4.2 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
SPM BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
SPM BIDANG KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
					Kesehatan Masyarakat
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
SPM BIDANG SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana

Sumber: Permendagri No 59 Tahun 2021, data diolah 2025.

b. Rencana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Garut memetakan dukungan program daerah terhadap pencapaian target yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Dukungan Program Daerah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
1	Isu 1 : Perlunya Pemerataan	11. Menjadikan Kota	Program pengembangan perumahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
	Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Sesuai Dengan DDDTLH	dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Program kawasan permukiman Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
			Program penanganan bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program penanganan kerawanan pangan Program pengawasan keamanan pangan	Perangkat daerah pengampu Urusan Pangan
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	Isu 2 : Kerentanan Perubahan Iklim, Rawan Bencana dan Pemulihan DAS	11.Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Program penanganan bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program penanganan kerawanan pangan Program pengawasan keamanan pangan	Perangkat daerah pengampu Urusan Pangan
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Program Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
			Program Penanganan Bencana	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
			Program pengembangan perumahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Isu 3 : Belum Optimalnya Pengeloaan Air Minum dan Sanitasi Yang Layak, Aman dan Berkelanjutan	6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Perencanaan lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program redistribusi tanah, dan ganti rugi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Perencanaan lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program pengelolaan persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
4	Isu 4 : Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Milik Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Program Pengembangan iklim penanaman modal Program Promosi penanaman modal Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
			Program Penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengambangan
			Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan sumber daya manusia	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja Penempatan tenaga kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
			Program Pengembangan UMKM Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Pemasaran Pariwisata Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan kesenian tradisional Program Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Pengelolaan museum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
		9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Pengembangan iklim penanaman modal Program promosi penanaman modal Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
			Program Perencanaan lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengambangan
			Perencanaan dan pembangunan industri	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
			Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
			Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Sekretariat Daerah

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Perencanaan
5	Isu 5 : Belum Optimalnya Penguatan SDM Berdaya Saing, Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Program Pengembangan sumber daya manusia	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan sumber daya manusia Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unsur Kewilayahan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan pengembangan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Daya saing Keolahragaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program Daya saing Keolahragaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Unsur Kewilayahan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
6	Isu 6 : Belum Optimalnya Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas	1.Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perencanaan lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program pengelolaan persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs	Dukungan Program Daerah	Perangkat Daerah
7	Isu 7 : Belum Optimalnya Tata Kelola Dan Kerjasama Dengan Wilayah Berbatasan	16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program pengelolaan aplikasi informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Perencanaan
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Unsur Kewilayahan
		17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Program pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan barang milik daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
			Program penelitian dan pengembangan daerah Program riset dan inovasi daerah	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, diolah Bappeda 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan

daerah. Penentuan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJMD ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator tersebut merupakan indikator yang terseleksi, sedangkan penentuan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan IKU dan IKD periode 2025-2030, IKU dan IKD tersebut berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dengan catatan tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

a. Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah merupakan ukuran kinerja utama yang mencerminkan capaian pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Garut. Indikator ini menjadi acuan dalam menyusun dan mengarahkan berbagai program pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029 agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Indikator makro pembangunan dijadikan dasar dalam menetapkan arah kebijakan serta sebagai alat untuk memantau efektivitas intervensi pembangunan lintas sektor dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia di Kabupaten Garut. Indikator ini penting untuk memantau dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara agregat. Selengkapnya terkait dengan target tiap indikator makro yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026*	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,91	70,57	71,35	72,13	72,9	73,68	74,39
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20 - 9,06	8,55	7,65 - 8,36	7,32 - 8,03	6,94 - 7,64	6,42 - 7,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,96	6,48 - 7,19	6,34	6,33 - 6,92	6,3 - 6,89	6,28 - 6,87	6,24 - 6,83
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5,06	5,54	5,16- 7,41	5,29- 7,56	5,42 - 7,88	5,95 - 6,45
5	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah/ Kapita	29,01	30,49- 31,68	32,94	31,56- 33,31	33,06 - 35,86	34,59 - 38,74	36,1 - 42,31
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,324	0,355- 0,362	0,324	0,344 - 0,367	0,343 - 0,366	0,341 - 0,364	0,34 - 0,363
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/ Milyar Rp	-	4,76	5,07	5,41	5,85	6,30	6,65
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	62,37	68,12	68,37	68,62	68,88	69,13	69,38
9	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,78	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72

Sumber: Bappeda, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

*Keterangan : *Sesuai hasil Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2025 (Nomor 3150/BP.01/PPEPD)*

Secara keseluruhan, terdapat sembilan indikator makro yang menjadi perhatian utama, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, Gini Ratio, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota. Target-target indikator tersebut ditetapkan secara realistis dan progresif, menyesuaikan dengan capaian tahun 2024 sebagai baseline serta memperhatikan tren pertumbuhan, kapasitas fiskal, dan potensi daerah.

Dari sisi pembangunan manusia, IPM ditargetkan meningkat dari 69,91 pada tahun 2024 menjadi 73,68 pada tahun 2029 dan 74,39 pada tahun 2030. Capaian ini akan didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun signifikan dari 9,68% menjadi 6,42–7,11% pada akhir periode, sebagai hasil dari intervensi terpadu pada program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. TPT juga ditargetkan menurun hingga kisaran 6,2 –6,83% dengan penguatan sektor ekonomi produktif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi diupayakan tumbuh secara konsisten hingga mencapai kisaran 5,95–6,45% pada tahun 2030, dengan peningkatan PDRB per kapita dari Rp29,01 juta/kapita pada tahun 2024 menjadi Rp36,1–42,31 juta/kapita pada tahun 2030. Sementara itu, ketimpangan pendapatan tetap dijaga pada kisaran

Gini Ratio 0,34–0,363, melalui pemerataan pembangunan antar wilayah dan peningkatan akses layanan dasar. Dalam hal pembangunan berkelanjutan, target penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan IKLH menjadi bagian penting untuk menjamin kelestarian lingkungan, dengan target IKLH mencapai 69,38 poin di tahun 2030. Selain itu, kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (terhadap PDRB Provinsi) ditargetkan berada di angka 2,72% sampai dengan tahun 2030.

Dengan penetapan indikator makro tersebut, arah pembangunan Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan diharapkan dapat lebih fokus dan terukur. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun program yang selaras dengan pencapaian indikator makro ini, dengan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang secara langsung mencerminkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang diperoleh dari tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD. Indikator ini menjadi alat utama untuk mengukur kinerja kepala daerah selama masa jabatan, dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya serta disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi. IKU ini mencerminkan ketercapaian berbagai aspek pembangunan lintas sektor. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan baseline tahun 2024, tren capaian sebelumnya, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga indikator yang dipilih mampu mewakili performa kinerja kepala daerah secara menyeluruh.

Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Garut
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	7,88	7,91	7,94	7,97	8	8,03
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	12,19	12,21	12,23	12,25	12,27	12,29
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan*	Angka	55,5 (2023)	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,87	75,04	75,24	75,43	75,62	75,82	76,01
5	Prevalensi *Stunting***	%	14,2	13,35	12,8	12,1	11,4	10,7	9,9
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,409	0,413	0,418	0,423	0,427	0,432	0,437
8	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan	%	1,14	3,85	4,54	5,29	6,25	6,81	6,81
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,44	9,42	9,49	9,58	9,68	9,78	9,79
10	Rasio PDRB Perdagangan	%	18,42	20,2	20,16	20,12	20,08	20,04	20,00
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,3	4,78	4,98	5,22	5,47	5,75	5,2
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	25,27	25,46	25,5	25,54	25,58	25,62	25,67
13	Tingkat Pengangguran Terbuka***	%	6,96	6,48 - 7,19	6,34	6,33 - 6,92	6,3 - 6,89	6,28 - 6,87	6,24 - 6,83
14	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,99	79,59	80,19	80,80	81,40	82,00	82,60
15	Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8,20 - 9,06	8,55	7,65 - 8,36	7,32 - 8,03	6,94 - 7,64	6,42 - 7,11
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88	89	90	91	92	93
17	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	10,83	14,88	15.56	15.57	15.77	16.02	16.23
18	Indeks Kualitas Infrastruktur****	Poin	51,75	60,2	61,32	62,44	63,53	64,56	66,19
19	Persentase Desa Mandiri	%	38	38,72	39,9	40,86	41,81	43,04	44,42
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,37	68,12	68,37	68,62	68,88	69,13	69,38
21	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132	131	130	129	128
22	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	84,49	85,04	85,87	86,14	86,69	87,24	87,79

Sumber: Bappeda, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.
Keterangan :

** Data kondisi 2024 dan Target 2025-2030 menggunakan data dan target Provinsi Jawa Barat (Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Pembangunan Olahraga)*
***Target prevalensi stunting berbeda dengan target pada RPJPD Kab Garut 2025-2045 sehubungan adanya update angka kondisi Kab Garut tahun 2024 sebagai baseline menjadi 14,2%*
****Target TPT 2026 sesuai hasil Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2025 (Nomor 3150/BP.01/PPEPD), target Tahun 2027-2030 menggunakan target RPJPD Tahun 2025-2045*
*****Perhitungan Angka baseline Tahun 2024 belum memperhitungkan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur, dikarenakan ketidaktersediaan data*

Sebanyak 22 indikator ditetapkan sebagai IKU dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025–2029. Indikator-indikator tersebut meliputi dimensi pembangunan manusia seperti Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, serta Indeks Pembangunan Gender. Dalam bidang ekonomi, indikator seperti Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan,

Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman, serta Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi fokus utama. Adapun indikator lainnya menyasar aspek tata kelola pemerintahan (Indeks Reformasi Birokrasi), penguatan keuangan daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan), pembangunan wilayah (Persentase Desa Mandiri, Indeks Kualitas Infrastruktur), hingga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial (IKLH, Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Kesalehan Sosial).

Secara umum, target yang ditetapkan bersifat realistis dan progresif. Misalnya, IPG yang meningkat dari 83,5 menjadi 84,1, menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam kesetaraan gender. Target penurunan Prevalensi Stunting dari 14,2% menjadi 9,99% di tahun 2030 mengindikasikan fokus besar pada pembangunan kesehatan anak dan keluarga. Dari sisi ekonomi, Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun hingga kisaran 6,42 – 7,11%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka ditekan pada angka 6,24 – 6,83%. Untuk pembangunan infrastruktur, Indeks Kualitas Infrastruktur ditingkatkan dari 60,2 menjadi 66,19 poin. Sementara itu, indikator baru seperti Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Kesalehan Sosial menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Garut mengarah pada keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual masyarakat.

IKU juga menjadi fondasi dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, karena setiap perangkat daerah dituntut untuk mengidentifikasi keterkaitan antara mandat tugas pokok dan fungsi dengan kontribusi terhadap pencapaian IKU. Dengan adanya keterpaduan antara target makro dan capaian mikro di level perangkat daerah, maka konsistensi dan efektivitas pembangunan dapat dijaga sepanjang periode perencanaan. Seluruh target IKU menjadi alat bantu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut.

c. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur penting yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025–2029, IKD menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan hasil, guna memastikan bahwa setiap perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKD disusun berdasarkan empat aspek utama yang mencerminkan kondisi dan kapasitas daerah, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	78,99	79,59	80,19	80,8	81,4	82	82,6	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,02	4,85	4,67	4,46	4,22	3,95	3,59	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,37	68,12	68,37	68,62	68,88	69,13	69,38	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	45,7	54,68	64,97	85,03	94,29	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	39,48	44,74	50,7	57,46	65,12	68,73	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,75	133	132	131	130	129	128	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,33	1,3	0,83	0,82	0,8	0,79	0,78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/ Milyar Rp	-	4,76	5,07	5,41	5,85	6,3	6,65	
10	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	-	643.797,58	706.305,04	772.877,45	849.927,53	939.414,70	1.036.818,21	
11	Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	4,16	5,04	5,95	6,87	7,81	8,76	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	-	31	34,49	37,94	41,39	44,83	48,28	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	-	5,94	11,32	16,69	22,07	27,44	32,82	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5.06-5.06	4.92-6.14	5.16-7.41	5.29-7.56	5.42-7.88	5.95-6.45	
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,68	8.20-9.06	8.01-8.72	7.65-8.36	7.32-8.03	6.94-7.64	6.42-7.11	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,96	6.48-7.19	6.11-6.45	6.33-6.92	6.3-6.89	6.28-6.87	6.24-6.83	
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,91	70,57	71,35	72,13	72,9	73,68	74,39	
5	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	29,01	30.49-31.68	31.97-32.34	31.56-33.31	33.06-35.86	34.59-38.74	36.1-42.31	
6	Indeks Gini	Poin	0,324	0.355-0.362	0.343-0.375	0.344-0.367	0.343-0.366	0.341-0.364	0.34-0.363	
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	7,88	7,91	7,94	7,97	8	8,03	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	12,19	12,21	12,23	12,25	12,27	12,29	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,5 (2023)	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,87	75,04	75,24	75,43	75,62	75,82	76,01	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
11	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,2	13,35	12,8	12,1	11,4	10,7	9,9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
12	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	Jumlah Kasus	50	48	45	42	40	38	36	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
13	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,404	0,42	0,435	0,45	0,465	0,48	0,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	76,68	90	90	90	90	90	90	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	81,62	90	90	90	90	90	90	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
16	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	84,49	85,04	85,87	86,14	86,69	87,24	87,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Unsur Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	-	62,51	63,94	65,41	66,92	68,46	70,03	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
18	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	Unsur Sekretariat Daerah
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Literasi - SD	%	72,42	72,74	73,06	73,38	73,7	74,02	74,34	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
20	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Literasi - SMP	%	74,03	74,67	75,31	75,95	76,59	77,23	77,87	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
21	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Literasi - SD Kesetaraan	%	56,25	58,05	59,85	61,65	63,45	65,25	67,05	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
22	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Literasi - SMP Kesetaraan	%	33,96	35,36	36,76	38,16	39,56	40,96	42,36	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
23	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Numerasi - SD	%	74,81	75,38	75,95	76,52	77,09	77,66	78,23	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
24	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Numerasi - SMP	%	71,84	72,59	73,34	74,09	74,84	75,59	76,34	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
25	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Numerasi -SD Kesetaraan	%	59,38	60,58	61,78	62,98	64,18	65,38	66,58	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
26	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indeks Numerasi - SMP Kesetaraan	%	37,25	38,75	40,25	41,75	43,25	44,75	46,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
27	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,533	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	83,2	84,87	86,54	88,21	89,88	91,35	93,22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	59,41	60,03	61,05	61,52	61,62	62,01	62,52	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	58,6	60,1	61,4	62,7	64	65,2	66,3	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,059	0,35	0,37	0,39	0,41	0,47	0,49	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
33	Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten	Jiwa	54.297	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
34	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	56,77	60,15	62	64	66	68	70	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
35	Indeks Kesejahteraan Sosial**	Poin	56,88	57,38	57,90	58,50	59,00	59,70	60,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	46,96	47,11	47,34	47,65	48,01	48,36	48,66	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,44	9,42	9,49	9,58	9,68	9,78	9,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,3	4,78	4,98	5,22	5,47	5,75	5,2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
4	Rasio Kontribusi Koperasi terhadap PDRB	%	0,01	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,64	3,7	3,77	3,84	3,92	4	4,08	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,215	0,41	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota	%	2,78	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	25,27	25,46	25,5	25,54	25,58	25,62	25,67	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	38,73	39,67	40,61	41,55	42,49	46,08	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Indeks Kota Kreatif	Poin	86,88	87	88	89	91	91,5	92	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Ribu Orang	3.301,36	3.360	3.444	3.530	3.618	3.708	3.800	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
12	Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,16	52,66	53,16	53,66	54,16	54,66	55,16	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Perencanaan
13	Tingkat Inflasi	%	1,94	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5	Unsur Sekretariat Daerah
14	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	3,42	3,51	3,55	3,6	3,64	3,68	3,71	Unsur Sekretariat Daerah
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	56,48	56,63	56,79	57,8	59,12	60,3	61,61	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,34	72,6	73,89	75,19	76,52	77,88	79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
17	Indeks Kualitas Infrastruktur*	Poin	51,75	60,2	61,32	62,44	63,53	64,56	66,19	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan
18	Persentase Desa Mandiri	%	38	38,72	39,9	40,86	41,81	43,04	44,42	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir	%	61,55	68,89	70,72	72,55	74,38	76,21	78,04	
20	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin	-	10,78	11,29	11,81	12,36	12,94	13,55	
21	Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi	Poin	33,66	35,17	36,78	38,5	40,56	42,77	45,11	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	86,53	88	89	90	91	92	93	Unsur Sekretariat Daerah
2	Indeks Pelayanan Publik.	Poin	4,56	4,57	4,58	4,59	4,6	4,61	4,62	Unsur Sekretariat Daerah
3	Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Unsur Sekretariat Daerah
4	Survei Penilaian Integritas	Indeks	69,07	69,1	69,14	69,17	69,21	69,24	69,28	Perangkat Daerah Unsur Pengawasan
5	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,66	88,4	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	Unsur Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Persentase Penegakan Perda	%	66	70	75	79	83	87	91	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,89	3,35	3,38	3,4	3,41	3,42	3,43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,8	3,41	3,44	3,46	3,48	3,51	3,53	
10	Indeks Toleransi	Poin	-	56,15	58	59	60	61	62	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	-	86,03	87,52	89,02	90,52	92,01	93,51	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	%	74,4	75,15	75,9	76,65	77,4	78,15	78,9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
2	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Poin	69,43	70,93	72,43	73,93	75,43	76,93	78,43	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
3	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Poin	77,65	78,55	79,45	80,35	81,25	82,15	83,05	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Skor kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,31	62,81	65,31	67,81	70,31	72,81	75,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
5	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,03	99,17	99,31	99,45	99,59	99,72	99,86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
6	Skor kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,27	59,17	62,07	64,97	67,87	70,77	73,67	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
7	Skor kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,71	63,21	64,71	66,21	67,71	69,21	70,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
8	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	94,17	95,01	95,84	96,67	97,5	98,34	99,17	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
9	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Poin	72,32	73,32	74,32	75,32	76,32	77,32	78,32	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
10	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Poin	55,57	57,97	60,37	62,77	65,17	67,57	66,97	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
11	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	38,85	43,82	48,8	53,78	58,76	63,73	68,71	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
12	Skor kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,35	69,45	70,55	71,65	72,75	73,85	74,95	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
13	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Poin	61,31	63,81	66,31	66,81	71,31	73,81	76,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
14	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	75,33	78,37	81,4	84,37	87,34	90,31	92,86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
15	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Poin	68,3	69,3	70,3	71,3	72,3	73,3	74,3	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
16	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	43,81	43,9	44,03	44,2	44,41	44,65	44,88	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Jumlah Kematian Balita	Angka	-	765	725	685	645	605	600	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
2	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	36	46	55	61	70	75	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
3	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	64,19	65	70	75	80	83,5	84	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	94,5	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
5	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
6	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
7	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	%	-	54	58	62	66	70	74	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	97,6	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
9	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95,5	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90,49	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
14	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89,31	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
15	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
16	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	76,61	77	78	79	79,5	80	81	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
17	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	-	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
18	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	75	77	79	81	83	84	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
19	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	-	68,7	70,2	71,7	72,7	83,7	83,7	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
20	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
21	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	91,07	80	85	90	93	95	95	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
22	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	1,36	15	20	25	35	50	50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
23	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	-	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
24	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
25	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	16,4	20	25	30	40	50	55	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
26	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	14,2	13,35	12,8	12,1	11,4	10,7	9,9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
27	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	-	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	8,4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
28	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	-	75	76	77	78	79	80	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	68,53	68,57	68,61	68,66	68,72	68,79	68,87	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF kabupaten/kota	%	-	90,91	91,67	92,31	92,86	93,33	93,75	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	36,46	39,4	52,07	64,75	77,42	90,09	94,84	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	68,63	70,59	73,05	75,97	79,1	82,62	86,54	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kabupaten/kota	%	84,73	85,25	85,9	86,55	87	87,55	88	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	62	63,96	67,1	70,43	73,69	76,86	80	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	90,74	90,85	90,9	90,95	91	91,05	91,1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	18	38	50	56	62	70	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	20	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	21,66	47,4	74,71	91,92	100	5	10	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0,12	0,54	3	5,47	7,93	10,4	12,86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	-	43,89	45,25	46,38	47,51	48,64	50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	7	8	11	14	17	20	23	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66	70	75	79	83	87	91	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	66,19	66,19	79,42	86,76	92,95	99,71	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	13,37	26,74	40,11	53,48	66,84	80,21	80,21	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,41	0,59	0,77	0,95	1,1	1,31	1,49	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	68,08	68,26	68,44	68,62	68,8	69,98	69,16	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
10	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
2	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	75	75	75	77	80	83	85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
3	Persentase pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	74,19	75	75	77	80	83	85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	77	77	77	77	80	83	85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	75	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
7	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
9	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	75	75	75	77	80	83	85	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
10	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
11	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	80	80	82	82	84	84	86	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	58,01	57	57,25	57,5	57,75	58	58,25	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada rencana tenaga kerja daerah	%	13,61	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
3	Persentase pencari kerja bersertifikat kompetensi	%	6,3	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	34,57	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00	36,50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	61,31	62,31	64,31	66,31	68,31	70,31	72,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	83,5	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,533	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	18	20	22	24	26	28	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	poin	91,54	91,94	92,35	92,75	93,15	93,55	93,96	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	poin	95,45	95,6	95,75	95,9	96,05	96,2	96,35	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,85	3,62	3,39	3,17	2,94	2,71	2,49	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	84,86	85,58	86,3	87,02	87,74	88,46	89,18	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	158	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
2	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	19,18	20	22	24	26	28	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
3	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	11,5	12	14	16	18	20	22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,37	68,12	68,37	68,62	68,88	69,13	69,38	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	44,3	45	50	52	52	58	58	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	17,41	25	27	29	31	33	35	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	62	62	64	66	68	70	72	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
8	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	85,83	87	89	91	93	95	97	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50,94	1,87	3,07	2,38	2,33	2,95	3,21	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0	15,20	17,58	19,95	22,33	24,70	27,08	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0	23,8	24,7	24,9	25,7	26,1	26,6	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	0	1,54	3,16	4,77	6,39	8,01	9,62	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	20	40	60	80	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	58,6	60,1	61,4	62,7	64	65,2	66,3	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	%	68,54	69,06	69,48	69,9	70,32	70,74	71,84	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	6,94	7,94	7,86	7,69	7,59	7,46	7,39	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 thn)	Kelahiran per- 1000 WUS 15-19 Tahun	26,9	23,8	21,5	19,8	18,5	17,6	16,9	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Poin	79,9	81,4	82,7	84	85,1	86,2	87,2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	36	36,4	36,7	37,1	37,4	37,8	38,1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
7	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	83,2	84,87	86,54	88,21	89,88	91,35	93,22	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	12,72	12,37	12,02	11,67	11,32	10,97	10,62	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Poin	51,1	52,12	54,67	57,22	59,77	62,32	64,87	
10	Indeks Lansia Berdaya	Poin	56,3	56,7	57	57,4	57,8	58,1	58,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,65	0,67	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	36,52	37,25	39,04	41,79	44,29	47,02	49,58	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	87,17	87,18	87,14	87,11	87,09	87,13	87,12	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Poin	-	90	90,5	91	91,5	92	92,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	7,04	7,74	8,52	9,37	10,31	11,34	12,47	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2	Pertumbuhan Wirausaha	%	36,71	37	38	38,5	39	39,5	40	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	23	26	29	30	30	30	30	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	157,47	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	76,39	18	19,5	20	20,5	21	21,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	60,3	60,78	61,27	61,75	62,24	62,72	63,21	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	Rasio Wirausaha Pemuda	%	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,95	4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	10,04	10,16	10,28	10,4	10,52	10,64	10,76	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
4	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
5	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	12,63	15,42	16,9	18,33	19,85	20,57	21,47	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
6	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	56,58	57,12	57,8	58,63	59,22	55,94	60,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	68	20	40	25	25	25	50	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
8	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,15	3,2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Indeks Keamanan Informasi	Poin	391	450	450	450	450	450	450	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	88,46	90,32	91,67	92,68	93,48	94,12	94,64	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
2	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan Yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	%	1,92	0,77	1,92	1,53	1,53	0,77	0,77	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
3	Persentase Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Didaftarkan	%	5,52	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,64	70	72	73	74	75	76	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Poin	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	76	76	76,38	76,68	76,97	77,2	77,55	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	98	98	98	98	98	98	98	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	4	4	4	4	4	4	4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	%	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	339,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	1	1	2	2	2	2	2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1	1	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
3	Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
4	Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	10	10	10	10	10	10	10	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Persentase Penanganan Wilayah Bencana Peternakan	%	0	69	70	71	72	74	75	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
7	Persentase Kejadian Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) pada Populasi Hewan	%	1,6	3	2,8	2,6	2,4	2,2	2	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
2	Nilai Ekspor Pelaku Usaha	USD	20.280.778	23.592.887	26.904.996	30.217.105	33.529.214	36.841.323	40.153.432	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	14,08	42	42	43	44	45	46	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	9,45	9,76	10,07	10,38	10,69	11	11,31	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Orang	309.412	322.085	334.758	347.431	360.104	372.777	385.450	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
3	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0,422	0,335	0,34	0,35	0,36	0,375	0,4	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
4	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	9,44	9,18	9,3	9,43	9,55	9,67	9,79	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	105	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
6	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil Rekomendasi Pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
7	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	17,65	11,61	12,5	14	15	16	17,5	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal ''Baik'' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan Pembinaan	%	80	82	85	87	90	95	100	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
BD	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	40	40	40	40	40	40	40	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Pengadaan
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20	20	22,5	23,33	24,17	25	25,83	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Pengadaan
3	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	26,83	28,58	28,7	28,85	29	29,5	30	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Pengadaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	94,76	94,85	94,9	94,95	95	95,05	95,1	Perangkat Daerah Pengampu Fungsi Koordinasi Pelayanan Publik
BE	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	Unsur Sekretariat DPRD
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	Unsur Sekretariat DPRD
BF	5.01 – PERENCANAAN									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	82,08	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Perencanaan
BG	5.02 – KEUANGAN									
1	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	2,96	27,5	28	28	28,5	29	30	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10,83	11,25	11,37	11,48	11,59	11,7	11,81	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95	95,5	96	96	96,5	96,5	97	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	34,74	38,08	36	30	30	30	30	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,64	0,8	1	1,5	1,8	2	2,5	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-19,17	18,92	18,64	18,33	17,99	17,62	17,22	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Keuangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
BH	5.03 – KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,6	75,06	77,18	79,3	81,42	83,54	85,66	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13,17	14,47	15,98	17,49	19	20,51	20,51	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,5	24,73	26,25	27,77	29,29	30,81	30,81	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
BI	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	85	86,7	88,43	90,2	92,01	93,85	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	50	23,2	24,5	25,8	27,1	28,4	30	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	76	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan
BJ	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3.290	3.390	3.490	3.590	3.690	3.790	3.890	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,15	3,225	3,3	3,5	3,525	3,55	3,75	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	73	76	77	79	82	85	88	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	poin	2,83	2,9	2,95	3	3,1	3,15	3,2	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
5	Indeks Manajemen Risiko	poin	3,144	3,145	3,146	3,147	3,148	3,149	3,15	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
6	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan
BK	7.01 – KECAMATAN									
1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	71	71	73,5	74	74,5	75	75,5	Kecamatan Banjarwangi
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	37,3	77,2	78,2	79,2	80,2	80,7	81,2	Kecamatan Banjarwangi
3	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	81,53	81,53	82	82,2	82,4	82,6	82,8	Kecamatan Banyuresmi
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	70,04	77,98	78,98	79,98	80,98	81,48	81,98	Kecamatan Banyuresmi
5	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,42	82,42	82,6	82,8	83	83,2	83,4	Kecamatan Bayongbong
6	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	78,56	78,56	79,56	80,56	81,56	82,06	82,56	Kecamatan Bayongbong
7	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	75,76	75,76	76	76,5	77	77,5	78	Kecamatan Balubur Limbangan
8	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	49,18	77,71	78,71	79,71	80,71	81,21	81,71	Kecamatan Balubur Limbangan
9	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	76,59	76,59	77	77,5	78	78,5	79	Kecamatan Bungbulang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	64,3	77,89	78,89	79,89	80,89	81,39	81,89	Kecamatan Bungbulang
11	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	76,39	76,39	77,8	78,3	78,8	79,3	79,8	Kecamatan Caringin
12	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	66,65	78,12	79,12	80,12	81,12	81,62	82,12	Kecamatan Caringin
13	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	79,73	79,73	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Cibalong
14	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	68,39	77,95	78,95	79,95	80,95	81,45	81,95	Kecamatan Cibalong
15	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	80,17	80,17	80,4	80,6	80,8	81	81,2	Kecamatan Cibatu
16	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	50,58	77,55	78,55	79,55	80,55	81,05	81,55	Kecamatan Cibatu
17	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	77,21	77,21	77,7	78,2	78,7	79,2	79,7	Kecamatan Cibiuk
18	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	49,81	77,37	78,37	79,37	80,37	80,87	81,37	Kecamatan Cibiuk
19	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	80,56	80,56	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	Kecamatan Cigedug
20	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	75,54	77,49	78,49	79,49	80,49	80,99	81,49	Kecamatan Cigedug
21	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,06	78,06	78,5	79,5	80	80,2	80,4	Kecamatan Cihurip
22	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	56,31	77,72	78,72	79,72	80,72	81,22	81,72	Kecamatan Cihurip
23	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	79,4	79,4	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Cikajang
24	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	79,51	79,51	80,51	81,51	82,51	83,01	83,51	Kecamatan Cikajang
25	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	74,98	74,98	75	75,5	76	76,5	77	Kecamatan Cikelet
26	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	41,98	77,32	78,32	79,32	80,32	80,82	81,32	Kecamatan Cikelet
27	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	81,75	81,75	81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	Kecamatan Cilawu
28	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	70,76	77,26	78,26	79,26	80,26	80,76	81,26	Kecamatan Cilawu
29	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,88	78,88	79	79,5	80	80,2	80,4	Kecamatan Cisewu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
30	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	52,17	77,6	78,6	79,6	80,6	81,1	81,6	Kecamatan Cisewu
31	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	80,24	80,56	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	Kecamatan Cisompet
32	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	74,76	77,55	78,55	79,55	80,55	81,05	81,55	Kecamatan Cisompet
33	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,95	82,95	83	83,2	83,4	83,6	83,8	Kecamatan Cisurupan
34	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	57,39	77,34	78,34	79,34	80,34	80,84	81,34	Kecamatan Cisurupan
35	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,34	82,34	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	Kecamatan Garut Kota
36	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	52,45	77,43	78,43	79,43	80,43	80,93	81,43	Kecamatan Garut Kota
37	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	83,75	83,75	83,9	84,1	84,3	84,5	84,7	Kecamatan Kadungora
38	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	60,35	77,29	78,29	79,29	80,29	80,79	81,29	Kecamatan Kadungora
39	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,09	82,09	82,1	82,3	82,4	82,6	82,8	Kecamatan Karangpawitan
40	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	51,56	77,55	78,55	79,55	80,55	81,05	81,55	Kecamatan Karangpawitan
41	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	81,86	81,86	82	82,2	82,4	82,6	82,8	Kecamatan Karangtengah
42	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	74,24	77,69	78,69	79,69	80,69	81,19	81,69	Kecamatan Karangtengah
43	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	81,36	81,36	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	Kecamatan Kersamanah
44	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	52,73	77,86	78,86	79,86	80,86	81,36	81,86	Kecamatan Kersamanah
45	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	83,39	83,39	84	84,2	84,4	84,6	84,8	Kecamatan Leles
46	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	78,61	78,61	79,61	80,61	81,61	82,11	82,61	Kecamatan Leles
47	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	80,94	80,94	81	81,2	81,4	81,6	81,8	Kecamatan Leuwigoong
48	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	60,77	77,26	78,26	79,26	80,26	80,76	81,26	Kecamatan Leuwigoong
49	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	83,85	83,85	84	84,2	84,4	84,6	84,8	Kecamatan Malangbong

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
50	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	81,63	81,63	82,63	83,63	84,63	85,13	85,63	Kecamatan Malangbong
51	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	77,19	77	78,5	79	79,5	80	80,5	Kecamatan Mekarmukti
52	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	60,24	77,28	78,28	79,28	80,28	80,78	81,28	Kecamatan Mekarmukti
53	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,11	78,11	78,5	79	79,5	80	80,5	Kecamatan Pakenjeng
54	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	67,66	77,83	78,83	79,83	80,83	81,33	81,83	Kecamatan Pakenjeng
55	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	77,36	77,36	77,5	78	78,5	79	79,5	Kecamatan Pameungpeuk
56	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	71,92	77,91	78,91	79,91	80,91	81,41	81,91	Kecamatan Pameungpeuk
57	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	79,86	79,86	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Pamulihan
58	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	56,93	77,4	78,4	79,4	80,4	80,9	81,4	Kecamatan Pamulihan
59	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,4	78,4	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Pangatikan
60	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	58,44	77,95	78,95	79,95	80,95	81,45	81,95	Kecamatan Pangatikan
61	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,93	82,93	83	83,2	83,4	83,6	83,8	Kecamatan Pasirwangi
62	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	76,26	77,6	78,6	79,6	80,6	81,1	81,6	Kecamatan Pasirwangi
63	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	77,57	77,57	78	78,5	79	79,5	80	Kecamatan Peundeuy
64	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	67,77	77,54	78,54	79,54	80,54	81,04	81,54	Kecamatan Peundeuy
65	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,67	78,67	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Samarang
66	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	54,54	77,91	78,91	79,91	80,91	81,41	81,91	Kecamatan Samarang
67	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,28	82,28	82,4	82,6	82,8	83	83,2	Kecamatan Selaawi
68	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	56,59	77,88	78,88	79,88	80,88	81,38	81,88	Kecamatan Selaawi
69	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,93	78,93	80	80,2	80,4	80,6	80,8	Kecamatan Singajaya

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
70	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	47,78	77,32	78,32	79,32	80,32	80,82	81,32	Kecamatan Singajaya
71	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	79,18	79,18	79,5	80	80,2	80,4	80,6	Kecamatan Sucinaraja
72	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	71,76	77,68	78,68	79,68	80,68	81,18	81,68	Kecamatan Sucinaraja
73	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	81,82	81,82	82	82,2	82,4	82,6	82,8	Kecamatan Sukaresmi
74	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	57,86	77,88	78,88	79,88	80,88	81,38	81,88	Kecamatan Sukaresmi
75	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,68	82,68	82,8	82,9	83	83,2	83,4	Kecamatan Sukawening
76	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	74,18	77,71	78,71	79,71	80,71	81,21	81,71	Kecamatan Sukawening
77	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	79,14	79,14	79,3	79,5	79,7	79,9	80	Kecamatan Talegong
78	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	57,94	78,18	79,18	80,18	81,18	81,68	82,18	Kecamatan Talegong
79	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	83,52	83,52	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	Kecamatan Tarogong Kaler
80	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	45,51	77,83	78,83	79,83	80,83	81,33	81,83	Kecamatan Tarogong Kaler
81	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	82,14	82,14	82,3	82,5	82,7	82,9	83	Kecamatan Tarogong Kidul
82	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	56,52	77,72	78,72	79,72	80,72	81,22	81,72	Kecamatan Tarogong Kidul
83	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	poin	78,98	78,98	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	Kecamatan Wanaraja
84	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	70,48	77,78	78,78	79,78	80,78	81,28	81,78	Kecamatan Wanaraja
BL	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	-	86,03	87,52	89,02	90,52	92,01	93,51	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	-	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
3	Indeks Kinerja Ormas	Poin	-	64	65	66	67	68	69	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
4	Indeks Kewaspadaan Nasional	Poin	-	72	73	74	75,5	77	78	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Sumber: Bappeda, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

*Keterangan: *Perhitungan Angka baseline Tahun 2024 belum memperhitungkan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur, dikarenakan ketidaktersediaan data*

***Data Kondisi 2024 dan Target 2025-2030 menggunakan data dan target Provinsi Jawa Barat (Indeks Kesejahteraan Sosial)*

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Dalam hal ini dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 Kabupaten Garut dijabarkan dengan berorientasi pada komitmen dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu Garut Hebat dan Berkelanjutan. Hal ini menggambarkan situasi atau kondisi dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 berkomitmen untuk menjadikan Garut menjadi Kabupaten yang Hebat dalam berbagai sektor, dengan mengusung 8 (delapan) misi pembangunan yaitu, (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing dan adaptif; (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif; (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan; (4) Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan; (5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif; (6) Mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan; (7) Mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang dan penanggulangan bencana; (8) Mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2030. Selanjutnya dokumen RPJMD ini menjadi pedoman dalam mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut untuk Tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029 serta Tahun 2030. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan menyesuaikan dengan perubahan atau dinamika yang terjadi.

Dalam implementasi visi, misi, dan program prioritas RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya. Oleh karena itu, perlu manajemen risiko untuk mencegahnya. Manajemen risiko mendukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen RPJMD ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan.

BUPATI GARUT

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

"Terwujudnya **Garut Hebat** dan Berkelanjutan."

BAPPEDA
GARUT

Jl. Patriot No. 8, Kelurahan Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151
Telp. (0262) 233063, Fax. (0262) 540321, email: bappeda@garutkab.go.id
website: bappeda.garutkab.go.id

Ikuti kanal media sosial resmi di bappedagarut